GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13 Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, Nom0r 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
17. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
25. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
29. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

(2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
i. BAB IX Penutup.

(4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2018-2023;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota;
c. dasar penyusunan RKPD; dan
d. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BAPPEDA.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 6

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW Provinsi, serta memperhatikan RTRW dan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi tetangga.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

(3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

(1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerahyang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/Urusan Pemerintahan dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap RPJMD ini.

Pasal 8

Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMN.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Maret 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : 1-74/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Sulawesi Selatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan RPJMN, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi tetangga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan setiap Tahun Anggaran dan Penyusunan Renstra PD. Selain itu menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 301

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4. Maksud dan Tujuan I-8
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Aspek Geografi II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografi II-3
2.1.2.1. Kondisi Topografi II-3
2.1.2.2. Kondisi Geologi II-4
2.1.2.3. Kondisi Hidrologi II-4
2.1.2.4. Kondisi Klimatologi II-4
2.1.2.5. Kondisi Penggunaan Lahan II-5
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-5
2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah II-10
2.1.4.1. Rencana Struktur Ruang II-12
2.1.4.2. Kawasan Strategis Provinsi II-14
2.1.4.3. Kawasan Andalan Provinsi II-16
2.1.4.4. Kawasan Kelautan dan Perikanan II-18
2.1.4.5. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan .. II-18
2.1.4.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata II-20
2.1.4.7. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas . II-21
2.1.4.8. Kawasan Peruntukan Industri II-23
2.1.4.9 Kawasan Peruntukan Perdangangan II-23
2.1.4.10 Potensi Energy Baru Terbaharukan (EBT) II-23
2.1.5. Aspek Demografi II-25
2.1.5.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk II-25
2.1.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-27

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat **II-32**
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi II-32
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB II-32
2.2.1.2. Laju Inflasi II-36
2.2.1.3. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB II-37
2.2.1.4. PDRB Perkapita II-37
2.2.1.5. Kontribusi Sektor Pertanian Terhdap PDRB II-39
2.2.1.6. Indeks Gini II-40
2.2.1.7. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar II-40
2.2.1.8. Indeks Ketimpangan Williamsom II-41
2.2.1.9. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan ... II-42
2.2.1.10 Persentase PAD Terhadap Pendapatan II-45
2.2.1.11 Opini Badan Pemeriksa Keuangan II-45

2.2.1.12 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB II-46
2.2.1.13 Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB..... II-46
2.2.1.14 PDRB Pertanian II-47
2.2.1.15 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB II-47
2.2.1.16 PDRB Perkebunan II-48
2.2.1.17 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB..... II-48
2.2.1.18 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB II-49
2.2.1.19 Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB..... II-49
2.2.1.20 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB II-50
2.2.1.21 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB..... II-51
2.2.1.22 Pertumbuhan PDRB Industri..... II-51
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-52
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... II-52
2.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH) II-55
2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah..... II-57
2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah II-59
2.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup II-60
2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-62
2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka II-63
2.2.2.8 Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja..... II-65
2.2.2.9 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja..... II-65
2.2.2.10 Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja..... II-66
2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga II-66

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-73
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II-73
2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan..... II-73
2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan..... II-86
2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-120
2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-139
2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-141
2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial..... II-143
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-148
2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja..... II-148
2.3.2.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi II-155
2.3.2.3. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-157
2.3.2.4. Bidang Urusan Penanaman Modal..... II-159
2.3.2.5. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-160
2.3.2.6. Bidang Urusan Statistik..... II-164
2.3.2.7. Bidang Urusan Persandian..... II-165
2.3.2.8. Bidang Urusan Kebudayaan..... II-165
2.3.2.9. Bidang Urusan Perpustakaan..... II-167
2.3.2.10. Bidang Urusan Kearsipan..... II-169
2.3.2.11. Bidang Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak II-170

2.3.2.12. Bidang Urusan Pangan II-178
2.3.2.13. Bidang Urusan Pertanahan II-183
2.3.2.14. Bidang Urusan Lingkungan Hidup II-183
2.3.2.15. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. II-191
2.3.2.16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-194
2.3.2.17. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-197
2.3.2.18. Perhubungan II-206
2.3.3. Fokus Layanan Pilihan II-216
2.3.3.1. Bidang Urusan Pariwisata II-216
2.3.3.2. Bidang Urusan Pertanian II-222
2.3.3.3. Bidang Urusan Kehutanan II-225
2.3.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral II-234
2.3.3.5. Bidang Urusan Perdagangan II-239
2.3.3.6. Bidang Urusan Perindustrian II-240
2.3.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi II-241
2.3.3.8. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan II-242
2.3.4. Fokus Layanan Penunjang II-250
2.3.3.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan II-250
2.3.3.2. Bidang Urusan Keuangan II-251
2.3.3.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan II-254
2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan II-258
2.3.3.5. Pengawasan II-259
2.3.3.6. Sekertariat Dewan II-261

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-262
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi II-262
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita II-262
2.4.1.2. Pengeluaran Perkapita/Tahun II-263
2.4.1.3. Nilai Tukar Petani II-264
2.4.1.4. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita II-264
2.4.1.5. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa II-265
2.4.1.6. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB II-265
2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-267
2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB/SDGs II-271

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Daerah III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.1.1 Pendapatan Daerah III-1
3.1.1.2 Belanja Daerah III-7
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah III-9
3.1.2 Neraca Daerah III-10
3.1.2.1 Asset Daerah III-12
3.1.2.2 Kewajiban III-12
3.1.2.3 Ekuitas Dana III-12
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah III-12
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah : Intensifikasi dan Ekstenfikasi PAD III-13
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah : Proporsi Penggunaan Anggaran III-14
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah III-15

3.3. Analisis Keuangan Daerah III-18
3.3.1 Analisis Fiskal Daerah III-18
3.3.2 Analisis Share APBD Terhadap Nilai PDRB III-26
3.3.3 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) III-28
3.4. Kerangka Pendanaan III-29
3.4.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal III-29
3.4.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III-31
3.5. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya III-37
3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-37
3.5.2 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah III-38

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan pembangunan IV-1
4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.1.2 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan IV-18
4.2 Isu Strategis Global IV-29
4.2.1 Isu Strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-29
4.2.2 Perubahan Iklim IV-35
4.2.3 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) IV-36
4.2.4 Bonus Demografi IV-37
4.3 Isu Strategis Nasional IV-38
4.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah IV-39
4.5 Sinkronisasi RPJMD daerah Lainnya dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan IV-43

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-2
5.3 Tujuan Dan Sasaran V-3
5.4 Keterkaitan Visi/Misi RPJPN dan RPJMD V-9
5.5 Keterkaitan Rancangan RPJMN Teknokratik 2020-2014 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 ..... V-11
5.6 Keterkaitan Target Kinerja RPJPD dan RPJMD V-15
5.7 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah V-18

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategis VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-16
6.3 Pembangunan Berbasis Pengwilayahaan Komoditi VI-26
6.3.1. Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan VI-27
6.3.2. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. VI-34
6.4 Integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan VI-42
6.5 Prioritas Pembangunan Daerah VI-44
6.5.1. Analisis Pertumbuhan Inklusif Di Sulawesi Selatan VI-45
6.5.2. Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan VI-46
6.5.3. Ketimpangan distribusi pendapatan VI-46
6.5.4. Kondisi Ketenaga Kerjaan VI-48
6.5.5. Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesepakatan Kerja VI-49

6.5.6. Pertumbuhan yang Iklusif (RPJMD 2018-2023) VI-50
6.6 Kebijakan Pembangunan Inklusif di Sulawesi Selatan VI-51
6.6.1. Gambaran Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pemerataan Pembangunan di Sulawesi Selatan VI-52
6.6.2. Menuju Pertumbuhan yang Iklusif Sulawesi Selatan Tahun 2023 ..... VI-57
6.7 Program Pembangunan Daerah VI-59

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1
7.1.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal VII-1
7.1.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah VII-3
7.1.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan VII-8
7.2 Program Perangkat Daerah VII-12

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN VIII-1
8.1 Pendapatan Indikator Kinerja Daerah VIII-1
8.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-1
8.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) VIII-4

BAB IX PENUTUP IX-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Jenis Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan 2017	II-6
Tabel 2.3	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	II-8
Tabel 2.4	Sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi di Sulawesi Selatan	II-10
Tabel 2.5	Indikator Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2017	II-26
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	II-26
Tabel 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan dan Air Provinsi Sulawesi Selatan	II-28
Tabel 2.8	Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	II-30
Tabel 2.9	Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air Provinsi Sulawesi Selatan	II-31
Tabel 2.10	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017	II-33
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017	II-32
Tabel 2.12	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.13	Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.14	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017	II-38
Tabel 2.16	Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017	II-38
Tabel 2.17	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.18	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.19	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	II-41
Tabel 2.20	Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	II-42

Tabel 2.21 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-42
Tabel 2.22 Persebaran Kepemilikan Rumah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2015 ..... II-43
Tabel 2.23 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-44
Tabel 2.24 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-44
Tabel 2.25 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-45
Tabel 2.26 Opini BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-46
Tabel 2.27 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-46
Tabel 2.28 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-47
Tabel 2.29 PDRB Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-47
Tabel 2.30 Kontribusi Sektor Perkebunan (TanamanKeras) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-48
Tabel 2.31 PDRB Perkebunan PDRB Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-48
Tabel 2.32 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-49
Tabel 2.33 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-49
Tabel 2.34 Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-50
Tabel 2.35 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-50
Tabel 2.36 Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-51
Tabel 2.37 Pertumbuhan PDRB Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-52
Tabel 2.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-52
Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 ..... II-53
Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-53
Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 ..... II-54
Table 2.42 Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2017 ..... II-56

Tabel 2.43 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-57
Tabel 2.44 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-57
Tabel 2.45 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 ..... II-58
Tabel 2.46 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-59
Tabel 2.47 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 ..... II-59
Tabel 2.48 Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulaatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-61
Tabel 2.49 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin 2017 ..... II-61
Tabel 2.50 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-63
Tabel 2.51 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-64
Tabel 2.52 Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-65
Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-66
Tabel 2.54 Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-66
Tabel 2.55 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-67
Tabel 2.56 Persentase Wirausaha Muda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-67
Tabel 2.57 Cakupan Pembinaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-68
Tabel 2.58 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-68
Tabel 2.59 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-69
Tabel 2.60 Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-70
Tabel 2.61 Jumlah Prestasi Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-70
Tabel 2.62 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-71
Tabel 2.63 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-72

Tabel 2.64 Karya Budaya yang direvitalitasi dan Inventarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-73
Tabel 2.65 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-73
Tabel 2.66 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017 ..... II-74
Tabel 2.67 Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-75
Tabel 2.68 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017 ..... II-76
Tabel 2.69 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-77
Tabel 2.70 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017 ..... II-78
Tabel 2.71 Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-80
Tabel 2.72 Angka Putus Sekolah (APtS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017 ..... II-80
Tabel 2.73 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-81
Tabel 2.74 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-82
Tabel 2.75 Angka Melanjutkan (AM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017 ..... II-82
Tabel 2.76 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-84
Tabel 2.77 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-84
Tabel 2.78 Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-85
Tabel 2.79 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-85
Tabel 2.80 Kualifikasi Guru S1/D-IV Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-86
Tabel 2.81 Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-87
Tabel 2.82 Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-87
Tabel 2.83 Angka Kematian Neonatal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-88
Tabel 2.84 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-89

Tabel 2.85 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-90
Tabel 2.86 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-90
Tabel 2.87 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-91
Tabel 2.88 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-92
Tabel 2.89 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-93
Tabel 2.90 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-95
Tabel 2.91 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-96
Tabel 2.92 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-97
Tabel 2.93 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-98
Tabel 2.94 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-98
Tabel 2.95 Non Polio AFP Rate Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-99
Tabel 2.96 Cakupan Balita Pneumonia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-100
Tabel 2.97 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-100
Tabel 2.98 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-101
Tabel 2.99 Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-102
Tabel 2.100 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-102
Tabel 2.101 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-103
Tabel 2.102 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-104
Tabel 2.103 Penderita Diare yang Ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-105
Tabel 2.104 Angka Kejadian Malaria Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-106
Tabel 2.105 Pendertia Malaria yang Diobati dengan ACT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-106

Tabel 2.106 Pendertia Malaria yang Diobati dengan ACT Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-106
Tabel 2.107 Prevalensi HIV/AIDS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-107
Tabel 2.108 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-108
Tabel 2.109 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-109
Tabel 2.110 Kunjungan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... II-110
Tabel 2.111 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-112
Tabel 2.112 Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-113
Tabel 2.113 Cakupan Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-113
Tabel 2.114 Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-113
Tabel 2.115 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-114
Tabel 2.116 Cakupan Pelayanan Nifas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-115
Tabel 2.117 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-117
Tabel 2.118 Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-118
Tabel 2.119 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-117
Tabel 2.120 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-118
Tabel 2.121 Prevalensi Balita Gizi kurang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-119
Tabel 2.122 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-119
Tabel 2.123 Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-120
Tabel 2.124 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-121
Tabel 2.125 Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-122
Tabel 2.126 Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-122

Tabel 2.127 Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-123
Tabel 2.128 Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-123
Tabel 2.129 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... II-124
Tabel 2.130 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-125
Tabel 2.131 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-125
Tabel 2.132 Rasio Jaringan Irigasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-126
Tabel 2.133 Total Daerah Irigasi (DI) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-126
Tabel 2.134 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-127
Tabel 2.135 Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-127
Tabel 2.136 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan II-128
Tabel 2.137 Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-129
Tabel 2.138 Proporsi Penduduk Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... II-130
Tabel 2.139 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan II-130
Tabel 2.140 Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-131
Tabel 2.141 Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-132
Tabel 2.142 Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan II-132
Tabel 2.143 Sampah Perkotaan yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-134
Tabel 2.144 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-135
Tabel 2.145 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-135

Tabel 2.146 Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-136
Tabel 2.147 Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-136
Tabel 2.148 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-138
Tabel 2.149 Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-138
Tabel 2.150 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-138
Tabel 2.151 Ketaatan terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-139
Tabel 2.152 Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-139
Tabel 2.153 Lingkungan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-139
Tabel 2.154 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-140
Tabel 2.155 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-140
Tabel 2.156 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-141
Tabel 2.157 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-142
Tabel 2.158 Persentase Penegakan PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-142
Tabel 2.159 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-143
Tabel 2.160 Persentase PMKS yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-144
Tabel 2.161 Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-144
Tabel 2.162 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-145
Tabel 2.163 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-146
Tabel 2.164 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-147
Tabel 2.165 Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-148
Tabel 2.166 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-149

Tabel 2.167 Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-149
Tabel 2.168 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-150
Tabel 2.169 Keselamatan dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-150
Tabel 2.170 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-151
Tabel 2.171 Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-152
Tabel 2.172 Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-152
Tabel 2.173 Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-153
Tabel 2.174 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-153
Tabel 2.175 Besaran Pemeriksaan Perusahaaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-153
Tabel 2.176 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-154
Tabel 2.177 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-155
Tabel 2.178 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-156
Tabel 2.179 Cakupan Layanan Telekomunikasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-156
Tabel 2.180 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-156
Tabel 2.181 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-156
Tabel 2.182 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-157
Tabel 2.183 Presentase Koperasi Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-157
Tabel 2.184 Pengembangan Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-158
Tabel 2.185 Presentase Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-159
Tabel 2.186 Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-159

Tabel 2.187 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-159
Tabel 2.188 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-160
Tabel 2.189 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-160
Tabel 2.190 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-161
Tabel 2.191 Persentase Wira Usaha Muda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-161
Tabel 2.192 Cakupan Pembinaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-161
Tabel 2.193 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-162
Tabel 2.194 Cakupan Pembiaan Atlet Muda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-162
Tabel 2.195 Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-163
Tabel 2.196 Jumlah Prestasi Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-164
Tabel 2.197 Data dan Statistik yang Terintegritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-164
Tabel 2.198 Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-164
Tabel 2.199 Ketersediaan Buku PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-164
Tabel 2.200 Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-165
Tabel 2.201 Penyelangaraan Festival Seni dan Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-166
Tabel 2.202 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Di lestarikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-167
Tabel 2.203 Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-167
Tabel 2.204 Pengunjung Perpustakaan Per tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-167
Tabel 2.205 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-168
Tabel 2.206 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-168
Tabel 2.207 Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-168
Tabel 2.208 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-169
Tabel 2.209 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-169

Tabel 2.210 Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-169
Tabel 2.211 Peningkatan SDM Pengelolah Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-170
Tabel 2.212 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-170
Tabel 2.213 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-171
Tabel 2.214 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-171
Tabel 2.215 Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-172
Tabel 2.216 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-173
Tabel 2.217 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-173
Tabel 2.218 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-174
Tabel 2.219 Layanan Rehabilitas Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-175
Tabel 2.220 Cakupan Penegakan Hukum Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-175
Tabel 2.221 Cakupan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-176
Tabel 2.222 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-176
Tabel 2.223 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-177
Tabel 2.224 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-177
Tabel 2.225 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-177
Tabel 2.226 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-178
Tabel 2.227 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-178
Tabel 2.228 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-179
Tabel 2.229 Ketersediaan Pangan Utama (Jagung) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-179
Tabel 2.230 Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-179

Tabel 2.231 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-180
Tabel 2.232 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-181
Tabel 2.233 Sebaran Kerawanaan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... II-182
Tabel 2.234 Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-183
Tabel 2.235 Tersusunnya RPPLH Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-183
Tabel 2.236 Integrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-184
Tabel 2.237 Ketersediaan Dokumen KLHS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-184
Tabel 2.238 Penyelenggaraan KLHS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-184
Tabel 2.239 Indeks Kualitas Air Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-185
Tabel 2.240 Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-186
Tabel 2.241 Indeks Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-186
Tabel 2.242 Ketersediaan Inventarisasi GRK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-187
Tabel 2.243 Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-187
Tabel 2.244 Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-188
Tabel 2.245 Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-188
Tabel 2.246 Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-189
Tabel 2.247 Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-190
Tabel 2.248 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-190
Tabel 2.249 Persentase Penanganan Sampah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-191
Tabel 2.250 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-191
Tabel 2.251 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-192
Tabel 2.252 Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-192

Tabel 2.253 Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-192
Tabel 2.254 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-193
Tabel 2.255 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-193
Tabel 2.256 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-193
Tabel 2.257 Penerbitan Akta Kelahiran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-194
Tabel 2.258 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-194
Tabel 2.259 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-195
Tabel 2.260 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-195
Tabel 2.261 Persentase LPM Berprestasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-196
Tabel 2.262 Persentase PKK Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-196
Tabel 2.263 Jumlah Posyandu Aktif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-197
Tabel 2.264 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-197
Tabel 2.265 Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-198
Tabel 2.266 Peran Aktif Perangkat Daerah Melalui Kampung KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-198
Tabel 2.267 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-199
Tabel 2.268 Ratio Akseptor KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-199
Tabel 2.269 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-199
Tabel 2.270 Cakupan PUS Unmet Need Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-200
Tabel 2.271 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-200
Tabel 2.272 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-201
Tabel 2.273 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-201
Tabel 2.274 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-201

Tabel 2.275 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-202
Tabel 2.276 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-202
Tabel 2.277 Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-203
Tabel 2.278 Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-203
Tabel 2.279 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-203
Tabel 2.280 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-204
Tabel 2.281 Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-204
Tabel 2.282 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-205
Tabel 2.283 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-205
Tabel 2.284 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-205
Tabel 2.285 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-206
Tabel 2.286 Jumlah Arus Penumpang, AKAP dan AKDP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 ..... II-206
Tabel 2.287 Rasio Ijin Trayek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-207
Tabel 2.288 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-207
Tabel 2.289 Hierarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota II-208
Tabel 2.290 Jumlah Halte Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-211
Tabel 2.291 Persentase Layanan Angkutan Darat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-212
Tabel 2.292 Pemasangan Rambu-Rambu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-212
Tabel 2.293 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-213
Tabel 2.294 Kinerja Pelayanan Kapal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-214

Tabel 2.295 Jumlah Orang/Barang Terangkut Angkutan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-216
Tabel 2.296 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-216
Tabel 2.297 Kunjungan Wisatawan Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-217
Tabel 2.298 Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-217
Tabel 2.299 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-218
Tabel 2.300 Target dan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-218
Tabel 2.301 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 Berdasar Pintu Masuk II-219
Tabel 2.302 Lama Kunjungan Wisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-221
Tabel 2.303 PAD Sektor Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-221
Tabel 2.304 Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Sulawesi Selatan II-222
Tabel 2.305 Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-223
Tabel 2.306 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-224
Tabel 2.307 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-224
Tabel 2.308 Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-224
Tabel 2.309 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-225
Tabel 2.310 Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-225
Tabel 2.311 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-226
Tabel 2.312 Produktivitas Hasil Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-226
Tabel 2.313 Populasi Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-227
Tabel 2.314 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-228

Tabel 2.315 Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-228
Tabel 2.316 Produktivitas Hasil Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-229
Tabel 2.317 Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-229
Tabel 2.318 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-230
Tabel 2.319 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-231
Tabel 2.320 Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-233
Tabel 2.321 Rasio Desa Berlistrik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-235
Tabel 2.322 Jumlah Rasio Energi Terbangun Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-236
Tabel 2.323 Cadangan Sumberdaya Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-238
Tabel 2.324 Jumlah Pembangunan Sumur Bor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-238
Tabel 2.325 Jumlah Produksi Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-238
Tabel 2.326 Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-239
Tabel 2.327 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-240
Tabel 2.328 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-241
Tabel 2.329 Pertumbuhan Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-241
Tabel 2.330 Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-241
Tabel 2.331 Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-241
Tabel 2.332 Persentase Transmigran Swakarsa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-242
Tabel 2.333 Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-242
Tabel 2.334 Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-243
Tabel 2.335 Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-245
Tabel 2.336 Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-246
Tabel 2.337 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-246

Tabel 2.338 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-247
Tabel 2.339 Proporsi Tangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-248
Tabel 2.340 Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-248
Tabel 2.341 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-249
Tabel 2.342 Ketersediaan Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-250
Tabel 2.343 Ketersediaan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-250
Tabel 2.344 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-251
Tabel 2.345 Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-251
Tabel 2.346 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-252
Tabel 2.347 Persentase SILPA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-252
Tabel 2.348 Persentase Belanja Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-252
Tabel 2.349 Persentase Belanja Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-253
Tabel 2.350 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017..... II-253
Tabel 2.351 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-253
Tabel 2.352 Penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-254
Tabel 2.353 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-254
Tabel 2.354 Pendidikan Dan Pelatihan Formal ASN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-254
Tabel 2.355 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-255
Tabel 2.356 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-256
Tabel 2.357 Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-256
Tabel 2.358 Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-257
Tabel 2.359 Pengalihan PNS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-257

Tabel 2.360 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-258
Tabel 2.361 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-258
Tabel 2.362 Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-258
Tabel 2.363 PenerapancKebijakan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-259
Tabel 2.364 Persentase Tindak Lanjut Temuan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-259
Tabel 2.365 Persentase pelanggaran pegawai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-260
Tabel 2.366 Jumlah Temuan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-261
Tabel 2.367 Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-261
Tabel 2.368 Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMDdan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-262
Tabel 2.369 Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-262
Tabel 2.370 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-263
Tabel 2.371 Pengeluaran Perkapita/Tahun Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017 ..... II-263
Tabel 2.372 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-264
Tabel 2.373 Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-264
Tabel 2.374 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-265
Tabel 2.375 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017..... II-265
Tabel 2.376 Nilai dan Berat Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2017..... II-266
Tabel 2.377 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-267
Tabel 2.378 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017..... II-267
Tabel 2.379 Capaian Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... II-273

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan..... III-6

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014-2018 ..... III-10
Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan III-14
Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan III-15
Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan III-16
Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan III-17
Tabel 3.7 Rasio Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 ..... III-19
Tabel 3.8 Ruang Fiskal Daerah III-21
Tabel 3.9 tax rasio pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 ..... III-22
Tabel 3.10 Rasio Belanja Pegawai III-23
Tabel 3.11 Rasio Belanja Modal III-24
Tabel 3.12 Rasio Belanja Daerah Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan III-25
Tabel 3.13 Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 ..... III-26
Tabel 3.14 Krontribusi Terhadap PDRB Pada Komponen Konsumsi Pemerintahan Tahun 2014-2018 ..... III-27
Tabel 3.15 Krontribusi Terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Tahun 2014-2018 ..... III-27
Tabel 3.16 Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... III-28
Tabel 3.17 Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... III-28
Tabel 3.18 Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 ..... III-29
Tabel 3.19 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ..... III-30
Tabel 3.20 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2019-2023 ..... III-31
Tabel 3.21 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 - 2023 ..... III-32
Tabel 3.22 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... III-36
Tabel 3.23 Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014–2018 ..... III-37

Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan “Infrastruktur masih kurang memadai” IV-5
Tabel 4.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017 ..... IV-8

Tabel 4.3 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017 ..... IV-9
Tabel 4.4 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017 ..... IV-10
Tabel 4.5 Perbandingan Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Sulawesi Selatan dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016 ..... IV-10
Tabel 4.6 Rumusan Permasalahan "Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia" IV-11
Tabel 4.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2017 ..... IV-13
Tabel 4.8 Rumusan Permasalahan "kesenjangan sosial masih tinggi" IV-14
Tabel 4.9 Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB (%) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017 ..... IV-16
Tabel 4.10 PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017 ..... IV-17
Tabel 4.11 Rumusan Permasalahan "Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang masih rendah" IV-17
Tabel 4.12 Kategori A Berdasarkan Tujuan TPB IV-30
Tabel 4.13 Kategori B Berdasarkan Tujuan TPB IV-32
Tabel 4.14 Kategori C Berdasarkan Tujuan TPB IV-33
Tabel 4.15 Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan IV-44

Tabel 5.1 Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 ..... V-1
Tabel 5.2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD V-2
Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter V-5
Tabel 5.4 Kawasan Strategis dan Sektor Unggulan Perencanaan Pembangunan Nasional Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 ..... V-13
Tabel 5.5 Keterkaitan dokumen RPJMD Sulawesi Selatan terhadap Rancangan RPJMN Teknokratis 2020-2024 ..... V-14
Tabel 5.6 Keterkaitan Misi RPJPD terhadap RPJMD V-17
Tabel 5.7 Indiaktor Pembangunan Inclusif V-18
Tabel 5.8 Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan V-19

Tabel 6.1 Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017 Menurut Kabupaten/Kota VI-2
Tabel 6.2 Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... VI-5

Tabel 6.3 Rasio Sarana Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... VI-8
Tabel 6.4 Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... VI-8
Tabel 6.5 Rasio Pelayanan Kesehatan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 ..... VI-9
Tabel 6.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan VI-14
Tabel 6.7 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan VI-17
Tabel 6.8 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023 ..... VI-21
Tabel 6.9 Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017 Menurut Kabupaten/Kota VI-27
Tabel 6.10 Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2017 ..... VI-31
Tabel 6.11 Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya Tahun 2017 ..... VI-31
Tabel 6.12 Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya Tahun 2017 ..... VI-32
Tabel 6.13 Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya Tahun 2017 ..... VI-33
Tabel 6.14 Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya Tahun 2017 ..... VI-33
Tabel 6.15 Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2023 ..... VI-36
Tabel 6.16 Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya Tahun 2023 ..... VI-37
Tabel 6.17 Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya Tahun 2023 ..... VI-38
Tabel 6.18 Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya Tahun 2023 ..... VI-39
Tabel 6.19 Sasaran Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya Tahun 2023 ..... VI-41
Tabel 6.20 Integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan VI-42
Tabel 6.21 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Sulawesi Selatan VI-60

Tabel 7.1 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial ProvinsiSulawesi SelatanTahun 2018-2023 ..... VII-2
Tabel 7.2 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018-2023 ..... VII-3
Tabel 7.3 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 – 2023 ..... VII-5
Tabel 7.4 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerahuntuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 ..... VII-9

Tabel 7.5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018-2023 ..... VII-11
Tabel 7.6 Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif Program RPJMD VII-14

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ..... VIII-5
Tabel 8.3 Penetapan Target Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ..... VIII-54
Tabel 8.4 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ..... VIII-59

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada Tahun 2018 telah menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada Selanjutnya Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerahserta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, maka Pemerintah Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen perencanaan lainnya untuk menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan dilantiknya **Prof.H.M.Nurdin Abdullah** sebagai **Gubernur Sulawesi Selatan** dan **Andi Sudirman Sulaiman,ST** sebagai **Wakil Gubernur Sulawesi Selatan** pada tanggal 5 September 2018, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang disusun merupakan dokumen perencanaan 5 tahun periode kepemimpinan kepala daerah terpilih yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan stakeholder serta para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketigaperiode Tahun 2019-2023 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ketiga dengan memprioritaskan loncatan dalam perekonomian, khususnya dalam capaian PDRB perkapita, yang dengan itu capaian berbagai aspek pembangunan lainnya diharapkan memposisikan Sulawesi Selatan sebagai pilar pembangunan nasional dan simpul jejaring dalam dinamika perubahan kawasan timur Indonesia atau bahkan luarJawa.

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 459);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028. Sementara itu dokumen RPJMD dan dokumen RKPD ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan periode pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMD. Selain berpedoman pada RPJPD, dalam penyusunannya RPJMD juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga pencapaian visi misi pembangunan daerah. RPJMD kemudian dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun.

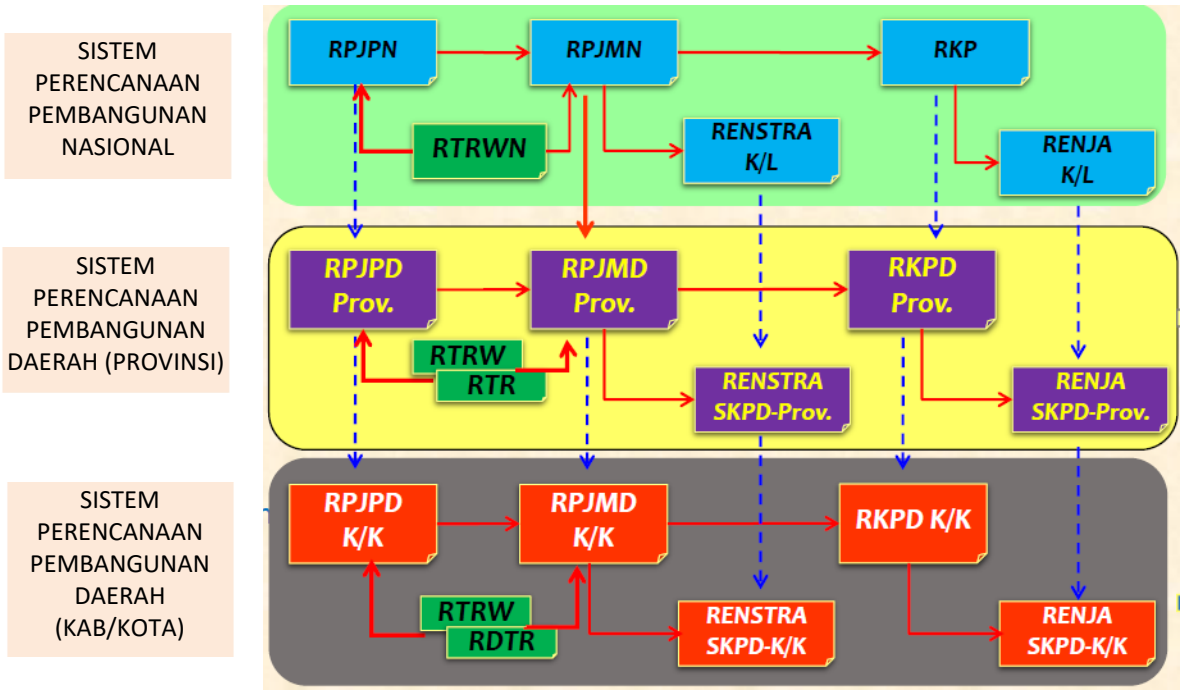
Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berkenaan.

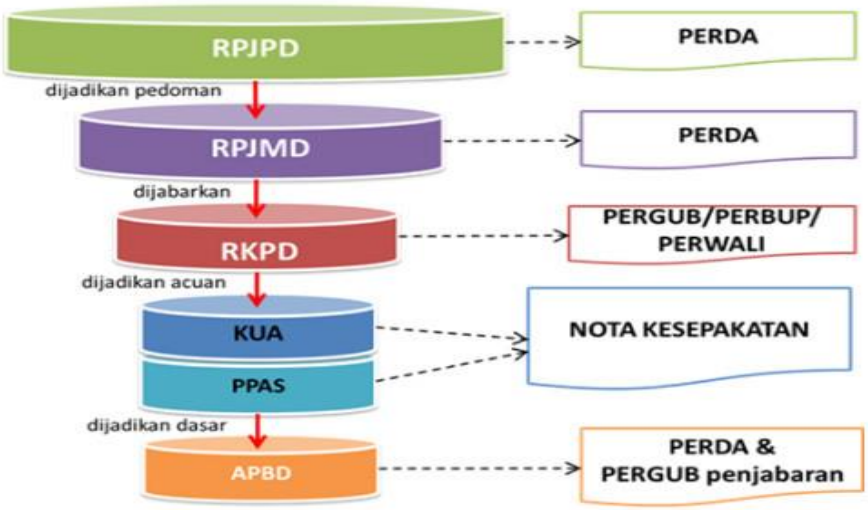
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Waki Gubernur terpilih yang memuat sasaran dan strategis pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.Selanjutnya sebagai dokumen rencana strategis perangkat daerah 5 (lima) tahunan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagai penjabaran rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar I.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan





Penyusunan dokumen perencanaan sesuai bagan alur diatas menunjukkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas kepala daerah. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setiap tahun yang juga memuat kebijakan baru terkait dinamika pembangunan khususnya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalamRencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan. Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dengan berpedoman pada RENSTRA-PD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun masa pemerintahanGubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dokumen RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan melalui penetapan program serta kegiatan prioritas daerah.

RPJMD menjadi tolak ukur pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur diukur dari pencapaian target RPJMD. Seluruh program prioritas selama lima tahun yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA PD.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode masa pemerintahan tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam dokumen RENSTRA PD.
3. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
6. Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program strategis pemerintah provinsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.
7. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Adapun sistematika secara lengkap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Kinerja Masa Lalu
- 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
- 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
- 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
- 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
- 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PRGORAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan dengan wilayah dan batas-batasnya yang ditetapkan dengan UU 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan wewenang pemerintah daerah. Menurut UUD 1945 amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia.

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 46.083,94 km persegi dan secara administratif terbagi 21 wilayah kabupaten, dan tiga wilayah kota. Terdiri dari 306 kecamatan dan 3.030 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 2.240 desa, 783 kelurahan. Kabupaten/Kota dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.365,51 km persegi, Kabupaten Luwu Timur sekitar 7.315,77 km persegi dan Kabupaten Bone sekitar 4.593,38 km persegi, sedangkan Kota Parepare merupakan kota dengan wilayah terkecil yaitu seluas 88,92 km persegi.

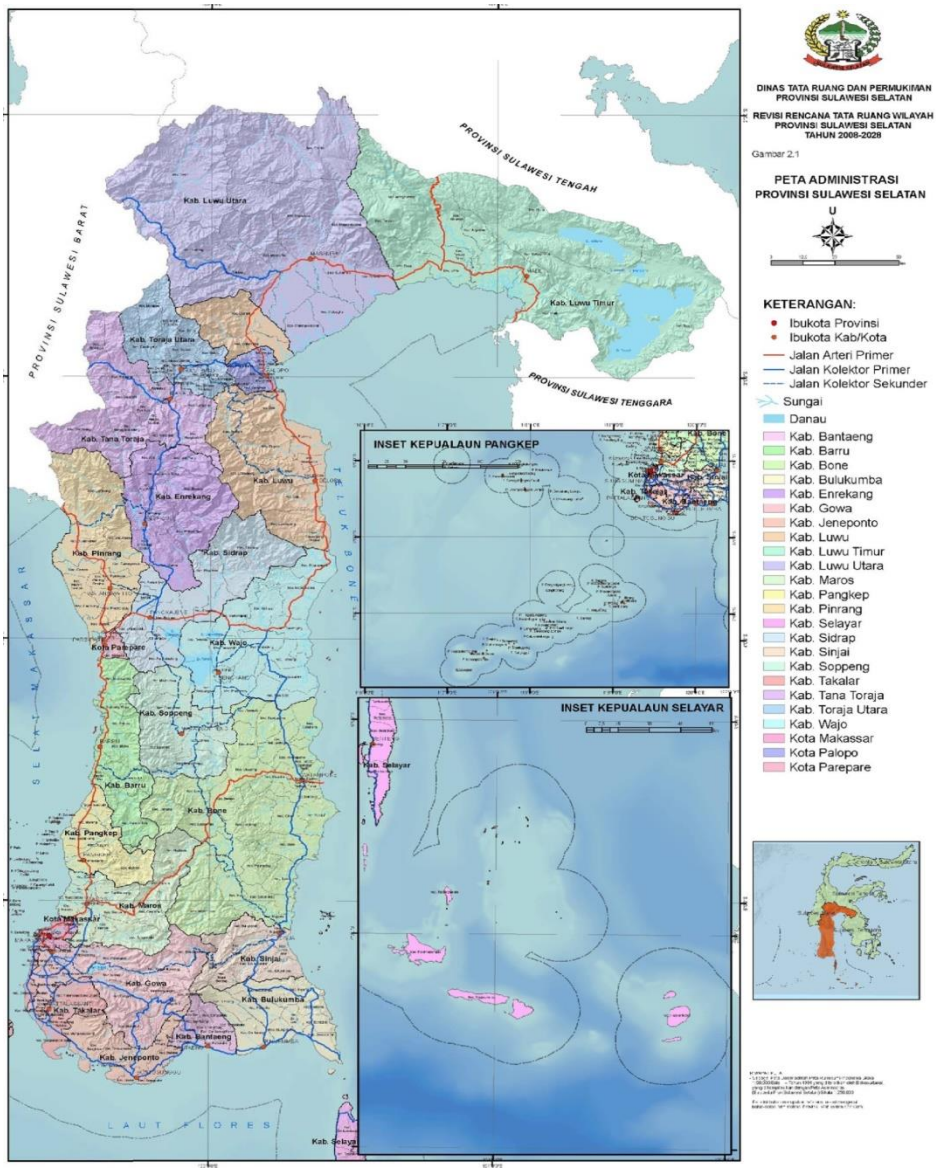
Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0 12'- 8 lintang selatan dan 116'48 - 122' 36' Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar dan Pulau Kalimantan

Posisi geografis tersebut secara tidak langsung mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah perdagangan dan jasa yang secara posisi memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, karena Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Posisi strategis geografis Sulawesi Selatan ini sebagai hub distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia menjadi salah satu nilai lebih yang harus mampu dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Poros maritim Indonesia seyogyanya itu bertumpu di Makassar, apalagi infrastruktur kemaritiman dengan hadirnya *New Port of Makassar* dan kebijakan *direct call* seharusnya mejadi modal dasar untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai *center point* of Indonesia.

Gambar II.1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel II.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kode	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km^2)	Jumlah Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Selayar	1.357,03	11	88	135.809
2	Bulukumba	1.284,63	10	136	432.141
3	Bantaeng	395,83	8	67	196.358
4	Jeneponto	706,52	11	113	409.693
5	Takalar	566,61	9	100	286.390
6	Gowa	1.883,32	18	167	752.896
7	Sinjai	798,96	9	80	255.853
8	Maros	1.619,12	14	103	397.937
9	Pangkep	1.132,08	13	103	361.636
10	Barru	1.174,71	7	55	173.683
11	Bone	4.559,00	27	372	866.245
12	Soppeng	1.557,00	8	70	249.768
13	Wajo	2.504,06	14	190	460.719
14	Sidenreng Rapppang	1.883,23	11	106	310.493
15	Pinrang	1.961,67	12	108	411.837
16	Enrekang	1.784,93	12	129	239.707
17	Luwu	3.343,97	22	227	375.535
18	Tana Toraja	1.990,22	19	159	283.214
19	Luwu Utara	7.502,58	15	173	364.828
20	Luwu Timur	6.944,88	11	127	294.383
21	Toraja Utara	1.215,55	21	151	239.558
22	Makassar	199,26	15	153	1.663.479
23	Pare Pare	99,33	4	22	177.651
24	Palopo	252,99	9	48	182.690
Sulawesi Selatan		**46.717.48**	**307**	**3.047**	**9.522.503**

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan hasil Pemekaran Luwu Utara pada tahun 2018 dari 12 Kecamatan menjadi 15

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' -122°36' Bujur Timur. Secara geografis mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat Gunung Bawakaraeng di selatan,serta Gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan Timur.

2.1.2.1. Kondisi Topografi

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen

merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL.

2.1.2.2. Kondisi Geologi

Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam Provinsi Busur Volkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara.Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-volkanik berumur Paleogen-Kuarter serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST.Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981).

Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobattang (Gowa).

2.1.2.3. Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 23 aliran sungai. Sungai terpanjang di Sulawesi Selatan adalah Sungai Saddang yang daerah alirannya meliputi Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang, dengan panjang sungai sekitar 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta Danau Matano dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

2.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan digital Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2010 rata-rata suhu udara 27,4 C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 C dan suhu minimum 24,0 C. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun.

Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun.Wilayah tipe terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi kab.Tana toraja, Luwu utara, Luwu timur.Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba dan Bantaeng, tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun.Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi kabupaten Wajo, Luwu dan Tana toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar.

2.1.2.5. Kondisi Penutupan Lahan

Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Dalam Angka Tahun 2018 adalah 46.083,94 km^2. Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi. Dari total luasan tersebut 2.566.937,69 Ha merupakan kawasan hutan dan perairan yang terbagi atas; Hutan Lindung seluas 1.221.559 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 503.815,10 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 111.990,81 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 25.490,66 Ha, dan Taman Buru seluas 4.014,75 Ha.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena terjadinya proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan dan juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah yang biasanya terjadi di kawasan perkotaan. Berdasarkan data tahun 2012, luas wilayah genangan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 5.154 Km^2 atau sekitar 20% dari luas kawasan budidaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya merupakan kawasan sentra produksi pertanian. Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan di wilayah Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkejene Kepulauan, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pinrang, Luwu, dan Luwu Timur.

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh kegempaan. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya yang berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di kabupaten Pinrang, kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan peta gerakan tanah Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh zona kerentanan gerakan tanah rendah dan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa bencana gerakan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah DAS dan pegunungan yang rentan akan bencana longsor. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wilayah yang rawan bencana gerakan tanah adalah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Luwu Timur.

Tabel II.2
Jumlah Jenis Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Bencana Tahun 2017	
		Jenis Kejadian	Jumlah Kejadian
1	Kota Makassar	Banjir	8
		Angin putting beliung	1
		Angin kencang	2
		Kebakaran pemukiman	14
2	Kota Pare-pare	Banjir	3
		Korban tenggelam	2
3	Kota Palopo	Banjir	1
4	Barru	Banjir	1
		Angin putting beliung	1
		Kebakaran permukiman	2
		Korban tenggelam	1
5	Soppeng	Banjir	8
		Angin Kencang	2
		Kebakaran Permukiman	2
6	Wajo	Banjir	11
		Angin putting beliung	2
		Kebakaran permukiman	4
7	Sidrap	Banjir	3
		Angin putting beliung	1
		Kebakaran permukiman	2
8	Enrekang	-	-
9	Pinrang	Banjir	7
		Tanah longsor	1
		Angin putting beliung	1
		Angin kencang	1
		Kebakaran permukiman	3
10	Toraja Utara	Tanah longsor	1
		Angin putting beliung	1
11	Tana Toraja	Tanah longsor	3
12	Luwu	Banjir	14
		Tanah lonsor	6
13	Luwu Utara	Banjir	6

No	Kabupaten/Kota	Bencana Tahun 2017	
		Jenis Kejadian	Jumlah Kejadian
		Tanah longsor	2
		Angin putting beliung	1
		Abrasi pantai	1
		Kebakaran permukiman	1
14	Luwu Timur	Tanah longsor	3
		Kebakaran permukiman	1
		Korban tenggelam	1
15	Gowa	Banjir	1
		Angin putting beliung	1
		Angin kencang	41
16	Takalar	Banjir	2
		Abrasi pantai	7
17	Bantaeng	Angin putting beliung	6
18	Bulukumba	-	-
19	Sinjai	Tanah longsor	2
		Angin putting beliung	2
		Kebakaran permukiman	1
20	Bone	Angin kencang	4
		Kebakaran permukiman	26
21	Maros	Banjir	12
		Angin kencang	1
22	Pangkep	Banjir	2
		Tanah longsor	1
		Angin putting beliung	3
23	Jeneponto	Banjir	1
		Angin putting beliung	2
24	Selayar	Gelombang pasang	NA
		Banjir	NA
		Tanah longsor	NA
		Abrasi pantai	NA
Sulawesi Selatan			**230**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah kejadian bencana sebanyak 230 kejadian, jenis kejadian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh pada tingkat bencana banjir dan kebakaran Permukiman. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan itu perlu melalukan kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali

perkembangan kegiatan perekonomian, social, dan budaya suatu wilayah yang terdampak bencana.

Penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana disyaratkan untuk mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel II.3
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir Angin Puting Beliung Kebakaran	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
2	Kota Pare-pare	Banjir Longsor Kebakaran	Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Cappa Galung, dan Kelurahan Ujung Sabbang
3	Kota Palopo	Banjir Tanah longsor Gelombang pasang Abrasi kebakaran	Kelurahan Maroangin, Kec. Telluwanua; Kel. Rampoang, Kec. Bara; Kel. Songka, Kec. Wara Selatan
4	Barru	Tanah longsor Banjir Gelombang pasang	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
5	Soppeng	Banjir Tanah longsor	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
6	Wajo	Banjir Tanah longsor	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulo Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
7	Sidrap	Banjir Angin Puting Beliung Tanah Longsor	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
8	Enrekang	Banjir Tanah Longsor Patahan	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
9	Pinrang	Banjir Tanah Longsor Gelombang pasang	Kawasan Waetuoe, Kec. Lanrisang

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
10	Toraja Utara	Tanah Longsor Banjir	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
11	Tana Toraja	Tanah Longsor Banjir Gempa Bumi	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
12	Luwu	Banjir Tanah Longsor	Kaw. Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma, Ilanbatu dan Bosso
13	Luwu Utara	Banjir Tanah Longsor Gelombang pasang	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
14	Luwu Timur	Banjir Tanah Longsor Gempa Bumi	Burau, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
15	Gowa	Banjir Tanah Longsor Gerakan Tanah	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
16	Takalar	Banjir Tanah Longsor Gelombang Pasang	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang
17	Bantaeng	Banjir Tanah Longsor Gelombang Pasang	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
18	Bulukumba	Banjir Tanah Longsor Tsunami Abrasi Gerakan Tanah	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
19	Sinjai	Tanah Longsor Banjir Gerakan Tanah	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
20	Bone	Banjir Gempa Tanah Longsor Angin Puting Beliung	Kaw. Taccipi, Kec. Ulaweng; Kaw. Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
21	Maros	Banjir Tsunami Tanah Longsor	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
22	Pangkep	Banjir Tanah Longsor Tsunami Abrasi	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
+	Jeneponto	Banjir Tanah Longsor Gelombang Pasang Abrasi Pantai	Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kaw. Bontotangnga, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec.

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
		Gerakan Tanah	Bontoramba
		Gempa Bumi	
24	Selayar	Gelombang Pasang	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki

Sumber : Hasil Analisis RTRWK, Tahun 2018

2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional,dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

Tabel II.4
Sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Benteng dan Kawasan Pamatata
2	Bulukumba		Bulukumba (Agroindustri, Peratnian, Pariwisata, Perikanan)	

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng
4	Jeneponto		Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata)	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
9	Pangkep		Pangkejene (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata)	
10	Barru		Barru (Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan)	Kawasan EMAS
11	Bone		Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian)	
12	Soppeng			Kawasan Watansoppeng
13	Wajo			Kawasan Sengkang
14	Sidrap			Kawasan Pangkajene
15	Pinrang			Kawasan Pinrang
16	Enrekang			Kawasan Enrekang
17	Luwu			Kawasan Belopa
18	Tana Toraja			Kawasan Makale
19	Luwu Utara			Kawasan Masamba
20	Luwu Timur			KTM Mahalona Kawasan Malili
21	Toraja			Kawasan

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
	Utara			Rantetpao
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
23	Pare Pare		Parepare (Agroindustri, Perikanan)	
24	Palopo		Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian)	

Sumber : RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan

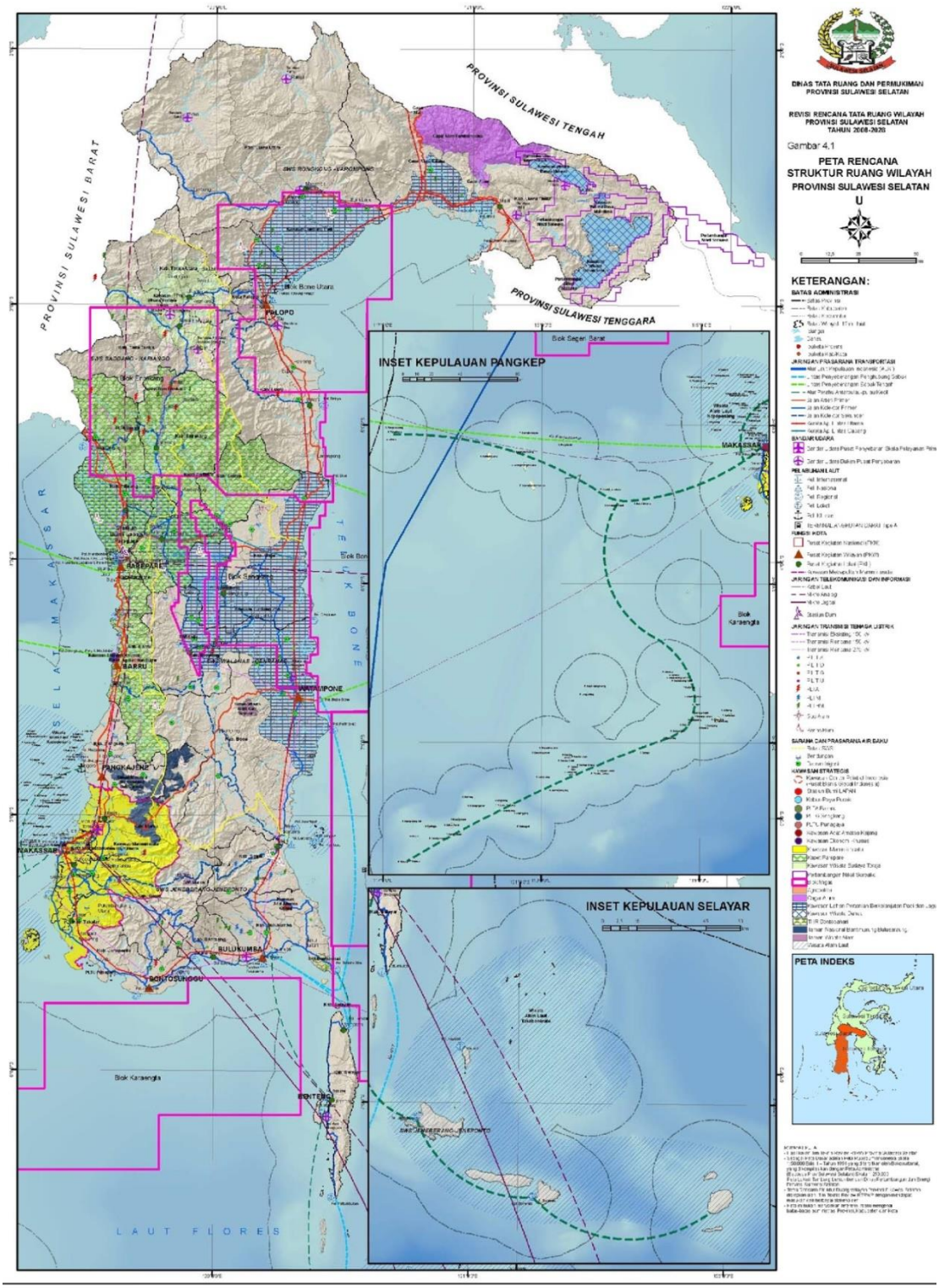
Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia.

2.1.4.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota

kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.

Gambar II.2
Peta Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sungguminasa, dan Kabupaten Takalar. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan di Kota Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto, dan Bulukumba. PKW merupakan kawasan perkotaan berfungsi sebagai simpul kegiatan perdagangan dan jasa skala regional yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional, sebagai pusat kegiatan industri serta berfungsi sebagai simpul transportasi skala Provinsi di Sulawesi Selatan (Gambar II.2).

Selain PKN dan PKW pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan juga ditetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan peran sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala kabupaten/kota dan sebagai simpul transportasi skala kabupaten/kota. Kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai PKL adalah Kawasan Perkotaan Malili, Kawasan Perkotaan Masamba, Kawasan Perkotaan Rantepao, Kawasan Perkotaan Makale, Kawasan Perkotaan Enrekang, Kawasan Perkotaan Pangkajene, Kawasan Perkotaan Sengkang, Kawasan Perkotaan Soppeng, Kawasan Perkotaan Sinjai, Kawasan Perkotaan Bantaeng, Kawasan Perkotaan Watansawitto, Kawasan Perkotaan Belopa, serta Kawasan Perkotaan Benteng, dan Kawasan Perkotaan Pamatata.

2.1.4.2 Kawasan Strategis Provinsi

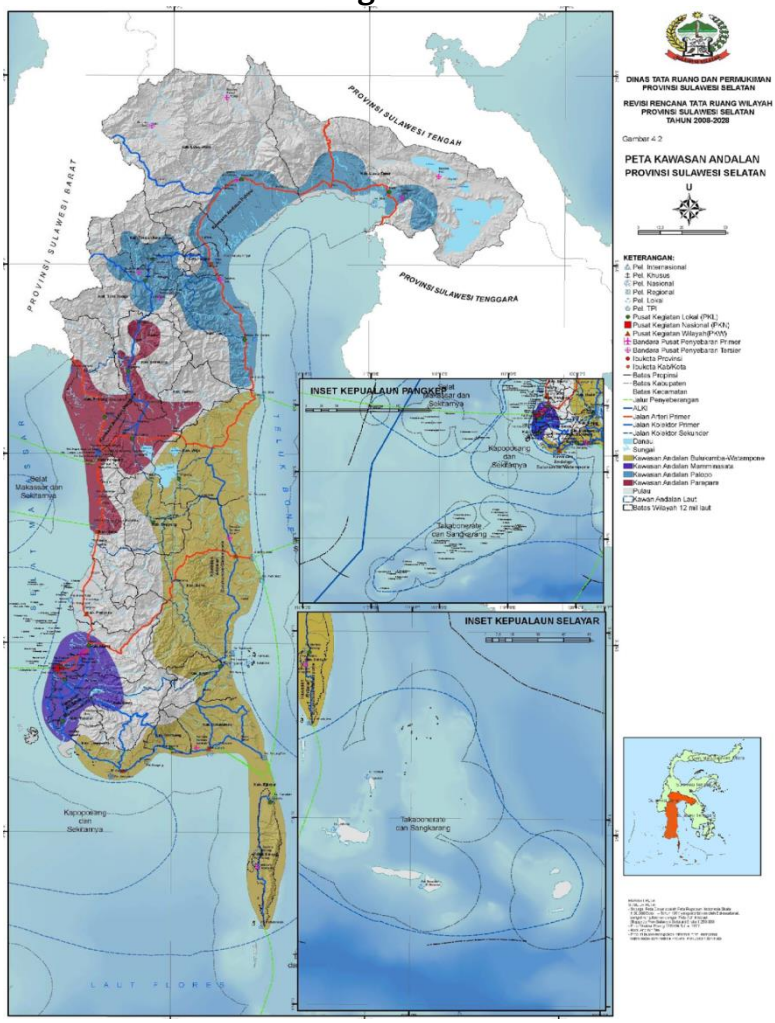
Selain Pusat Kegiatan Lokal, RTRWP Sulawesi Selatan juga menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Gambar II.3).

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Sulawesi Selatan adalah:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
    1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
    2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar;

3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, Bulukumba, Takalar dan Wajo;
5. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru;
8. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan industri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros (Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI Parepare (Kota Parepare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros).

Gambar II.3
Peta Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu: kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Suku Bajo di Kabupaten Bone.
c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, yaitu:
    1. Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar;
    2. Pusat-pusat pembangkit listrik terdiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang), PLTA Enrekang, PLTA Toraja, PLTB Sidrap dan PLTB Jeneponto
d. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu:
    1. Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep); Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar);
    2. Kawasan Konservasi kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap), Danau Matano dan Towuti (Kabupaten Luwu Timur);
    3. Kawasan bendungan yang terdiri atas Bendungan Batubassi (Kabupaten Maros), Bendungan Kelara dan Kareloe (Kabupaten Jeneponto), Bendungan Pamukkulu (Kabupaten Takalar), Bendungan Baliase (Kabupaten Luwu Utara), Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili dan Jenelata (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola dan Paselloreng (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego dan Salomekko (Kabupaten Bone).

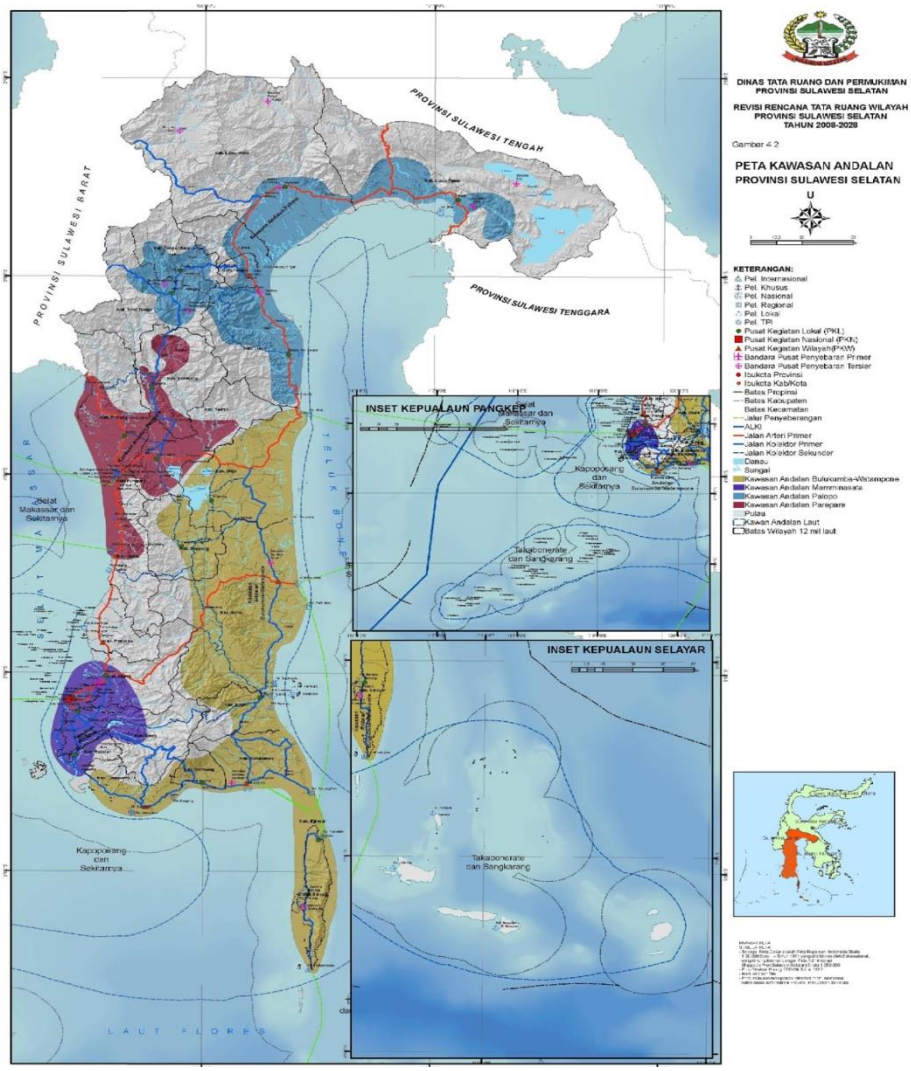
2.1.4.3 Kawasan Andalan Provinsi

Pengembangan kawasan di Sulawesi Selatan (Gambar II.4), selain didasarkan pada RTRWP juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan keberadaan Kawasan Andalan Laut dan Kawasan Andalan Darat di Sulawesi Selatan. Kawasan Andalan merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Adapun kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

a. Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan agroindustri;

b. Kawasan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
c. Kawasan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan.
d. Kawasan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, agroindustri dan pertanian.
e. Kawasan Andalan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
f. Kawasan Andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan.
g. Kawasan Andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Gambar II.4
Peta Kawasan Andalan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

2.1.4.4 Kawasan Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan yang dimiliki begitu besar dan beragam namun perlu komitmen bersama untuk mengelola dan mengolahnya secara profesional. Wujud dari komitmen itu adalah harus membangun dan memiliki industri kelautan (maritim) yang kuat, sinergis (terpadu), optimal dan berkelanjutan beserta kebijakan dan sasaran yang tepat dan benar. Termasuk dengan membangun dan mendidik SDM kelautan (kemaritiman) yang mumpuni. Pembangunan kelautan (maritim) untuk wilayah Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan perlu mendapat perhatian karena memiliki potensi sumberdaya alam, pariwisata, pelabuhan dan transportasi laut dan hasil laut yang cukup memadai. Sehingga untuk mengoptimalkannya perlu pendayagunaan sumberdaya kelautan yang terdiri dari : 1) Pengembangan transportasi laut, 2)Pengembangan perikanan, 3) Pengembangan pariwisata bahari, 4) Pertambangan, 5) Industri maritim, 6) Bangunan kelautan, dan 7) Jasa kelautan.

Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan potensi maritim maka keberhasilannya ditandai oleh adanya kondisi ruang hidup yang memungkinkan masyarakat untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suasana kehidupan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Kondisi ruang hidup tersebut ditandai oleh: (1) adanya infrastruktur dan akses wilayah yang lancar; (2) kondisi ekonomi,sosial dan budaya, politik dan keamanan yang baik; dan (3) kontribusi sumberdaya alam dalam pembangunan yang optimal.

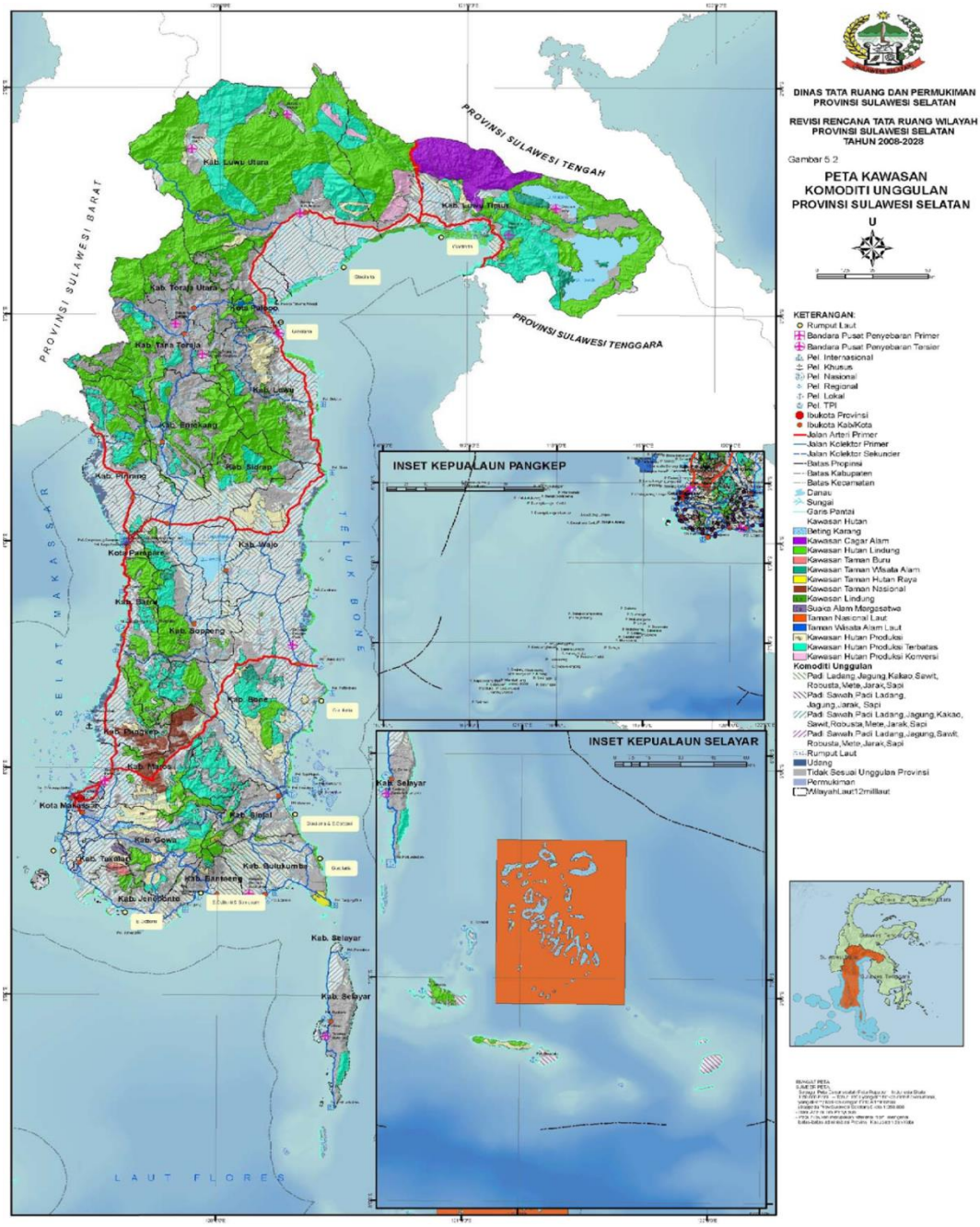
Pengelolaan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam Perda RTRWP Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya perikanan diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan udang, yang ditetapkan pada: Kabupaten Barru dengan luasan 2.860,74 ha, Kabupaten Pangkep dengan luasan 8.307.12 ha, Kabupaten Bone dengan luasan 8.401,13 ha, Kabupaten Wajo dengan luasan 9.100,43 ha, dan Kabupaten Pinrang dengan luasan 13.559,01 hektar. Pengawasan atas eksploitasi potensi kemaritiman harus dilakukan secara ketat demi menjamin kelestariannya dan daya produksi kelautan.

2.1.4.4 Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan hewan besar, dengan komoditas unggulan berupa komoditas pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan di seluruh Kabupaten/Kota yaitu; Kabupaten Bantaeng dengan luasan 16.044,24 ha, Kabupaten Barru dengan luasan 18.195,73 ha, Kabupaten Bone dengan luasan 203.883,63 ha, Kabupaten Bulukumba dengan luasan 69.772,85 ha, Kabupaten Enrekang dengan luasan 16.525,21 ha, Kabupaten Gowa dengan luasan 41.249,14 ha, Kabupaten Jeneponto dengan luasan 39.238,05 ha, Kabupaten Luwu dengan luasan 66.279,81 ha, Kabupaten Luwu Timur dengan luasan 55.563,72 ha, Kabupaten Luwu Utara dengan luasan 124.095,96 ha, Kota

Makassar dengan luasan 5.465,20 ha, Kabupaten Maros dengan luasan 48.593,69 ha, Kota Palopo dengan luasan 6.032,93 ha, Kabupaten Pangkep dengan luasan 30.352,96 ha, Kota Parepare dengan luasan4.268,30 ha, Kabupaten Pinrang dengan luasan 76.445,75 ha, Kabupaten Selayar dengan luasan 34.311,28 ha, Kabupaten Sidrap dengan luasan 91.266,84 ha, Kabupaten Sinjai dengan luasan 14.407,44 ha, Kabupaten Soppeng dengan luasan 50.520,92 ha, Kabupaten Takalar dengan luasan 39.663,68 ha, Kabupaten Tana Toraja dengan luasan 3.421,02 ha, Kabupaten Toraja Utara dengan luasan 1.857,66 ha, dan Kabupaten Wajo dengan dengan luasan 183.907,44 ha.

Gambar II.5
Peta Potensi Komoditi Unggulan

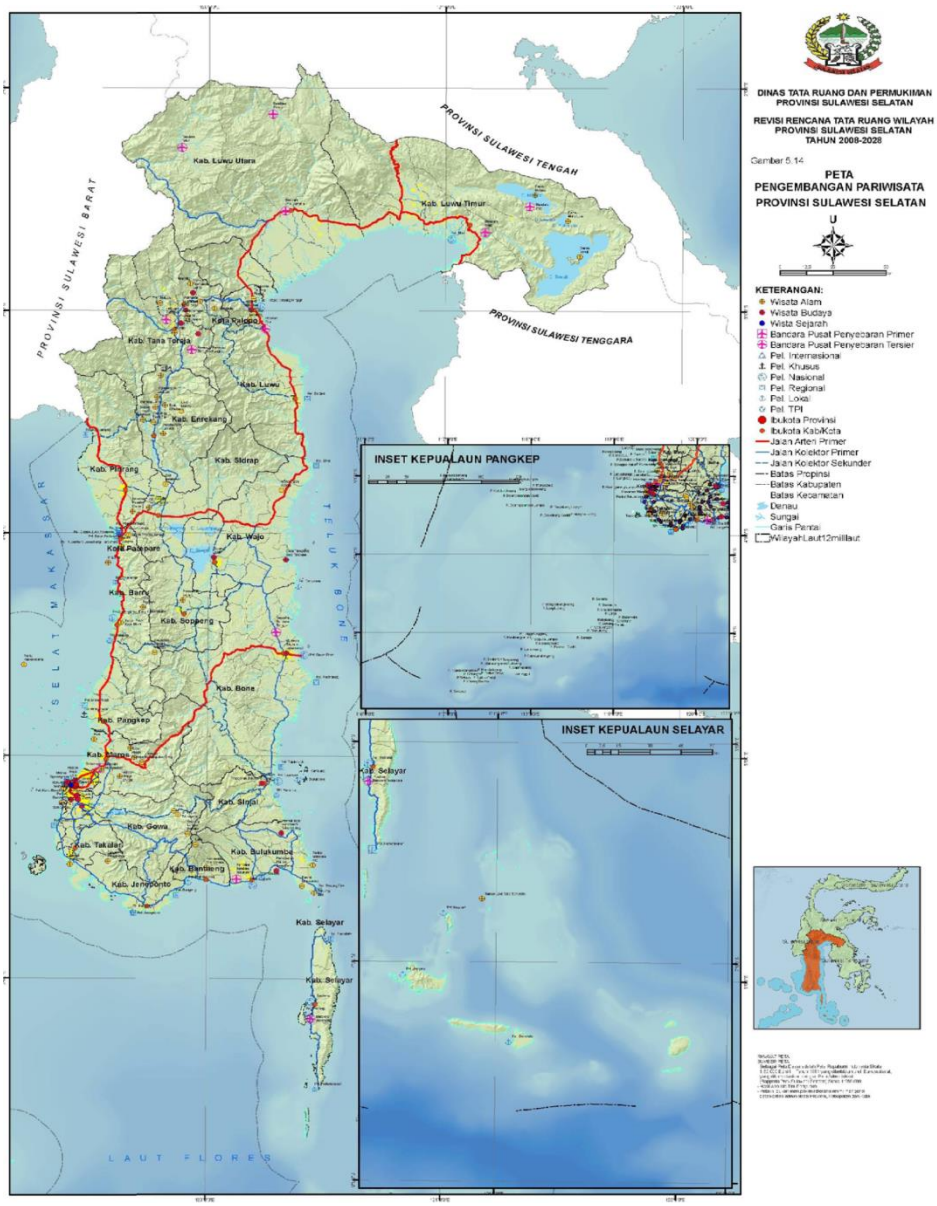


Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

2.1.4.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Sulawesi Selatan diarahkan pada perannya sebagai tujuan wisata mupun keberadaanya sebagai objek wisata. Sebaran kawasan peruntukan wisata dapat dilihat pada Gambar II.6.

Gambar II.6
Peta Kawasan Pariwisata



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Sulawesi Selatan dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kawasan Wisata Alam yang meliputi: Taman Wisata Alam (TWA) Danau Matano – Mahalona dan TWA Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur, TWA Malino di Kabupaten Gowa, TWA Cani Sirenreng di Kabupaten Bone, TWA Lejja di Kabupaten Soppeng, TWA Laut Kepulauan Kapoposang di Kabupaten Pangkep, TWA Danau Tempe -Sidenreng di Kabupaten Wajo dan Sidrap, TWA Laut Kepulauan Spermode di Kawasan Mamminasata, TWA Kebun Raya Enrekang, TWA Kebun Raya Pucak di

Kabupaten Maros, TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Taman Hutan Raya Abdul Latief di Kabupaten Sinjai, Taman Hutan Raya Nanggala di Kota Palopo, Taman Nasional Laut Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Taman Nasional Bantimurung – Bulusarang (Rammang-rammang) di Kabupaten Maros dan Pangkep, Taman Buru Ko'mara di Kabupaten Takalar dan Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto; Goa mampu di Bone, Wisata Alam Bantaeng, Goa Purbakala Passea dan Passohara di Bulukumba,

b. Kawasan Wisata Budaya yang meliputi: Taman Wisata Budaya (TWB) perdesaan tradisional di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, TWB Permukiman Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Taman Miniatur Sulawei Selatan di Situs Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; kawasan Wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere di Kota Makassar, kawasan Pusat industri perahu tradisional Pinisi di Kabupaten Bulukumba, Kawasan Fort Rotterdam di Kota Makassar, Kawasan Situs Benteng Tallo dan Makam Raja-raja Tallo di Kota Makassar, kawasan Makam Raja-raja Gowa di Kota Makassar, kawasan Makam Syech Yusuf di Kota Makassar, kawasan Masjid Tua Katangka di Kabupaten Gowa, kawasan Museum Saoraja Lapawawoi Karaeng Sigeri di Kabupaten Bone, kawasan Masjid Jami Tua Palopo di Kota Palopo, dan kawasan Taman prasejarah Batu Pakek Gong dan Karampuang di Kabupaten Sinjai, Kawasan Wisata Adat Rongkong di Luwu Utara.
c. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2015-2025 guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Melalui peraturan ini ditetapkan Destinasi Pariwisata Nasional Makassar-Takaboneratoe dan sekitarnya yang meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bukukumba dan sekitarnya, KPPN Sinjai dan sekitarnya, KPPN Selayar dan sekitarnya dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya dan Destinasi Pariwisata Nasional Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang meliputi KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya, dan KPPN Palopo dan sekitarnya.

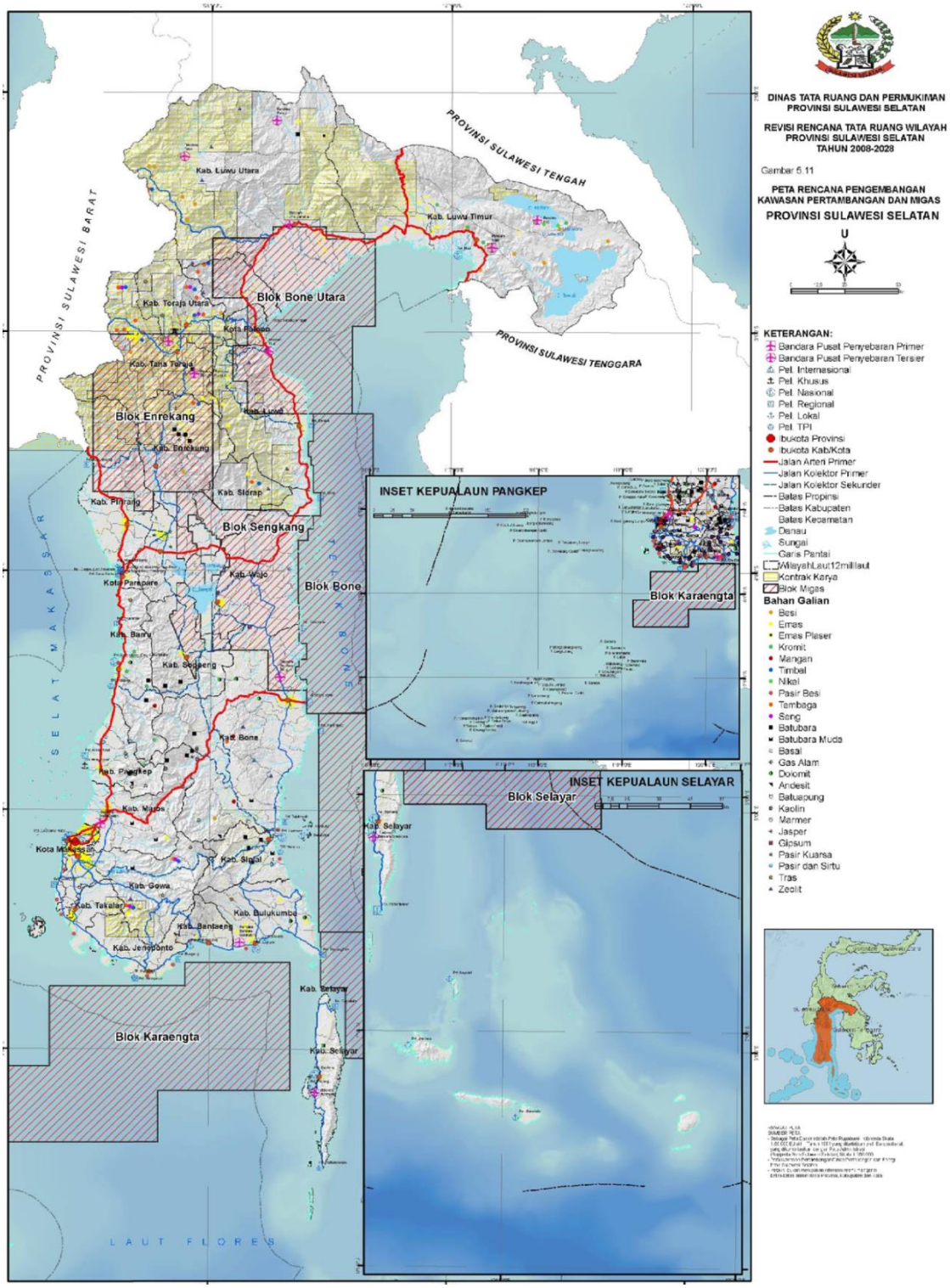
2.1.4.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan Dan Migas

Pengelolaan kawasan pertambangan berupa kawasan potensil pengembangan minyak dan gas bumi ditetapkan pada 8 blok wilayah pertambangan minyak dan gas bumi (Gambar II.6) yaitu:

a. Blok Segeri di Selat Makassar;
b. Blok Bone di Teluk Bone;
c. Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang;
d. Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo;
e. Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Bone;
f. Blok Kambuno di perairan laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba;

g. Blok Karaengta di perairan laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar; dan
h. Blok Selayar di perairan laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar.

Gambar II.7
Peta Kawasan Pertambangan dan Migas



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

2.1.4.7 Kawasan Peruntukan Industri

Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan industri skala besar dan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan ditetapkan di:

a. Kawasan industri skala besar diarahkan pada Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
b. Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada: Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

2.1.4.8 Kawasan Peruntukan Perdagangan

Pengelolaan kawasan peruntukan perdagangan di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan perdagangan skala besar dan kawasan perdagangan skala menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan perdagangan di Sulawesi Selatan ditetapkan di:

a. Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada PKN Mamminasata, dan Kawasan Perkotaan di PKW yaitu Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkejene Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bulukumba;
b. Kawasan perdagangan skala menengah diarahkan pada Kawasan Strategis Provinsi yaitu KEK Barru, dan Kawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia di Kawasan Pelabuhan Pamatata.

2.1.4.9 Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT)

Saat ini, sistem kelistrikan Sulawesi Selatan memiliki kapasitas daya mampu 1.230 MW dengan beban puncak 1.002 MW. Dengan kata lain, besaran cadangan daya mencapai 228 MW atau rasio reserve margin 18,5%. Pada Tahun 2018, kapasitas daya mampu Sulawesi Selatan diprediksikan mencapai 1.973 MW dengan beban puncak sebesar 1.475 MW, sehingga daya cadangan Sulawesi Selatan diprediksi mencapai 33% atau melampaui ambang batas ideal. Bahkan pada 2020, cadangan daya listrik di Sulsel diprediksi bisa berada pada level 55% atau ekuivalen 1.176 MW dengan asumsi daya mampu sebesar 3.291 MW, sedangkan beban puncak 2.115 MW.

Ketersediaan listrik serta penambahan pembangkit yang relatif agresif tersebut menjadi sebuah sinyalemen dorongan akselerasi perekonomian daerah. Ketersediaan pasokan listrik dengan cadangan daya yang terus membesar tersebut bahkan bisa menjadi momentum bagi Sulsel untuk bertransformasi menjadi lumbung energi dan melengkapi predikat daerah yang sebelumnya sebagai salah satu lumbung pangan di Tanah Air. Namun ketersediaan serta penambahan pembangkitan memerlukan dukungan peningkatan kapasitas tranmisi dan konsistensi pelayanan serta pemerataan distribusi listrik guna mendukung kebijakan pengembangan industri

Gambar II.8
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)



Sumber : Kementerian ESDM, Olah Data : Michael Agustinus

Gambar II.9
Pengerjaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)



Sumber : Jendela Nasional.com

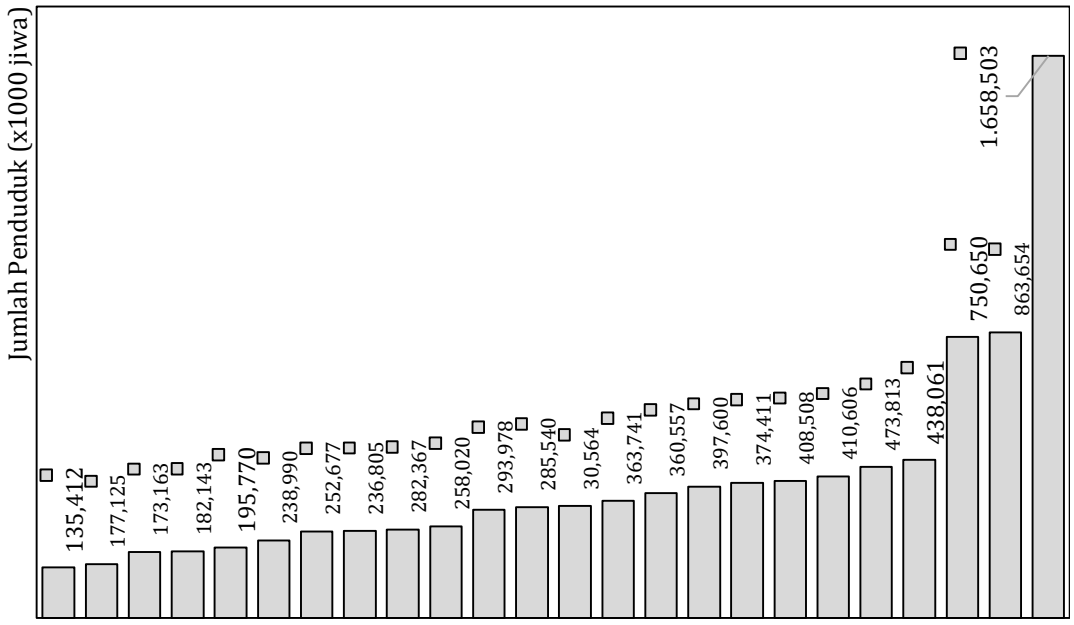
Pemenuhan kebutuhan energi yang berasal dari energi fosil yang keberadaannya akan semakin berkurang akan berdampak terhadap perubahan iklim. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah melalui kebijakan energi nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 menyatakan bahwa energi yang berkelanjutan adalah modal pembangunan melalui pengembangan energi baru terbarukan sebagai focus utama mencapai kedaulatan energi. Salah satu program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang menjadi focus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan energi terbarukan dari hidro dan bayu. Pemerintah melalui RUPTL Tahun 2017-2016 menyatakan bahwa potensi tenaga air yang dapat dikembangkan menjadi PLTA di Sulawesi Selatan sebesar 1.836 MW dan yang dapat dikembangkan menjadi PLTM sebesar 160 MW yang antara lain meliputi Sinjai dengan potensi 50 kW, Bakaru dengan kapasitas 126 MW, dan Bili-Bili dengan potensi 20 MW.

Selain potensi energi air, Sulawesi Selatan juga berlimpah akan ketersediaan energi bayu (angin). Saat ini di Sulawesi Selatan sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang merupakan investasi asing bekerjasama dengan perusahaan Indonesia di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kapasitas 75 MW dan di Kabupaten Jeneponto dengan kapasitas 60 MW. Berdasarkan hasil pemetaan potensi pengembangan energi bayu melalui PLTB, maka di Sulawesi Selatan masih dapat dikembangkan beberapa wilayah untuk pengembangan PLTB yang meliputi antara lain Kabupaten Takalar dengan kapasitas 20 MW, Bantaeng dengan kapasitas 84 MW, Takalar II dengan kapasitas II dengan kapasitas 60 MW, Sidrap II dengan kapasitas 45 MW dan Selayar dengan kapasitas 5 MW.

2.1.5 Aspek Demografi

Secara demografis, distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 terlihat sangat tinggi pada tiga wilayah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa, dimana sekitar 34% penduduk mendiami wilayah tersebut. Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Pare-pare dan Kabupaten Barru adalah tiga daerah dengan jumlah penduduk terendah dalam provinsi (Grafik II.1).

Grafik II.1
Distribusi Penduduk (x1000 jiwa) di Sulawesi Selatan menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017



Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.1.5.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 9,48 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,72% per tahun. Pada tahun 2014 tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Selatan adalah 202,46 jiwa/km^2. Sementara pada tahun 2017

kepadatan penduduk Sulawesi Selatan menunjukkan nilai 202,93 jiwa/km^2. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Kegunaan data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat disebabkan angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Sedangkan struktur penduduk di wilayah Sulawesi Selatan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel II.5
Indikator Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.458.378	9.473.684	9.521.658	9.522.503
2	Pertumbuhan Penduduk	%	0.0046727418	0.0016182478	0.0050445000	-0.0043252970
3	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	202,46	202,78	203,81	202,93
4	Sex Ratio	%	99,24	99,02	99,53	99,28
5	Jumlah Rumah Tangga	Ruta	1.938.938	1.956.593	1.976.250	1.995.421
6	Rata-rata ART	Orang/ Ruta	4.35	4.35	4.35	4.36
Menurut Kelompok Umur						
7	0-14 Tahun	Orang	2.375.076	2.577.826	2.370.395	2.318.047
8	14-64 Tahun	Orang	6.487.183	6.308.647	6.544.370	6.530.446
9	Diatas 65 Tahun	Orang	606.715	587.183	606.715	631.981

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2018

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kepulauan Selayar	135.809
2	Bulukumba	432.141
3	Bantaeng	196.358
4	Jeneponto	409.693
5	Takalar	286.390
6	Gowa	752.896
7	Sinjai	255.853
8	Maros	397.937
9	Pangkajene Kepulauan	361.636
10	Barru	173.683
11	Bone	866.245

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
12	Soppeng	249.768
13	Wajo	460.719
14	Sidenreng Rappang	310.493
15	Pinrang	411.837
16	Enrekang	239.707
17	Luwu	375.535
18	Tana Toraja	283.214
19	Luwu Utara	364.828
20	Luwu Timur	294.383
21	Toraja Utara	239.558
22	Makassar	1.663.479
23	Parepare	177.651
24	Palopo	182.690
SULAWESI SELATAN		**9.552.503**

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan sistem grid. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa untuk status penyediaan bahan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup bagus dimana 99,4% wilayahnya belum melampaui ambang batas. Sedangkan untuk status penyediaan air bersih 100% wilayahnya belum terlampaui. Akan tetapi nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit.

Analisis status daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan teknik pengolahan data spasial, sehingga untuk membendingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial. Adapun standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat adalah standar angka kecukupan energi(AKE)yaitu m3/tahun/kapita. Adapun hasil perhitungan kebutuhan pangan dan air di Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel II.7 berikut.

Tabel II.7
Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan dan Air
Provinsi Sulawesi Selatan

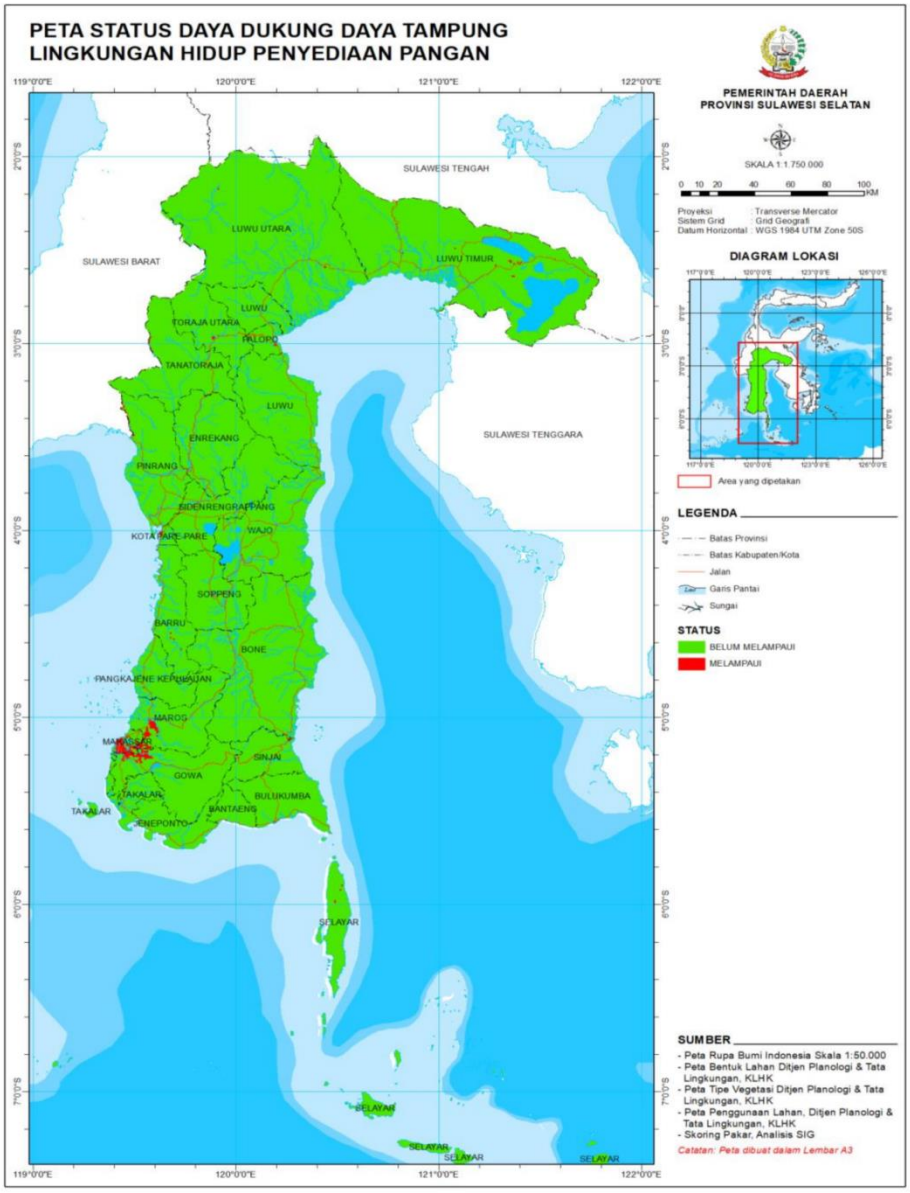
No.	Kabupaten/ Kota	Daya Dukung Air		Daya Dukung Pangan	
		Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air (m^3)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)
1	Bantaeng	13.207.132.029,30	334.276.617,14	381.231.535.589,20	123.154.741.250,00
2	Barru	30.555.654.693,98	545.607.631,74	632.417.004.096,43	185.959.853.250,00
3	Bone	86.853.621.918,66	3.532.169.849,69	3.606.385.505.072,13	1.000.032.037.000,00
4	Bulukumba	35.577.450.403,97	1.102.441.867,51	965.145.139.948,67	345.695.715.750,00
5	Enrekang	28.042.648.239,89	660.428.672,64	871.516.999.291,37	316.700.772.750,00
6	Gowa	51.416.156.653,79	1.208.815.020,19	1.323.334.268.129,08	439.120.988.000,00
7	Jeneponto	32.615.406.153,58	798.752.266,08	925.869.108.918,79	261.674.102.750,00
8	Pare-Pare	2.275.751.598,53	48.446.958,74	52.928.199.277,17	21.196.882.250,00
9	Luwu	31.283.925.765,53	1.218.157.190,96	1.868.257.117.924,51	409.262.820.000,00
10	Luwu Timur	116.297.005.372,44	979.291.990,33	3.680.421.183.912,68	300.910.818.000,00
11	Luwu Utara	100.524.004.886,09	1.448.698.478,77	3.674.996.781.617,69	313.732.848.250,00
12	Makassar	5.102.519.376,17	83.589.912,53	102.340.577.049,49	70.804.068.750,00
13	Maros	27.288.025.525,12	828.980.209,64	807.467.046.487,89	281.485.901.250,00
14	Palopo	3.614.529.014,26	121.702.499,64	173.799.582.855,48	42.190.514.250,00
15	Pangkajene Kepulauan	19.609.838.624,31	548.156.258,38	478.054.522.400,42	171.412.942.500,00
16	Pinrang	64.175.477.823,26	1.544.949.046,65	1.705.801.653.957,59	435.785.800.500,00
17	Kepulauan Selayar	31.302.709.923,63	191.798.110,70	493.321.663.914,85	87.648.727.500,00
18	Sidenreng Rappang	24.054.015.484,03	1.496.493.874,26	1.485.400.950.831,03	405.181.335.250,00
19	Sinjai	22.598.794.834,56	683.842.119,05	593.801.262.153,45	256.939.706.000,00
20	Soppeng	11.682.994.864,81	811.765.910,18	1.022.938.778.905,09	315.472.639.000,00
21	Takalar	19.876.784.917,12	692.269.506,59	530.214.766.865,93	179.929.834.250,00
22	Tana Toraja	45.575.264.603,58	553.347.018,36	844.661.408.211,19	250.717.423.250,00
23	Toraja Utara	23.039.425.764,89	571.527.801,69	625.333.077.553,24	224.307.446.750,00
24	Wajo	29.326.878.846,27	2.798.876.683,13	2.905.045.328.720,86	683.382.273.000,00
SULAWESI SELATAN		**855.896.017.317,75**	**22.804.385.494,59**	**29.750.683.463.684,20**	**7.122.700.191.500,00**

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sektor pangan dan air hampir pada setiap kabupaten belum terlampaui. Analisis terkait perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pada setiap kabupaten sangat diperlukan untuk mengukur berapa ambang batas penyediaan, mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat

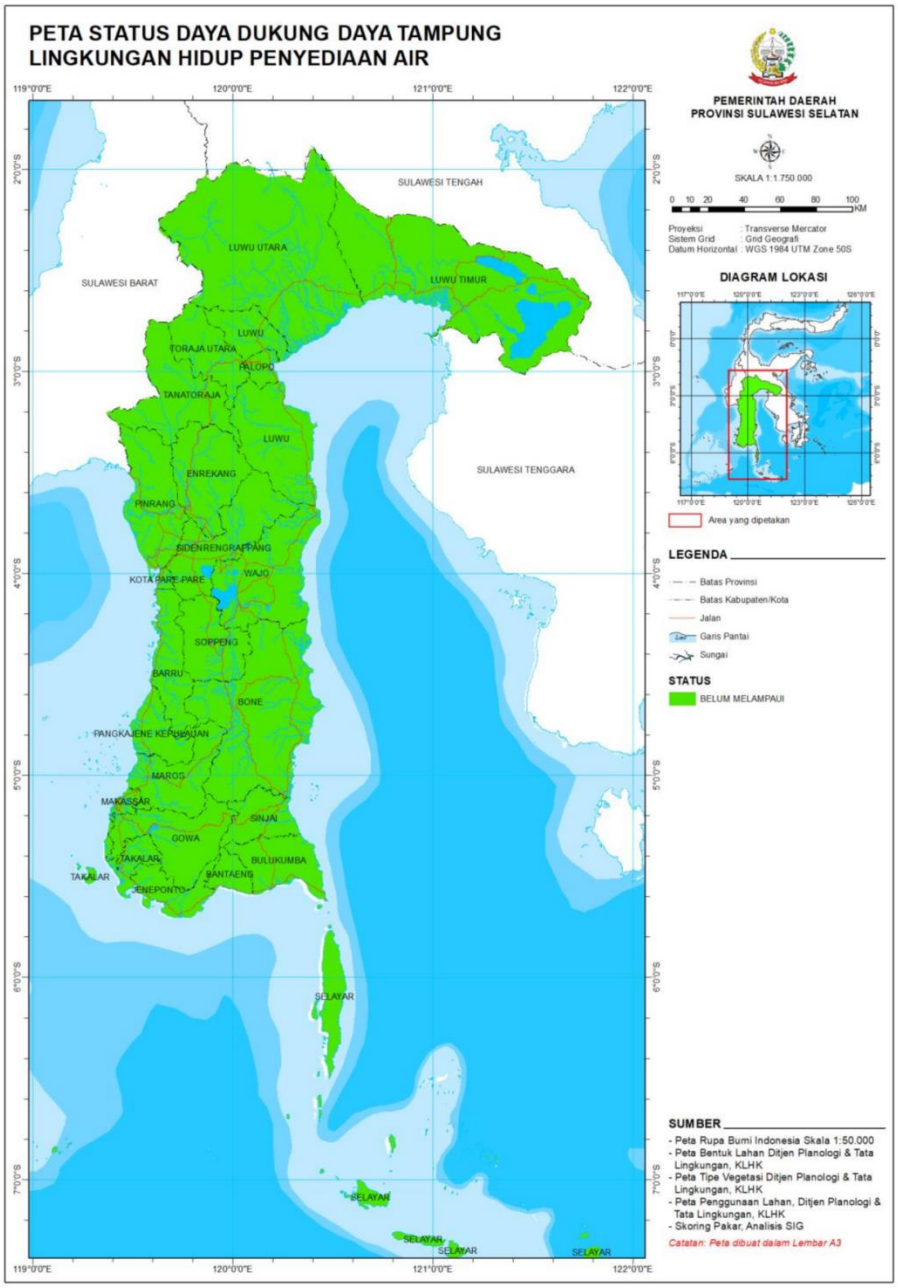
sehingga akan meningkatkan kebutuhan, yang mana yang akan dating dapat menyebabkan terlampauinya daya dukung wilayah. Wilayah-wilayah yang diperkirakan akan melampaui ambang batasnya dapat menjadi zona yang terbatas terhadap program-program perencanaan pembangunan wilayah dikarenakan dua komponen analisis yang digunakan yakni pangan dan air merupakan komponen penentu bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat disuatu wilayah. Akan tetapi banyak teknik yang dapat dilakukan ketika terjadi kekurangan ketersediaan di suatu wilayah yakni dapat dilakukan dengan mendatangkan sumbernya dari luar wilayah atau dari wilayah-wilayah yang masih surplus ketersediaanya. Pada Gambar II.10 menunjukkan Peta Status Penyediaan Bahan Pangan di Sulawesi Selatan dan Gambar II.11 menunjukkan Status Penyediaan Air Bersih di Sulawesi Selatan.

Gambar II.10
Peta Status Penyediaan Bahan Pangan Sulawesi Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Gambar II.11
Peta Status Penyediaan Air Bersih di Sulawesi Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Berdasarkan informasi dari Gambar II.10 dan II.11 diatas diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampauan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan bahan pangan terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi pangan yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Adapun rincian luasan status daya dukung wilayah penyedian bahan pangan dan penyediaan air disajikan pada Tabel II.8 berikut:

Tabel II.8
Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Status Daya Dukung Pangan			
		Wilayah yang Masih Mendukung		Wilayah yang Tidak Masih Mendukung	
		Ha	(%)	Ha	(%)
1	Bantaeng	39.780,51	0,9	149,64	
2	Barru	120.229,51	2,6	426,40	0,00
3	Bone	459.634,90	10,1		0,01
4	Bulukumba	116.518,73	2,6	217,96	0,00
5	Enrekang	185.119,33	4,1		0,00
6	Gowa	175.985,12	3,9	5.573,47	0,12
7	Jeneponto	81.899,50	1,8		0,00
8	Pare-Pare	9.464,33	0,2	440,31	0,01
9	Luwu	305.116,37	6,7		0,00
10	Luwu Timur	679.403,59	14,9	1.506,46	0,03
11	Luwu Utara	739.711,51	16,3	482,57	0,01
12	Makassar	10.419,31	0,2	6.921,62	0,15
13	Maros	139.021,75	3,1	6.053,87	0,13
14	Palopo	24.627,21	0,5	341,71	0,01
15	Pangkajene Kepulauan	82.258,37	1,8	258,39	0,01
16	Pinrang	187.623,96	4,1	1.095,86	0,02
17	Kepulauan Selayar	116.549,16	2,6	420,45	0,01
18	Sidenreng Rappang	176.789,66	3,9		0,00
19	Sinjai	87.928,12	1,9	257,48	0,01
20	Soppeng	137.592,54	3,0	85,05	0,00
21	Takalar	56.199,80	1,2	187,76	0,00
22	Tana Toraja	204.009,53	4,5	742,31	0,02
23	Toraja Utara	121.298,11	2,7	429,69	0,01
24	Wajo	263.831,72	5,8	171,07	0,00
SULAWESI SELATAN		**4.521.012,67**	**99,4**	**25.762,03**	**0,57**

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tabel II.9
Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Status Daya Dukung Air Wilayah yang Masih Mendukung	
		Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Bantaeng	39.930,15	0,88
2	Barru	120.655,90	2,65
3	Bone	459.634,90	10,11

No.	Kabupaten / Kota	Status Daya Dukung Air Wilayah yang Masih Mendukung	
		Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
4	Bulukumba	116.736,69	2,57
5	Enrekang	185.119,33	4,07
6	Gowa	181.558,59	3,99
7	Jeneponto	81.899,50	1,80
8	Pare-Pare	9.904,64	0,22
9	Luwu	305.116,37	6,71
10	Luwu Timur	680.910,05	14,98
11	Luwu Utara	740.194,08	16,28
12	Makassar	17.340,93	0,38
13	Maros	145.075,63	3,19
14	Palopo	24.968,91	0,55
15	Pangkajene Kepulauan	82.516,76	1,81
16	Pinrang	188.719,81	4,15
17	Kepulauan Selayar	116.969,61	2,57
18	Sidenreng Rappang	176.789,66	3,89
19	Sinjai	88.185,60	1,94
20	Soppeng	137.677,60	3,03
21	Takalar	56.387,55	1,24
22	Tana Toraja	204.751,83	4,50
23	Toraja Utara	121.727,80	2,68
24	Wajo	264.002,79	5,81
SULAWESI SELATAN		**4.546.774,70**	**100,00**

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan ini mampu mendukung kebutuhan pangan dan air diwilayahnya, bahkan untuk saat ini dapat mengekspor kelebihan potensi pangan dan air ke wilayah disekitarnya.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

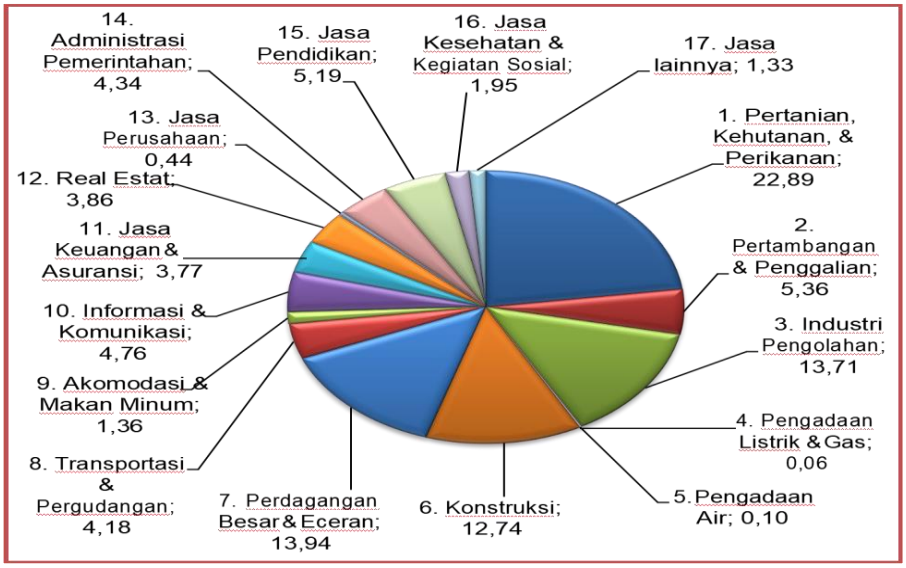
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2017 tumbuh 7,23%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,74% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 10,52%. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha tahun 2017 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,89%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,94%); Industri Pengolahan (13,71%) serta Konstruksi (12,74%). Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV tahun 2017 mengalami kontraksi 4,19% bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh intensitas hujan yang cukup tinggi pada tahun 2017 menyebabkan beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan seperti padi palawija mengalami gagal panen. Kontraksi ekonomi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh minus 22,64%. Selain Pertanian, lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi antara lain Pertambangan dan Penggalian (-2,86%), Pengadaan Air (-1,13%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-2,42%) serta Transportasi dan Pergudangan (-1,20%).

Grafik II.2
Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2017

Tabel II.10
Pertumbuhan PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan PDRB						
Sulawesi Selatan	%	7,62	7,54	7,19	7,42	7,23
Nasional	%	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Trend pertumbuhan ekonomi tersebut, sejalan dengan perkembangan secara nasional. Pola perkembangan ekonomi nasional juga menunjukkan besaran peningkatan yang menurun antara Tahun 2013-2017 sebesar 0,39%. Sebagaimana yang terlihat pada Tahun 2016, baik provinsi dan nasional mengalami perlambatan, dan memasuki Tahun 2017, provinsi dan nasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan kondisi nasional pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada diatas rata-rata nasional.

Tabel II.11
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten Kota
Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan PDRB				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bantaeng	9,00	8,33	6,64	7,39	7,32
2	Barru	7,87	7,35	6,32	6,01	6,48
3	Bone	6,30	9,53	8,30	9,01	8,43
4	Bulukumba	7,77	8,54	5,62	6,79	6,92
5	Enrekang	5,84	5,99	6,91	7,64	6,89
6	Gowa	9,42	7,17	6,79	7,61	7,23
7	Jeneponto	6,64	7,93	6,54	8,37	8,26
8	Pare-Pare	7,95	6,33	6,30	6,87	6,99
9	Luwu	7,74	8,81	7,26	7,88	6,79
10	Luwu Timur	6,30	8,10	6,42	1,58	3,07
11	Luwu Utara	7,39	8,82	6,67	7,49	7,60
12	Makassar	8,55	7,39	7,55	8,03	8,23
13	Maros	6,28	4,73	8,44	9,50	6,81
14	Palopo	8,02	7,05	6,47	6,95	7,19
15	Pangkajene Kepulauan	9,33	10,41	7,63	8,31	6,60
16	Pinrang	7,27	8,11	8,24	7,44	7,86
17	Kepulauan Selayar	8,18	9,01	8,83	7,35	7,61
18	Sidenreng Rappang	6,93	7,87	8,03	8,81	7,11
19	Sinjai	7,79	6,98	7,55	7,09	7,23
20	Soppeng	7,23	6,89	5,11	8,14	8,34
21	Takalar	8,80	9,76	8,42	9,61	7,39
22	Tana Toraja	7,19	6,80	6,85	7,32	7,50
23	Toraja Utara	9,74	7,64	7,76	8,04	8,22
24	Wajo	6,92	9,67	7,06	4,98	5,22
SULAWESI SELATAN		**7,62**	**7,54**	**7,19**	**7,42**	**7,23**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Memperhatikan lebih jauh pada struktur perekonomian Sulsel, berdasarkan Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor yang paling besar, pada Tahun 2017 nilai PDRB-ADHK sektor ini sebesar Rp 61,47 trilyun dari total PDRB Sulsel, Sektor kedua adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini sebesar Rp. 42,48 Trilyun. Sektor ketiga adalah Industri Pengolahan dengan nilai PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp. 40,41 trilyun. Sektor keempat adalah Konstruksi, dengan konstribusi sebesar Rp. 34,76 Trilyun terhadap total PDRB. (Tabel II.10).

Tabel II.12
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,45	51,08	53,96	58,44	61,47
Pertambangan dan Galian	13,24	14,71	15,87	15,96	16,72
Industri Pengolahan	30,55	33,28	35,51	38,45	40,41
Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,22	0,21	0,26	0,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,30	0,30	0,32	0,34
Konstruksi	26,03	27,67	29,97	31,99	34,76
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,19	32,64	34,92	38,36	42,48
Transportasi dan Pergudangan	8,45	8,60	9,19	9,86	10,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,95	3,18	3,37	3,66	4,08
Informasi dan Komunikasi	13,77	14,56	15,71	16,99	18,78
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,63	8,07	8,66	9,84	10,28
Real Estate	7,93	8,56	9,20	9,78	10,22
Jasa Perusahaan	0,94	1,00	1,06	1,14	1,24
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	10,29	10,56	11,38	11,22	11,93
Jasa Pendidikan	11,92	12,47	13,38	14,30	15,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,02	4,43	4,85	5,25	5,72
Jasa Lainnya	2,74	2,94	3,21	3,25	3,86
Total PDRB	**217,59**	**234,27**	**250,73**	**269,07**	**288,91**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Dari segi pertumbuhan ekonomi, untuk Tahun 2013-2017 persentase pertumbuhan untuk tahun 2013 sebesar 7,62% namun pada tahun 2017 kondisi pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan mengalami penurunan hingga 7,23%. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 22,64%. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menurun tetapi angka tersebut masih diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,10%. Dari segi distribusi lapangan usaha terhadap PDRB yang terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,89%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,94% dan kemudian industri pengolahan sebesar 13,71%. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan PDRB ADHK seluruh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen pengeluaran terbesar yaitu 53,65%.

2.2.1.2 Laju Inflasi

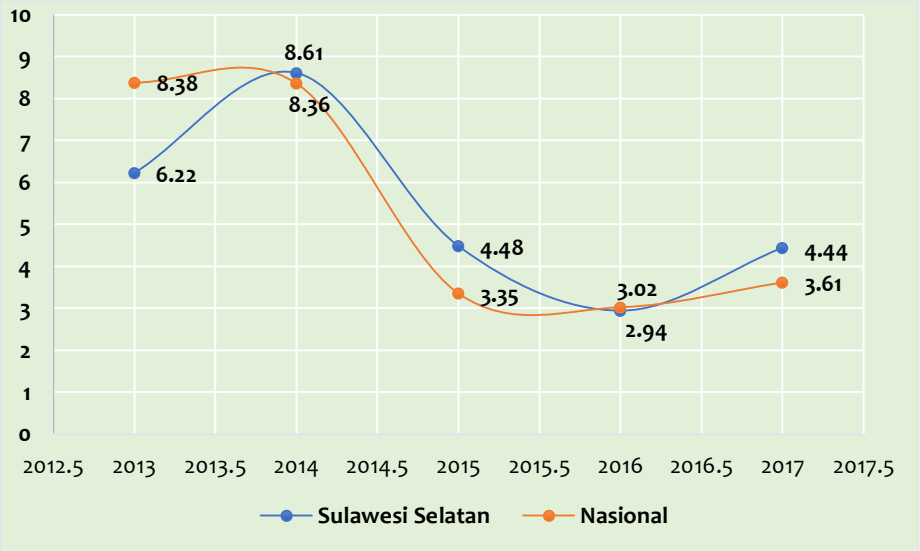
Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Inflasi tertinggi yang terjadi di Sulawesi Selatan dalam periode 5 tahun (2013-2017) terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,61%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan sejumlah barang kebutuhan masyarakat khususnya tahun 2014 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok khususnya kelompok bahan makanan serta transportasi dan komunikasi. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah sebesar 4,44% lebih tinggi dibandingkan secara nasional 3,61%.

Tabel II.13
Perkembangan Laju Inflasi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Laju Inflasi						
Sulawesi Selatan	%	6,22	8,61	4,48	2,94	4,44
Nasional	%	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Grafik II.3
Perkembangan Laju Inflasi
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

Perubahan harga yang terjadi di Sulawesi Selatan menyebabkan seluruh kelompok pengeluaran selama tahun 2017 mengalami kenaikan indeks harga atau tanpa terkecuali. Kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 6,07%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada

kelompok bahan makanan dengan laju inflasi sebesar 3,29%. Komposisi ini sangat berbeda dengan kondisi tahun 2016, dimana kelompok pengeluaran bahan makanan justru menjadi kelompok pengeluaran dengan laju inflasi tertinggi. Laju inflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menjadikan kelompok pengeluaran tersebut sebagai penyumbang andil terbesar dalam pembentukan inflasi umum selama tahun 2017, dengan andil terhadap sebesar 1,39 persen. Pemberi andil inflasi terbesar kedua setelah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil sebesar 0,85%. Sedangkan andil terendah disumbangkan oleh kelompok pengeluaran kesehatan dengan andil sebesar 0,14%.

2.2.1.3 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Produksi jagung tahun 2013 sebesar 1,25 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 2,34 juta ton pipilan kering atau meningkat 13,38% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi jagung tahun 2017 dipengaruhi oleh meningkatnya luas panen sebesar 12,33% dan meningkatnya produktifitas sebesar 0,93%. Meningkatnya luas panen dan produktifitas pada tahun 2017 ditunjang dengan iklim yang cukup baik dan banyaknya alokasi bantuan benih jagung yang disalurkan pada petani pada sejumlah 227.586 Ha. Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian (palawija) sebesar 6,01% terhadap PDRB dengan rata-rata kontribusi 4,54% sepanjang tahun 2013-2017.

Tabel II.14
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	3,30	3,94	4,07	5,42	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

2.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah total PDRB dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun pada suatu daerah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pendapatan perkapita, maka laju perekonomian haruslah meningkat sebaliknya laju pertumbuhan penduduk harus dapat dikendalikan. PDRB perkapita atau pendapatan perkapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu daerah dari tahun ke tahun. Namun penggunaan indikator PDRB Perkapita tentu tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesejahteraan penduduk atau meningkatnya pendapatan masyarakat, namun secara luas untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi nyata perkapita penduduk.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mengindikasikan majunya suatu wilayah dari segi ekonomi. Indikasi pendapatan perkapita harus disandingkan dengan angka

inflasi, gini ratio dan beberapa indikasi kesenjangan pendapatan maupun pengeluaran termasuk perkembangan harga-harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok. Pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi peningkatan tersebut harus berkesinambungan serta merata dirasakan pada setiap lapisan masyarakat.Jumlah penduduk Sulawesi Selatan meningkat rata-rata pada kisaran 1,08 persen setiap tahunnya. Sementara itu pertumbuhan PDRB perkapita secara "riil" juga selalu meningkat di kisaran 6 hingga 7 persen. Dengan demikian pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan selalu diikuti dengan peningkatan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Tabel II.15
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Perkapita (ADHB)						
Sulawesi Selatan	Juta Rp	31,03	35,34	39,94	44,11	48,21
Nasional	Juta Rp	38,40	41,90	45,10	48,00	51,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan ratarata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Tabel 2.13 menunjukkan angka PDBR Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 dimana PDRB Perkapita tahun 2013 yaitu 31,01 Juta, dan pada tahun 2014 sebesar 35,34 Juta hingga pada tahun 2017 terus mengalami tren peningkatan yang mencapai 48,21 Juta. Pada triwulan 1 tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan mampu menciptakan nilai tambah sebagai PDRB sebesar 108,65 trilyun rupiah, tumbuh sebesar 7,41% pada periode yang sama tahun sebelumnya dan nilai PDRB Perkapita tertinggi ke-3 secara nasional. Sekitar 51% atau setengah dari perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi sektor Pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kontribusi terbesar pertanian adalah tanaman pangan dan perikanan untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,89%. Sektor industri pengolahan dikontribusi oleh industri makanan dan minuman serta industri barang galian bukan logam sebesar 13,71%. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,94%.

Tabel II.16
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan PDRB Perkapita (Juta Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bantaeng	24,03	27,14	31,86	35,60	39,67
2	Barru	22,64	26,03	28,86	31,76	34,55

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan PDRB Perkapita (Juta Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Bone	22,79	26,90	31,35	35,21	39,15
4	Bulukumba	17,75	20,53	23,10	26,18	29,28
5	Enrekang	20,97	23,69	26,20	29,27	31,53
6	Gowa	15,39	16,97	19,02	21,10	23,08
7	Jeneponto	15,00	17,42	19,68	22,00	24,02
8	Pare-Pare	29,14	32,39	36,49	39,47	43,00
9	Luwu	22,34	25,98	29,58	33,57	36,60
10	Luwu Timur	63,35	70,62	69,72	67,67	70,34
11	Luwu Utara	21,31	25,30	28,73	32,06	35,06
12	Makassar	62,75	70,24	78,93	87,39	96,12
13	Maros	36,06	40,11	45,93	52,11	56,15
14	Palopo	26,00	28,79	31,68	34,15	37,02
15	Pangkajene Kepulauan	43,38	49,86	56,94	62,94	67,64
16	Pinrang	27,38	31,22	35,83	39,87	44,08
17	Kepulauan Selayar	22,64	27,14	31,86	35,60	39,67
18	Sidenreng Rappang	24,48	28,07	32,12	36,76	40,37
19	Sinjai	23,84	27,41	31,57	34,65	38,10
20	Soppeng	23,95	27,34	30,26	34,99	39,50
21	Takalar	17,83	20,72	23,78	26,74	29,27
22	Tana Toraja	16,28	18,78	21,43	23,80	26,27
23	Toraja Utara	19,02	22,46	26,10	30,02	34,09
24	Wajo	29,77	34,83	38,44	41,93	45,24
SULAWESI SELATAN		**31,03**	**35,34**	**39,94**	**44,11**	**48,21**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.5 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. Kondisi pertanian di Sulawesi Selatan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya pelaku tani. Selain potensi yang besar dalam nilai produksi, sektor pertanian juga merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Sulawesi Selatan. Sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi dan jagung berkontribusi besar terhadap sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dengan nilai kontribusi 22,89%. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis pada sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian tanaman pangan komoditas padi dan jagung diarahkan pada beberapa daerah seperti Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto dan Luwu.

Tabel II.17
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,16	22,97	23,14	23,27	22,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisen gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,429 yang masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 0,391. Pada rentan tahun 2014 hingga 2016 nilai Indeks Gini Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan yang berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan semakin kecil.

Pada Maret 2018 indeks gini mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 0,397 masih diatas indeks gini nasional sebesar 0,389. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita dari beberapa sektor antara lain: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Industri Pengolahan menjadi faktor penurunan Indeks Gini dimana distribusi pendapatan yang semakin meningkat akan memperkecil ketimpangan.

Tabel II.18
Indeks Gini
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Indeks Gini				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	0,432	0,448	0,404	0,400	0,429
Nasional	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.7 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Kebijakan pemerintah dibidang pangan untuk komoditas padi mengakibatkan pola pangan pokok masyarakat yang dahulu beragam (beras, jagung, sagu, pisang) sesuai dengan potensi budaya lokal, kini mengalami perubahan yang cenderung kearah pola pokok tunggal yaitu beras. Jenis, jumlah dan kualitas produk pangan lokal sangat bergantung pada kondisi spesifik pada suatu wilayah. Kondisi tersebut bukan hanya pada kesesuaian lahan, sifat tanah, iklim dan budidaya akan tetapi kondisi sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat pada wilayah tersebut juga mempengaruhi jumlah produksi.Produktivitas padi atau lahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai produktivitas sebesar 50,93% dengan rata-rata produktivitas 51,49% selama 5 tahun. Produksi beras pada tahun 2013 sebanyak 3,06 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 3,8 juta ton. Rata-rata perkembangan produksi beras selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan cukup besar yaitu 4,75%.

Tabel II.19
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	51,22	52,18	52,41	50,72	50,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.8 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Ketimpangan Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah berdasarkan nilai PDRB Perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk pada setiap wilayah/daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada proses pembangunan dan menyangkut kesejahteraan dari masyarakat. Akan tetapi, proses pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa daerah yang mengalami pembangunan secara cepat sementara daerah yang lainnya mempunyai laju pembangunan yang lambat. Sulawesi Selatan sebagai Provinsi yang meliputi 24 kabupaten/kota mempunyai keberagaman karakteristik, mulai dari wilayah, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana social-ekonomi maupun kebijakan pemerintah daerah. Adanya keberagaman tersebut menyebabkan terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkaipta antar wilayah. Indeks Ketimpangan Williamson berdasarkan data pada tabel 2.14 berikut menunjukkan nilai ketimpangan yang berflutuasi sejak tahun 2013-2017, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah/daerah lain meskipun pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Indeks Ketimpangan Williamson pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan nilai indeks 0,610.

Tabel II.20
Indeks Ketimpangan Williamson
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Ketimpangan Williamson	0,648	0,630	0,616	0,603	0,610

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.9 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan sekalipun relatif menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi. Persoalan kemiskinan penduduk berdampak pada keterbelakangan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan perumahan yang diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya tingkat pendapatan.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 864,51 ribu jiwa (10,12%). Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (Maret 2018) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 792,63 ribu jiwa (9,06%) dibawah rata-rata nasional yaitu 9,82%.

Tabel II.21
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan	Ribu Jiwa	160,53	154,40	157,18	150,60	166,50
Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan	Ribu Jiwa	696,91	651,95	707,34	646,21	659,47
Jumlah Penduduk Miskin Kota + Desa	Ribu Jiwa	857,45	806,35	864,51	796,81	825,97
Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	%	5,23	4,93	4,93	4,47	4,76
Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	%	13,31	12,25	13,22	12,30	12,65
Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa	%	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 864,51 ribu jiwa (10,12%). Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (Maret 2018) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 792,63 ribu jiwa (9,06%) dibawah rata-rata nasional yaitu 9,82%.

Merujuk pada Hasil Pemutakhiran Sebaran Data Terpadu Tahun 2015, keterbelakangan akses masyarakat miskin, khususnya pada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah terhadap pemenuhan rumah yang layak huni berdasarkan komponen yang tidak layak tergambar pada jumlah RTLH di Sulawesi Selatan sebanyak 217.755 Keluarga (KK).

Tabel II.22

Persebaran Kepemilikan Rumah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Rumah				RTLH
		Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
1	KEP. SELAYAR	12.727	27	704	117	4.278
2	BULUKUMBA	32.479	134	2674	246	11.645
3	BANTAENG	15.439	76	1118	205	3.308
4	JENEPONTO	45.818	105	5288	398	11.012
5	TAKALAR	32.096	126	1824	92	4.445
6	GOWA	64.876	660	4136	355	9.335
7	SINJAI	19.884	55	785	147	4.548
8	MAROS	28.313	183	1823	169	38.115
9	PANGKEP	28.438	181	3142	325	3.963
10	BARRU	15.003	85	1225	212	9.300
11	BONE	74.720	517	4333	585	9.404
12	SOPPENG	19.881	160	1497	114	21.654
13	WAJO	26.716	141	2809	218	5.961
14	SIDRAP	18.359	190	2712	169	11.066
15	PINRANG	20.460	182	2275	90	8.324
16	ENREKANG	17.454	56	2107	202	823
17	LUWU	30.067	136	3090	404	12.926
18	TANA TORAJA	20.581	111	3009	556	18.136
19	LUWU UTARA	28.674	143	3028	118	4.004
20	LUWU TIMUR	16.825	125	1414	149	11.126
21	TORAJA UTARA	15.904	156	3039	4566	3.672
22	MAKASSAR	27.527	10410	11577	1000	5.237
23	PARE-PARE	4.710	779	1537	109	1.461
24	PALOPO	5.430	714	1057	74	4.012
JUMLAH		622.381	15.452	66.203	10.620	217.755

Sumber : Hasil Pemutakhiran Sebaran Data Terpadu, Tahun 2015.

Tabel II.23
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	235.488	246.416	274.140	286.669	303.834
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	207.023	219.109	254.524	267.428	287.788
Garis Kemiskinan Nasional						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	275.779	326.853	356.378	372.114	400.995
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/ Bulan	275.779	296.681	333.034	350.420	370.910
Jumlah Penduduk Miskin						
Sulawesi Selatan	Ribu Jiwa	857,45	806,35	864,51	796,81	825,97
Nasional	Ribu Jiwa	28.553,93	27.727,78	28.513,57	27.764,32	26.582,99
Persentase Penduduk Miskin						
Sulawesi Selatan	%	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48
Nasional	%	11,47	10,96	11,13	10,70	10,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Penurunan angka kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan memfokuskan program terkait penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan semakin meningkat.

Tabel II.24
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan						
Sulawesi Selatan	%	89,68	90,46	89,88	90,76	90,52
Nasional	%	88,53	89,04	88,87	89,30	89,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Peningkatan persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Sulawesi Selatan yaitu 90,76% (2016) menjadi 90,52% (2017) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan jumlah 792,63 ribu jiwa dari total jumlah penduduk miskin nasional sebesar 25.949,80 ribu jiwa. Peranan komiditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras.

Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan makanan dan non makanan diantaranya adalah bandeng, telur ayam ras, mie instan, daging sapi dan rokok filter.

2.2.1.10 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pada awal pelaksanaan RPJMD tahun 2013, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 52,59%. Hal ini menunjukkan PAD masih lebih dominan kontribusinya dibandingkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2014, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah meningkat menjadi 55,04%. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan positif semua sector penerimaan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2015, persentase PAD terhadap total pendapatan sedikit mengalami penurunan menjadi 53,57% disebabkan kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang tidak seagresif tahun 2014. Pada tahun 2016 Dana BOS mulai disalurkan melalui APBD Pemerintah Provinsi sebagai penerimaan DAK Non Fisik. Sebagai efek kebijakan ini, Dana Transfer meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya sehingga persentase Dana Transfer terhadap total Pendapatan Daerah naik signifikan walaupun realisasi PAD juga bertumbuh positif. Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 dikarenakan dampak penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas kepada Pemerintah Provinsi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Gaji guru SMA/SMK dialokasikan pada DAU Pemerintah Provinsi mulai tahun anggaran 2017 yang mengakibatkan persentase Dana Transfer terhadap total Pendapatan Daerah kembali naik sehingga persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 40,62.

Tabel II.25
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	52,59	55,04	53,57	48,16	40,62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.1.11 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun2013 hingga 2017 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Tabel II.26
Opini BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.1.12 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, dengan kontribusi sekitar 22,89% dari seluruh sektor pada di tahun 2017. Data keadaan angkatan kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian cukup mendominasi sekitar 38.67% dari seluruh sektor ekonomi. Tidak salah dikatakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 95,90 triliun rupiah atau sebesar 22,89%. Sub kategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 63,34%. Sub kategori tersebut juga masih dirinci lagi dan tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut yaitu sebesar 51,89 persen.

Tabel II.27
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,16	22,97	23,14	23,27	22,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.13 Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB

Tanaman bahan makanan sebagai sumber bahan makanan memiliki peranan yang sangat penting. Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 7,75%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanin (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai kontribusi 7,52%. Beberapa faktor seperti curah hujan atau cuaca ekstrim menyebabkan produksi tanaman bahan makanan mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun ke tahun. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan produksi cabai sebagai tanaman utama dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Meskipun di Sulawesi Selatan banyak sawah tadah hujan namun tetap dapat mempengaruhi penurunan kualitas produksi padi dan jagung. Curah hujan yang tinggi pada tahun 2017

menyebabkan penurunan jumlah produksi beberapa tanaman pangan di Sulawesi Selatan sehingga kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Tabel II.28
Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama / Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB	%	7,98	7,79	7,65	7,81	7,52

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.14 PDRB Pertanian

Sektor pertanian selain berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, menyerap tenaga kerja di perdesaan, juga berperan dalam pengendalian Inflasi serta pembentukan PDRB. Percepatan pembangunan sektor pertanian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten yang pendapatan asli daerah terbesarnya adalah bersumber dari pertanian. Peningkatan PDRB Pertanian selain meningkatkan ketahanan pangan juga memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan perkapita. Tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha pertanian yaitu sebesar 51,89%. Berdasarkan data BPS, PDRB Pertanian mengalami pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 95,50 Trilyun Rupiah pada tahun 2017.

Tabel II.29
PDRB Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Pertanian	Trilyun Rp	57,37	68,47	78,78	88,33	95,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.15 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Perkebunan sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan telah menempatkan beberapa komoditas unggulan perkebunan (tanaman keras) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian seperti Kakao, Kopi, Jambu Mete, Tebu, Cengkeh, Kelapa Sawit, Lada, Pala dan Tembakau. Pada tahun 2017 produktivitas komoditi unggulan perkebunan Sulawesi Selatan sebesar 1.191 Kg/Ha dengan volume produksi 43.458 Ton serta nilai produksi sejumlah 77,71 Trilyun Rupiah. Untuk mencapai target produksi pemerintah bersama stakeholder terkait melakukan upaya pemeliharaan tanah dan merehabilitasi lahan yang rusak. Kontribusi sektor

perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 4,26% dari total PDRB.

Tabel II.30
Kontribusi Sektor Perkebunan (TanamanKeras) Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	4,28	4,56	4,55	4,45	4,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.16 PDRB Perkebunan

Secara nasional sub sektor perkebunan memberikan kontribusi peningkatan devisa Negara dan PDRB terbesar diluar minyak dan gas bumi serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Sehubungan dengan strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran pembangunan perkebunan adalah memulihkan produksi dan kualitas kakao. Sejak tahun 2013, produksi kakao meningkat sebesar 3,27% dari 148.960 Ton menjadi 153.830 Ton pada tahun 2017. Dari 9 komoditas unggulan perkebunan, kakao merupakan komoditi dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 67.521 atau berkontribusi sebesar 66,19% dari total nilai ekspor. Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang peningkatan produksi kakao tersebut antara lain: kebun contoh (demplot) metode pengendalian penyakit VSD kakao pada kabupaten/kota wilayah pengembangan kakao. Pencapaian pertumbuhan PDRB sektor perkebunan pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai pertumbuhan 17,84 Trilyun Rupiah.

Tabel II.31
PDRB Perkebunan
PDRB Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Perkebunan	Trilyun Rp	11,08	13,60	15,49	16,91	17,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.17 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Peranan sektor kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sangat penting dalam kaitannya terhadap pertumbuhan PDRB. Kontribusi sektor kehutanan antara lain didukung oleh peningkatan jumlah produksi pangan dalam hutan sebesar 16,90 ton, jumlah produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 7,450 ton, serta jumlah produksi hasil hutan kayu olahan sebesar 379,023 m3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah 0,07%. Kontribusi sub kategori kehutanan dan penebangan kayu sebesar 272,68 milyar rupiah.

Tabel II.32
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.18 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Perkembangan pembangunan pertambangan di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari jumlah investasi sektor pertambangan dimana jumlah izin usaha pertambangan mengalami peningkatan. Namun dengan berlakunya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah (PNT) yang memaksa perusahaan-perusahaan tambang untuk meningkatkan kadar pada batasan tertentu sebelum diizinkan untuk dijual ke luar negeri. Kebijakan pemerintah inilah yang menyebabkan menurunnya nilai ekspor komoditas logam sehingga berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada sektor pertambangan. Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sub lapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangandan Penggalian lainnya. Di Sulawesi Selatan terdapat tiga subkategori, hanya sub kategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit yang tidak ada. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu hanya berkisar 5 hingga 7 persen. Pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 17,88 milyar rupiah atau 6,91% dan meningkat menjadi 22,48 milyar rupiah atau 5,39% pada tahun 2017. Salah satu sumber produksi pertambangan terbesar di Sulawesi Selatan adalah pertambangan Bijih Nikel yang terletak di Soroako Kabupaten Luwu Timur.

Tabel II.33
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	6,91	7,11	6,32	5,59	5,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.19 Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 318,059 ton pada tahun 2017 merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Produksi udang adalah salah satu unggulan Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya udang windu, vannamei, udang putih dan lainnya. Pada tahun 2017, nilai

ekspor udang segar berkontribusi 17,71% terhadap total sektor pertanian/perikanan namun mengalami penurunan yang disebabkan kurangnya raw material dan faktor harga yang tidak stabil. Pada tahun 2017 produksi udang mencapai 43,03 ribu ton atau naik 3,2% dari tahun 2016 sebesar 41,64 ton. Selain udang, rumput laut yang dikembangkan di Sulawesi Selatan oleh pembudidaya. Komoditas rumput laut ini dibudidayakan di laut dan tambak. Produksi rumput laut tahun 2013 sebesar 2.422 ribu ton dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 3.375 ribu ton atau sebesar 39,35%. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai kontribusi sektor kelautan daan perikanan mencapai 8,33% pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,83% selama 5 tahun.

Tabel II.34
Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	6,92	7,67	8,10	8,14	8,33

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.20 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dikontribusi oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 13,94% dari total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,16%. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 12% terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017,kontribusi kategori ini mencapai 58,38 triliun rupiah atau sekitar 13,94%. Dari nilai tersebut, sekitar 78,11% merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sedangkan 21,89% merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Maraknya *e-commerce* menjadi salah satu pendorong bergairahnya kinerja kategori Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Makassar merupakan salah satu kota dengan konsumen *e-commerce* terbanyak.

Tabel II.35
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,99	12,62	12,86	13,39	13,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.21 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Target utama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada sektor industri adalah pengolahan kopi, kakao (coklat), rumput laut, sutera, markisa dan pengolahan hutan. Alasan pengembangan sektor industri pengolahan karena mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dan sekaligus membuka lapangan kerja yang luas. Ekspor produk dari Sulawesi Selatan selama ini masih berbentuk bahan mentah dapat diolah terlebih dahulu sebelum di ekspor, sehingga menciptakan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian. Namun demikian perkembangan industrialisasi di Sulawesi Selatan cenderung melamban. Pertumbuhan industri manufaktur di Sulawesi Selatan hanya 5,03% pada tahun 2017. Kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pun menurun dari 13,97% pada tahun 2015 menjadi 13,71% pada tahun 2017. Untuk mendorong industrialisasi di Sulawesi Selatan pemerintah membangun kawasan industri Bantaeng yang fokus pada industri smelter ferronikel berupa stainless steel. Meskipun nilai kontribusi mengalami fluktuasi mulai tahun 2013 hingga 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,85%, namun kontribusi sektor industri menempati urutan ketiga terbesar berdasarkan lapangan usaha.

Tabel II.36
Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Indutri Terhadap PDRB	%	13,71	13,98	13,88	13,97	13,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.1.22 Pertumbuhan PDRB Industri

Industri pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2017 adalah Industri Makanan dan Minuman dan Industri Barang Galian Bukan Logam, dengan kontribusi masing-masing kategori sebesar 52,30% dan 41,25%. Pertumbuhan PDRB Industri pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai kontribusi 5,03%. Industri Pengolahan berkembang dari 35,49 triliyun rupiah menjadi 57,45 triliyun rupiah. Namun pertumbuhannya berfluktuasi sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2017, hanya lima lapangan usaha yang tumbuh lebih dari 5 persen, yaitu Industri Makanan dan Minuman (9,36%), Industri Pengolahan Tembakau (21,15%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (7,66%), Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan (5,72%), dan Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (9,07%). Selain Industri Pengolahan, produksi industri manufaktur besar dan sedang di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang berada di atas angka pertumbuhan nasional. Jenis industri manufaktur yang mengalami kenaikan produksi tertinggi, yaitu industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang naik sebesar 6,05%, serta industri barang galian bukan logam yang naik 5,23%.

Tabel II.37
Pertumbuhan PDRB Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan PDRB Industri	%	9,22	9,00	6,77	8,23	5,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam ukuran keberhasilan suatu wilayah. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia ini tertuang dalam indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan cenderung mengalami kemajuan dimana pada tahun 2013 IPM Sulawesi Selatan sebesar 67,92 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 70,34 lebih rendah daripada IPM Nasional sebesar 70,81. Selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017 angka IPM Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 1,85 point dimana IPM Sulawesi Selatan dari posisi 14 secara nasional pada tahun 2017. Tren komponen IPM Sulawesi Selatan meliputi: 1) Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2017 tumbuh 0,03% dengan capaian 69,84%; 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2017 tumbuh 0,91% dengan capaian 13,28%; 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2017 tumbuh 2,58% dengan capaian 7,95%; 4) Pengeluaran Per Kapita/tahun pada tahun 2017 tumbuh sebesar 2,02% dengan capaian 10.489 Ribu Rupiah.

Tabel II.38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan jenis kelamin, dari tahun 2013 sampai dengan 2017, IPM perempuan ternyata masih jauh dari laki-laki. Bahkan pada tahun 2016 dan 2017, tidak mengalami perubahan dengan perbedaan 5,31.

Tabel II.39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013-2017

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan	71.84	66.34	72.59	67.22	72.98	67.81	73.61	68.30	74.21	68.90
Nasional	72.69	65.56	73.36	66.27	73.58	66.98	74.26	67.44	74.85	68.08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Pertumbuhan IPM kabupaten/kota tertinggi di Sulawesi Selatan tahun 2016-2017 adalah kabupaten Jeneponto (1,39%), kabupaten Soppeng (1,09%), dan Bantaeng (1,02%). Sedangkan pertumbuhan IPM kabupaten/kota terendah di Sulawesi Selatan tahun 2016-2017 adalah kabupaten Luwu (0,45%), kota Palopo (0,34%), dan kota Pare-Pare (0,26%). Tahun 2017 IPM Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,83% dibanding pertumbuhan nasional sebesar 0,90%.Angka IPM tahun 2017 menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar yaitu dari 81,13 (Makassar), 76,71 (Palopo) dan 76,68 (Pare-pare), Penyebab terjadinya variasi angka tersebut disebabkan sebahagian oleh kondisi sosial, ekonomi, kultural serta geografis yang berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli dari masing-masing daerah.

Tabel II.40
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	63,16	63,66	64,32	64,95	65,39
2	Bulukumba	64,27	65,24	65,58	66,46	67,08
3	Bantaeng	64,88	65,77	66,20	66,59	67,27
4	Jeneponto	60,55	61,45	61,61	61,81	62,67
5	Takalar	62,58	63,53	64,07	64,96	65,48
6	Gowa	65,45	66,12	66,87	67,70	68,33
7	Sinjai	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80
8	Bone	66,06	66,65	67,13	67,76	68,42
9	Maros	65,24	66,16	66,65	66,86	67,25
10	Pangkajene Kepulauan	67,02	67,94	68,64	69,07	69,56
11	Barru	61,40	62,09	63,11	63,86	64,16
12	Soppeng	64,43	64,74	65,33	65,95	66,67
13	Wajo	65,79	66,49	66,90	67,52	68,16
14	Sidrap	67,15	68,14	69,00	69,39	69,84
15	Pinrang	68,14	68,92	69,24	69,42	69,90
16	Enrekang	68,39	69,37	70,03	70,79	71,44

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2013	2014	2015	2016	2017
17	Luwu	66,39	67,34	68,11	68,71	69,02
18	Tana Toraja	64,55	65,08	65,75	66,25	66,82
19	Luwu Utara	66,40	66,90	67,44	67,81	68,35
20	Luwu Timur	69,53	69,75	70,43	70,95	71,46
21	Toraja Utara	65,65	66,15	66,76	67,49	67,90
22	Makassar	79,35	79,94	80,53	80,53	81,13
23	Pare-Pare	75,66	76,31	76,48	76,48	76,68
24	Palopo	75,65	76,27	76,45	76,45	76,71
Sulawesi Selatan		**67,92**	**68,49**	**69,15**	**69,76**	**70,34**

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, ketimpangan IPM antara laki-laki dan perempuan, tertinggi di Kabupaten Toraja Utara dengan ketimpangan mencapai 10,10. Menyusul Kabupaten Takalar dengan ketimpangan 9,28, Toraja 9,23, Gowa 8,97 dan Maros 8,12. Sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sinjai dengan ketimpangan 1,33, Enrekang 1,35, Soppeng 1,75, Kota Palopo 1,90 dan Kota Parepare 1,98.

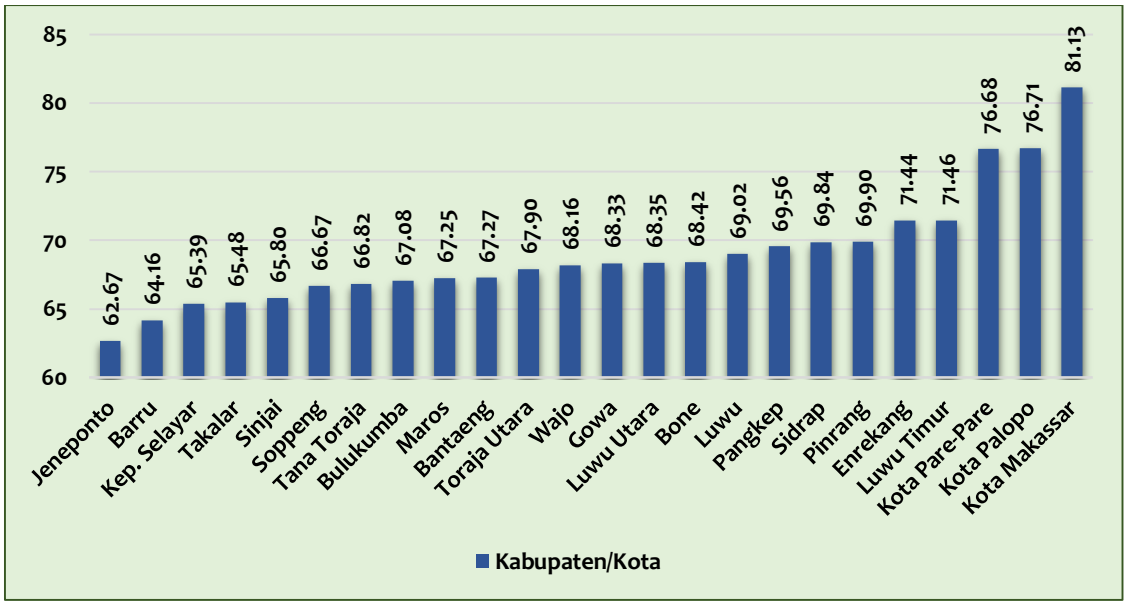
Tabel II.41
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017

Provinsi/Kab/Kota	IPM	
	L	P
Kepulauan Selayar	70.66	64.28
Bulukumba	69.41	67.02
Bantaeng	68.44	65.21
Jeneponto	67.47	61.36
Takalar	70.09	60.81
Gowa	72.84	63.87
Sinjai	66.93	65.60
Maros	73.21	65.09
Pangkajene dan Kepulauan	72.16	64.41
Barru	72.34	69.09
Bone	67.85	62.86
Soppeng	68.12	66.37
Wajo	72.89	65.53
Sidenreng Rappang	73.71	67.97
Pinrang	72.22	68.93
Enrekang	71.99	70.64
Luwu	72.32	66.91
Tana Toraja	72.01	62.78
Luwu Utara	71.99	63.98
Luwu Timur	76.03	68.04
Toraja Utara	72.30	62.20

Provinsi/Kab/Kota	IPM	
	L	P
Kota Makasar	83.28	78.87
Kota Parepare	78.19	76.21
Kota Palopo	78.17	76.27

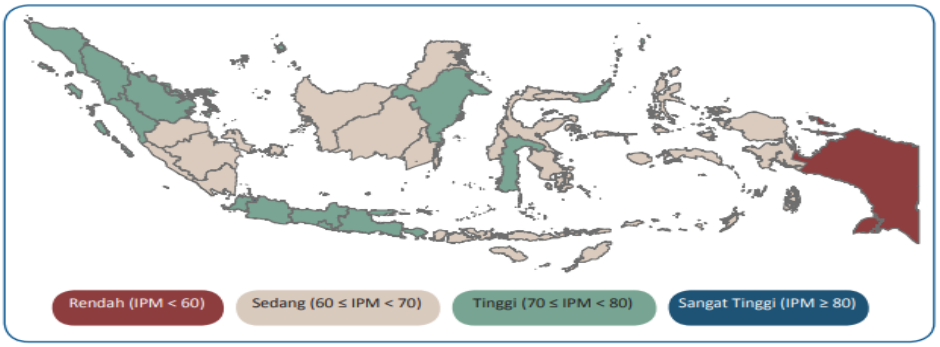
Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Grafik II.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

Gambar II.12
Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari

dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai 90,44% atau sejumlah 9,56% penduduk Sulawesi Selatan yang buta huruf.

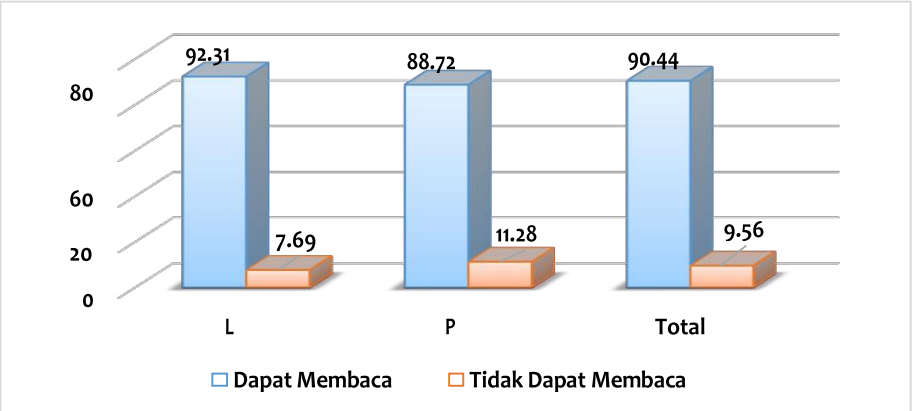
Tabel II.42
Angka Melek Huruf (AMH)
Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	%	89,69	92,81	91,29	91,52	90,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang melek huruf di Sulsel tahun 2017, lebih besar dibanding perempuan. Persentase laki-laki dapat membaca sebesar 92,31% sementara perempuan 88,72%. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 9,56 persen. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Grafik II.5
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Tabel II.43
Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan					
Umur 15+	9,84	8,74	8,71	8,48	8,35
Umur 15-44	3,20	2,58	2,22	2,07	2,03
Umur 45+	23,55	21,44	21,34	20,81	20,28
Nasional					
Umur 15+	6,08	4,88	4,78	4,62	4,50
Umur 15-44	1,61	1,24	1,10	1,00	0,94
Umur 45+	15,15	12,25	11,89	11,47	11,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

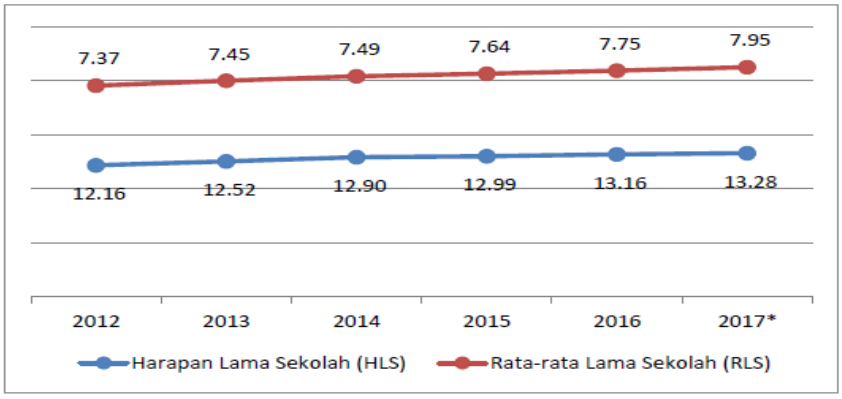
Perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indikator angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Walaupun masih belum tinggi, namun sepanjang periode tahun 2013-2017 rata-rata lama sekolah di Sulawesi selatan terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,65 tahun.

Tabel II.44
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	Tahun	7,45	7,49	7,64	7,75	7,95
Nasional	Tahun	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Grafik II.6
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

Adapun berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki memang masih lebih lama dibandingkan perempuan, dimana laki-laki sudah menikmati pendidikan hingga kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

Dari 24 kabupeten/kota, Kota Makassar, Palopo dan Parepare menduduki peringkat tertinggi yang rata-rata lama sekolahnya lebih lama dibandingkan kabupaten/kota lainnya, baik laki-laki maupun perempaun. Sedangkan yang terendah untuk laki-laki yaitu Jeneponto, Bone dan Takalar, dan untuk perempuan yaitu Jeneponto, Bantaeng dan Wajo.

Tabel II.45
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

Provinsi/Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah	
	L	P
SULAWESI SELATAN	8.31	7.63
Kepulauan Selayar	7.66	6.97
Bulukumba	7.47	7.09
Bantaeng	7.15	6.32
Jeneponto	6.37	5.98
Takalar	7.03	6.55
Gowa	7.95	7.55
Sinjai	7.57	7.03
Maros	7.84	7.16
Pangkajene dan Kepulauan	8.02	6.91
Barru	8.06	7.67
Bone	6.94	6.67
Soppeng	7.57	7.30
Wajo	7.12	6.38
Sidenreng Rappang	7.78	7.34
Pinrang	8.04	7.18

Provinsi/Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah	
	L	P
Enrekang	8.75	8.03
Luwu	7.96	7.69
Tana Toraja	8.49	7.77
Luwu Utara	7.67	7.07
Luwu Timur	8.56	7.94
Toraja Utara	8.37	7.50
Kota Makasar	11.36	10.83
Kota Parepare	10.31	9.90
Kota Palopo	10.54	10.30

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Tujuan mengukur indikator angka HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Grafik menunjukkan bahwa angka HLS mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 13,28.

Tabel II.46
Angka Harapan Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Angka Harapan Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	Tahun	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28
Nasional	Tahun	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Jika dikaitkan antara RLS dan HLS, masyarakat Sulawesi Selatan masih memiliki harapan untuk bisa mengenyam pendidikan hingga sekitar 13 tahun atau hingga bangku kuliah setaraf diploma.

Berdasarkan jenis kelamin, hampir semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, perempuan memiliki Angka Harapan Lama sekolah yang lebih lama dibandingkan laki-laki, kecuali di Kabupaten Jeneponto dan Luwu Utara, dimana laki-laki memiliki Harapan Lama Sekolah yang lebih lama dibandingkan perempuan.

Tabel II.47
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017

Provinsi/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah	
	L	P
SULAWESI SELATAN	12.99	13.59
Kepulauan Selayar	12.38	13.21

Provinsi/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah	
	L	P
Bulukumba	12.35	13.09
Bantaeng	11.77	12.34
Jeneponto	12.00	11.92
Takalar	12.21	12.50
Gowa	12.83	13.46
Sinjai	12.84	13.55
Maros	12.97	13.11
Pangkajene dan Kepulauan	12.37	12.45
Barru	13.46	13.79
Bone	12.40	12.88
Soppeng	12.31	12.83
Wajo	12.83	13.60
Sidenreng Rappang	12.49	13.25
Pinrang	12.31	13.97
Enrekang	13.40	14.14
Luwu	12.81	13.67
Tana Toraja	13.22	13.72
Luwu Utara	12.51	12.23
Luwu Timur	12.73	13.18
Toraja Utara	12.92	13.64
Kota Makasar	14.99	15.77
Kota Parepare	14.07	14.63
Kota Palopo	14.08	15.75

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup

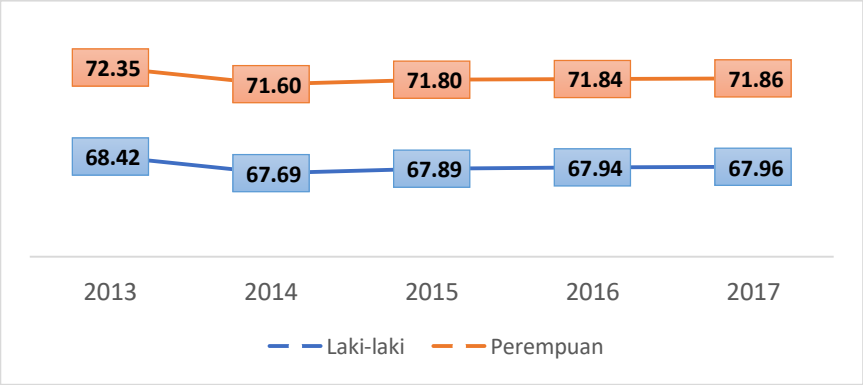
Ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat adalah angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Tolak ukur keberhasilan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat. Selama periode 2013 hingga 2017, secara rata-rata, UHH tumbuh 0,17 persen pertahun. Pada tingkat kabupaten/kota, UHH Toraja Utara (72,94 tahun) merupakan usia tertinggi dibanding 24 kabupaten/kota lainnya. Dengan membaiknya kondisi kesehatan daerah, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2013 angka usia harapan hidup masyarakat di Sulawesi Selatan sebesar 69,50 tahun meningkat menjadi 69,84 tahun pada tahun 2017. Peningkatan angka harapan hidup rata-rata sebesar 0,085 per tahun menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun seorang bayi yang dilahirkan dapat hidup lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.48
Angka Usia Harapan Hidup
Provinsi Sulaatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Angka Usia Harapan Hidup				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	Tahun	69,50	69,60	69,80	69,82	69,84
Nasional	Tahun	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Grafik II.7
Angka Usia Harapan Hidup
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2013-2017



Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018.

Berdasarkan jenis kelamin, meskipun cenderung mengalami penurunan, namun Angka Usia Harapan Hidup perempuan di Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terjadi dari tahun 2013 sampai 2017. Pada tahun 2017, perempuan memiliki Angka Usia Harapan Hidup sampai 71,86 tahun sedangkan laki-laki hanya 67,96 tahun.

Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Angka Usia Harapan Hidup yang tertinggi baik perempuan maupun laki-laki yaitu Kabupaten Toraja Utara 74,79 tahun untuk perempuan dan 70,98 tahun untuk laki-laki. Terendah yaitu Kabupaten Jeneponto 67,52 tahun untuk perempuan dan 63,66 tahun untuk laki-laki.

Tabel II.49
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin 2017

Provinsi/Kab/Kota	Usia Harapan Hidup	
	Laki-laki	Perempuan
SULAWESI SELATAN	67.96	71.86
Kepulauan Selayar	65.78	69.74
Bulukumba	64.94	68.86
Bantaeng	67.94	71.81
Jeneponto	63.66	67.52

Provinsi/Kab/Kota	Usia Harapan Hidup	
	Laki-laki	Perempuan
Takalar	64.37	68.27
Gowa	67.92	71.86
Sinjai	64.60	68.50
Maros	66.71	70.52
Pangkajene dan Kepulauan	63.87	67.74
Barru	66.26	70.22
Bone	64.22	68.11
Soppeng	66.68	70.64
Wajo	64.52	68.42
Sidenreng Rappang	66.78	70.74
Pinrang	66.64	70.60
Enrekang	68.36	72.29
Luwu	67.57	71.52
Tana Toraja	70.59	74.42
Luwu Utara	65.58	69.53
Luwu Timur	67.76	71.70
Toraja Utara	70.98	74.79
Kota Makasar	69.51	73.39
Kota Parepare	68.67	72.60
Kota Palopo	68.28	72.21

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018.

2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja tahun 2017 sebanyak 6.251.377 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 3.812.358 orang dengan komposisi 3.599.663 adalah penduduk yang bekerja dan 213.695 orang penduduk yang menganggur. Dibandingkan Agustus 2016, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 4,50 persen atau terjadi penurunan angkatan kerja sebanyak 68.645 orang angkatan kerja. Demikian juga dengan jumlah orang yang bekerja terjadi penurunan sebesar 5,33 persen atau terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja sebanyak 96.049 orang. Sebaliknya jumlah orang yang menganggur meningkat 12,21 persen atau terjadi penambahan pengangguran sebanyak 27.404 orang penganggur. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus 2017 sebesar 60,98 persen. Sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, TPAK tahun 2017 1,94 persen poin lebih rendah dibandingkan

Agustus 2016. Hal ini menunjukkan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tabel II.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	Orang	3.558.183	3.715.801	3.706.128	3.881.003	3.812.358
Bekerja	Orang	3.376.549	3.527.036	3.485.492	3.694.712	3.598.663
Pengangguran	Orang	181.634	188.765	220.636	186.291	213.695
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.340.470	2.273.948	2.375.747	2.349.137	2.439.019
Penduduk Usia Kerja	Orang	5.898.653	5.989.749	6.081.875	6.124.063	6.251.377
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,49	62,00	60,94	62,92	60,98

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi social yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebesar 5,61% dengan total jumlah pengangguran sebanyak 224.885 jiwa. Pada Februari 2018 tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan mengalami penurunan yaitu 5,39% masih diatas rata-rata nasional sebesar 5,13%.

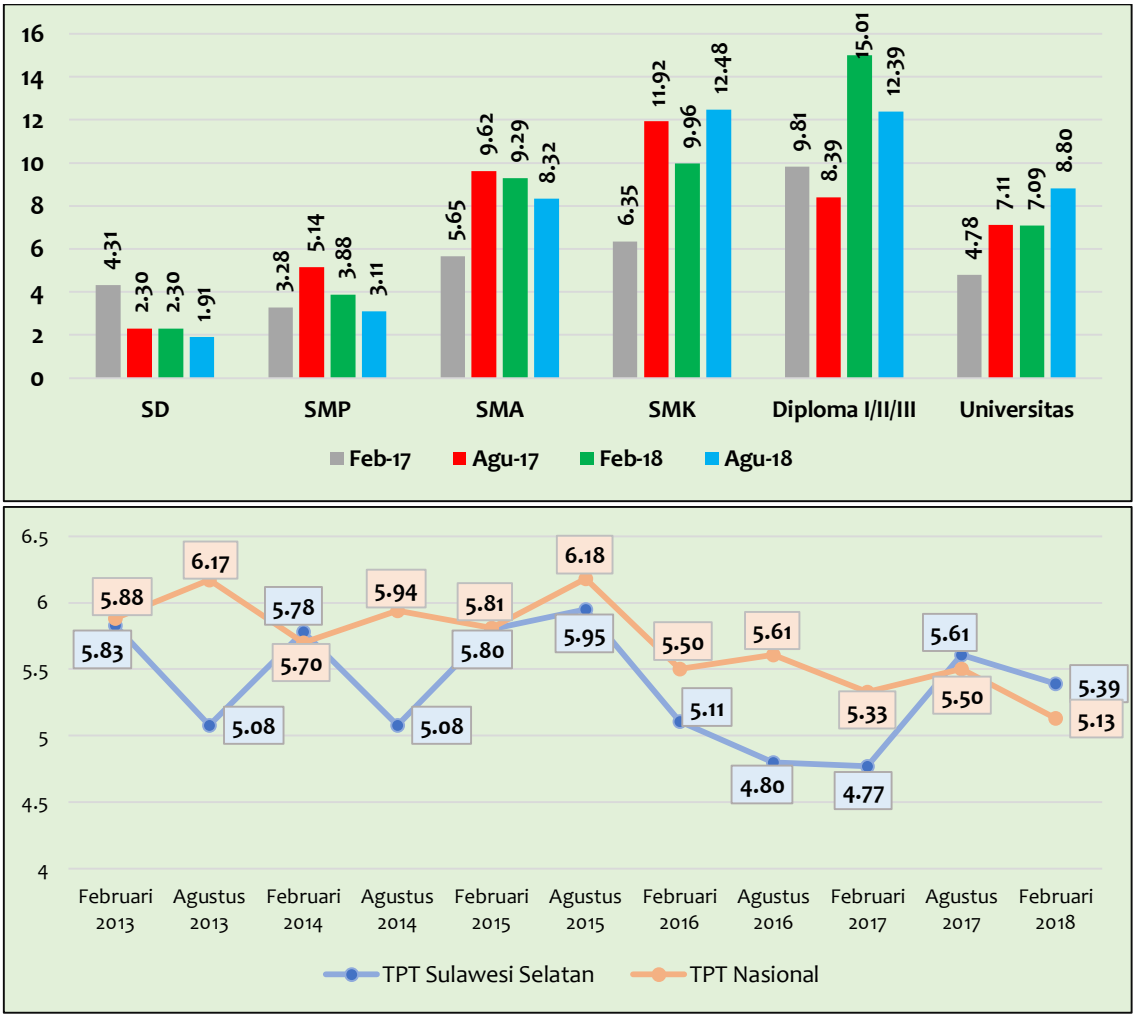
Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang ada belum terserap secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah lulusan angakatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Agustus 2017, TPT Sulawesi Selatan sebesar 5,61%, mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2016 yang besarnya 4,80%. TPT perempuan sebesar 4,98 persen, jauh lebih rendah dibandingkan TPT laki-laki yang besarnya 6,66 persen. Dibandingkan Agustus 2016, TPT laki-laki dan TPT perempuan keduanya juga mengalami kenaikan.

Tabel II.51
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	%	5,10	5,08	5,95	4,80	5,61
Nasional	%	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Grafik II.8
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

Dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2017, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 11,92%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,62%. Dengan kata lain terdapat penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada jenjang pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau

menerima pekerjaan apa saja, sehingga terlihat TPT SD ke bawah paling kecil dibandingkan jenjang lainnya yaitu sebesar 2,30%. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik pada tahun 2016 maupun 2017. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, TPT perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu pada SD dan Diploma.

2.2.2.8 Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Selama periode tahun 2013-2017 penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian walaupun seiring dengan waktu menunjukkan pola cenderung menurun. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja tahun 2017 sebanyak 6.251.377 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 3.812.358 orang dengan komposisi 3.598.663 adalah penduduk yang bekerja dan 213.695 orang penduduk yang menganggur. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 94,39%. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017, penduduk Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 1.391.639 orang (38,67%), disusul oleh sektor perdagangan sebanyak 766.755 orang (21,31%), dan sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 652.899 orang (18,14%).

Tabel II.52
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,90	94,92	94,05	95,20	94,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.9 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mengalami peningkatan menjadi 10,09%.

Tabel II.53
Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	%	9,60	0,35	8,46	1,34	10,09
Nasional	%	5,39	3,31	4,62	1,83	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.10 Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja

Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2017, status pekerjaan yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan (34,12%), diikuti oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (21,43%), dan pekerja keluarga (19,80%).Dalam setahun terakhir (Agustus 2016 hingga Agustus 2017), persentase penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/ pegawai meningkat dari 31,82% pada Agustus 2016 menjadi 34,12% pada Agustus 2017. Peningkatan juga terjadi pada pekerja keluarga dari 18,67% menjadi 19,80%. Sebaliknya penduduk yang berusaha sendiri maupun berusaha dibantu pekerja tidak dibayar mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi melalui status pekerjaan Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas pada sektor pertanian, pekerja bebas pada sektor non pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Sisanya merupakan pekerja formal. Persentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja pada tahun 2017 sebesar 37,26% mengalami peningkatan dari tahun 2016.

Tabel II.54
Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	34,72	35,44	36,86	35,65	37,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan

kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2013 berjumlah 651 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah organisasi 655. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 kemudian persentasenya menurun pada tahun 2017 yaitu nilai 8,31%.

Tabel II.55
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	Organisasi	59	59	59	59	59
Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	651	651	831	695	710
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	9,06	9,06	7,10	8,49	8,31

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Persentase pemuda yang aktif dalam lima tahun terakhir dalam keadaan tetap sehingga pembinaan difokuskan pada 59 organisasi pemuda yang aktif. Hal ini sesuai dengan persyaratan organisasi pemuda yang terdaftar di KNPI. Jumlah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Jumlah organisasi pemuda meningkat sejak tahun 2013 hingga 2017. Namun persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kelembagaan yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga kabupaten/kota belum terbentuk di Sulawesi Selatan.

2.2.3.2 Persentase Wirausaha Muda

Pada tahun 2017 persentase wirausaha muda mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh karena dinamika perekonomian global nasional.

Tabel II.56
Persentase Wirausaha Muda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wirausaha Muda	Orang	200	220	260	200	110
Jumlah Seluruh Wirausaha	Orang	1010	1010	1010	1010	1010
Persentase Wirausaha Muda	%	19,80	21,78	25,74	19,80	10,89

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.3 Cakupan Pembinaan Olahraga

Penambahan jumlah cabang olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebanyak satu cabang olahraga. Jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawsi Selatan sejak tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 50 cabang olahraga.

Tabel II.57
Cakupan Pembinaan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Cabor	15	16	16	16	16
Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Ada/Terdaftar	Cabor	50	50	50	50	50
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	30	32	32	32	32

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2015 hingga 2017 jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami penurunan sebanyak 90 orang. Kecenderungan penurunan jumlah pelatih bersertifikat kemungkinan dipengaruhi oleh persyaratan lisensi sertifikasi yang tidak dapat dipenuhi. Jumlah seluruh pelatih di Sulawesi Selatan mengalami stagnasi dengan jumlah 907 pelatih sejak lima tahun.

Tabel II.58
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	160	200	205	175	110
Jumlah Seluruh Pelatih	Orang	907	907	907	907	907
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	17,64	22,05	22,60	19,29	12,13

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Jumlah atlet binaan dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan sejumlah 90 atlet. Sedangkan jumlah seluruh atlet pelajar di Sulawesi Selatan dari tahun 2013 hingga 2017 tidak mengalami peningkatan jumlah.

Tabel II.59
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Pelajar yang Dibina	Atlet	110	110	115	115	200
Jumlah Seluruh Atlet Pelajar	Atlet	2652	2652	2652	2652	2652
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	4,15	4,15	4,34	4,34	4,34

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.6 Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih berbagai prestasi yaitu :

a. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga antara lain :
   1. Atlet PPLP meraih 4 medali emas, 3 medali perak dan 24 medali perunggu pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Semarang Jawa Tengah.
   2. Atlet PPLP meraih 13 medali emas, 3 medali perak dan 11 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP.
b. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah antara lain :
   1. Atlet PPAPD meraih 5 medali emas, 2 medali perak pada Pekan Olahraga Antar Mahasiswa di Makassar.
   2. Atlet PPAPD meraih 2 medali emas, 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Jawa Timur open.
   3. Atlet PPAPD meraih 1 medali perak pada event Bosowa Maraton.
   4. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas pada Kejuaraan Indonesia Timur.
   5. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Kempo meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada pada event Kejurnas Piala Walikota Tangeran.
   6. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Karate meraih 1 medali perunggu pada event Piala Panglima.

7. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada kejuaraan Gojukai se Selselbar dan Tenggara.
8. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, pada Kejuaraan Silat Antar Periai Putih di Jakarta.

c. Prestasi A Tradisonal/Kemasyarakatan Atlet yang berkebutuhan khusus Sulawesi Selatan pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional menempati urutan ke 12 dengan perolehan medali : 6 medali emas, 5 medali perak dan 4 medali perunggu.

Jumlah atlet berprestasi tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan jumlah 81 atlet pada tahun 2017.

Tabel II.60
Jumlah Atlet Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	50	39	46	76	81

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.7 Jumlah Prestasi Olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Peningkatan kualitas pelatih dan kuantitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Diharapkan agar pemerintah mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan di kabupaten/kota serta menginisiasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk membuat inovasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahrag (SIPOR).

Tabel II.61
Jumlah Prestasi Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	17	18	17	14	16

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Analisis data capaian jumlah prestasi olahraga pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi- Selatan mengalami fluktuasi. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi terbanyak pada tahun 2014 dan dua tahun berikutnya mengalami tren yang menurun. Namun demikian, pada akhir tahun 2017, jumlahnya kembali meningkat akan tetapi belum melebihi prestasi di tahun 2014.

Capaian prestasi sebagaimana yang telah di uraikan pada beberapa tabel di atas adalah hasil dari pembinaan atlet pelajar melalui program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Program Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAPD). Jumlah Cabor yang dibina dari tahun 2013 – 2017 adalah 16 Cabor dan jumlah seluruh cabor yang ada / terdaftar dikomite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan Sebanyak 50 cabor.

2.2.3.8 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 46.717 Km2, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 Kota, dengan jumlah penduduk sesuai data BPS tahun 2018 kurang lebih 8,7 Juta Jiwa, dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk ini melakoni kehidupannya diwarnai/ dipengaruhi oleh 3 Etnis yaitu: Etnis Makassar, Bugis dan Toraja, masing-masing Etnis ini memiliki Kesenia Daerah yang berbeda-beda walaupun dalam pergaulannya sangat kental dan harmonis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membina, melestarikan dan mengembangkan Kesenian Daerah sebagai warisan Budaya, tugas tersebut pada tahun Anggaran 2013 – 2017, telah dilakukan terhadap Seniman melalui Kelompok/Sanggar Seni berupa; memberikan bantuan kepala Kelompok/Sanggar Seni dari Kab/Kota yang bersyarat, dan juga memberikan kesempatan sekaligus menfasilitasi para Pelaku Seni/Sanggar Seni yang berprestasi untuk menampilkan Karya Seninya pada Event-Event Daerah maupun pada Event Nasional.

Daya tarik kesenian daerah Sulawesi Selatan tidak kalah bersaing dengan kesenian daerah provinsi lain, bahkan pada berbagai Event tingkat Nasional Tim Seni Budaya Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan apresiasi ditingkat pusat, termasuk Festival Tari Nusantara di Jakarta tahun 2014 Tim Tari Provinsi Sulawesi Selatan meraih Prestasi sebagai "Penata Rias dan Busana Terbaik" dan pada Event Festival Nasional Teater Anak-Anak 2015 meraih prestasi sebagai "Sutra Dara Terbaik". Seiring dengan perkembangan zaman, dimana para generasi muda sudah sangat mudah mengakses segala jenis kesenian modern melalui berbagai macam media yang dapat merusak mental generasi muda, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah tetap menghidupkan, membina, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya sebagai alat perekat diantara etnis dan menjadi aset daerah.

Tabel II.62
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	16	16	15	19	22

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.9 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan dalam daerah mengalami penurunan dari angka tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 5 buah, pada Tahun 2013 sebesar 3 Buah dan Tahun 2016 turun menjadi 1 Buah, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 3 Buah. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya (Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya) kurang lebih 700 buah, tersebar di 24 Kabupaten/Kota. Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya yang cukup banyak sehingga perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik. Upaya pengelolaan dan pelestariannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannya diperlukan adanya upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Tabel II.63
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	4	5	3	1	3

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.2.3.10 Jumlah Karya Budaya yang direvitalitasi dan Inventarisasi

Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terdapat di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan, yang jumlahnya saat ini baru dapat dicatat oleh seksi Sejarah dan Nilai Tradisional Bidang Sejarah dan Cagar Budaya sebanyak 670 Karya Budaya. Sejak Tahun 2013 hingga 2018 dari jumlah tersebut hanya 44 yang dianggap lengkap datanya dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 44 WBTB Indonesia asal Sulawesi Selatan itu ada 2 yang telah mendapatkan pengakuan Dunia sebagai warisan Dunia oleh UNESCO.

Tabel II.64
Karya Budaya yang direvitalitasi dan Inventarisasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	4	3	3	6	6

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah membandingkan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK untuk SMA/SMK Sederajat secara nasional telah memenuhi standar ideal berdasarkan Indikator Pemerataan dan Perluasan Pendidikan yang pencapaiannya di atas 100 % termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian APK SMA/SMK Sederajat juga telah mencapai target nasional "tuntas paripurna"sejak tahun 2013, mencapai target Millenium Development Goals (MDG's) dan target UNESCO dalam Education For All (EFA), yang memastikan pada tahun 2017, semua anak laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Tabel II.65
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	69,75	78,46	81,28	81,37	81,39
Nasional						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	66,61	74,26	78,02	80,89	82,84

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

APK SMA/SMK/MA/Paket C seperti pada tabel diatas menunjukan peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2013 APM SMA/SMK/MA/Paket C mencapai 69.75% mengalami kenaikan 16.69% pada tahun 2017 yang mencapai 81.37% atau mengalami kenaikan 4.05% setiap tahunnya. Dibandingkan dengan capaian nasional APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2017 Sulawesi Selatan berada dibawah APK Nasional dengan nilai APK 82,84%. Keberhasilan capaian ini karena didukung adanya pertambahan dan perbaikan daya tampung baik melalui pembiayaan APBD maupun APBN (dekonsentrasi) serta dukungan koordinasi dengan stakeholder pendidikan

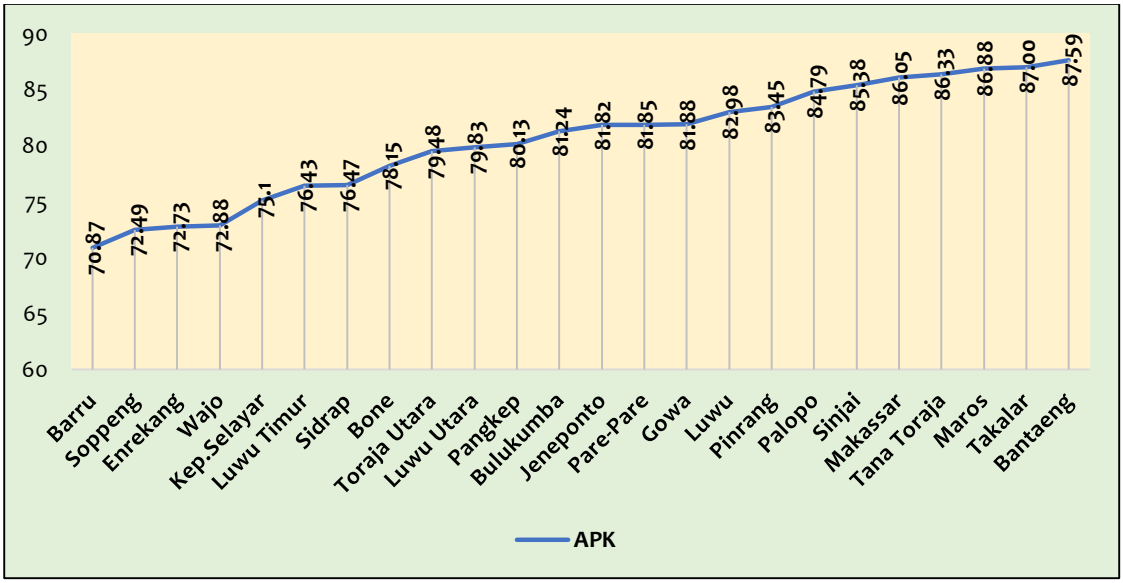
(Kemdikbud, Disdik Kab/Kota dan Satuan Pendidikan). Dari 24 kabupaten/kota APK SMA/SMK/MA/Paket C yang terendah pada tahun 2016 adalah Kabupaten Wajo dengan nilai APK 60,40, sedangkan pada tahun 2017 APK SMA/SMK/MA/Paket C yang terendah adalah Kabupaten Barru dengan nilai APK 70,87% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.66
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	85,19	75,10
2	Bulukumba	79,05	81,24
3	Bantaeng	70,83	87,59
4	Jeneponto	68,82	81,82
5	Takalar	99,77	87,00
6	Gowa	78,70	81,88
7	Sinjai	75,03	85,38
8	Bone	63,76	78,15
9	Maros	76,58	86,88
10	Pangkajene Kepulauan	92,51	80,13
11	Barru	71,82	70,87
12	Soppeng	88,04	72,49
13	Wajo	60,40	72,88
14	Sidenreng Rappang	80,45	76,47
15	Pinrang	84,41	83,45
16	Enrekang	92,33	72,73
17	Luwu	86,64	82,98
18	Tana Toraja	83,90	86,33
19	Luwu Utara	81,61	79,83
20	Luwu Timur	77,24	76,43
21	Toraja Utara	83,61	79,48
22	Makassar	94,98	86,05
23	Pare-Pare	80,56	81,85
24	Palopo	91,28	84,79
Sulawesi Selatan		**81,37**	**81,39**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Grafik II.9
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai salah satu indikator dalam layanan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 47,92% pada tahun 2017 mencapai 70,54%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan SMA/SMK/MA/Paket C tingkat Nasional yang hanya 60,37 pada tahun 2017.

Tabel II.67
Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	47,92	61,48	70,12	70,46	70,54
Nasional						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	54,25	59,35	59,71	59,95	60,37

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Peningkatan ketercapaian APM setiap tahunnya ditingkat provinsi ini, didukung dengan adanya kedisiplinan masyarakat yang patuh dan taat menyekolahkan anaknya sesuai dengan usia sekolah terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Faktor lain

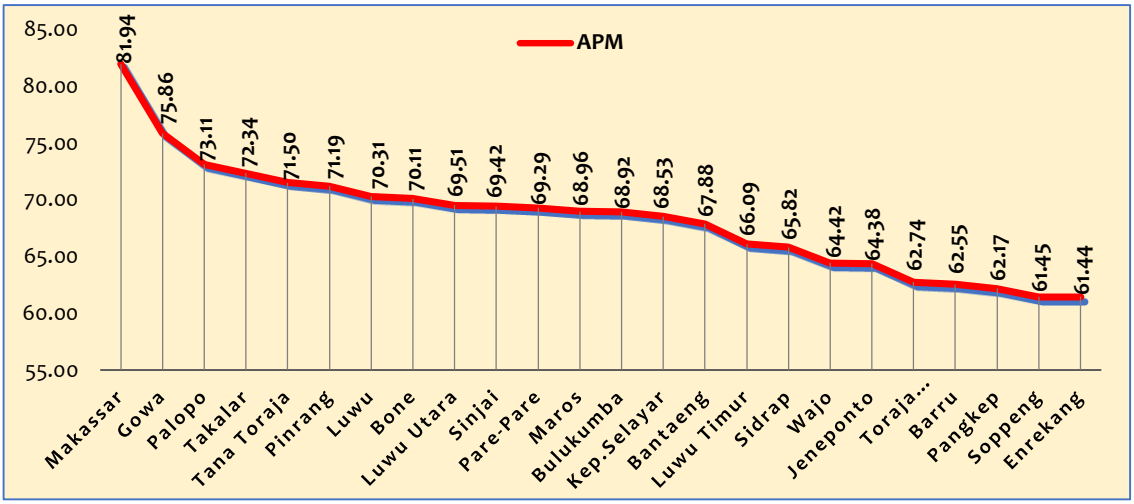
adalah adanya sosialisasi di Kabupaten/Kota dan pada satuan Pendidikan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat/lembaga tentang pentingnya pendidikan dan adanya program perluasaan akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Dari 24 kabupaten/kota APM SMA/SMK/MA/Paket C yang terendah pada tahun 2016 adalah Kabupaten Wajo dengan nilai APM 59,07%, sedangkan pada tahun 2017 APM SMA/SMK/MA/Paket C yang terendah adalah Kabupaten Enrekang dengan nilai APM 61,44% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.68
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	69,35	68,53
2	Bulukumba	63,31	68,92
3	Bantaeng	63,06	67,88
4	Jeneponto	64,42	64,38
5	Takalar	67,70	72,34
6	Gowa	71,00	75,86
7	Sinjai	61,65	69,42
8	Bone	63,06	70,11
9	Maros	68,80	68,96
10	Pangkajene Kepulauan	80,74	62,17
11	Barru	63,92	62,55
12	Soppeng	67,57	61,45
13	Wajo	59,07	64,42
14	Sidenreng Rappang	63,25	65,82
15	Pinrang	63,50	71,19
16	Enrekang	66,46	61,44
17	Luwu	76,54	70,31
18	Tana Toraja	73,26	71,50
19	Luwu Utara	66,08	69,51
20	Luwu Timur	73,09	66,09
21	Toraja Utara	62,02	62,74
22	Makassar	84,93	81,94
23	Pare-Pare	76,94	69,29
24	Palopo	72,81	73,11
Sulawesi Selatan		**70,46**	**70,54**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Grafik II.10
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pada tahun 2013 jumlah murid sekolah usia 16-19 tahun sebesar 304.841 dan meningkat pada tahun 2014 yakni 305.841 namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 304.841 dan terus meningkat hingga tahun 2017 sebanyak 351.422. APS SMA/SMK mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 sebesar 61,66% dan pada tahun 2017 mencapai 71,80%. Capaian APS dari 2013 hingga 2017 trendnya mengalami kenaikan setiap tahunnya rata – rata 4.07% dan atau mengalami kenaikan 16.45% dari tahun 2013 ke tahun 2017. Keberhasilan ini ditunjukan adanya pertumbuhan / keberadaan sekolah khusunya tingkat SM sederajat di daerah yang padat penduduknya, yang terluar dan yang terpencil.

Tabel II.69
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Murid Usia 16-19 Tahun	Orang	304.841	305.841	304.841	317.020	351.422

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	61,66	62,25	71,64	71,70	71,80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

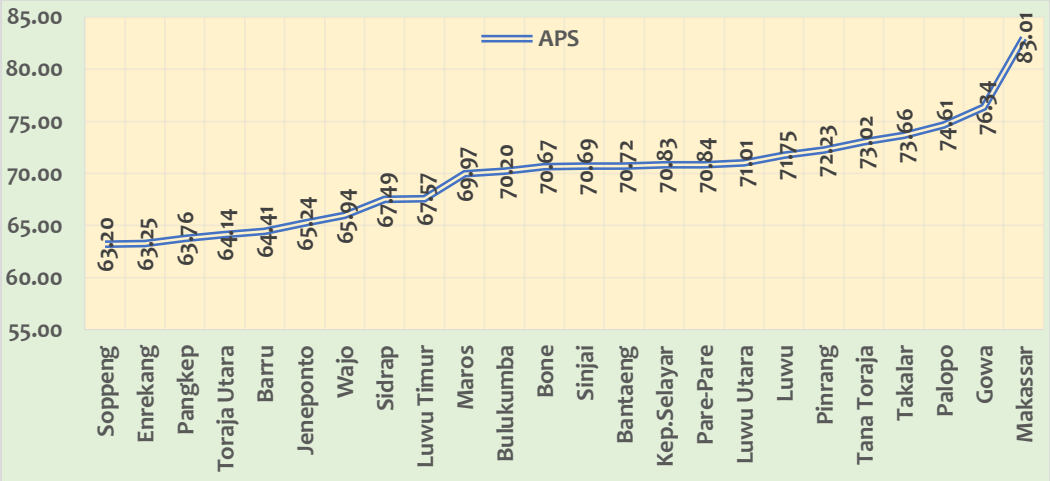
Dari 24 kabupaten/kota APS SMA/SMK/MA/Paket C yang terendah pada tahun 2016 adalah Kabupaten Wajo dengan nilai APS 60,53% dan yang tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai APS 85,3%. Sedangkan pada tahun 2017 APS SMA/SMK/MA/Paket C yang terendah adalah Kabupaten Soppeng dengan nilai APS 63,20% dan yang tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai APS 81,94%.

Tabel II.70
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	71,08	70,83
2	Bulukumba	64,21	70,20
3	Bantaeng	64,72	70,72
4	Jeneponto	65,05	65,24
5	Takalar	69,48	73,66
6	Gowa	71,43	76,34
7	Sinjai	62,82	70,69
8	Bone	63,52	70,67
9	Maros	70,00	69,97
10	Pangkajene Kepulauan	82,68	63,76
11	Barru	65,91	64,41
12	Soppeng	69,41	63,20
13	Wajo	60,53	65,94
14	Sidenreng Rappang	64,90	67,49
15	Pinrang	64,46	72,23
16	Enrekang	68,40	63,25
17	Luwu	78,33	71,75
18	Tana Toraja	75,09	73,02
19	Luwu Utara	67,62	71,01
20	Luwu Timur	75,21	67,57
21	Toraja Utara	73,87	64,14
22	Makassar	85,83	83,01
23	Pare-Pare	78,97	70,84
24	Palopo	74,75	74,61
Sulawesi Selatan		**71,70**	**71,80**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Grafik II.11
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) dimaknai sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (SM sederajat = 16-18 tahun). Diinterprestasikan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Pada tahun 2013 capaian angka putus sekolah = 1,30 mengalami penurunan 1,18 pada tahun 2014 dan turun 1,10 pada tahun 2015. Angka ini menunjukan adanya kondisi pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang semakin baik. Keberhasilan ini didukung adanya pendanaan dana BOS nasional yang setiap tahunnya meningkat dan adanya sebagian daerah (Kab/Kota) menyediakan BOSDA. Namun demikian pada tahun 2016 APTS ini meningkat menjadi 1,19 dan pada tahun 2017 turun menjadi 1,18. Setelah ditelusuri secara saksama kenaikan APtS tahun 2017 itu diakibatkan adanya pengaruh bagi orang tua cenderung anaknya dijadikan tenaga kerja di negara lain untuk mendapatkan pendapatan yang lebih memadai Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu pada tahun sebelumnya dengan jumlah murid pada tahun berikutnya di jenjang pendidikan tertentu dinyatakatan dalam persentase.

Tabel II.71
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Putus Sekolah (APS)				
		2013	2014	2015	2016	2017
SMA/SMK/MA	%	1,30	1,18	1,10	1,19	1,18

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dari 24 kabupaten/kota APtS SMA/SMK/MA yang terendah pada tahun 2016 adalah Kota Makassar dengan nilai APtS 0,59% dan yang tertinggi adalah Kota Pare-Pare dengan nilai APtS 2,53%. Sedangkan pada tahun 2017 APtS SMA/SMK/MA yang terendah adalah Kabupaten Barru dengan nilai APtS 0,54% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Luwu dengan nilai APtS 2,68% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.72
Angka Putus Sekolah (APtS) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (APtS)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	2,22	1,29
2	Bulukumba	1,24	1,11
3	Bantaeng	2,20	1,82
4	Jeneponto	1,36	1,45
5	Takalar	1,14	1,30
6	Gowa	1,04	1,46
7	Sinjai	1,18	1,10
8	Bone	1,20	0,75
9	Maros	1,21	1,24
10	Pangkajene Kepulauan	1,02	2,46
11	Barru	2,09	0,54
12	Soppeng	1,59	1,36
13	Wajo	1,36	1,34
14	Sidenreng Rappang	1,17	2,24
15	Pinrang	1,32	2,09
16	Enrekang	1,54	1,45
17	Luwu	1,14	2,68
18	Tana Toraja	1,31	1,37
19	Luwu Utara	1,10	1,40
20	Luwu Timur	1,34	1,01
21	Toraja Utara	1,44	1,46
22	Makassar	0,59	1,06
23	Pare-Pare	2,53	1,07
24	Palopo	2,19	1,57
Sulawesi Selatan		**1,19**	**1,18**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.1.1.5 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah peserta didik atas ketuntasan criteria dan standar nilai yang ditetapkan. Kondisi angka kelulusan tahun 2013 sampai ke tahun 2014, menunjukan peningkatan dengan capaian 0,23% , namun pada tahun 2015 turun menjadi 96,65% serta di tahun 2016 naik menjadi 100% dan turun kembali pada tahun 2017 dengan capaian 99,95%.

Setiap tahunnya khususnya untuk Ujian Nasional struktur soal yang sering berubah pada tingkat kesukaran/pemahaman. Soal ujian kadang strukturnya lebih banyak pada dimensi pemahaman dan seperti pada soal di tahun 2017 strukturnya lebih banyak ke analisia sehingga kurang kesiapan siswa menghadapi/menelaah soal. Angka kelulusan merupakan persentase kelulusan dalam ujian nasional atau telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia mencapai pendidikan menengah. Angka Kelulusan SMA/MA Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 99,50% pada tahun 2017 mencapai 99,95%. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, pada tahun 2017 Angka Kelulusan (AL) siswa SMA/MA yang terendah adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 99,33%, selanjutnya Kabupaten Soppeng (99,77%), Kabupaten Gowa (99,78%), Kabupaten Takalar (99,83%), Kabupaten Kepulauan Selayar (99,87), Kabupaten Jeneponto (99,89%), Kabupaten Barru (99,93%), Kabupaten Luwu Timur (99,95%), dan Kabupaten Sinjai (99,96%).

Tabel II.73
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Kelulusan (AL)				
		2013	2014	2015	2016	2017
SMA/SMK/MA	%	99,50	99,73	96,65	100	99,95

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.6 Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA/SMK/MA sejak 2013 hingga 2017

mengalami kenaikan yang setiap tahun mencapai rata – rata 7,37% atau mengalami peningkatan 36,78 % dari tahun 2013 hingga 2017. Trend ini menunjukan bahwa minat siswa dari lulusan SMP melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi termotivasi dari pentingnya pendidikan bagi mereka. Selain itu dengan adanya Program Wajib Belajar 12 Tahun mendorong semua stakeholder pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota menjadikan program ini menjadi program prioritas dalam mewujudkan hak layanan dasar masyarakat. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan sebesar 94,65% pada tahun 2017 dari 94,13% pada tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/MA/SMK.

Tabel II.74
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Melanjutkan (AM)				
		2013	2014	2015	2016	2017
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	69,2	87,43	87,46	94,13	94,65

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dari 24 kabupaten/kota Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA yang terendah pada tahun 2016 adalah Kabupaten Enrekang dengan nilai AM 90,38% dan yang tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai AM 95,89%. Sedangkan pada tahun 2017 AM yang terendah adalah Kabupaten Luwu Timur dengan nilai AM 88,00% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.75
Angka Melanjutkan (AM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	95,89	90,27
2	Bulukumba	95,14	93,76
3	Bantaeng	95,29	94,36
4	Jeneponto	95,30	90,14
5	Takalar	96,41	90,60
6	Gowa	95,32	89,86
7	Sinjai	94,10	93,11
8	Bone	93,20	90,42
9	Maros	93,04	99,66
10	Pangkajene Kepulauan	91,08	93,36
11	Barru	94,13	103,73
12	Soppeng	91,80	93,71
13	Wajo	93,36	92,94
14	Sidenreng Rappang	94,55	91,17

No	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2016	2017
15	Pinrang	93,09	105,61
16	Enrekang	90,38	91,56
17	Luwu	90,45	119,42
18	Tana Toraja	92,64	83,97
19	Luwu Utara	91,96	96,16
20	Luwu Timur	93,57	88,00
21	Toraja Utara	94,68	87,90
22	Makassar	94,75	88,64
23	Pare-Pare	94,05	96,68
24	Palopo	92,98	116,59
Sulawesi Selatan		**94,13**	**94,65**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.1.1.7 Rasio Guru/Murid per Kelas Pendidikan Menengah

Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sebaliknya nilai rasio yang rendah menunjukan adanya penguasan kelas yang lebih sehingga mutu pengajaran cenderung membaik. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang/tingkat Sekolah menengah (SM) sederajat cenderung rasio menurun dari tahun ke tahun menunjukan adanya mutu pengajaran yang baik. Capaian menunjukan satuan pendidikan pada jenjang SM sederajat telah menjalankan program manajemen berbasis sekolah (school based management) dengan memperhatikan ketentuan Standar Proses (PBM) dan Standar Pengelolaan (Sekolah) yang termaktub dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Rasio murid dan guru bervariasi pada setiap jenjang, paling tinggi pada jenjang SMA yaitu 1:12. Semakin tinggi nilai rasio, semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru. Rendahnya rasio murid dan guru dapat terjadi karena membludaknya perekrutan guru di Sulsel. Pemerintah perlu memperketat kualifikasi calon guru agar kebutuhan guru tidak hanya terpenuhi secara kuantitas. Rasio guru terhadap murid di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 mengalami perbaikan, bahkan rasio ini terlihat lebih baik dari angka ideal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah dimana pada tahun 2013 rasio guru terhadap murid pada tingkat SMA/MA 1:30 sementara pada tahun 2017 sebesar 1:12. Rasio guru murid pada kedua jenjang tersebut rata-rata masih dibawah 30, yang berarti bahwa proses belajar mengajar masih berlangsung secara optimal.

Tabel II.76
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:30	1:28	1:13	1:12	1:12

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.8 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah (SM) Sederajat

Ratio Guru/Murid perkelas rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah guru pada satuan pendidikan (SM sederajat) per kelas dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan (SM sederajat). Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi penguasaan kelas oleh guru semakin tidak efektif. Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan akan tetapi menunjukan pengelolaan kelas yang semakin efektif. Dengan angka capaian yang menunjukan pada satuan pendidikan (SM sederajat) mengatur jumlah kelompok belajar sesuai ketentuan Standar Sarana Prasaran Pendidikan sehingga penguasaan materi bagi siswa memperlihatkan kompetensinya dan bagi guru dapat memperlihatkan penguasaan bahan ajar/materi.

Tabel II.77
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah (SM) Sederajat	1:30	1:28	1:13	1:12	1:12

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.9 Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan program keaksaraan fungsional yang membimbing masyarakat untuk berkemampuan menguasai keterampilan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) menunjukan trend yang signifikan, dimana setiap tahunnya ada peningkatan atau rata setiap tahun mengalami peningkatan 1,54%, atau dari tahun 2013 mengalami kenaikan 6,78 % ke tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatan Indek pembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.

Tabel II.78
Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	88,50	90,00	91,78	93,01	94,06

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.10 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013-2017, pada tahun 2013 jumlah guru yang memenuhi sebanyak 72,57% kemudian naik pada dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 sejumlah 91,80%.

Tabel II.79
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	72,57	73,90	79,59	98,99	91,80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dari 24 kabupaten/kota persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV yang terendah pada tahun 2016 adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah 98,17% dan yang terbanyak adalah Kota Makassar dengan jumlah 99,44%. Sedangkan pada tahun 2017 persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 88,39% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.80
Kualifikasi Guru S1/D-IV Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	98,17	89,49
2	Bulukumba	98,74	91,58
3	Bantaeng	98,46	95,22
4	Jeneponto	98,65	94,79
5	Takalar	98,57	92,31
6	Gowa	98,66	92,93
7	Sinjai	98,57	92,60
8	Bone	98,78	90,23
9	Maros	98,66	91,01
10	Pangkajene Kepulauan	98,48	89,13
11	Barru	98,45	93,79
12	Soppeng	99,07	94,27
13	Wajo	98,50	92,62
14	Sidenreng Rappang	98,38	92,08
15	Pinrang	98,92	92,85
16	Enrekang	98,74	96,09
17	Luwu	98,58	89,95
18	Tana Toraja	98,49	88,39
19	Luwu Utara	98,82	93,20
20	Luwu Timur	98,64	91,54
21	Toraja Utara	98,81	91,59
22	Makassar	99,44	91,17
23	Pare-Pare	98,87	91,11
24	Palopo	99,07	92,01
Sulawesi Selatan		**98,99**	**91,80**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas) angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan

tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel II.81
Angka Kematian Bayi (AKB)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	1.012	1.113	1.167	1.183	1.059

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 angkanya mencapai 1.012 kasus, selanjutnya naik pada tahun 2014 menjadi 1.113 kasus, dan tahun 2015 angka kematian bayi kembali naik yakni 1.167 kasus hingga tahun 2016 mencapai 1.183 kasus. Pada tahun 2017 angka kematian bayi turun menjadi 1.059 kasus. Tahun 2013 – 2017 cakupan Kematian Bayi berada pada posisi stagnan namun menurun pada akhir tahun, perbedaan/gap antara target dan cakupan disebabkan oleh penetapan target yang agak rendah, sehingga sulit dicapai. Penurunan angka kematian bayi ini terjadi setelah mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita

Kasus kematian Balita dari tahun 2013 sampai 2017, cenderung meningkat namun terjadi penurunan pada akhir tahun 2017. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phemonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat.

Tabel II.82
Angka Kematian Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	1.157	1.201	1.265	1.303	1.151

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.3 Angka Kematian Neonatal

Tahun 2013 hingga tahun 2017 cakupan kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Kematian neonatal dari tahun 2013 hingga 2017 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

Tabel II.83
Angka Kematian Neonatal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Kasus	813	762	936	887	818

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibudisebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya.Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global.AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus kematian ibu pada tahun 2013 sebesar 108 kasus, dengan penyebab perdarahan 32 kasus (29,63%), hipertensi dalam kehamilan 41 kasus (37,96%), infeksi 2 kasus (1,85%), abortus 4 kasus (3,70%), partus lama (0,93%) dan lain-lain 28 kasus (25,93%). Sedangkan pada tahun 2014 kasus kematian ibu meningkat menjadi 138 kasus, dengan penyebab perdarahan 44 kasus (40,34%), hipertensi dalam kehamilan 55 kasus (50,93%), infeksi 3 kasus (2,78%), gangguan system peredaran darah 2 kasus (1,85%), dan lain-lain 34 kasus (31,48%). Pada tahun 2015 kasus kematian ibu sebesar 149 kasus dengan penyebab perdarahan 58 kasus (38,93%), hipertensi dalam kehamilan 39 kasus (26,17%), infeksi 6 kasus (4,03%), gangguan system peredaran darah 11 kasus (7,38%), lain-lain 34 kasus (22,82%), dan gangguan metabolic 1 kasus (0,67%). Pada tahun 2016 kasus

kematian ibu sebesar 156 kasus dengan penyebab perdarahan 45 kasus (28,85%), hipertensi dalam kehamilan 53 kasus (33,97%), infeksi 8 kasus (5,13%), gangguan system peredaran darah 7 kasus (4,49%), lain-lain 41 kasus (26,28%), dan gangguan metabolic 2 kasus (1,28%). Jika melihat data tersebut dari tahun 2013 hingga 2016 terjadi peningkatan kasus hal ini disebabkan:

1. Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil, bulin dan nifas;
2. Belum semua tenaga kesehatan penolong persalinan memiliki skill penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal;
3. Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik ketersediaan alat maupun tenaga terlatih yang sudah tidak lengkap lagi, yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat karena adanya tenaga yang melanjutkan Pendidikan ataupun mutase tenaga.
4. Belum semua RS di kabupaten/kota memiliki Bank Darah;
5. Sistem rujukan belum seluruhnya berjalan optimal;
6. Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes);
7. Faktor 3 terlambat (terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan.
8. Terdapat beberapa Kabupaten yang belum melaksanakan ANC terstandar dikarenakan fasilitas yang belum memadai terkait pemeriksaan laboratorium khusus;
9. Belum semua tenaga kesehatan menerapkan ANC sesuai standar dan terpadu (10T).
10. Masih kurangnya koordinasi antar penolong persalinan sehingga data kesehatan ibu hilang atau tidak lengkap.

Pada tahun 2017 jumlah kematian ibu menurun menjadi 115 kasus dari 165 kasus kematian pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penyediaan alat pada puskesmas PONED/puskesmas perawatan sudah mulai dilengkapi, tersedianya Bank Darah RS hamper di 24 kabupaten/kota, dan system rujukan sudah mulai berjalan walaupun belum optimal.

Tabel II.84
Angka Kematian Ibu (AKI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	108	138	149	156	115

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tahun 2013-2017mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Provinsi Sulawesi Selatan relative meningkat. Pada tahun 2013, jumlah posyandu sebanyak 9.414 unit, meningkat menjadi 9.754 unit pada tahun 2017. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2013 sebanyak 656.298 jiwa, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 863.350 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2013

adalah 14,34 per 1000 balita dan menjadi 11,30 per 1000 balita pada tahun 2017. Permasalahan dalam fungsi pelayanan posyandu diantaranya:

a. Masyarakat tidak membawa balitanya kembali ke Posyandu setelah imunisasi dasarnya lengkap;
b. Pelayanan posyandu kurang inovatif;
c. Keterlibatan lintas sektor (Tim Pokjanal Posyandu) kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

Tabel II.85
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Posyandu	Unit	9.401	9.657	9.592	9.710	9.754
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Per 1000 balita	11,79	11,74	12,70	12,23	11,30

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 75 Tahun 2014 tentang persyaratan Puskesmas pada Pasal 9, dijelaskan bahwa pada setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas, dan dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Sementara berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan. Sehingga dalam hal ini tidak ada penetapan rasio jumlah penduduk per puskesmas, mengingat kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah berbeda-beda termasuk luas wilayah pada kabupaten/kota tersebut serta mempertimbangkan ketersediaan SDM kesehatan sesuai kompetensi pada PMK Nomor 75 Tahun 2014.

Tabel II.86
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas	Unit	440	446	448	448	451
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	23,17	22,64	21,28	22,63	20,37

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.7 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu rumah sakit. Pada tahun 2013, jumlah rumah sakit sebanyak 32 unit dan pada tahun 2017

jumlah rumah sakit bertambah menjadi sebanyak 36 unit. Sedangkan rasio rumah sakit persatuan penduduk selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuasi yang rendah. Pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2017 berkembang mengikuti trend pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2017 berkembang mengikuti trend pertumbuhan penduduk. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk sebesar 1,03 pada tahun 2017 memperlihatkan besarnya beban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, beberapa rumah sakit Daerah bahkan memiliki beban lebih besar. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu pelayanan serta sulitnya masyarakat mengakses pelayanan rumah sakit yang cepat.

Sejak berlakunya JKN pada tahun 2014, kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan rumah sakit semakin meningkat. Trend kebutuhan pelayanan tersebut menyebabkan beberapa pihak swasta mendirikan rumah sakit untuk menangkap peluang tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 trend pertumbuhan rumah sakit relatif meningkat karena fenomena JKN tersebut, khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Makassar. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesungguhnya lebih banyak berpengaruh oleh waktu tempuh dibandingkan karena jarak tempuh, menyebabkan beberapa daerah yang secara geografis memiliki wilayah yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, maka ratio rumah sakit terhadap jumlah penduduk harus ditingkatkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan akses penduduk terhadap pelayana rujukan.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus melakukan kajian dalam menyediakan layanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan akses masyarakat. Meskipun pertumbuhan rumah sakit mulai terasa sejak 2014, tetapi angka tersebut didominasi oleh rumah sakit swasta. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses tersebut.

Tabel II.87
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	Unit	3	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru Dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	Unit	6	6	6	5	6
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/ Polri	Unit	7	7	7	7	7
Jumlah Rumah Sakit Pemprov, Pemkab dan Pemkot	Unit	32	32	32	34	32
Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	43	44	46	45	51

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	Unit	91	91	93	93	98
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,09	1,08	1,09	1,08	1,03

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sejak berlakunya era JKN, akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat semakin meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada. Secara geografis, beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki kepadatan penduduk yang rendah karena wilayahnya luas dengan jumlah penduduk sedikit sehingga jumlah sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan sarana pelayanan kesehatan yang berdasarkan rasio jumlah penduduk hanya melihat dari jarak tempuh tanpa mempertimbangkan waktu tempuh menjadi penyebab sulitnya masyarakat mengakses sarana pelayanan kesehatan. Perlunya ditingkatkan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan rujukan seharusnya diimbangi dengan kualitas pelayanan, khususnya RS Pemerintah. Rerata BOR untuk seluruh rumah sakit pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar 51,08% dan rumah sakit swasta sebesar 67%, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih lebih memilih ke rumah sakit swasta dibanding rumah sakit pemerintah. Perlu upaya peningkatan manajemen pelayanan dan kualitas SDM di rumah sakit pemerintah sesuai standar pelayanan yang berlaku.

2.3.1.1.8 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2013 jumlah dokter 1.186 orang dengan rasio 14,22% dan pada tahun 2017 jumlah dokter meningkat menjadi 1.334 orang dokter dengan rasio 14,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2013-2017 belum sebanding dengan pertambahan penduduk. Distribusi tenaga kesehatan belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Kabupaten/Kota. Redistribusi tenaga kesehatan belum dapat diatur oleh stakeholder terkait di Kab/Kota (Dinkes Kab/Kota, BKD Kabupaten/Kota). Pengangkatan tenaga kesehatan tidak sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.

Tabel II.88
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Dokter Umum	Jiwa	1.462	1.456	1.413	1.356	1.341
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.342,047	8.432,163	8.520,345	8.606,375	9.522.503

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	17,53	17,27	16,58	15,76	14,08

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.9 Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Pemenuhan Rasio tenaga kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini karena adanya upaya yang dilakukan untuk pemenuhan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi, dan tenaga ahli teknologi laboratorium medis).

Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan rawan bencana serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di daerah tersebut selalu berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan dengan berbagai macam alas an yang mereka ajukan. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan melakukan penugasan khusus namun beberapa daerah tetap kosong peminat untuk bertugas didaerah tersebut. Jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu dari 2.097 orang pada tahun 2013 menjadi 3.596 orang pada tahun 2017. peningkatan jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami peningkatan 25,14 pada tahun 2013 menjadi 37,76 per 100.000 penduduk pada tahun 2017.

Tabel II.89
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tenaga Medis	Jiwa	2.994	3.111	4.089	3.581	3.590
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.342,047	8.432,163	8.520,345	8.606,375	9.522.503
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	35,89	36,89	47,99	41,61	37,70

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Distribusi tenaga kesehatan belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Kabupaten/Kota. Re-distribusi tenaga kesehatan belum dapat diatur oleh stakeholder terkait di Kab/Kota (dinkes Kab/Kota, BKD Kabupaten/Kota). Pengangkatan tenaga kesehatan tidak sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.

2.3.1.1.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013 sebesar 64,99% masih ada sekitar 35,01% yang tidak ditangani, tahun 2014 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 71,65% masih ada sekitar 28,35% yang tidak ditangani, tahun 2015 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 79,21% masih ada sekitar 20,79% yang tidak ditangani,t ahun 2016 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 76,48% masih ada sekitar 23,52% yag tidak ditangani dan pada tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 81,84% masih ada sekitar 18,16% yang tidak ditangani. Jika melihat data tersebut penanganan komplikasi kebidanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan hal ini disebabkan tenaga kesehatan telah melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB Pasca Persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir. Beberapa permasalahan yang dihadapi :

1. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan (belum optimalnya pemahaman tentang 3 Terlambat);
2. Skrining deteksi resiko tinggi bagi ibu hamil belum maksimal;
3. Pelaksanaan ANC sesuai standar (10 T), berkualitas dan terpadu belum terlaksana secara maksimal.

Data rekapitulasi Kabupaten/Kota cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani secara defenitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan berkompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan tahun 2013 hingga tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Tahun 2013, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 64,99%, meningkat menjadi 71,65% di tahun 2014 dan 79,21% pada tahun 2015. Namun pada akhir tahun 2016 menurun menjadi 76,48%. Sampai dengan tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 79,95%. Hal ini menunjukkan masih perlunya ditingkatkan upaya yang mendukung peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu yang sesuai standar di Sulawesi Selatan khususnya dalam penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sesuai kompetensinya. Terlambat dalam pengambilan keputusan, Skrining Deteksi Resiko Tinggi bagi ibu hamil belum maksimal serta Pelaksanaan ANC sesuai standar (10 T), berkualitas dan terpadu belum terlaksana secara maksimal menjadi permasalahan dalam pelayanan komplikasi dalam persalinan.

Tabel II.90
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	64,99	71,65	79,21	76,48	81,84

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.11 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2013 sebesar 92,74% berarti ada sekitar 7,26% yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Tahun 2014 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,79% dan yang ditolong oleh non kesehatan sekitar 7,21%. Tahun 2015 cakup pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,02% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 5,98%. Tahun 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,90% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 7,1% dan tahun 2017 cakuoan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,05% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 5,95%. Jika melihat cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan namun capaian pada tahun 2016 menurun hal ini disebabkan karena adanya ibu hamil yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan dan pertolongan bukan oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya jarak dengan fasilitas kesehatan, alat transportasi, letak demografi daerah dan pengetahuan mencari penolong persalinan yang aman dan pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan dalam meminta bantuan penolong persalinan.

Pada tahun 2017 capaian persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 94,05%, hal ini disebabkan Kabupaten/Kota telah melaksanakan permenkes 97 tahun 2014 tentang pelayanan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, menyelenggarakan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual yang terdapat pada bagian ketiga pasal 14 ayat 1 yaitu persalinan harus dilakukan di fasilitasi kesehatan, namun secara umum penyebab masih adanya persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesheatan adalah :

1. Masih adanya persalinan yang dilakukan dirumah karena kondisi wilayah yang terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan serta adanya pengaruh budaya (kepercayaan) yang dianut oleh masyarakat.
2. Masih terdapat tenaga penolong persalinan yang belum melaksanakan asuhan persalinan sesuai standar.

Selain kesehatan ibu hamil, proses persalinan yang tepat turut berperan dalam melahirkan generasi yang sehat. Persentase perempuan pernah kawin yang melahirkan anak lahir hidup dengan ditolong oleh tenaga kesehatan telah mencapai 95,31% pada

tahun 2017. Beberapa kabupaten/kota bahkan telah 100 persen menggunakan tenaga kesehatan.Cakupan kunjungan ibu bersalin yang memperoleh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.91
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	92,74	92,79	94,02	92,90	94,05

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Masih adanya persalinan yang dilakukan di rumah dikarenakan kondisi wilayah yang terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan serta adanya pengaruh budaya (kepercayaan) yang dianut oleh masyarakat. Masih terdapat tenaga penolong persalinan yang belum melaksanakan asuhan persalinan sesuai standar.

2.3.1.1.12 Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) selama 5 (Lima) tahun cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2013 capaian UCI sebesar 90,50% meningkat menjadi 96,45% pada tahun 2017. Hal ini menunjukan gencarnya upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai dan mempertahankan status imunisasi masyarakat yang lengkap sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat. Namun masih ditemukannya permasalahan di lapangan, dimana terdapat cakupan pemberian imuniasi untuk beberapa kabupaten/kota masih dibawah target. Hal ini disebabkan beberapa hal di antaran lain :

1. Terdapat wilayah yang sulit dijangkau dan keterbatasan alat transportasi terutama di daerah pulau dan adanya mutase petugas di Puskesmas dan Kabupaten;
2. Perbedaan data sasaran pusdatin yang jauh selisih dengan data riil Kabupaten/Kota.;
3. Adanya kelompok-kelompok penolokan terhadap imunisasi;
4. Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar.

Cakupan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat tahun berturut turut (tahun 2013-2017) menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 87,1% meningkat menjadi 90,5% di tahun 2013, ditahun 2014 kembali meningkat menjadi 94,98% dan mencapai 95,28% pada tahun 2015. Namun data Sampai dengan bulan Desember tahun 2017 menunjukkan Cakupan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,45%, tercatat dari 3.027 Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah mencapai UCI sebanyak 2.884 Desa/Kelurahan.

Tabel II.92
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/ Kel	2.729	2.873	2.884	2.855	2.933
Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Desa/ Kel	3.107	3.025	3.027	3.029	3.041
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90,50	94,98	95,28	94,26	96,45

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.13 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tahun 2018, proporsi status gizi buruk nasional sejumlah 3,9% dan status gizi kurus mencapai 6,7% dan sangat kurus mencapai 3,5%. Jumlah balita gizi buruk yang terbanyak di Sulawesi Selatan adalah di Kabupaten Wajo sejumlah 19 kasus, Kabupaten Bone sejumlah 14 kasus dan Kota Makassar sejumlah 11 kasus. Cakupan balita gizi buruk di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;
2. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
3. Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
4. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesamas.

Adapun kendala yang ditemukan adalah:

1. Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sectoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifactor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tetapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air Bersih (Intervensi Sensitif dan Spesifik);
2. Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi tidak optimal;
3. Banyak orang tua penderita gizi buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk melalui rawat inap.

Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari apek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dll (Intervensi Sensitif dan Spesifik). Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi

tidak optimal. Banyak Orang Tua Penderita Gizi Buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk melalui rawat inap.

Tabel II.93
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	255	229	184	156	138
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	255	229	184	156	138
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.14 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini antara lain didukung oleh upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi kepada 24 Kabupaten/Kota. Diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan. Pelaksanaan imunisasi campak pada kelompok sasaran di Provinsi Sulawesi Selatan, masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Adanya kelompok-kelompok penolakan terhadap imunisasi;
2. Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar.

Salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan bayi adalah imunisasi, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Sulsel tahun 2017 sebesar 102%. Persentase tertinggi adalah Kota Pare-Pare sebesar 120%, sementara Kepulauan Selayar hanya 90%.

Tabel II.94
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	99,6	99,4	98,4	101	102

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.15 Non Polio AFP Rate

Pelacakan kasus lumpuh layu di kabupaten/kota sangat ditentukan oleh SDM yang ada. Kasus lumpuh layu didapatkan dari rumah sakit dan masyarakat. Permasalahan dalam penemuan kasus lumpuh layu adalah:

1. Tenaga klinis tidak pernah dilatih tentang surveilans lumpuh layu/AFP;

2. Keterbatasan anggaran;
3. Pemeriksaan specimen tinja kasus AFP masih dikirim ke BBLK Surabaya sebagai laboratorium rujukan nasional;
4. Penemuan kasus AFP di rumah sakit sangat rendah karena dokter spesialis belum tersosialisasi program surveilans AFP.

Tenaga klinisi tidak pernah dilatih tentang surveilans Lumpuh Layu/AFP. Pemeriksaan spesimen tinja kasus AFP masih dikirim ke BBLK Surabaya sebagai laboratorium rujukan nasional. Penemuan kasus AFP di rumah sakit sangat rendah karena dokter spesialis belum tersosialisasi program surveilans AFP.

Tabel II.95
Non Polio AFP Rate
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,92	2,08	1,60	1,60	1,96

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.16 Cakupan Balita Pneumonia

Cakupan balita pneumonia yang ditangani tahun 2013 sebanyak 1,89%, tahun 2014 sejumlah 10,04%. Capaian yang sangat rendah disebabkan karena petugas ISPA di tingkat Puskesamas belum mendapatkanpelatihan tentang pelaksanaan kegiatan program ISPA dan tatalaksana Pnemonia/ISPA. Capaian di tahun 2015 sebanyak 10,01%, tahun 2016 sebanyak 18,24%, dan tahun 2017 sebanyak 19,04% dimana target 2015-2017 yaitu 9,7% dimana petugas kabupaten/kota dan puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi tatalaksana ISPA sesuai standar sehingga cakupan yang diperoleh diatas target provinsi, artinya capaian 2015-2017 sudah melebihi target provinsi yaitu 9,7%. Tingginya tingkat mutasi di daerah yang berimbas pada pengelola program baik di Kabupaten/Kota maupun di tingkat Puskesmas sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan program di daerah. Dukungan Sumberdaya (SDM, bahan KIE serta sarana dan prasarana) yang tersedia masih terbatas, masih lemahnya koordinasi antar Program, Dokter, Pengelola Program dan Petugas MTBS serta program lain.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Petugas ISPA di tingkat Puskesmas belum mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan program ISPA dan tatalaksana Pnemonia/ISPA;
2. Tingginya tingkat mutase di daerah yang berimbas pada pengelola program baik di kabupaten/kota maupun di tingkat Puskesmas sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan program di daerah;
3. Dukungan Sumber Daya (SDM, Bahan KIE serta sarana dan prasarana) yang tersedia masih terbatas, masih lemahnya koordinasi antar Program, Dokter, Pengelola Program dan Petugas MTBS serta program lain.

Tabel II.96
Cakupan Balita Pneumonia
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	1,89	10,04	10,01	18,24	19,04

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.17 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penderita TBC BTA yang ditemukan dan diobati. Pada tahun 2013 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA50,80% dan meningkat pada tahun 2014 52,70%, kemudian menurun hingga tahun 2016 43,90%. Tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatanmencapai46,00%. Tentunya perlunya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kondisi lingkungan sekitarnya serta belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*). Dalam upaya penemuan dan penanganan pasien TBC dibutuhkan strategi yang tepat yaitu startegi DOTS. Pengobatan TBC yang diberikan di fasilitas kesehatan DOTS dilakukan secara gratis oleh pemerintah dengan pendampingan yang dilakukan oleh PMO selama 6 bulan masa pengobatan hingga tuntas. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam system pelaporan program TBC;
2. Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai standar ISTC.

Tabel II.97
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa	8.929	8.859	8.191	7.139	7.890
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jml	12.208	16.949	17.518	17.518	26.919
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	50,80	52,7	48,3	43,9	46

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.18 Tingkat Prevalensi Tuberkolosis

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013-2015. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan keshatan dan dilaporkan di program terus meningkat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pada tahun 2016 tidak meningkat adalah :

1. Belum adanya kewajiban pelaporan dari Rumah Sakit dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*);
2. Sebagian besar Kab/Kota belum mengembangkan jejaring eksternal dalam program TBC;
3. Jejaring internal rumah sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus TBC yang ditemukan di beberapa poli rumah sakit tidak tercatat dan terlaporkan dengan baik di unit DOTS rumah sakit;
4. Beberapa fasilitas kesehatan swasta belum menjalankan program TBC dengan strategi DOTS.

Tabel II.98
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 penduduk	146	152	156	156	197

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.19 Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis

Laporan kematian yang masuk tidak semua penyebab utamanya adalah Tuberkulosis. Data tahun 2017 akan bisa dievaluasi 1 tahun setelah pengobatan (kohor pengobatan). Angka kematian pada penderita TBC pada tahun 2013-2016 relatif sama, namun pada tahun 2017 turun menjadi 3 per 100.000 penduduk. Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi antara tahun 2013-2016:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC.
2. Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kseshatan karena sigma yang masih ada dia masayarakat.
3. Pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

Tabel II.99
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian karena Tuberkolosis	Jiwa	3.847	4.351	3.962	4.278	3.732
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 penduduk	5	6	6	6	3

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.20 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*). Dalam proporsi jumlah kasus TBC menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program. Berdasarkan proporsi penemuan kasus TBC yang didapatkan, belum mencapai target yang diharapkan yaitu >70%. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 belum menunjukkan peningkatan. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Beberapa adanya kewajiban pelaporan dari RS daln Fasilitas kesehatan swasta lainnya dalam penemuan kasus TBC (*mandatory notification*);
2. Upaya penemuan kasus TBC masih lebih bersifat pasif karena petugas TBC masih lebih cenderung untuk menunggu pasien yang datang ke fasilitas kesehatan;
3. Keterlibatan kader kesehatan untuk program TBC belum optimal;
4. Jejaring internal dan eksternal antara fasilitas kesehatan belum berjalan dengan baik;
5. Upaya skrining terduga TBC belum dilaksanakan pada kelompok-kelompok populasi daerah kumuh dan miskin, lapas dan lain-lain;
6. Komitmen pemerintah daerah yang masih rendah.

Tabel II.100
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam Program DOTS	%	50,80	52,70	48,30	43,90	46,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.21 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Success Rate (SR) tahun 2016-2017 belum mencapai target karena:

a. Beberapa kasus pindah yang tidak terlaporkan data kesembuhan;
b. Turn over SDM TB yang tinggi yang mengakibatkan pasien tidak terlayani dengan baik (*Lost to Follow Up*).

Target kesembuhan antara 2013-2015 telah mencapai sesuai indikator nasional yaitu 85%. Tahun 2016 sesuai kebijakan NTP (*National Tuberculosis Program*) target yang harus dicapai sebesar 90%. Berdasarkan laporan data kesembuhan antara 2016-2017 menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Beberapa hal yang yang menjadi permasalahannya adalah :

1. *Turn Over* SDM TBC yang tinggi sehingga mengakibatkan pasien terlayani dengan baik
2. Beberapa kasus pindah ke daerah lain dengan tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani
3. Beberapa kasus terlaporkan *lost to follow up* dengan beberpa penyebab yaitu efek samping obat, kejenuhan karena pengobatan yang sangat lama, ekonomi, kurangnya dukungan keluarga.

Tabel II.101
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	86	86	86	87	89

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu 4.834 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 4.834 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan jumlah temuan 7.587 kasus. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2017 sebanyak 1.755 kasus. Diantara 24 kabupaten/kota jumlah kasus DBD yang tertinggi pada Kabupaten Maros dengan jumlah temuan 253 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mencapai 100, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100%. Kekurangan logistik untuk penemuan kasus dan penanggulangan kasus serta perlunya sosialisasi tatalaksana kasus DBD untuk Dokter dan Petugas di Puskesmas. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%, karena jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah seluruhnya dapat ditangani sesuai standar/SOP. Hal ini dapat tercapai karena penanganan penderita DBD dapar langsung dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada di masing-masing Kab/Kota.

Kesadaran dari masyarakat untuk segera membawa penderita sedini mungkin ke rumah sakit atau puskesmas sangat berperan dalam penanganan berdasarkan standar/SOP yang ada.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat perbedaan standar/SOP yang dipedomani oleh dokter dan petugas kesehatan pada masing-masing rumah sakit dan puskesmas di Kab/Kota. Hal Ini terlihat dari terjadinya kenaikan drastris terhadap jumlah penderita di tahun 2016 yang mencapai hingga 190% dari jumlah penderita di tahun 2015. Kondisi ini terjadi karena penetapan kriteria penderita DBD yang digunakan hanya berdasarkan pada keadaan demam/suhu badan 390C, serta adanya bintik-bintik merah pada tubuh penderita (*petechiae*). Sedangkan berdasarkan WHO, standar yang digunakan adalah melalui pemeriksaan Darah Rutin seperti Hb, Trombosit, Haematokrit, Ns-1, IgG/IgM, dan deteksi adanya kebocoran plasma pada penderita.

Sebagai solusi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel senantiasa mendorong penyamanan standar yang digunakan oleh petugas kesehatan, diantaranya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Tata Laksana Kasus bagi Dokter dan pengelola Program DBD yang ada di puskesmas masing-masing Kab/Kota. Selain itu untuk menurunkan jumlah penderita maka dilakukan gerekan pencegahan berupa Gerakan 1 (satu) rumah 1 (satu) Jumantik (G1R1J) dengan menggandeng masing-masing Pemerintah Kab/Kota yang juga untuk terus meningkatkan capaian diatas, maka masih dihadapi diantarannya :

1. Kekurangan logistik untuk penemuan kasus dan penanggulangan kasus
2. Pelaksanaan sosialisasi tatalaksana kasus DBD belum menyentuh seluruh Dokter dan Petugas di Puskesmas/RSUD di masing-masing Kab/Kota
3. Gerakan 1 (satu) rumah 1 (satu) jumantik (G1R1J) belum dilaksanakan oleh seluruh Kab/Kota.

Tabel II.102
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa	4.834	3.386	4.037	7.587	1,755
Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wikayah dalam kurun waktu yang sama	Jiwa	4.834	3.386	4.037	7.587	1,755
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.23 Penderita Diare yang Ditangani

Menurunnya jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun 2013-2017 setiap tahun belum mencerminkan bahwa jumlah kasus diare sudah berkurang di masyarakat. Hal ini terlihat dari target cukupan penemuan dan pelayanan penderita diare sampai akhir tahun 2017 belum mencapai target 100%. Beberapa hal yang menjadi kendala sehingga target cakupan penemuan dan pelayanan belum tercapai di anatarannya adalah petugas diare di puskesmas dan kebupaten belum secara rutin dan tepat waktu mengirimkan

laporannya, Kasus-kasus diare yang tangani di rumah sakit belum semua terlaporkan, masih kurangnya kegiatan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya penanganan kasus diare di pelayanan kesehatan khususnya kepala balita, sehingga banyak orang tua yang menangani sendiri kasus diare di rumah tangga dengan cara yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tatalaksana diare pada belita. Beberapa masalah dalam penanganan penderita diare diantaranya:

1. Masih banyak laporan yang tidak masuk dari puskesmas
2. Kurangnya motivasi kerja pengelola puskesmas untuk mengirimkan laporan tepat waktu
3. Laporan yang dikirim masih banyak yang kurang tepat (tidak sesuai)
4. Seringnya terjadi mutasi pegawai dalam lingkup puskesmas, sehingga mempengaruhi kinerja pengelola yang sudah terlatih.

Tabel II.103
Penderita Diare yang Ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penderita Diare yang Ditangani	Orang	243.669	240.381	238.085	192.681	169.972

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.24 Angka Kejadian Malaria

Penurunan Angka Kejadian Malaria sesuai dengan Target Nasional Yaitu < 1 Per 1000 Penduduk pada Tahun 2013 sampai dengan 2017, penurunan angka ini di sebabkan karena penemuan kasus malaria Secara dini atau early diagnosis dan prompt treatment sehingga memutuskan mata rantai penularan malaria setempat. Penurunan Angka Kejadian Malaria diperoleh dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baik oleh Provinsi maupun Kab/Kota, diantaranya adalah peningkatan Kapasitas SDM, Mass Bolod Survey (MBS), Penyemprotan Rumah, Distribusi Kelambu, Surveilans Migrasi, Sosialisasi Sistem Surveilans Malaria kepada LS/LP, pengamatan daerah reseptif dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun angka kesakitan malaria sudah tercapai terget nasional, tetapi masih banyak kendala yang di hadapi di lapangan terutama dalam kualitas SDM, *logistic* (*Laboratorium Supply*) penatalaksanaan, dan kasus import yang datang dari daerah – daerah endemis yang harus ditemukan secara dini. Beberapa permasalahan dalam penanganan kejadian malaria diantaranya:

1. Masih perlu pelatihan bagi tenaga mikroskopis Puskesmas;
2. Logistik penemuan penderita (*Rapid Test Diagnostik*/RDT) bagi puskesmas yang tidak memiliki tenaga mikroskopis masih kurang;
3. Mikroskop yang layak pakai pemeriksaan sediaan darah masih kurang;
4. Jejaring tatalaksana untuk kliknik Swasta, Dojter Swasta belum berjalan dengan baik;
5. Sistem surveilans migrasi masih belum maksimal.

Tabel II.104
Angka Kejadian Malaria
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0,22	0,14	0,12	0,13	0,15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.25 Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT

Upaya penanggulangan penyakit malaria di Indonesia seak tahun 2007 dapat dipantau dengan menggunakan indikator *Annual Parasit Insidence* (API). Setiap kasus malaria harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah dan semua kasus positif harus diobati dengan pengobatan dengan kombinasi berbasis artemisinin atau ACT (*Artemisinin based Combination Therapies*). Cakupan kasus yang dinyatakan positif dan mendapatkan pengobatan, diukur melalui indikator persentase penderita malaria yang diobati.

Tabel II.105
Pendertia Malaria yang Diobati dengan ACT
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Positif Malaria	Kasus	1.772	1.126	953	1.073	1.237
Pengobatan ACT	Penderita	1.626	1.058	864	1.032	1.156
Persentase Pendertia Malaria yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat (ACT)	%	91,76	93,96	90,66	96,18	93,45

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel II.106
Pendertia Malaria yang Diobati dengan ACT Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT
Kep. Selayar	59	59	27	27	53	50	23	23	30	27
Bulukumba	51	51	23	23	20	20	22	22	38	38
Bantaeng	9	9	5	2	15	14	15	15	33	33
Jeneponto	67	67	37	37	35	35	36	36	53	52
Takalar	43	43	16	15	12	12	19	17	20	20
Gowa	31	27	27	26	15	15	13	13	10	8
Sinjai	36	36	21	20	38	38	33	33	33	31
Bone	48	39	35	34	36	33	36	33	61	61
Maros	57	48	53	51	38	38	70	63	132	117
Pangkajene Kepulauan	145	142	91	87	82	73	53	53	67	65

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT
Barru	30	29	17	16	24	24	19	19	17	17
Soppeng	29	29	21	21	23	22	12	12	10	10
Wajo	51	46	29	27	16	13	10	10	38	37
Sidenreng Rappang	11	11	15	14	16	16	14	14	9	9
Pinrang	84	81	68	68	92	92	80	80	72	71
Enrekang	121	98	86	72	62	52	98	92	58	58
Luwu	72	71	58	57	36	35	34	34	32	31
Tana Toraja	108	94	33	33	28	25	25	19	51	51
Luwu Utara	99	93	55	53	18	17	34	34	24	24
Luwu Timur	98	96	41	41	27	22	18	18	25	25
Toraja Utara	208	168	175	175	84	82	137	137	145	145
Makassar	196	189	98	92	83	78	196	191	188	168
Pare-Pare	34	29	14	13	14	14	9	7	20	9
Palopo	85	71	81	54	86	44	67	57	71	49
Sulawesi Selatan	**1.772**	**1.626**	**1.126**	**1.058**	**953**	**864**	**1.073**	**1.032**	**1.237**	**1.156**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.1.1.26 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Masih rendah penemuan kasus di Kabupaten/Kota karena belum semua Kabupaten/Kota melakukan Testing HIV. Prevalensi HIV-AIDS sejak tahun 2013-2017 sudah sesuai target program sebesar < 0.5, namun capaian ini masih rendah disebabkan oleh tidak semua Kabupaten/Kota melakukan kegiatan Sero Survey untuk penemuan kasus. Kondisi yang ada :

1. Angka prevalensi diperoleh dari kegiatan survey setiap tahun;
2. Tahun 2013, dilakukan Survey Terpadu Biologis & Perilaku (STPB) seingga nilai prevalensi di peroleh;
3. Tahun 2014 – 2017 dikukan kegiatan Sero Survey Sentibel di 2 Kabupaten;
4. Rendahnya Prevalensi HIV karena tidak semua Kabupaten/Kota melakukan Kegiatan Sero Survey untuk penemuan kasus.

Tabel II.107
Prevalensi HIV/AIDS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,3	0,025	0,056	0,28	0,33

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.27 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Belum ada Juknis Khusus Survey penggunaan Kondom di tingkat Provinsi, tetapi dilakukan oleh Subdit AIDS & PMS Kemkes bersama dengan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Diperlukan survey, karena keterbataan dana, survey tidak dilakukan setiap tahun. Kondisi terkait capaian indikator kinerja:

1. Tahun 2013, Indikator Survey Pengguan Kondom diperoleh dari kegiatan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STPB) yang dilakukan oleh Subdit AIDS & PMS Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Tahun 2015, data diperoleh dari kegiatan Survey Cepat Perilaku (SCP) yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bersama dengan komisi penganggulangan AIDS Provinsi (KPAP);
3. Karena Keterbataan dana, survey tidak dilakukann setiap tahun.

Tabel II.108
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	%	Perempuan : 35 Laki-Laki : 14	0	Perempuan : 69,6% Laki-Laki : 56,6%	0	0

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.28 Proporsi Jumlah Penduduk Memiliki Pengetahuan Komprehensif

Kurangnya sosialisasi HIV AIDS di sekolah dan belum semua kabupaten/kota memiliki pendanaan APBD untuk program HIV-AIDS, Survey masih bergantung pada APBD Provinsi. Diperlukan survey, karena keterbataan dana, survey tidak dilakukan setiap tahun. Kondisi terkait capaian indikator kinerja :

1. Indikator diperoleh dari Survey yang dilakukan pada anak usia 15 – 24 tahun;
2. Tahun 2013 survey dilakukan hanya Kota Makassar, sehingga hasil survey rendah;
3. Pengembangan survey dilakukan tahun 2014 sebanyak 14 Kab/Kota, Tahun 2015 yang dilakukan sebanyak 21 Kab/Kota, dan Tahun 2016 Sebanyak 24 Kab/Kota, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendanaan APBD Provinsi dan GF-AIDS (Global Fund);
4. Masih kurangnya sosialisasi HIV AIDS di sekolah;
5. Nelum semua Kab/Kota memiliku pendanaan APBD untuk melakukan survey pengetahuan komprenshif, survey masih bergantung pada APBD Provinsi.

Tabel II.109
Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif	%	11,40	65,30	73,4	83,40	n.a

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Sama halnya dengan cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit DBD, capaian kinerja untuk tahun 2017 juga mencapai angka 100%. Pelayanan rujukan ini, antara lain meliputi Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, Rehabilitasi medis, Penunjang diagnostic seperti pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Tindakan medis kecil dan sedang, Operasi sedang dan besar, Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan, Pelayanan KB seperti pelayanan pasca persalinan/ keguguran, Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, pelayanan darah dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang perawatan kelas III. Diterapkannya sistem rujukan online oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk Pasien, hal ini menimbulkan adanya batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit karena sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Ketersediaan Rumah Sakit Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan sistem rujukan berjenjang, akhirnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Khusus dengan fasilitas yang tidak memadai.

Pencapaian sasaran cakupan perlayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin yang telah memamnfaatkan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dari jumlah pemduduk miskin adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2013 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah masayrakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakuit Sebanyak 164.968 Kasus;
2. Tahun 2014 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah masayrakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakuit Sebanyak 164.620 Kasus;
3. Tahun 2014 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah masayrakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakuit Sebanyak 137.136 Kasus;
4. Tahun 2016 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah masayrakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakuit Sebanyak 202.811 Kasus;
5. Tahun 2017 sebanyak 4.634.971 jiwa, jumlah masayrakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakuit Sebanyak 458.673 Kasus.

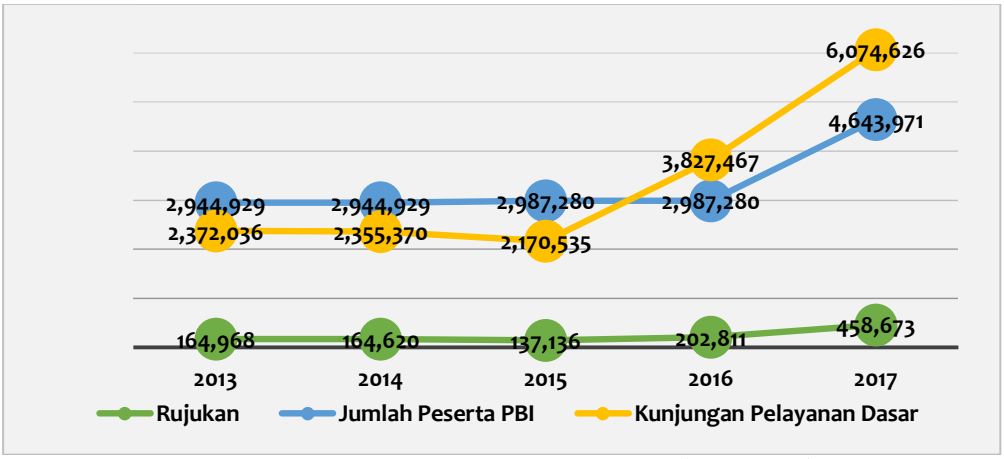
Pada Tahun 2014 dengan adanya regulasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengharuskan Program Kesehatan Gratis integrase dan tuntas pada tahun 2016, maka pemerintah Sulawesi Selatan melakukan pemetaan masyarakat yang tergolong miskin sesuai dengan PP. No. 101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kab/Kota jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 sebanyak 1.735.222 jiwa yang di biayai oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, sedangkan Peserta PBI Pusat yang dibiayai dengan dan APBN sebanyak 2.944.929 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan secara keseluruhan yang mendapat jaminan kesehatan sebanyak 4.680.151 jiwa.

Tabel II.110
Kunjungan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta PBI	Kunjungan Pelayanan Dasar	Rujukan
1	Kepulauan Selayar	93.237	149.629	3.123
2	Bulukumba	224.539	238.697	12.667
3	Bantaeng	78.326	37.957	1.486
4	Jeneponto	269.419	219.964	14.343
5	Takalar	181.197	149.933	4.861
6	Gowa	226.020	446.727	5.487
7	Sinjai	128.578	81.235	5.536
8	Bone	563.479	476.140	32.497
9	Maros	209.653	198.144	33.147
10	Pangkajene Kepulauan	232.047	207.683	26.407
11	Barru	119.636	89.961	8.402
12	Soppeng	140.601	261.910	28.736
13	Wajo	166.467	214.338	11.464
14	Sidenreng Rappang	130.957	167.296	24.484
15	Pinrang	168.115	233.173	16.051
16	Enrekang	115.474	117.510	8.201
17	Luwu	242.705	122.911	5.878
18	Tana Toraja	172.217	110.265	13.436
19	Luwu Utara	174.079	233.463	7.535
20	Luwu Timur	152.427	264.550	21.670
21	Toraja Utara	154.749	146.166	7.981
22	Makassar	490.393	1.616.827	152.653
23	Pare-Pare	102.323	192.342	1.526
24	Palopo	107.315	97.805	11.102
Sulawesi Selatan		**4.634.971**	**6.074.626**	**458.673**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Grafik II.12
Kunjungan dan Rujukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

Peserta yang mengakses pelayanan kesehatan pada tahun 2013 – 2017 yang mendapatkan rujukan di FKTRL sebanyak 1.128.208 orang yang didukung dengan adanya regulasi Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang system rujukan berjenjang, dan adanya peningkatan Sumber Daya Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan, dimana tergambar semakin menurunnya keluhan dan masalah rujukan masyrakat miskin untuk mengakses pelayanan di Rumah Sakit.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Adanya kebijakan yang mengatur Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Khususnya Integrasi Jamkesda ke JKN/KIS, Yaitu :
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Rangka Penyelenggaraan jaminan Sosial
   b. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program JKN.
2. Komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan Menyiapkan dan sharing untuk pembiayaan Pelaksanaan Program Integrasi Jamkesda ke JKN yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15 tentang Sistem Regionalisasi dan Rujukan Berjenjang.
3. Dukungan anggaran dari pemerintah Pusat berupa alokasi Pembiayaan untuk peserta PBI dan Operasional pengelolaan Program JKN.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana yang belum memadai sehingga terjadi proses antrian bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit;

2. Penerapan Sistem rujukan belum berjalan optimal dimana beberapa kasus yang seharusnya dapat ditangani pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang Non Spesialistik, namun tetap dirujuk ke Rumah Sakit.

Namun pada bulan September 2018 BPJS Kesehatan menerbitkan Sistem Rujukan berjejang berbasis kompetensi dan terintegrasi dengan sistem informasi (rujukan online), sehingga menimbulkan kendala pada pelayanan sistem rujukan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu untuk mendapatkann pelayanan rujukan sebgaimana penjelasan berikut :

1. Diterapkannya system rujukan online Oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk pasien, hal ini menimbulkan adanya Batasan masyrakat untuk memilih Rumah Sakit Karena sudah di tentukan oleh BPJS Kesehatan;
2. Ketersedian RS Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan system rujukan berjenjeng, akhirnya pasien dirujuk ke RS Khusus dengan fasilitas yang Tidak Memadai.

Tabel II.111
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.30 Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2013 jumlah kunjungan sebanyak 90,98% dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 98,54%. Keterlibatan Lintas Sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas; Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu. Berdasarkan data capaian dari tahun 2013 sampai 2017, cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasarpada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal Ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun. Oleh karena itu, perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam oenigkatan kualitas pelayanan kesehatan pada anaka bayi khususnya peran kader dan PKK dalam Pelayanan kesehatan anak bayi saat permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Keterlibatan lintas sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal;
2. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas;
3. Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu.

Tabel II.112
Cakupan Kunjungan Bayi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kunjungan Bayi	%	90,98	95,23	98,11	98,08	98,54

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.31 Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan Pejabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan menurut Permenkes 75 Tahun 2014. Permasalahan terkait capaian indikator kinerja :

1. Kewenangan Kab/Kota;
2. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tridak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan;
3. Tingginya mutase petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas;
4. Penempatan penjabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi menurut Permenkes 75 Tahun 2014.

Tabel II.113
Cakupan Puskesmas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas	Unit	440	446	448	448	451
Cakupan Puskesmas	%	144	146	146	146	147

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.32 Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Cakupan puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa di Sulawesi Selatan masih rendah, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan dasar di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian dari pemerintah khususnya bagi daerah terisolir. Pada tahun 2017 cakupan puskesmas pembantu sebesar 56,56%.

Tabel II.114
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)	%	56,22	54,78	54,82	54,06	56,56

sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.33 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya. Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 tahun 2013 sebesar 91,64% berarti ada sekitar 8,36% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Tahun 2014 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,22% ada sekitar 8,78% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, Tahun 2015 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,72 %, ada sekitar 8,228% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, tahun 2016 cakupan kuncungan ibu hamil sebesar 89,75%, ada sekitar 10,25% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamilK4.

Pada tahun 2017 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,13%, ada sekitar 8,87 yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Berdasarkan data tersebut cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) masih berfungsi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas/kesenjangan antar Kab/Kota yang variasinya cukup besar, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini menyebabkan ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke -1 (0-12 Minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (.12-24 Minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (> 24 minggu sampai dengan kelahirannya). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut diatas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagain cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengakp (K4) adalah :

1. Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan
2. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sasmpai persalinannya.

Tabel II.115
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	91,64	91,22	91,72	89,25	91,13

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.34 Cakupan Pelayanan Nifas

Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan serta ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau. Cakupan pelayanan nifas tahun 2013 sebesar 85,54% masih ada sekitar 14,46% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas; tahun 2014 cakupan pelayanan nifas sebesar 89,49, masih ada sekitar 10,51% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas; tahun 2015 cakupan pelayanan nifas sebesar 91,72%, masih ada sekitar 8,28% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas; tahun 2016 cakupan pelayanan nifas sebesar 91,32%, masih ada sekitar 8,68% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas dan tahun 2017 cakupan pelayanan nifas sebesar 91,48, masih ad sekitar 8,52 yang tidak mendapatkan pelayanan nifas.

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan cakupan pelayanan nifas dari tahun 2013 sampai dengan 2017 oleh tenaga kesehatan walaupun masih ada ibu nifas yang belum memperoleh pelayanan nifas, hal ini disebabkan masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga ibu nifas tidak terpantau oleh nakes dan tidak memperoleh pelayanan nifas yang seharusnya. Secara umum penyebab yang mempengaruhi cakupan kunjungan nifas yaitu:

1. Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan;
2. Ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau.

Tabel II.116
Cakupan Pelayanan Nifas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Nifas	%	85,54	89,49	91,72	91,32	91,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.35 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

Kompetensi Nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah, deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah serta kualitas Kesehatan Ibu hamil masih rendah merupakan permasalahan dalam penanganan neonates dalam komplikasi. Berdasarkan data capaian pelayanan neonates dengan komplikasi yang ditangani dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktasi disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten serta menyangkut sarana dan prasarana dalam menangani bayi baru lahir bermasalah yang belum adekuat. Masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada sebelum dan saat hamil. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. kompetensi nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah
2. deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah
3. kualitas kesehatan ibu hamil masih rendah.

Tabel II.117
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	53,80	56,44	88,74	60,66	60,28

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.36 Cakupan Pelayanan Anak Balita

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2013 sampai 2017 peningkatannya tidak signifikan, hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Demikian pula keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal. Kompetensi Nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan anak balita belum adekuat. Pemberdayaan masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak balita masih kurang.

Tabel II.118
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	58,62	65,17	76,51	69,09	71,74

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.37 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin

Pemberian makanan pendamping ASI pada tahun 2013-2015 tidak terlaksana, karena pada saat itu tidak ada droping MP-ASI dari kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017, cakupan MP-ASI telah mencapai terget, hal ini didukung oleh upaya pendistribusian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang bersumber dari pusat maupun daerah kepada semua balita kurus secara cepat, tepat dan akurat.

Namun demikian, masih ditemukannya permasalahan diantaranya :

1. Makanan pendamping ASI yang didistribusikan pada masyarakat miskin seringkali dikonsumsi bukan hanya oleh Balita Kurus tapi juga oleh anggota keluarga lainnya;
2. Banyak balita kurus yang memperoleh bantuan MP-ASI enggan mengkonsumsi sesuai aturan yang ditetapkan sehingga perubahan status gizi yang diharapkan tidak optimal.

Makanan Pendamping ASI yang didistribusikan pada masyarakat miskin seringkali dikonsumsi bukan hanya oleh Balita Kurus tapi juga oleh anggota keluarga lainnya. Banyak Balita kurus yang memperoleh Bantuan MP-ASI enggan mengkonsumsi sesuai aturan yang ditetapkan sehingga perubahan status gizi yang diharapkan tidak optimal.

Tabel II.119
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	0	0	0	100	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemerintah Pusat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang merupakan peralihan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program kesehatan gratis yang keduannya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pencapaian sasaran cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin yang telah memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2013 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 2.355.370 kasus
2. Tahun 2014 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 2.355.370 kasus
3. Tahun 2015 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 2.170.535 kasus
4. Tahun 2016 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 3.827.467 kasus
5. Tahun 2017 sebanyak 4.634.971 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 6.074.626 kasus

Pada tahun 2014 dengan adanya regulasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengharuskan program kesehatan gratis integrase dan tuntas pada tahun 2016, maka Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan pemetaan masyarakat yang tergolong miskin sesuai dengan PP.No. 101 tahun 2013 tentang penerima bantuan iuran (PBI), dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebanyak 1.735.222 jiwa yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan peserta PBI Pusat yang dibiayai dengan dan APBN sebanyak 2.944.929 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 4.680.151 jiwa mendapatkan layanan yang ada di Sulawesi Selatan. Peserta yang mengakses pelayanan kesehatan pada tahun 2013-2017 sebanyak 16.800.034 kasus yang mendapatkan pelayanan dasar di FKTP.

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
   1. Adanya kebijakan yang mengatur sistem jaminan Kesehatan Daerah Khususnya integrase Jamkesda ke JKN/KIS, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Sanksi Administrasi kepada pemberi kerja dan setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional.
- Peraturan Presiden Ri Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.
- Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan atas perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang kerja sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.

2. Komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan dana sharing untuk pembiayaan pelaksanaan program integrase Jamkesda ke JKN yang tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan atas perda Nomor 2 tahun 2009 tentang kerja sama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
3. Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat berupa alokasi Pembiayaan untuk peserta PBI Jamkesmas dan operasional pengelolaan Program JKN.

b. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain :
   1. Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan terutama tenaga medis (dokter) yang belum terdistribusi dengan baik terutama di daerah terpencil.
   2. Kerjasama lintas sektor khususnya Dinas Sosial dan Dians Kependudukan belum optimal terkait validasi data kepesertaan baik penetapan kouta, dan persyarakat yang harus dipenuhi utamanya identitas dan NIK peserta. Selain itu pengusulan kuota peserta kesehatan gratis integrase ke JKN dari Kabupaten/Kota ke BPJS belum tepat sasaran.

c. Walaupun capaian program 100%, namun :
   1. Tenaga medis untuk beberapa FKTP (Puskesmas) masih kurang/tidak sebanding dengan rasio jumlah peserta yang ada wilayah FKTP, sehingga ada pasien yang dipindahkan ke FKTP lain meskipun jaraknya jauh.
   2. Kebiasaan masyarakat selalu mau di rujuk ke Rumah Sakit.

Walaupun capaian program 100% namun tenaga medis untuk beberapa FKTP (Puskesmas) masih kurang/tidak sebanding dengan jumlah pasien di FKTP, sehingga ada pasien yang dipindahkan ke FKTP lain meskipun jaraknya jauh. Kebiasaan masyarakat selalu mau dirujuk ke Rumah Sakit.

Tabel II.120
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.39 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tahun 2018, proporsi balita gizi kurang di Indonesia mencapai 13,8%. Proporsi status gizi pendek pada balita mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 19,3% dan sangat pendek mengalami penurunan dari tahun 2013 mencapai 11,5%. Sedangkan proporsi status gizi pendek pada batuta mencapai 17,1% dan sangat pendek mencapai 12,8%. Prevalensi balita gizi kurang di Sulawesi Selatan masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 17,59%. Capaian status Gizi Kurang pada Balita dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Sulawesi Selatan mengalami flutuasi disebabkan oleh multifactor diantaranya adalah asupan gizi yang tidak adekuat, tingginya kasus-kasus penyakit infeksi dan hygiene Sanitasi yang tidak optimal. Secara spesifik penyebab balita gizi kurang sebagai berikut :

1. Asupan Gizi yang tidak adekuat disebabkan oleh pemberian Asi Eksklusif yang tidak optimal dan makanan pendamping ASI yang tidak memenuhi syarat asupan gizi;
2. Deteksi Dini Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk tidak berjalan disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak membawa anaknya ke posyandu sehingga pemantauan pertumbuhan anak tidak optimal;
3. Banyak balita yang terpapar penyakit infeksi dibawa ke fasilitas kesehatan saat kondisi anak sudah berat sehingga berpengaruh terhadap asupan gizi;
4. Rendahnya pengetahuan ibu tentang higyene dan sanitasi terutama dalam penyiapan makanan anak sehingga banyak menyebabkan kasus infeksi dan berdampak pada asupan balita;
5. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor belum optimal dan terintegrasi.

Tabel II.121
Prevalensi Balita Gizi kurang
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	19,0	20,5	17,1	20,2	17,59

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.1.40 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Dukungan dan keterlibatan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan siswa SD yang masih kurang sehingga mempengaruhi capaian. Demikian pula dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan dijaring.

Tabel II.122
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	58,89	60,46	82,58	65,76	83,19

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dalam pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2017 persentase jalan dengan tahun kemarin sedikit menurun dari tahun sebelumnya yakni tahun 2016. Kondisi jalan baik pada tahun 2013 adalah 40,74%, meningkat pada tahun 2014 sebesar 40,88% dan tahun 2015 sebesar 42,11%. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik saat ini mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km.Sedangkan pada kondisi jalan rusak berat tiap tahunya terus mengalami penurunan, kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesear 4,85. Tetapi mengalami peningakatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. Hal ini disebabkan karena masuknya beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.

Tabel II.123
Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	467,46	469,13	483,21	633,36	556,05
Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1.147,51	1.147,51	1.147,51	1.500,15	1.500,15
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	40,73	40,88	42,11	42,22	37,07

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan

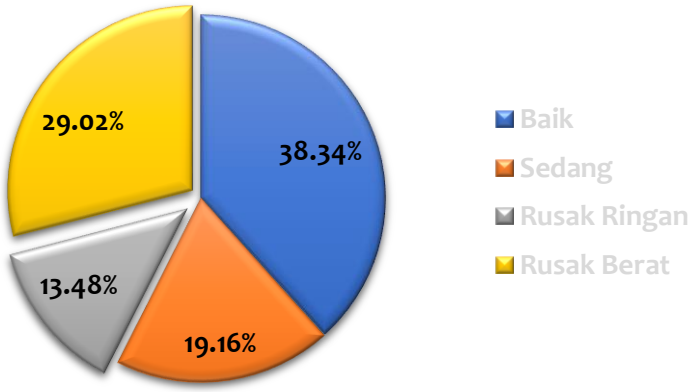
Capaian kinerja jaringan jalan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2016, namun pada tahun 2017 tingkat capaian kinerja jaringan jalan dalam kondisi baik Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan disebabkan pengalihan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang kondisi jalannya rusak parah. Panjang jaringan jalan provinsi pada tahun 2018 mencapai 2009,35 Km dengan kondisi baik 38,34% (770,48 Km), kondisi sedang 19,16% (385,05 Km), kondisi rusak ringan 13,48% (270,78 Km), kondisi rusak berat 29,02 (583,05 Km).

Tabel II.124
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun									
		2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Kondisi Baik	Km	467,46	40,74	469,13	40,88	483,21	42,11	633,36	42,22	556,05	37,07
Kondisi Sedang	Km	508,40	44,30	510,51	44,49	519,92	45,31	294,70	19,64	397,62	26,51
Kondisi Rusak Ringan	Km	87,31	7,61	85,81	7,48	88,77	7,74	188,34	12,55	128,59	8,57
Kondisi Rusak Berat	Km	84,34	7,35	82,06	7,15	55,61	4,85	383,75	25,58	417,89	27,86
Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1.147,51	100	1.147,51	100	1.147,51	100	1.500,15	100	1.500,15	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Grafik II.13
Kondisi Jaringan Jalan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018



Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.3.3 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan. Dengan kata lain bahwa dalam 1 (satu) Km jalan di wilayah tersebut dibanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 hingga 2017 berfluktuasi. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, dengan Panjang jalan 1.147,51 Km mengalami penurunan setiap tahun, sedangkan pada tahun 2016 hingga 2017 panjang jalan mengalami peningkatan menjadi 1.500,15 Km. Rasio panjang jalan sebesar 0,000170 pada tahun 2017 mengindikasikan bahwa jalan provinsi di Sulawesi Selatan mengalami penurunan kinerja pelayanan terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan, yang diakibatkan pada Tahun 2015 terdapat penambahan panjang jalan provinsi menjadi 1.500,15 Km. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat penggunaan jalan di wilayah Sulawesi Selatan masih membutuhkan peningkatan guna meningkatkan akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah dengan kondisi jalan yang rusak.

Tabel II.125
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	Km/ Jiwa	0,000138	0,000136	0,000135	0,000174	0,000170

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.4 Persentase Jalan Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air

Jalan provinsi di Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan trotoar dan drainase pada tahun 2017 sepanjang 1.155,12 Km atau sebesar 77%. Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sepanjang 952,43 Km (83%) jalan memiliki drainase/saluran pembuangan air. Pada tahun 2014 sepanjang 958,17 Km (83,5%) dan tahun 2015 sepanjang 963,90 Km (84%). Sedangkan pada tahun 2016 persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air mengalami penurunan yang disebabkan oleh masuknya beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan kewenangan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dimana pada tahun 2016 sepanjang 1.125 Km (75%) dan tahun 2017 sepanjang 1.155,12 (77%). Salah satu kendala utama penyediaan trotoar dan drainase/saluran air pada jalan provinsi, khususnya pada kawasan perkotaan adalah ketersediaan lahan, khususnya pada wilayah yang sudah terbangun.

Tabel II.126
Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	83,00	83,50	84.00	75,00	77,00

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.5 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Pemanfaatan sempadan jalan oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar di Sulawesi Selatan hanya sepanjang 147,76 Km atau sebesar 9,85% pada tahun 2017. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar sepanjang tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2013 sepanjang 114,63 Km (9,99%), tahun 2014 sepanjang 110,97 Km (9,67%), dan tahun 2015 sepanjang 107,32 Km (9,35%) dari 1.147,51 Km total Panjang jalan Provinsi. Namun pada tahun 2016 sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar mengalami peningkatan yaitu sepanjang 152,79 Km (10,18%), tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun

2017 yaitu sepanjang 147,77 Km (9,85%) dari 1.500,15 Km total panjang jalan provinsi. Hal tersebut merupakan persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah provinsi melalui dukungan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dipicu oleh masih kurangnya konsistensi penerapan aturan pemanfaatan sempadan jalan oleh pemerintah daerah dan kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan sempadan jalan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005. Untuk itu diharapkan adanya dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sepanjang jalan provinsi yang sebagian besar melintasi kawasan perkotaan.

Tabel II.127
Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	%	9,99	9,67	9,35	10,18	9,85

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana pada terdapat peningkatan sebesar 5,82% dalam 5 tahun terakhir. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 84,41%. Salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pembangunan septic tank yang sesuai dengan kriteria teknis.

Tabel II.128
Rumah Tinggal Bersanitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi	1.579.900	1.617.112	1.651.626	1.767.440	1.713.087
Jumlah Rumah Tangga	1.948.608	1.957.528	1.990.008	2.009.996	2.029.478
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	81,08	82,61	83,00	83,41	84,41

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

Tabel II.129
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi				
		Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Bersanitasi	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persen tase (%)
1	Kep. Selayar	133.003	33.168	113.312	28.257	85,20
2	Bulukumba	415.713	102,392	359.053	88.437	86,37
3	Bantaeng	185.581	45.044	178.721	43.379	96,30
4	Jeneponto	359.787	85,056	266,637	63,035	74,11
5	Takalar	292.983	70.769	262.544	63.416	89,61
6	Gowa	748.200	173.596	594.383	137.908	79,44
7	Sinjai	241.208	52.666	235.763	51.477	97,74
8	Bone	751.026	171.859	534.482	122.307	71,17
9	Maros	346.383	76,974	222.911	49.536	64,35
10	Pangkajene Kepulauan	329.791	77.781	245.636	57.933	74,48
11	Barru	172.767	41.832	161.591	39.126	93,53
12	Soppeng	226.466	58.217	188.585	48.479	83,27
13	Wajo	395.583	96.484	371.418	90.590	93,89
14	Sidenreng Rappang	296.125	71.184	248.257	59.677	83,84
15	Pinrang	372.230	87.378	365.892	85.890	98,30
16	Enrekang	203.320	45.283	168.858	37.608	83,05
17	Luwu	356.305	77.122	252.150	54.578	70,77
18	Tana Toraja	231.519	55.788	182.753	44.037	78,94
19	Luwu Utara	308.001	72.642	241.121	56.868	78,29
20	Luwu Timur	287.874	68.869	244.534	58.501	84,94
21	Toraja Utara	228.414	50.091	184.995	40.569	80,99
22	Makassar	1.489.011	345.478	1.450.643	336.576	97,42
23	Pare-Pare	142.097	32.004	101.074	22.764	71,13
24	Palopo	176.907	37.801	150.409	32.139	85,02
Sulawesi Selatan		**8.690.294**	**2.029.478**	**7.325.722**	**1.713.087**	**84,41**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

2.3.1.3.7 Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Pemanfaatan sempadan sungai di Sulawesi Selatan oleh bangunan liar menunjukkan trend peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebesar 22% yang meningkat menjadi 35% pada Tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan karena masih kurangnya perangkat pengendalian pemnafaatan ruang sempadan sungai dan kurangnya upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sempadan sungai melalui penerbitan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai.

Tabel II.130
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	27	25	30	32	35

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.8 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik cukup tinggi di tahun 2013 namun mengalami penurunan di tahun 2014 karena besarnya tingkat kerusakan di jaringan irigasi dan kembali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seirin dengan besarnya anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi dan puncaknya di tahun 2017 mengalami peningkatan cukup tinggi. Di Sulawesi selatan ada lahan sawah yang dilakukan irigasi dan ada juga yang tidak. Jumlah lahan yang irigasi lebih banyak dibandingkan non irigasi, daerah irigasi sebesar 391.147 sedangkan non irigasi sebesar 262.799. Kabupaten yang paling banyak melakukan irigasi adalah pinrang, yaitu sebanyak 47.139, sedangkan daerah yang tidak melakukan irigasi paling banyak adalah wajo, dengan jumlah 70.219. Jumlah kebun keseluruhan yang dimiliki Sulawesi selatan sebanyak 481.405, jumlah lading yang dimiliki sebanyak 117.588 dan lahan yang tidak diusahakan atau kosong sebanyak 101.911.

Tabel II.131
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	10,95	8,81	9,61	16,67	32,55

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan mulai tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 32,55% dibanding tahun 2016 sebesar 16,67%.

2.3.1.3.9 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan Irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi diabgi luas lahan budidaya pertanian yang cenderung konsisten tiap tahunnya karena tidaka da tambahan Panjang saluran irigasi ataupun luas lahan budidaya pertanian kecuali ditahun 2015 dan tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan karena adanya penambahan luas lahan budidaya pertanian.

Tabel II.132
Rasio Jaringan Irigasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Jaringan Irigasi	M/H	8,83	8,83	9,03	9,18	9,18

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Tabel II.133
Total Daerah Irigasi (DI) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
1	Kepulauan Selayar	50	3.778
2	Bulukumba	154	20.777
3	Bantaeng	100	16.990
4	Jeneponto	113	22.779
5	Takalar	11	2.852
6	Gowa	216	27.806
7	Sinjai	161	12.027
8	Bone	224	34.379
9	Maros	74	9.094
10	Pangkajene Kepulauan	118	13.392
11	Barru	103	9.792
12	Soppeng	121	9.666
13	Wajo	126	17.504
14	Sidenreng Rappang	94	11.299
15	Pinrang	87	8.294
16	Enrekang	237	8.846
17	Luwu	69	8.904
18	Tana Toraja	184	14.238
19	Luwu Utara	61	9.221
20	Luwu Timur	33	6.788
21	Toraja Utara	162	10.129
22	Makassar	-	-
23	Pare-Pare	5	164
24	Palopo	6	800
Sulawesi Selatan		**2.509**	**279.509**

Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2018

2.3.1.3.10 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Pada tahun 2017 persentase penduduk berakases air minum di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 87,38%.

Tabel II.134
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk berakses air minum	Jiwa	7.316.093	7.316.093	7.443.530	7.517.263	7.593.263
Jumlah Penduduk	Unit	8.342.049	8.380.765	8.520.304	8.606.375	8.690.294
Persentase Penduduk Berakses air minum	%	87,70	87,30	87,36	87,35	87,38

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.11 Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Persentase rumah tangga yang berakses air minum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 87,45% dari total 2.029.478 rumah tangga.

Tabel II.135
Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	Jiwa	1.673.318	1.710.365	1.740.268	1.757.030	1.774.720
Jumlah Rumah Tangga	Unit	1.948.608	1.957.528	1.990.008	2.009.996	2.029.478
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	85,87	87,37	87,45	87,41	87,45

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

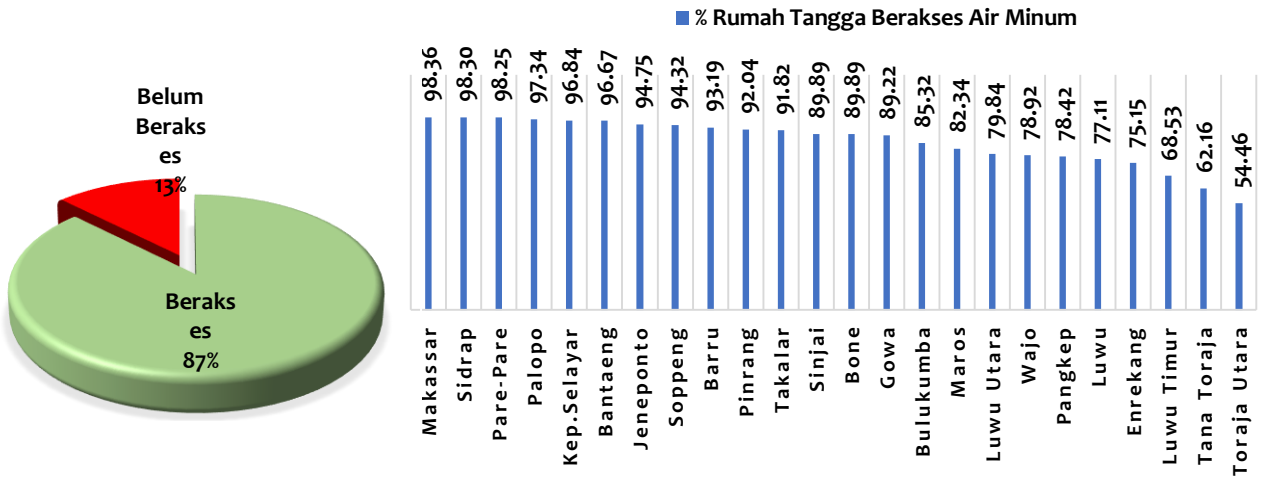
Jumlah desa/kelurahan yang belum berakses air minum yang terbanyak adalah kabupaten Jeneponto sejumlah 103 desa/kelurahan. Persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang berakses air bersih perpipaan sejumlah 74,77%.

Tabel II.136
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)	Rumah Tangga Berakses Perpipaan (%)	Cakupan Layanan Air Minum (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan Belum Berakses Air Minum
1	Kepulauan Selayar	96,84	94,80	73,71	23
2	Bulukumba	85,32	78,43	78,43	34
3	Bantaeng	96,67	90,62	41,23	10
4	Jeneponto	94,75	84,25	66,00	103
5	Takalar	91,82	74,31	81,62	18
6	Gowa	89,22	58,35	52,54	45
7	Sinjai	82,09	73,46	22,66	12
8	Bone	89,89	64,92	64,92	15
9	Maros	82,34	74,80	74,80	17
10	Pangkajene Kepulauan	78,42	65,53	65,53	14
11	Barru	93,19	84,95	66,00	n.a
12	Soppeng	94,32	77,40	77,30	47
13	Wajo	78,92	89,04	88,62	22
14	Sidenreng Rappang	98,30	76,41	85,36	79
15	Pinrang	92,04	59,27	81,00	21
16	Enrekang	75,15	76,21	76,21	58
17	Luwu	77,11	90,10	82,00	91
18	Tana Toraja	62,16	70,34	49,53	18
19	Luwu Utara	79,84	83,25	82,99	35
20	Luwu Timur	68,53	66,89	40,00	38
21	Toraja Utara	54,46	81,14	28,00	38
22	Makassar	98,36	73,98	70,08	46
23	Pare-Pare	98,25	81,98	81,85	0
24	Palopo	97,34	94,36	87,71	6
Sulawesi Selatan		**87,45**	**74,77**	**67,42**	**780**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

Grafik II.14
Akses Air Minum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.3.12 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan

Air minum layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya; kualitas air sesuai dengan standar air minum, kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang, Kontunuitas atau tersedia secara terus menerus, serta Keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau. Penyediaan air minum layak menunjukkan peningkatan sebesar ±2% /tahun. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 83,34%. Namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masayarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau masih belum layak, belum terjangkau serta belum menggunakan jaringan perpipaan. Selain itu, pengelolaan sumber air baku belum maksimal untuk menjamin penyediaan dan penyaluran air baku sesuai standar kebutuhan.

Tabel II.137
Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	66,95	68,89	72,07	73,40	83,34

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.13 Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan

Target *universal access* pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua. Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian pada tahun 2017 sejumlah 74,76%. Mayoritas sumber air minum masyarakat secara nasional diperoleh dari air dalam kemasan, sumur terlindung, dan air tanah dengan memakai pompa.

Tabel II.138
Proporsi Penduduk Akses Berkelanjutan
Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Uraian	Satuan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	5.182.407	5.669.766	6.194.207	6.497.004
Jumlah Penduduk Seluruhnya	Jiwa	8.432.163	8.520.304	8.606.342	8.690.294
Proporsi Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		61,46	66,54	71,97	74,76

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

2.3.1.3.14 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan

Peningkatan akses kepada layanan air minum merupakan target nasional melalui Perwujudan 100% layanan air minum, dengan 85% populasi terlayani akses kepada air sejalan dengan prinsip 4K dan 15% lainnya akan terlayani sesuai dengan layanan kebutuhan dasar pada tahun 2019. Berdasarkan data Susenas oleh BPS mencatat adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia sejumlah 72,04%. Sedangkan di Sulawesi Selatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan mencapai 87,45%.

Tabel II.139
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih	Persentase (%)
1	Kep.Selayar	113.003	33.168	128.805	32.121	96,84
2	Bulukumba	415.713	102.392	354.693	86.363	85,32
3	Bantaeng	185.581	45.004	179.402	43.544	96,67
4	Jeneponto	359.787	85.056	340.905	80.592	94,75

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih	Persentase (%)
5	Takalar	292.983	70.769	269.005	64.977	91,82
6	Gowa	748.200	173.596	667.557	154.886	89,22
7	Sinjai	241.208	52.666	198.011	43.234	82,09
8	Maros	346.383	76.974	285.195	63.377	82,34
9	Pangkep	329.791	77.781	258.612	60.993	78,42
10	Barru	172.767	41.832	161.004	38.984	93,19
11	Bone	751.026	171.859	675.099	154.485	89,89
12	Soppeng	226.466	58.217	213.604	54.911	94,32
13	Wajo	395.583	96.484	312.198	76.146	78,92
14	Sidrap	296.125	71.184	291.104	69.977	98,30
15	Pinrang	372.230	87.378	342.607	80.424	92,04
16	Enrekang	203.320	45.283	152.793	34.030	75,15
17	Luwu	356.305	77.122	274.753	59.470	77,11
18	Tana Toraja	231.519	55.788	143.906	34.676	62,16
19	Luwu Utara	308.001	72642	245.899	57.995	79,84
20	Luwu Timur	287.874	68.869	197.294	47.200	68,53
21	Toraja Utara	228.414	50.091	124.397	27.280	54,46
22	Makassar	1.489.011	345.478	1.464.608	339.816	98,36
23	Parepare	142.097	32.004	139.606	31.443	98,25
24	Palopo	176.907	37.801	172.206	36.796	97,34
Sulawesi Selatan		**8.690.294**	**2.029.478**	**7.593.263**	**1.774.720**	**87,45**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

2.3.1.3.15 Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di kota sedang dan kecil. Persentase luas areal Kawasan kumuh di Sulawesi Selatan mencapai 0,067% mengalami penurunan dari tahun 2013. Dalam upaya mencapai target nasional 0% kawasan kumuh pada tahun 2019 pemerintah kabupaten/kota melalui program penanganan kawasan kumuh harus terus berupaya mengurangi luas areal kawasan kumuh.

Tabel II.140
Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kawasan Kumuh	Ha	2.615,48	2.592,84	2.552,51	2.517,86	1.729,35
Luas Wilayah Perkotaan	Ha	2.582.120	2.582.120	2.582.120	2.582.120	2.582.120
Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	%	0,101	0,100	0,099	0,098	0,067

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.16 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Akses sanitasi layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta septic tank yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 84,41%. Beberapa hal yang mempengaruhi keterpenuhan 100% akses terhadap layanan tersebut antara lain adalah penggunaan septic tank oleh masyarakat yang belum layak serta pelayanan dan pengelolaan di IPLT yang belum baik. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan air limbah domestik di kab/kota sebagian masih menggunakan on-site system (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke septick tank, ataupun langsung ke sungai, danau, atau ke saluran irigasi tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah, sungai dan danau.

Tabel II.141
Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	81,08	82,74	82,94	83,40	84,41

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Pencapaian 100% layanan sanitasi (air limbah domestik, sampah, drainase lingkungan), yaitu 85% masyarakat akan terlayani sesuai standar layanan, dan 15% masyarakat akan terlayani sesuai kebutuhan dasar merupakan target nasional yang menjadi acuan pemerintah provinsi sulawesi selatan dalam pembangunan sanitasi layak berkelanjutan. Mencapai akses kepada sanitasi dan kebersihan yang layak dan merata bagi semua serta mengakhiri BAB sembarangan melalui program ODF (*open defection free*)/bebas BABs. Berikut kondisi sanitasi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan:

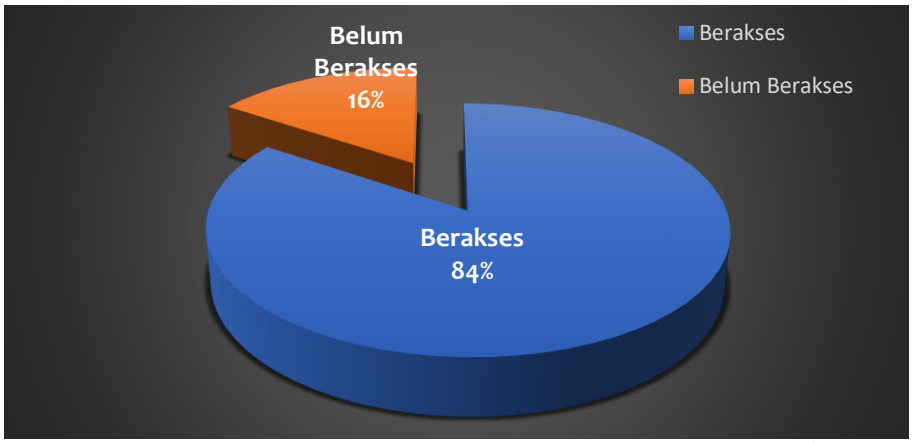
Tabel II.142
Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/ Kota	BAB Sembarangan (%)	Akses Jamban (%)	Septic Tank Layak (%)	Ketersediaan Truk Tinja (%)	Kondisi IPLT
1	Kepulauan Selayar	21,76	78,24	56,64	21,60	Belum Tersedia
2	Bulukumba	7,51	92,49	83,71	83,71	Rusak
3	Bantaeng	8,66	91,34	87,87	87,87	Tidak Berfungsi
4	Jeneponto	15,59	84,41	71,18	71,18	Belum Tersedia
5	Takalar	7,71	92,29	40,74	40,74	Tidak

No	Kabupaten/ Kota	BAB Sembarangan (%)	Akses Jamban (%)	Septic Tank Layak (%)	Ketersediaan Truk Tinja (%)	Kondisi IPLT
						Berfungsi
6	Gowa	5,67	94,33	81,94	81,94	Belum Tersedia
7	Sinjai	10,63	89,37	70,13	70,13	Berfungsi
8	Bone	7,67	92,33	16,02	76,31	Rusak
9	Maros	16,75	83,25	7,72	75,53	Tidak Berfungsi
10	Pangkajene Kepulauan	20,17	79,83	10,19	69,64	Belum Tersedia
11	Barru	6,80	93,20	23,11	76,31	Berfungsi
12	Soppeng	3,35	96,55	60,03	36,52	Belum Tersedia
13	Wajo	1,74	98,26	6,32	91,94	Tidak Berfungsi
14	Sidenreng Rappang	3,02	96,98	9,68	87,30	Tidak Berfungsi
15	Pinrang	3,32	96,68	41,60	55,08	Berfungsi
16	Enrekang	8,96	91,04	1,47	89,57	Belum Tersedia
17	Luwu	16,97	83,03	22,45	60,58	Belum Tersedia
18	Tana Toraja	3,95	96,05	33,84	62,21	Berfungsi
19	Luwu Utara	11,21	88,79	10,36	78,43	Belum Tersedia
20	Luwu Timur	9,89	90,11	33,16	56,95	Belum Tersedia
21	Toraja Utara	2,99	97,01	65,86	31,15	Belum Tersedia
22	Makassar	2,78	97,22	63,87	33,35	Berfungsi
23	Pare-Pare	0	100	12,82	87,18	Berfungsi
24	Palopo	7,81	92,12	0,01	92,18	Berfungsi
Sulawesi Selatan		**7,66**	**92,34**	**27,94**	**64,40**	

Sumber : Data Olahan AMPL, STBM, dan Dokumen SSK, Tahun 2018

Grafik II.15
Rumah Tangga Berakses Sanitasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.3.17 Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Besarnya timbunan sampah yang belum tertangani, menyebabkan berbagai fenomena permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk perkotaan. Selain menimbulkan pencemaran dan sumber berbagai penyakit menular, juga pudarnya nilai-nilai keindahan kota karena maraknya tumpukan-tumpukan sampah. Penanganan sampah di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar 75,41% yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan sampah belum dilakukan secara optimal. Beberapa faktor penghambat upaya penanganan sampah antara lain adalah masih terbatasnya TPA dengan sistem yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perUUan yaitu sistem sanitary landfill. TPA dengan sistem *sanitary landfill* baru diterapkan di Kabupaten Bulukumba dan Barru.

Tabel II.143
Sampah Perkotaan yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	n.a	66,61	71,67	74,5	75,41

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.18 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah dibandingkan dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan rasio 2,09 unit/jiwa.

Tabel II.144
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah tempat ibadah	Unit	17.304	16.941	17.785	17.003	18.129
Jumlah penduduk	Jiwa	8.342.049	8.380.765	8.520.304	8.606.375	8.690.294
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Unit/ Jiwa	2,07	2,02	2,09	1,98	2,09

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel II.145
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Rasio Tempat Ibadah		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Ibadah	Rasio
1	Kepulauan Selayar	133.003	382	2,87
2	Bulukumba	415.713	1.097	2,64
3	Bantaeng	185.581	500	2,69
4	Jeneponto	359.787	857	2,38
5	Takalar	292.983	521	1,78
6	Gowa	748.200	1.441	1,93
7	Sinjai	241.208	774	3,21
8	Bone	751.026	1.496	1,99
9	Maros	346.383	726	2,10
10	Pangkajene Kepulauan	329.791	533	1,62
11	Barru	172.767	315	1,82
12	Soppeng	226.466	478	2,11
13	Wajo	395.583	668	1,69
14	Sidenreng Rappang	296.125	495	1,67
15	Pinrang	372.230	527	1,42
16	Enrekang	203.320	783	3,85
17	Luwu	356.305	1.028	2,89
18	Tana Toraja	231.519	1.017	4,39
19	Luwu Utara	308.001	1.108	3,60
20	Luwu Timur	287.874	674	2,34
21	Toraja Utara	228.414	883	3,87
22	Makassar	1.489.011	1.337	0,90
23	Pare-Pare	142.097	189	1,33
24	Palopo	176.907	300	1,70
Sulawesi Selatan		**8.690.294**	**18.129**	**2,09**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.1.3.19 Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R ini bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Konsep 3R ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah dilaksanakan, tetapi sulit implementasinya. Karena keberhasilan konsep 3R ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dengan mengubah perilakunya yang pada umumnya dipengaruhi oleh karakter sosial budaya dan karakter sosial ekonomi yang mewarnai kehidupan masyarakat. Penerapan konsep 3R dalam mengelola sampah secara swakelola oleh masyarakat bukanlah hal baru dalam pengelolaan sampah. Namun pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R harus diawali dengan mengubah perilaku "membuang" sampah menjadi perilaku "mengelola" sampah. Pada tahun 2017 dari total 79.297 ton sampah yang mengalami daur ulang di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk ke TPA sejumlah 8,52% atau 6.753 ton.

Tabel II.146
Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pegelolaan sampah sebelum masuk TPA	Ton	1.095	1.460	4.015	5.840	6.753
Total volume sampah	Ton	76.138	76.943	77.748	78.533	79.297
Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,44	1,90	5,16	7,44	8,52

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

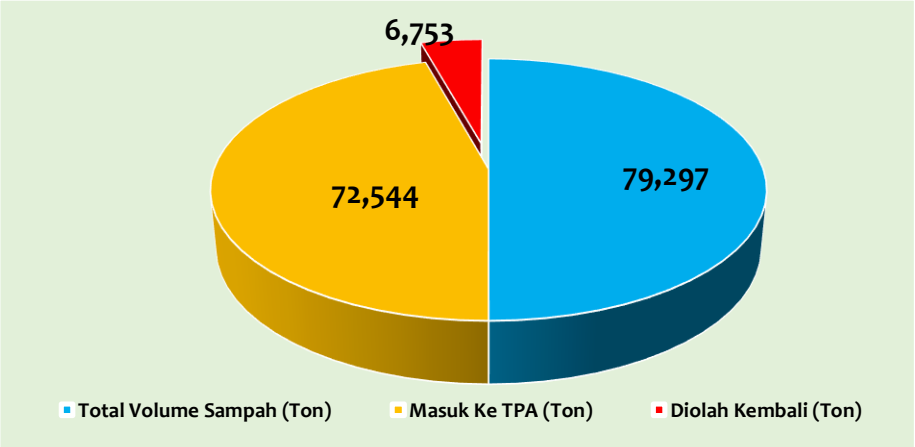
Tabel II.147
Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah		
		Total Volume Sampah (Ton)	Volume Sampah di Perkotaan Yang Mengalami Guna Ulang, Daur ulang, Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Sebelum Masuk TPA (M^3/Thn)	Persentase (%)
1	Kepulauan Selayar	1.214	0	0,00
2	Bulukumba	3.973	182,5	4,81
3	Bantaeng	1.693	365	21,56

No	Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah		
		Total Volume Sampah (Ton)	Volume Sampah di Perkotaan Yang Mengalami Guna Ulang, Daur ulang, Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Sebelum Masuk TPA (M^3/Thn)	Persentase (%)
4	Jeneponto	3.283	182,5	5,56
5	Takalar	2.673	365	13,66
6	Gowa	6.826	0	0,00
7	Sinjai	2.201	182,5	8,29
8	Bone	6.853	365	5,33
9	Maros	3.161	365	11,55
10	Pangkajene Kepulauan	1.009	365	12,13
11	Barru	1.576	365	23,16
12	Soppeng	2.067	0	0,00
13	Wajo	3.610	182,5	5,06
14	Sidenreng Rappang	2.702	547,5	20,26
15	Pinrang	3.397	1.277,5	37,61
16	Enrekang	1.855	182,5	9,84
17	Luwu	3.251	182,5	5,61
18	Tana Toraja	2.113	0	0,00
19	Luwu Utara	2.811	0	0,00
20	Luwu Timur	2.627	0	0,00
21	Toraja Utara	2.084	0	0,00
22	Makassar	11.587	1.095	8,06
23	Pare-Pare	1.297	182,5	14,07
24	Palopo	1.614	365	22,62
Sulawesi Selatan		**79.297**	**6.753**	**8,52**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

Grafik II.16
Penanganan Sampah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.3.20 Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa ruang untuk RTH di Kawasan Perkotaan di Sulawesi Selatan belum memenuhi standar minimal yang di persyaratkan.

Tabel II.148
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	20	23	24	25	25

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.21 Rasio ber-IMB per satuan Bangunan

Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa izin mendirikan bangunan sudah mengikuti rencana tata ruang, namun belum maksimal karena hampir setiap perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan belum mempunyai Perda RDTR Perkotaan.

Tabel II.149
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	%	25	29	35	38	48

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.22 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Untuk tahun 2013-2015 sumber data didapatkan dari citra Landsat, sementara untuk tahun 2016-2017 sumber didapatkan dari Data Spot. Sumber data berbeda mengakibatkan perbedaan data.

Tabel II.150
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan	%	25	29	35	38	48

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.3.23 Ketaatan terhadap RTRW

Pemerintah daerahbaik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Akan tetapi pemanfaatan RTRW sebagai acuan pelaksanaan

pembangunan belum optimal dilakukan, karena belum terintegrasinya program prioritas RTRW dalam dokumen perencanaan daerah baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) maupun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Tabel II.151
Ketaatan terhadap RTRW
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketaatan Terhadap RTRW	%	60	65	65	70	70

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibandingkan jumlah penduduk, sehingga jumlah rumah layak huni adalah ±1.839,211 rumah di tahun 2017.

Tabel II.152
Rasio Rumah Layak Huni
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Rumah Layak Huni		0,190	0,191	0,192	0,193	0,194

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.4.2 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendataan berdasarkan indikator kumuh yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, hingga saat ini masih terdapat kawasan kumuh sebesar 2.242,43 Ha.

Tabel II.153
Lingkungan Permukiman Kumuh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,101	0,100	0,099	0,098	0,048

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.4.3 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, luas kawasan kumur yang tertangani tahun 2013-2017 adalah sekitar 951,49 Ha atau sekitar 35,49% dari total luas permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat persentase tertinggi dalam menangani kawasan kumuh adalah Kabupaten Sinjai sebesar 84,93%, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Jeneponto hanya sebesar 3,42%.

Tabel II.154
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Permukiman Kumuh Tertangani	Ha		88	208,33	374,33	951,49
Luas Permukiman Kumuh	Ha	2.680,84	2.680,84	2.680,84	2.680,84	2.680,84
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%		3,28	7,77	13,96	35,49

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

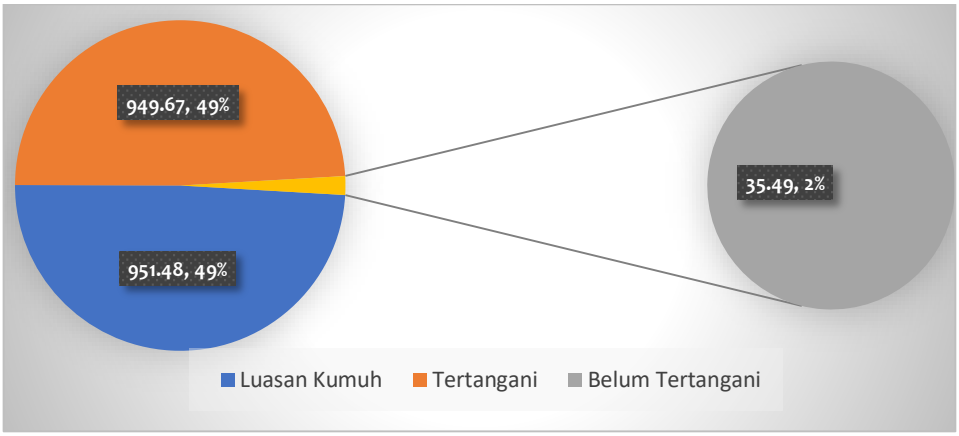
Tabel II.155
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani			
		Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Kepala Daerah (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	Persentase Pengurangan (%)	Luas Kawasan Kumuh Saat ini (Ha)
1	Kepulauan Selayar	24,27	14,93	61,52	9,34
2	Bulukumba	56,00	39,65	70,80	16,35
3	Bantaeng	39,36	19,71	50,08	19,65
4	Jeneponto	365,92	12,50	3,42	353,42
5	Takalar	29,05	8,40	28,92	20,65
6	Gowa	231,03	118,61	51,34	112,42
7	Sinjai	67,09	56,98	84,93	10,11
8	Bone	260,46	14,26	5,47	246,2
9	Maros	5,74	1,84	32,06	3,90
10	Pangkajene Kepulauan	37,39	3,20	8,56	36,19
11	Barru	31,04	4,50	14,50	26,54
12	Soppeng	4,69	2,30	49,04	2,19
13	Wajo	40,62	28,38	69,87	12,24
14	Sidenreng Rappang	22,40	5,77	25,76	16,63
15	Pinrang	20,64	17,43	84,45	3,23
16	Enrekang	38,47	5,60	14,56	32,87
17	Luwu	202,60	24,18	11,93	178,42
18	Tana Toraja	14,25	4,50	31,58	9,75
19	Luwu Utara	42,30	12,40	29,31	29,9
20	Luwu Timur	19,78	6,70	33,87	13,08
21	Toraja Utara	24,39	11,61	47,60	12,78
22	Makassar	740,02	317,44	42,90	422,58

No	Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani			
		Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Kepala Daerah (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	Persentase Pengurangan (%)	Luas Kawasan Kumuh Saat ini (Ha)
23	Pare-Pare	274,00	163,35	59,62	110,65
24	Palopo	89,33	57,25	64,09	32,08
Sulawesi Selatan		**951,48**	**949,67**	**35,42**	**35,49**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018

Grafik II.17
Luas Kawasan Kumuh (Ha)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

2.3.1.5 Bidang Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tabel dibawah memperlihatkan bahwa cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) masih berada pada angka 32% di tahun 2013 namun terus meningkat hingga mencapai angka 34,54% di tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

Tabel II.156
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0	32,29	32,84	34,04	34,54

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Tabel dibawah menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 90% di tahun 2014 menjadi 93% ditahun 2017.

Tabel II.157
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	0	90	91	92	93

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.5.3 Persentase Penegakan PERDA

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami Peningkatan. Dari tabel dibawah menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2014 hanya sekitar 10% dan mengalami peningkatan menjadi 75% di Tahun 2017.

Tabel II.158
Persentase Penegakan PERDA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penegakan PERDA	%	0	10	35	55	75

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6 Bidang Urusan Sosial

2.3.1.6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2013 jumlah total Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 320.720 jiwa dan yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 57.362 jiwa. jumlah yang menerima bantuan sosial ini masih dirasa cukup sedikit karena jika dilihat dari nilainya hanya 17,88% dari total keseluruhan jumlah PMKS. Adapun permasalahan yang sering di hadapi di lapangan yaitu masih kurangnya petugas dalam melakukan pendataan dimana petugas tersebut harus melakukan verifikasi dan validasi data 2 kali dalam 1 tahun di setiap kab/kota.

Pada tahun 2014 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) naik mejadi 321.765 jiwa, dari jumlah PMKS tersebut yang menerima bantun sosial sebanyak 77.376 jiwa atau 24,04%, jika dilihat dari jumlah penerima bantuan ada sedikit kenaikan dari penerima bantuan tahun 2013 daan penerima bantuaan tahun 2014. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Peran petugas pendata dalam hal ini adalah Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) masih kurang maksimal sehingga masih adanya masyarakat yang belum terdata dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tahun 2015 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 376.071 jiwa dan yang mendapatkan batuan sosial bebanyak 101.154 jiwa atau 26,90%. Tahun 2016 jumlah penyandang msalah kesejahteran sosial (PMKS) sebanyak 456.381 jiwa dan yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 187.972 atau 41,18%. Sampai dengan tahun 2017 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosia (PMKS) sebanyak 584.240 jiwa dengan jumlah yang menerima bantuan sosial sebanyak 185.514 jiwa atau 31,75%.

Tabel II.159
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	57.362	77.376	101.154	187.972	185.514
Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jiwa	320.720	321.765	376.071	456.381	584.240
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	17,88	24,04	26,90	41,18	31,75

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6.2 Persentase PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani adalah jumlah PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pedidikan dan sandang pangan sampai dengan bantuan sosial berbentuk usaha ekonomi produktif dan bantuan kelompok usaha bersama. Pada tahun 2013 jumlah PMKS sebanyak 320.720 jiwa dan yang tertangani sebanyak 117,385 jiwa atau 36,60%. Tahun 2014 jumlah PMKS

sebanyak 321.765 jiwa dan yang tertangani sebanyak 112.163 jiwa atau 34,855. Tahun 2015 jumlah PMKS sebanyak 376.071 jiwa dan yang PMKS tetangani sebanyak 104.542 atau 27,80%. Tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 456.361 jiwa dan PMKS yang tertangani sebanyak 216.431 atau 47.42%. tahun 2017 jumlah PMKS sebanyak 584.240 jiwa dan PMKS yang tertangani sebanyak 204.428 jiwa atau 35%. Adapun kendala yang di hadapi pada pencapaian target indiktor ini adalah masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk penanganan Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial di sulawesi selatan dan juga tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Tabel II.160
Persentase PMKS yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS yang Tertangani	Jiwa	117.385	112.163	104.542	216.431	204.428
Jumlah PMKS	Jiwa	320.720	321.765	376.071	456.381	584.240
Persentase PMKS yang Tertangani	%	36,60	34,85	27,8	47,42	35,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6.3 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mejadi salah satu standar pelayan minumum pada setiap panti yang ada, dalam pelayanan panti sangat penting keberadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan karena akan menunjang pelayanan yang dilakukan dalam penanganan klien atau santunan pada dalam panti. Itulah mengapa setiap panti harus memiliki standar pelayanan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Dari capaian taget indikator pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencakup 100% dikarenakan seluruh panti yang ada harus memiliki paling minumum sarana dan parsaran pelayana kesehatan. Kedala yang sering dihadapi yaitu, masih kurangnya jumlah peralatan dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu adanya penambahan unit alat kesehatan dan rehabilitasi tempat pelayanan kesehatan.

Tabel II.161
Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6.4 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

Pada tahun 2013 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan soslal yang berjumlah sebanyak 242 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 172 atau 68,25 %. pada tahun wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan soslal yang berjumlah sebanyak 283 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 182 atau 63,60 %. Pada tahun 2015 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan soslal yang berjumlah sebanyak 361 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 200 atau 55,40%.pada tahun 2016 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan soslal yang berjumlah sebanyak 383 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 250 atau 65,27%. Pada tahun 2017 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan soslal yang berjumlah sebanyak 773 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 350 atau 45,27%. Adapun kendala yang dihadapi terkait pencapaian indikator penyediaan sarana dan prasarana adalah masih kurangnya pengalokasian bantuan dari pemerintah setempat dalam hal ini kab/kota untuk melengkapi dan memperhitungkan kenaikan WKSBM pada setiap tahunnya.

Tabel II.162
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	WKBSM	172	180	200	250	350
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	WKBSM	252	283	361	383	773
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	68,25	63,60	55,40	65,27	45,27

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6.5 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Pencapaian target indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam hal ini bantuan logistik mulai pada tahun 2013 korban bencana sebanyak 49.044 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 31.152 jiwa atau 63,52%. Tahun 2014 korban bencana sebanyak 37,202 jiwa dan yang menerima

bantuan sosial sebanyak 25.205 jiwa atau 67,75%. Tahun 2015 korban bencana sebanyak 45.442 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 31.908 jiwa atau 70,25%. Tahun 2016 korban bencana sebanyak 42.611 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 31.998 jiwa atau 75,09%. Tahun 2017 korban bencana sebanyak 37.645 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 30.925 jiwa atau 82,15%. Adapun yang menjadi kedala dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana yaitu medan yang di lalui cukup berat dikarenakan lokasi bencana yang cukup jauh dan juga jalan yang kecil dimana sulit akses kendaraan roda 4 untuk mengantarkan bantuan tersebut harus menggunakan kendaraan besar seperti truk dan kendaraan sejenisnya. Dan apabila yang terjadi bencana sosial atau konflik sosial pendistribusian bantuan harus di perlambat karena harus menunggu keadaan tenang.

Tabel II.163
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	31.152	25.205	31.908	31.998	30.925
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	49.004	37.202	45.422	45.611	37.645
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	63,52	67,75	70,25	75,09	82,15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6.6 Persentase Korban Bencana Dievakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Cepat

Pencapaian target indikator korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat. Pada Tahun 2013 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 9.808 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 6.080 jiwa atau 61,90%. Pada Tahun 2014 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 7.440 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 5.084 atau 68,33%.

Pada Tahun 2015 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 9.084 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 8.622 jiwa atau 75.09%. Pada Tahun 2016 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 8522

jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 6.832 jiwa atau 80,16%. Pada Tahun 2017 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 9.808 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 7.529 atau 82,32%. Adapun yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan evakuasi korban bencana yaitu masih kurangnya petugas atau relawan dalam tanggap darurat, oleh karena itu walaupun sarana prasarana tanggap darurat lengkap tetapi tidak didukung oleh petugas dan relawan yang memadai akan menjadi penghambat dalam mengevakuasi korban bencana.

Tabel II.164
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	6.080	5.084	8.622	6.832	6.198
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	9.808	7.440	9.084	8.522	7.529
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	61,90	68,33	75,09	80,16	82,32

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.1.6.7 Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Pencapaian target indikator jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun di Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai yang tetap yaitu 1.135 jiwa. Sedangkan untuk indikator jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sekitar 15.272 jiwa dan tahun 2017 sekitar 17.668 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi bahwa persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami penurunan, dari 7,43% di tahun 2013 menjadi 6,42% di tahun 2017.

Tabel II.165
Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	15.272	15.310	17.668	18.124	17.668
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	7,43	7,41	6,42	6,26	6,42

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1 Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja Pertahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahunnya kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 sebesar 1,26% dengan jumlah perusahaan sebesar 12.201 perusahaan, pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,9% menjadi sebesar 2,16% menurun lagi pada tahun 2015 sebesar 0,27%, namun pada tahun 2016 meningkat lagi sebesar 0,07%, dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 0,27% dengan jumlah perusahaan sebesar 12.487 perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan sengketa pengusaha dan pekerja meningkat antara lain adalah meningkatnya wawasan pekerja dan buruh dan era transparansi sementara sebagian perusahaan masih belum melaksanakan secara maksimal aturan yang berlaku, disamping itu kendala SDM yang kita miliki dalam mengawasi dan melakukan pembinaan masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya ini dibuktikan dengan data pengawas maupun mediator kurang lebih 50 sd 60 orang yang mau melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap 12.487 perusahaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut untuk Internal Dinas adalah berupaya untuk menambah jumlah mediator dan pengawas setiap tahunnya dan tenaga teknis diupayakan untuk ditingkatkan pengetahuannya melalui bimbingan teknis dan ketrampilan. Sementara untuk eksternal pengusaha dan pekerja secara terus menerus dilakukan pembinaan baik pelatihan maupun bimbingan teknis agar pengusaha maupun pekerja memahami posisi dan kewajiban masing-masing sehingga pada gilirannya keduanya bisa saling memahami dan bersinergi dalam membangun kebersamaan dalam

mengurus perusahaan yang pada akhirnya bisa mengurangi bahkan mempersempit ruang perselisihan. Perlu upaya pemerintah untuk dapat memfasilitasi sengketa antara pemilik perusahaan dan karyawan.

Tabel II.166
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	Kasus	155	267	235	244	279
Jumlah Perusahaan	Perusahaan	12.201	12.366	12.487	12.487	12.487
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1,26	2,16	1,89	1,96	2,23

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.2 Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sesuai table diatas menggambarkan nilai fluktuatif, tahun 2013 kasus yang terselesaikan sebesar 90,96 %, kemudian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 76,40 % dan tahun 2015 meningkat kembali sebesar 87,66 %, dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat mencapai peningkatan sampai sebesar 100 %. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak-pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan social ekonomi perusahaan.

Tabel II.167
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	90,96	76,40	87,66	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.3 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 78,58%, mengalami penurunan sebesar 34% pada tahun 2014 menjadi 44,99%, dan pada tahun 2015 meningkat lagi sebesar 17% menjadi 61,67%, namun pada tahun 2016 turun lagi sekitar 16 persen menjadi 45,59 persen dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 5,61% menjadi 51,20%. Fluktuasi terhadap besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sangat dipengaruhi oleh

ketersedian data dari kabupaten/kota yang diolah secara online, dimana ada beberapa kabupaten yang sama sekali tidak mengirim data karena penghentian anggaran operasional dari kementerian ketenagakerjaan. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggaran dari kementerian pada beberapa kabupaten kota yang tidak mendapat anggaran, dan juga memaksimalkan fungsi dari fungsional pengantar kerja.

Tabel II.168
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	78,58	44,99	61,67	45,59	51,20

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.4 Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap jumlah perusahaan. Keselamatan dan perlindungan K3 dari tahun 2013-2017 rata rata mencapai realisasi sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa hampir semua perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan sudah menerapkan SMK3. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) dari tahun ketahun tingkat kepatuhan terhadap norma K3 mengalami kemajuan yang menggembirakan. Dalam Pasal 5 ayat (2) PP tersebut, bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya wajib menerapkan SMK3. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 4.573 Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dari jumlah perusahaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sejumlah 12.487 Perusahaan.

Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah kualitas SDM maupun kuantitas Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan yang ada Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah kurang lebih 55 orang.cPersentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselematan danckesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran sejumlah perusahaan telah menerapkan keselamatan dan kesejahatan kerja bagi para pekerjanya.

Tabel II.169
Keselamatan dan Perlindungan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Keselamatan dan Perlindungan	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.5 Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Bahwa perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terlihat dengan ditetapkannya Upah Minimum setiap tahunnya, dimana kemampuan membayar perusahaan tidak semua sama tergantung banya faktor sehingga timbul perselisihan antara pekerja dan pengusaha, namun terhadap hal ini telah diberikan jalan oleh Peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Tabel II.170
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.6 Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2013 – s017 berfluktuatif, dimana pada tahun 2013 sebesar 4,97%, pada tahun 2014 turun sebesar 0,62% menjadi 4,35%, dan pada tahun 2015 mengalami stagnan dan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 4,50% dan 5,00%. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan jumlah besaran pengujian peralatan di perusahaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 624 perusahaan dari total jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 adalah sebanyak 12.487 perusahaan.

Peningkatan besaran pengujian peralatan di perusahaan perlu terus ditingkatkan agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Setiap peralatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja atau dibutuhkan sertifikasi untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja dalam setiap operasinya. Di Indonesia setiap peralatan kerja harus disertifikasi sesuai dengan ketentun dan perundangan yang berlaku untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Sebagaimana yang telah diketahui dan dijalankan sampai saat ini, sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan lokasi dimana peralatan kerja tersebut akan dioperasikan. Seperti di pabrik-pabrik produksi dan perkebunan untuk sertifikasinya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun didalam melaksanakan pemeriksaan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih memiliki kendala dari segi kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan masih sangat terbatas hanya berjumlah kurang lebih 60 orang, disamping itu kualitas SDM nya juga masih sangat terbatas terutama terkait tenaga ahli.

Tabel II.171
Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	4,97	4,35	4,35	4,50	5,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.7 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 hanya berkisar 52,38%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 47,62% menjadi 100%, dan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 100%, namun pada tahun 2017 menurun sebanyak 20% dibandingkan pada tahun 2016. Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja.

Tabel II.172
Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	52,38	100	100	100	80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.8 Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 hanya berkisar 67,95%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 22,05% menjadi 100%, dan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 100%, namun pada tahun 2017 menurun sebanyak 23,33% menjadi 66,67% dibandingkan pada tahun 2016. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.173
Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	67,95	100	100	100	66,67

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.9 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuatif. Dimana pada tahun 2013 sebesar 79,05% kemudian pada tahun 2014 dan tahun 2015 turun menjadi masing-masing sebesar 74,52 pada tahun 2015 dan 71,22 persen. Dan pada tahun 2016 naik sekitar 0,59% menjadi 71,81%, Namun pada tahun 2017 turun lagi menjadi 0,73% menjadi 71,08%. Ada banyak factor yang mempengaruhi turunnya kepesertaan jamsostek salah satunya adalah sebagian perusahan masih bersifat sentralistik artinya pekerjanya di Makassar tapi terdaftar BPJS ketenagakerjaannya di Jakarta dan tidak terlaporkan di Makassar. Kemudian ada peserta yang keluar masuk BPJS ketanagakerjaan terutama pekerja kontrak atau pekerja di sektor konstruksi.

Tabel II.174
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	79,05	74,52	71,22	71,81	71,08	73,54

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.10 Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2013 – s017 berfluktuatif, dimana pada tahun 2013 sebesar 8,71%, pada tahun 2014 turun sebesar 2,84% menjadi 5,87%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 19,36% menjadi sebesar 25,23% dan pada tahun 2016 meningkat lagi sebesar 3,60% menjadi sebesar 28,83%. Namun pada tahun 2017 turun sebesar 3,35%. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan jumlah besaran pemeriksaan di perusahaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 3.182 perusahaan dari total jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 adalah sebanyak 12.487 perusahaan. Memperhatikan perkembangan jumlah perusahaan yang melapor sejaka pelaksanaan system pemerintahan otonomi daerah, dimana pertumbuhannya hamper tidak bergerak. Demikian pula pertumbuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan ada juga tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung berkurang karena usia pension.

Tabel II.175
Besaran Pemeriksaan Perusahaaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pemeriksaaan Perusahaaan	%	8,71	5,87	25,23	28,83	25,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.11 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan prosentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2013 sampai 2017 secara umum cenderung berfluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 sebesar 60,32% mengalami kenaikan sebesar 1,72% pada tahun 2014 menjadi sebesar 62,04%, pada tahun 2015 turun sebesar 1,10 point dibanding TPAK pada tahun 2014 menjadi 60,94%, dan TPAK tahun 2016 kembali terkoreksi sebesar 1,98% dibanding TPAK pada tahun 2015 menjadi 62,92%, Tahun 2017 turun sebesar 1,94 point dibanding TPAK pada tahun 2016 menjadi 60,98%. Meningkat atau menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Usia Kerja, Semakin tinggi Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, maka TPAK akan semakin tinggi, namun jika terjadi hal yang sebaliknya maka TPAK akan menurun.

Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, diharapkan jumlah lapangan kerja juga tersedia agar tidak terjadi peningkatan pengangguran, namun dari data BPS tergambar bahwa Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi berpendidikan SD berkisar 40% hingga 45%, disusul pendidikan SMP 14% hingga 16%, SMTA/Kejuruan berkisar 23% hingga 26%, kemudian perguruan tinggi 11% hingga 15%, dan pendidikan Diploma 2% hingga 4%. Untuk mengurangi jumlah pengangguran dinas tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan berbagai upaya baik melalui pelatihan pelatihan bagi calon pencari kerja (putus sekolah, perempuan, petugas lansia), pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan produktivitas, pemberdayaan kelompok usaha mandiri dan wirausaha produktif maupun penyebar luasan kesempatan kerja melalui job fair.

Tabel II.176
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,32	62,04	60,94	62,92	60,98	61,44

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.1.12 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas

Rasio Kesempatan Kerja adalah merupakan prosentase Penduduk Yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2013 hingga 2017 persentase penduduk yang bekerja terhadap total jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami fluktuasi. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun keatas mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 realisasi rasio kesempatan kerja sebesar 57,24%, pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,64% menjadi 58,88%, dan mengalami penurunan sebesar 1,57 persen menjadi 57,31 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,59% menjadi 59,90% namun pada tahun 2017

mengalami penurunan sebesar 5,61%. Penurunan persentase rasio kesempatan kerja sebagai akibat menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di beberapa sektor yaitu :

a. Sektor Pertanian, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 39,73% menurun pada tahun 2017 sebesar 76.350 orang menjadi 38,67%, hal ini disebabkan :
   1. Berkurangnya lahan pertanian, karena adanya alih fungsi lahan pertanian kelahan permukiman;
   2. Adanya teknologi mekanisasi pertanian dimana alih peran dari tenaga manusia beralih kepenggunaan mesin-mesin pertanian yang lebih efisien dan efektif dalam pengolahan lahan;
   3. Pengaruh iklim.

b. Sektor Konstruksi, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 7,11% menurun pada tahun 2017 sebesar 29.989 orang menjadi 6,47%.

c. Sektor Industri, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 7,65% menurun pada tahun 2017 sebesar 19.818 orang menjadi 7,31%, hal ini disebabkan :
   1. Penggunaan mesin-mesin yang dioperasikan secara digital dengan teknologi modern yang bersumber dari penanaman modal asing dengan menggunakan TKA sehingga dapat mengurangi tenaga kerja lokal dengan dalih proses alih pengetahuan kepada tenaga kerla lokal.
   2. Sektor Pertambangan dan Penggalian, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 1,09% menurun pada tahun 2017 sebesar 11.532 orang menjadi 0,80%, hal ini disebabkan beberapa usaha pertambangan tidak beroperasi sebagai akibat dari kebijakan yang memberatkan pengusaha tambang.

Tabel II.177
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	57,24	58,88	57,31	59,90	54,01	57,47

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.2 Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

2.3.2.2.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jumlah KIM tersebut meningkat 8,32% dalam 5 tahun.

Tabel II.178
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	5,00	10,16	6,16	19,89	13,62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.2.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Sulawesi Selatan telah menjangkau 90% wilayah provinsi pada tahun 2016.

Tabel II.179
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	n.a	n.a	n.a	90	n.a

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.2.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Pada tahun 2013, 47,12% atau sebesar ±4.4 juta masyarakat telah memiliki HP/telepon, kemudian meningkat 11,41% di tahun 2016 atau sebesar 5.573.026 orang.

Tabel II.180
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	%	47,12	49,75	56,21	58,53	n.a

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.2.3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Peningkatan penggunaan internet meningkat cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, dari ±2 juta penduduk di tahun 2013 menjadi 3.985.591 orang di tahun 2017.

Tabel II.181
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	21,99	26,57	37,72	39,21	42,04

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.2.4 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Kepemilikan komputer pribadi meningkat sebesar 8,83% dalam 5 tahun terakhir, dari ±1,6 juta orang di tahun 2013 menjadi 2.549.299 orang di tahun 2017.

Tabel II.182
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	18,06	25,20	20,58	21,73	26,89

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.3 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.2.3.1 Presentase Koperasi Aktif

Tahun 2013 jumlah koperasi sebanyak 8.230 unit yang aktif sebanyak 5.624 unit atau 68,33% disebabkan karena beberapa kabupaten/kota tidak memiliki Lembaga yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif sejumlah 5.331 unit atau 62,24dari total 8.565 unit koperasi. Pola pembinaan yang dilakukan beberapa kabupaten/kota dinilai kurang terarah dimana masih banyak kabupaten/kota yang lembaganya terkait urusan koperasi masih bergabung dengan OPD lain, sehingga kualitas kelembagaan masih kurang. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebanyak 5.427 unit atau berkisar 62,48%, dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan sudah adanya kejelasan terkait pola pembinaan serta aktifnya peran penyuluh koperasi di lapangan. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sejumlah 5.185 unit atau 58,64% dari total 8.841 unit jumlah koperasi. Penurunan ini terjadi disebabkan karena adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang pembubaran Koperasi bagi yang sudah tidak aktif dan tidak ingin dibina. Tahun 2017 jumlah koperasi meningkat menjadi 8.845 unit koperasi dengan jumlah koperasi aktif 5.226 unit atau 59,08%. Terkait bertambahnya jumlah koperasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah koperasi aktif, maka pihak Kementerian sangat selektif dalam memberikan perizinan serta telah kita usulkan beberapa koperasi tidak aktif untuk dibubarkan.

Tabel II.183
Presentase Koperasi Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Koperasi Aktif	%	68,33	62,24	62,48	58,64	59,08

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

Tabel II.184
Pengembangan Koperasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/ Kota/Status	Jumlah Koperasi (Unit)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
1	Kepulauan Selayar	132	52	138	48	141	47	143	49	147	44
2	Bulukumba	186	117	224	78	222	80	222	80	229	79
3	Bantaeng	133	79	139	78	123	96	126	95	131	94
4	Jeneponto	47	180	137	90	121	110	121	111	154	90
5	Takalar	270	68	272	69	234	116	243	113	249	109
6	Gowa	364	149	414	122	424	117	453	117	455	115
7	Sinjai	97	29	106	26	110	25	115	25	114	26
8	Bone	759	175	185	753	183	754	184	754	184	754
9	Maros	185	126	204	125	229	118	236	117	237	116
10	Pangkajene Kepulauan	240	69	246	70	253	69	262	67	264	66
11	Barru	87	22	93	22	96	22	97	22	97	22
12	Soppeng	190	7	191	7	192	7	181	22	182	21
13	Wajo	223	190	256	186	270	182	281	181	282	160
14	Sidenreng Rappang	161	193	176	182	178	182	178	182	184	182
15	Pinrang	204	109	228	109	249	97	259	96	270	96
16	Enrekang	84	98	65	89	83	101	85	104	88	117
17	Luwu	203	213	206	213	206	216	187	237	187	237
18	Tana Toraja	99	44	102	43	100	62	118	45	116	42
19	Luwu Utara	152	85	174	76	149	84	173	85	154	105
20	Luwu Timur	179	76	190	71	185	77	159	113	144	92
21	Toraja Utara	62	38	60	42	53	63	70	60	70	60
22	Makassar	1.134	223	1.134	366	1.163	364	808	720	808	720
23	Pare-Pare	103	101	127	80	111	96	123	92	123	92
24	Palopo	191	76	193	82	192	90	204	82	200	86
25	Provinsi	113	72	113	72	134	68	131	72	138	72
26	Sekunder	26	15	26	15	26	15	26	15	19	22
Jumlah		**5.624**	**2.606**	**8.230**	**68**	**5.427**	**3.258**	**5.185**	**3.656**	**5.225**	**3.619**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.3.2 Presentase Usaha Mikro dan Kecil

Beberapa permasalahan terkait pengembangan usaha mikro dan kecil diantaranya adalah:

1. Para pengelola belum professional dan akuntabel dalam pengelolaan;
2. Para pengelola belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk;
3. Kemampuan dalam mengakss teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah;
4. Masih banyak pengelola yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
5. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran.

Tabel II.185
Presentase Usaha Mikro dan Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	71,45	90,35	91,64	92,48	94,29

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.4 Bidang Urusan Penanaman Modal

2.3.2.4.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan jumlah proyek mencapai 689. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan kepada investor, peningkatan iklim yang lebih kondusif, system perizinan yang lebih baik dan adanya jaminan kepastian hokum dari pemerintah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.186
Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	145	183	505	281	689

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.4.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2017 cenderung meningkat diakibatkan karena kondisi ekonomi regional yang stabil.

Tabel II.187
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	5,32	7,90	12,10	8,30	11,48

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada perusahaan beskala nasional di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 mencapai angka 301 orang/proyek, diakibatkan karena pada adanya proyek yang berskala nasional yang merealisasikan proyeknya pada sektor jasa lainnya (industri semen) yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun berikutnya angka rasio daya serap tenaga kerja di Provinsi

Sulawesi Selatan menurun karena perusahaan-perusahaan sebagian besar menggunakan mesin-mesin yang berteknologi sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel II.188
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Proyek	301	91	55	29	11

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.4.4 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Terjadinya fluktuasi nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Selatan diakibatkan karena peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif dan adanya jaminan kepastian hokum dari pemerintah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga turut mendorong peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel II.189
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-60	437	86	64	-41

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.5 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.2.5.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2013 berjumlah 651 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah organisasi 655. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 kemudian persentasenya menurun pada tahun 2017 yaitu nilai 8,31%.

Tabel II.190
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	9,06	9,06	7,10	8,49	8,31

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

Persentase pemuda yang aktif dalam lima tahun terakhir dalam keadaan tetap sehingga pembinaan difokuskan pada 59 organisasi pemuda yang aktif. Hal ini sesuai dengan persyaratan organisasi pemuda yang terdaftar di KNPI. Jumlah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Jumlah organisasi pemuda meningkat sejak tahun 2013 hingga 2017. Namun persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kelembagaan yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga kabupaten/kota belum terbentuk di Sulawesi Selatan.

2.3.2.5.2 Persentase Wira Usaha Muda

Pada tahun 2017 persentase wirausaha muda mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh karena dinamika perekonomian global nasional.

Tabel II.191
Persentase Wira Usaha Muda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Wirausaha Muda	%	19,80	21,78	25,74	19,80	10,89

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.5.3 Cakupan Pembinaan Olahraga

Penambahan jumlah cabang olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebanyak satu cabang olahraga. Jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawsi Selatan sejak tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 50 cabang olahraga.

Tabel II.192
Cakupan Pembinaan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	40	40	42	42	40

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.5.4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2015 hingga 2017 jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami penurunan sebanyak 90 orang. Kecenderungan penurunan jumlah pelatih bersertifikat kemungkinan dipengaruhi oleh persyaratan lisensi sertifikasi yang tidak dapat dipenuhi. Jumlah seluruh pelatih di Sulawesi Selatan mengalami stagnasi dengan jumlah 907 pelatih sejak lima tahun.

Tabel II.193
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	17,64	22,05	22,60	19,29	12,13

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.5.5 Cakupan Pembiaan Atlet Muda

Jumlah atlet binaan dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan sejumlah 90 atlet. Sedangkan jumlah seluruh atlet pelajar di Sulawesi Selatan dari tahun 2013 hingga 2017 tidak mengalami peningkatan jumlah.

Tabel II.194
Cakupan Pembiaan Atlet Muda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	4,15	4,15	4,34	4,34	4,34

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.5.6 Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih berbagai prestasi yaitu :

a. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga antara lain : 1. Atlet PPLP meraih 4 medali emas, 3 medali perak dan 24 medali perunggu pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional di

Semarang Jawa Tengah. 2. Atlet PPLP meraih 13 medali emas, 3 medali perak dan 11 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP.

b. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah antara lain :

1. Atlet PPAPD meraih 5 medali emas, 2 medali perak pada Pekan Olahraga Antar Mahasiswa di Makassar.
2. Atlet PPAPD meraih 2 medali emas, 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Jawa Timur open.
3. Atlet PPAPD meraih 1 medali perak pada event Bosowa Maraton.
4. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas pada Kejuaraan Indonesia Timur.
5. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Kempo meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada pada event Kejurnas Piala Walikota Tangeran.
6. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Karate meraih 1 medali perunggu pada event Piala Panglima.
7. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada kejuaraan Gojukai se Selselbar dan Tenggara.
8. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, pada Kejuaraan Silat Antar Periai Putih di Jakarta.

c. Prestasi A Tradisonal/Kemasyarakatan Atlet yang berkebutuhan khusus Sulawesi Selatan pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional menempati urutan ke 12 dengan perolehan medali : 6 medali emas, 5 medali perak dan 4 medali perunggu.

Jumlah atlet berprestasi tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan jumlah 81 atlet pada tahun 2017.

Tabel II.195
Jumlah Atlet Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	50	39	46	76	81

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.5.7 Jumlah Prestasi Olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Peningkatan kualitas pelatih dan kuantitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Diharapkan agar pemerintah mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan di kabupaten/kota serta menginisiasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk membuat inovasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahrag (SIPOR).

Tabel II.196
Jumlah Prestasi Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	17	18	17	14	16

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.6 Bidang Urusan Statistik

2.3.2.6.1 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan sistem data statistik setiap tahun.

Tabel II.197
Data dan Statistik yang Terintegritas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Jumlah	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.6.2 Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun buku Kabupaten Dalam Angka setiap tahun.

Tabel II.198
Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Jumlah	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.6.3 Buku (PDRB)

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun buku PDRB setiap tahun.

Tabel II.199
Ketersediaan Buku PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Buku "PDRB"	Jumlah	Ada (48)	Ada (48)	Ada (48)	Ada (48)	Ada (48)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.7 Bidang Urusan Persandian

2.3.2.7.1 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam KomunikasiPerangkat Daerah

Persentase keterhubungan antar Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi telah menjangkau seluruh perangkat daerah.

Tabel II.200
Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah	%	0	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.8 Bidang Urusan Kebudayaan

2.3.2.8.1 Penyelangaraan Festival Seni dan Budaya

Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 46.717 Km2, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 Kota, dengan jumlah penduduk sesuai data BPS tahun 2018 kurang lebih 8,7 Juta Jiwa, dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk ini melakoni kehidupannya diwarnai/ dipengaruhi oleh 3 Etnis yaitu: Etnis Makassar, Bugis dan Toraja, masing-masing Etnis ini memiliki Kesenia Daerah yang berbeda-beda walaupun dalam pergaulannya sangat kental dan harmonis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membina, melestarikan dan mengembangkan Kesenian Daerah sebagai warisan Budaya, tugas tersebut pada tahun Anggaran 2013 – 2017, telah dilakukan terhadap Seniman melalui Kelompok/Sanggar Seni berupa; memberikan bantuan kepala Kelompok/Sanggar Seni dari Kab/Kota yang bersyarat, dan juga memberikan kesempatan sekaligus menfasilitasi para Pelaku Seni/Sanggar Seni yang berprestasi untuk menampilkan karya seninya pada event-event daerah maupun pada event nasional.

Daya Tarik Kesenian Daerah Sulawesi Selatan tidak kalah bersaing dengan Kesenian Daerah Provinsi Lain, bahkan pada berbagai event tingkat nasional tim seni budaya Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan apresiasi ditingkat pusat, termasuk Festival Tari Nusantara di Jakarta tahun 2014 Tim Tari Provinsi Sulawesi Selatan meraih Prestasi sebagai "Penata Rias dan Busana Terbaik" dan pada Event Festival Nasional Teater Anak-Anak 2015 meraih prestasi sebagai "Sutra Dara Terbaik". Seiring dengan perkembangan zaman, dimana para generasi muda sudah sangat mudah mengakses segala jenis kesenian modern melalui berbagai macam media yang dapat merusak mental generasi muda, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah tetap menghidupkan, membina, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya sebagai alat perekat diantara etnis dan menjadi aset daerah.

Tabel II.201
Penyelangaraan Festival Seni dan Budaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	16	16	15	19	22

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.8.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya (benda, situs dan kawasan cagar budaya) kurang lebih 700 buah, tersebar di 24 Kab./Kota. Data tersebut menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya yang cukup banyak sehingga perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik. Upaya pengelolaan dan pelestariannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannyan diperlukan adanya upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga implikasinya dapat mengancam Keberadaan Cagar Budaya, maka diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya. Dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tujuan melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dan mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat Nasional dan Internasional.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2013 hingga 2017 melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi, telah melakukan pelestarian terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Upaya pelestarian Cagar Budaya dari tahun ketahun telah dilakukan, namun belum menunnjukkan peninggakatan yang cukup signifikan. Dalam upaya Pelestarian, setiap Cagar Budaya perlu ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya yang mempunyai tugas Verifikasi dokumen pendaftaran, melakukan kajian pemeringkatan Cagar Budaya, melakukan penetapan Cagar Budaya, memberikan rekomendasi tentang pengusulan Cagar Budaya Peringkat Nasional dan memberi Rekomendasi tentang penghapusan Cagar Budaya.

Tabel II.202
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Di lestarikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	4	5	3	1	3

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.8.3 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terdapat di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan, yang jumlahnya saat ini baru dapat dicatat oleh seksi Sejarah dan Nilai Tradisional Bidang Sejarah dan Cagar Budaya sebanyak 670 Karya Budaya. Sejak Tahun 2013 s/d 2018 dari jumlah tersebut hanya 44 yang dianggap lengkap datanya dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 44 WBTB Indonesia asal Sulawesi Selatan itu ada 2 yang telah mendapatkan pengakuan Dunia sebagai warisan Dunia oleh UNESCO.

Tabel II.203
Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Buah	4	3	3	6	6

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.9 Bidang Urusan Perpustakaan

2.3.2.9.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2017. Data pada tabel dibawah menunjukkan jumlah pengunjung selama kurun waktu 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan sekitar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat semakin meningkat.

Tabel II.204
Pengunjung Perpustakaan Per tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	342,152	438,686	440,579	513,408	621,306

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.9.2 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah koleksi buku pada tahun 2013 sebanyak 240.006 eksamplar dan tahun 2017 jumlah koleksi buku berjumlah 380.579 eksamplar, mengalami peningkatan sekitar 60,1%.

Tabel II.205
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksamplar	240,006	342,502	350,802	360,902	380,579

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.9.3 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana rasio perpustakan per satuan penduduk menagalami peningkatan, dimana tahun 2013 hanya sekitar 2.079 unit menjadi sebesar 3.009 unit.

Tabel II.206
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Unit	2.079	2.671	2.783	2.896	3.009

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.9.4 Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengunjung hanya sekitar 96.534 orang, sedangkan pada tahun2017 mengalami peningkatan menjadi sekitar 107.898 orang.

Tabel II.207
Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan / Tahun	Orang	96.534	1.893	72.829	107.898	107.898

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

1.3.2.9.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi buku perpustakaan juga mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 jumlah judul buku hanya sekitar 225.000 sedangkan pada tahun 2017 judul buku koleksi perpustakaan sudah berjumlah 571.002.

Tabel II.208
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	225,000	250,000	280,570	300,575	571,002

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.9.6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan tentunya harus ditunjang oleh jumlah tenaga pustakawan dan tenaga teknis yang bertugas di perpustakaan. Tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

Tabel II.209
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	1.200	1.500	1.800	2.300	2.900

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.10 Bidang Urusan Kearsipan

2.3.2.10.1 Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada Organisasi Perangkat daerah (OPD), sistem pengelolaan arsip merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan arsip merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi. Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi 62 OPD/Unit kerja dan Desa/Kelurahan di tahun 2017.

Tabel II.210
Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	OPD/Unit Kerja & Desa Kelurahan	47	50	54	58	62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.10.2 Peningkatan SDM Pengelolah Kearsipan

Dalam mengelola arsip secara baku membutuhkan tenaga sumberdaya manusia yang memadai. Organisasi Perangkat daerah (OPD) /Unit kerja terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang ditingkatkan kulitasnya dalam pengelolaan kearsipan setiap tahunnya.

Tabel II.211
Peningkatan SDM Pengelolah Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	2.727	3.010	3.250	3.620	3.700

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.11.1 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan , baik ekeskutif dan yudikatif di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 (45,26%) hingga tahun 2017 (49,66%) meskipun belum optimal dan dibawah 50%, hal ini disebabkan karena para pemimpin lembaga pemerintah sebagian sudah memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.212
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	45,26	47,95	48,41	48,91	49,66

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Terlihat

dengan adanya peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat pada periode pemilihan 2009-2014. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode Pemilu, yaitu periode 2004-2009, periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 mengalami peningkatan, namun belum dapat mencapai kuota 30%, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

Terbitnya *grand design* peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 10 tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan berhasil meningkatkan motivasi perempuan untuk masuk dan berkiprah di partai politik dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

Tabel II.213
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	%	17	19	19	21	21

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2013 yaitu 64 % meningkat menjadi 71% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka untuk perempuan, meskipun posisi perempuan di perusahaan atau pabrik kebanyakan bukan menempati posisi strategis atau posisi pengambil keputusan melainkan sebagai karyawati seperti sekretaris dan administrasi atau buruh pada pabrik.

Tabel II.214
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	64	65	67	69	71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Anak merupakan penentu kualitas sumberdaya manusia dan akan menjadi pilar utama pembangunan, oleh karena itu seluruh popuasi anak perlu ditingkatkan kualitasnya, mendapatkan perlindungan sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak memiliki tenaga kerja dibawah umur, terutama yang bekerja di usaha-usaha informal, asisten rumah tangga, hotel tempat karoke, pedagang asongan(untuk diwilayah perkotaan), pemulung dst. Kondisi tempat kerja tersebut sangat rentan dengan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, seks bebas dan narkoba.

Dari jumlah tenaga informal dan formal, pekerja anak mengalami peningkatan yg cukup signikan dari tahun-tahun dan pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 0,042 persen atau jika dirata-ratakan meningkat 0,011 persen pertahun, inipun berdasarkan data dari 12 kabupaten/kota (Makassar, Gowa, Maros, Bone, Barru, Palopo, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, Pare-Pare, Bantaeng dan Kota Pare-Pare) yang memberikan laporan. Fenomena meningkatnya pekerja usia anak merupakan permasalahan klasik yaitu masalah ketidak berdayaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak dalam keluarga. karena alasan ekonomi dan minimnya pendidikan orang tua membuat banyak anak yang putus sekolah dan bahkan tidak bersekolah dan kemudian anak ikut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

Tabel II.215
Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0,02	0,02	0,15	0,18	0,40

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.5 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan. Kecenderungan. Melalui data Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dapat dikatakan bahwa hanya 43,76 persen saja dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja pada tahun 2017. Saat ini, perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) Sulawesi Selatan lebih banyak berkegiatan mengurus rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa kerja di Sulawesi Selatan masih banyak dikuasai oleh penduduk laki-laki.

Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial

budaya, stereotip terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah (Khotimah, 2009).

Tabel II.216
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	48,18	45,33	44,31	47,47	43,76

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Berdasarkan data yang tercantum, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2013-2017 realisasi 100%, dimana semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih baik ditingkat kabupaten maupun kota, hal ini merujuk pada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban.

Tabel II.217
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

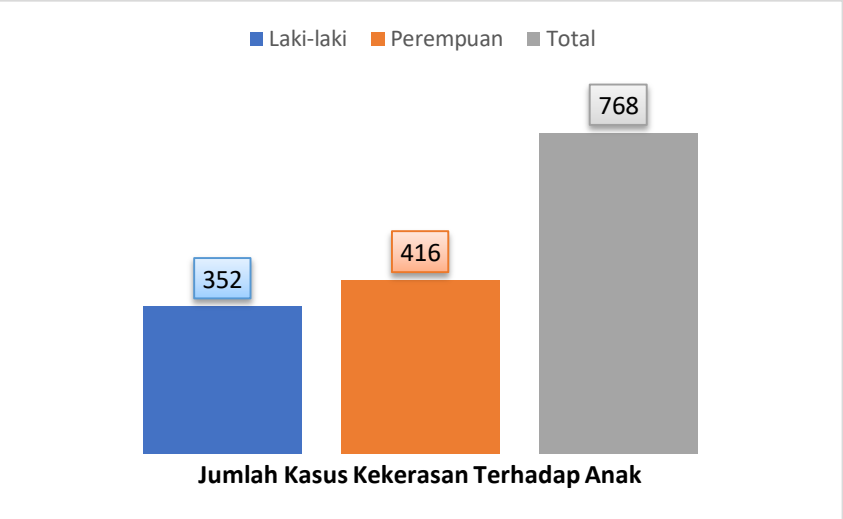
Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Pada tahun 2017, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan sebanyak 1537 kasus. Dari jumlah ini 769 kasus (50%) adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 768 kasus (50%) adalah kasus kekerasan terhadap anak. 27 kasus diantaranya adalah perempuan difabel.

Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, tertinggi terjadi di Kota Makassar dengan jumlah 424 kasus. Demikian juga kasus kekerasaan terhadap anak, tertinggi juga terdapat di Kota Makassar dengan jumlah 245 kasus, menyusul Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 77 kasus. Daru jumlah kasus tersebut, 54% korbannya anak perempuan dan 46% anak laki-laki.

Grafik II.18
Jumlah Kasus Terhadap Anak
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



Sumber : DP3A Provinsi Sulawesi Selatan

2.3.2.11.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Berdasarkan tabel diatas bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit realisasi 100% tahun 2013-2017, dimana semua kasus korban kekerasan akan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasien/klien di fasilitasi kesehatan akan terlayani 100% berdasarkan tingkat keterpaparannya/diagnosa hasil pemeriksaan, terkecuali pada kasus kasus tertentu pasien/klien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau pelayanan khusus.

Tabel II.218
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.8 Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang mengalami disfungsisosial/traumatik sehingga klien/korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat, lembaga/petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka menindak lanjuti kasus klien. Berdasarkan tabel diatas bahwa cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2013-2017 rata-rata korban yang mendapatkan rehabsos sebanyak 45 persen , sebab tidak semua korban menginginkan untuk Rehab Sosial. Diharapkan semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih.

Tabel II.219
Layanan Rehabilitas Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di dalam Unit Pelayanan Terpadu.	%	43	43	46	44	49

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.9 Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Peyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Sulsel sejak tahun 2013 sd 2017 mencapai 100%. seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh Penyidik seluruhnya terproses dan dikawal oleh pendamping dari P2TP2A Maupun Unit PPA Polda/Polres/Poltabes ketingkat pengadilan, demikian pula tingkat kejaksaan tetap terproses dengan baik hingga putusan.

Tabel II.220
Cakupan Penegakan Hukum Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.10 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan tabel, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum kurun waktu lima tahun (2013-2017) data berfluktuasi. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

Tabel II.221
Cakupan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	55	55	58	57	54

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.11 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Layanan reintegrasi sosial, merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban /klien kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Pelayanan lembaga P2TP2A dalam reintegrasi terhadap korban /klien adalah melakukan layanan terapi oleh konselor selama dalam penanganan, sebagai wujud perlindungan kepada klien disiapkan rumah aman kemudian diberikan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien . Reintegrasi akan dilakukan jika kondisi klien sudah siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban.

Persentase klien/korban yang dipulangkan ke keluarga yang ditangani oleh Layanan P2TP2A Provinsi Sulsel sampai tahun 2017 sebanyak 29 persen, dan jika dirata-ratakan klien yang di reintegrasi sebanyak 27 persen termasuk klien yang dipulangkan diluar provinsi sulsel yakni Maluku, Kendari dan Kalimantan.

Tabel II.222
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	28	26	27	26	29

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.12 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SD bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki.

Tabel II.223
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	%	99,93	100,11	101,55	100,75	100,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.13 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan anak perempuan sudah mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP meskipun pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan namun APM nya masih diatas 100%.

Tabel II.224
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	%	104,01	105,04	106,59	105,33	104,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.14 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perempuan sudah mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan belajar di bangku SMA, rasionya meningkat secara siginifikan pada tahun 2015 sebesar 101,86 menjadi 110,6.

Tabel II.225
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%	100,03	102,02	102,95	101,86	110,6

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.15 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perempuan sudah diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi sama seperti laki-laki. Hal ini berarti jenjang pendidikan perempuan yang ditempuh semakin meningkat disebabkan kesadaran bahwa perempuan harus meningkatkan kualitas ilmu dan pendidikan sama seperti laki-laki.

Tabel II.226
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	%	108,05	110,02	110,02	0	103,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.11.16 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017) di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tidak ada lagi perempuan yang buta huruf pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sudah mencapai nilai 100. Kesadaran kaum perempuan untuk bisa baca tulis semakin meningkat, hal ini berkorelasi dengan rasio APM perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan SMP hingga perguruan tinggi juga sudah mencapai nilai 100.

Tabel II.227
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	100,57	100,49	100,15	100,28	100,4

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.12 Bidang Urusan Pangan

2.3.2.12.1 Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) selama 5 tahun (2013 hingga 2017) ketersediaan beras per kapita per tahun suda melebihi dar kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 105,2 kg/kapita/tahun, tahun 2016 sebesar 18,9 kg/kapita/tahun. Sehingga berdasarkan hasil analisi data menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) rata-rata 3,6 kali lipat dari kebutuhan konsumsi beras.

Tabel II.228
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	339,4	361,9	352	373,6	384

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tahun 2018

2.3.2.12.2 Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)

Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan ketersediaan jagung per kapita per tahun telah melebihi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 2,3 kg/kapita/tahun dan tahun 2016 sejumlah 2,8 kg/kapita/tahun.

Tabel II.229
Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	10,23	15,17	24,33	34,02	38,89

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.3.2.12.3 Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)

Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan ketersediaan jagung per kapita per tahun telah melebihi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 4,0 kg/kapita/tahun dan tahun 2016 sejumlah 3,9 kg/kapita/tahun.

Tabel II.230
Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	5,28	6,06	23,56	23,71	20,88

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.3.2.12.4 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita

Jika mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) tahun 2012 adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yaitu Energi = 2.400 kkal/kapita/hari dan Protein 63 gram/kapita/hari sehingga dapat dikatakan bahwa kecukupan rata-rata gizi setiap hari semua penduduk Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sudah melebihi dari standar yang ditetapkan.

Tabel II.231
Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Energi	kkal/ kapita/ hari	4.609	6.557	5.544	5.862	5.769
Ketersediaan Protein	gram/ kapita/ tahun	130,51	168,76	154,52	168,34	164,38

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.3.2.12.5 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pada tahun 2013 berdasarkan hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah serta produk perikanan dapat dilihat bahwa dari jumlah yang diambil sampelnya 113 sampel yang aman dikonsumsi sekitar 65 atau 57,52% dan sisanya 48 atau 42,48% tidak aman dikonsumsi. Sehingga Sayur, Buah, dan Produk Perikanan yang aman dikonsumsi berdasarkan hasil uji residu pestisida, mikroba dan formalin sebesar 57,52%. Pada tahun 2014 hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah dengan total sampel adalah 59 sampel, sejumlah 46 sampel atau 77,96% dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Sisanya sejumlah 13 sampel atau 22,04% tidak aman dikonsumsi. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah sampel yang aman untuk dikonsumsi. Kategori sampel yang tidak aman terdapat pada pengujian residu pestisida dan pengujian formalin pada buah.

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah dengan jumlah sampel 66 sampel yang dikategorikan aman sebanyak 51 atau 77,27% sampel. Sedangkan 15 sampel dinyatakan tidak aman atau 22,73% dari total jumlah sampel. Sampel yang tidak aman ini dari kategori buah dengan uji formalin, sedangkan sayur dengan pengujian residu pestisida dan logam berat dinyatakan semuanya aman. Pada tahun 2016 berdasarkan hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 101 sampel dan dinyatakan aman sejumlah 86 sampel atau 85,13%. Sedangkan 15 sampel dinyatakan tidak aman atau 14,85%. Sampel sayur yang tidak aman terdapat pada pengujian residu pestisida sedangkan sampel buah terdapat pada pengujian formalin. Terjadi peningkatan yang signifikan tingkat keamanan pangan dari tahun 2015 sejumlah 7,86%. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk pengambilan sampel sayur dengan jumlah sampel 23 sampel dinyatakan bahwa semua sampel yang diuji dengan parameter residu pestisida, logam berat dan mikroba aman untuk dikonsumsi dalam arti 100% sampel sayur aman.

Tabel II.232
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	57,52	77,93	77,27	85,13	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) mulau dari Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 3 pilar ketahanan pangan yaitu pilar ketersediaan pangan, pilar akses pangan dan pilar pemanfaatan pangan.

Kecamatan yang terindikasi sangat rentan terhadap kerawanan pangan terdapat 5 Kecamatan yang tersebar di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone (Kecamatan Bontocani), Kabupaten Luwu (Kecamatan Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara, dan Walenrang Barat), dan Kabupaten Toraja Utara (Kecamatan Rantebua). Faktor penyebab terindikasinya Kecamatan sangat rentan terhadap kerawanan pangan adalah Persentase Penduduk Miskin; Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Usia 15 Tahun keatas; Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk; Persentase Balita Stunting; Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih; Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik; dan Persentase Angka Kesakitan.

Kecamatan yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan terdapat 4 Kecamatan yang tersebar di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone (Kecamatan Tellulimpoe), Kabupaten Luwu (Kecamatan Suli Barat), dan Kabupaten Luwu Utara (Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi). Faktor penyebab terindikasinya Kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan adalah Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk; Persentase Angka Kesakitan; Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Usia 15 Tahun keatas; Persentase Balita Stunting; Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih; dan Persentase Penduduk Miskin.

Kecamatan yang terindikasi agak rentan terhadap kerawanan pangan terdapat 7 Kecamatan yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Gowa (Kecamatan Bungaya), Kabupaten Maros (Kecamatan Tompobulu), Kabupaten Luwu (Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Utara), Kabupaten Luwu Utara (Kecamatan Limbong), dan Kabupaten Toraja Utara (Kecamatan Buntao dan Kecamatan Buntu Pepasan). Faktor penyebab terindikasinya Kecamatan agak rentan terhadap kerawanan pangan adalah Persentase Penduduk Miskin; Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Usia 15 Tahun keatas; Persentase Angka Kesakitan; Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk; Persentase Balita Stunting.

Hasil Pemetanaan Untuk tingkat Kabupaten/Kota (tahun 2017) yang keluaran petanya adalah seluruh Desa/Kelurahan Lembang yang berada di Provinsi Sulawesi

Selatan (3.030Desa/Kelurahan/Lembang), menunjukkan bahwa hasil analisis komposit ketahanandan kerentanan pangan untuk perbandingan seluruh Desa/Kelurahan/Lembang yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terdapat 78 (2,78%) Desa/Kelurahan/Lembang yang terindikasi sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, 164 (5,41%) Desa/Kelurahan/Lembang terindikasi rentan terhadap pangan, 510 (16,83%) Desa/Kelurahan/Lembang yang terindikasi tahan terhadap pangan, serta terdapat 2.278 (75,18) Desa/Kelurahan/Lembang yang terindikasi prioritas 4 atau sangat tahan terhadap pangan. Faktor penyebab terindikasinya Kelurahan sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi adalah Tingginya rasio rumah tangga yang tidak sejahtera; Masih banyaknya Desa tanpa akses kendaraan roda 4 dan air yang dapat dilalui sepanjang tahun; Tingginya rasio rumah tangga tanpa sarana BAB yang memadai; Tingginya rasio rumah tangga tanpa akses ke air bersih; dan Tingginya rasio rumah tangga tanpa akses listrik sebagai sumber penerangan utamanya. Faktor penyebab terindikasinya Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi adalah Tingginya rasio rumah tangga yang tidak sejahtera; Tingginya rasio rumah tangga tanpa sarana BAB yang memadai; dan Tingginya rasio rumah tangga tanpa akses ke air bersih.

Tabel II.233
Sebaran Kerawanaan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan/ Lembang	Jumlah Desa			
				Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan	Tahan Pangan
1	Kepulauan Selayar	11	88	10	5	10	63
2	Bulukumba	10	136	1	1	18	116
3	Bantaeng	8	67	0	0	5	62
4	Jeneponto	11	113	0	8	76	29
5	Takalar	9	100	2	2	7	89
6	Gowa	18	167	0	2	19	146
7	Sinjai	9	80	0	3	8	69
8	Bone	27	372	7	21	68	276
9	Maros	14	103	0	6	23	74
10	Pangkajene Kepulauan	13	103	3	16	16	68
11	Barru	7	55	0	1	8	46
12	Soppeng	8	70	0	1	6	63
13	Wajo	14	176	1	3	21	151
14	Sidenreng Rappang	11	106	1	3	5	97
15	Pinrang	12	108	5	4	4	95
16	Enrekang	12	129	1	6	36	86
17	Luwu	22	227	23	23	48	133
18	Tana Toraja	19	159	6	31	36	86
19	Luwu Utara	12	179	16	13	31	119
20	Luwu Timur	11	128	0	1	7	120

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan/ Lembang	Jumlah Desa			
				Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan	Tahan Pangan
21	Toraja Utara	21	151	3	15	58	75
22	Makassar	14	143	0	2	2	139
23	Pare-Pare	4	22	0	0	0	22
24	Palopo	9	48	0	1	4	43
Sulawesi Selatan		**306**	**3.030**	**79**	**168**	**516**	**2.267**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tahun 2018

2.3.2.13 Pertanahan

2.3.2.14 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.14.1 Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi

Dokumen RPPLH memuat tentang latarbelakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2017 DPLH Prov. Sulsel telah menyususn dokumen RPPLH Sulawesi Selatan untuk 2017-2047, sehingga target IKD tersedianya dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai pada tahun 2017. Skenario RPPLH prov. Sulsel adalah sebagai berikut:

- Periode I (tahun 2017 - 2026)
- Periode II (tahun 2027 - 2036)
- Periode III (tahun 2037 - 2047)

Tabel II.234
Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.2 Tersusunnya RPPLH Provinsi

Dengan adanya dokumen RPPLH maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penyusunan peraturan daerah tentang RPPLH. Tahun 2019 direncanakan untuk menyusun naskah akademik Ranperda RPPLH, di tahun 2020 direncanakan penyelesaian penyusunan RPPLH prov. Sulsel menjadi Peraturan Daerah.

Tabel II.235
Tersusunnya RPPLH Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersusunnya RPPLH Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.3 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi

Dokumen RPPLH diselesaikan pembuatannya pada bulan desember 2017, sehingga dokumen ini baru dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan dalam rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) prov. Sulsel. Dokumen RPPLH digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD pada tahun 2018. Sehingga RPPLH telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Provinsi.

Tabel II.236
Integrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.4 Tersedianya dokumen KLHS Provinsi

Pada tahun 2017, prov. Sulsel telah menyusun dokumen KLHS untuk dua KRP (Kebijakan, Rencana, Program) yaitu KLHS RZWP3K dan KLHS RTR Pusat Bisnis Terpadu. Untuk tahun 2018 dokumen KLHS yang dibuat adalah KLHS RPJMD. Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibuat KLHS revisi RTRW provinsi. KLHS RZWP3K, KLHS RTR Pusat Bisnis Terpadu, dan KLHS revisi RTRW provinsi pelaksanaannya melekat pada anggaran dinas penanggungjawab KRP masing-masing. Namun, DPLH menjadi tim pokja dalam penyusunan KLHS tersebut. Untuk pelaksanaan tahun selanjutnya, mengikuti perencanaan dari instansi terkait yang akan melaksanakan kegiatan wajib KLHS.

Tabel II.237
Ketersediaan Dokumen KLHS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan KLHS sejak berlakunya PP 46 tahun 2016 diwajibkan untuk setiap KRP baik tingkat provinsi maupun kab/kota, sehingga di tiap tahunnya selalu terdapat KLHS yang diselenggarakan oleh kab/kota/provinsi.

Tabel II.238
Penyelenggaraan KLHS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.6 Peningkatan Indeks Kualitas Air

Penentuan nilai IKA (Indeks Kualitas Air) Sulawesi Selatan didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air pada 27 sungai lintas kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas air untuk setiap sungai dilakukan pada lokasi hulu, tengah dan hilir. Kecenderungan penurunan kualitas air di beberapa daerah di Sulawesi Selatan telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya paremater e-Coli, BOD dan COD yang semakin meningkat. Selain itu meningkatnya jumlah limbah domestik yang masuk kedalam badan sungai, hal ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Peningkatan limbah domestik akan meningkatkan pencemaran air yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan konsentrasi parameter BOD dan COD di badan air sungai. Secara umum, nilai IKA di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2013 – 2017 apabila dilihat kecenderungan linear-nya maka nilai IKU cenderung menurun dengan laju penurunan 0,57 per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan yang cukup besar dari 56,29 menjadi 72,43 dan 75,44 atau terjadi penurunan nilai indeks sebesar 19,15 poin. Sementara pada tahun 2017 IKA Sulawesi Selatan kembali menurun menjadi 54,29. Hal ini karena adanya perubahan lokasi pemantauan, dimana kualitas air yang dipantau pada tahun 2017 tidak lebih baik dibandingankan tahun 2016. Nilai IKU Sulawesi Selatan ini berada dibawah IKU nasional yaitu 60,38. Nilai IKU ini secara umum dalam kategori kurang baik.

Tabel II.239
Indeks Kualitas Air
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Kualitas Air		57,14	56,29	56,29	75,44	54,29

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.7 Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Penentuan nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) Sulawesi Selatan didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler yang dilakukan di 24 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas udara untuk setiap kabupaten dilakukan pada lokasi roadside, terminal dan pemukiman. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa daerah di Sulawesi Selatan telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan konsentrasi parameter SO_2 dan NO_2 di udara ambien.

Secara umum, nilai IKU di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2013 – 2017 apabila dilihat kecenderungan linear-nya maka nilai IKU cenderung meningkat dengan laju peningkatan 0,136 per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup besar dari 90,43 menjadi 76,80 atau terjadi penurunan nilai indeks sebesar 13,63 poin. Namun pada tahun 2016 dan 2017 IKU Sulawesi Selatan kembali meningkat menjadi 85,80 dan 88,66. Nilai IKU Sulawesi Selatan ini berada diatas IKU nasional yaitu 81,61. Nilai IKU ini secara umum masih dalam kategori baik dilihat dari parameter SO2 dan NO2.

Tabel II.240
Indeks Kualitas Udara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	87,98	90,43	76,80	85,80	88,66

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penjumlahan nilai dari lima indeks yaitu Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan (IPH), Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA), dan Indeks Kondisi Habitat (IKH). Data IKTL Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, penggunaan Kawasan hutan untuk sektor diluar kehutanan, dan pemukiman. Adanya kecenderungan penurunan IKTL menunjukkan korelasi dengan tutupan lahan berhutan di tingkat tapak yang dimungkinkan dikarenakan terjadi penurunan kelas hutan menjadi non hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan seharusnya berfungsi sebagai penjaga tata air, penyedia udara bersih, penyerap polutan, serta penyedia jasa ekosistem lainnya. Perubahan fungsi hutan akan mengganggu kualitas dan kuantitas air, kesuburan tanah, kualitas udara, dan ekosistem hutan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan. Kawasan hutan yang tidak berhutan dan secara alamiah harusnya berupa hutan mengindikasikan hutan belum terkelola dengan baik.

Tabel II.241
Indeks Tutupan Lahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	50,10	50,10	50,85	55,43	54,81

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.9 Laporan Inventarisasi GRK

Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011dimana Pasal 9 Gubernur bertugas menyelenggarakan Inventarisasi GRK di tingkat Provinsi. Pasal 12 ayat 2 "Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari kabupaten dan atau kota Menteri satu kali dalam setahun. Dalam pelaksanaan dari tahun 2013 – tahun 2017 kegiatan inventarisasi dilakukan setiap tahun untuk 3 sektor antara lain sektor limbah, sektor Afolu (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan sektor energi . Sedangkan untuk sektor industri belum dilakukan.

Tabel II.242
Ketersediaan Inventarisasi GRK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Laporan Inventarisasi GRK	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.10 Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Jenis kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah kegiatan Program Kampung Iklim, Inventarisasi GRK dan lain-lain. Target yang akan dicapai pada saat itu adalah jumlah lokasi yang dibina. Sedangkan laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2016 bahwa terdapat target penurunan emisi GRK sekitar 29 % kegiatan sendiri dan 41 % dengan bantuan pihak luar pada tahun 2029. Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pergub No. 59 Tahun 2012 RAD Penurunan Emisi GRK memiliki target 22, 56 % dan dilakukan kaji ulang pada tahun ini. Target Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak bisa mengikuti target tersebut karena tidak semua kegiatan dalam RAD tidak dikerjakan oleh DPLH tetapi oleh instansi teknis lain seperti dinas kehutanan, dinas pertanian, dinas peternakan, dinas tarkim, dinas esdm dan pemerintah kabupaten/kota. Lebih memungkinkan targetnya adalah menginventarisasi aksi mitigasi yang ada di sektor dan melakukan analisis berapa penurunan emisi dari kegiatan tersebut dan dijabarkan dalam sebuah laporan tiap tahun. Dengan laporan ini bisa digunakan dalam pengisian PEP online Bappenas dan SRN online Kementerian LHK.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Instansi terkait belum bisa melakukan identifikasi jenis kegiatan yang masuk dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi;
2. RAD Penurunan Emisi GRK belum diintegrasikan kedalam renstra instansi terkait

Tabel II.243
Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.11 Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfataan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 tahun 2014). Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan atau pelaku usaha/kegiatan. Hasil pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3 sejumlah 611.898 Ton, Tahun 2016 sejumlah 677.869 Ton dan Tahun 2017 sejumlah 667.900 Ton, dari perusahaan di sektor rumah sakit, pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Data menggambarkan bahwa pengelolaan limbah B3, terlihat bahwa berbagai sektor di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan Limbah B3 yang dikelola terutama sektor pertambangan, energi menghasilkan limbah B3 dengan jumlah dan persentase yang dominan.

Tabel II.244
Jumlah Limbah B3 yang Dikelola
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	611.898	677.869	667.900

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.12 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Jumlah izin Lingkungan yang diawasi selama tahun 2013 sebanyak 6 izin lingkungan dari 46 izin/perusahaan, selanjutnya tahun 2014 sebanyak 15 izin dari 47 izin, tahun 2015 sebanyhak 25 izin dari 89 izin, tahun 2016 sebanyak 35 izin sari 110 izin dan tahun 2017 sebanyak 45 izin dari 131 izin. Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, BAPEDALDA) belum mempunyai PPLH, Tahun 2014-2017 jumlah sebanyak 5 Orang, serta tidak tersedianya sarana dan Prasarana Pengawasan yaitu kendaraan operasional dan alat Pelindung diri (APD) untuk pengawas tahun 2013 hingga 2017.

Tabel II.245
Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha	%	2,27	8,69	43,37	20,19	23,37

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.13 Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, dan pada masa sekarang ini pembangunan sedang gencarnya, terbukanya akses globalisasi, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan, perubahan ikim, pertambahan penduduk, pembuangan limbah B3, dan lain sebagainya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum diimbangi dengan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan oleh para pelaku usaha. Aturan perundangan yang berlaku, IzinLingkungan yang dikeluarkansering diabaikan (tidak ditaati) dan tidak dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan/atau kegiatan yang akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan. Untuk itu, dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang melakukan usaha dan / atau masyarakat pada umumnya mempunyai kewajiban dan menjadi upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan berkontribusi nyata dari setiap persoalan lingkungan yang ditemukan,kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tersebut akan menjadi sentral dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih maksimal.

Berdasarkan persoalan diatas maka dari tahun ketahun pengaduan dibidang lingkungan hidup atas terus bertambah demi mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih maksimal.

Tabel II.246
Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Lokasi Usaha Dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani	Pengaduan	Tidak Ada Data	5	7	8	9

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.14 Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi

Tersedianya data dan informasi Pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan melalui Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (SILHD SULSEL) meliputi data dan informasi:

1. Data umum Kab/Kota;
2. Data Timbulan sampah Kab/Kota;
3. Data komposisi sampah Kab/Kota;
4. Timbulan sampah harian;
5. Timbulan sampah terolah;
6. Volume sampah terangkut per hari;
7. Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah.

Tabel II.247
Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.14.15 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 27 "dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerntah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah" dalam penjelasan PP 81 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, bencana non alam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah terjadi kondisi khusus sehingga Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan pengangkutan, pengelolaan maupun proses akhir sampah.

Tabel II.248
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Pada Kondisi Khusus di Provinsi Kabupaten/Kota	%	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Penanganan sampah yang terangkut ke TPA Sanitary *Landfill*/*Control landfill* dan yang terkelola melalui rumah kompos adalah sebagai berikut:

Tabel II.249
Persentase Penanganan Sampah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Tahun	Timbulan Sampah	Tertangani		Persentase Penanganan Sampah
		Diangkut ke TPA	Kompos	
2013	1668,40	277,79	14,68	17,53
2014	1686,44	280,79	14,84	17,53
2015	1704,06	283,73	15,00	17,53
2016	1721,28	286,59	15,15	17,53
2017	1738,06	289,39	15,29	17,53

Sumber : Dinas Pengelolaan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa persentase sampah yang tertangani dalam kondisi khusus masih kurang yaitu 17,53% untuk upaya peningkatan persentase sampah tertangani menggunakan Model TPA *Sanitary Landfill* dan *Control Landfill* untuk Kab/Kota khususnya yang berada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang persentase timbulan sampahnya cukup besar.

2.3.2.15 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.15.1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Penduduk yang ber-KTP elektronik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh dinas Dukcapil Kabupaten/Kota serta tersedinya sarana dan prasarana perekaman dan penerbitan KTP-el yang memadai. Namun belum tuntas secara keseluruhan diakibatkan oleh kondisi yang dialami diantaranya:

a. Pernahnya terjadi kekosongan blanko KTP-el;
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el;
c. Masih adanya data ganda/anomali pada Database kependudukan;
d. Keterbatasan peralatan dan anggaran di Kabupaten/Kota.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan dimana tahun 2016 sejumlah 0,79 menjadi 0,82 pada tahun 2017.

Tabel II.250
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	0	0	0	0,79	0,82

Sumber : sipd.kemendagri.goi.id

2.3.2.15.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Terjadi peningkatan karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi seperti melalui

PKS dengan stakeholder terkait seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas, selain itu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

Tabel II.251
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0	0	0	0,81	0,86

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.15.3 Kepemilikan Akte Kelahiran

Terjadi peningkatan karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi seperti melalui PKS dengan stakeholder terkait seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas. Selain itu, upaya untuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran ataupun mengkonversi akte kelahiran manual ke akte kelahiran yang sudah terintegrasi ke SIAK senantiasa dilakukan. Kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan SPTJM untuk kondisi tertentu juga turut mendongkrak penerbitan akte kelahiran anak.

Tabel II.252
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	0	0	0	0	0,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.15.4 Rasio Pasangan Berakte Nikah

Masih Rendahnya cakupan kepemilikan akte nikah disebabkan oleh data yang dijadikan acuan adalah data SIAK sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan banyak akte nikah yang sudah diterbitkan jauh sebelumnya namun belum dikonversi ke dalam SIAK. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor budaya serta kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih banyaknya pasangan menikah yang belum memiliki akte pernikahan/buku nikah.

Tabel II.253
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Pasangan Berakte Nikah	0	0	0	0,09	0,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.15.5 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

UU 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 serta turunannya telah mengamanahkan penyediaan database kependudukan skala provinsi yang disajikan setiap semester.Di tingkat internal, aparatur pengelola adminduk telah menyediakan database kependudukan skala provinsi yang disajikan setiap semester.

Tabel II.254
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	0	0	0	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.15.6 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

UU 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 serta turunannya telah mengamanahkan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel II.255
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.15.7 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penduduk yang ber-KTP elektronik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan inovasi dan stelsel aktif yang dilakukan oleh dinas Dukcapil Kab/Kota serta tersedinya sarana dan prasarana perekaman dan penerbitan KTP-el yang memadai. Namun belum tuntas secara keseluruhan diakibatkan oleh kondisi yang dialami :

a. Pernahnya terjadi kekosongan blanko KTP-el;
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el;
c. Masih adanya data ganda/anomali pada Database kependudukan;
d. Keterbatasan peralatan dan anggaran di Kab/Kota.

Tabel II.256
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		0	0	0	77,36	79,92

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.15.8 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Terjadi peningkatan karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi seperti melalui PKS dengan stakeholder terkait seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas. Selain itu, upaya untuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran ataupun mengkonversi akte kelahiran manual ke akte kelahiran yang sudah terintegrasi ke SIAK senantiasa dilakukan. Kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan SPTJM untuk kondisi tertentu juga turut mendongkrak penerbitan akte kelahiran anak.

Tabel II.257
Penerbitan Akta Kelahiran
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		0	0	0	80,90	85,03

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.16 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.16.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Dari total 2.555 desa sejumlah 820 desa yang teridentifikasi kondisi sarana dan prasarana perkantorannya dan sejumlah 1.436 desa belum teridentifikasi. Sejumlah 710 desa sarana dan prasarana perkantoran dengan kondisi baik dan sejumlah 110 desa kondisi sarana dan prasarananya rusak.

Tabel II.258
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	-	-	-	-	31,47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.16.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Peningkatan kelompok binaan LPM terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu 51.650 total kelompok binaa LPM dengan jumlah LPM sebanyak 3.037 pada tahun 2015, sejumlah 56.431 kelompok binaan dengan jumlah LPM 3.037 pada tahun 2016, 60.866 kelompok binaan dengan jumlah LPM 3.038. Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM ini didukung oleh program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, akan tetapi melihat perkembangan yang ada pada tahun 2018 kelompok binaan LPM tidak bertahan lama oleh karena masih kurangnya pembinaan kepada anggota LPM serta pergantian kepengurusan LPM.

Tabel II.259
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LPM	Lembaga	3.024	3.038	3.037	3.037	3.038
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klp	3.024	3.038	51.650	56.431	60.866
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	17	19	20

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.16.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilyahan atau kegiatan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Berdasarkan data sampai pada tahun 2017, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 39 kelompok binaan dari 3.632 jumlah PKK, sehingga peran masyarakat dalam pemberdayaan yang menunjang pembangunan masih relatif besar serta dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi melalui pembinaan. Dibanding pada tahun 2015 yang kelompok binaan PKK hanya berkisar rata-rata 19 kelompok binaan hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam ikut andil dalam pembangunan menurun serta banyaknya kader yang tidak aktif disbanding tahun sebelumnya.

Tabel II.260
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK	Klp	11.361	11.787	7.531	3.328	3.632
Jumlah Kelompok Binaan	Klp	335.792	294.096	146.835	123.487	142.517
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	30	25	19	37	39

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.16.4 Persentase LPM Berprestasi

Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 indikator persentase LPM berprestasi sangat rendah dikarenakan tolak ukur untuk menentukan indikator LPM berprestasi menyebabkan banyak LPM masuk dalam golongan tidak berprestasi sehingga sampai tahun 2015 hanya 1,22% LPM berprestasi dari total 3.037 LPM. Selain itu capaian yang rendah disebabkan oleh pembinaan masih kurang terhadap tugas dan fungsi LPM didalam masyarakat. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 persentase LPM berprestasi meningkat disebabkan oleh peran aktif pemerintah daerah provinsi beserta kabupaten/kota dalam mendukung keterlibatan LPM dalam proses pembangunan yang sampai pada tahun 2017 mencapai 24,33% LPM berprestasi dari total 3.038 jumlah LPM.

Tabel II.261
Persentase LPM Berprestasi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LPM	Lembaga	3.024	3.038	3.037	3.037	3.038
Jumlah LPM Berprestasi	Lembaga	29	30	37	736	739
Persentase LPM Berprestasi	%	0,98	0,99	1,22	24,24	24,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.16.5 Persentase PKK Aktif

Jumlah PKK dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, Lembaga atau instansi, berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Berdasarkan data persentase PKK aktif mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 97,71%. Proses pembinaan yang terkendala dengan luasnya ruang lingkup pembinaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hingga tahun 2017 tercatat sejumlah 2.255 desa termasuk desa di wilayah kepulauan yang memiliki Tim Penggerak PKK dengan persentase aktif 97,71% dari 3.632 jumlah PKK.

Tabel II.262
Persentase PKK Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK	Klp	11.361	11.787	7.531	3.328	3.632
Jumlah PKK Aktif	Klp	11.074	11.315	7.536	3.251	3.549
Persentase PKK aktif	%	97,47	96,00	97,68	97,69	97,71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.16.6 Jumlah Posyandu Aktif

Jumlah pos yandu aktif dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2017 sejumlah 99,53% posyandu aktif dari total 10.988 posyandu. Keaktifan posyandu didukung oleh program/kegiatan melalui pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi posyandu. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembinaan posyandu adalah beberapa desa yang berada di wilayah kepulauan yang jauh.

Tabel II.263
Jumlah Posyandu Aktif
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Posyandu	Unit	9.429	9.408	9.695	9.775	10.988
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	9.324	9.126	9.589	9.725	10.936
Persentase Posyandu Aktif	%	98,89	97,00	99,28	99,49	99,53

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.17 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.17.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka ini masih tergolong tinggi diatas target nasional. Sempat mengalami penuruan pada tahun 2014 dan 2015, namun pada tahun berikutnya angkanya kembali naik. Penyebabnya adalah naiknya angka kelahiran, angka kemiskinan yang masih tinggi yang berakibat pada kurangnya pendidikan, serta pengaruh meningkatnya arus imigrasi ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun berkenan.

Tabel II.264
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,01	1,57	1,16	1,39	1,36

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.2 Total Fertility Rate (TFR)

Tingginya angka TFR ini yaitu angka rata-rata per wanita disebabkan oleh masih tingginya angka unmet need (kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), dan masih relatif tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pada program KB semakin menurun sejak era reformasi birokrasi, namun 3 tahun terakhir angka TFR menunjukkan penurunan meski masih diatas target nasional 2,1.

Tabel II.265
Total Fertility Rate (TFR)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,56	2,56	2,28	2,35	2,40

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 Kampung KB Belum dicanangkan. Tahun 2016 Kampung KB di canangkan oleh Presiden RI, berdasarkan surat edaran Mendagri No: 440/70/SJ, tanggal 11 Januari 2016. Tanggal 27 Oktober 2017, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan: 2548/X/2017 tentang pembentukan kelompok kerja Advokasi Akselerasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) provinsi Sulawesi Selatan, dan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan No : 472/7329/DISDUKCAPIL DALDUK KB, tanggal 6 Nopember 2017, perihal dukungan lintas program/sektoral pada kampung KB di Sulsel.

Tahun 2016 telah dicanangkan sebanyak 24 Kampung KB disetiap Kab/Kota provinsi Sulsel. Tahun 2017 telah dibentuk sebanyak 305 disetiap kecamatan se sulsel. OPD Provinsi yang berperan aktif di Kampung KB adalah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Pertiwi, Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Prov Sulsel. Jumlah OPD Provinsi Sulawesi Selatan : 49 OPD, sehingga OPD yang berperan aktif 24.5%.

Tabel II.266
Peran Aktif Perangkat Daerah Melalui Kampung KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	0	0	0	0	11,29

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.4 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah rata-rata anak yang lahir dalam satu keluarga mengalami penurunan dan secara bertahap diharapkan akan mencapai target nasional pada tahun 2019 yaitu 2,3. Penyebabnya adalah tingkat usia pernikahan pada perempuan dan laki-laki yang masih rendah. Diupayakan untuk mendorong laki-laki dan perempuan bisa terus meningkatkan tingkat usia pernikahan guna mencegah pernikahan anak. Saat ini perempuan berusia 15

hingga 19 tahun masih memilih usia 20 tahun sebagai usia terendah untuk menikah. Sementara itu, untuk laki-laki, sebanyak sebagian besar memilih usia 20 tahun sebagai usia terendah untuk menikah. Kami mendorong agar usia nikah terendah bisa naik ke usia 21 tahun dan usia tertinggi yang dipilih 25 tahun. Upaya itu dilakukan dengan terus mengintervensi remaja melalui pusat informasi dan konseling (PIK) remaja serta sosialisasi program Genre.

Tabel II.267
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak/ Keluarga	0	0	0	2,58	2,4

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.5 Ratio Akseptor KB

Rata – rata jumlah akseptor KB 67.11 %. Artinya terdapat 67,11 akseptor KB aktif dari pasangan usia subur (PUS). Melakukan Advokasi KIE bagi pasangan usia subur.

Tabel II.268
Ratio Akseptor KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ratio Akseptor KB	%	0	67,85	66,87	67,42	66,30

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.6 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Upaya pemerintah yang lain dalam meningkatkan kesehatan adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). KB diharapkan dapat mengatur jarak kelahiran sehingga mengurangi angka kematian ibu, menjamin tumbuh kembang bayi dan mencegah bayi kekurangan gizi. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,30%.

Tabel II.269
Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	63,05	67,85	66,87	67,42	66,30

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.7 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS Unmeet Need untuk 5 thn terakhir, rata-rata 14,35 % artinya dari total PUS, masih ada 14,35 % yang belum tersentuh pelayanan KB bagi petugas KB, sehingga memungkinkan untuk memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi angka Unmeet need ini, maka salah satu yang harus diperhatikan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, khususnya PUS yang berada di daerah terluar, terpencil dan terbelakang, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan. Perlu pelayanan mobile bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas KB. Menggalang mitra strategis dengan stakeholder dalam penggerakan program. Mengembangkan sistem rujukan alkon (alat kontrasepsi) yang berkelanjutan.

Tabel II.270
Cakupan PUS Unmet Need
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14,68	13,85	15,13	13,98	14,14

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.8 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk 5 tahun terakhir, rata-rata 19,70 %. Angka ini menunjukkan masih terdapat 80,30 % peserta KB aktif yang ber KB dengan metode yang masih memungkinkan Drop Out (DO), atau berhenti ber KB, atau terdapat 19,70% peserta KB yang aktif ber KB untuk jangka panjang yang sangat kecil untuk Drop Out. Untuk meningkatkan MKJP, maka hal yang harus dilakukan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan. Menyusun rencana aksi daerah percepatan target MKJP yang melibatkan semua sector terkait. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

Tabel II.271
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	17,57	18,39	19,40	21,1	22,05

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.9 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi untuk 4 tahun terakhir, rata rata 9.56 %. Angka ini menunjukkan masih terdapat 90.44 % peserta KB yang masih memungkinkan untuk tidak lanjut memakai kontrasepsi. Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi, maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP. Pendampingan PUS yang berKB yang mengalami komplikasi dan efek samping, sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Memperbanyak calon fasilitator KB, yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

Tabel II.272
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	0	10,32	8,16	8,76	10,99

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.10 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Dari 5 tahun presentase BKB Ber-KB mengalami penurunan setiap tahun 1-2% (2013-2017). Karena pada tahun tahun tersebut isu KB mengalami Stagnan, nanti pada tahun 2016 kembali dicanangkan Program Nasional Kampung KB.

Tabel II.273
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	63	63	61	61	60

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.11 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Rata-rata Presentase Cakupan BKR Ber-KB selama 5 tahun sebanyak 53,2%. Setiap tahunnya angka cakupan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 cakupan mengalami angka yang paling besar yaitu sebanyak 57%.

Tabel II.274
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	57	54	50	53	52

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.12 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Dalam 3 tahun terakhir dalam (2015-2017) Cakupan BKL yang Ber-KB mengalami peningkatan yang relative kecil yaitu sebanya 1,4%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh aktifnya Posyandu melakukan pelayanan pada lansia melalui program revitalisasi Posyandu.

Tabel II.275
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	44	42	39	43	44

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.13 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Data distribusi PPKS di setiap kecamatan pada table di atas memperlihatkan anomali khususnya dalam tahun 2014 dimana angka 10, PPKS sangat kecil dibandingkan pada 4 tahun sebelum dan sesudahnya. Kemungkinan tahun 2014 jumlah PPKS yang tidak aktif sangat besar disebabkan oleh aspek pemodalan dan pemasaran.

Tabel II.276
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	57	10	55	54	55

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.14 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Upaya meningkatkan peserta KB juga dilakukan melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang merupakan wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan keikutseretaan dan kesinambungan ber-KB dapat ditingkatkan. Berdasarkan tabel dibawah persentase cakupan pasangan usia subur (PUS) peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari 5% ditahun 2013 menjadi 15% di tahun 2017.

Tabel II.277
Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	5	13	13	15	15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.15 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 3030 Desa/Kelurahan di Sulawesi Selatan dengan jumlah PPKBD sebanyak 3038 orang petugas. Sehingga Ratio petugas per desa atau kelurahan adalah 100.26 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata terdapat 1 orang PPKBD/desa atau kelurahan.

Tabel II.278
Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	0	0	0	0	100,26

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.16 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KKBK sesuai dengan standarisasi pelayanan mencapai 65,71 %, artinya masih terdapat Faskes dan jejaringnya yang belum bekerjasama dengan BPJS dan belum memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Persyaratan kerjasama dengan BPJS yang belum terpenuhi oleh Faskes, sementara hampir semua Faskes menginginkan kerjasama dengan BPJS karena akan menambah item pelayanan Faskes yang berdampak pada pendapatan Faskes tersebut.

Tabel II.279
Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	%	0	0	0	0	65,71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.17 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Dari 1000 orang remaja terdapat 36 kasus IMS dalam 5 tahun.Hal ini disebabkan karena praktek seksual luar nikah cenderung terjadi mengingat semakin terbuka dan vulgarnya informasi yang di terima oleh remaja.

Tabel II.280
Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0,12	0,04	0,02

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.18 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tahun 2017 semua POKTAN melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga 2016 tidak tersedia data yang akurat untuk menjelaskan cakupan pembinaan 8 fungsi keluarga oleh POKTAN.

Tabel II.281
Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	0	0	0	0	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.19 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam memberi pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, menanamkan fungsi keluarga dan pembentukan kepribadian yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak yaitu Asah, Asih, dan Asuh. Berdasarkan data dibawah, persentase cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sekitar 71%.

Tabel II.282
Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	0	0	0	0	71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.20 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata – rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2015 adalah 20,8 tahun. Perlunya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi wanita. Data terakhir adalah pada tahun 2015, karena pendataan dilakukan sekali dalam 5 tahun, sehingga pendataan selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 (berdasarkan Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2015).

Tabel II.283
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	0	0	20,8	0	0

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.17.21 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes

Pembiayaan untuk urusan pengendalian penduduk khusus oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan KB masih baru dan urusan ini hanya dilaksanakan oleh lembaga setingkat bidang (Eselon III).

Tabel II.284
Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0	0	0	0	0,03

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.18 Perhubungan

2.3.2.18.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Berikut adalah data jumlah arus penumpang angkutan umum di Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan kecenderungan meningkat pada tiap tahunnya sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.285
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	9.378.146	11.639.705	11.833.341	12.683.600	13.322.856

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel di atas menggambarkan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 42,06 % atau 3.944.710 penumpang. Jika dihitung pertahunnya persentase kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 24 %, tahun 2014 – 2015 sebesar 1,67 %, tahun 2015-2016 sebesar 7,18 % dan tahun 2016-2017 sebesar 5 %. Rata-rata pertumbuhan arus penumpang adalah 9,46 % atau 986.177 penumpang dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2013-2014 serta terendah pada tahun 2014-2015. Tren peningkatan ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadikan angkutan umum sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Adapun dengan fluktuasi kenaikan penumpang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi. Pengembangan transportasi umum masih berbasis di perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah. Peningkatan jumlah penumpang merupakan arus urbanisasi dari desa ke perkotaan sebanyak 800.000 orang per tahunnya.

Tabel II.286
Jumlah Arus Penumpang, AKAP dan AKDP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Indikator	Satuan	Terminal Regional Daya	Terminal Tamalate	Jumlah
Jumlah AKAP	Unit	21.734	--	21.734
Jumlah AKDP	Unit	78.478	28.960	107.438
Jumlah Penumpang	Jiwa	949.983	303.951	1.253.934

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.18.2 Rasio Ijin Trayek

Angkutan umum merupakan salah satu fasilitas layanan yang menjadi indikator yang penting dalam dalam urusan perhubungan. Dalam hal ini, angkutan umum baik angkutan orang maupun barang perlu dilegalisasi dalam bentuk pemberian ijin trayek.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan telah mengeluarkan ijin trayek yang dibandingkan dengan jumlah penduduk sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel II.287
Rasio Ijin Trayek
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio ijin trayek	0,45	0,38	1,99	0,26	0,20

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Berdasarkan tabel di atas, rasio ijin trayek secara umum mengalami penurunan dari 0,45 di tahun 2013 menjadi 0,20 di tahun 2017 atau sekitar 0, 25 secara total walaupun telah terjadi kenaikan secara signifikan pada tahun 2015 sebanyak 1,99. Jika melihat kecenderungan kenaikan penumpang yang naik, penurunan ini dapat disebabkan oleh maraknya angkutan umum yang berplat hitam serta berbasis aplikasi yang tidak melakukan legalisasi terhadap status kendaraannya.

2.3.2.18.3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain legalisasi angkutan umum, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan juga merupakan salah satu tugas penting pemerintah provinsi. Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kenaraan penumpang. Terminal Regional Daya sebagai salah satu terminal penumpang tipe A di Kota Makassar memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Belum terintegrasinya transportasi antar moda dan belum optimalnya pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal serta terjadinya berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai kewenangan pengelolaan pelabuhan laut/bandara/terminal. Kecenderungan peningkatan jumlah pelabuhan laut, udara dan terminal bis ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel II.288
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenis Prasarana Transportasi	Satuan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pelabuhan Udara	Unit	11	11	11	11	11
Pelabuhan Laut	Unit	62	62	62	82	82
Terminal Tipe B	Unit	16	16	16	16	16
Jumlah	**Unit**	**90**	**98**	**134**	**237**	**281**

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Perubahan angka yang menunjukkan tren positif ini merupakan dampak dari terjadinya kenaikan jumlah penumpang dan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Direncanakan akan dibangun terminal multi moda untuk menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda untuk menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda yang akan dibangun adalah terminal multi moda bagian utara di Bandara Hasanuddin dan terminal multi moda bagian selatan di Pelabuhan Boddia Takalar.

Tabel II.289
Hierarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
1	Bantaeng	Bantaeng / Bonthain	Pengumpan Regional	Provinsi
2	Barru	Garongkong	Pengumpul	Pusat
3	Barru	Awerange	Pengumpan Regional	Provinsi
4	Bone	Bajoe	Pengumpul	Pusat
5	Bone	Pattirobajo	Pengumpan Regional	Provinsi
6	Bulukumba	Bulukumba / Lappe'e	Pengumpul	Pusat
7	Bulukumba	Maccini Baji	Pengumpan Regional	Provinsi
8	Jeneponto	Jeneponto /Bunging	Pengumpan Regional	Provinsi
9	Luwu	Belopa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
10	Luwu Timur	Malili	Pengumpan Regional	Provinsi
11	Luwu Timur	Lampia	Pengumpul	Pusat
12	Luwu Utara	Munte	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
13	Makassar	Makassar	Utama	Pusat
14	Palopo	Palopo / Tg. Ringgit	Pengumpul	Pusat
15	Pangkajene Kepulauan	Biringkasi	Pengumpan Regional	Provinsi
16	Pangkajene Kepulauan	P. Kalukalukuang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
17	Pangkajene Kepulauan	P. Sabutung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
18	Pangkajene Kepulauan	P. Sailus	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
19	Pangkajene Kepulauan	P. Sapuka	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
20	Pare-Pare	Pare - Pare	Pengumpul	Pusat
21	Pinrang	Marabombang	Pengumpan Lokal	PR
22	Kepulauan Selayar	Jampea	Pengumpan Regional	Provinsi
23	Kepulauan Selayar	Selayar/Benteng/Rauf Rahman	Pengumpul	Pusat
24	Kepulauan Selayar	Galesong/Takalar	Pengumpan Regional	Provinsi
25	Kepulauan Selayar	P. Bonerate	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
26	Kepulauan Selayar	Kalaotoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
27	Kepulauan Selayar	Kayuadi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
28	Kepulauan Selayar	P. Jinato	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
29	Kepulauan Selayar	Ujung Jampea	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
30	Kepulauan Selayar	Pamatata	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
31	Sinjai	Sinjai / Larea-rea	Pengumpul	Pusat
32	Wajo	Siwa / Bangsalae	Pengumpan Regional	Provinsi
33	Barru	Lamuru Kung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
34	Barru	Pancana / Pute Angin	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
35	Bone	Waetuo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
36	Bone	Cenrana	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
37	Bone	Lapangko / Salameko	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
38	Bone	Barebbo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
39	Bone	Uloe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
40	Bone	Tuju-Tuju	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
41	Bulukumba	Butung / Kasuso	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
42	Bulukumba	Bira / Tanah Beru	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
43	Bulukumba	Kajang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
44	Jeneponto	Tarowang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
45	Luwu	Bawa Salo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
46	Luwu	Bona Pute	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
47	Luwu	Larompong	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
48	Luwu Timur	Wotu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
49	Luwu Utara	Labuange	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
50	Luwu Utara	Cappasalo/Malangke	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
51	Makassar	Kayu Bangkoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
52	Makassar	Pulau Barrang Caddi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
53	Makassar	Pulau Barrang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
54	Makassar	Pulau Bonetambung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
55	Makassar	Pulau Kodingareng	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
56	Makassar	Pulau Lae-Lae	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
57	Makassar	Pulau Langkai	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
58	Makassar	Pulau Samalona	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
59	Pangkajene Kepulauan	P. Badi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
60	Pangkajene Kepulauan	P. Balang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
61	Pangkajene Kepulauan	P. Balo-Baloang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
62	Pangkajene Kepulauan	P. Dewakang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
63	Pangkajene Kepulauan	P. Doang-Doangan Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
64	Pangkajene Kepulauan	P. Gondong Bali	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
65	Pangkajene Kepulauan	P. Kapoposang Bali	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
66	Pangkajene Kepulauan	P. Karangrang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
67	Pangkajene Kepulauan	P. Kulambing	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
68	Pangkajene Kepulauan	P. Langkoitang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
69	Pangkajene Kepulauan	P. Matalaang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
70	Pangkajene Kepulauan	P. Pammantauang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
71	Pangkajene Kepulauan	P. Salemo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
72	Pangkajene Kepulauan	P. Karumpa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
73	Pangkajene Kepulauan	Kalatoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
74	Pinrang	Langga	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
75	Pinrang	Ujung Lero	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
76	Selayar	Appatana	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
77	Selayar	Bangkala	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
78	Selayar	P. Batang Mata	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
79	Selayar	P. Bembe / Tanamlala	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
80	Selayar	P. Biropa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
81	Selayar	P. Bona Lohe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
82	Selayar	P. Kalao	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
83	Selayar	P. Komba- Komba	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
84	Selayar	P. Lambego	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
85	Selayar	P. Padang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
86	Selayar	P. Samatellu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
87	Selayar	P. Tarupa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
88	Selayar	P. Tambolongan	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
89	Selayar	P. Madu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
90	Selayar	P. Rajuni	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
91	Selayar	Pasitallu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
92	Sinjai	Cappa Ujung Sinjai	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
93	Sinjai	P. Burung Lohe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
94	Sinjai	Patubukan	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
95	Sinjai	P. Kambuno	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
96	Takalar	P. Tanakeke / Satanga	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
97	Takalar	Salomakko	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
98	Wajo	Doping	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
99	Wajo	Jalang/Cendrane	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
100	Wajo	Danggae	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
Daftar Dermaga Sungai dan Danau				
101	Dermaga Danau Soroako	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
102	Dermaga Danau Nuha	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
103	Dermaga Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti	Konstruksi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
104	Dermaga Danau Towuti	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
105	Dermaga Danau Matano	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
106	Dermaga Danau Mahalona	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
107	Dermaga Sungai Sadang	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
108	Dermaga Danau Sidenreng	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
109	Dermaga Danau Tempe	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota

Sumber : Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN *2017* dan Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN *2017*

Tabel II.290
Jumlah Halte
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Koridor/Tahun	Satuan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	Unit	1	-	6	-	12	19
3	Unit	-	8	13	12	15	48
4	Unit	-	-	17	2	10	29
5	Unit	-	-	-	13	1	14
7	Unit	-	-	-	38	2	40
8	Unit	-	-	-	-	2	2
PLUS	Unit	-	-	-	-	2	2
Jumlah	**Unit**	**1**	**8**	**36**	**65**	**44**	**154**

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.18.4 Persentase Layanan Angkutan Darat

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Angkutan Antar Kota Antar (AKAP), dimana Kota Makassar merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai lintasan dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan sebaliknya;
2. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan kabupaten/kota yang terdapat didalam Provinsi Sulawesi selatan;
3. Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan;

Saat ini jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan tercatat telah mencapai angka 2,2 juta unit, namun hal ini tidak beriringan dengan pengembangan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan antara 8-10% per tahun. Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tercatat memiliki jumlah kendaraan beredar terbesar;

Selain itu, jumlah angkot di Makassar sebanyak 4.013 unit. BRT 30 unit melayani 4 rute diantaranya: Sentral-Sungguminasa, Panampu-Sungguminasa, Makassar-Parepare dan jalur khusus Bandara Sultan Hasanuddin-Lapangan Karebosi. Taksi sejumlah 2.500 unit dari 11 perusahaan taksi yaitu Taksi Bosowa, Taksi Lima Muda, Taksi Gowata, Taksi Metro Makassar, Taksi Putra, Taksi Puskud, Taksi Gowa Mas, Taksi Mitra, Taksi Airport, Taksi Koperasi TNI (Kopsidara), Taksi Bintang.

Data berikutnya menggambarkan kapasitas pelayanan dari salah satu jenis angkutan umum yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

Tabel II.291
Persentase Layanan Angkutan Darat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase layanan angkutan darat	%	80	87	90	94	97

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel di atas menginformasikan bahwa telah terjadi kenaikan persentase layanan angkutan darat sejak tahun 2013 yang hanya 80 % menjadi 97 % di tahun 2017 atau peningkatan sebesar 17%. Kenaikan tertinggi terjadi selama periode 2013-2014 sebesar 7% dan terendah pada tahun 2014-2015 dan 2016-2017 sekitar 3%. Informasi ini menyiratkan bahwa layanan angkutan darat semakin baik walaupun belum 100 % sebagaimana ditargetkan.

2.3.2.18.5 Pemasangan Rambu-Rambu

Peningkatan jumlah panjang jalan seiring dengan meningkatnya fasilitas keselamatan jalan sehingga dapat memperkecil jumlah kecelakaan hingga tahun 2017 telah terpasang 9 jenis fasilitas keselamatan jalan sebanyak 135.665 atau 30% dari Panjang jalan Sulawesi Selatan. Rambu merupakan fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas ini memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan.Di Sulawesi Selatan, berdasarkan data pemasangan rambu-rambu, terjadi penurunan jumlah pemasangan di Tahun 2017. Salah satu penyebabnya karena jumlah pemasangan rambu telah tercover di tahun sebelumnya. Berikut data Pemasangan Rambu-Rambu di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 :

Tabel II.292
Pemasangan Rambu-Rambu
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenis Rambu	Satuan	Pemasangan Rambu-Rambu				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rambu Lalu Lintas	Unit	560	4.484	45	1.440	1.909
Warning Light	Unit	-	-	-	10	-
Guarddrail	Unit	-	200	200	2.720	-
Marka Jalan	Unit	13.160	13.500	13.250	166.122	128.551
Cermin Tikungan	Unit	-	-	-	-	-
Deliniator	Unit	-	-	-	3.250	5.205
Paku Marka	Unit	-	-	-	2.170	-
Traffic Light	Unit	-	-	-	-	-
RPPJ	Unit	-	-	-	68	-

Jenis Rambu	Satuan	Pemasangan Rambu-Rambu				
		2013	2014	2015	2016	2017
APILL	Unit	-	-	2	-	-
Jumlah	Unit	13.720	18.184	13.497	175.780	135.665

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.2.18.6 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar arus perekonomian daerah. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya akses untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang. Panjang jalan Provinsi Sulawesi Selatan 1.500,15 Km. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 2,2 juta unit pada tahun 2017 namun tidak sebanding dengan penambahan jumlah Panjang jaringan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan antara 8-10% per tahun. Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tercatat memiliki jumlah kendaraan beredar terbesar. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Jenis kendaraan yang diperhitungkan terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor, sedangkan panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan proinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan di bawah menunjukkan bahwa di Tahun 2017, secara umum, 1 km jalan melayani 108 unit kendaraan bermotor. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya khususnya dari tahun 2013 yaitu 33 unit/1 km panjang jalan atau 44 %. Hal ini dapat diartikan bahwa kuantitas kendaraan semakin meningkat yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas layananan pengangkutan dan di sisi lain juga berefek apada semakin tingginya kepadatan jalan yang berpotensi pada kemacetan. Berikut data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel II.293
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	75	88	95	102	108

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.2.18.7 Jumlah Orang/ Barang Terangkut Angkutan Umum

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan salah satu yang paling penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Pengembangan prasarana transportasi laut khususnya pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu hal yang penting bagi pergerakan

penumpang dan barang untuk menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) salah satunya memprogramkan pengembangan infrastruktur pelabuhan.

Pemerintah Provinsi meminta PT.Pelabuhan Indonesia IV untuk merealisasikan pengembangan Pelabuhan Makassar tahun 2013. Hal ini disebabkan arus bongkar muat barang yang sudah melebihi kapasitas membutuhkan perluasan dermaga, serta penambahan ruang dan fasilitas terminal peti kemas Pelabuhan Makassar semakin mendesak. PT.Pelindo IV menginvestasikan dana sebesar 150 Milyar rupiah untuk perluasan Dermaga Hatta seluas 150 meter persegi dari luas dermaga saat ini 850 m2. Dengan perluasan dermaga kapasitas muat pelabuhan peti kemas diharapkan bertambah dan waktu tunggu kapal yang akan sandar di pelabuhan juga dapat dikurangi. Sulawesi Selatan memiliki cukup banyak pelabuhan potensial untuk mendukung program MP3EI. Sebagai contoh, Pelabuhan Makassar dapat fokus pada aktivitas bongkar muat peti kemas. Pelabuhan Garongkong fokus pada bongkar muat barang, dan Pelabuhan Boddia dapat fokus sebagai pelabuhan penumpang. Di Kabupaten Barru selain pelabuhan penyeberangan Garongkong juga ada Pelabuhan serbaguna/curah di Kawasan Garongkong yang proses pembuatannya terpadu dengan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Awerange dengan Panjang dermaga 70 meter lebar 8 meter. Panjang pelataran 40 meter lebar 4 meter. Pelabuhan berstatus pelabuhan rakyat.

Pelabuhan laut Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hirarkinya terdiri dari pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional. Pelabuhan Makassar merupakan satu-satunya pelabuhan internasional yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena fungsinya sebagai pelabuhan internasional, pelabuhan tersebut memiliki volume bongkar muat barang dan naik penumpang yang paling tinggi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berikut ini kinerja Pelabuhan Makassar:

Tabel II.294
Kinerja Pelayanan Kapal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Arus Kunjungan Kapal	Call	4.767	4.912	4.315	5.625	6.188
Arus Peti Kemas	Ton	3.782.717	5.915.854	6.905.622	7.127.755	7.908.590

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Pelabuhan yang selama ini diusahakan di Sulawesi Selatan adalah: Pelabuhan Makassar di Kota Makassar, Pelabuhan Palopo di Kota Palopo, Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo, Pelabuhan Galesong di Kabupaten Takalar, Pelabuhan Pattiro Bajo di Kabupaten Bone, Pelabuhan Bantaeng di Kabupaten Bantaeng, Pelabuhan Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, Pelabuhan Parepare di Kota Pare-Pare, Pelabuhan Awerangnge di Kabupaten Barru, Pelabuhan Sinjai di Kabupaten Sinjai, Pelabuhan Bulukumba di Kabupaten Bulukumba, Pelabuhan Tujutuju di Kabupaten Bone, Pelabuhan Jampea di

Kabupaten Kepulauan Selayar, Pelabuhan Biringkassi di Kabupaten Pangkep, Pelabuhan Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transportasi udara didalam wilayah Sulawesi Selatan masih dalam taraf awal pengembangan seperti di Bandara Pongtiku di Kabupaten Tator, Bandara Arupala di Kabupaten Selayar secara umum dapat melayani kebutuhan lalu lintas udara antara Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dan ke Pulau Selayar. Sejak beberapa tahun sebelumnya, bandara ini telah memberikan kontribusi pengembangan sektor transportasi. Untuk Kabupaten Tana Toraja kendala yang dihadapi adalah selain stabilitas jumlah penumpang juga faktor sarana dan prasarana yang belum secara optimal memenuhi standar bagi penerbangan pesawat udara. Di Soroako terdapat bandara yang dioperasikan oleh PT.INCO yang sangat strategis karena menghubungkan Makassar dengan wilayah Luwu yang relatif jauh jika menggunakan transportasi darat.

Pengembangan wilayah di kawasan itu cukup terdorong oleh keberadaan bandara tersebut. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin merupakan bandara yang secara fisik telah masuk kedalam internasional hubs dimana memiliki dua pilihan run way yang lebih Panjang sesuai persyaratan serta terminal penumpang dan pesawat yang menampung lebih dari 12 pesawat udara. Menghadapi kondisi perkembangan dunia penerbangan, bandara Sultan Hasanuddin akan terus berbenah diri khususnya dari aspek manajemen pengelolaan penerbangan bertaraf internasional. Kondisi fisik telah mampu melayani jumlah penumpang domestik dan mancanegara yang terus meningkat termasuk kelengkapan sarana dan jasa angkutan barang. Kapasitas normal Bandara Sultan Hasanuddin hanya mampu menampung 7 juta penumpang. Tetapi saat ini penumpang yang dilayani hingga akhir tahun ini sudah 8 juta orang dan dikhawatirkan membengkak hingga sekitar 13 juta penumpang pada tahun 2017.

Bandara harus diperluas sebagai langkah optimalisasi untuk menghadapi *over capacity*. Pertumbuhan arus penumpang yang signifikan kedepannya diproyeksikan mampu memberikan kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Makassar dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Bandara perintisan yang beroperasi di Sulawesi Selatan adalah: Bandara Pongtiku di Tana Toraja, Bandara Andi Jemma di Masamba, Bandara Seko di Masamba, Bandara Rampi di Masamba, Bandara Bua di Luwu, Bandara Aeropala di Selayar, Bandara Bone di Bone, Bandara Khusus PT.Inco di Soroako. Data jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan yang signifikan, dari tahun 2013 hingga 2017 sebesar 1.467.937 atau 13%. Namun angka ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pergerakan penduduk yang tidak merata sepanjang waktu, misalnya ada saat-saat dimana permintaan cukup tinggi (biasanya menjelang hari raya) dan ada saat dimana permintaan menurun. Membaiknya sarana dan prasarana transportasi juga secara tidak langsung mempengaruhi angka ini. Di bawah ini, tabel Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum :

Tabel II.295
Jumlah Orang/Barang Terangkut Angkutan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenis Transportasi	Jumlah Orang/ Barang Terangkut Angkutan Umum				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bus	119.365	120.110	121.080	121.425	121.785
Kereta Api	-	-	-	-	-
Kapal Laut	1.460.543	1.822.717	1.644.073	1.642.444	1.823.531
Pesawat Udara	9.654.384	8.828.586	9,302.437	10.756.915	12.294.226
Jumlah	11.234.292	10.771.413	11.067.590	12.520.784	14.239.542

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Peningkatan jumlah penumpang pesawat terbang melalui Bandara Sultan Hasanuddin sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 berdasarkan data mengalami peningkatan sebesar 7,83% dengan jumlah penumpang pada tahun 2017 sebesar 12.294.226 jiwa. Lalu lintas penumpang diperkirakan mencapai 21 juta penumpang pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,7%. Pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan dengan jumlah 113.911 unit pada tahun 2017 yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Diperkirakan pergerakan pesawat mencapai 174.000 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 3,8%.

Tabel II.296
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara /terminal per tahun	12.357.723	11.848.554	12.174.349	12.684.570	13.972.454

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3 Fokus Layanan Pilihan

2.3.3.1 Bidang Urusan Pariwisata

2.3.3.1.2 Kunjungan Wisata (Wisatawan Nusantara)

Kenaikannya signifikan kunjungan wisatawan nusantara terjadi sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2016 dimana jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan mencapai 8.426.528 orang. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan dengan jumlah pengunjung 8.367.748 orang. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dan pihak terkait untuk terus mempromosikan destinasi baru di Wilayah Sulawesi Selatan. Peningkatan jumlah kunjungan yang cukup signifikan ini merupakan salah satu indikator keefektifan branding baru pariwisata Sulsel yakni *Explore South Sulawesi*, sehingga pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mendongkrak peningkatan perekonomian. Secara umum rata-rata pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara di Sulawesi Selatan sebesar 11,96%. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun

2015, yaitu pertumbuhan sebesar 20,41% dari tahun lalu atau dengan nilai absolut sebanyak 1.208.298. Dengan pertumbuhan rata-rata capaian sebesar 11,96%, realisasi pergerakan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tabel berikut ditampilkan target dan capaian pergerakan wisatawan nusantara.

Tabel II.297
Kunjungan Wisatawan Nusantara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	5.385.80	5.920.528	7.128.826	8.426.528	8.367.748

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di wilayahnya yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung atau berlibur di Sulawesi Selatan.

Tabel II.298
Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Target Kunjungan	Kunjungan	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000
Realisasi Kunjungan	Kunjungan	5.385.809	5.920.528	7.128.826	8.426.528	8.367.748
Rata-Rata Pengeluaran/Hari	Rupiah	675.000	700.000	750.000	750.000	750.000
Belanja/Tahun	Trilyun Rupiah	18,18	20,72	26,73	31,60	31,38

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.1.2 Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)

Pencapaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2017 mencapai 255.747 orang. Pencapaian tersebut sejalan dengan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017, yang didukung oleh sinergitas antar stakeholder pariwisata seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Kota asosiasi pariwisata yakni, PHRI, ASITA, HPI, BPPD, akademisi serta dukungan media yang memajukan sektor pariwisata Sulsel.

Tabel II.299
Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	106.584	151.763	191.773	236.491	255.747

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Secara umum rata-rata pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara di Sulawesi Selatan sebesar 25,02%. Realisasi pergerakan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tabel berikut ditampilkan target dan capaian wisatawan mancanegara.

Tabel II.300
Target dan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Target	Kunjungan	100.000	115.000	125.000	175.000	200.000
Capaian	Kunjungan	106.584	151.763	191.773	236.491	255.747

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Ada fakta yang perlu dicermati secara saksama dari tampilan kedua tabel tersebut yaitu rata-rata capaian pertubuhan selama lima tahun terakhir sebesar 25,02% dan tiap tahun melampaui target, namun kecenderungan pertumbuhan wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Pertumbuhan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 sebesar 42%, kemudian tahun 2015 turun sebesar 26% selanjutnya pada tahun 2016 hanya sebesar 22%, terakhir pada tahun 2017 turun menjadi 9%. Kecenderungan pertumbuhan yang terus menurun harus menjadi bahan evaluasi tidak hanya seluruh destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan berupa aksesibilitas, amenitas dan atraksi tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama lima tahun ke depan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 sebagai acuan target indikator kinerja daerah. Perkembangan kunjungan wisman dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat fluktuatif terhadap faktor-faktor di luar kendali yang menjadi fenomena trend kunjungan wisatawan, seperti: persepsi keamanan warga negara asing-wisatawan asing (*tourist*) terhadap kondisi keamanan nasional, gangguan atau stabilitas pada beberapa daerah tujuan wisata (DTW), seperti Bali yang sampai saat ini masih merupakan "trendsetter" atau barometer besaran (naik-turunnya) kunjungan wisata di Indonesia telah memberikan warna signifikan terhadap turunnya minat kunjungan wisatawan ke Indonesia, juga termasuk ke Sulawesi Selatan. Pada Tabel di bawah ini ditampilkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan pintu masuk baik yang di bandara Sultan Hasanuddin maupun di pelabuhan Soekarno-Hatta.

Tabel II.301
Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 Berdasar Pintu Masuk

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Wisatawan Mancanegara	Kunjungan	17.730	15.713	13.713	17.705	18.335

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Berdasarkan capaian kunjungan wisatawan mancanegara tertera pada Tabel di atas menunjukkan grafik "kurva U", artinya kecenderungan menurun walauun pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan rebound. Selisih nilai absolut pada tahun 2013 terhadap tahun 2017 sebesar 605. Pada tahun 2013 situasi politik dan keamanan di daerah Sulawesi Selatan cenderung stabil dan efek promosi yang dilakukan pada program Visit South Sulawesi mulai mendapat respon postif dari pasar terutama market tourist internasional hal ini di buktikan dengan lonjakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2013 sebesar 39,39% atau 106,584 orang wisatawan asing telah berkunjung keberbagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan. Hal ini juga membuktikan bahwa upaya keras yang di lakukan para stakeholder pariwisata di daerah ini dalam mengembangkan inovasi dan diversifikasi produk-produk wisata terutama pembenahan terhadap fasilitas dan rekayasa beberapa obyek dan atraksi wisata baru mampu menarik minat wisatawan asing untuk kembali berkunjung ke destinasi unggulan seperti Makassar, Toraja, Toraja Utara dan Maros. Selain itu kemudahan aksesbilitas berupa perbaikan jalur utara transportasi darat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan imbas terhadap kenyamanan dan jarak tempuh ke destinasi- destinasi pariwasata yang menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara di sepanjang jalur tersebut. Sehingga jumlah peningkatan kunjungan wisatawan asing yang terjadi cuklup signifikan disbanding periode tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 promosi brandig Visit South Sulawesi mulai mendapat respon postif dari pasar terutama market tourist internasional. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 sebesar 42,39% atau 151,763 orang wisatawan asing telah berkunjung ke berbagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan. Hal ini juga merupakan implikasi dari mulai diperkenalkannya beberapa alternatif destinasi wisata baru yang ditunjang dengan penguatan event-event lokal yang secara berkala di selenggarakan di destinasi wisata daerah. Komponen atraksi wisata yang menjadi bagian dari penyelenggaraan event wisata merupakan daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Hal ini pula sejalan dengan preferensi wisatawan mancanegara cenderung memilih destinasi karena paket wisata yang ditawarkan memiliki komponen atraksi dan event wisata daerah. Sejak launching Visit South Sulawesi pada tahun 2010, maka tahun 2015 merupakan masa akhir dari program tersebut. Pada tahun ini pula program dan event pendukung turut dilaunching guna mendukung masa final Visit South Sulawesi.

Hal tersebut ternyata mampu membawa tambahan arus kunjungan wisatawan manca negara yang meningkat hingga 26,36%. dengan penyelenggaraan event Festival Full Moon di kawasan Karst Maros-Pangkep yang merupakan contoh Best Practice Diversifikasi produk yang menjadi terobosan pemerintah dalam upaya menggaet lebih banyak wisatawan internasional. Selain itu, interkonektivitas antar destinasi dan event pariwisata sudah menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten/kota sehingga kenyamanan dalam melakukan perjalanan dan kepastian event turut memeberikan kesan positif bagi pencitraan destinasi pariwisata Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2016, setelah berhasil dengan branding pariwisata Visit South Sulawesi pada tahun 2010 lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan melaunching branding pariwisata Sulsel yang baru yaitu, Explore South Sulawesi. Launching Explore South Sulawesi di tahun 2016 merupakan branding pariwisata yang baru. Explore South Sulawesi dimaksudkan agar wisatawan yang datang ke Sulsel dapat melakukan eksplorasi atau menjelajahi seluruh destinasi wisata di Sulsel. Dengan hadirnya branding baru tersebut yang didukung oleh fasilitas pendukung seperti tersedianya pusat informasi pariwisata di bandara telah memberi dampak yang lebih baik untuk peningkatan pariwisata. Selain itu, diluncurkannya media promosi dalam bentuk aplikasi android dan IOS serta website baru merupakan strategi baru yang diupayakan mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara di Sulawesi Selatan hingga 22,16% atau 234,249 wisatawan mancanegara pada tahun 2016.

Secara keseluruhan bila kita mengamati analisa diatas, maka terlihat peningkatan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun walau secara bersamaan pula terjadi fluaktuasi prosentase jumlah wisatawan dari tahun ke tahun yang di pengaruhi oleh variabel sebagai berikut:

1. Kondisi kemanan baik dari faktor *force majuer* (bencana alam) dan social human eror (kecelakan, teroris, kerusuhan).
2. Kegiatan promosi dan penetrasi pasar potensial serta perluasan pangsa pasar baru
3. Adanya kompetisi antar destinasi yang memiliki keunggulan komperatif yang sama
4. Peningkatan fasilitas dan destinasi baru di Sulawesi Selatan.

Terbukanya lagi aksesibilitas penerbangan Internasional ke destinasi Sulawesi Selatan (Singapura dan Malaysia).

2.3.3.1.3 Lama Kunjungan Wisata

Pada tahun 2017 ditargetkan kunjungan wisatawan sebanyak6.000.000 orang, namun jumlah kunjungan pada tahun tersebut mencapai 8.367.748 orang dengan rata-rata lama tinggal 5 hari, besaran pengeluaran perharinya sebesar Rp 750.000 dan besaran belanja pertahunnya sebesar 31.38 trilyun rupiah.

Tabel II.302
Lama Kunjungan Wisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	5	5	5

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Khusus untuk Sulawesi Selatan, ikon pariwisata budaya telah mulai menggeliat berkat dukungan stake holder pariwisata dan perhatian serius pemerintah baik pusat dan daerah untuk kembali menghidupkan atraksi-atraksi wisata potensial di detinasi Toraja. Dukungan event pariwisata internasional seperti Toraja International Festival yang menghadirkan para pekerja seni dari berbagai negara yang berkolaborasi menggelar pertunjukan seni etnografi, telah menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung kembali ke Toraja. Sinkronisasi promosi dan event pariwisata telah mampu meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Pemanfaatan promosi In *Flight Magazine*, yang mengiklankan semua event pariwisata daerah di Sulawesi Selatan turut berpengaruh terhadap peningakatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Destinasi baru yang diendorse oleh komunitas seperti komuitas photografi dan provider telekomunikasi di dunia maya turut berperan membuka pangsa pasar baru bagi para traveler independen dari luar negeri, pergerseran paradigma berwisata dengan pola konvensional yang memanfaatkan moda pergerakan transportasi berubah menjadi pemanfaatan gadget dan aplikasi serta internet dalam menentukan minat traveling wisatawan mancanegra. Selain itu terbukanya akses pasar baru sebgai akibat kebijakan bebas visa juga memberikan ekses positif terhadap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

2.3.3.1.4 PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami capaian yang berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Promosi destinasi wisata dan pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan harus lebih optimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya sektor pariwisata.

Tabel II.303
PAD Sektor Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	418.4011.000	311.513.000	491.991.725	383.640.000	451.750.000

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2 Bidang Urusan Pertanian

2.3.3.2.1 Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi dan jagung berkontribusi besar terhadap sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dengan nilai kontribusi 22,89%. Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 mengarahkan sector utama pendukung pembangunan wilayah Sulawesi 2020-2024, salah satunya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengarahkan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai pusat lumbung pangan nasional. Strategi pembangunan nasional tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan yang diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis pada sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan dengan melakukan pengendalian terhadap lahan pangan di Sulawesi Selatan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRWP Sulawesi Selatan.

Tabel II.304
Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	Perkembangan Rata-Rata Pertahun	
				(Ha)	(%/Tahun)
Bantaeng	7,829	7,829	7,829	0.0	0.0
Barru	14,475	14,694	14,557	41.0	0.3
Bone	100,631	112,331	112,081	5,725.0	5.1
Bulukumba	22,797	22,901	22,958	80.5	0.4
Enrekang	10,861	10,573	11,164	151.5	1.3
Gowa	33,806	33,929	34,093	143.5	0.4
Jeneponto	16,834	17,303	17,666	416.0	2.4
Kepulauan Selayar	3,572	3,825	3,825	126.5	3.3
Kota Makassar	2,549	2,609	2,609	30.0	1.1
Kota Palopo	2,353	2,671	2,667	157.0	5.9
Kota Pare Pare	819	817	703	-58.0	-8.2
Luwu	37,037	38,158	32,623	-2,207.0	-7.0
Luwu Timur	22,900	24,662	24,626	863.0	3.5
Luwu Utara	24,916	25,314	25,387	235.5	0.9
Maros	25,927	26,022	25,852	-37.5	-0.1
Pangkajene Kepulauan	16,732	16,732	16,732	0.0	0.0
Pinrang	53,584	54,615	55,111	763.5	1.4
Sidenreng Rappang	48,309	47,783	48,218	-45.5	-0.1
Sinjai	15,852	15,899	16,067	107.5	0.7
Soppeng	27,413	28,631	28,940	763.5	2.7
Takalar	16,779	16,619	16,876	48.5	0.3
Tana Toraja	10,761	10,761	10,761	0.0	0.0
Toraja Utara	15,318	15,277	15,199	-59.5	-0.4
Wajo	96,177	99,237	100,068	1,945.5	2.0
Sulawesi Selatan	**628,231**	**649,192**	**646,612**	**9,190.5**	**1.4**

Memperhatikan perkembangan luas sawah di Sulawesi Selatan, maka terdapat pertambahan luasan sawah di Sulawesi Selatan seluas 9.190,5 Ha. Pertambahan tersebut menunjukkan bahwa terjadi dinamika perkembangan luasan sawah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, baik berupa dinamika positif yaitu pertambahan luasan sawah pada 15 kabupaten/kota (62,5%) maupun dinamika negatif yaitu alih fungsi lahan pertanian pada 5 kabupaten/kota (20,8%).

2.3.3.2.1.1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, dengan kontribusi sekitar 22,89% dari seluruh sektor pada di tahun 2017. Data keadaan angkatan kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian cukup mendominasi sekitar 38.67% dari seluruh sektor ekonomi. Tidak salah dikatakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 95,90 triliun rupiah atau sebesar 22,89%. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 63,34%. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut yaitu sebesar 51,89 persen.

Tabel II.305
Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	22,16	22,97	23,14	23,27	22,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.3.3.2.1.2 Kontribusi Subsektor Pertanian Tanaman Pangan (Palawija) terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyumbang peningkatan pertumbuhan PDRB di Sulawesi Selatan. Palawija merupakan salah satu kunci dalam menggalakkan diverisifikasi pangan di Indonesia demi mempertahankan ketahanan pangan. Lahan tidur yang tidak tergarap, misalnya lahan kehutanan bisa ditanam palawija karena penanaman palawija tidak membutuhkan banyak air. Produktivitas pertanian (palawija) seperti jagung dan umbi-umbian yang meningkat menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian (palawija).

Tabel II.306
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	3,30	3,94	4,07	5,42	6,01

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2.1.3 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB

Kondisi geobiofisik wilayah Sulawesi selatan sesuai untuk pengembanagn tanaman pangan, hal ini yang menjadikan provinsi ini memiliki ketahanan dan ketersediaan pangan yang baik sepanjang tahun. Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar 7,23% tidak terlepas dari embangunan yang difokuskan pada sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB sulawesi Selatan pada tahun 2017 sekitar 7,52%.

Tabel II.307
Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	%	7,98	7,79	7,65	7,81	7,52

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2.1.4 Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) Terhadap PDRB

Pengembangan sektor pertanian Sub sektor hortikultura juga menjadi fokus dan akan terus dikembangkan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,23%.

Tabel II.308
Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB	%	1,35	1,33	1,31	1,30	1,23

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2.1.5 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sebanyak 73 persen dari total rumah tangga pertanian di Sulawesi Selatan mengusahakan tanaman pangan. Dominasi subsektor ini mencapai nilai tambah sebesar 95,59 trilliun rupiah, dengan pertumbuhan 5,34 persen pada tahun 2017. Komoditas utamanya adalah padi, jagung dan ubi kayu. Sulawesi Selatan menyandang predikat

sebagai lumbung pangan nasional di Indonesia Timur. Daerah penyokongnya adalah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan Maros. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar pada tahun 2017 sebesar 50,93% mengalami peningkatan dibanding tahun 2016.

Tabel II.309
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	51,22	52,18	52,41	50,72	50,93

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2.2 Subsektor Peternakan

2.3.3.2.2.1 Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap PDRB

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana jika dibandingkan dengan kontribusi sub sektor lain terhadap PDRB lebih kecil karena jumlah pelaku usaha peternakan yang jumlahnya kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha tani. Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi peternakan, maka dilakukan upaya peningkatan kelahiran ternak, peningkatan pemotongan dan pengeluaran ternak hidup baik sebagai bibit maupun sebagai ternak potong serta upaya peningkatan populasi ternak.

Tabel II.310
Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1,13	1,11	1,08	1,11	1,09

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

2.3.3.2.2.2 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak Terhadap PDRB

Sumbangan sub sektor peternakan terhadap PDRB Sulsel yang bersumber dari kelompok ternak non komersial pada tahun 2017 sebesar 32% antara lain pada ternak besar untuk jenis sapi perah, kerbau dan kuda, sedangkan untuk kelompok ternak keil antara lain kambing dan babi, untuk ternak ungags yakni ayam buras dan itik. Sektor peternakan Sulawesi Selatan didominasi oleh sapi potong sebesar 43,70% dari seluruh ternak besar. Kabupaten Bone merupakan produsen terbesar untuk ternak sapi potong, dengan distribusi sebesar 29,59% dari keseluruhan sapi potong di Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Sebagian peternak umumnya adalah peternakan rakyat. Sementara pada usaha peternakan komersial antara lain ayam ras petelur dan ayam buras pedaging (broiler) umumnya tidak tergabung dalam kelompok tani ataupun koperasi tetapi berada dibawah korporasi.

Tabel II.311
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak terhadap PDRB	%	31	30	33	34	32

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

2.3.3.2.2.3 Produktivitas Hasil Peternakan

Produktivitas ternak dapat diukur dengan kelahiran, pemotongan (produksi daging) dan pengeluaran (ekspor) untuk ternak potong, produksi susu untuk ternak perah dan produksi telur untuk ungags. Produksi daging berasal dari pemotongan ternak sapi, kerbau, ternak kecil an unggas. Sedangkan produksi telur dari ternak ayam petelur dan itik, serta produksi susu dari sapi perah. Selama 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan produksi daging, susu dan telur diatas 10%. Pembinaan yang konsisten dalam 5 tahun kedepan diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan produksi yang besar.

Tabel II.312
Produktivitas Hasil Peternakan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenis	Satuan	Produktivitas Hasil Peternakan					(%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
Daging	Kg	80.969.670	113.377.425	121.141.815	119.811.816	125.673.776	9,3
Telur	Kg	99.969.069	121.236.098	133.600.123	143.847.788	140.439.879	8,5
Susu	Kg	2.566.800	2.635.600	2.727.000	2.752.200	3.052.800	3,9

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

Pembangunan peternakan Provinsi Sulawesi Selatan mampu memberi peningkatan produktivitas ternak dalam 5 tahun terakhir, antara lain 9,3% daging, 8,5% telur dan 3,9 produksi susu. Peningkatan produksi daging didukung oleh pemetongan ternak sapi, kerbauu dan dan unggas (ayam pedaging, ayam buras dan ayam petelur serta itik). Jumlah pemotongan ternak sapi tahun 2017 terbanyak adalah kota Makassar dengan jumlah 29.757 (RPH) dan 2.976 (DRPH) sedangkan untuk pemotongan kerbau terbanyak berada pada Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 10.095 (RPH) dan 1.010 (DRPH), dan jumlah pemotongan kuda terbanyak di kabupaten Jeneponto dengan dan 4.534 (DRPH). Kasus penyakit hewan terbanyak adalah rabies, terutama di daerah Kabupaten Toraja Utara. Populasi ternak sapi potong terbanyak di Sulawesi Selatan adalah kabupaten Bone dengan jumlah 419.819 ekor. Sedangkan untuk sapi perah paling banyak di Kabupaten Enrekang dengan jumlah 1.530 ekor. Populasi kerbau di Sulawesi Selatan paling banyak di Tana Toraja dan jumlah domba terbanyak di Kabupaten Jeneponto. Ada 8 jenis unggas yang ada Sulawesi selatan dengan jumlah ayam pedaging yang paling banyak yaitu 51.115.768 ekor.

Pada tahun mendatang produksi daging, susu dan telur diperkirakan tumbuh sebesar 5% pertahun. Kelebihan produksi akan dijual keluar daerah sebagai daging

ataupun ternak hidup sebagai bibit dan ternak sapi potong. Kelebihan produksi tersebut akan memberikan konstribusi pada peningkatan sumbangan PDRB. Berdasarkan hasil analisis perkembangan PDRB, diketahui bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan nilai 3-7,8% atau rata-rata 5% per tahun. Pembinaan kelompok peternak berupa bantuan bibit, pakan, tanaman pakan ataupun bantuan lainnya sehingga produksi kelompok ternak meningkat. Pengawasan pembinaan keamanan pangan asal hewan dilakukan melalui pemeriksaan sampel pangan asal hewan yang beredar. Nilai tukar petani peternakan selama 5 tahun (2013-2017) mengalami peningkatan dari 97,36% pada tahun 2013 menjadi 108,46% pada tahun 2017. Kondisi pada triwulan 2 tahun 2018 sudah mencapai 110,40% sehingga kesejahteraan peternak meningkat.

Tabel II.313
Populasi Sapi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak (Ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	15.358	15.995	16.756	18.070	18.894
2	Bulukumba	62.203	65.451	68.345	70.662	73.177
3	Bantaeng	23.967	24.891	26.046	27.789	28.824
4	Jeneponto	25.490	27.817	29.925	30.955	32.246
5	Takalar	38.131	38.410	36.374	36.025	32.336
6	Gowa	102.399	104.257	111.399	107.573	109.605
7	Sinjai	84.572	92.537	97.805	101.860	105.806
8	Bone	307.437	325.425	362.821	395.310	419.819
9	Maros	69.945	72.869	76.381	80.540	83.902
10	Pangkajene Kepulauan	42.474	45.981	49.585	53.377	53.816
11	Barru	62.040	65.645	68.805	70.850	71.857
12	Soppeng	30.250	36.310	41.327	46.441	49.120
13	Wajo	76.943	89.858	100.913	111.968	116.518
14	Sidenreng Rappang	45.425	49.960	54.950	60.433	64.604
15	Pinrang	23.331	24.072	24.937	25.821	26.628
16	Enrekang	46.333	47.433	47.552	48.912	50.175
17	Luwu	18.755	18.133	17.886	18.870	18.065
18	Tana Toraja	6.611	6.659	6.714	6.961	7.006
19	Luwu Utara	23.131	24.852	26.456	27.963	29.361
20	Luwu Timur	14.145	13.740	14.010	15.021	15.546
21	Toraja Utara	278	352	450	422	493
22	Makassar	3.259	3.219	3.334	3.409	3.483
23	Pare-Pare	4.312	4.713	5.090	5.538	5.814
24	Palopo	2.943	3.022	3.096	3.415	3.619
Sulawesi Selatan		**1.129.732**	**1.201.601**	**1.290.957**	**1.368.194**	**1.420.714**

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.3.2.3 Subsektor Perkebunan

2.3.3.2.3.1 Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami percepatan pada tahun 2014, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi PDRB atas harga yang berlaku mencapai 4,56 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,28 persen. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 konstribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 4,45 persen dan 4,26.

Tabel II.314
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	4,28	4,56	4,55	4,45	4,26

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2.3.2 Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB

Berdasarkan hasil analisis terlihat kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2016. Kenaikan ini bersumber dari dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh kelompok tani perkebunan rakyat yang dibagi dengan jumlah produksi perkebunan rakyat ditambah dengan PBS dan PBN. Tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan jumlah produksi yang menurun untuk beberapa komoditi unggulan.

Tabel II.315
Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%	89,78	90,48	90,18	90,90	87,71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.2.3.3 Produktivitas Hasil Perkebunan

Analisis data menunjukkan produktivitas hasil perkebunan selama 5 tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan kenaikan di tahun 2015 dan 2016. Hal ini dipicu adanya kenaikan jumlah produksi pada beberapa komoditi perkebunan seperti : kopi, kakao, cengkeh, lada, tembakau, aren, dll. Terhadap adanya penurunan produktivitas yang terjadi pada tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa penurunannya akibat jumlah produksi yang berkurang yang disebabkan adanya alih fungsi lahan dan komoditi.

Tabel II.316
Produktivitas Hasil Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktivitas Hasil Perkebunan	%	57,80	57,78	60,80	66,32	63,70

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel II.317
Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Kakao (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	153	151	158	165	159
2	Bulukumba	5.188	4.882	4.985	5.802	4.596
3	Bantaeng	2.790	2.848	2.849	3.047	3.088
4	Jeneponto	10	11	50	34	33
5	Takalar	24	26	26	26	10
6	Gowa	2.100	2.138	1.342	1.458	1.350
7	Sinjai	1.647	1.605	1.646	2.495	3.023
8	Bone	15.980	16.412	17.474	18.079	12.234
9	Maros	671	715	351	586	586
10	Pangkajene Kepulauan	49	50	51	55	58
11	Barru	801	494	485	751	263
12	Soppeng	12.360	11.577	12.345	12.361	9.807
13	Wajo	10.040	11.170	11.290	11.180	10.904
14	Sidenreng Rappang	7.262	7.277	7.133	7.527	7.607
15	Pinrang	14.109	12.018	10.935	12.281	11.067
16	Enrekang	7.017	7.034	7.019	5.000	3.289
17	Luwu	27.941	27.159	27.000	28.989	24.262
18	Tana Toraja	1.184	1.295	1.364	1.392	966
19	Luwu Utara	21.201	21.236	22.296	27.391	26.275
20	Luwu Timur	14.180	11.896	11.908	12.250	12.862
21	Toraja Utara	1.435	1.434	812	812	822
22	Makassar	-	-	-	-	-
23	Pare-Pare	-	-	-	-	-
24	Palopo	2.814	1.809	1.554	1.240	828
Sulawesi Selatan		**148.956**	**143.237**	**143.073**	**152.921**	**134.089**

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.3.3 Bidang Urusan Kehutanan

2.3.3.3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Dari tabel diatas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2013 mencapai 21,98% pada tahun 2017 mencapai 48,48% atau penurunan lahan kritis dari tahun 2013 sampai 2017 sebesar 14,65%. Rata-rata penurunan lahan kritis per tahun mencapai 3,88%. Kondisi

lahan kritis mencapai 525.885,28 Ha dan pada tahun 2017 mencapai 448.856,47 Ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2013 hingga 2017 mencapai 101.984,39 Ha dengan rata-rata rehabilitasi hutan dan lahan pertahun mencapai 25,496 Ha, dimana tahun 2014 dilakukan penanaman seluas 30,912 Ha. Tahun 2015 seluas 31.917,41 Ha, tahun 2016 27.069 Ha, tahun 2017 seluas 12.085.98 Ha. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui keterlibatan multipihak mulai dari kementerian LHK, Provinsi, Kabupaten, BUMN/BUMS, dan mitra kehutanan. Bentuk keterlibatannya berupa penanaman pada hutan dan lahan kritis serta fasilitasi bibit tanaman hutan ke masyarakat.

Namun pada tahun 2017 fasilitasi bibit ini mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah daerah kabupaten, serta adanya penghematan anggaran pada beberapa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBDN sehingga berdampak pada pengurangan jumlah bibit tanaman hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Kehutanan sejak terbentuk, karena merupakan indikator utama dari Dinas Kehutanan. Sejak tahun 2013 proporsi rehabilitasi hutan dan lahan kritis semakin meningkat mulai dari 21,98% di tahun 2013 dan mencapai 48,48% di tahun 2017. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilakukan bukan hanya menggunakan APBD tapi banyak pula mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan pihak swasta. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan menjadi faktor yang memberikan dampak positif terhadap capaian indeks rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Tabel II.318
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha	115.628,91	146.540,91	178.458,32	205.527,32	217.613,30
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	Ha	525.885,28	502.537,45	478.430,23	457.985,01	448.856,47
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	21,98	29,16	37,30	44,87	48,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 525.885,28 Ha tahun 2013 menjadi 448.856,47 Ha tahun 2017. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang penetapan lahan kritis nasional, luas lahan kritis di provinsi Sulawesi Selatan dengan kategori sangat kritis seluas 293.952 Ha dan lahan kritis dengan kategori kritis seluas 155.568 Ha.

2.3.3.3.2 Kerusakan Kawasan Hutan

Dari tabel dibawah, kerusakan Kawasan hutan pada tahun 2013 mencapai 0,01467% dan pada tahun 2017 mencapai 0,0092% atau rata-rata penurunan per tahun sebesar 38,12% kejadian kebakaran hutan pada tahun 2013 mencapai 399,76 Ha, tahun 2014 371 Ha, tahun 2015 seluas 327,85 ha, tahun 2016 seluas 49 ha, pada tahun 2017 seluas 25,18 ha. Kerusakan Kawasan hutan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan Kawasan hutan diantaranya kejadian kebakaran hutan dan perambahan hutan. Kebakaran hutan masih terjadi di setiap tahun. Penyebabnya oleh faktor manusia untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sedangkan perambahan hutan dengan cara menebang dan mengambil pohon. Kejadian kebakaran hutan tertinggi pada tahun 2013 hingga 2015, dimana tahun 2013-2015 merupakan tahun dengan cuaca paling panas, temperature yang cukup tinggi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Namun upaya pengendalian kebakaran hutan terus dilakukan diantaranya pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api), pemadaman api pada lokasi kebakaran hutan, koordinasi dengan manggala agni (brigade kebakaran hutan UPT.KLHK).

Kerusakan kawasan hutan dihitung dengan menggunakan indikator degradasi hutan akibat kebakaran hutan. Sejak tahun 2013 kerusakan kawasan hutan berada pada kisaran dibawah 1%. Hal ini menunjukkan kinerja perlindungan hutan yang baik. Namun demikian kerusakan hutan masih terjadi setiap tahun disebabkan oleh musim kemarau yang mengakibatkan hutan menjadi rentan terhadap kebakaran. Perilaku masyarakat dalam membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar lahan atau membuang puntung rokok pada saat memasuki hutan kerap memicu kejadian kebaran hutan. Namun demikian kejadian kebakaran hutan masih dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan koordinasi antara pihak Dinas Kehutanan dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam serta bantuan masyarakat setempat.

Tabel II.319
Kerusakan Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	399,76	371,00	327,85	49,00	25,18
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725,796
Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,01467	0,01361	0,01203	0,00180	0,0092

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

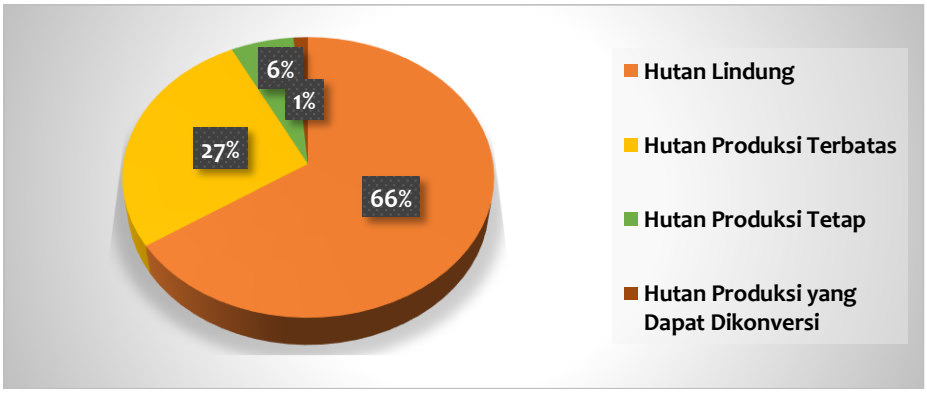
Luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 399,76 ha atau sebesar 0,01467% tahun 2013 menurun

menjadi 25,18 Ha atau sebesar 0,0092% pada tahun 2017. Penurunan luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat mengingat hutan merupakan salah satu sumber daya pembangunan Sulawesi Selatan.

2.3.3.3.3 Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rasio luas Kawasan lindungan terhadap total luas Kawasan hutan sebesar 76,45%. Rasio ini merupakan luas Kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) seluas 2.083.950 Ha. Kawasan hutan ini merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan tersebut berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomo 434/Kemenhut-II/2009. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dihitung dengan membagi luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. Kawasan hutan di Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.145.031 ha (daratan) dan 580.765 ha (perairan) dengan luas total 2.725.796 ha atau 59,56 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.576.453 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan lindung seluas 1.232.683 ha, hutan produksi terbatas seluas 494.846 ha, hutan produksi seluas 124.024 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.976 ha, hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam seluas 851.267 ha. Karena luas kawasan hutan dan luas kawasan lindung ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan, maka rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan adalah tetap selama keputusan penetapan kawasan hutan tidak berubah. Namun demikian pada kenyataannya terdapat banyak lokasi kawasan yang masih mendapat klaim kepemilikan oleh masyarakat sehingga terjadi konflik kepemilikan kawasan hutan.

Grafik II.19
Luas Areal Kawasan Hutan Sesuai Peruntukan
Provinsi Sulawesi Selatan



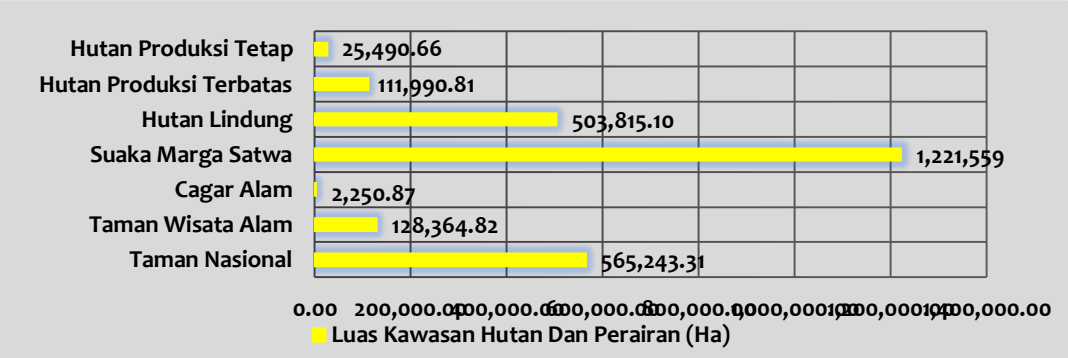
Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2018 (Data Diolah)

Tabel II.320
Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kawasan Lindung	Ha	2.083.950	2.083.950	2.083.950	2.083.950	2.083.950
Total Luas Kawasan Lindung	Ha	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	76,45	76,45	76,45	76,45	76,45

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Grafik II.20
Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha)
Provinsi Sulawesi Selatan



1.3.3.3.4. Perhutanan Sosial

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep pengentasan kemiskinan melalui sektor kehutanan yang diharapkan dapat mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Realisasi capaian Program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan sampai dengan Agustus 2018 seluas 49.148,78 Ha atau baru sekitar 16,62% dari luas indikatif perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan yaitu 285.870 Ha. Dengan capaian tersebut, diharapkan program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan karena berdasarkan data tenurial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, jumlah penduduk yang bermukim dalam kawasan hutan mencapai 62.716 KK dengan indikatif luasan garapan mencapai 155.023,44 Ha. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat interaksi masyarakat terhadap hutan cukup tinggi sehingga program perhutanan sosial diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Peta Indikatif Dan

Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III, target program perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 403.162 Ha.

2.3.3.4 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.4.1 Rasio Desa Berlistrik

Capaian rata-rata Rasio Desa Berlistrik yang diukur dari tahun 2013-2017 sebesar 73.92 %. Capaian Rasio Desa berlistrik di tahun 2013 sebesar 87,02 % didasarkan pada jumlah Desa pada tahun tersebut sebesar 2.751 Desa dan yang sudah berlistrik sebanyak 2.394 Desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2013 adalah Pembangunan PLTMH 2 Unit di Kec. Buntu pepesan Roroan Bara-Bara, Kab. Toraja Utara sebesar 50 Kw dan Desa Buntu Sarek, Kec. Lattimojong, Kab.Luwu sebesar 100 Kw. Selain pembangunan PLTMH juga dilakukan pembangunan PLTS Tersebar di Kab Pinrang Sebanyak 50 Unit dan di Kabupaten Bone sebanyak 200 Unit. Untuk Tahun 2014, rasio desa berlistrik meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 89,22 % dengan jumlah desa yang sudah teraliri listrik sebesar 2.697 dari 3.023 desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2014 adalah pembangunan PLTS Tersebar di Kab. Bone sebanyak 50 Unit dan Kabupaten Sinjai 10 Unit. Untuk Tahun 2015, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 90,20 % dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebesar 2.727 desa dari 3.023 desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2015 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Leppangeng, Kec. Pituriase, Kab.Sidrap 1 Unit dan PLTS Tersebar di Kab. Luwu Timur 88 Unit dan Kab. Pangkep 32 Unit.

Pada Tahun 2016, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 91,65% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.777 Desa dari 3.030 Jumlah desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2016 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Ulusalu, Kec.Latimojong, Kab.Luwu 1 Unit kapasitas 30 Kw, di Desa Lembang, Kec. Suppirang, Kab. Pinrang 1 Unit kapasitas 70 Kw, di Desa Taloto, Kec. Seko Kab Luwu Utara 1 Unit kapasitas 40 Kw. Untuk pembangunan PLTS Tersebar dilakukan di Kab. Pinrang sebanyak 52 Unit dan di Kab. Bone sebanyak 100 Unit. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di Pulau Balang Caddi, Kel. Mattiro Bintang, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep dan di Pulau Manara Indah, Desa Mana Indah, Kec. Bontomatene, Kab. Selayar. Untuk Tahun 2017, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 92,52% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.804 Desa dari 3.030 Jumlah desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2017 adalah Pembangunan PLTMH 10 Unit yang dilaksanakan di (1) Desa Sali-Sali, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, (2) Desa Kanna Kec. Bessesangtempe, Kab. Luwu , (3) Desa Suppirang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (4) Desa Mesakda, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (5) Desa Balepe, Kec. Malimbong Balepe, Kab. Tana Toraja (6) Desa Makkodo, Kec. Simbuang, Kab. Tana Toraja, (7) Desa Ilanbatu Uru Kec. Walenreng Barat, Kab. Luwu (8) Desa Kaladi Darussalam, Kec. Suli Barat, Kab.

Luwu (9) Desa Kanandede Kec. Rangong, Kab. Luwu Utara (10) Desa Beroppa, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di (1) Pulau Sabangko, Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep, (2) Pulau Pasi Kec. Bontoharu ab. Kep Selayar, (3) Pulau Kanalo II Desa Persatuan, Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian rasio desa berlistrik adalah sebagai berikut :

1. Capaian tiap tahun 4-10 Desa;
2. Kapasitas Pembangkit yang dipengaruhi oleh potensi local;
3. Sebaran potensi tenaga air tidak sama disemua daerah yang belum berlistrik.

Tabel II.321
Rasio Desa Berlistrik
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Desa Berlistrik	%	87,02	89,22	90,20	91,65	92,52

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.4.2 Jumlah Bio Energi yang Terbangun

Jumlah Bio Gas yang terbangun dalam kurun waktu 2013-2017 sebanyak 1.249 yang dilaksanakan di beberapa lokasi/daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga yang dibangun pada tahun 2013 sebanyak 8 Unit yang dilaksanakan di Kab. Maros dengan jumlah pembangunan bio gas sebanyak 3 Unit, di Kab. Gowa sebanyak 2 Unit, dan di Kab. Sidrap sebanyak 3 Unit. Pada Tahun 2014 jumlah pembangunan Bio Gas meningkat sebanyak 200 Unit yang dilaksanakan di Kab. Pangkep sebanyak 33 Unit, Kab. Sinjai 34 Unit, Kab. Maros 33 Unit, Kab. Bulukumba 33 Unit, Kab. Wajo 34 unit, Kab. Sidrap 33 Unit. Pada Tahun 2015 jumlah pembangunan bio gas meningkat menjadi 342 Unit yang dilaksanakan di Luwu Utara sebanyak 30 Unit, Kab. Soppeng sebanyak 30 Unit, Kab. Sinjai sebanyak 30 Unit, Kab. Maros sebanyak 30 Unit, Kab. Takalr sebanyak 30 Unit, Kab. Luwu Timur sebanya 30 Unit, Kota Parepare sebanyak 30 Unit, Kota Palopo sebanyak 30 Unit, Kab. Kep. Selayar sebanyak 30 Unit.

Tahun 2016 jumlah pembangunan Bio Gas meningkat menjadi 404 Unit yang di laksanakan di Toraja Utara 13 Unit, Kab. Pinrang 28 Unit, Kab. Pangkep 28 Unit, Kab. Luwu Utara 28 Unit, Kab. Enrekang, 13 Unit, Kab. Soppeng 28 Unit, Kab. Sinjai 28 Unit, Kab. Maros 28 Unit, Kab. Bulukumba 28 Unit, Kab. Barru 28 Unit, Kab. Bantaeng 28 Unit, Kab. Bone 10 Unit, Kab. Wajo 28 Unit, Kab. Luwu Timur 28 Unit, Kab. Tana Toraja 14 Unit, Kab. Jeneponto 14 Unit, Kota Parepare 17 Unit, Kab. Gowa 15 Unit. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan pembangunan Bio Gas dari tahun 2016 dengan jumlah bio gas yang dibangun sebanyak 367 Unit. Pembangunan pada tahun 2017 dilaksanakan di Kab. Pinrang 170 Unit, Kab. Luwu Utara 18 Unit, Kab. Sinjai 130 Unit, Kab. Maros 20 Unit, Kab. Bulukumba 19 Unit, Kab. Bone 10 Unit, Kab. Wajo 10 Unit, Kab. Jeneponto 10 Unit.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bio energi adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya permohonan bio gas yang belum dapat diakomodir;
2. Proses hibah bio gas yang rumit dan panjang (Permendagri 32 Tahun 2011) kapasitas digester yang relatif masih kecil.

Tabel II.322
Jumlah Rasio Energi Terbangun
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Bio Energi yang Terbangun	Unit	8	200	342	404	367

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.4.3 Cadangan Sumberdaya

Cadangan sumberdaya yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2013-2017 adalah 1.931.426.384 Ton dan luas wilayah pemataan 47.457 Ha. Hasil penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2013 dilakukan di 5 Kabupaten, antara lain : 1) Kabupaten Jeneponto dengan jenis komoditi Logam Emas, Luas Daerah Penyelidikan 745 Ha dan Kadar Au : 2,85 ppm; Cu : 93,24 ppm. 2) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditi Non Logam Pasir Silika, Luas Daerah Potensi 660 Ha dengan kadar SiO2 : 94 % didapatkan cadangan sumber daya terunjuk sebanyak 16.000.000 Ton. 3) Kabupaten Bone dengan jenis komoditas Batubara, Luas Daerah Penyelidikan 216 Ha dengan nilai Kalor : 3975 - 5.042 kal/gr didapatkan cadangan sumber daya tereka 2.800.000 Ton. 4) Kabupaten Bone dengan jenis Komoditas Batuan Marmer/Metagamping, Luas Daerah Potensi 7.890 Ha dengan Kualitas Kuat Tekan : 240 - 700 kg/cm2 didapatkan cadangan sumber daya terunjuk sebanyak 220.920.000 Ha. 5) Kabupaten Jeneponto dengan jenis komoditi Non Logam Feldspar, Luas Daerah 3.992 Ha dengan kualitas SiO2 = 63,75 %, Al2O3 = 15,97 % didapatkan cadangan sumber daya tereka 297.500.000 Ton.

Hasil penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2014 dilakukan di 4 Kabupaten antara lain : 1) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditi Logam Galena (Timah Hitam) Luas Daerah Penyelidikan 67 Ha didapatkan cadangan sumber daya Hipotetik sebanyak 337.680.000 Ton. 2) Kabupaten Barru dengan jenis komoditi Non Logam Leusit, Luas Daerah 100 Ha dengan kadar CaO > 50 % didapatkan cadangan sumber daya terukur 1.150.000 Ton. 3) Kabupaten Luwu dengan jenis komoditi Logam Biji Besi dan Emas didapatkan kualitas Kadar Fe Total : 38,9 %; Kadar Au : 1,50 ppm. 4) Kabupaten Enrekang dengan jenis komoditi Logam Base Metal (Cu,Pb,Zn), Kualitas Pb : 243 ppm; Cu : 74 ppm; Zn 125,79 ppm

Hasil Penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2015 dilakukan di : 1) Gowa dan Jeneponto dengan jenis Logam Base Metal (Cu,Pb,Zn), luas daerah penyelidikan 3.117 Ha didapatkan kualitas Cu 318 ppm, Pb 84 , Zn 118,2, Au 0,4. 2)

Kabupaten Barru dan Pangkep dengan jenis komoditi Logam Kromit, Luas daerah penyelidikan 900 Ha dengan kadar Cr : 3 - 42,3 % didapatkan cadangan sumber daya terukur 21.602.650 Ton. 3) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditas batuan Marmer/Metagamping, luas daerah penyelidikan 99 Ha dengan kualitas kuat tekan kuat tekan 143,2 kg/cm2 didapatkan cadangan terunjuk 14.850.000 Ton. 4) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditas Batuan Batu Gamping, Luas daerah penyelidikan 456 Ha dengan kualitas kuat tekan 104,3 kg/cm2 didapatkan cadangan sumber daya terunjuk 22. 835.000 Ton. 5) Kabupaten Gowa dengan jenis komoditas Batuan Mineral Lempung, luas daerah penyelidikan 10.000 Ha didapatkan kualitas SiO_2 = 78,3 %, Al_2O_3 = 8,8 % dan cadangan sumber daya terunjuk 300.000.000 Ton. 6) Kabupaten Gowa dengan jenis komoditas Batuan Bentonit , Luas wilayah penyelidikan 1.100 Ha dengan kualitas SiO_2 : 78 % Al_2O_3 : 4,25% didapatkan jumlah cadangan terunjuk 26.812.500 Ton.

Hasil Penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2016 dilakukan di : 1) Kabupaten Soppeng dengan komoditas batuan leusit, luas daerah penyelidikan 62 Ha didapatkan kualitas K_2O : 3,71-4,68% dan jumlah cadangan sumber daya tereka 5.617.996 Ton. 2) Kabupaten Sinjai dengan komoditas Logam Pb, Cu, Zn, luas daerah penyelidikan 132 Ha dengan kualitas Pb : 92,Cu:38,7,Zn: 28,9 ppm. 3) Kabupaten Pinrang dengan komoditas tambang Batuan Mika, Luas daerah penyelidikan 851 Ha dengan kualitas Mika 35% dlm trakit, jumlah cadangan sumber daya terukur 567 Ton. 4) Kabupaten Sinjai dengan komoditas batuan leusit, luas wilayah pemetaan 419 Ha dengan kualitas K_2O: 1,68-2,46%, jumlah cadangan tereka sebanyak 72.909.871 Ton. 5) Kabupaten Bulukumba dengan komoditas tambang Batuan Tras, luas daerah pemetaan 780 Ha dengan kualitas SiO_2 : 91,9-92,17%, jumlah cadangan sumber daya yang hipotetik 7.800 Ton. 6) Kabupaten Bone dengan komoditas batuan Batu Gamping, luas wilayah pemetaan 7.000 Ha dengan kualitas CaO : 48,3-51,8%, jumlah cadangan sumber daya hipotetik 233.240.000 Ton.

Pada tahun 2017, Survey tinjau batu gamping dolomitan dilakukan di Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Tellu Siattinge seluas 6.500 hektar dan dihasilkan sumberdaya hipotetik sebesar 406.250.000 ton. Adapun kegiatan eksplorasi dilakukan di Desa Lanca dan Desa Lappae, Kecamatan Tellu Siattinge dan dihasilkan sumberdaya terkira sebesar 10.360.557 ton terdiri dari 4.726.273 ton pada Blok Lanca dan 5.634.284 ton pada Blok Lappae. 3) Pemetaan dan Penyelidikan Zona Konservasi Air Tanah. 4) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Air Tanah di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kota Parepare, dan Kota Makassar. 5) Dokumentary dan Informasi Geologi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pengambilan contoh batuan pada formasi batuan yang menyusun di Kabupaten Gowa dan Takalar. 6) Pembinaan Pengelolaan Air Tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, Luwu Timur, Makassar, dan Parepare lebih difokuskan kepada pemakai air tanah atau pengguna air tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan komersil.

Tabel II.323
Cadangan Sumberdaya
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cadangan Sumber Daya	Ton	537,220,00	338,830.000	386,100,150	311,776,234	357,500,000
Luas Wilayah Pemetaan	Ha	13,503	2,538	15,672	9,244	6,500

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.4.4 Jumlah Pembangunan Sumur Bor

Pembangun sumur bor merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagai upaya pemanfaatan air tanah. Pembangunan sumur bor diharapkan menjadi sarana bagi penyediaan air bersih bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau air bersih.

Tabel II.324
Jumlah Pembangunan Sumur Bor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pembangunan Sumur Bor	Unit	19	13	7	13	16

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2018

2.3.3.4.5 Jumlah Produksi Mineral dan Batubara

Wilayah Sulawesi Selatan memiliki potensi tambang yang cukup besar, salah satu hasil tambang di sulawesi Selatan adalah nikel. Berdasarkan data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013-2017 produksi tambang yang terbesar berasal dari jenis non logam dan terkecil dari jenis batubara. Peningkatan produksi tambang jenis non logam mengalami peningkatan yang signifikan dari 6.945.692 ton di tahun 2013 menjadi 16.894.928 ton tahun 2017.

Tabel II.325
Jumlah Produksi Mineral dan Batubara
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Jenis	Satuan	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara				
		2013	2014	2015	2016	2017
Logam	Ton	93.088	68.906	87.901	77.581	79.837
Non Logam	Ton	6.945.692	6,338.038	10.245.160	11.082.066	16.894.928
Batuan	M^3	17.855.266	6.962.019	7.347.647	1.212.249	8.481.874
Batubara	Ton	22.452	1.748	12.472	10.226	10.070

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2018

2.3.3.5 Bidang Urusan Perdagangan

2.3.3.5.1 Ekspor Bersih Perdagangan

Dari data Ekspor Bersih Perdagangan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 diatas, dapat terlihat bahwa Nilai Ekspor Bersih Perdagangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Untuk Tahun 2014 hingga Tahun 2017 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Surplus) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan yang sangat cukup drastis bila dibandingkan di Tahun 2016. Fluktuasi ini disebabkan karena telah terjadinya perekonomian yang buruk sehingga mengalami inflasi dan banyaknya jumlah uang beredar sehingga menyebabkan harga di pasaran meningkat dan pemerintah lebih memilih impor, selain itu produk tambang (Nikel) yang selama ini berkontribusi besar terhadap Nilai Ekspor mengalami penurunan harga yang berdampak pada menurunnya Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Surplus). Tahun 2017 Produk yang diimpor didominasi oleh produk Bahan Bakar Mineral sebesar 228,71 Juta US$ atau 21,92 %, Gandum-Ganduman sebesar 144,24 Juta US$ atau 13,8 %, Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik sebesar 132,43 Juta US$ atau 12,69 % dan Mesin/Peralatan Listrik sebesar 130,02 Juta US$ atau 11,45%.

Impor pada tahun 2017 ini lebih besar dibandingkan tahun 2016, hal ini karena akan banyak realisasi dari kesepakatan investasi kurun 2016-2017 seperti pembangunan pabrik (mesin, bahan baku, bahan penolong dan lain-lain) yang masih berjalan hingga tahun depan. Implementasi dari investasi tersebut akan membuat tekanan yang cukup tinggi terhadap impor sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus bersiap akan hal tersebut karena ini masih menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan masuknya banyak investor ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan semakin kuat. Sehingga nanti pada tahun 2018, yang sekarang investasi, membangun pabrik dan lain-lain, akan mulai produksi dan sebagian ada yang melakukan ekspor. Kita bisa bayangkan, dengan pemulihan ekonomi, maka pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan akan sangat mungkin jauh lebih besar dari sekarang.

Tabel II.326
Ekspor Bersih Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US$	83.871.373	811.243.792	415.988.894	310.889.806	57.950.717

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.5.2 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha Informal

Sektor informal sering dipandang sebagai sektor transisi bagi tenaga kerja dari sektor pertanian di desa ke sektor industri di kota. Fenomena munculnya sektor informal hanyalah bersifat temporer. Akibat keterampilan yang terbatas, para pencari kerja dari desa, pada awal kepindahannya untuk sementara berusaha dan bekerja di sektor informal. Setelah mapan dan berpengalaman mereka akan mengalihkan

usahanya ke sektor formal. Di sinilah terjadi proses formalisasi sektor informal, dimana terjadi peralihan status usaha yang tadi nya informal menjadi formal, dan berpindahnya pekerja yang tadinya bekerja di sektor informal ke sektor formal. Namun pada kenyataannya seringkali proses ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah "Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan" usaha di sektor informal khususnya industri kecil dan industri rumah tangga semakin menjamur. Demikian juga dengan jumlah pekerjanya.

Tenaga kerja dari desa sebagian besar bukan diserap oleh sektor industri (yang formal) tetapi oleh sektor jasa (terutama yang informal). Hal tersebut menandakan bahwa usaha yang tadinya berstatus informal tidak berubah menjadi formal. Demikian juga pekerja yang berada di sektor informal tetap berada di sektor tersebut. Dengan kata lain, sektor informal bukan menjadi sektor transisi, tetapi justru menjadi sektor yang dituju oleh pencari kerja dari sektor tradisional (pertanian). Selain itu juga menjadi sektor yang dituju oleh pencari kerja pertama yang tidak tertampung di sektor formal maupun pekerja sektor formal yang tidak memperoleh penghasilan yang cukup, sehingga secara sambilan ataupun serius merangkap berusaha dan bekerja di sektor informal. Sehingga dari data diatas terlihat labil dari tahun ke tahun. Untuk itu, kedepannya Dinas Perdagangan berusaha agar para pelaku usaha lebih intens dalam memahami data dan informasi tentang karakteristik sektor informal, seperti historis usaha mereka, motivasi Memasuki sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan lain sebagainya.

Tabel II.327
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	1,32	0,93	0,92	0,94	0,74

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.6 Bidang Urusan Perindustrian

2.3.3.6.1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Belum adanya data spesifik yang menghitung jumlah cakupan kelompok pengrajin. Sedangkan data di dalam tabel didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah industri kerajinan yang bersumber dari data industri. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kualitas di bidang industri kerajinan.

Tabel II.328
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	793	881	978	1.065	1.121

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel II.329
Pertumbuhan Industri Pengolahan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pertumbuhan industri pengolahan	%	13,52	13,66	13,69	13,92	14,51

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Tabel II.330
Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perkembangan Industri Pengolahan	%	13,52	13,66	13,69	13,92	14,51
Industri Besar	Unit	326	333	338	341	348
Industri Kecil	Unit	12.016	12.140	12.166	12.370	12.894
Industri Menengah	Unit	661	668	670	681	710
Usaha Kecil Menengah	Unit	37.503	37.888	37.967	38.917	40.561

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Tabel II.331
Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap Sektor Industri	208.290	210.447	210.909	215.726	24.815

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.3.7 Bidang Urusan Transmigrasi

2.3.3.7.1 Persentase Transmigran Swakarsa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pembinaan Transmigrasi pada tahun 2013 sebesar 90,77%, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 2,93% menjad 93,70%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,98% menjadi 88,72%, pada tahun 2016 turun lagi sebesar 3,05% menjadi 75,67% dan pada tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 0,19% menjadi 75,86%. Fluktuasi terhadap persentase pembinaan transmigrasi adalah adanya beberapa KK transmigran yang ditempatkan meninggalkan lokasi karena ketidaksesuaian terhadap pola transmigrasi di lokasi yang bersangkutan, dimana pada proses seleksi calon transmigran didaerah asal tidak menyampaikan dan menggambarkan secara detail tentang lokasi transmigran yang akan ditempati sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi.

Tabel II.332
Persentase Transmigran Swakarsa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase transmigran swakarsa	%	90,77	93,70	88,72	75,67	75,86

Sumber : sipd.kemendagri.co.id

2.3.3.8 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

2.3.3.8.1 Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah. Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup tinggi. Sulawesi Selatan merupakan produsen perikanan terbesar di Indonesia. Ada 15 kabupaten/Kota yang merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar menjadi penyumbang terbesar produksi ikan Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 33,41%. Produksi Perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 10,3%. Produksi Perikanan pada tahun 2013 hanya sebesar 2.884.006,7 ton meningkat sebesar 4.262.554,7 ton. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 10,9% dan perikanan tangkap sebesar 5,3%. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng.

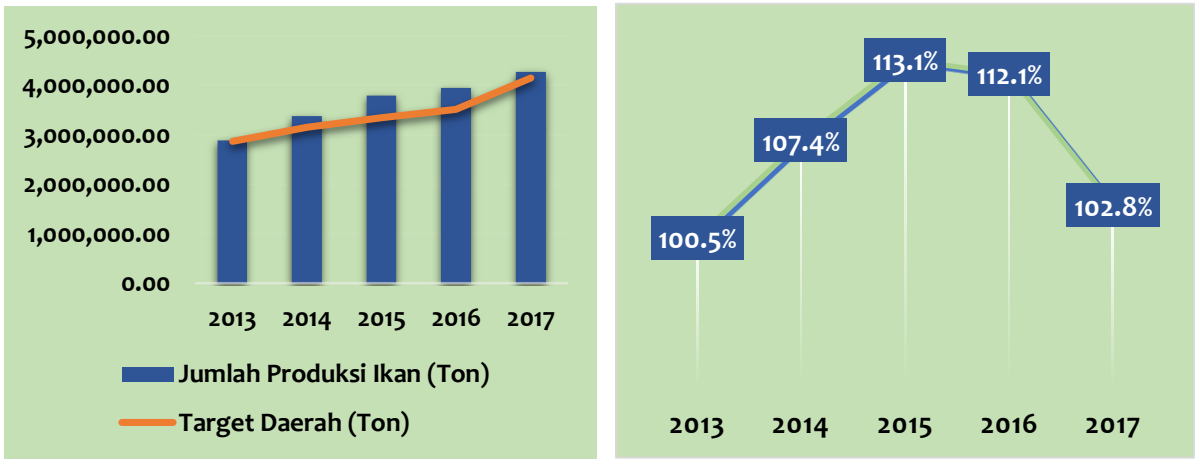
Tabel II.333
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Produksi Ikan	Ton	2.884.006,7	3.377.689,6	3.786.837,2	3.941.648,8	4.262.553,5
Target Daerah	Ton	2.869.663,1	3.146.106,0	3.349.134,6	3.517.298,7	4.145.760,6
Produksi Perikanan	%	100,5	107,4	113,1	112,1	102,8

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dari grafik perkembangan produksi perikanan dibawah, produksi perikanan dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan trend positif dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 8,16%. Pada tahun 2017 realisasi produksi perikanan sebesar 4.262.553,5 ton atau mencapai 102,8% dari target, capaian ini turun 8,1% dari produksi tahun 2016.

Grafik II.21
Produksi Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2013-2018 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan dan perluasan jejaring serta kemitraan. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan budidaya sebesar 10,8% dan perikanan tangkap sebesar 7,4%. Kenaikan nilai produksi perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi produksi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2013 kontribusinya sebesar 43,6%, tahun 2014 sebesar 44,3%, tahun 2015 sebesar 48,9%, tahun 2016 sebesar 42,7% dan tahun 2017 sebesar 46,7%. Pada tahun 2017 kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Takalar sebesar 996.550 ton, Kabupaten Luwu sebesar 622.251,1 ton. Kabupaten Wajo sebesar 462.479 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 294.406 ton, Kabupaten Pangkep sebesar 280.976 ton.

Tabel II.334
Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	10.567	7.656	285	170	334
2	Bulukumba	108.384	128.360	157.920	158.440	168.717
3	Bantaeng	104.422	86.478	85.349	82.628	83.455
4	Jeneponto	132.941	120.979	138.081	149.885	150.510
5	Takalar	506.518	733.972	846.395	923.832	996.550
6	Gowa	-	-	-	-	-
7	Sinjai	8.820	12.112	7.680	12.220	40.208
8	Bone	100.016	125.020	126.128	128.204	247.178
9	Maros	-	8	-	-	125
10	Pangkajene Kepulauan	124.790	148.652	179.603	202.552	280.976
11	Barru	665	798	788	892	936

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
12	Soppeng	-	-	-	-	-
13	Wajo	129.402	138.504	263.159	237.900	462.479
14	Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-
15	Pinrang	4.625	3.582	6.754	9.027	11.056
16	Enrekang	-	-	-	-	-
17	Luwu	289.327	356.386	392.024	244.946	622.251
18	Tana Toraja	-	-	-	-	-
19	Luwu Utara	30.545	33.156	31.422	33.931	190.255
20	Luwu Timur	96.829	133.107	141.789	145.099	294.406
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	35	-	-	-	-
23	Pare-Pare	-	-	28	-	-
24	Palopo	13.450	31.123	31.589	27.519	113.536
Sulawesi Selatan		**1.661.335**	**2.059.892**	**2.409.022**	**2.357.245**	**3.662.971**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Sulawesi Selatan merupakan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Selain rumput laut, Sulawesi selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 7,9 %. Pada tahun 2017 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Pinrang sebesar 9.935,7 Ton, Kabupaten Bone sebesar 4.885,9 ton, Kabupaten Takalar sebesar 4.516 Ton, kabupaten Bulukumba sebesar 3.990,3 ton, kabupaten Barru sebesar 3.810,5 Ton, Kabupaten Pangkep sebesar 3.463 ton. Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sector perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 9,6 %. Pada tahun 2017 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Bone sebesar 68.950,8 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 21.640 ton, Kabupaten Pinrang sebesar 19.714,7 Ton, kabupaten Pangkep sebesar 14.893 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 10.4125 Ton.

Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (*effort*) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaaan sarana dan prasarana penunjang pengkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 2,3 %.

Tabel II.335
Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Udang (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	845,2	1.673,1	261,3	189	74,4
2	Bulukumba	2.333,3	3.753,3	2.951,5	3.287,9	3.990,3
3	Bantaeng	49,5	32,6	32,5	38,3	34,9
4	Jeneponto	1.007,6	577,7	610,8	586,7	684,2
5	Takalar	3.623	5.113,8	4.538,7	4.805	4.516
6	Gowa	99,2	59,6	51,4	67,2	67,5
7	Sinjai	138,8	132,9	117,7	169,4	160,2
8	Bone	3.229	3.964,2	4.189,4	3.840,5	4.885,9
9	Maros	1.589,7	3.117,7	3.485,2	2.911,5	3.122,6
10	Pangkajene Kepulauan	1.887,7	2.046,3	2.546	2.850	3.463
11	Barru	2.536,6	3.851	3.209,4	3.430,8	3.810
12	Soppeng	-	-	-	-	-
13	Wajo	1.785,7	2.374,4	2.086,8	1.849,1	1.956,1
14	Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-
15	Pinrang	5.916,5	8.175,5	7.479,5	7.467,2	9.935,7
16	Enrekang	-	-	-	-	-
17	Luwu	2.913,8	2.990,6	3.585,9	3.812,7	3.847,4
18	Tana Toraja	-	-	-	-	-
19	Luwu Utara	1.730,3	1.491,2	1.367,8	1.317,4	1.331,1
20	Luwu Timur	4.392,8	4.040,8	3.397,8	4.510,4	2.897
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	142,4	191	248,1	302,9	300,3
23	Pare-Pare	95,2	113,8	16,9	10,2	15,7
24	Palopo	104,4	165,5	170	239,7	249,2
Sulawesi Selatan		**34.420,7**	**43.865**	**40.346,7**	**41.685,9**	**45.342**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.3.8.2 Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung. Selain faktor budaya, pencapaian konsumsi ikan ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan berupa keikutsertaan pada pameran produk perikanan, penyebarluasan informasi melalui promosi dan pameran, lomba masak serba ikan, dan pengembangan sarana dan prasarana hasil perikanan.

Dalam periode 2013-2017 telah terjadi peningkatan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 3,2% pertahun yaitu 44,3 kg/kap pada tahun 2013, menjadi 46,8 kg/kap pada tahun 2014, menjadi 49,7 kg/kap pada tahun 2015, menjadi 52,5 kg/kappada tahun 2016, hingga sampai pada tahun 2017 telah mencapai 51,7 kg/kap. Sedangkan pencapaian

konsumsi ikan nasional pada tahun 2016 telah mencapai 43,9 kg/kap (Data Susenas) dan KKP menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2017 sebesar 47,12 kg/kap. Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

Tabel II.336
Konsumsi Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	44,3	46,8	49,7	52,5	55,2
Target Daerah	Kg	43,9	44,7	45,2	45,6	46,6
Konsumsi Ikan	%	100,9	104,7	110,0	115,1	119,7

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir sekitar 452 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Tahun 2013 hanya 33 kelompok yang mendapatkan bantuan sedangkan tahun yang paling banyak mendapatkan bantuan pemerintah daerah adalah tahun 2016 yaitu sebesar 193 kelompok. Kemudian di tahun 2017 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 78 kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan

Tabel II.337
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n	Klp	33	59	89	193	78
Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	131	168	295	333	358
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	25,19	35,12	30,17	57,96	21,79

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dimana produksi kelompok nelayan pada tahun 2013 sebesar 70.001,5 ton meningkat sampai tahun 2016 sebesar 172.376,69 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 72.016,39 ton.

Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas KP Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan.

Tabel II.338
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	73.614,65	106.129,73	93.614	181.055,91	78.393,90
Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	292.237	302.191,7	310.290,4	312.380,8	359.770,1
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	23,95	33,46	28,71	55,18	20,02

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.8.5 Proporsi Tangkapan Ikan

Dari tahun 2013 sampai saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Tahun 2013, proporsi tangkapan ikan sebesar 39,30% dan sampai tahun 2017 mencapai 48,37%. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch*/TAC). Potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (*Total Allowable Catch*/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk propinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY). Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan < 100%. Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

Tabel II.339
Proporsi Tangkapan Ikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tangkapan Ikan	Ton	292.237,6	302.191,7	310.290,4	312.380,8	359.770,1
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari	Ton	747.776	743.776	743.776	743.776	743.776
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	39,3	40,6	41,7	42,0	48,4

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.8.5 Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar 762.055,12 Ha. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2013-2016 telah dikelola seluas 76.205,7 Ha pada tahun 2013, kemudian meningkat pada tahun 2014 telah dikelola sebesar 91.446,7 Ha, dengan melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ikan maka pada tahun 2015 pengelolaan meningkat menjadi 92.557,1 Ha hingga pada tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalan UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 95.241 Ha, dan hingga tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi sebesar 95.752,1 Ha sehingga total pengelolaan luas kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 seluas 355.450 Ha hampir 50% dari luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikelola.

Tabel II.340
Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kawasan Lindung Perairan	Ha	76.205,7	91.446,8	92.557,1	95.241,0	95.752,1
Total Luas Perairan Tutorial	Km^2	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0,18	0,21	0,22	0,22	0,22

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.8.6 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yangdigunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Berdasarkan tabel dibawah nilai tukar nelayan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 berfluktuasi. Peningkatan NTN disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan.

Tabel II.341
Nilai Tukar Nelayan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks yang Diterima Nelayan	153,10	117,40	107,80	156,70	186,80
Indeks yang Dibayar Nelayan	130,10	135,60	140,90	143,70	128,10
Nilai Tukar Nelayan	117,68	86,58	76,51	109,05	145,82

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure)* keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Selama periode 2013-2017 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 22,8% pertahun sedangkan pembudidaya 13,3% pertahun. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2014 telah dibagi menjadi dua yaitu Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya, hal ini disebabkan karena Tahun dasar perhitungan NTN telah mengalami perubahan dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012 sehingga Nilai Tukar NTN Tahun 2013 masih di gabung Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya dengan pencapaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya sebesar 111,45 dan Tahun 2014 Nilai Tukar Nelayan sebesar 106,40 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 106,47. Kemudian pada tahun 2015 rata-rata Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,1 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 102,1 pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 103,5 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 99,1 , hingga tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 107,6 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 97,9.

2.3.4 Fokus Penunjang Urusan

2.3.4.1 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.3.4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

Tabel II.342
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawasi Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel II.343
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada

Pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur setiap tahunnya. Namun dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkualitas.

Tabel II.344
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.4 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 92,80%. Sejumlah 472 Program yang ditetapkan pada dokumen RPJMD namun yang terakomodir pada RKPD sejumlah 438 Program.

Tabel II.345
Konsistensi Program RPJMD dan RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	92,80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.5 Bidang Urusan Keuangan

2.3.4.1.6 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan - RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Untuk opini LKPD tahun anggaran 2017 dengan nilai WTP. Sebagai perbandingan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 7 tahun secara berturut turut.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, Keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut harus tetap dipertahankan keberlanjutannya, olehnya itu Inspektorat Provinsi melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi dan monitoring, Konsultasi dan Reviu Laporan Keuangan.

Tabel II.346
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.7 Persentase SILPA

Pada perkembangannya SILPA APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase masih berfluktuatif dimana pada tahun 2013 mencapai 0,80% dan SILPA tertinggi tercatat 2,89%pada tahun 2015, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1,78 %. Dari trend tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD ProvinsiSulawesi rata-rata masih dikategorikan sangat rendah yaitu 1,75%.

Tabel II.347
Persentase SILPA
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase SILPA	%	0,80	1,51	2,89	1,78	1,78

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.8 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Perkembangan persentase belanja pendidikan sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari tahun 2013 yang mencapai 25,53% meningkat menjadi 42,48% pada tahun 2017.

Tabel II.348
Persentase Belanja Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25,53	24,44	24,34	28,82	42,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.i

2.3.4.1.9 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 8,89% hingga tahun 2015 sebesar 13,42%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 10,84% pada tahun 2017 dalam alokasi anggaran APBD Tahun 2017.

Tabel II.349
Persentase Belanja Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	8,89	12,57	13,42	11,59	10,84

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.10 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung

Proporsi belanja daerah sebagaimana di atas, merupakan indikasi bahwa belanja tidak langsung lebih dominan dibanding belanja langsung yang selama lima tahun terakhir yang cenderung berfluktuasi, mulai dari 62,02% pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi 58,75%, pada tahun 2015 sebesar 60,54%, pada tahun 2016 menjadi 63,64%, dan pada tahun 2017sebesar 65,64%.

Tabel II.350
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung	%	Belanja langsung: 37,98 Belanja Tidak Langsung: 62,02	Belanja langsung: 41,25 Belanja Tidak Langsung: 58,75	Belanja langsung: 39,46 Belanja Tidak Langsung: 60,54	Belanja langsung: 36,36 Belanja Tidak Langsung: 63,64	Belanja langsung: 34,24 Belanja Tidak Langsung: 65,64

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.11 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Belanja bagi hasil Kabupaten/kota dan desa dalam lima tahun terakhir mengalamiperubahan-perubahan dikarenakan adanya kebijakan pusat yang berubah-ubah terhadap Pemerintah Daerah (Provinsi). Dana bagi hasil pada tahun 2013mengalami kenaikan hingga tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 16,86%.

Tabel II.351
Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	16,73	18,14	19,17	19,52	16,86

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.1.12 Penetapan APBD

Idealnya suatu penetapan APBD ditetapkan lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam penetapan APBD berdasarkan data antara tahun 2013 sampai dengan 2017 jadwal penetapannyayaitu di bulan Desember.

Tabel II.352
Penetapan APBD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penetapan APBD	No Perda dan Tanggal	Perda No. 10 Tahun 2012, Tanggal 31 Desember 2012	Perda No. 11 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014	Perda No. 8 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014	Perda No. 13 Tahun 2015, Tanggal 31 Desember 2015	Perda No. 11 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.2 Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

2.3.4.2.1 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Tabel II.353
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	15 JP/Tahun	15 JP/Tahun	15 JP/Tahun	15 JP/Tahun	15 JP/Tahun

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.2.2 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan pelatihan disebabkan karena ketesediaan biaya pada setiap tahun APBD masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ketahun, selain itu pelaksanaan Pergub 73 Tahun 2010 tentang pelaksanaan diklat satu pintu tidak dipatuhi oleh setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sehingga data data ASN yang telah mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi tidak dapat diketahui oleh BPSDM.

Tabel II.354
Pendidikan Dan Pelatihan Formal ASN
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,7	0,8	4,3	0,1	0,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.2.3 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Tabel II.355
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,4	3,9	37,64	3,3	2,9

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.2.4 Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat dewan, sekretariat DPRD, dinas/badan daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah meliputi :

- Kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
- Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Pada tabel di atas terlihat tidak ada peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemprov Sulsel periode tahun 2013 s/d 2016 yakni berjumlah 64 jabatan sebagaimana amanat PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan serta tipelogi perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah (12 biro dan 1 sekda), sekretariat DPRD, badan/dinas (45 SKPD), rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah (6 RS). Sedangkan pada tahun 2017 mengalami perubahan sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 60 jabatan terdiri atas sekretariat daerah (9 biro dan 1 sekda), badan/dinas (44 OPD), RSUD dan RSKD (6 RS).

Tabel II.356
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	64	64	64	64	60

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.4.2.5 Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

1. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III;
2. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV;
3. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada tabel di atas tampak peningkatan terjadi sepanjang tahun 2013 s/d tahun 2017. Pada tahun 2013 s/d 2016 peningkatan jumlah jabatan terjadi di jabatan pelaksana, hal ini disebabkan penambahan jumlah pegawai (pelaksana) yang berasal dari penerimaan CPNS daerah dan usulan pindah masuk ke Pemprov Sulsel yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun (Batas Usia Pensiun / BUP). Sedangkan pada tahun 2017 peningkatan terlihat lebih signifikan sebagai implikasi diterapkannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu adanya pengalihan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi yang kemudian menambah jumlah jabatan pengawas yang terdiri atas UPT dinas yang membidangi Pendidikan, Kehutanan, dan Ketenagakerjaan.

Tabel II.357
Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	7.473	7.581	7.793	7.587	8.877

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.4.2.6 Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

1. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
2. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel II.358
Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.170	2.389	2.424	2.400	17.485

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berasal dari penerimaan CPNS daerah dan usulan pindah dari instansi luar untuk masuk ke Pemprov Sulsel yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memasuki masa penisun setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2017 terlihat peningkatan yang sangat signifikan sebagai implikasi dari diterapkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni adanya pengalihan uruan dari kab/kota ke provinsi. Selanjutnya juga diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan setelah dtetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi. Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari kab/kota ke provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas sebagai Pengawas tenaga kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan. Berikut daftar pengalihan PNS ke Provinsi :

Tabel II.359
Pengalihan PNS
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Instansi Pusat	Urusan	Jabatan yang Dialihkan	Instansi	
			Asal	Tujuan
Kementerian Ketenagakerjaan	Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan	Pengawas Tenaga Kerja	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan menengah	Guru SMA/SMK	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Kehutanan	Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan	Kab/kota	Provinsi

Instansi Pusat	Urusan	Jabatan yang Dialihkan	Instansi	
			Asal	Tujuan
Kementerian Perhubungan	BIdang pengelolaan terminal penumpang tipe A dan B	Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Dalam Negeri	Urusan pemerintahan umum	Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum	Kab/kota	Provinsi

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.3.4.3 Penelitian Dan Pengembangan

2.3.4.3.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel II.360
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.3.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel II.361
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	50	53	56	24

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.3.3 Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi

Tabel II.362
Penerapan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	34	22	29	20	49

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.3.4 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel II.363
PenerapancKebijakan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	14	13	12	13	22

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.4 Pengawasan

2.3.3.4.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk tahun 2013 capaian kinerja cukup optimal mencapai 83,31% sesuai dengan terget yang ditetapkan. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan dari 81,5% menjadi 67,91%. Penurunan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain kurangnya respon dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan, adanya beberapa pejabat yang mutase/pension/meninggal dan adanya rekanan yang terkait dengan temuan sulit ditelusuri lagi keberadaannya. Penurunan capaian pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2016) dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2017 sebagian besar dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), sehingga sebagian bsar rekomendasi hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Adanya perubahan nomenklatur OPD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan adanya OPD mengalami perubahan nama dan terdapat kewenangan urusan pemerintahan yang berpisah terbagi pada 2 (dua) OPD dan tergabung dalam 1 (satu) OPD sehingga sulit untuk ditindaklanjuti kepada Kepala OPD sebelum berlakunya struktur baru sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud. Dalam rangka mendukung capaian indikator ini telah dilakukan upaya monitoring/pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ke OPD terkait dan melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan 2 (dua) kali setiap semester dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.364
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	83,31	81,5	78,18	74,09	67,91

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.4.2 Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tersebut bahwa capaian indikator pada tahun 2013 yaitu 0,11% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 0,07%. Pada tahun 2017 capaian indikator persentase pelanggaran pegawai mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 0,08%. Hal ini disebabkan karena keseluruhan laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diadukan oleh Kepala OPD masing-masing ASN yang tidak mentaati jam kerja sehingga mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin dapat meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Pengaduan/laporan dan pemeriksaan khusus/tertentu yang dilaksanakan dan yang masuk tersebut terhadap pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak bersifat pada ketaatan atas jam kerja.

Tabel II.365
Persentase pelanggaran pegawai
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,11	0,07	0,10	0,19	0,08

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.3.4.3 Jumlah Temuan BPK

Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Pada tahun 2013 sejumlah 54,74% jumlah hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2017 capaian kinerja meningkat menjadi 64,11% yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 88%. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya respon dari obrik pemeriksaan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI;
2. Terdapat rekomendasi temuan BPK bukan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetapi kepada Direksi Bank Sulselbar sehingga bukan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti;
3. Rekomendasi BPK yang ditujukan kepada penyedia jasa dan pejabat teknis kegiatan sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit menindaklanjuti temua;
4. Terkait dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan serta anggota DPRD periode lama juga sudah berganti;
5. Untuk rekomendasi tentang persertifikatan asset tanah memang belum dilakukan secara komprehensif atau menyelurih tetapi dilakukan secara bertahap mengingat anggaran sertifikasi tanah dianggarkan secara bertahap tiap tahunnya;

6. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI khususnya pada tahun 2017 yang baru mencapai 64,11% disebabkan adanya rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke kas daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya dan beberapa temuan tersebut telah berproses pada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) yang putusannya telah dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan jaminan dan penyelesaiannya dengan cara dicicil selama 2 (dua) tahun;
7. Adanya perubahan nomenklatur nama OPD yang menyulitkan untuk ditindaklanjuti karena rekomendasi temua masih ditujukan kepada Kepala OPD yang lama.

Meskipun demikian akan terus diupayakan agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya seperti monitoring ke OPD dan melaksanakan rapat-rapat pembahasan tindak lanjut BPK dengan OPD terkait. Sehingga pada tahun-tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat dimaksimalkan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Tabel II.366
Jumlah Temuan BPK
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah temuan BPK	%	54,74	56,84	67,98	65,3	64,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.5 Sekretariat Dewan

2.3.4.5.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel II.367
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.5.2 Tersusun dan Terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel II.368
Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMDdan RKPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.3.4.5.3 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel II.369
Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat daritingkat pendapatannya.Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secaraumum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannyarendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunya pendapatan yang

besar pula.Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standarhidup layak yang direpresentasekan oleh pengeluaran perkapita (harga konstan 2012) pada tahun 2017, pengeluaran perkapita masyarakat Sulawesi Selatan mencapai 25,94juta rupiah per tahun.Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Tabel II.370
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	17,58	19,65	21,78	23,75	25,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.4.1.2 Pengeluaran Perkapita/Tahun

Rata-rata pengeluaran perkapita/tahun yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat dengan nilai pengeluaran pada tahun 2017 sebesar 10,489 juta rupiah.

Tabel II.371
Pengeluaran Perkapita/Tahun
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Perkapita / Tahun Sulawesi Selatan	Ribu Rupiah	9.632	9.723	9.992	10.281	10.489
Pengeluaran Perkapita / Tahun Nasional	Ribu Rupiah	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Tabel II.372
Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Tukar Petani	Poin	106,96	105,39	104,72	104,73	101,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Selama tahun 2017, NTP relatif stabil walaupun terjadi penurunan tetapi relatif kecil yaitu sebesar 3,70%. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan sedangkan dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (Ib) nmengalami kenaikan. It mengalami penurunan sebesar 0,42%, sedangkan Ib terjadi kenaikan sebesar 3,41%. Penurunan NTP terutama disebabkan oleh turunnya NTP pada Subsektor Perkebunan Rakyat, Subsektor Hortikultura dan Subsektor Tanaman Pangan. Penurunan NTP tertinggi terjadi pada Subsektor Perkebunan Rakyat dengan penurunan sebesar 9,76%, kemudian diikuti oleh Subsektor Hortikultura dengan penurunan sebesar 4,27%.Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dialami oleh Subsektor Peternakan dan Subsektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Kenaikan NTP tertinggi dialami oleh subsektor perikanan dengan kenaikan sebesar 1,05%, kemudian diikuti oleh subsektor peternakan sebesar 0,14%.

Tabel II.373
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Sub Sektor	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Tanaman Pangan	97,55	99,69	100,56	99,17
Hortikultura	109,24	110,69	115,00	107,76
Perkebunan Rakyat	113,44	105,95	102,39	93,64
Peternakan	106,39	107,86	108,46	109,73
Perikanan	106,44	104,24	100,98	105,13
Perikanan Tangkap	108,59	107,12	103,48	110,97
Perikanan Budidaya	105,00	102,92	99,13	100,83

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.4.1.4 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) suatu penduduk, sedangkan pergeseran komposisi

pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan suatu penduduk.Data konsumsi/pengeluaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu makanan dan bukan makanan. kelompok bukan makanan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu juga dikumpulkan kuantitasnya, seperti listrik, air, gas, dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan untuk semua kabupaten/kota. Secara provinsi pengeluaran rata-rata per kapita penduduk sebesar Rp 927.908,-. Kabupaten/kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kota Makassar sebesar Rp 1.536.017,- sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Soppeng sebesar Rp 607.629,- .Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

Tabel II.374
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	9,81	11,06	12,28	13,17	14,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.4.1.5 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Tabel II.375
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	79,37	59,25	79,03	207,44	266,62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

2.4.1.6 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mencapai nilai US$ 1.020,80 juta dengan berat bersih sebesar 1.266,30 ribu ton. Dari beberapa kelompok komoditas ekspor Sulawesi Selatan, kelompok komoditas nikel masih merupakan kelompok komoditas dengan nilai ekspor terbesar, yaitu sebesar US$ 629,33 juta atau sekitar 61,65 persen dari total ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Posisi kedua terbesar merupakan komoditas Biji Bijian Berminyak dan Tanaman Obat dengan nilai ekspor

sebesar US$ 98,16 Juta (9,62%), dan kelompok komoditas Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya menempati posisi ketiga dengan nilai ekspor sebesar US$ 68,52 Juta. Selanjutnya kelompok komoditas ekspor dengan berat bersih terbesar adalah kelompok komoditas Garam, Belerang dan Kapur dengan total berat sebesar 292,25 ribu ton atau berkontribusi sebesar 26,87 persen. Sepanjang tahun 2017, rata rata harga Nikel sebesar US$ 6,52 Juta per ribu ton, untuk kelompok komoditas Biji Bijian Berminyak dan Tanaman Obat memiliki rata rata harga US$ 0,96 juta per ribu dolar dan rata rata harga kelompok komoditas Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya sebesar US$ 6,04 juta per ribu ton.

Tabel II.376
Nilai dan Berat Ekspor Sulawesi Selatan
Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2017

Komoditas	Nilai (Juta US$)	Persentase (%)	Berat (000,- Ton)	Persentase (%)
Nikel	584,14	50,59	96,51	7,62
Biji-bijian berminyak dan Tanaman Obat	98,16	9,62	102,12	8,02
Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya	68,52	6,71	11,35	0,90
Kakao/Coklat	53,41	5,23	17,23	1,36
Garam, belerang dan kapur	32,16	3,15	726,77	57,39
Kayu dan barang dari kayu	31,83	3,12	39,28	3,10
Buah-buahan	30,60	3,00	6,81	0,54
Daging dan Ikan serta Hewan Air Lainnyayang diolah	24,64	2,41	1,12	0,09
Ampas/Sisa dari Industri Makanan	15,71	1,54	102,36	8,08
Lak, Getah dan Damar	7,86	0,77	4,54	0,36
Total 10 komoditas utama	**992,23**	**97,20**	**1.108,10**	**87,51**
Komoditas Lainnya	**28,57**	**2,80**	**158,20**	**12,49**
Total Ekspor	**1.020,80**	**100,00**	**1.266,30**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Komoditas impor Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2017 dengan nilai terbesar adalah Bahan Bakar Mineral dengan nilai sebesar US$ 32,13 juta atau 35,24% dari total impor Sulawesi Selatan, Gula dan Kembang Gula dengan nilai sebesar US$ 18,74 juta atau 20,55% dari total impor Sulawesi Selatan; gandum-ganduman dengan nilai sebesar US$ 14,69 juta atau16,11% dari total impor Sulawesi Selatan kemudian disusul oleh Mesin/peralatan Listrik dengan nilai sebesar US$ 7,64 juta atau 8,38% dari total impor Sulawesi Selatan. Impor terbesar Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2017 melalui Pelabuhan Makassar dengan nilai US$ 58,71 juta (64,40%). Kemudian disusul pelabuhan Sukarno Hatta Makassar dengan nilai US$ 20,35 juta atau 22,32% dari total nilai impor Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan bulan November 2017 impor Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Makassar mengalami peningkatan sebesar 166,87%

dan impor yang melalui pelabuhan Sukarno Hatta Makassar naik sebesar 19,59%. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB merupakan perbandingan jumlah nilai ekspor dan impor barang dan jasa denga PDB mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan nilai 33,08 pada tahun 2017.

Tabel II.377
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	53,61	57,09	48,27	30,94	33,08

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel II.378
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan						
Pendidikan Menengah						
Persentase jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	47,92	61,48	70,12	70,46	70,54
Pendidikan Khusus						
Persentase jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100%					
Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi						
Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	40%	50%	75%	80%	85%
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi						
Persentase penduduk/ warga pada kondisi	100%	96,85	100	100	100	100

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
Pekerjaan Umum						
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota						
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%					
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Kabupaten/ Kota						
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%					
Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat						
Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	60%	85,04%	85,37%	87,42%	61,86%	57,51%
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi						
Persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat						
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	51,18%	51,18%	51,18%	56,06%	57,22%
Perumahan Rakyat						
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi						
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100%					
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi						

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
Program Pemerintah Daerah Provinsi						
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%					
Rumah Layak Huni dan Terjangkau						
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%					
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%					
Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum						
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%					
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi						
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%					
Sosial						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti						
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	7,43%	7,41%	6,42%	6,26%	6,42%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti						
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	11,70%	11,68%	9,15%	8,52%	8,91%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti						
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	5,58%	5,56%	4,97%	4,97%	4,97%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti						
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100%	0	2,02%	6,37%	0	8,13%

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
dasarnya di dalam panti						
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi						
Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	61,90%	68,33%	75,09%	80,16%	82,32%
Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Sosial						
Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar	80%	36,60%	34,85%	27,80%	47,42%	35%
Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	60%	100	100	100	100	100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial						
Persentase Panti Sosial skala provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	60%	-	-	-	-	-
Penanggulangan Korban Bencana						
Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	80%	63,42	67,75	70,25	75,09	82,15
Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	61,90	68,33	75,09	80,16	82,32

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial						
Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	40%	Lanjut Usia : 5,58%	Lanjut Usia : 5,56%	Lanjut Usia : 4,97%	Lanjut Usia : 4,97%	Lanjut Usia : 4,97%
	40%	Disabilitas : 7,43%	Disabilitas : 7,41%	Disabilitas : 6,42%	Disabilitas : 6,26%	Disabilitas : 6,42%

Indikator Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian tidak pernah dibawah 50% pertahun dan cenderung konstan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 karena tidak ada penambahan luas areal pertanian secara signifikan yang terairi, berbeda pada tahun 2016 ada penambahan Daerah Irigasi dan bertambah pula areal pertanian yang dapat diairi sesuai dengan ketersediaan air dijaringan irigasi sampai tahun 2017 dan capaian tahun 2018 sebesar 58,38 terus mengalami peningkatan.

Indikator Persentase Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti bukan merupakan kewenangan provinsi karena pelayanan terkait luar panti sosial.

2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi. Target-target SDGs di tingkat provinsi telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaanmya. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mencapai target nasional sejumlah 17 Tujuan (Goals) sejumlah 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi sejumlah 235 indikator. Indikator TPB terbanyak yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah capaian indikator pada pilar sosial sejumlah 42 indikator. Capaian target indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.379
Capaian Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
1	**Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun**							
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	7%	9,91%	9,77%	9,32%	-	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	65%	67%	70%	75%	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%	1173%	1135%	1135%	1173%	1173%	Dinas Sosial
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	74.178 Rumah Tangga	100.473 Rumah Tangga	100.473 Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	Dinas Sosial
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	81%	81,96%	86,81%	80,96%	91,11%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	63%	91,2%	85,9%	91,9%	102,9%	Dinas Kesehatan
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	68%	71,86%	71,38%	72,39%	72,67%	Dinas Kesehatan
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	100%	69,51%	72,97%	72,36%	84,20%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	91,63%	63,50%	61,48%	70,12%	70,46%	70,54%	Dinas Pendidikan
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,4%	77,4%	-	-	57,22%	66,09%	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.11	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	95%	89,22%	90,20%	91,65%	92,52%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
1.12	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Jiwa	-	1.016 Jiwa	14.472 Jiwa	5.598 Jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.14	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.15	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	435	476	498	948	-	Dinas Sosial
2	**Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**							
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	22,1%	26,1%	20,05%	25,2%	23%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	48,9%	42,22%	40,33%	-	40%	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan	8,5%	15,87%	13,84%	14,34%	-	16%	Dinas Ketahanan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.							Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Menurun	33,86%	35,9%	34%	36%	35%	Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	28%	33,87%	-	-	26,7%	21,8%	Dinas Kesehatan
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Menurun	7,25%	10,2%	10,9%	9,4%	8,7%	Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	28,5%	-	-	15%	13,4%	Dinas Kesehatan
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	44%	68%	72%	68%	73%	Dinas Kesehatan
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/thn	57,67	55,79	55,37	65,55	60,75	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
3	**Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**							
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	104	138	149	156	115	Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	96%	92,79%	94,02%	92,90%	94,05%	Dinas Kesehatan
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85 %	81%	81,96%	86,81%	80,96%	91,11%	Dinas Kesehatan
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	1.151	1.201	1.265	1.303	1.151	Dinas Kesehatan
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	835	762	936	887	818	Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	24	1037	1113	1167	1183	1059	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%	85%	95,83%	100%	100%	95,83%	Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	<0,5%	0,025%	0,056%	0,28%	0,33%	Dinas Kesehatan
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per	245	158	152	154	155	155	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	100.000 penduduk							
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	<1	0,14	0,12	0,12	0,15	Dinas Kesehatan
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota	5 Kab/Kota	0	0	14 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		30%	4%	4%	17%	50%	Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	338.635	422.382	253.796	283.942	333.251	Dinas Kesehatan
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi	14 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota	11 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	35 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota	-	-	Dinas Kesehatan
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,4%	6%	6,9%	7%	-	1,3%	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,3%	19,82%	20,64%	20,92%	20,08%	5,02%	Dinas Kesehatan
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,4%	13,60%	13,60%	4,01%	10,11%	3,17%	Dinas Kesehatan
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat	Menurun	3,7	0	0	0	0,1	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	bunuh diri							
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	280 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,95%	-	-	-	1,95%	Dinas Kesehatan
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66%	1.495.547	-	-	-	1.387.345	Dinas Kesehatan
3.23	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	68%	71,86%	71,38%	72,39%	72,67%	Dinas Kesehatan
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,5%	11%	11,47%	11,67%	12,47%	14%	Dinas Kesehatan
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	700 Jiwa	500 Jiwa	550 Jiwa	600 Jiwa	750 Jiwa	Dinas Kesehatan
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	95%	75%	65%	67%	70%	75%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	(JKN)							
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	83%	73%	77%	83%	85%	Dinas Kesehatan
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	357	222	280	299	299	Dinas Kesehatan
4	**Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**							
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	91,63%	161%	103,84%	108,69%	109,92%	110,02%	Dinas Pendidikan
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	8,8 Tahun	8,11 Tahun	8 Tahun	8,26 Tahun	8,28 Tahun	8,31 Tahun	Dinas Pendidikan
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Meningkat	79,9	79,18	82	82,83	82,93	Dinas Pendidikan
4.4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,1%	93,78%	90,04%	91,78%	93,01%	94,06%	Dinas Pendidikan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
4.5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	93,78%	90%	91,78%	93,08%	94,06%	Dinas Pendidikan
5	**Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**							
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	70%		50%	90%	94%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	161%	103,84%	108,69%	109,92%	110,02%	Dinas Pendidikan
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	16,6%	60 orang	0 orang	50 orang	60 orang	60 orang	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6	**Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**							
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%	100%	69,51%	72,97%	72,36%	84,20%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2	Kualitas Air Danau	Meningkat		20%	38,50%	40,25%	55,05%	Dinas Pengelolaan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
								Lingkungan Hidup
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat		5%	7%	10%	12%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha (Skala Nasional)	6.000 Ha	30.912 Ha	31.917,41 Ha	27.069 Ha	11.461 Ha	Dinas Kehutanan
7	**Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua**							
7.1	Rasio elektrifikasi	96,6%	96,6%	85,18%	89,37%	94,53%	97,33%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	**Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**							
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Meningkat	9,29%	7,54%	7,17%	7,41%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.2	PDB per kapita	50 Juta	48,21 Juta	32,12 Juta	35,11 Juta	38,02 Juta		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.3	Persentase tenaga kerja formal	51%	44,97%	36,45%	36,95%	35,11%	37,63%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	39,42%	41,81%	41,73%	39,76%	38,67%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke	25%	20%	18,7%	19,9%	20,3%	20%	Dinas Koperasi & UMK

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	layanan keuangan							
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	4,56%	5,05%	5,83%	4,74%	5,61%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.7	Tingkat setengah pengangguran	Menurun		1.439.039	1.396.305	-	1.295.011	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat		-	24,10%	22,21%	21,83%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	8%	1,38%	1,34%	1,32%		Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)	151.763 Wisman	151.763 Wisman	191.773 Wisman	236.491 Wisman	255.747 Wisman	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	6.000.000	5.920.528	7.128.826	8.426.528	8.367.748	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat		-	10,36%	12,28%	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	20%	18,7%	19,9%	20,3%	20%	Dinas Koperasi & UMKM
9	**Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**							

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
9.1	Panjang jalur kereta api	3.258 Km	145 Km	-	-	16,1	16,1	Dinas Perhubungan
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah pelabuhan strategis	24 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	Dinas Perhubungan
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	14,25%	13,98%	13,88%	13,92%	13,95%	Dinas Perindustrian
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	9,25%	13,98	13,88	13,92	13,95	Dinas Perindustrian
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	287.269	202.003	230.459	296.882	262.936	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	53.000	54.000	51.141	52.309	54.513	Dinas Perindustrian
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO_2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%	22,5%	-	5,12	7,50	-	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	**Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara**							
10.1	Koefisien Gini	0,36	0,36	0,448	0,404	0,400	0,429	BPS
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,	7-8%	7%	9,54	10,12	9,24	9,38	BPS

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat		8,9%	10,09%	11,17%	11,09%	BPS
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	14%	15,31	15,18	15,49	15,4	BPS
11	**Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**							
11.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32%	22,8%	18%	19,6%	21,2%	22,8%	Dinas Perhubungan
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	20 kota sedang (skala nasional)	7 kota sedang (skala nasional)	7 kota sedang	7 kota sedang	7 ota sedang	7 kota sedang	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 Metropolitan (skala nasional)	1 Metropolitan	1	1	1	1	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Orang	-	1.016 Orang	17.472 Orang	5.598 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia	30%	24%	24%	24%	24%	24%	Badan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	(IRBI)							Penanggulangan Bencana Daerah
11.6	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ada	75					
11.7	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	80%	15,82%	16,21%	16,54%	17,53%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	**Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**							
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton (skala nasional)		528,88 Ton/ Periode	711,89 Ton/ Periode	677,87 Ton/ Periode	743,29 Ton/ Periode	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari (skala nasional)	20 Ton/ Hari	14,84 Ton/ Hari	15 Ton/ Hari	15,15 Ton/ Hari	15,29 Ton/ Hari	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	**Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**							
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
13.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Orang	-	1.016 Orang	17.472 Orang	5.598 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
14	**Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**							
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	37.648 Nelayan	-	-	25.814 Nelayan	37.811 Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	**Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**							
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	55,65	59,56	59,56	59,56	59,56	Dinas Kehutanan
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	22 KPH	-	-	9 KPH	16 KPH	Dinas Kehutanan
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
16	**Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**							
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	Rp. 190.759.499.612	Rp. 60.592.271.668	Rp. 65.173.075.697	Rp. 35.83.608.000	Rp. 3.670.839.640,8	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2	Persentase peningkatan Sistem	75%	-	CC	CC	B	B	Biro Organisasi dan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)							Tata Laksana Setda
16.3	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	80%	100% (602 Paket/ Kegiatan)	-	100% (688)	100% (525)	100% (507)	Biro Pembangunan Setda
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	60 Orang	-	50 Orang	60 Orang	60 Orang	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	**Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan**							
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkat	Rp. 9.292.958.272.501	5.503.161.406.065,78	6.105.815.095.557,51	7.162.588.691.182,52	9.055.278.907.514,25	Badan Pendapatan Daerah
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi;	71%	44%	-	63%	-	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
		Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi						
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	99,16%	-	-	-	99,16%	BPS
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	85,13%	-	-	-	85,13%	BPS
17.5	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Meningkat	1	-	8	9	1	BPS
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada		-	-	-	2.985.233 Data	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	27.712 User	8.985 User	20.263 User	45.247 User	27.712 User	BPS

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	94,05%	-	-	-	94,05%	BPS

Sumber : BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah terakhir. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhi sebagai existing condition, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD, dan perkembangan neraca daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, secara khusus menguraikan perkembangan pendapatan daerah beserta rincian sumber-sumbernya, belanja daerah beserta rincian alokasi belanja langsung dan tidak langsungnya, serta pembiayaan daerah beserta dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok APBD dalam time series lima tahun dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah terakhir. Kinerja realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014-2018, disajikan berdasarkan komponen-komponen APBD, berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

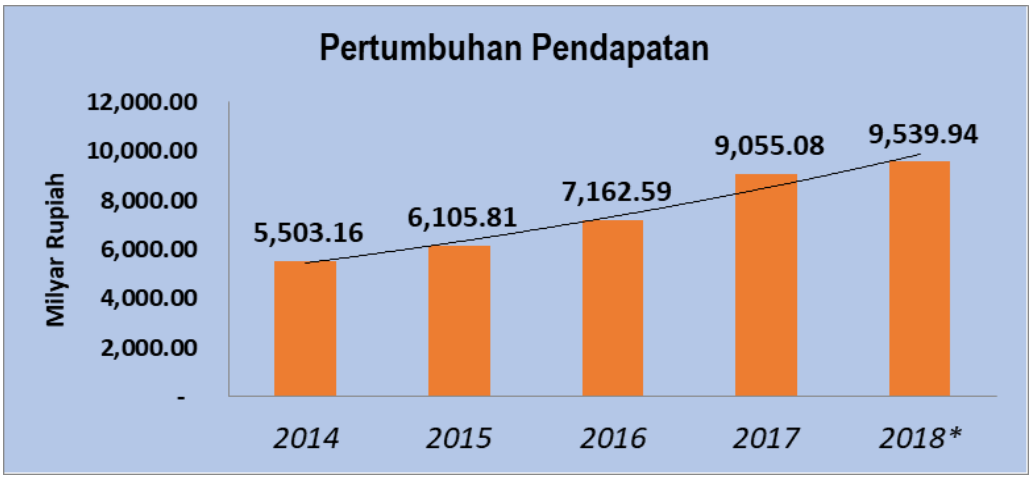
Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2014-2018 mencapai 18,07 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah hanya mencapai 17,85 persen pada periode yang sama. Capaian tingkat pertumbuhan jauh lebih rendah ditunjukkan pada rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah, yang bahkan mengalami penurunan hingga mencapai minus 14,87 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan rata-rata pada komponen pendapatan dan daerah yang lebih besar dari pertumbuhan rata-rata belanja daerah memberikan indikasi yang baik pada peningkatan kemampuan fiskal daerah, setidaknya selama periode 2014-2018 ini.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal Sulsel selama periode 2014-2018 menggambarkan kondisi yang semakin membaik. Meskipun kontribusi dana perimbangan masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan PAD hingga tahun 2018, tetapi komponen PAD dan Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak menunjukkan kontribusi yang signifikan, mencapai hingga 45 persen pada tahun 2018. Artinya, 45 persen pendapatan daerah ini betul-betul dihasilkan dalam lingkup Sulsel itu sendiri, selebihnya berasal dari luar Sulsel dikontribusi melalui sumber pendapatan DAU, DAK, DID, hibah. Hal yang membanggakan dan menggembirakan adalah kontribusi sumber pendapatan dari komponen pajak daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang terbesar, bahkan melebihi kontribusi sumber pendapatan dari DAU dan DAK. Terlihat bahwa pada tahun 2018, kontribusi pendapatan daerah dari pajak daerah mencapai 36,4 persen, melebihi kontribusi DAK yang

hanya mencapai 28,4 persen dan DAU yang berkontribusi sebesar 26,5 persen dari total pendapatan daerah Sulsel yang mencapai Rp 9,5 Trilyun pada APBD perubahan Tahun 2018.

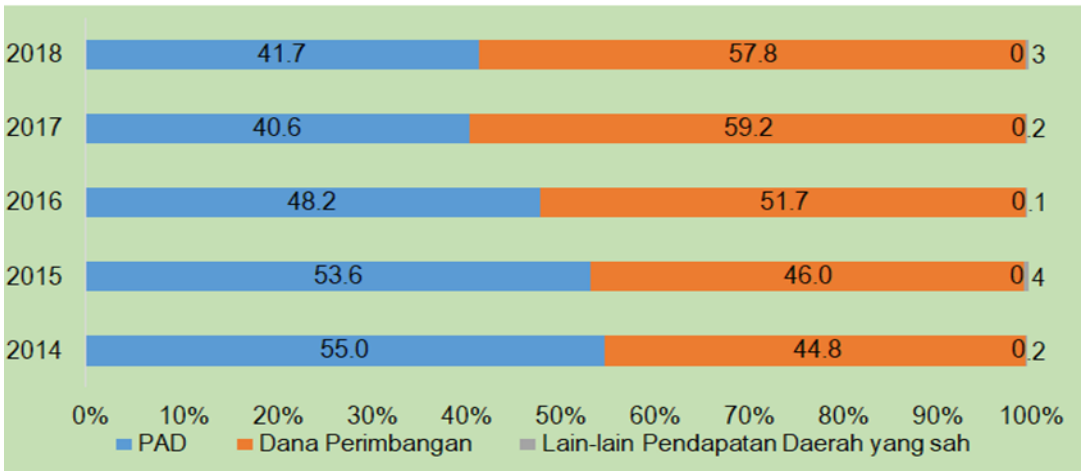
Grafik 3.1.
Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Perlu menjadi perhatian terkait dengan pendapatan pada periode ini adalah sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang tinggi pada komponen pendapatan daerah yang berasal dari luar dibandingkan pendapatan dari dalam daerah sendiri. Hal ini, menggambarkan besarnya faktor ketidakpastian dalam menentukan pendapatan daerah Sulsel ke depan. Selain karena banyaknya faktor eksternal yang berada di luar kontrol pemerintah daerah Sulsel, juga karena tingkat rata-rata pertumbuhan yang tinggi memberikan gambaran besarnya faktor insidentil dalam menentukan rata-rata pertumbuhan pendapatan yang tinggi tersebut. Seperti digambarkan pada gambar berikut ini

Grafik 3.2.
Postur Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018



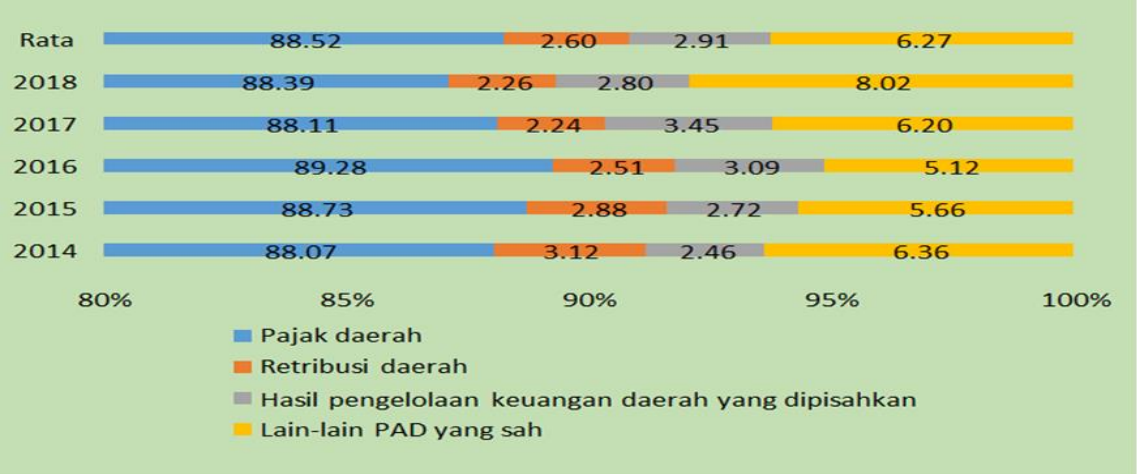
Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Fakta ini menggambarkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, sebaliknya proporsi dana perimbangan mengalami peningkatan. Hal ini perlu menjadi perhatian utama, karena tingkat tingkat ketergantungan fiskal daerah Sulsel cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, dari hanya 44,8 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 57,8 persen pada tahun 2018. Sebaliknya tingkat kemandirian fiskal Sulsel mengalami penurunan, dari 55,0 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 41,7 persen pada tahun 2018.

Kecenderungan tingkat kemandirian fiskal yang menurun, meskipun dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat ini, terutama didorong oleh tidak stabilnya peran dari komponen pajak daerah.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat pesat pada tahun 2014-2016, tetapi menurun tajam selama periode 2016-2018, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Grafik 3.3.
Postur PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2018

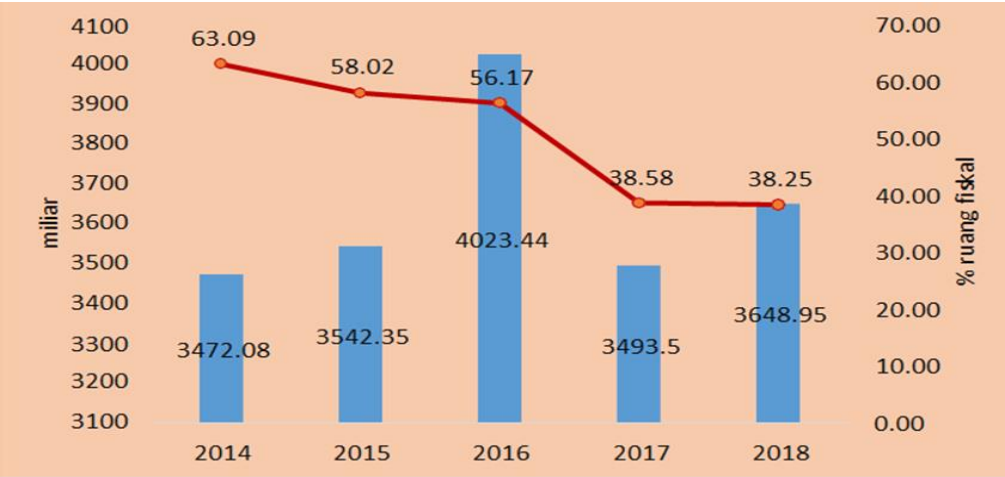


Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Ketergantungan fiskal daerah Provinsi Sulsel yang cenderung meningkat selama periode 2014-2018 ini akan berdampak pada menurunnya ruang fiskal daerah. Ruang fiskal daerah ini menggambarkan besarnya pendapatan daerah yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Semakin tinggi rasio ruang fiskal, maka keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga akan semakin besar.

Kinerja ruang fiskal daerah Sulsel selama periode 2014-2018, cenderung berfluktuasi. Menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2014-2016, meningkat dari Rp 3,4 trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp 4,02 trilyun pada tahun 2016. Tiga tahun berikutnya cenderung berfluktuasi menurun menjadi hanya Rp 3,5 trilyun pada tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi Rp 3,65 trilyun pada tahun 2018. Meskipun nilai absolut ruang fiskal tidak stabil pada periode tersebut, tetapi dilihat dari persentasenya terhadap pendapatan daerah, kinerjanya terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2018, seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Grafik 3.4.
Perkembangan Ruang Fiskal Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Ruang fiskal daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014-2018 menurun dari sebesar 63,09 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 38,25 persen pada tahun 2018. Digambarkan, meskipun nilai ruang fiskal meningkat, tetapi persentase ruang fiskalnya cenderung menurun selama periode ini. Fakta ini mengindikasikan peningkatan komponen pendapatan daerah yang tidak lagi dapat dikreasikan oleh pemerintah daerah dalam mendanai prioritas pembangunannya, karena besarnya komponen pendapatan daerah yang sudah jelas peruntukannya. Penurunan pada persentase ruang fiskal daerah Sulsel selama periode ini terutama didorong oleh peningkatan yang cukup pada komponen pendapatan daerah yang peruntukannya telah ditetapkan seperti DAK, dana hibah. Selain besarnya peningkatan pada komponen belanja untuk gaji pegawai.

Dalam perspektif sisi permintaan, kapasitas fiskal riil yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan hanyalah salah satu dari empat pelaku utama dalam pembentukan keseluruhan permintaan (agregat demand) perekonomian Sulawesi Selatan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah yang hanya **Rp 16,72 trilyun** selama periode 2019-2023 yang akan datang hanya sebagian kecil dari keseluruhan perputaran uang dalam menggerakkan perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar yang lain akan diperankan oleh sektor konsumsi masyarakat melalui permintaan rumah tangga, konsumsi sektor swasta melalui permintaan investasi, serta perdagangan internasional Sulawesi Selatan.

Untuk itu, asumsi pertumbuhan makro ekonomi daerah yang dirumuskan dalam RPJMD ini, tidak semata-mata hanya bergantung pada kapasitas fiskal riil keuangan daerah yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi pengeluaran pemerintah daerah hanya sebagian kecil. Bahkan dari sisi fiskalpun untuk mengoptimalkan peran keuangan pemerintah daerah dalam implementasi berbagai program pembangunannya, kapasitas fiskal keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini harus memperoleh dukungan optimal dari alokasi fiskal kauangan negara (APBN). Pada saat yang sama tidak bisa diabaikan dan bahkan harus mampu disinergikan dengan alokasi dan kapasitas fiskal keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Guna mengoptimalkan peran keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, desain kerangka pendanaan betul-betul harus menyentuh kepentingan dan permasalahan pembangunan daerah. Ditujukan bukan hanya untuk sekedar implementasi program pembangunan yang berdampak parsial, tetapi harus mampu menyentuh aspek-aspek yang mampu mendorong dan meningkatkan peran sumber pertumbuhan dari sisi permintaan lainnya. Alokasi fiskal daerah harus mampu mendorong peningkatan dan stabilitas permintaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita sehingga sektor swasta dapat meresponnya dari sisi produksi. Dengan demikian, kebijakan untuk mendorong peningkatan investasi swasta dari sisi permintaan bukan hanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha, tetapi lebih jauh harus mampu mendorong produksi komoditas strategis daerah.

Tantangan perekonomian daerah Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu ditujukan fokus pada inklusivitas pertumbuhan sambil tetap berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan dan wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.

Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif bakal ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif untuk lima tahun ke depan, fokus pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**PENDAPATAN**	**5.503.161.406.066**	**6.105.815.095.558**	**7.162.588.691.183**	**9.055.278.907.514**	**9.539.849.988.329**	**18,07**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.029.122.238.496**	**3.270.828.511.467**	**3.449.561.308.105**	**3.679.083.943.914**	**3.975.726.084.809**	**7,33**
1.1.1	Pajak daerah	2.667.266.552.726	2.902.245.605.671	3.079.662.364.379	3.241.746.521.290	3.462.102.500.000	7,33
1.1.2	Retribusi daerah	94.595.826.667	94.314.412.509	86.532.573.010	82.251.711.775	89.080.963.903	(1,06)
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	74.599.105.137	88.982.067.487	106.759.668.458	127.005.994.839	109.489.402.859	22,82
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	192.660.753.965	185.286.425.800	176.606.702.258	228.079.716.010	315.053.218.047	5,42
1.2	**Dana Perimbangan**	**2.464.148.133.299**	**2.809.629.553.175**	**3.704.816.673.661**	**5.362.007.388.022**	**5.515.513.551.400**	**31,12**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	248.811.019.824	188.057.830.411	314.343.523.186	279.526.930.374	310.805.709.400	6,23
1.2.2	Dana alokasi umum	1.209.598.741.000	1.180.010.167.000	1.394.148.361.000	2.509.480.255.000	2.509.480.255.000	26,87
1.2.3	Dana alokasi khusus	1.000.738.372.475	1.436.561.555.764	1.991.324.789.475	2.565.500.202.648	2.695.227.587.000	42,33
1.2.4	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	16.000.000.000	55,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**9.891.034.271**	**25.357.030.916**	**8.210.709.417**	**14.187.575.578**	**32.610.352.120**	**58,14**
1.3.1	Hibah	9.891.034.271	10.458.158.916	8.210.709.417	14.187.575.578	32.610.352.120	58,14
1.3.2	Dana darurat	-	14.898.872.000	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah	-	-	-	-	-	-
	Daerah lainnya						
2	**BELANJA**	**5.600.386.775.838**	**6.149.604.542.113**	**6.930.978.668.388**	**8.901.080.390.856**	**9.666.536.054.203**	**17,85**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.446.840.488.398**	**3.798.198.139.666**	**4.483.455.182.666**	**5.924.446.787.246**	**6.710.631.510.912**	**23,53**
2.1.1	Belanja Pegawai	852.198.957.100	913.334.508.532	940.833.054.886	2.780.875.839.862	3.147.766.942.217	66,35
2.1.2	Belanja Bunga	16.151.416.303	28.158.982.447	21.172.836.369	10.370.062.643	1.500.000.000	(7,20)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	950.682.805.000	1.221.910.000.000	1.747.841.750.000	1.407.811.730.100	1.999.931.083.681	27,81
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	597.750.000	2.900.000.000	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.101.354.583.380	1.175.949.065.823	1.408.139.587.844	1.536.772.252.432	1.355.033.527.815	5,37
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	525.489.443.114	458.845.582.863	365.467.953.567	187.987.387.209	206.599.957.200	(15,55)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	963.283.500	-	-	31.765.000	2.500.000.000	494,06
2.2	**Belanja Langsung**	**2.153.546.287.440**	**2.351.406.402.447**	**2.447.523.485.722**	**2.976.633.603.610**	**2.955.904.543.290**	**8,75**
2.2.1	Belanja Pegawai	168.276.410.908	188.238.513.439	198.792.269.193	201.237.823.908	13.894.456.380	6,85
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.309.032.667.481	1.313.862.831.452	1.391.668.973.561	1.724.208.449.031	1.800.035.679.475	5,59
2.2.3	Belanja Modal	676.237.209.051	849.305.057.556	857.062.242.969	1.051.187.330.671	1.141.974.407.434	15,35
3	**PEMBIAYAAN**	**(288.681.251.210)**	**(173.744.920.344)**	**65.044.526.212**	**(29.802.879.896)**	**(126.686.065.874)**	**(14,87)**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	339.681.251.210	309.744.920.344	129.955.473.788	165.802.879.896	192.336.065.874	(8,99)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	51.000.000.000	136.000.000.000	195.000.000.000	136.000.000.000	65.650.000.000	24,34

Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

3.1.1.2. Belanja Daerah

Berkaitan dengan perkembangan belanja daerah, selama periode 2014-2018 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan belanja daerah mencapai 17,85 persen, dimana komponen alokasi belanja daerah yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada komponen belanja tidak langsung, khususnya alokasi belanja pegawai, dan alokasi belanja tidak langsung lainnya. Sedangkan alokasi untuk belanja langsung mencatat rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni hanya mencapai 8,75 persen selama periode 2014-2018.

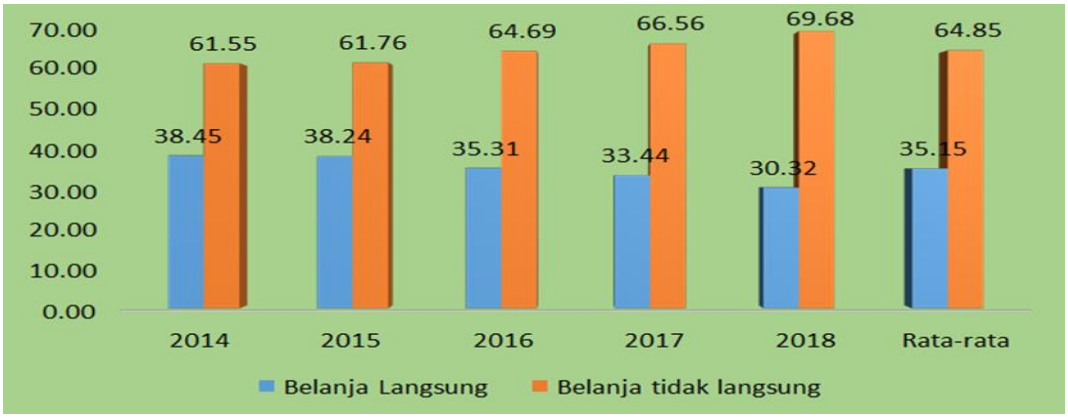
Grafik 3.5.
Kinerja Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Dilihat dari struktur belanja daerah Sulsel dalam lima tahun terakhir, nampaknya masih didominasi oleh alokasi belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung mencapai 69,7 persen dari Rp 9,6 Trilyun alokasi belanja daerah pada tahun 2018, selebihnya hanya 30,3 persen dialokasikan untuk belanja langsung. Fakta ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Sulsel ke depan, karena alokasi belanja langsung selain kontribusinya lebih kecil, juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan alokasi belanja tidak langsung. Hal ini menggambarkan fokus perhatian pemerintah daerah yang lebih rendah terhadap alokasi layanan yang secara langsung diterima dan ditujukan untuk masyarakat berupa pelayanan publik daripada untuk kegiatan yang bersifat rutin selain berupa bantuan sosial dan alokasi bantuan keuangan lainnya. Seperti diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

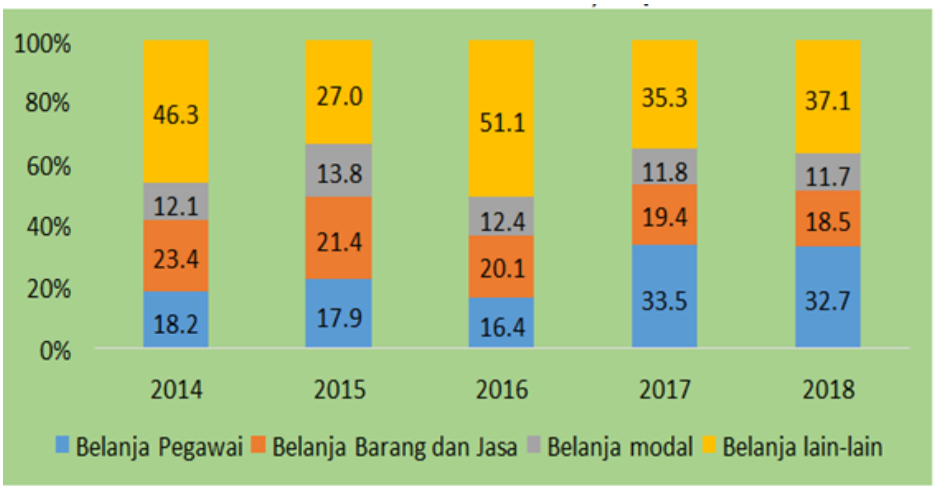
Grafik 3.6.
Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Alokasi belanja daerah Provinsi Sulsel berdasarkan klasifikasi ekonomi, nampaknya alokasi belanja modal menunjukkan alokasi yang terendah, dan cenderung mengalami penurunan selama periode 2014-2018 ini. Meskipun sempat meningkat dari tahun 2014 ke 2015, tetapi setelah selalu menunjukkan penurunan. Menurun dari 13,8 persen pada tahun 2015 menjadi hanya 11,7 persen pada tahun 2018. Penurunan alokasi belanja modal tersebut, seiring dengan peningkatan tajam pada alokasi belanja pegawai. Meningkat dari hanya 18,2 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 32,7 persen pada tahun 2018.

Grafik 3.7.
Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, Tahun 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

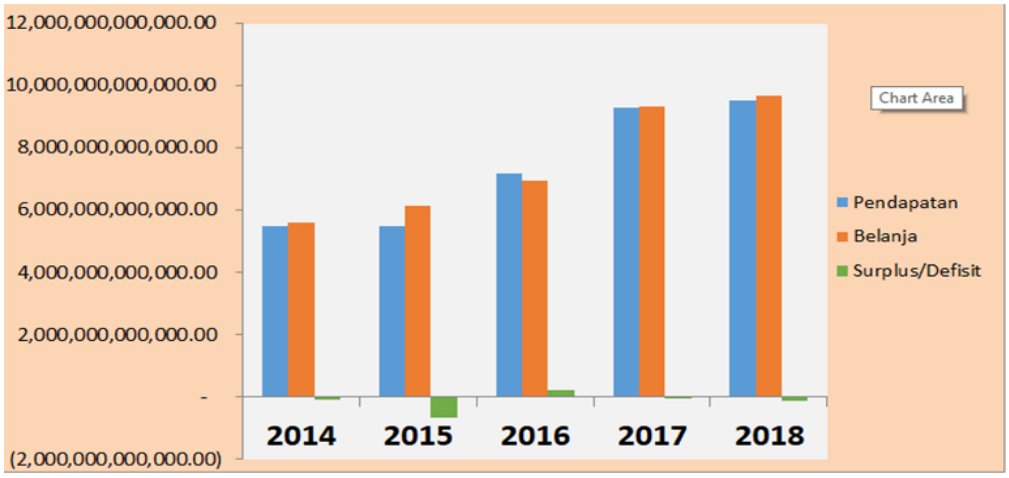
Alokasi belanja lain-lain menunjukkan alokasi belanja daerah yang terbesar selama periode 2014-2018 ini, meskipun cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Berfluktuasi dari mulai 27 hingga 51 persen dan selalu mendominasi dari alokasi belanja lainnya selama periode ini. Komponen belanja lain-lain ini, termasuk alokasi belanja hibah, belanja bantuan

keuangan, bantuan sosial dan belanja bagi hasil. Hal ini menggambarkan besarnya alokasi belanja daerah yang bersifat insidentil dan cenderung tak terduga berdasarkan dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang diterapkan.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Sedangkan komponen pembiayaan daerah, selama periode 2014-2018 secara rata-rata menunjukkan kecenderungan pembiayaan defisit, dimana belanja daerah selalu lebih besar dari pendapatan daerah, kecuali pada tahun 2016 yang mencatat angka surplus hingga lebih dari Rp 65 Milyar. Selebihnya, APBD Sulsel selama periode ini mencatat nilai pembiayaan defisit. Hanya saja secara rata-rata, pertumbuhan defisit APBD cenderung mengalami penurunan, sehingga mengindikasikan pengelolaan alokasi belanja yang semakin efektif atau kemampuan meningkatkan pendapatan daerah yang semakin membaik.

Grafik 3.8.
Perkembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014-2018



Sumber: Buku APBD Provinsi Sulsel, berbagai seri

Berkaitan dengan pembiayaan defisit, selama periode ini nampaknya pemerintah daerah Sulsel mengambil langkah kebijakan ekspansif, dengan memperbesar alokasi belanja daerah untuk sektor-sektor ekonomi atau kegiatan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih akseleratif, khususnya dalam mendorong akselerasi kegiatan ekonomi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Selain itu, defisit APBD selalu tetap terjaga pada angka yang jauh lebih dari ketentuan perundangan yang mengharuskan defisit pembiayaan di bawah 3 persen dari total PDRB daerah bersangkutan. Selama periode ini defisit APBD Sulsel tidak pernah mencapai satu persen dari PDRB Sulsel periode tahun yang sama. Fakta ini mengindikasikan terjaganya kondisi kesehatan keuangan daerah Sulsel untuk tetap tidak membebani masyarakat dalam hal menutup defisit APBDnya. Bahkan melalui kebijakan pembiayaan

defisit ini, ke depan diharapkan akan menghasilkan kinerja pembangunan yang signifikan untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel secara luas.

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan nercara daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pencatatan 2014-2018, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**	
1.1	**Aset Lancar**	
1.1.1	Kas	45,73
1.1.2	Piutang	-9,18
1.1.3	Persediaan	2,48
	Jumlah Aset Lancar	**-11,80**
1.2	**Aset Tetap**	
1.2.1	Tanah	3,46
1.2.2	Peralatan dan Mesin	17,19
1.2.3	Gedung dan Bangunan	34,40
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,06
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	90,93
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	382,96
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	109,98
	Jumlah Aset Tetap	**1,46**
1.3	**Aset Lainnya**	
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-38,91
1.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	-
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,21
1.3.4	Aset Tak Berwujud	19,11
1.3.5	Aset Lain-lain	7.766,74
1.3.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-
	Jumlah Aset Lainnya	**80,25**
	JUMLAH ASET	**1,73**
2	**KEWAJIBAN**	
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47,54
2.1.2	Utang Bunga	28,63
2.1.3	Utang PPh Pasal 21	-20,00

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.4	Utang PPh Pasal 22	-20,00
2.1.5	Utang PPh Pasal 23	-20,00
2.1.6	Utang PPN	-20,00
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-10,00
2.1.8	Pendapatan Diterima Dimuka	8,49
2.1.9	Utang Beban	-4,63
2.1.10	Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	-16,58
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	-18,57
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**13,97**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**20,42**
3.	**EKUITAS DANA**	
3.1	**Ekuitas Dana Lancar**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3,16
3.1.2	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-33,35
3.1.3	Cadangan Piutang	-16,46
3.1.4	Cadangan Persediaan	-8,19
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Jangka Pendek	-8,81
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**-14,96**
3.2	**Ekuitas Dana Investasi**	
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-16,34
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	-20,48
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	58,36
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-20,00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**-20,40**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**2,02**
	JUMLAH KEWEAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1,66**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Daerah, berbagai seri

3.1.2.1. Aset Daerah

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2014-2018, Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 1,73 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi oleh pertumbuhan aset daerah lainnya yang mencapai 80,25 persen. Jauh melampaui rata-rata pertumbuhan aset tetap yang hanya rata-rata bertumbuh 1,46 persen dan bahkan pertumbuhan aset lancar yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -11,80 persen selama periode yang sama 2014-2018. Artinya, melambatnya rata-rata pertumbuhan aset daerah, terutama disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lancarnya.

Hal ini menunjukkan penggunaan aset lancar daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendek daerah.

3.1.2.2. Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014-2018 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kewajiban daerah selama periode ini, meningkat rata-rata 20,42 persen setiap tahunnya. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen utang perhitungan pihak ketiga (PFK) yang bertumbuh rata-rata sebesar 47,54 persen, kemudian rata-rata pertumbuhan utang bunga yang mencapai 28,63 persen, serta pertumbuhan utang beban sebesar 8,48 persen. Ketiga komponen inilah yang mendorong rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek hingga mencapai 13,97 persen setiap tahunnya selama periode 2014-2018. Komponen-komponen kewajiban lainnya menunjukkan penurunan yang cukup berarti, terutama yang terkait dengan komponen kewajiban pajak dan bagian lancar utang jangka panjang yang menunjukkan penurunan tajam selama periode ini.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Sulsel selama periode 2014-2018, menunjukkan trend positif, meskipun rata-rata pertumbuhan yang relative kecil, yakni hanya 2,02 persen setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana tersebut, terutama dikontribusi oleh rata-rata pertumbuhan negatif yang dicapai ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Kontribusi terbesar dalam menciptakan pertumbuhan rata-rata ekuitas dana yang positif ditunjukkan oleh komponen ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya yang mencapai 58,36 persen. Berkat pertumbuhan ekuitas dana yang diinvestasikan pada aset lainnya ini, menggambarkan modal sendiri yang dimiliki oleh Sulsel tetap bertumbuh dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang sama-sama bertumbuh secara rata-rata 1,66 persen selama periode 2014-2018 tersebut.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiamana tergambar dalam APBD selama periode 2014-2018, menguraikan dua aspek penting, yakni (1)proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan yang mencakup. Pada dua aspek ini dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait

orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan public untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kebijakan pada sisi pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumberdaya daerah lainnya, khususnya pengelolaan sumberdaya alam daerah. Kebijakan dari sisi pendapatan daerah ini bukan hanya dapat dikreasikan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sangat tergantung kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sisi pendapatan ini, dua hal yang penting diperhatikan, yakni: (1) Upaya mengintensifkan pengelolaan pendapatan daerah pada yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi; dan (2) Melakukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik PAD maupun DBH pajak dan non pajak.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah, sedang dan perlu diterapkan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, antara lain: (1) Penguatan local taxing power, memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah. (2) Mengoptimalkan pengelolaan obyek-obyek PAD potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan obyek-obyek PAD dan PAD Lainnya yang Sah, antara lain mengoptimalkan kinerja BUMD dan pengelolaan sumberdaya daerah lainnya. (3) Memperluas jangkauan kerjasama pemerintah daerah untuk sharing pembiayaan program-program pembangunan daerah yang bersifat strategis, seperti skim Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah tidak semata-mata terfokus pada peningkatan pendapatan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan alokasi belanja daerah yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah: Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung, meliputi belanja: (1) gaji dan tunjangan, (2) tambahan penghasilan, (3) penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, dan (4) belanja pemungutan pajak daerah. Sedangkan alokasi belanja langsung, meliputi belanja: (1) honorarium PNS, (2) uang lembur, (3) beasiswa pendidikan PNS, (4) kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS, (5) premi asuransi kesehatan, (6) makanan dan minuman pegawai, (7) pakaian dinas dan atributnya, (8) pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (9) perjalanan dinas, (10) perjalanan pindah tugas, (11) pemulangan pegawai, dan (12) belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelir, peralatan dan perlengkapan, dll). Alokasi belanja daerah tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelengaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Tabel 3.3.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	1.523.166.006.211,97	7.125.978.668.388,43	21,37
2	2017	3.673.151.699.912,45	9.447.576.911.476,24	38,88
3	2018	3.263.764.714.990,59	9.699.709.777.343,00	33,65

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Selama periode 2016-2018 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuasi. Alokasi belanja pada tahun 2016 mencapai 21,37 persen dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Pada tahun 2017, proporsi tersebut meningkat signifikan menjadi 38,88 persen. Peningkatan proporsi tersebut terutama didorong oleh peningkatan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang meningkat hingga 141,2 persen, pada saat yang sama belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah hanya bertumbuh 32,6 persen.

Sebaliknya, pada tahun berikutnya, tahun 2018 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun sebesar 11,15 persen dan pada saat yang sama total belanja dan pembiayaan pengeluaran pemerintah meningkat 2,7 persen, sehingga berimplikasi pada penurunan proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menjadi hanya 33,65 persen pada tahun 2018 dari 38,88 persen pada tahun sebelumnya.

Penurunan proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2018 ini merupakan gambaran kebijakan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah yang lebih mengarah pada upaya pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib layanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir. Pada bagian ini akan dicermati kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, lebih mengarah pada pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Selanjutnya pada setiap kebijakan pengangaran tersebut, digambarkan komponen-komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pengeluaran pembiayaan kalau mencapai penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

Tabel 3.4.
Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	7.162.588.691.183	9.281.774.031.580	9.481.232.583.434
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	6.930.978.668.388	9.311.576.911.476	9.598.152.577.343
3	Pengeluaran Pembiayaan	195.000.000.000	136.000.000.000	100.650.000.000
Defisit Riil		**36.610.022.794**	**(165.802.879.896)**	**(217.569.993.909)**

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Selama periode 2016-2018, penganggaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, APBD Sulsel mencapai surplus mencapai Rp 36,6 Milyar, tetapi pada dua tahun berikutnya, direncanakan mengalami defisit sebesar Rp 165,8 Milyar pada tahun 2017, dan meningkat menjadi Rp 217,6 Milyar pada tahun 2018. Kebijakan pembiayaan defisit pada dua terakhir tersebut menunjukkan menunjukkan komitemen pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara ekspansif mengakselerasi pembangunan daerah guna meningkatkan dan mempertahan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap tinggi dan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan keuangan defisit ini juga menggambarkan effort yang besar dari pemerintah daerah untuk lebih menguatkan peran Sulsel sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional,

tidak sekedar terbesar di KTI, tetapi setara dengan kontributor utama perekonomian nasional di KBI selama ini.

Tabel 3.5.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)		
		2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Selama periode 2016-2018, komposisi penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Komponen-komponen penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutupi defisit tidak nampak signifikan, kecuali pada tahun awal periode 2014-2018 ini terdapat komponen penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah yang bersama-sama SiLPA menutup defisit pada tahun berkenaan.

Fakta ini mengindikasikan, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh pemerintah daerah bukan didasarkan pada sebuah kebijakan yang berorientasi ekspansif fiskal. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melebihi kemampuan fiskalnya untuk sebuah tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih akseleratif dalam mendorong peluang-peluang ekonomi masyarakat secara luas.

Tabel 3.6.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	129.955.473.788	100	165.802.879.896	100	217.569.993.99	100
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Defisit anggaran lebih banyak disebabkan oleh tidak terpenuhinya realisasi pendapatan, penghematan dalam pengelolaan keuangan, serta adanya sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi sepenuhnya dan harus berlanjut pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian, kebijakan penganggaran defisit yang ditempuh oleh Provinsi Sulsel selama ini, perlu lebih dicermati sebagai sebuah kebijakan ekspansi fiskal, bukan persoalan teknis pencatatan dan pelaporan keuangan semata.

Defisit anggaran harus bisa ditunjukkan keterkaitannya antara kebijakan perencanaan program pembangunan dengan kebijakan penganggaran daerah, sehingga melahirkan kebijakan umum anggaran berpijak secara nyata pada target-target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

3.3. Analisis Keuangan Daerah

3.3.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018. Berdasarkan rasio keuangan APBD tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayan daerah.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: **rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (fiscal space), serta rasio pajak (tax ratio).** Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestic regional bruto (PDRB) daerah. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya.

Di sisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung.

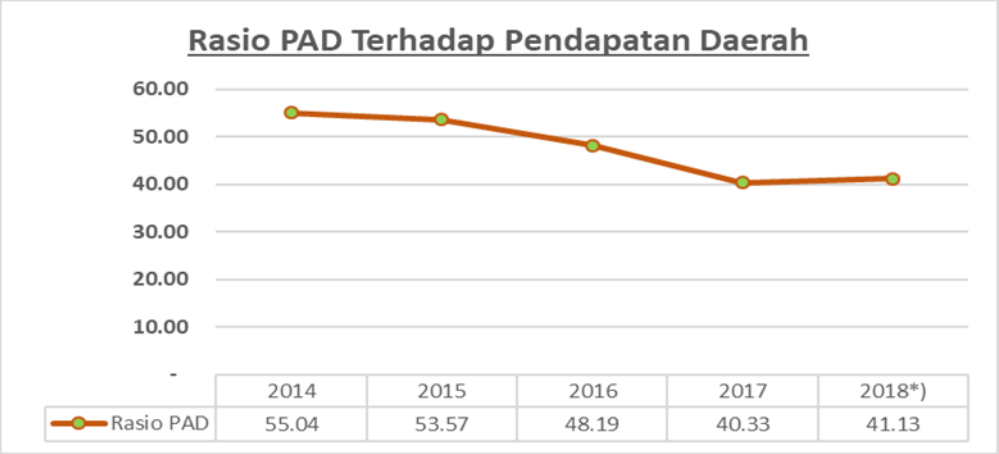
Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawes Selatan Tahun 2014-2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/ dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio

transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendahKemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indicator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar peleksanaan desentralisais fiscal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik sebagai berikut.

Grafik 3.9. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

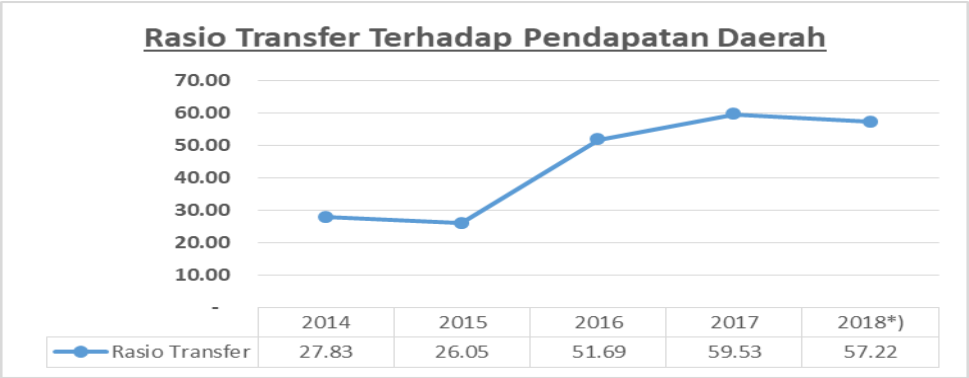


Tabel 3.7. Rasio Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	TOTAL PENDAPATAN TRANFER/PERIMBANGAN (Rp)	RASIO TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
2014	5,503,161,406,065.78	1,531,386,240,824	27.83
2015	6,105,815,095,557.51	1,590,754,389,411	26.05
2016	7,157,588,691,182.52	3,699,816,673,661	51.69
2017	9,281,774,031,580.00	5,525,650,037,099	59.53
2018*)	9,666,536,054,203.00	5,531,513,551,400	57.22

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Prov Sulsel 2018
Ket : *) Unaudit

Grafik 3.10.
Rasio Transfer Terhadap Pendapatan Daerah



2. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal (fiscal space) dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat untuk secara bebas dialokasikan sesuai kebijakan pemerintah daerah (diskresi) untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah. Ruang fiskal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

Pada Tahun 2014-2018 Kondisi ruang fiscal daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan penurunan yaitu Tahun 2014 sebesar 65,77 Persen dan menurun pada Tahun 2017 menjadi 40,38 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh impilkasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahah daerah yang implmemtasi dan pelaksanaanya dimulai Tahun 2017 dengan pengalihan beberapa urusan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi antara laian urusan pendidikan menengah atas dan menengah khusus, kehutanan dan kelautan. Pengalihan tersebut berimplikasi pada pengalihan prasarana dan sarana dan pelimpahan pegawai negeri sipil yaitu guru SMA dan SMK maupun guru non PNS yang menyebabkan peningkatan secara signifikan pada belanja pegawai dari Rp. 940 Miliar lebih pada Tahun 2016 menjadi Rp. 2,832 Triliun lebih pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp. 3,144 Triliun lebih pada Tahun 2018.

Pengalihan urusan kewenangan pemerintahan tersebut menpengaruhi peningkatan alokasi pendapatan transfer dari pusat / dana perimbangan khususnya pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja gaji guru PNS tersebut dan peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik atau Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Sehubungan dengan hal tersebut untuk kedepannya perlu menentukan skala prioritas pembangunan untuk pengalokasian anggaran sesuai kelompok prioritas untu menyelesaikan isu stratetgis dan permasalahan serta tantangan pembangunan

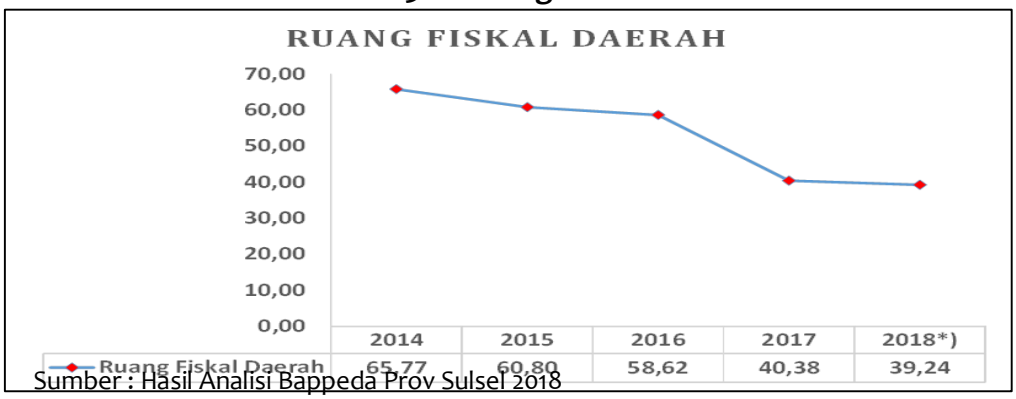
Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran ruang fiscal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.8. Ruang Fiskal Daerah

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN HIBAH	DANA OTONOMI KHUSUS/ DANA PENYESUAIAN	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	SELISIH	RUANG FISKAL
2014	5,503,161,406,065.78	9,891,034,271.00	932,761,892,475.00	72,976,480,000.00	852,198,957,100.00	16,151,416,303.19	3,619,181,625,916.59	65.77
2015	6,105,815,095,557.51	10,458,158,916.00	1,218,875,163,764.00	222,686,392,000.00	913,334,508,532.00	28,158,982,447.48	3,712,301,889,898.03	60.80
2016	7,157,588,691,182.52	8,210,709,417.00		1,991,324,789,475.00	940,833,054,886.00	21,172,836,369.11	4,196,047,301,035.41	58.62
2017	9,281,774,031,580.00	12,779,473,950.00		2,676,714,860,000.00	2,832,312,820,379.64	12,000,000,000.00	3,747,966,877,250.36	40.38
2018*)	9,666,536,054,203.00	32,610,352,120.00		2,695,227,587,000.00	3,144,251,409,838.32	1,500,000,000.00	3,792,946,705,244.68	39.24

Sumber : Hasil Analisi Bappeda Prov Sulsel 2018
Ket : *) Unaudit

Grafik 3.11. Ruang Fiskal Daerah



Sumber : Hasil Analisi Bappeda Prov Sulsel 2018
Ket : *) Unaudit

3. Rasio Pajak Daerah (Tax Ratio)

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (economy), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di Provinsi Sulawesi Selatan akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak

daerah wilayah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait.

Rasio Pajak Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari Tahun 2014 ke Tahun 2018 yang semula 0,89 Persen, menurun menjadi 0,75 persen pada Tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tax rasio di Provinsi Sulawesi Selatan dan kecenderungan tingkat kesadaran pajak semakin menurun dengan melihat trend penurunan tersebut. Indikasi penyebab rendahnya angka tax rasio diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi dan eksistensifikasi serta tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang harus terus di dorong untuk ditingkatkan.

Tax Rasio sebesar 0,75 persen pada tahun 2018 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistius sesuai otoritas dan kewenangan pemerintah provinsi. Perhitungan tax rasio pajak sesuai kewenangan pemerintah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak air permukaan, pajak rokok, pajak BPNKB, PBBKB sehingga perluasan basis pajak daerah masih sangat diperlukan untuk mendorong tax rasio yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan potensi daerah serta sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

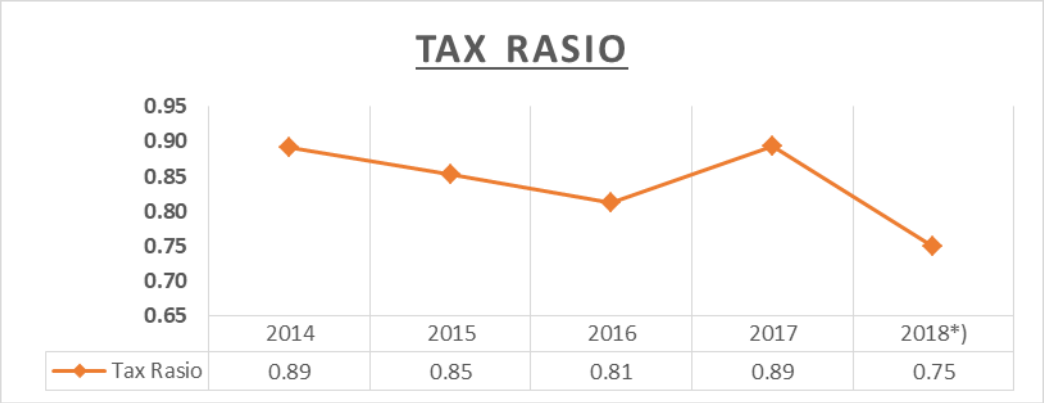
Untuk mengetahui gambaran tax rasio pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini

Tabel 3.9. tax rasio pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

TAHUN	PAJAK DAERAH	NILAI PDRB	TAX RASIO
2014	2,667,266,552,726.00	299,628,210,000,000.00	0.89
2015	2,902,245,605,671.00	340,390,000,000,000.00	0.85
2016	3,079,662,364,379.00	379,630,000,000,000.00	0.81
2017	3,743,344,520,531.00	418,930,000,000,000.00	0.89
2018*)	3,462,102,500,000.00	462,340,000,000,000.00	0.75

Sumber : Hasil Analisi Bappeda Prov Sulsel 2018
Ket : *) Unaudit

Grafik 3.12.
tax rasio pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018



4. Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif, pada tahun 2014 sebesar 15,22 persen, dan turun sebesar 14,85 persen dan 13,57 persen pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 30,42 persen dari 10.324 Pegewai Negeri Sipil pada Tahun 2016 menjadi 27.665 Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2017 yang merupakan pengalihan pegawai negeri sipil terdiri dari Guru SMA/SMK, PNS Kehutanan, PNS Perhubungan, PNS Kelautan dan Perikanan dan pengawas tenaga kerja.

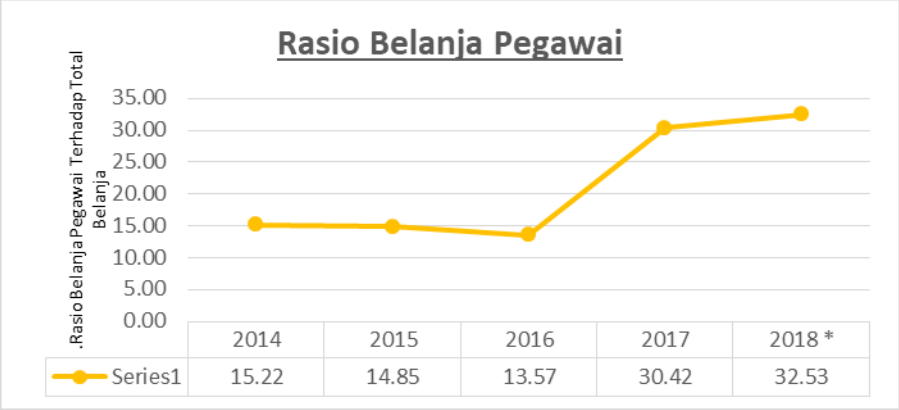
Peningkatan secara signifikan tersebut pada tahun 2017 disebabkan atas implmentasi Kebijakan Pengalihan Urusan Kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Gambaran kondisi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada Tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3.10. Rasio Belanja Pegawai

TAHUN	BELANJA PEGAWAI	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
2014	852,198,957,100.00	5,600,386,775,837.72	15.22
2015	913,334,508,532.00	6,149,604,542,113.18	14.85
2016	940,833,054,886.00	6,930,978,668,388.43	13.57
2017	2,832,312,820,379.64	9,311,576,911,476.24	30.42
2018 *	3,144,251,409,838.32	9,666,536,054,203.00	32.53

Sumber : Hasil Analisi Bappeda Prov Sulsel 2018
Ket : *) Unaudit

Grafik 3.13.
Rasio Belanja Pegawai



5. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 menurun pada tahun 2014 dari 12,07 persen menjadi 11,80 persen pada Tahun 2018, sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional . Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, yang berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan yang akan mempunyai dampak kedepan (forward lingkage) untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sektor swasta dan investasi, pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kelancaran distribusi dan peningkatan ekspor barang dan jasa.

Peningkatan belanja modal pada periode tersebut di prioritaskan pada belanja untuk pembangunan infrastruktur jalan untuk peningkatan kondisi jalan mantap yang semakin baik, pembangunan dan rehabilitasi infrasturktur irigasi, pembangunan stadion barombong, pembangunan sarana dan prasaran pelayanan publik disektor pendidikan dan kesehatan serta pembangunan kawasan center point of Indonesia. Namun demikian untuk kedepannya Pemerintah Provinsi juga mendorong belanja modal khususnya untuk pembangunan infrastruktur melalui bantuan keuangan kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana untuk mengimbangi kondisi mantap jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah.

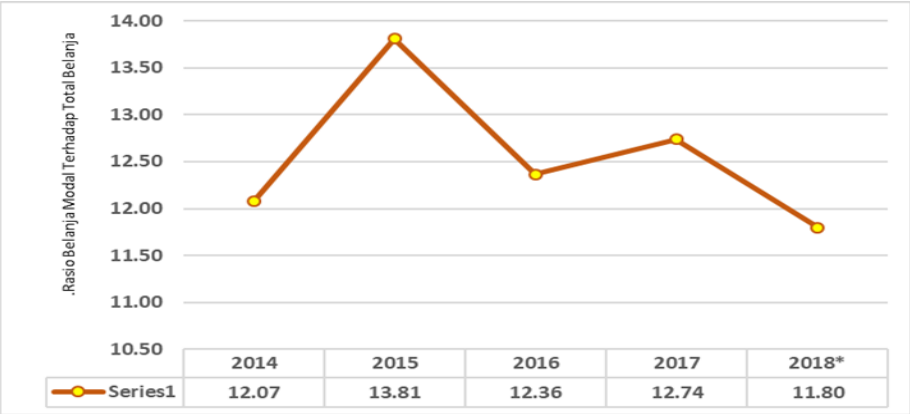
Berikut untuk lebih jelasnya capaian kondisi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 3.11. Rasio Belanja Modal

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA
2014	676,237,209,051.00	5,600,386,775,837.72	12.07
2015	849,305,057,556.00	6,149,604,542,113.18	13.81
2016	856,863,743,968.55	6,930,978,668,388.43	12.36
2017	1,186,163,713,265.74	9,311,576,911,476.24	12.74
2018*	1,140,259,610,214.34	9,666,536,054,203.00	11.80

Sumber : Hasil Analisi Bappeda Prov Sulsel 2018
Ket : *) Unaudit

Grafik 3.14.
Rasio Belanja Modal



6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

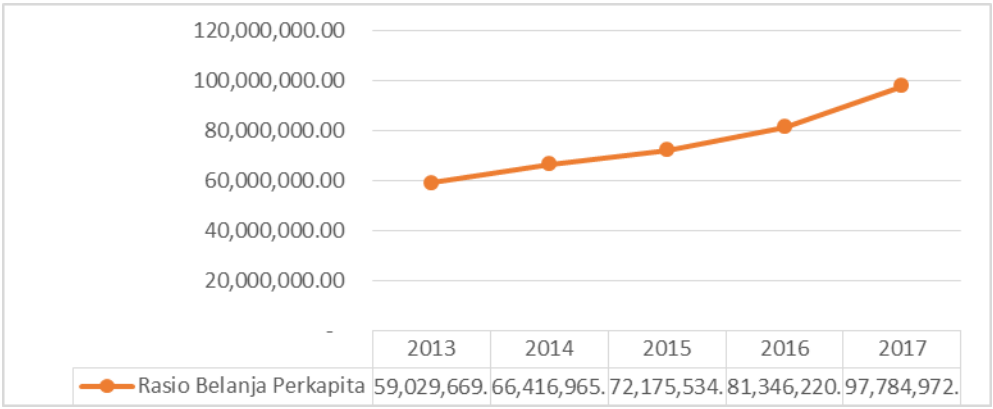
Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya. belanja perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.12. Rasio Belanja Daerah Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan

TAHUN	TOTAL BELANJA	JUMLAH PENDUDUK	BELANJA DAERAH PER KAPITA
2013	4,924,282,805,901.31	8,342,047	59,029,669.89
2014	5,600,386,775,837.72	8,432,163	66,416,965.32
2015	6,149,604,542,113.18	8,520,345	72,175,534.47
2016	6,930,978,668,388.43	8,520,345	81,346,220.94
2017	9,311,576,911,476.24	9,522,503	97,784,972.20

Sumber : Hasil Analisi Bappeda Prov Sulsel 2018

Grafik 3.15.
Rasio Belanja Daerah Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan



3.3.2. Analisis Share APBD Terhadap Nilai PDRB

Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Thun 2014-2018 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi Selatan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), nilai eksport dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018, dapat terlihat dominasi komponen rumah tangga sebesar 51,64 persen pada Tahun 2013, meningkat menjadi 54,32 persen pada Tahun 2018. Berdasarkan capaian tersebut Perekonomian Sulawesi Selatan menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah komponen PMTB, ekspor dan konsumsi pemerintah. Untuk komponen pembentukan PMTB pada Tahun 2014 sebesar Rp. 110 Triliun lebih atau 34,36 persen meningkat menjadi Rp. 171 Triliun lebih atau 37,16 persen pada Tahun 2018. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.13.

Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Konsumsi Rumah Tangga	165,652,220,000,000.00	185,590,000,000,000.00	204,370,000,000,000.00	225,400,000,000,000.00	251,150,000,000,000.00
2	Konsumsi LNPRT	3,863,840,000,000.00	4,270,000,000,000.00	4,630,000,000,000.00	5,110,000,000,000.00	6,150,000,000,000.00
3	Konsumsi Pemerintah	31,774,370,000,000.00	36,400,000,000,000.00	37,400,000,000,000.00	39,390,000,000,000.00	44,830,000,000,000.00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	110,225,840,000,000.00	125,990,000,000,000.00	141,410,000,000,000.00	157,250,000,000,000.00	171,940,000,000,000.00
5	Perubahan Inventori	(1,550,670,000,000.00)	5,640,000,000,000.00	4,850,000,000,000.00	2,940,000,000,000.00	1,540,000,000,000.00
6	Ekspor	21,723,590,000,000.00	73,410,000,000,000.00	50,900,000,000,000.00	61,950,000,000,000.00	74,320,000,000,000.00
7	Dikurangi Import barang dan jasa	(10,961,420,000,000.00)	(90,900,000,000,000.00)	(66,450,000,000,000.00)	(76,300,000,000,000.00)	(87,590,000,000,000.00)
	Total PDRB	**320,727,770,000,000.00**	**340,400,000,000,000.00**	**377,110,000,000,000.00**	**415,740,000,000,000.00**	**462,340,000,000,000.00**

Sumber : BPS 2018

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu 5 tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan dari 17,63 persen pada tahun 2013 menjadi 22,08 persen pada Tahun 2017.. Untuk lebih jelasnya kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada Tabel dan Grafik di bawah ini

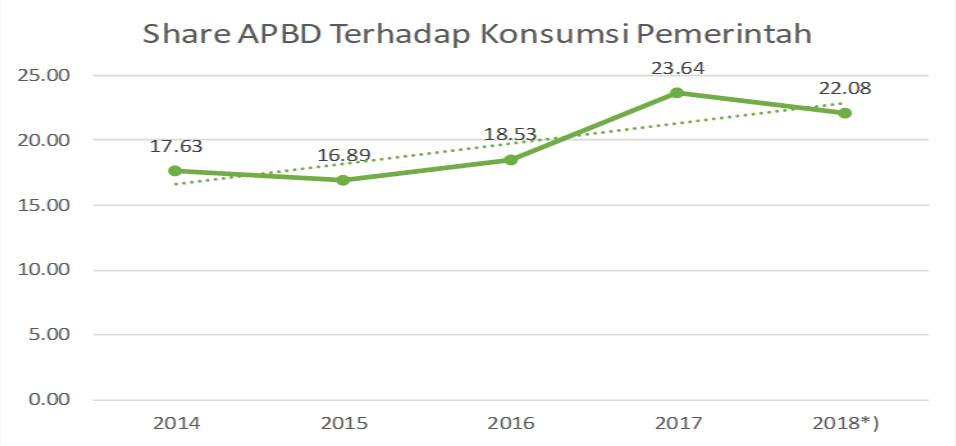
Tabel 3.14.

KONTRIBUSI APBD TERHADAP PDRB
PADA KOMPONEN KONSUMSI PEMERINTAH TAHUN 2014-2018

Tahun	Konsumsi Pemerintah	Total Belanja APBD	Share APBD Terhadap Konsumsi Pemerintah
2014	31,774,370,000,000.00	5,600,386,775,837.72	17.63
2015	36,400,000,000,000.00	6,149,604,542,113.18	16.89
2016	37,400,000,000,000.00	6,930,978,668,388.43	18.53
2017	39,390,000,000,000.00	9,311,576,911,476.24	23.64
2018*)	44,830,000,000,000.00	9,898,600,069,896.00	22.08

Sumber : Hasil Analisis Bappeda 2018
Ket : *) Unaudit

Grafik 3.16.



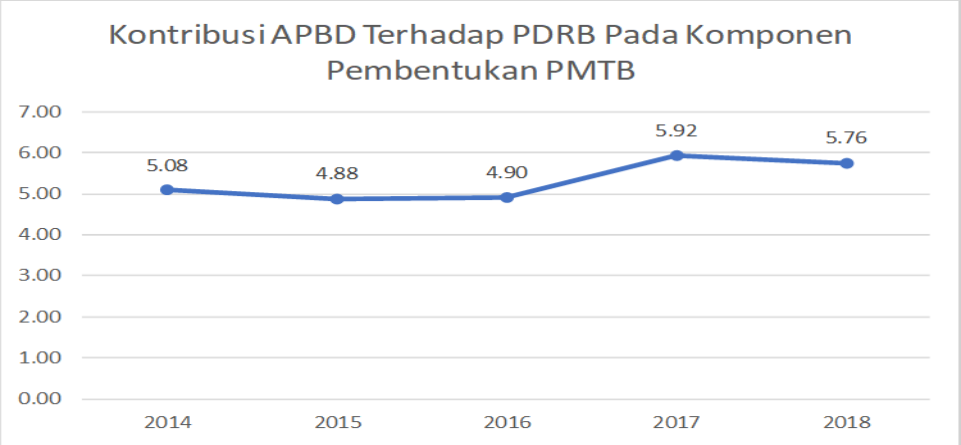
Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 tahun terakhir yang belum mengalami peningkatan yang signifikan meskipun meningkat. Belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB sepeti Tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3.15.

KONTRIBUSI APBD TERHADAP PDRB
PADA KOMPONEN PEMBENTUKAN PMTB TAHUN 2014-2018

Tahun	KOMPONEN PMTB	Total Belanja APBD	Share APBD Terhadap Konsumsi Pemerintah
2014	110,225,840,000,000.00	5,600,386,775,837.72	5.08
2015	125,990,000,000,000.00	6,149,604,542,113.18	4.88
2016	141,410,000,000,000.00	6,930,978,668,388.43	4.90
2017	157,250,000,000,000.00	9,311,576,911,476.24	5.92
2018	171,940,000,000,000.00	9,898,600,069,896.00	5.76

Grafik 3.17.



3.3.3. Rasio Keuangan (likuiditas, solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2017 akan dijelaskan sebagai berikut:

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, di tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Rasio Lancar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Rasio Lancar	Kas	Utang Jgk Pndk	Persentase (%)
1	2013	92,818,569,412.76	391,984,332,403.21	0.24
2	2014	191,998,104,404.82	572,317,542,956.74	0.34
3	2015	130,096,680,361.15	576,373,980,854.60	0.23
4	2016	165,850,886,097.24	567,858,913,679.58	0.24
5	2017	192,426,623,153.01	390,421,892,911.48	0.24

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, menunjukkan hasil dengan kondisi fluktuatif. Namun demikian, tahun 2016 & 2017 memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek baik. Untuk mengetahui rincian rasio quick daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Rasio Lancar	Aset Lancar	Utang Jgk Pndk Lainnya	Persentase (%)
1	2013	707,615,730,834.21	391,984,332,403.21	1.81
2	2014	1,008,641,683,245.53	572,317,542,956.74	1.76
3	2015	365,690,985,166.47	576,373,980,854.60	0.63
4	2016	352,179,628,952.81	567,858,913,679.58	0.24
5	2017	381,940,393,565.26	390,421,892,911.48	0.24

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 0,010 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,04. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2017 lebih tinggi dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Rasio Quick Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Rasio Hutang Thdp Aset	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
1	2013	498,688,656,149.21	11,356,518,073,049.40	0.04
2	2014	790,654,842,598.74	7,945,615,814,350.41	0.10
3	2015	795,500,319,402.60	8,146,167,988,934.76	0.10
4	2016	650,985,252,227.58	9,137,116,284,120.30	0.10
5	2017	408,921,892,911.48	11,221,285,206,789.00	0.10

Sumber: APBD Sulsel berbagai seri

3.4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi social masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

3.4.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah,asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2018-2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 3.19.
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	7,0-7,4	7,2-7,6	7,4-7,8	7,6-8,0	7,8-8,2	7,9-8,3
2	Tingkat Pengangguran (%)	5,4	5,2	5,05	4,90	4,50	4,25
3	Inflasi (%)*)	3,5±1,0	3,5±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0
4	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	45-55*)	55-65	65-70	70-75	75-80	80-85
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,87	8,78	8,52	8,35	8,13	7,87
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,96	71,58	72,18	72,79	73,40	74,01

Asumsi makro ekonomi daerah Provinsi Sulsel yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Sulsel lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Sulsel untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional, sehingga Sulsel tetap diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian Nasional.Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Sulsel akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relative peringkatnya secara nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Sulsel juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomimasyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Sulsel yang

semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 6,66 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 4,60 persen selama periode 2019-2023 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel 3.20.
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan PAD	4.88	4.79	6.04	6.56	7.32
2.	Pertumbuhan Dana Perimbangan:	3.02	3.26	4.26	5.08	5.52
a.	Pertumbuhan DBH	(14.09)	2.05	4.06	5.51	8.51
b.	Pertumbuhan DAU	3.06	2.50	2.00	3.00	3.00
c.	Pertumbuhan DAK	4.50	4.51	6.31	6.84	7.34

Sumber: Hasil Proyeksi

3.4.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2019-2023 yang akan datang.

Tabel 3.21.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**5,80**	**9.952.606.237.000,00**	**10.314.124.016.000,00**	**10.830.112.657.000,00**	**11.447.069.168.000,00**	**12.165.451.507.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**6,85**	**4.170.721.006.000,00**	**4.375.872.214.000,00**	**4.617.613.027.000,00**	**4.910.507.974.000,00**	**5.260.452.576.000,00**
1.1.1.	Pajak daerah	4,73	3.711.927.500.000,00	3.843.460.587.000,00	4.009.685.323.000,00	4.189.532.457.000,00	4.367.276.778.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	12,59	87.626.316.000,00	102.385.225.000,00	110.008.562.000,00	119.646.363.000,00	132.474.926.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang	62,36	109.494.062.000,00	137.467.473.000,00	185.581.088.000,00	260.268.985.000,00	382.595.408.000,00
	dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	9,24	261.673.128.000,00	292.558.929.000,00	312.338.054.000,00	341.060.169.000,00	378.105.464.000,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**5,22**	**5.726.538.455.000,00**	**5.913.666.135.000,00**	**6.187.913.977.000,00**	**6.511.975.541.000,00**	**6.880.413.278.000,00**
1.2.1	**Dana Perimbangan**	**5,26**	**5.697.596.607.000,00**	**5.892.598.430.000,00**	**6.166.824.918.000,00**	**6.490.464.701.000,00**	**6.858.472.221.000,00**
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	(0,01)	279.763.771.000,00	252.413.160.000,00	257.485.363.000,00	266.595.056.000,00	279.609.590.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	4,93	2.596.312.342.000,00	2.686.143.998.000,00	2.799.499.275.000,00	2.937.234.639.000,00	3.091.145.735.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	6,18	2.821.520.494.000,00	2.954.041.272.000,00	3.109.840.280.000,00	3.286.635.006.000,00	3.487.716.896.000,00
	- Dana Alokasi Khusus Fisik	-	360.814.685.000,00	376.451.937.000,00	426.054.264.000,00	468.659.690.000,00	525.461.244.000,00
	- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.460.705.809.000,00	2.577.589.335.000,00	2.683.786.016.000,00	2.817.975.316.000,00	2.962.255.652.000,00
1.2.4	**Dana Insentif Daerah**	(10,94)	28.941.848.000,00	21.067.705.000,00	21.089.059.000,00	21.510.840.000,00	21.941.057.000,00
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**(23,58)**	**55.346.776.000,00**	**24.585.667.000,00**	**24.585.653.000,00**	**24.585.653.000,00**	**24.585.653.000,00**
1.3.1	Hibah	(23,58)	55.346.776.000,00	24.585.667.000,00	24.585.653.000,00	24.585.653.000,00	24.585.653.000,00
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan						
	Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus ***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi						
	atau Pemerintah Daerah lainnya						

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
2	**BELANJA**	**5,72**	**9.952.606.237.000,00**	**10.414.124.016.000,00**	**10.830.112.657.000,00**	**11.447.069.168.000,00**	**12.165.451.507.000,00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**6,52**	**6.868.951.050.451,77**	**7.125.871.922.076,18**	**7.447.052.146.176,74**	**8.020.622.452.155,70**	**8.617.024.695.340,43**
			69,02	**68,43**	**68,76**	**70,07**	**70,83**
2.1.1	Belanja Pegawai	3,11	3.357.803.860.030,00	3.346.788.646.893,41	3.483.807.162.825,74	3.778.518.823.282,85	3.748.914.238.919,43
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	10,09	1.607.996.853.826,00	1.594.966.853.723,00	1.594.966.853.826,00	1.599.966.853.826,00	2.409.966.853.826,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	(20,83)	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00	600.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	11,41	1.401.200.995.695,77	1.716.117.080.659,77	1.895.228.788.725,00	2.169.037.434.246,85	2.015.694.261.795,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	(7,27)	480.849.340.900,00	446.849.340.800,00	446.849.340.800,00	446.849.340.800,00	416.849.340.800,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	32,89	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**3,92**	**3.083.655.186.548**	**3.288.252.093.924**	**3.383.060.510.823**	**3.426.446.715.844**	**3.548.426.811.660**
			30,98	**31,57**	**31,24**	**29,93**	**29,17**
2.2.1	Belanja Pegawai	6,17	15.926.175.569	16.722.484.347	17.558.608.565	18.436.538.993	19.358.365.943
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,41	1.671.008.737.886	1.739.642.785.506	1.782.923.444.198	1.787.528.261.782	1.845.467.285.330
2.2.3	Belanja Modal	6,29	1.396.720.273.093	1.531.886.824.070	1.582.578.458.060	1.620.481.915.069	1.683.601.160.387
			14,03	**14,71**	**14,61**	**14,16**	**13,84**
	Surplus / (Defisit)		-	(100.000.000.000,00)	-	-	-
3	**PEMBIAYAAN**	-	**-**	**100.000.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	(26,00)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	(76,16)	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

Selama periode 2019-2023, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 9.95 Triliun lebih pada tahun 2019 menjadi Rp 12,16 Triliun lebih pada tahun 2023. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan dari dana bagi hasil pajak/non pajak. Dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil komponen PAD. Hal ini karena komponen DAU dan DAK tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan komponen yang berasal dari luar daerah. Sedangkan PAD dan dana bagi hasil pajak/non pajak merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Sulsel sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Sulsel untuk lima tahun ke depan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan ke depan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstersifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Sulsel yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang harapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akansemakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Sulsel lima tahun ke depan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkanakan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat. Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Sulsel untuk periode 2019-2023 yang akan datang diharapkan meningkat secara konsisten,dari Rp 3,08 trilyun lebih pada tahun 2019 menjadi Rp 3,54 trilyun lebih pada tahun 2023. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharakan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreasitivitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari

penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.22.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

KELOMPOK PRIORITAS RPJMD 2018-2023	TAHUN 2019	%	TAHUN 2020	%	TAHUN 2021	%	TAHUN 2022	%	TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KP 1	1.287.636.249.054,68	**41,76**	1.274.760.095.334,67	**38,77**	1.324.064.428.193,87	**39,14**	1.341.694.889.305,70	**39,16**	1.386.098.464.299,54	**39,06**
KP 2	997.816.057.285,45	**32,36**	1.185.256.951.167,38	**36,05**	1.187.462.791.541,04	**35,10**	1.205.876.602.635,72	**35,19**	1.240.187.897.708,72	**34,95**
KP 3	798.202.880.208,10	**25,88**	828.235.047.421,95	**25,19**	871.533.291.088,09	**25,76**	878.875.223.903,58	**25,65**	922.140.449.651,74	**25,99**
JUMLAH	**3.083.655.186.548,23**	**100,00**	**3.288.252.093.924,00**	**100,00**	**3.383.060.510.823,00**	**100,00**	**3.426.446.715.845,00**	**100,00**	**3.548.426.811.660,00**	**100,00**

Sumber : Hasil Proyeksi

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerahtermasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Untuk periode 2019-2023 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Sulsel akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

3.5. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

3.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

Tabel 3.23.
Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014–2018

No.	Jenis Anggaran	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Dekonsentrasi	303.159.000.000,00	366.750.000.000,00	478.380.000.000,00	270.700.000.000,00	263.892.000.000,00
2	Tugas Pembantuan	947.555.000.000,00	731.518.867.000,00	1.739.660.000.000,00	816.580.000.000	764.118.000.000,00
Jumlah		1.250.714.000.000,00	1.098.268.867.000,00	2.218.040.000.000,00	1.087.280.000.000,00	1.028.010.000.000,00

Sumber: APBN Sulsel berbagai seri

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN pada 5 (lima) tahun terakhir adalah terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan Tahun 2018 berada pada posisi menurun. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri Bappenas, Kementerian Keuangan RI, Kemendagri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.5.2. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :

1. **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

   Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha.Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh pihak menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan solicited project maupun oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai unsolicited projectSaat ini, di Provinsi Sulawesi Selatan penyelenggaraan skema KPBU akan diterapkan pada pembangunan Rel Kereta Api antara Makassar-Pare pare, Pembangunan Jalan Layang Tol Dalam Kota, PLTU Jeneponto Tahap II.

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

2. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)

PINA adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah yang menggalang sumbersumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang emmpunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. PINA penting untuk dilaksanakan sebab ruang fiskal anggaran pemerintah sangat terbatas akibat adanya pembatasan lebar defisit anggaran. Kebutuhan investasi infrastruktur sangatlah besar sehingga anggaran pemerintah difokuskan untuk infrastruktur yang tidak dapat dikelola secara komersial (filling the gap). Dengan skema PINA, pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur yang membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dapat dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Skema PINA melengkapi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi.

oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional.

Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor. Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastuktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaran skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres No.58/2017, Perpres No.20/2016, dan Perpres No.66/2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan ke dalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu greenfield, brownfield, dan operational. Provinsi Sulawesi Selatan penyelenggaraan skema PINA sudah diterapkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Sidrap, dan yang sedang on progress Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Jeneponto.

3. Obligasi Pemerintah Daerah

Salah satu penerimaan negara yang dapat dijadikan alternatif adalah menerbitkan surat-surat berharga (SSB) Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan telah mempersiapkan sejumlah aturan dalam penerbitan SSB di daerah. PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah,di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Dengan aturan tersebut, pemerintah daerah harus (1) menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek yang menghasilkan pendapatan dan kepentingan publik; (2) penerimaan hasil penerbitan SSB masuk ke dalam kas negara; (3) Jika proyek belum menghasilkan, maka pemda wajib menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi. Selain itu, sejumlah syarat seperti (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

(2) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; (3) Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan (4) mendapat persetujuan dari DPRD, pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan ijin dari Kementerian Keuangan.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;

d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Tata cara penerbitan obligasi daerah

Terdapat tiga tahapan yang harus dilewati oleh pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Tahapan tersebut meliputi:



4. Sistem Resi Gudang

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditas yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan jaminan lainnya sehingga dapat meningkatkan kredit/pembiayaan kepada petani, poktan, gapoktan, koperasi dan pelaku UMKM. Di samping itu SRG diterapkan untuk menyimpan hasil pertanian pada saat harga jual jatuh (tunda jual) sehingga dapat menjaga kestabilan

harga/inflasi. Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang (warehouse ability), diharapkan dengan Sistem Resi Gudang ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Implementasi SRG di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006 kemudian diubah oleh UU No.9 Tahun 2011 tentang resi gudang, dengan komoditas SRG meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahann Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, komoditi tersebut adalah Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh dan Kopra.

Sistem Resi Gudang (SRG) telah memiliki dasar hukum sejak ditetapkannya UU No.9 Tahun 2006 tentang SRG yang kemudian diamandemen dengan UU No.9 Tahun 2011. Resi gudang atau disebut juga warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang ini nantinya dapat digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (Document of Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan lain.

Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat berharga maka resi gudang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman. Resi Gudang dapat juga digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak berjangka resi gudang. Derivatif Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non bank dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Resi Gudang juga bermanfaat bagi dunia perbankan, pelaku usaha dan pemerintah, dimana beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ikut menjaga kestabilan serta dapat mengendalikan harga komoditi.
2. Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
3. Adanya jaminan ketersediaan barang dan bahan baku industri khususnya pada agroindustri.
4. Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional.

5. Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi.
6. Memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah.
7. Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan Sistem Resi Gudang lainnya.

Barang yang dapat diterbitkan resi gudangnya memiliki persyaratan: setiap barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, diutamakan barang yang memiliki nilai strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan/ atau tujuan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/11/2011 mempersyaratkan bahwa barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang paling sedikit memenuhi persyaratan : a) memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; b) memenuhi standar mutu tertentu; c) Jumlah minimum barang yang disimpan. Barang/ produk yang disimpan di gudang akan dinilai terkait dengan persyaratan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel oleh Lembaga Penilai Kesesuaian yang terakreditasi. Berdasarkan Permendag No.08/M-DAG/PER/2/2013 terdapat 10 komoditas yang dapat disimpan di gudang dalam rangka SRG, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam, yang mana komoditas yang disimpan dalam gudang harus memenuhi persyaratan standar minimalnya.

Namun demikian pelaksanaan SRG masih menemui beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan Bappebti (2015), beberapa kendala dalam implementasi SRG diantaranya yaitu:

1. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen masyarakat, pelaku usaha (petani, pedagang, pabrikan), dan dunia perbankan terhadap mekanisme Sistem Resi Gudang;
2. Keterbatasan infrastruktur gudang di daerah yang memenuhi persyaratan;
3. Kualitas hasil panen belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan;
4. Keterbatasan referensi harga komoditas;
5. Belum optimalnya sinergi kebijakan antar instansi terkait, pemda dan sektor swasta serta pelaku SRG;
6. Terbatasnya Pengelola Gudang di daerah yang memiliki permodalan cukup serta mampu melakukan pengelolaan dan pemasaran komoditas (integrasi bisnis);
7. Kurangnya SDM tenaga Badan Pengawas SRG.

Kelembagaan Resi Gudang:

Di dalam UU No 9 tahun 2006 telah diatur tentang lembaga yang terkait dengan resi gudang yang terdiri atas : Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Namun pada perkembangannya terdapat beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan resi gudang, diantaranya dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi para pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau mengalami kelalaian dalam mengelola sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya. Dengan kondisi tersebut akhirnya DPR melakukan

amandemen UU No 9 Tahun 2006 menjadi UU No 9 tahun 2011 dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang sehingga diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang resi gudang, bank dan pengelola gudang) semakin meningkat dan terlindungi. Adapun lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang adalah:

a. **Badan Pengawas Resi Gudang.** Adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sistem resi gudang dan bertanggungjawab terhadap Menteri.
b. **Pengelola Gudang.** Adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan baik milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang dan berhak menerbitkan resi gudang
c. **Lembaga Penilaian Kesesuaian.** Adalah lembaga yang mendapatkan persetujuan dari badan pengawas untuk melakukan sertifikasi, inspeksi dan pengujian berkaitan dengan barang, gudang dan pengelola gudang.
d. **Pusat Registrasi.** Adalah institusi yang melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatifnya yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
e. **Koordinasi Kelembagaan Pusat dan Daerah.** Adalah koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang. Pemerintah Pusat mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penerapannya, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan dan sektor terkait lainnya. Sedangkan pemerintah daerah mencakup pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang.
f. **Lembaga Jaminan Resi Gudang.** Adalah lembaga yang memiliki fungsi melindungi hak pemegang resi gudang dan atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

5. Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial cash outflow yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun operational cash inflow yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total life-cycle cost yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5. Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

1. Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian.Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
    a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
    b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
    c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF):

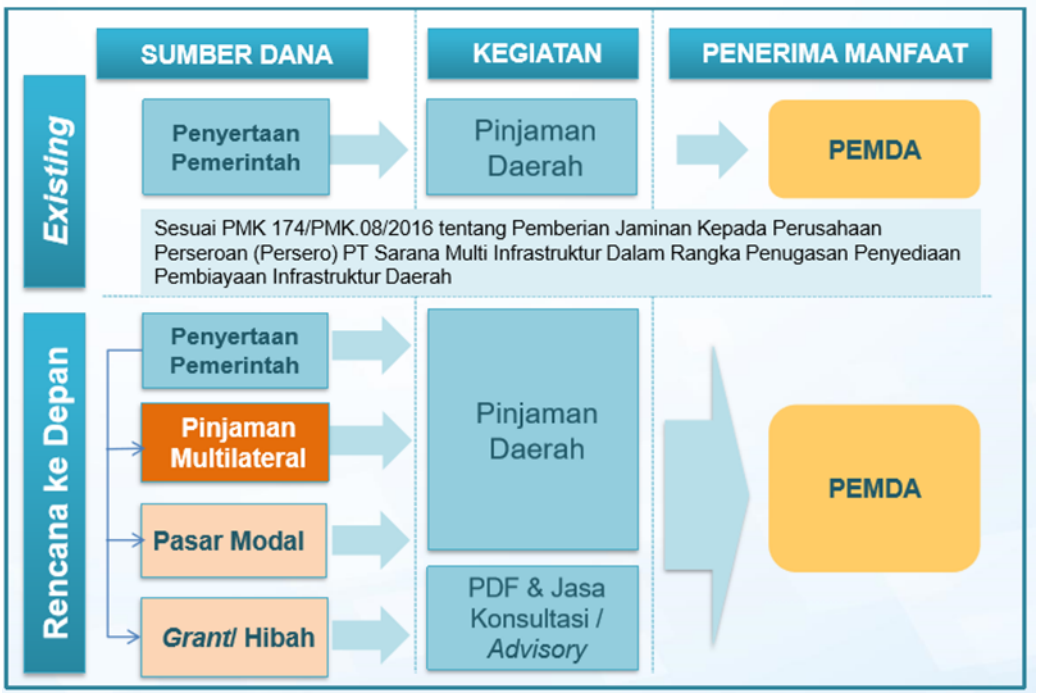
Tujuan:

1. Meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur di daerah, dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar;
2. Mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat;
3. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman yaitu dengan pembentukan debt management unit dan pelatihan personil terkait;
4. Mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund (“PDF”); dan

5. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development) melalui kepatuhan/compliance terhadap environment and social safeguard

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan secara lengkap dapat dilihat pada gambar skema berikut :

Gambar. 3.3. Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada Bab ini menguraikan isu-isu strategis Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam proses pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam masa Periode 2018-2023. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang utamanya pada akhir Periode RPJMD yaitu tahun 2023.

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan masalah ini digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yakni masalah pokok, masalah, Akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang lebih rinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Provinsi Sulawesi Selatan adalah **"Sulawesi Selatan belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat"**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut.

1. Tata Kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
2. Pembangunan Infrastruktur masih perlu di tingkatkan;
3. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih perlu dikembangkan;
4. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;
5. Kesenjangan sosial yang masih tinggi; serta
6. Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam masih perlu dioptimalkan.

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan realisasi dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Berikut ini pemetaan permasalahan permasalahan utama Provinsi Sulawesi Selatan dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah.

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan



Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan pokok pembangunan daerah tersebut di atas, dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. Tata Kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintahan dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai good governance, yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

Dari masalah utama Belum terwujudnya secara optimal tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. **Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.** Hal ini di tandai dengan masih rendahnya indeks reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2017 hanya mendapatkan nilai "CC". Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan. Untuk meningkatkan indeks birokrasi maka kedelapan area perubahan reformasi birokrasi harus menjadi perhatian.

b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja

Nilai sakip pada tahun 2017 hanya bernilai B (62,04), yang diukur dari komponen: 1)Perencanaan kinerja dengan nilai 20,03, 2)Pengukuran kinerja dengan nilai 11,52, 3) pelaporan kinerja dengan nilai 10,80, 4) evaluasi internal dengan nilai 7,41, dan 5) capaian kinrja dengan nilai 12,28

2. Pembangunan Infrastruktur masih perlu di tingkatkan

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perijinan, hingga pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus merumuskan program-program kegiatan yang mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. Hal tersebut dilaksanakan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga saat ini masih belum maksimal direalisasikan. Dari masalah utama **infrastruktur masih kurang memadai,** terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar

Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah masalah perumahan dan pemukiman. Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah rumah layak di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah ±1.839,211 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka rasio rumah layak huni baru mencapai 0,194.

Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah 84,58%. Perhatian pemerintah harus diarahkan pada yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat.

Penanganan sampah di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar 75,41% yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan sampah belum dilakukan secara optimal. Beberapa faktor penghambat upaya penanganan sampah antara lain adalah masih terbatasnya TPA dengan sistem yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perUUan yaitu sistem *sanitary landfill*. TPA dengan sistem *sanitary landfill* baru diterapkan di Kabupaten Bulukumba dan Barru.

Jika dilihat dari jumlah pelanggannya, dapat terlihat belum sepenuhnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan mendapat akses distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 83,34%. Namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masayarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau.

Pada pengembangan fasilitas elektrifikasi dalam hal penggunaan sumber penerangan listrik, rata-rata Rasio Desa Berlistrik yang diukur dari tahun 2013-2017 sebesar 73.92%. Untuk mendukung ketersediaan listrik, dibangun Bio Gas dalam kurun waktu 2013-2017 sebanyak 1.249 yang dilaksanakan di beberapa lokasi/daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan masih perlu ditingkatkan;

Salah satu permasalahan mendasar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sehingga menyebabkan kesulitan baik distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Kualitas infrastruktur aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata ditandai dengan masih rendahnya jaringan jalan dalam kondisi baik yaitu 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km.

Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,000170. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat penggunaan jalan di wilayah Sulawesi Selatan masih membutuhkan peningkatan guna meningkatkan akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah dengan kondisi jalan yang rusak dan daerah yang masih terisolir.

Infrastruktur perhubungan juga belum memadai. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 2,2 juta unit pada tahun 2017 tidak sebanding dengan penambahan jumlah Panjang jaringan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan antara 8-10% per tahun. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah 108, artinya setiap 1 km jalan melayani 108 unit kendaraan bermotor. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 11 pelabuhan udara, namun yang sudah baik baru 4 bandara. Transportasi udara dibeberapa wilayah Sulawesi Selatan masih dalam taraf awal pengembangan. Kapasitas normal Bandara Sultan Hasanuddin hanya mampu menampung 7 juta penumpang. Tetapi pada tahun 2017 penumpang yang dilayani lebih dari 8 juta orang.

Keberadaan sarana da prasarana transportasi laut merupakan salah satu yang paling penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Pelabuhan laut di Sulawesi Selatan sejumlah 100, sebagian besar merupakan pelabuhan rakyat, dengan kondisi belum seluruhnya memenuhi standar. Terdapat 16 terminal, yang mengindikasikan belum seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 24 memiliki terminal.

c. Masih terdapat daerah yang terisolir

Sulawesi Selatan masih memiliki daerah yang terisolir, dalam artian belum dapat dijangkau dengan kenderaan roda 4 (empat), yaitu di Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Malino, Bone, Wajo, Sinjai, Tana Toraja, Pinrang, Toraja Utara, Soppeng, Luwu Timur, Jeneponto dan Bulukumba. Total jarak tempuh seluruh jalan tersebut $\pm$ 160 km.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rumusan Permasalahan
"Infrastruktur masih kurang memadai"

Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar	1 Wilayah kepulauan
	2 Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi
	3 Sarana dan prasarana serta sumber daya kurang

Permasalahan	Akar Masalah
	tersedia
	4 Jaringan irigasi dalam kondisi baik untuk sumber air baku belum mencukupi
Kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan masih kurang	1 Wilayah kepulauan
	2 Sarana dan prasarana perhubungan belum mumpuni
	3 kondisi jalan rusak berat masih tinggi khususnya pada daerah pinggiran
	4 Transportasi antar moda belum terintegrasi
Masih terdapat daerah yang terisolir	1 Lokasi jauh dari pusat perekonomian
	2 Tidak terhubung langsung dengan jalan provinsi (dibatasi jalan kabupaten)

3. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih perlu dikembangkan

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah pusat (PKW), kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.

Selain PKN dan PKW pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan juga ditetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan peran sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala kabupaten/kota dan sebagai simpul transportasi skala kabupaten/kota.

Selain Pusat Kegiatan Lokal, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dari masalah utama **Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum berkembang,** terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. Potensi pariwisata masih perlu dikelola dengan maksimal

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah yaitu hanya 0,012% pada tahun 2017. Pada hal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa potensial, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa tempat eksotis yang menjanjikan untuk menjadi tujuan pariwisata dunia. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai obyek wisata yang memiliki daya

tarik tetapi masih belum dikelola secara optimal padahal memiliki prospek pasar skala nasional dan internasional. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan *resort*, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata.

Potensi wisata yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk secara alamiah dari kondisi geografis, sejarah dan budaya. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari, pengunungan dan agro. Potensi wisata yang berasal dari sejarah meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Sulawesi Selatan dengan segala kebudayaannya.

Pada tahun 2016, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di Sulawesi Selatan mencapai 8,43 juta orang, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 8,37 juta orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara terus tumbuh dan berkembang dari 106.584 orang pada tahun 2013 menjadi 255.747 orang pada tahun 2017.

Jika pariwisata dikelola secara optimal maka potensi wisatawan lokal maupun mancanegara bisa meningkat mencapai angka 100 persen sehingga secara langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata hingga level internasional. Oleh karena itu, agar potensi pariswisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah.

b. Tingkat Pengangguran masih tinggi

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 3.988.029 orang, naik 175.671 orang dibanding Agustus 2017. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2018, sebanyak 3.774.924 orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 213.105 orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 176.261 orang sedangkan pengangguran berkurang 590 orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 63,02 persen, meningkat 2,03 poin dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 80,15 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 47,19 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 0,49 poin dan 3,43 poin. Dilihat dari daerah tempat tnggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tnggi dibanding di perdesaan. Pada Agustus 2018, TPT di wilayah perkotaan sebesar 8,38 persen, sedangkan TPT di perdesaan hanya sebesar 3,16 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, TPT di perdesaan

mengalami penurunan sebesar 0,72 poin. Sedangkan TPT perkotaan meningkat sebesar 0,27 poin.

c. Investasi dan penanaman modal berkembang belum optimal

Berbagai potensi sumber daya yang merupakan keanekaragaman dan kekayaan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah daerah membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat laju roda perekonomian daerah.

Realisasi penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dan cenderung stagnan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2015, nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,10 triliun dengan jumlah investor 505 perusahaan, namun menurun menjadi Rp8,30 triliun rupiah dengan jumlah investor 281 perusahaan pada tahun berikutnya dan naik kembali menjadi Rp11,48 triliun dengan jumlah 689 perusahaan pada tahun 2017. Mengingat cukup banyaknya potensi sumber daya alam, seharusnya investasi yang direalisasika untuk meningkatkan perekonomian dapat lebih dioptimalkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan penanaman modal.

4. Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan

Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Pada akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan meningkatnya daya saing manusia antarnegara di dalam pelaksanaan MEA menyebabkan persaingan akan kualitas, dan kompetensi sangat di butuhkan bagi SDM Indonesia. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Demikian juga dengan kondisi kemampuan pemuda dalam daya saing perekonomian, pada tahun 2017 persentase wirausaha muda mengalami penurunan menjadi 10,89% dari 21,78% pada tahun 2014.

Tabel 4.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah IPM nasional, dan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, IPM Sulawesi Selatan berada pada peringkat ke-14.

Berdasarkan jenis kelamin, IPM perempuan di Sulawesi Selatan masih lebih rendah yaitu 68,90 sedangkan laki-laki sudah mencapai 74,21.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar merumuskan berbagai program prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan strategis yang mendukung tercapainya daya saing masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Menerjemahkan dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama **Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia,** terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan utama, antara lain:

a. Peningkatan kualitas pendidikan masih perlu dioptimalkan

Kualitas sumber daya manusia akan selalu dihubungkan dengan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Selatan, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menyangkut kualifikasi guru maupun tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan terutama di kawasan pedalaman/kepulauan, aksesibilitas pendidikan, kesadaran untuk melanjutkan sekolah karena kondisi social ekonomi misalnya pernikahan dini atau mencari kerja bagi anak usia sekolah, hingga sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,95 tahun pada tahun 2017, yang berarti penduduk Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 7,95 tahun atau kelas 2 SMP semester kedua, bagi laki-laki laki-laki sudah menikmati pendidikan hingga kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP. Meskipun-begitu, Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan juga masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,10 tahun.

Tabel 4.3
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	7,45	7,49	7,64	7,75	7,95
Nasional	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dari segi harapan lama sekolah, angka harapan masyarakat usia masuk sekolah cukup tinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya. Angka harapan lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 13,28 tahun

yang mengindikasikan bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13-14 tahun. . Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki mencapai 12,99 dan perempuan 13,59. Angka Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan pada dasarnya lebih tinggi dari angka di tingkat nasional.

Tabel 4.4
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28
Nasional	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

b. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu optimal

Peran kesehatan menjadi vital, mengingat setiap orang memerlukan kondisi tubuh "sehat" guna memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan rumah sakit rujukan di setiap regional, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis sampai ke wilayah pedalaman, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Masalah di bidang pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan memang masih membutuhkan perhatian. Saat ini, Kota Makassar masih menjadi pusat rujukan dari sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan akibat tidak tersedianya rumah sakit yang memberikan pelayanan rujukan di wilayahnya. Di samping itu, banyak penduduk yang bermukim pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan belum terlayani fasilitas kesehatan maupun tenaga medis sebagaimana yang diharapkan.

Angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung naik perlahan, pada tahun 2013 sebesar 69,50 tahun, meningkat menjadi 69,84 tahun pada tahun 2017. Angka ini tergolong rendah dan selama lima tahun peningkatnya kurang dari 1 (satu) digit. Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Nasional yang mencapai 71,06 tahun, maka Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup tertinggal. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, ternyata laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan

Tabel 4.5
Perbandingan Angka Harapan Hidup (Tahun)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Rumusan Permasalahan
"Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	1 Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil
	2 Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil
	3 Kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terkualifikasi baik
	4 Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan yang tinggi
Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan	1 Belum meratanya pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat
	2 Perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah
	3 Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat
	4 Jumlah sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. Kesenjangan sosial masih tinggi

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 48,32 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasakan oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (Gini Ratio).

Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1 dimana angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis sedangkan angka 1 menunjukkan hal yang sebaliknya.

Dilihat dari tabel indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan, ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ketimpangan tinggi karena masih di atas angka 0,4. Indeks gini menurun dari angka 0,432 di tahun 2013 ke angka 0,429 pada tahun 2017 yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pada pemerataan pendapatan masyarakat.

Meskipun mengalami penurunan gini ratio, akan tetapi jika dibandingkan dengan nasional (0,391), Sulawesi Selatan masih berada pada ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus merumuskan program pemerataan pendapatan masyarakat agar kesenjangan sosial menurun dan berusaha mestabilkan pemerataan pendapatan masyarakat dalam kualitas yang optimal.

Dari masalah utama **kesenjangan sosial masih tinggi,** terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan utama, antara lain:

a. Angka kemiskinan masih perlu diturunkan

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera. Hal tersebut terlihat pada tahun 2017 dimana tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan (9,48%). Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 10,32%, namun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9,24%. Angka ini juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,82%. fenomena kenaikan angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan diminimalisir kembali guna menjalankan salah satu amanat pembangunan nasional untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.

b. Tingkat Pengangguran terbuka masih perlu diturunkan

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan masa produktif untuk mandiri secara ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang berkualitas akan meningkatkan akselerasi capaian pembangunan, namun sebaliknya, jika angkatan kerja yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah masih minim kualitasnya, maka akan timbul masalah.

Angka pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa tahun ini masih cukup fluktuatif dimana sempat mencapai 5,95 persen pada tahun 2015 meskipun menurun kembali pada tahun berikutnya mencapai 4,80 persen dan kembali naik menjadi 5,61% pada tahun 2017. Dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, angka pengangguran ini masih cukup tinggi sehingga perlu adanya penanganan khusus pada angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memiliki daya saing dalam kompetisi pasar kerja.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2017, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 11,92%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,62%. Dengan kata lain terdapat penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada jenjang pendidikan SMK dan SMA. Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi yaiu 6,66% sedangkan laki-laki 4,98%.

Tabel 4.7
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2017

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	5,10	5,08	5,95	4,80	5,61
Nasional	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Pada analisis lanjutan, dari keseluruhan penduduk angkatan kerja yang memiliki pekerjaan, penduduk Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 1.391.639 orang (38,67%), disusul oleh sektor perdagangan sebanyak 766.755 orang (21,31%), dan sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 652.899 orang (18,14%). Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, sehingga terlihat TPT SD ke bawah paling kecil dibandingkan jenjang lainnya yaitu sebesar 2,30%.

Sebagai salah satu sektor strategis bagi ketahanan pangan maupun perekonomian daerah, sektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan memiliki permasalahan yakni sebagian besar pelaku sektor pertanian masih menggunakan sistem tradisional. Permasalahan ini memiliki berbagai solusi yang mungkin dapat diselaraskan dengan berbagai sektor lain seperti agrobisnis, teknologi informasi, dan sebagainya.

c. Pertumbuhan perekonomian masih terpusat di perkotaan

Pemerataan pembangunan daerah akan sulit diimplementasikan, mengingat pergerakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan terpusat pada wilayah perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata merupakan salah satu penyebab permasalahan tersebut timbul. Secara demografis, distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 terlihat sangat tinggi pada tiga wilayah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa, dimana sekitar 34% penduduk mendiami wilayah tersebut.

Kegiatan perekonomian di daerah pedesaan belum mampu menggerakkan roda perekonomian secara masif pada masing-masing wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terlalu signifikan. Pengembangan pariwisata yang diharapkan mampu mendorong perekonomian pedesaan, belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Rumusan Permasalahan
"kesenjangan sosial masih tinggi"

Permasalahan	Akar Masalah
Aangka kemiskinan masih tinggi	1. Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum optimal
	2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat ekonomi lemah
Masih tingginya pengangguran	1. Program kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan yang belum efektif dan efisien dijalankan
	2. Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha
	3. Permintaan tenaga kerja berkualifikasi khusus pada setiap perekrutan pegawai (pabrik, perusahaan, dsb)
	4. Lulusan SMK kurang pengalaman kerja (magang)
	5. Pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki
Pertumbuhan perekonomian masih terpusat di perkotaan	1. Rendahnya kuantitas maupun kualitas usaha mikro masyarakat
	2. Sebagian besar usaha masih belum menerapkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Regional
	3. Masyarakat desa berurbanisasi ke perkotaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik
	4. Destinasi wisata di pedesaan belum berkembang

d. Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam masih perlu dioptimalkan

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari permasalahan perekonomian yang berujung pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perwujudan berbagai tujuan pembangunan memiliki kendala pembangunan yang multi dimensi seperti masih tingginya angka kemiskinan, angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan, hingga pemerataan pelaksanaan pembangunan.

Luasnya wilayahnya dan distribusi penduduk di berbagai wilayah menjadikannya salah satu keuntungan sekaligus kelemahan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan wilayah yang luas dan memiliki potensi lebih banyak, Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki permasalahan yang lebih kompleks seperti minimnya aksesibilitas ke setiap wilayah (terutama wilayah terpencil) maupun variasi keanekaragaman potensi SDM.

Terlepas dari hal tersebut, perbedaan potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di setiap wilayah menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat semakin terlihat. Bahkan dalam satu wilayah yang samapun, kesenjangan masih kerap terjadi baik dalam kerangka kehidupan sosial maupun ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki "pekerjaan rumah" yang merupakan permasalahan utama dan periodik yakni menurunkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian melalui transformasi pengelolaan produk pertanian yang berfokus pada komoditi unggulan sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2017 tumbuh 7,23%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,74% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 10,52%. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha tahun 2017 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,89%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,94%); Industri Pengolahan (13,71%) serta Konstruksi (12,74%).

Memperhatikan lebih jauh pada struktur perekonomian Sulsel, berdasarkan Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor yang paling besar, pada Tahun 2017 nilai PDRB-ADHK sektor ini sebesar Rp 61,47 trilyun dari total PDRB Sulsel, Sektor kedua adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini sebesar Rp. 42,48 Trilyun. Sektor ketiga adalah Industri Pengolahan dengan nilai PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp. 40,41 trilyun. Sektor keempat adalah Konstruksi, dengan konstribusi sebesar Rp. 34,76 Trilyun terhadap total PDRB.

Pengembangan perekonomian lokal daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini memiliki program-program yang memberdayakan masyarakat dalam perekonomian lokal tapi kurang maksimal implementasinya. Hal ini dikarenakan permasalahan pengembangan ekonomi lokal selalu terkait dengan permasalahan lain seperti aksesibilitas wilayah, sumber daya manusia, maupun koordinasi pemerintah daerah.

Dari masalah utama **Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang masih rendah,** terdapat beberapa fenomena yang menggambarkan atau memicu permasalahan utama tersebut, antara lain:

a. **Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan belum optimal**

   Kondisi pertanian di Sulawesi Selatan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya pelaku tani karena memiliki potensi yang

besar besar dalam nilai produksi. Produksi jagung tahun 2013 sebesar 1,25 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 2,34 juta ton pipilan kering atau meningkat 13,38% dari tahun sebelumnya.

Produktivitas padi atau lahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai produktivitas sebesar 50,93% dengan rata-rata produktivitas 51,49% selama 5 tahun. Produksi beras pada tahun 2013 sebanyak 3,06 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 3,8 juta ton. Rata-rata perkembangan produksi beras selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan cukup besar yaitu 4,75%.

Pada tahun 2017 produktivitas komoditi unggulan perkebunan Sulawesi Selatan sebesar 1.191 Kg/Ha dengan volume produksi 43.458 Ton. Produksi Perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 10,3%. Produksi Perikanan pada tahun 2013 hanya sebesar 2.884.006,7 ton meningkat sebesar 4.262.554,7 ton.

b. Nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah

Perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, dengan kontribusi sekitar 22,89% dari seluruh sektor pada di tahun 2017. Data keadaan angkatan kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian cukup mendominasi sekitar 38.67% dari seluruh sektor ekonomi. Tidak salah dikatakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB. Pada tahun 2017 atas dasar harga berlakumencapai 95,90 triliun rupiah atau sebesar 22,89%. Subkategori usahaPertanian, Peternakan, Perburuan, danJasa Pertanian merupakan kontributorterbesar dalam menciptakan nilai tambahlapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 63,34%.

Subkategori tersebut juga masihdirinci lagi dan Tanaman panganmerupakan kontributor terbesar terhadappembentukan nilai tambah subkategoriusaha tersebut yaitu sebesar 51,89 persen.

Tabel 4.9
Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB (%)
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	22,16	22,97	23,14	23,27	22,89
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	3,30	3,94	4,07	5,42	6,01
Kontribusi Sektor Pertanian	7,98	7,79	7,65	7,81	7,52

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(Tabama / Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB					
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	4,28	4,56	4,55	4,45	4,26
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	6,92	7,67	8,10	8,14	8,33
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	1,13	1,11	1,08	1,11	1,09

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

Tabel 4.10
PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Pertanian	Trilyun Rp	57,37	68,47	78,78	88,33	95,50
PDRB Perkebunan	Trilyun Rp	11,08	13,60	15,49	16,91	17,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Rumusan Permasalahan
"Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang masih rendah"

Permasalahan	Akar Masalah
Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan belum optimal	1. Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
	2. Masih rendahnya SDM pertanian
	3. Jaringan irigasi masih terbatas
Nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah	1. Hilirisasi produk pertanian kurang mendapat dukungan dan perhatian
	2. Penggunaan teknologi tepat guna masih belum optimal

4.1.2 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap (jarak) antara kondisi yang ada pada saat ini dengan kondisi ideal. Berdasarkan pada kondisi yang tergambarkan pada Gambaran Umum Kondisi Daerah maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Sulawesi Selatan yang harus diselesaikan dalam periode 2018-2023 ke depan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
   a) Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 7,95 tahun, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 8,10 tahun dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,10 tahun. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 13,28 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 12,82,tetapi lebih rendah dari target RPJMD sebesar 13,61. Ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Murni SMA (59,62). jika dilihat berdasarkan jenis kelamin perempuan di angka 62,98 dan laki-laki 56,92
   b) Angka Partisipasi Kasar SMA (83,66) juga masih rendah. Salah satu akar masalah dari belum optimalnya kinerja ini adalah masih rendahnya rasio sekolah dengan jumlah murid 1:324), dan rasio guru dengan murid (1:15), serta masih berlanjutnya anak putus sekolah (SMA/SMK/MA sebesar 1,19%), belum meratanya distribusi guru sekolah antar desa dan kota, selain itu hambatan sosio-kultural bagi akses anak usia sekolah masih ada seperti anak usia sekolah yang terlibat dalam dunia kerja.
   c) Angka melanjutkan sekolah belum optimal. Angka melanjutkan dari SMA sederajat pada tahun 2017, sebesar 94,65 %.
2. Kesehatan
   a) Cakupan Angka Kematian Neotus masih fluktuatif, hal ini disebabkan kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang masih belum memadai serta deteksi factor resiko yang belum adukuat.
   b) Masih sangat kurangnya tenaga kesehatan penolong persalinan yang memiliki skil penanganan gawat darurat matemal dan neonatal dalam menekan angka kematian ibu
   c) Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi secara kualitas masih relative kurang
   d) Layanan Sistem Perlindungan Perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan belum berjalan secara holistic integrative, baik inter maupun antar sector dan wilayah.
   e) Lembaga layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang terstandarisasi belum mencukupi jumlah dan persebarannya di kabupaten/kota.
   f) Penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam situasi darurat dan/atau kondisi khusus belum berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

g) Melemahnya ketahanan keluarga yang berdampak pada menurunnya kualitas keluarga yang berbasis hak anak dan responsive gender

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a) Kondisi panjang jaringan jalan belum sepenuhya baik, hal ini disebabkan masih terdapat jalan yang berkrikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan jalan tanah atau belum tembus sepanjang 211,52 km (10,53%). Faktor yang menjadi hambatan karena belum di prioritaskannya alokasi pendanaan berdasarkan kondisi jalan.
   b) Panjang jalan provinsi masih belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan.
   c) Jalan Provinsi, khusunya di kawasan perkotaan mengalami kendala untuk dilengkapi dengan trotoar dan drainase karena terkendala oleh ketersediaan lahan, khususnya pada wilayah yang sudah terbangun.
   d) Masih kurangnya konsistensi penerapan aturan pemanfaatan daerah milik jalan oleh Pemerintah daerah dan kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan pemanfaatan daerah milik jalan.
   e) Masih kurangnya upaya pemerintah daerah dan perangkat pengendalian untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sempadan sungai melalui penerbitan regulasi pengendalian pemanfaatan ruangan sempadan sungai
   f) Terbatasnya TPA dengan sistem yang sesuai dengan regulasi dalam ketentuan peraturan per UUan yaitu sistem sanitary landfill selain itu belum optimalnya penanganan sampah dengan sistem 3 R.
   g) penggunaan septic tank yang belum layak digunakan oleh masyarakat serta pelayanan dalam pengelolaan di IPLT yang belum baik.
   h) Belum meratanya pemenuhan kebutuhan air minum khususnya pada wilayah rawan air bersih di wilayah kepulauan dan beberapa sungai yang digunakan sebagai sumber air baku mengalami pencemaran.
   i) Masih kurangnya ketaatan pemerintah kabupaten/kota terhadap penyediaan RTH, pesatnya pembangunan dikawasan perkotaan yang mengokupasi lahan yang direncanakan sebagai RTH serta kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota
   j) Belum terintegrasinya program prioritas RTR dalam dokumen perencanaan daerah dan RTR belum menjadi acuan pelakasaan pembangunan serta belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyebabkan belum maksimalnya ketaatan terhadap RTRW
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   a) Masih banyaknya kebutuhan akan rumah layak huni khsusunya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
   b) Masih kurangnya kawasan publik serta kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik yang disebabkan areal kawasan kumuh seluas 2268 ha yang masih belum dituntaskan.

c) Kualitas sarana dan prasarana di beberapa area perumahan belum memiliki kualitas yang baik

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) sudah melampaui target hal ini disebabkan adanya fungsi linmas di beberapa Kabupaten/Kota sudah dapat diberdayakan oleh Sat.Pol PP serta adanya dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota daam menyongsong pilakda serentak di Sulsel juga sedikit banyak mempengaruhi pola rekrutmen linmas di kab/kota.
   b) Masih kurangnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 akibat masih merebaknya berbagai tindakan kekerasan dan aksi massa yang dapat terselesaikan di beberapa kab/kota.
   c) Belum adanya formasi khusus untuk penerimaan Polisi Pamong Praja ditambah lagi banyak personil yang sudah memasuki purna bakti (Pensiun)
   d) Kurang maksimalnya pengadaan penyediaan sarana fasilitas pendukung layanan keamanan siskamling di kabupaten/kota

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a) Meningkatnya populiasi PMKS sehingga tidak sesuai dengan kemampuan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan
   b) Masih Kurangnya dukungan pengusaha dan stakeholder lainnya serta kurangnya motivasi masyarakat untuk berkiprah dalam wadah WKSBM.
   c) Jumlah Populasi yang terdampak sangat banyak sementara barang logistic terbatas
   d) Lokasi korban bencana yang terisolir dan sulit untuk dijangkau
   e) Peralatan evakuasi yang terbatas dan hanya dapat dilakukan pada pertolongan pertama
   f) SDM tidak memadai atau belum mahir dalam melakukan evakuasi

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a) Tidak adanya kesepakatan tentang upah antara pengusaha dengan tenaga pekerja serta sarana hubungan industrial di perusahaan belum berjalan sesuai peran dan fungsinya terhadap angka sengketa pengusaha-pekerja setiap tahunnya.
b) Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama disebabkan pihak yang berselisih kurang memahami aspek positif/ penyelesaian perselihan lewat perjanjian bersama.
c) Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan disebabkan ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
d) Terbatasnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap keselamatan dan perlindungan kerja.

e) Belum semua pekerja/buruh di perusahaan didaftarkan dalam kepesertaan jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Kondisi di Level pengambilan keputusan jumlah perempuan masih sangat rendah, hal ini disebabkan penetuan jabatan (eselon II, III dan IV) masih diwarnai oleh budaya patriakhi (bahwa yang layak jadi pemimpin adalah laki-laki), sedangkan perempuan diberikan kedudukan pada level pengambilan keputusan yang kurang strategis sehingga mengurangi tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

b) Proporsi kursi perempuan di DPR cukup tinggi, namun tingkat kepercayaan perempuan masih kurang untuk berkompetensi dengan kaum pria.

3. Pangan

a) Rendahnya harga untuk komoditas tertentu tanaman pangan sehingga menurunkan minat petani untuk membudidayakan (misalnya : kedelai, ubi kayu dan ubi jalar).

b) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan

c) Menurunnya minat generasi muda untuk berusaha disektor pertanian.

d) Belum optimalnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikabupaten/kota berdasarkan UU No.41 tahun 2009

e) Degradasi lahan disebabkan penggunaan pupuk an organik dan pestisida yang berlebihan

f) Kualitas benih masih rendah

g) Rendahnya sumber daya petani dan kelembagaan kelompok tani

4. Pertanahan

a) Belum terintegrasinya data lahan bersertifikat dengan pihak BPN

b) Masih banyaknya aset lahan Pemerintah Provinsi yang berkasus sehingga tingkat peyelesaiannya belum maksimal.

c) Belum terintegrasinya proses penyelesaian izin lokasi dengan pihak BPN dan masih banyaknya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

5. Lingkungan Hidup

a) Semakin meluasnya lahan kritis dalam maupun diluar kawasan hutan

b) Menurunya tutupan vegetasi/tutupan hutan pada lahan di kawasan hutan

c) Menurunya kualitas/debit badan air (Sungai/Air Tanah)

d) Menurunnya Kualitas Sumberdaya Air Baku dikarenakan pencemaran pestisida dan tingginya TSS dan TDS

e) Terjadinya eutrofikasi akibat limbah domestik pada badan air (sungai dan danau)

f) Pencemaran BBM, Pelumas dan limbah B3 diperairan pantai, sungai dan danau

g) Timbulnya kasus pencemaran logam berat di sungai dan pantai/laut

h) Terjadinya kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir

i) Masih banyaknya pelanggaran lingkungan yang terjadi

6. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
   a) Capaian Perekaman Penduduk ber-KTP masih dibawah target nasional
   b) Masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya akte kelahiran
7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   a) Kurangnya Regulasi dan sarana prasarana di tingkat Kabupaten/kota yang mendukung terhadap upaya peningaktan keberdayaan masyarakat
   b) Banyaknya inovasi TTG yang tidak terindentifikasi ditingkat desa sert sarana dan prasarana pembentukan posyantek masih sangat kurang.
   c) Kemampuan manajerial pengelolaan BUMDes khususnya pengelolaan unit usaha yang masih rendah
   d) Jaringan pemasaran yang terbatas dan penguatan kerjasama BUMDes masih rendah
   e) Kurangnya kompetensi, kualifikasi dan motivasi pengelola LPM terhadap peningaktan partisipasi masyarakat dalam membanguna desa.
   f) Belum maksimalnya peran LPM dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembanguna di desa
   g) Kurangnya dukungan pemda kabupaten dan OPD terkait ditingakt Provinsi utama OPD yang kegaitannya langsung ke desa
   h) Kurang Maksimalnya pembinaan ke desa mengenai pentingnya profil desa/kelurahan

8. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
   a) Permasalahan pusat pelayanan kesejahteraan (PPKS) yang sering timbul yaitu pada kualitas pelayanan itu sendiri diantaranya sulit menentukan dan mengukur kualitas dari pelayanannya, bagaimana bentuk kualitas pelayanannya serta jauh dari jangkauan masyarakat
   b) Masih kurangnya anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri
   c) Masih kurangnya tingkat pengetahuan pelajar SMP/SMA terhadap bahaya infeksi penularan seksual serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa lebih dini
   d) Dana yang belum memadai, program kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/Kota belum sinkron.
9. **Perhubungan**
   a) Peningkatan jumlah penumpang belum diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang baik
   b) Masih banyaknya angkutan umum yang belum memiliki ijin trayek
   c) Masih banyaknya sarana angkutan umum yang tidak layak yang digunakan oleh masyarakat
   d) Kualitas sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan yang belum layak

e) Jumlah angkutan umum darat (termasuk penyeberangan) tidak mampu menampung jumlah seluru penumpang, khususnya pada musim mudik seperti saat hari raya
f) Jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga menyebabkan semakin padatnya kendaraan di jalan raya dan menaikkan rasio
g) Belum terbangunnya sistem transportasi terintegrasi/terpadu kawasan perkotaan Mamminasata
h) Pengembangan sistem perkeretaapian belum optimal

10. Komunikasi dan Informatika

a) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta kurangnya SDM dalam pengelolaan informasi publik.
b) Terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi serta terbatasanya kualitas SDM terkait IT
c) Belom optimalnya dukungan tata kelola, infrastruktur teknologi informasi, data dan aplikasi, serta terbatasanya kualitas SDM terkait

11. Koperasi dan UKM

a) masih banyak Koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip Koperasi secara benar,
b) Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi),
c) rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan Koperasi dan masih banyak Koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah
d) kurangnya kesadaran anggota Koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan Koperasi,
e) kurangnya kapasitas Koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota serta
f) kurangnya kemampuan Koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar
g) terbatasnya kemampuan Koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran,
h) terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar Koperasi dan antara Koperasi dengan usaha besar
i) banyak anggota yang tidak mengerti tentang Koperasi,
j) regulasi dan kebijakan ditingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan Koperasi,
k) belum optimal fungsi kelembagaan pemberdayaan dan infrastruktur Koperasi, terutama dibidang pendidikan, pembiayaan dan pemasaran,
l) rendahnya pemetaan dan pembinaan stakeholder mengenai perkembangan Koperasi.

12. **Penanaman Modal**
    a) Belum optimalnya pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk melaporkan LKPN tepat waktu
    b) Masih kurangnya investor PMA dan PMDN untuk menanamkan modal di Sulawesi Selatan
    c) Pertumbuhan dan Investasi belum merata di wilayah Sulawesi Selatan
13. **Kepemudaan dan Olahraga**
    a) Banyaknya OKP yang belum terdaftar di pemerintah serta belum maksimalnya regerasi kepengurusan organisasi
    b) Belum adanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan kepemudaan yang dibina oleh lembaga pemerintah provinsi.
    c) Belum adanya pembinaan wirausaha muda secara berkelanjutan.
    d) Belum adanya kompetensi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh cabang olahraga dan masih kurangnya even nasional dan internasional yang diikuti.
    e) Kualitas pelatih pada pemprov. Cabang olahraga belum merata baik secara kuantitas maupun kualitas
    f) Minimnya usia muda untuk menggeluti olahraga prestasi karena olahraga dipandang belum memiliki prospek masa depan yang lebih baik.
    g) Kurangnya kompetisi daerah yang dilaksanakan oleh cabang olahraga secara rutin, terutama pada cabang olahraga yang dipertandingkan di olympiade sehingga regenerasi atlet tidak berjalan secara paralel.
    h) Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
14. **Satatistik**
    a) Belum tersedianya standar dan format meta data yang dibakukan oleh wali data terkait
15. **Persandian**
    a) Pengelolaan layanan persandian belum sepenuhnya optimal
16. **Kebudayaan**
    a) Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap inidvidu pada semua aspek kehidupan.
    b) Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khas kearifan lokal.
    c) Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya bagi perkembangan kunjungan wisata.
    d) Tidak signifikannya warisan nilai budaya kemaritiman sebagai sumber etos dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan dalam perkembangan pariwisata maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum.

17. Perpustakaan

a) Belum memadainya sarana dan prasrana pendukung perpustakaan
b) Belum adanya gedung perpustakaan yang reprensentatif
c) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan
d) Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (pustakawan)

18. Kearsipan

a) Sarana prasarana pengelolaan penyimpanan arsip masih kurang
b) Arsip yang berada di OPD masih masuk dalam kategori kacau, belum tertata sesuai kaidah kearsipan
c) Tidak tersediannya sarana dan prasarana sistem kearsipan yang baku
d) Belum terwujudnya unit kearsipan di setiap OPD, sesuai amanah undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang arsip
e) Kurangnya tenaga fungsional kearsiapan (arsiparis)

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Pemanfaatan pelabuhan perikanan dan fasilitas pendukung belum optimal
b. Fasilitas sarpras pelabuhan belum memadai
c. Saluran dan jaringan irigasi belum memadai
d. Masih terbatasnya lahan yang dipakai untuk kegiatan usaha perikanan dibandingkan potensi yang ada seperti pengembangan usaha garam, budidaya laut dan air tawar
e. Masih kurangnya armada perikanan 10-30 GT
f. Sarana prasarana pengawasan belum memadai
g. Ketidakseimbangan Pemanfaatan SDI antar WPP
h. Pendataan produksi hasil tangkapan belum maksimal
i. Tingginya tingkat kerentanan daerah pesisir terhadap perubahan iklim
j. Minimnya petugas syahbandar
k. Belum optimalnya penanganan pasca panen / pasca penangkapan
l. Minimnya kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan
m. Akses layanan Infrastuktur wilayah pesisir belum optimal karena belum ditetapkannya RZWP3K
n. Masih adanya kesenjangan gender / akses kesetaraan gender dalam pembangunan pesisir

2. Pariwisata

a) Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata
b) Masih rendahnya kemitraan dalam mendorong daya saing industri pariwisata
c) Belum optimalnya aktraksi, aksesibilitas dan amenitas destinasi wisata.

3. Pertanian

- Perkebunan

a) Produksi dan Produktivitas masih rendah

b) Mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan masih rendah
c) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi perkebunan
d) Rendahnya sumber daya petani dan kelembagaan kelompok tani

- Peternakan

a) Meningkatnya pemotongan ternak betina produktif Khususnya ternak sapi yang menyebabkan degradasi populasi ternak.
b) Meningkatnya penularan penyakit hewan menular (PHMS), khususnya penyakit Antrax, Rabies, Brucellosis dan Flu Burung
c) Rendahnya Pelaksanaan inseminasi buatan yang disebabkan sistem pemeliharaan yang tidak insentif
d) Alih fungsi lahan untuk sub sektor peternakan dari tahun ke tahun masih tinggi
e) Rendahnya sumber daya petani peternak dan kelembagaan kelompok.

4. Kehutanan

a) Masih terdapatnya lahan kritis didalam maupun diluar kawasan hutan.
b) Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan berkarbon tinggi ke lahan berkarbon rendah
c) Tingkat perambahan dan kasus illegal logging serta kebakaran hutan masih cukup tinggi
d) Adanya konflik agraria di sekitar kawasan hutan
e) Masih kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan
f) Belum optimalnya pengelolaan jasa lingkungan sektor kehutanan
g) Masih kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari
h) Masih rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
i) Kurangnya data dan informasi sektor kehutanan
j) Masih kurangnya sarana dan prasarana pada UPT Dinas Kehutanan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Sebaran sumber Daya Mineral lebih luas dari pemetaan
b) Sarana dan prasarana belum memenuhi standar
c) Masih terdapat daerah yang belum teraliri aliran listrik
d) Rendahnya tingkat keberlanjutan kegiatan energi baru terbarukan di masyarakat

6. Perdagangan

a) Rendahnya koordinasi lintas sector baik koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dengan dunia usaha.
b) rendahnya penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
c) Belum optimalnya penguatan kelembagaan perlindungan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
d) Belum optimalnya Diversifikasi komoditi ekspor dan negara tujuan ekspor

e) Belum tertatanya sistem informasi perdagangan yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat yang berfungsi sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha.
f) Rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (learning organization).

7. Perindustrian

a) Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal
b) Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industry
c) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia industri
d) Terbatasnya kemampuan pelaku IKM terkai Inovasi dan update teknologi industri
e) Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing kabupaten kota
f) Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan
g) Meningkatnya produk impor yang murah yang kurang bersaing dengan produk lokal
h) Terbatasnya akses permodalan bagi IKM
i) Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri.

8. Transmigrasi

a) Ketersediaan lahan permukiman dan lahan usaha yang terbatas.
b) Keinginan / kemauan dari calon transmigran untuk bertransmigrasi mandiri masih kurang.

D. Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

a) Belum optimalnya proses pembangunan daerah yang sesuai dengan alur tahapan dalam peraturan menteri dalam negeri No 86 tahun 2017
b) Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan pembangunan pada tahun tahun berikutnya

2. Keuangan

a) Penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan belum tepat waktu
b) Pengetahuan para bendahara OPD terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran daerah yang belum optimal
c) Terkait pengelolaan adminstrasi penggajian PNS adalah masih adanya SKPD yang terlambat memasukan SPM gaji, masih adanya kesalahan mencantumkan kode map pajak.

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- Kepegawaian

a) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada custumer (pegawai di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan);

b) Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;
c) Kurangnya perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
d) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
e) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui system renumerasi yang adil, layak dan kompetitif;
f) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
g) Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
h) Belum terbangunnya system kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informatika;
i) Orientasi pada jabatan struktural;
j) Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap SKPD;
k) Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian;
l) Belum terinternalisasinya perubahan paradigm administrasi kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebagai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

- Pendidikan dan Pelatihan

a) OPD lingkup Pemerintah Provinsi melaksanakan sendiri kegiatan diklatnya, hal ini tidak sesuai Pergub. 101 Tahun 2016 Diklat Satu Pintu.
b) Pelaksanaan Diklat Kab/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya dan tidak terlapor di BPSDM Provinsi SulSel.
c) Indeks biaya untuk setiap diklat sangat besar dan tingkat mutasi jabatan di Kab/Kota tinggi.

4. Penelitian dan Pengembangan

a) Perlu regulasi penguatan implementasi kelitbangan terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
b) Kurangnya desiminasi hasil kelitbangan kepada stakeholders karena terbatasnya anggaran desiminasi.
c) Kurangnya sosialisasi pengembangan SIDa di kab./kota.
d) Terbatasnya SDM Iptek di lingkup lembaga litbang Provinsi dan Kab/Kota.
e) kurangnya dukungan regulasi terhadap inovasi yang telah dilakukan.

5. Pengawasan

a) Temuan sudah sangat lama sehingga sulit dalam menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
b) Penyedia jasa dan pejabat teknis sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit dalam menindaklanjuti rekomendasi.

c) Terkait dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan serta anggota DPRD periode lama dan sudah berganti ini juga menjadi kendala dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
d) Terkait dengan rekomendasi persertifikatan aset tanah memang belum dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh tapi dilakukan secara bertahap mengingat anggaran untuk sertifikasi tanah dianggarkan secara bertahap.
e) Terkait dengan rekomendasi bantuan keuangan kepada partai politik, fakta yang ada sekarang pengurus dari partai yang dimaksud sudah diganti dengan pengurus baru saat ini sehingga juga menjadi kendala dalam menindaklanjuti.

6. Sekretariat Dewan

a) Dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi Inkonsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan.
b) Program kerja DPRD telah tersusun dan terintegrasi dalam melaksanakan fungsinya, namun koordinasi antar eksekutif dan legislatif kadang belum berjalan dengan baik.

4.2. Isu Strategis Global

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis . Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4.2.1. Isu Strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan

peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasaranya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara—baik negara maju, negara berkembang, dan Negara kurang berkembang—untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Adapun capaian pembangunan SDGs di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD tahun 2019. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada gambar berikut ini.

Tabel 4.12
Kategori A Berdasarkan Tujuan TPB

No. TPB	TUJUAN TPB	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Seala Bentuk Dimanapun	8
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	5
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	20
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	4
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	3

No. TPB	TUJUAN TPB	Kategori Indikator
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	4
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	3
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	4
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	5
Total		**75**

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 17 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator.

2. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan Indikator yang telah dilaksankan tetapi belum mencapai target yaitu dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Kategori B Berdasarkan Tujuan TPB

NO. TPB	TUJUAN TPB	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	6
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	4
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	8
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	7
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,	1

NO. TPB	TUJUAN TPB	Kategori Indikator
	Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	3
Total		**42**

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 13 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 42 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator.

3. Adapun indikator yang belum dilaksanakan program dan kegiatan daerah dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Kategori C Berdasarkan Tujuan TPB

NO. TPB	TUJUAN TPB	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	4
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	3
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	8
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	4

NO. TPB	TUJUAN TPB	Kategori Indikator
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	6
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	9
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	3
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	4
Total		**58**

Jadi secara keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator dengan berbagai kriteria adalah sebagai berikut:

No.	KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	JUMLAH	(%)
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	75	31,91
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	42	17,87
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	58	24,68

No.	KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	JUMLAH	(%)
4.	Data tidak tersedia	60	25,53

Berdasarkan hasil proyeksi dan kajian 6 Muatan daya dukung, maka terdapat tiga berlas (13) tujaun yang menjadi sasaran prioritas dari 17 Tujaun Pembangunan Berkelanjutan dalam merumuskan arah kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga belas isu prioritas tersebut antara lain;

1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
6) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
7) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
8) Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
9) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
10) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
11) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
12) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
13) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

4.2.2. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim

hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Dalam skala nasional Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perubahan iklim dengan berkomiten untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pertemuan UNFCC COP-21 menghasilkan dokumen Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO_2eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

4.2.3. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*

MEA bertujuan menciptakan Asean sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Dengan demikian, akan terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antarnegara Asean.Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Sulawesi Selatan kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipanya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan

kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Tantangan yang dihadapi negara berkembang adalah persaingan global ASEAN karena MEA yang dibentuk menjadi kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Selain sebagi tantangan, MEA juga menjadi peluang yang bagus bagi Indonesia untuk mengembangkan perekonomian, MEA akan menjadi penyerap tenaga kerja, sebab tentunya perusahaan asing akan banyak ber-investasi di Indonesia, sehingga beragam tenaga kerja akan banyak dibutuhkan. Dari segi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pun, hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas baik SDM, Operasional, juga dari segi peraturan pemerintah harus terus diperbaiki, supaya momentum MEA dapat dimanfaatkan sebaik muingkin. Namun hal Ini akan menjadi "memakan atau dimakan" ketika SDM nya kurang, atau perusahaan Indonesia tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan negara lain yang malah meng-ekspansi Indonesia sebagai lading bisnisnya.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

4.2.3. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Keadaan pada saat Rasio Ketergantungan semakin menurun hingga berada di bawah 50 % disebut 'Jendela Kesempatan' (The windos of opportunity) yang hanya berlangsung satu kali dalam seluruh perjalan kehidupan penduduk.

Ledakan usia produktif yang akan dijelang oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan tantangan. Pada periode itu, setidaknya 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun, bukan semata peluang untuk bangkit, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga bisa menjadi awal keruntuhan sebuah bangsa.

Bonus demografi adalah peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena banyak tersedianya sumber daya manusia produktif. Sebaliknya bonus demografi akan menjadi kejatuhan suatu bangsa atau daerah jika tidak dimanfaatkan dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong era tersebut. Pentingnya pembangunan generasi muda harus merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah saat ini. Perbaikan SDM pemuda perlu terus ditingkatkan agar cita-cita mencetak generasi kreatif dapat terwujud. Kehadiran bonus demografi menjadi suatu peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara baik agar memberikan keuntungan maksimal di masa mendatang. Agar bonus itu juga menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu teradinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

4.3. Isu Strategis Nasional

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahawa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

a. Pelayanan pendidikan menengah;
b. Pelayanan pendidikan khusus;
c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensibencana daerah provinsi;
d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

4.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi Kepala Daerah tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2018-2023 adalah :

- Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

  Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan

kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan RS Regional sehinggal menjangkau pelayanan kesehatan antar wilayah Kabupate/Kota, Ibu Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. yang harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan.

  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

  Selain kondisi ekonomi, hal lainnya juga adalah factor Pendidikan dan Kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan), bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia

- Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

  Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

  Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan

2.009,35 Km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cendrung mengalami peningakatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesear 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.

- Pemerataan Perdapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

  Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapota maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

- Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

  Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertembuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dati total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

  Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan.

  Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

  Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/diekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status social, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

- Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

  Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian "Peningkatan Nilai Tambah Industri Lokal untuk Mendongkrak Daya Saing Ekonomi, yang seharusnya lebih meningkat.

  Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking), serta kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik. "Hilirisasi komoditi bertujuan untuk

meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. hilirisasi Komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sector pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi selatan dalam hal produksi, industry pengolahan berbasis pertanian dan keungulan pemasaran hasil baik dalam negeri maupun ekspor.

- **Sulawesi Selatan sebagi poros maritim**

  Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km^2 diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.

  "Potensi ekonomi yang terkandung dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola dengan benar akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang teluk Bone yamh merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembanguna infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortshipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

  Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di Nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang mangrak dari Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan, dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada.

  Aspek Sosial dan Budaya bagi masyarakat maritim adalah sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sekaitan dengan hal tersebut, oleh pemerintah Sulawesi Selatan menjadikan prioritas proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

  Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan diperlukan untuk upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.5. Sinkronisasi RPJMD daerah Lainnya dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan dokumen RPJMD provinsi lain yang secara administrasi berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023.

Sinergitas antara dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan RPJMD lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah antar daerah khususnya keterpaduan pembangunan wilayah lingkup Pulau Sulawesi.

Tabel 4.15
Penelaahan RPJMD Daerah lain dengan Kebijakan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Provinsi Sulawesi Barat	2017-2022	Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis melalui konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas yang menghubungkan daerah terpencil;	Peningkatan dan penguatan konektivitas, khususnya pada daerah terpencil yang menghubungkan Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja dan Pinrang sejalan dengan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu: 1. Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan pada daerah terpencil; 2. Pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal feri
2.	Provinsi Sulawesi Tengah	2016-2021	Prioritas Daerah: 1. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang melalui pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;	Peningkatan dan penguatan konektivitas, khususnya pada daerah terpencil yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara, dan Luwu Timur sejalan dengan kebijakan pembangunan

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
				Sulawesi Selatan yaitu: 1. Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan pada daerah terpencil; 2. Pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal feri.
			2. Pemantapan iklim investasi melalui pengembangan kawasan industry dan pembangunan wilayah berbasis kawasan strategis dan transmigrasi; dan	Pengembangan kawasan industry dan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah terkait dengan kebijakan hilirirasi komoditas Sulawesi Selatan melalui pengembangan komoditas pertanian dan pertambangan
			3. Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritime serta pariwisata melalui pengembangan agribisnis dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan serta pengelolaan pariwisata.	Pengembangan pariwisata di Sulawesi Tengah diharapkan dapat mendukung kebijakan pengembangan destinasi wisata unggulan khususnya peruntukan pariwisata bahari dan peruntukan ekowisata
3.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2018-2023	Pembangunan yang dititikberatkan pada pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur wilayah;	Peningkatan dan penguatan konektivitas, khususnya pada daerah terpencil yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur sejalan

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
				dengan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu: 1. Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan pada daerah terpencil; 2. Pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal feri.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"Sulawesi Selatan Yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter".

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter". Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel V.1.
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru,produk baru,dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "bersih dan melayani"
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "sehat dan cerdas"
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barangdan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudSulawesi Selatan yang "mandiri dan sejahtera".
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "inklusif dan

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		terkoneksi".
	Berkarakter	Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "berkarakter".

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientas iMelayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel V.2.

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter			
No.	**Misi**	**Penjelasan Misi**	**Pokok Visi**
1.	Mewujudkan Pemerin-tahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-koneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif
4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga,menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas	Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

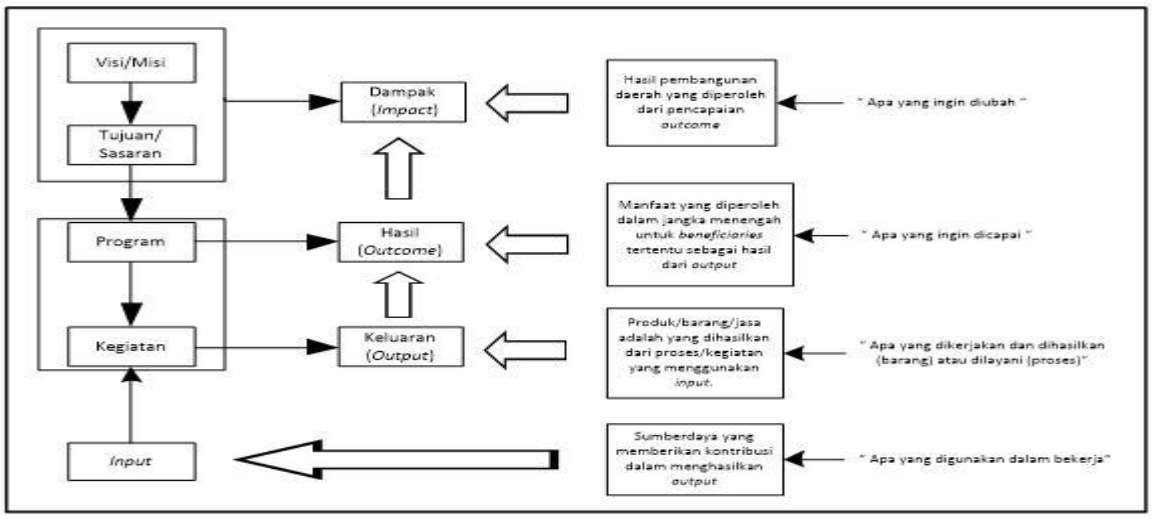
Pernyataan Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter			
No.	**Misi**	**Penjelasan Misi**	**Pokok Visi**
		tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian danpemajuan kebudayaan daerah	
5.	Meningkatkan Produk-tivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

5.3. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.1.
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; danmemenuhi kriteria SMART-C.Untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan
Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan		1. Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	BB	BB	A	A
			1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	2. Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	AA	AA
			2 Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	IKM = D	D	C	C	B	B	B
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang	2. Meningkatkan infrastruktur wilayah		4. Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air	Tahun 2016: 6,99 dan Tahun 2017:8,56	7.6	7.8	8,0	8,2	8,3	8,3

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
	Berkualitas dan Aksesibel			(%)							
			3 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	5. Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	51	56	64	65	71	73	73
3.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah		6. PDRB Perkapita (Juta Rp)	47,93	57,64	62,97	62,97	68,80	82,13	82,13
				7. Angka Kemiskinan (%)	9,48	8.78	8.46	8.14	7.82	7.5	7.5
			4 Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	8. PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Milyar RP)	29,202,608.04	33,110,348.45	35,124,356.44	37,138,364.43	39,152,372.42	41,166,380.41	41,166,380.41
				9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5.17	4.97	4.77	4.57	4.37	4,37
			5 Menurunnya kesenjangan antar lapisan	10. Indeks Gini	0,429	0.385	0.376	0.366	0.357	0.347	0.347
				11. Indeks	0,610	0,580	0,570	0,560	0,549	0,539	0,539

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
			masyarakat dan antar wilayah	Williamson							
4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter	4. Meningkatkankualitas SDM secara inklusif		12. IPM	70,34	71,58	72,18	72,79	73,40	74,01	74,01
			6 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	13. Indeks Pendidikan	63,39	65,19	66,10	67,02	67,93	68,5	68,5
			7 Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	14. IPG	92,84	93,18	93,40	93,62	93,84	94,06	94,06
				15. IDG	72,48	74,01	75,54	77,07	78,60	80,13	80,13
			8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	16. Indeks Kesehatan	76,68	77,03	77,17	77,31	77,45	77,58	77,58
5.	MeningkatkanProduktivitas dan Daya Saing Produk Sumber	5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian,		17. Pertumbuhan PDRB (%)	7,23	7,2-7,6	7,4-7,8	7,6-8,0	7,8-8,2	7,9-8,3	7,9-8,3

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
	Daya Alam yang Berkelanjutan	daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup									
			9 Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam	18. Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	75.782.133	78.777.309	81.942.489	87.882.496	90.664.371	93.325.387	93.325.387
			10. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,24	73,33	73,36	73,40	73,44	73,49	73,49
				20. Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	0,79 Juta ton CO_2eq (2017)	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,3

5.4. Keterkaitan Visi/Misi RPJPN dan RPJMD

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.** Visi tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Adapun prioritas RPJMN ke-4 (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia**;** terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat**;** serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi gobal.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

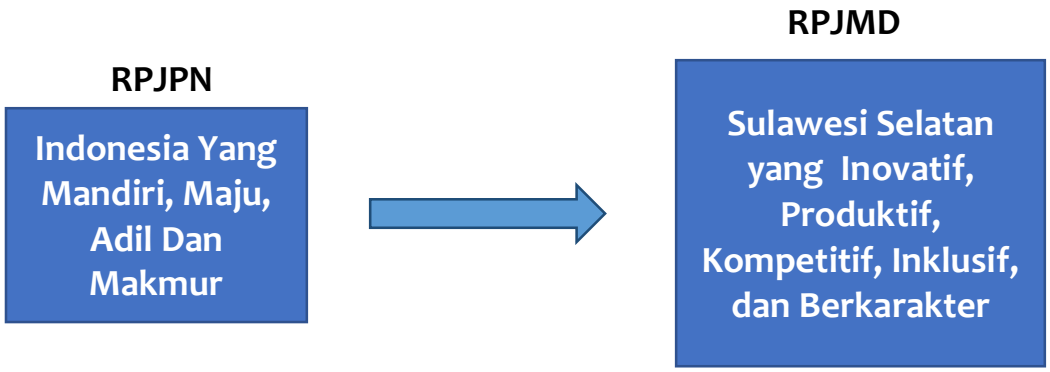
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Secara ringkas, arahan RPJPN2005-2025 Untuk RPJMN2020-2024 (Tahap IV) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dengan tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"

Jadi Keterkaitan Visi RPJPN (2000-2025) dengan visi RPJMD (2018-2023) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.2.
Keterkaitan Visi RPJPN dengan RPJMD.



5.5. Keterkaitan Rancangan RPJMN Teknokratik 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024 yang memiliki tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan". Tema ini mengarah pada arahan RPJPN tahap terakhir yakni tahapan keempat yakni "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Adapun isu strategis pembangunan terdiri dari: 1) Pembangunan Antar Wilayah Masih Timpang , 2) Pusat Pertumbuhan Wilayah Masih Belum Optimal , 3) Pelayanan Dasar Belum Optimal , 4) Daya Saing Daerah Relatif Masih Rendah , 5) Pemanfaatan Ruang dan Urbanisasi Kurang Terkendali. Arah kebijakan umum pembangunan kewilayahan yaitu:

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
3. Peningkatan konektivitas antar-wilayah
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN)
5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)

6. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah
8. Peningkatan kemudahan perizinan
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah

Pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu:

1). Strategi pertumbuhan ekonomi wilayah
- Mencapai target pertumbuhan melalui **peningkatan daya saing wilayah**
- Peningkatan daya saing wilayah dicapai melalui:
  - pengembangan **pusat-pusat pertumbuhan wilayah strategis** yang membentuk **koridor pertumbuhan ekonomi** (PKN, KEK, KI, KSPN, Megapolitan, dsb)
  - pengembangan **sektor/komoditas/kegiatan unggulan** yang terkoneksi dengan koridor ekonomi nasional

2). Strategi pemerataan wilayah, melalui: 1) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata, 2) Meningkatkan daya beli melalui distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang (koridor pemerataan).

Ada pun pokok-pokok pengembangan wilayah dengan menetapkan:
- Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024 yaitu:
  - ✓ Pertanian, kehutanan, perikanan.
  - ✓ Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil
  - ✓ Konstruksi
- Tema Pembangunan Wilayah Sulawesi:
  - ✓ Pusat Lumbung pangan (padi, jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan.
- Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:
  - ✓ Pengembangan Kawasan metropolitan Mamminasata dan rencana pengembangan kawasan metropolitan Bimindo.
  - ✓ Operasionalisasi dan peningkatan investasi KEK Bitung
  - ✓ Peningkatan investasi di KEK Palu, KI Bantaeng, KI Morowali, dan KI Konawe.
  - ✓ Pengembangan Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa.

Exercise Strategi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Sulawesi tahun 2020-2024: 1) Mendorong kerja sama antar daerah dan terbentuk serta beroperasinya kelembagaan regional pada kawasan metropolitan (Mamminasata dan Bimindo), KSPN Wakatobi, KSPN Bunaken, dan KSPN Tana Toraja, KEK/KI (a.l. KEK Palu, KEK Bitung, KI Morowali, KI Konawe, KI Bantaeng), serta pusat pertumbuhan lainnya. 2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan prioritas anggaran pada: SPM bidang pendidikan (peningkatan APM SMP) dan SPM bidang kesehatan (peningkatan pelayanan kesehatan ibudan penurunan stunting) serta meningkatkan layanan kesehatan anak, terutama di provinsi Gorontalo, Sultra, danSulbar. 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi (perluasan basis pajak dan retribusi daerah, khususnya PBB P3 non perkotaan dan PBB P2) dan intensifikasi (administrasi perpajakandaerah) 4). Optimasi pemanfaatan APBD untuk belanja modal produktif(Infrastruktur strategis) 5). Meningkatkan ketersediaan ASN dan meningkatkan kualitas kompetensibidang perikanan, pertanian, pariwisata, danindustri. 6). Memperbaiki distribusi ASN bidang pelayanan dasar kesehatan (tenagamedis) dan Pendidikan (tenaga guru danpendidik) 7). Mendorong kolaborasi multipihak (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas), antara lain melalui kewirausahaan, dan keterkaitan aktivitas ekonomi terutama di perdesaan nontertinggal 8). Meningkatkan iklim investasi melalui pengurangan perda (aturan) yang berimplikasi pada ekonomi berbiaya tinggi serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP danOSS 9. Meningkatkan pelaksanaan good governance di level pemerintahan daerah(Opini keuangan BPK, Penilaian Penyelenggaraan PemerintahanDaerah) 10).Meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran 11).Mendorong tercipta dan dilaksanakannya inovasi daerah sesuai kebutuhandan potensi daerah. Hal ini sejalan dengan Misi RPJMD Sulawesi Selatan yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Tabel V.4.
Kawasan Strategis dan Sektor Unggulan Perencanaan Pembangunan Nasional Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024

No	Kawasan Strategis	Sektor Unggulan
1	Kawasan Manado Sekitarnya (PKN, Metropolitan, KEK, KI) dan KSN,	Perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan, tanaman pangan, panas bumi
2	Kawasan Dumoga- Kotamubago dan Sekitarnya (PKW)	Tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, panas bumi

No	Kawasan Strategis	Sektor Unggulan
3	Kawasan Gorontalo (PKN, PKSN, PKW, KSN)	Tanaman pangan, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata panas bumi
4	Kawasan Marisa	Tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan
5	Kawasan Toli-toli dan Sekitarnya (PKSN, PKW)	Pertambangan, perkebunan, perikanan, tanaman pangan, pariwisata
6	Kawasan Poso dan Sekitarnya (PKW)	Tanaman pangan, perikanan, pariwisata, perkebunan, industri
7	Kawasan Kolonedale dan Sekitarnya (PKW, KI)	Tanaman pangan, perikanan, pariwisata, perkebunan, agroindustry, pertambangan, industri
8	Kawasan Palu dan Sekitarnya (PKN, KSN, KEK, KI)	Pertambangan, perikanan, industri, tanaman pangan, perkebunan, pariwisata, panas bumi
9	Kawasan Mamuju dan Sekitarnya (PKN)	Perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, agroindustry, perikanan, minyak dan gas bumi
10	Majene	-
11	Kawasan Asesolo/Kendari	Agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, industri, apriwisata
12	Kawasan Kapolimu-Patikala Muna-Buton (KSPN, PKW)	Agroindustri, pertambangan, perikanan, tanaman oangan perekbunan, kehutanan, pariwisata, minyak dan gas bumi
13	Kawasan Mowedong/Kolaka (PKW)	Agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, tanaman pangan
14	Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar)	Pariwisata, industri, tanaman pangan, agroindustri, perikanan
15	Kawasan Palopo dan Sekitarnya	Pariwisata, perekbunan, tanaman pangan, perikanan, pertambangan
16	KAwasan Bulukumba-Watampone	Tanaman pangan, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, perdagangan, industri
17	Kawasan Pare-pare dan Sekitarnya	Agroindustri, tanaman pangan, perikanan, perkebunan

Berdasarkan uraian di atas maka target makro pembangunan nasional untuk wilayah Sulawesi berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi Berdasarkan Asumsi Skenario Moderat adalah sebesar 6,71-7,01 %
2. Tingkat inflasi yaitu 3,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu: 4,97-4,74 %
4. Tingkat Kemiskinan: 10,32-10,26 %

Konsistestensi dokumen RPJMD Sulawesi Selatan terhadap rancangan RPJMN Teknokratis dapat dilihat Secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel V.5.
Keterkaitan dokumen RPJMD Sulawesi Selatan terhadap Rancangan RPJMN Teknokratis 2020-2024

No	Indikator	Target Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	Target RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,71-7,01 %	7,8-8,2
2	Tingkat inflasi	3,0 %	3,0-1,0
3	Tingkat Pengangguran terbuka	4,97-4,74 %	4,37
4	Tingkat Kemiskinan	10,32-10,26 %	7,87

5.6. Keterkaitan Target Kinerja RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Visi secara harfiah berarti '*melihat*', sehingga menggambarkan kemampuan untuk melihat kedepan, mengisyaratkan orientasi ke masa depan. Jadi visi merupakan impian sesuatu yang belum terwujud dan kemampuan melukiskan impian yang menarik tersebut agar bias dilihat orang lain, sehinggamengandung arti standar pencapaian sukses, dan cita-cita. Kehadiran visi RPJMD (2018-2023) yang menjadi visi Gubernur saat ini adalah merupakan tahapan akhir dari pencapaian visi RPJPD, yang diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan memperkokoh kesatuantim kerja agar energi yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen terbentuk.

Visi RPJPD (2000-2025) adalah: "*Wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan Kemandirian Lokal yang bernafaskan keagamaan*": Dalam visi ini kata "Wilayah Terkemuka di Indonesia" merepresentasikan Sulawesi Selatan sebagai suatu propinsi yang dapat menjadi 10 besar di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan indeks pembangunan manusianya. Wilayah terkemuka tersebut akan direalisasi dengan menggunakan pendekatan pembangunan yakni "Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan".

Pendekatan kemandirian lokal yang diakomodasi dari variabel Fisika (Variabel lokal). Intinya adalah pembangunan suatu "tatanan" harus menjadi bagian dari "tatanan" lainnya. Dengan kata lain output suatu tatanan bisa berguna atau dibutuhkan oleh tatanan lainnya, dengan demikian akan tercipta koneksitas antar tatanan baik dalam

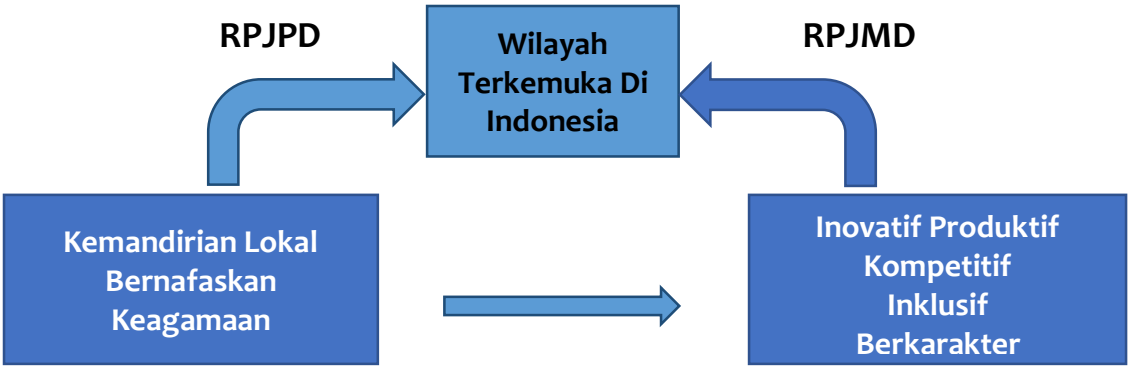
maupun dengan luar negeri. Sedangkan kata "bernafaskan keagamaan" ditambahkan pada pendekatan ini dimaksudkan untuk mempertegas sikap kita bahwa pembangunan yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan selalu sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang religius**.**

VISI RPJPD 2005 – 2025
"Wilayah Terkemuka di Indonesia melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan"

VISI RPJMD 2018 – 2023
"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter"

Visi RPJMD 2018-2023 adalah "*Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan Berkarakter" yang merupakan* penjabaran dari visi RPJPD, sehingga target yang dituju adalah menjadikan Sulawesi Selatan sebagai "wilayah terkemuka di Indonesia". Jadi Keterkaitan Visi RPJPD (2005-2025) dengan visi RPJMD (2018-2023) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.3.
Keterkaitan Visi RPJPD dengan RPJMD



Keterangan:

1. Visi RPJMD (2018-2023) disusun dengan mengacu pada visi RPJPD (2000-2025) yakni untuk mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi suatu "Wilayah Terkemuka di Indonesia".
2. Pendekatan "kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan" sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam RPJPD untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah Terkemuka di Indonesia akan di implementasikan dalam RPJMD berupa upaya yang inovatif, produktif, kompetitif dilakukan secara inklusif, dan

tetap menjaga karakter Sulawesi Selatan. Dengan kata lain dalam visi RPJMD hanya menegaskan dan mengelaborasi pentinya pendekatan yang tepat sesuai nafas kemandirian local untuk merealisasivisi RPJPD menjadi wilayah terkemuka di Indonesia.

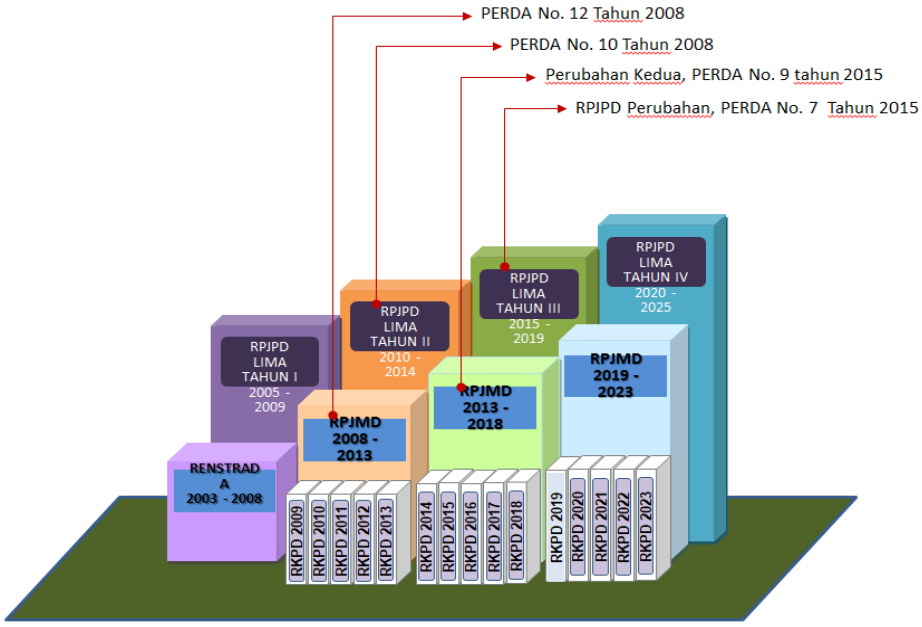
Misi **Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025:**

1. Mewujudkan Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan.
2. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar
3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif
4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan
5. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional.

Misi **Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023:**

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Secara grafik dapat dilihat hubungan/Penjabaran RPJPD dan RPJMD dapat dilihat berikut ini:



Keterkaitan Misi RPJPD terhadap RPJMD secara lengkap dapat dilihat pada table berikut:

Tabel V.6.
Keterkaitan Misi RPJPD terhadap RPJMD

No	Misi RPJPD	Misi RPJMD
1	Mewujudkan Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.
2	Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar	
3	Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
4	Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan	- Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif - Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
5	Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

5.7 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsis Sulawesi Selatan 2005-2025

Pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada lima tahun tahap ketiga (2015-2019) memprioritaskan loncatan dalam perekonomian, khususnya dalam capaian PDRB perkapita, yang dengan itu capaian berbagai aspek pembangunan lainnya diharapkan memposisikan Sulawesi Selatan sebagai pilar pembangunan nasional dan simpul jejaring dalam dinamika perubahan kawasan timur Indonesia atau bahkan luar Jawa. Ini merupakan konsekuensi logis dari capaian

pembangunan tahap sebelumnya yang berhasil mendorong perbaikan kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya umum yang diprioritaskan pada pembangunan lima tahun ketiga berkisar pada pengembangan kehidupan religious dan kerukunan antar dan intra ummat beragama, dimana upaya ini merupakan substansi landasan bagi perubahan yang diamanahkan oleh visi RPJPD ini. Upaya umum lainnya adalah meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global; meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum; meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa; dan meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Pembangunan lima tahun tahap keempat merupakan tahap terakhir dari RPJPD 2005-2025. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan pada lima tahun tahap ketiga (2015-2019)/ RPJMD tahun 2013-2018 yang fokusnya pada loncatan dalam perekonomian dan posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Lima tahun keempat (2018-2023) adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari periode sebelumnya. Prioritas ini sekaligus untuk mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Upaya umum yang diprioritaskan pada pembangunan lima tahun keempat (2020-2024) difokuskan dalam mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan, menguatkan daya saing daerah dan kemandirian lokal, meningkatan kualitas pelayanan umum, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih, dan menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan spiritual dan pengamalan agama. Pelaksanaan upaya-upaya umum ini diletakkan dalam prinsip untuk mengejar target-target sasaran yang belum tercapai dan mendorong keseimbangan berbagai aspek dalam komposisi target kinerja sasaran. Dengan demikian, pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 yang fokus **pada pencapaian pembangunan yang inklusif yang merupakan penjabaran** dari arahan RPJPD 2005-2025 tahap keempat yang focus pada **pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan. Adapun indicator pembangunan Sulawesi Selatan yang inklusif adalah:**

Tabel V.7.
Indiaktor Pembangunan Inklusif

Indikator Makro	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Kondisi Akhir (Tahun2023)
PDRB Perkapita (Juta Rp)	48,21	82,13
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,23	7,9-8,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	4,37

Indikator Makro	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Kondisi Akhir (Tahun2023)
Indeks Gini	0,429 (sedang)	0.347 (rendah)
Angka Kemiskinan (%)	9,48	7,5
IPM	70,34	74,01

Adapun keterkaitan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 terhadap Sasaran RPJMD periode 2018-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel V.8.
Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2018-2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran Pokok RPJD	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2024	Tujuan / Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Sela-tan sebagai dampak dari keterlibatan se-luruh pihak (pemerin-tah, swasta dan masya-rakat) pada berbagai level wilayah (kabupa-ten/kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1)	Indeks Pembangunan Manusia	74.71	Meningkatkankualitas SDM secarainklusif	Indeks Pembangunan Manusia	74,01
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memiliki mentalitas/karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun	7,99 (Tahun	Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun	8,66
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,47		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,39
Meningkatnya keber-dayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan ke-sehatan yang berkuali-tas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan.	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	71,27	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	70,43

Sasaran Pokok RPJD	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2024	Tujuan / Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
(S3)					
Meningkatnya keter-serapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secara lokal, nasional dan internasional. (S4)	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50-2,70	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25
Meningkatnya kulitas kehidupan pada insti-tusi keluarga, relasi gender dan perlin-dungan terhadap anak. (S6)	Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	IPG Meningkat	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG	94,06
		IKA Menurun		IDG	80,13
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerap-kan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif (clean and good governance) (S 19)	Opini Laporan Keuangan	WTP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan	Nilai SAKIP	AA
				Opini Laporan Keuangan	WTP
Berkembangnya sistem pe-layanan yang efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	B

Sasaran Pokok RPJD	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2024	Tujuan / Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat (S 21)	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	75-80	Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	PDRB Perkapita (Rp Juta)	82,13
	Gini Ratio	0,36	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini	0,347
				Indeks Ketimpangan Williamson	0,539
Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S22)	Angka Kemiskinan dan persen PMKS yang terlayani	6,00-5,20	Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah	Angka Kemiskinan (%)	7,5
Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerata-an pembangunan antar-daerah (sub-wilayah) (S 27)	Persentase kemantapan jalan, kapasitas/kualitas baik, dan konektivikasi	91,31	Meningkatnya infrastruktur wilayah	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	8,3
				Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	73

Sasaran Pokok RPJD	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2024	Tujuan / Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai (S 35)	Indeks Mutu Lingkungan yang semakin membaik	3 DAS	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,49
				Potensi Penurunan emisi GRK	2,3

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive;

   Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST, salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani. Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama dengan mengupayakan pencapaian nilai Indeks Reformasi yang saat ini bernilai CC menjadi A pada tahun 2023, dan mempertahankan opini laporan keuangan untuk tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

   Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi dan mencapai opini WTP adalah:

   1. Peningkatan kualitas aparatur
   2. Penataan dan penguatan kelembagaan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misi pemerintah dan pemerintah daerah.
   3. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan keuangan daerah.
   4. Implementasi e-government
   5. Pengembangan inovasi pemerintahan

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar akan ditingkatkan dari nilai D menjadi A. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain:

1. Pengembangan layanan berbasis elektronik
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
3. Pengembangan layanan kesehatan dan kesiagaan bencana
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar
5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan Wajib Pelayanan Dasar.

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat interkoneksivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan;

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sedangkan kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Gambaran kondisi pembangunan wilayah dapat dilihat dari indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.2
Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017
Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bantaeng	7.32
2	Barru	6.48
3	Bone	8.43
4	Bulukumba	6.92
5	Enrekang	6.89
6	Gowa	7.32
7	Jeneponto	8.26
8	Pare-Pare	6.99
9	Luwu	6.79
10	Luwu Timur	3.07
11	Luwu Utara	7.60
12	Makassar	8.23
13	Maros	6.81
14	Palopo	7.19

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi
15	Pangkajene Kepulauan	6.60
16	Pinrang	7.86
17	Kepulauan Selayar	7.61
18	Sidenreng Rappang	7.11
19	Sinjai	7.23
20	Soppeng	8.34
21	Takalar	7.39
22	Tana Toraja	7.50
23	Toraja Utara	8.22
24	Wajo	5.22
SULAWESI SELATAN		**7.23**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Sebaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi sama maupun di atas provinsi sebanyak 13 kabupaten/kota, meliputi: Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Jeneponto, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara;
2. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah provinsi sebanyak 11 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Palopo, Kabupaten Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Maros, Pangkejene Kepulauan, Sidenreng Rappang, dan Wajo.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tumbuh paling rendah sebesar 3,07 persen, dan tertinggi adalah Kabupaten Bone dengan pertumbuhan sebesar 8,43 persen.

Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan pertumbuhan PDRB khususnya pada beberapa sector utama dan peningkatan *indeks aksesibilitas infrastruktur*. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

1. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
3. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat

pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; dan

4. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pedoman untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

3. Memperkuat dukungan sarana-prasarana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan kordinasi penanggulangan kemiskinan;

RTRWN dan RTRWP menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang/Watansawitto, kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru, kawasan perkotaan Benteng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Merujuk pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya yang meliputi: Kawasan Makassar dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, Kawasan Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, dan Kawasan Palopo dan Sekitarnya.

Tabel 6.2
Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Gowa	8.4	6.14	7.32
2	Makassar	4.6	10.59	8.23
3	Maros	11.1	6.85	6.81
4	Takalar	9.2	4.93	7.39
5	Pangkajene Kepulauan	16.2	7.05	6.60
6	Bantaeng	9.7	5.23	7.32
7	Bulukumba	8.0	3.73	6.92
8	Jeneponto	15.4	3.31	8.26
9	Kepulauan Selayar	13.3	2.34	7.61
10	Sinjai	9.2	4.53	7.23
11	Barru	9.7	5.60	6.48
12	Enrekang	13.2	1.87	6.89
13	Pare-Pare	5.7	6.47	6.99
14	Pinrang	8.5	4.41	7.86
15	Sidenreng Rappang	5.3	3.17	7.11
16	Bone	10.3	4.55	8.43
17	Soppeng	8.3	2.71	8.34
18	Wajo	7.4	3.06	5.22
19	Luwu	14.0	4.78	6.79
20	Luwu Timur	7.7	2.58	3.07
21	Luwu Utara	14.3	3.31	7.60
22	Palopo	8.8	10.96	7.19
23	Tana Toraja	12.6	5.60	7.50
24	Toraja Utara	14.4	4.24	8.22
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

Merujuk pada persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada tiap wilayah pengembangan, maka persebaran persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi sebanyak 12 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Makassar, Palopo, Kabupaten Gowa, Bulukumba, Luwu Timur, Sidenreng Rappang, Pinrang, Sinjai, Soppeng, Takalar, dan Wajo;

2. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi sebanyak 12 kabupaten, meliputi: Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, Tana Toraja dan Toraja Utara.
3. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada tahun 2017 sebesar 16,2 persen dan persentase penduduk miskin terkecil terdapat di Kota Makassar.
4. Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran terbuka di bawah provinsi sebanyak 18 kabupaten, meliputi: Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo;
5. Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran terbuka di atas provinsi sebanyak 6 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Makassar, Palopo, Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan.
6. Persentase pengangguran terbuka terbesar terdapat di Kota Palopo sebesar 10,96 persen dan persentase pengangguran terbuka terkecil terdapat di Kabupaten Enrekang.

Perkuatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan mengoptimalkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunanan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat.;
2. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan industry yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman.

4. Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi merupakan salah satu variable yang bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sector jasa dan industry yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industry;
2. Perluasan dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas serta penguatan kompetensi keahlian di bidang aplikatif untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3. Penyediaan pendidikan khusus melalui pengembangan model pembelajaran mandiri dengan system *mobile schooling*;
4. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional sekolah
5. Peningkatan akses pemerataan pendidikan

5. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

   Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan melakukan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi yang akan dilaksanakan melalui strategi:

   1. Memperkuat system perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan mengoptimalkan upaya pencegahan;
   2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
   3. Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana parasarana olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi olah raga;

Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa terobosan telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini berbagai upaya dan terobosan tersebut belum cukup untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan peningkatan upaya promotof dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak,

penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.

Olahraga merupakan salah satu upaya yang terkait dengan peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Olahraga selain berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga merupakan modal sosial dengan membentuk watak bangsa yang akan diperoleh melalui strategi penumbuhan budaya olehraga dan prestasi.

Tabel 6.3
Rasio Sarana Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Sarana Kesehatan	Provinsi Sulawesi Selatan		Nasional	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
Rasio Puskesmas per Kecamatan	451	1,47	9.825	1,36
Persentase RS Terakreditasi	56	57,14	1.481	53,47
Persentase Posyandu Aktif	5.400	55,65	164.867	56,57
Rasio RS per satuan penduduk	100	0,012	2.776	0,011
Rasio Tempat Tidur Per 1.000 Penduduk	13.162	1,51	305.055	1,16

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017, Kemenkes RI 2018

Tabel 6.4
Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Sarana Kesehatan	Provinsi Sulawesi Selatan		Nasional	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
Tenaga Kesehatan	32.076	3,69	836.466	3,19
Tenaga Penunjang Kesehatan	7.731	0,89	307.208	1,17
Persentase Puskesmas yang memiliki 5 Jenis tenaga kesehatan	160	35,48	2.641	26,89
Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di RS	2.231	0,26	55.924	0,21
Persentase RS Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	4	44,44	180	54,22

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017, Kemenkes RI 2018

Tabel 6.5
Rasio Pelayanan Kesehatan Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Sarana Kesehatan	Provinsi Sulawesi Selatan		Nasional	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
% cakupan kunjungan ibu hamil K4	152.087	81,27	4.606.215	86,57
% ibu bersalin ditolong nakes di fasilitas kesehatan	144.995	81,17	4.222.506	83,14
% Puskesmas yang menyelenggarkan pelayanan kesehatan lansia	145	32,37	2.432	24,84
Cakupan kunjungan neonatal	149.424	87,83	4.448.532	91,96

Sumber: Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017, Kemenkes RI 2018

Gambaran pembangunan kesehatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah berada di atas rata-rata kinerja pembangunan nasional. Permasalahan yang masih harus menjadi perhatian di Sulawesi Selatan antara lain adalah belum optimalnya peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada RS di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:

a) Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
b) Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.

7. Meningkatkan keamanan daerah melalui penyediaan fasilitas pengembangan kebudayaan daerah, peningkatan kerukunan beragama dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta peningkatan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan;

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pencapaian strategi ini adalah:

a) Peningkatan Pendidikan karakter dan pekerti guna sebagai upaya membentengi pemuda dari paham radikalisme, serta pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan jam pelajaran agama dan menumbuhkan gerakan membaca Al-Quran di sekolah sebagai kurikulum lokal;
b) Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang tidak bertentangan dengan norma agama

8. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat;

   Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurungkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas Rumput Laut, Kakao, dan Jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, potensi pengembangan dan pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam di Kabupaten/Kota dengan sebaran sebagai berikut :

   1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
   2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar;
   3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;

4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;

Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging local guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka Pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan system pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumber daya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meingkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggul di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat peneilitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

9. Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang difokuskan pada

pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusf, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Teresterial Berkelanjutan.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan meliputi:

a) Permukiman dengan akses layanan sanitasi yang kurang memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak;
b) Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
c) Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyelematan Danau Prioritas Nasional dan Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;
d) Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
e) Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;

f) Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan sumber daya hayati laut.

10. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya hayati, non hayati, dan jasa-jasa lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumberdaya pesisir atau jasa lingkungan secara terarah dan berkelanjutan selain dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi kelautan, juga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya, degradasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar gugus kepulauan merupakan akibat dari pemanfaatan sumberdaya atau jasa lingkungan yang tidak terarah dan tidak berkelanjutan.

Pemanfataan sumber daya pesisir dan kelautan sesuai dengan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan hilirisasi komoditas ungggulan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim yang diiringi dengan upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

a) Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pengembangan potensi kawasan pessir untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, peningkatan produksi kelautan dan perikanan;
b) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir;
c) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
d) Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

Meperhatikan penjabaran keterkaitan antara gambaran pembangunan Sulawesi Selatan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci pada tabel berikut.

Tabel 6.6

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan

VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan;	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive
	2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar	
Misi 2 Mewujudkan Insfrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel		
Meningkatkan infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas insfrastruktur	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan
MISI 3 Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif		
Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	1. Meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;	Memperkuat dukungan sarana prasarana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan
	2. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	
MISI 4 Mewujudkan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter		
Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi
	2. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan

VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
	3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ;	Meningkatkan keterpenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan serta meningkatkan kualitas sarana parasarana olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi olah raga
MISI 5 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam.	Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dengan dukungan sarana dan prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pedapatan masyarakat
		Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
	2. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan lima tahun Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
Tema: Memacu Pembangunan Daerah berkualitas untuk Mewujudkan Pemerataan **Arah Kebijakan:** 1. Penataan dan penguatan kelembagaan 2. Pengembangan dan implementasi e-government; 3. Membangun konektivitas untuk pemerataan pembangunan; 4. Pengembangan sector unggulan dan potensi ekonomi wilayah; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Meningkatkan kapasitas	**Tema:** Akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta SDA yang berdaya saing bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan **Arah kebijakan:** 1. Pengembangan kompetensi sumberdaya aparatur; 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar; 3. Membangun konektivitas untuk pemerataan pembangunan; 4. Pengembangan sector unggulan dan potensi	Tema: Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan infrastruktur Arah kebijakan: 1. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah; 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar 3. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya; 4. Akselerasi pertumbuhan	Tema: Penguatan Inovasi daerah dan pemantapan hilirisasi pengolahan berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Arah kebijakan: 1. Pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar; 3. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya; 4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan	Tema: Pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter Arah kebijakan: 1. Pengembangan layanan berbasis elektronik; 2. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar; 3. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya; 4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Memperkuat system perlindungan anak dan perempuan dari berbagai

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia dan mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan Pendidikan karakter dan pekerti serta pengembangan nilai-nilai keagamaan; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda; 10. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi 11. Peningkatan kualitas tata kelola kawasan	ekonomi wilayah; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia dan mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan tokoh agama,	ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Memperkuat system perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta	hilirisasi komoditas unggulan; 5. Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan; 6. Memperkuat system perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; 7. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepedulian sosial dan	tindak kekerasan; 7. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat; 8. Pemantapan peran pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepedulian sosial dan kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industri 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; 11. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
hutan; 12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industry; 10. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi; 11. Peningkatan kualitas tata kelola kawasan hutan ; 12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat; 8. Peningkatan akses dan peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industry; 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; 11. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;	kebudayaan daerah serta kepemimpinan dalam pembangunan 9. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sda serta pengembangan industry; 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; 11. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; 12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
		12. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.		

Tabel 6.8

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter								
1.	**Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasi-kan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif.	1. Penataan dan penguatan kelembagaan 2. Pengembangan dan implementasi e-government; 3. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 4. Pengembangan baruga layanan public	Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan ber-akuntabilitas	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan yang responsive terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas	Pemantapan pelayanan yang responsive terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas
2.	**Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel**							
	Meningkatkan infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuatan inter-koneksivitas pusat-pusat pertumbuhan	Kordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam perbaikan infrastruktur wilayah terisolir	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi	Pembangunan pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder serta bandara	Pembangunan infrastruktur energi terbarukan	Pembangunan infrastruktur sumberdaya air

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
			ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan.					
3.	**Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif**							
	Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	Meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Memperkuat dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan kordinasi penanggulangan kemiskinan	Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis data akurat sumber-sumber pertumbuhan pada wilayah tersebut serta peletakan dasar infrastruktur pendukung pertumbuhan	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru	Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional	Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Pemantapan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah						
4.	**Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**							
	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri	Peningkatan kualitas pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan	Penguatan pendidikan vocasional dalam kerangka link and mach dengan dunia	Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah umum dalam	Penguatan pendidikan vocasional untuk menghasilkan tammatan yang	Pemantapan pendidikan vocasional dalam link and match dengan dunia usaha dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
			serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi dan meningkatkan pembinaan pemuda	tinggi negeri bereputasi	usaha dan industri	meluluskan tammatan pada seleksi perguruan tinggi negeri bereputasi	bisa menciptakan lapangan kerja	industri serta menghasilkan tammatan yang bisa menciptakan lapangan kerja
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak dan peningkatan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Peningkatan upaya eliminasi dan penghapusan segala bentuk kekerasan dan praktek-praktek yang membahayakan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	Pemantapan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak serta akselerasi upaya perlindungan anak dan	Pemantapan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak serta akselerasi upaya perlindungan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
							perempuan	anak dan perempuan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan keterpenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan serta meningkatkan sarana parasarana olah raga serta peningkatan pembinaan dan pendidikan peserta keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi olah raga	Pembangunan sarana prasarana kesehatan dalam memperlancar pelayanan kesehatan khususnya ketersediaan rumah sakit regional dan sarana kesehatan mobile pada lokasi kepulauan	Perbaikan pelayanan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan	Akselerasi pembangunan rumah sakit regional	Akselerasi pembangunan rumah sakit regional	Pemantapan fungsi rumah sakit regional dalam memperlancar pelayanan kesehatan secara merata antar wilayah
5.	**Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**							
	Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berdaya saing sesuai daya	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian	Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam	Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian,	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis	Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya	Pemantapan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya	Pemantapan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dukung dan daya tampung lingkungan hidup	berbasis sumberdaya alam	dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat	peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertmabngan) secara ekologis	sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis	alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis	alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis	alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Mengintegrasikan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upaya –upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk keterpeliharaan kualitas lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon	Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon	Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon	Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon

6.3 Pembangunan Berbasis Pengwilayahaan Komoditi

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa dokumen rencana tata ruang daerah dan dokumen rencana pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa dokumen rencana tata ruang daerah merupakan arahan spasial bagi pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Arahan spasial pembangunan Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029 yang operasionalisasinya kedalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah serta pengembangan kawasan strategis provinsi secara merata dan berkeadilan dengan mengacu pada struktur ruang dan pola ruang. Merujuk pada kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan diarahkan ke dalam 5 wilayah pengembangan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya yang meliputi: Kawasan Makassar dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, Kawasan Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, dan Kawasan Palopo dan Sekitarnya.

Pembangunan suatu kawasan regional yang berbasis wilayah, secara makro seyogyanya memperhatikan unsur potensi dan fungsi terhadap suatu kawasan (daerah, provinsi) sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari pembangunan berdimensi kawasan, sebab perencanaan yang kurang mengabstrasikan fungsi dan potensi suatu kawasan akan berdampak pada hasil yang tidak berkesinambungan.

Mengelabotasi potensi sumberdaya yang dimiliki sebagai basis kekuatan dasar suatu wilayah adalah keniscayaan untuk memotret kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan potensi sumber daya alam yg dimiliki terkhusus disektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan mengalami pasang surut perkembangan akibat arah dan orientasi kebijakan yang berubah ubah. Kelemahan tersebut tercermin dari produksi yang susah berswasembada dan mutu yang cenderung tidak dapat berkompetisi dipasar Sulawesi Selatan yang didukung sumber daya alam melimpah, memiliki keunggulan komoditi disektor pertanian dan perkebunan (beras, jagung, kakao, Kelapa, cengkeh, hortikultura, disektor perikanan dan kelautan (perikanan tangkap dan

budidaya serta rumput laut) yang selama ini belum tergarap secara maksimal sehingga belum memberikan comparatif dan competitif advantage yang bernilai tambah melalui konsep petik, olah, jual.

Oleh karenanya diperlukan landasan konsepsional yang terpadu dengan pola operasional dan pengembangan nilai terhadap komoditi unggulan sulawesi selatan baik pada aspek sub sistrm on farm agribisnis maupun pada aspek pengolahan lebih lanjut dengan produk intermediate dan final product sehingga nilai tambah terbesar dari komoditas unggulan kita dinikmati oleh bangsa ini. Pada subsistem agribisnis hulu dan hilir, perlunya penerapan terpadu undang sistem resi gudang (SRG) agar terjadi perlindungan terhadap petani dan penguatan ekonomi di sentra sentra agribisnis dapat berkelanjutan

6.3.1. Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi isu kesenjangan, baik kesenjangan secara ekonomi maupun sosial. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Sementara kesenjangan sosial ditunjukkan dengan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingginya kesenjangan ekonomi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan pengangguran, maka distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan wilayah perlu untuk mendapatkan perhatian yang seksama, sehingga berdampak pada semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Gambaran kondisi pembangunan wilayah dapat dilihat dari indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.9
Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2017
Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bantaeng	9.7	5.23	7.32
2	Barru	9.7	5.60	6.48
3	Bone	10.3	4.55	8.43
4	Bulukumba	8.0	3.73	6.92
5	Enrekang	13.2	1.87	6.89
6	Gowa	8.4	6.14	7.32
7	Jeneponto	15.4	3.31	8.26
8	Pare-Pare	5.7	6.47	6.99

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
9	Luwu	14.0	4.78	6.79
10	Luwu Timur	7.7	2.58	3.07
11	Luwu Utara	14.3	3.31	7.60
12	Makassar	4.6	10.59	8.23
13	Maros	11.1	6.85	6.81
14	Palopo	8.8	10.96	7.19
15	Pangkajene Kepulauan	16.2	7.05	6.60
16	Pinrang	8.5	4.41	7.86
17	Kepulauan Selayar	13.3	2.34	7.61
18	Sidenreng Rappang	5.3	3.17	7.11
19	Sinjai	9.2	4.53	7.23
20	Soppeng	8.3	2.71	8.34
21	Takalar	9.2	4.93	7.39
22	Tana Toraja	12.6	5.60	7.50
23	Toraja Utara	14.4	4.24	8.22
24	Wajo	7.4	3.06	5.22
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sebaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi sama maupun di atas provinsi sebanyak 13 kabupaten/kota, meliputi: Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Jeneponto, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara;
2. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah provinsi sebanyak 11 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Palopo, Kabupaten Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Maros, Pangkejene Kepulauan, Sidenreng Rappang, dan Wajo.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tumbuh paling rendah si Sulawesi Selatan sebesar 3,07 persen, dan tertinggi adalah Kabupaten Bone dengan pertumbuhan sebesar 8,43 persen.

b. Kemiskinan

Persebaran persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan Tahun 2017, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi sebanyak 12 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Makassar, Palopo, Kabupaten Gowa, Bulukumba, Luwu Timur, Sidenreng Rappang, Pinrang, Sinjai, Soppeng, Takalar, dan Wajo;
2. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi sebanyak 12 kabupaten, meliputi: Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 16,2 persen dan persentase penduduk miskin terkecil terdapat di Kota Makassar.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambaran kondisi pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran terbuka di bawah provinsi sebanyak 18 kabupaten, meliputi: Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo;
2. Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran terbuka di atas provinsi sebanyak 6 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Makassar, Palopo, Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan.

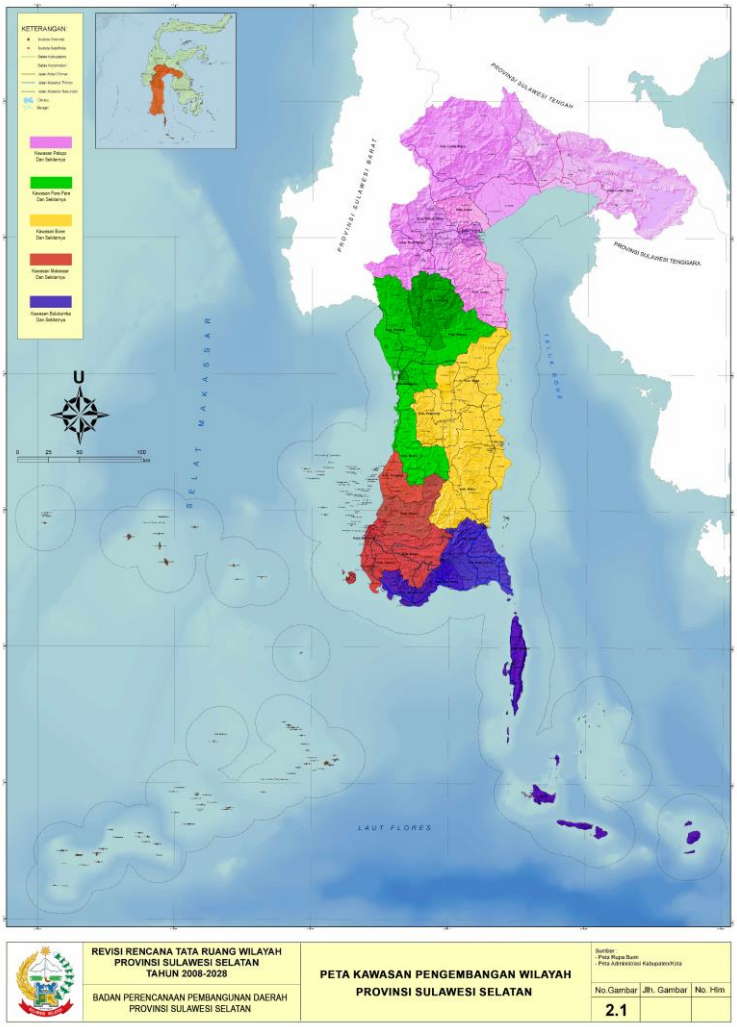
Persentase pengangguran terbuka terbesar terdapat di Kota Palopo sebesar 10,96 persen dan persentase pengangguran terbuka terkecil terdapat di Kabupaten Enrekang.

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan perkembangan wilayah dengan memperhatikan keterkaitan fungsional antar wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada Sistem Nasional dengan mempertimbangkan efektivitas pengelolaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan 5 (lima) Kawasan strategis Nasional, 4 (empat) Kawasan Andalan, dan 4 (empat) Kawasan Andalan Laut, maka untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan keterkaitan fungsional dan efetivitas pengelolaan pembangunan, maka pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibagi dalam 5 (lima) Wilayah Pengembangan, yaitu: 1) Wilayah Pengembangan Makassar dan Sekitarnya; 2) Wilayah

Pengembangan Bulukumba dan Sekitarnya; 3) Wilayah Pengembangan Watampone dan Sekitarnya; 4) Wilayah Pengembangan Palopo dan Sekitarnya; dan 5) Wilayah Pengembangan Parepare dan Sekitarnya.

Gambar 6.1
Peta Kawasan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Perda Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRWP Sulsel

Merujuk pada gambaran kondisi pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indicator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, maka kondisi pembangunan di Sulawesi Selatan berdasarkan wilayah pengembangan, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kawasan Makassar dan Sekitarnya

Kondisi pembangunan di wilayah Kawasan Makassar dan Sekitarnya menunjukkan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin yang ditandai dengan persentase penduduk miskin yang masih lebih besar daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan. Kabupaten yang sangat memerlukan perhatian pada kawasan

Makassar dan Sekitarnya adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang pertumbuhan ekonominya di bawah Sulawesi Selatan dan persentase penduduk miskin yang jauh di atas Sulawesi Selatan sebesar 16,2 persen. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.10

Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Gowa	8.4	6.14	7.32
2	Makassar	4.6	10.59	8.23
3	Maros	11.1	6.85	6.81
4	Takalar	9.2	4.93	7.39
5	Pangkajene Kepulauan	16.2	7.05	6.60
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

b. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya

Pembangunan di wilayah Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya menunjukkan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin yang ditandai dengan persentase penduduk miskin yang masih lebih besar daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan. Kabupaten yang menunjukkan kinerja pembangunan yang baik adalah Kabupaten Sinjai yang ditunjukkkan dengan pertumbuhan ekonomi sama dengan Sulawesi Selatan dan persentase penduduk miskin dibawah Sulawesi Selatan. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.11

Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bantaeng	9.7	5.23	7.32
2	Bulukumba	8.0	3.73	6.92
3	Jeneponto	15.4	3.31	8.26
4	Kepulauan Selayar	13.3	2.34	7.61
5	Sinjai	9.2	4.53	7.23
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

c. Kawasan Parepare dan Sekitarnya

Kondisi pembangunan di wilayah Kawasan Parepare dan Sekitarnya menunjukkan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut secara umum di bawah Sulawesi Selatan, namun dengan persentase penduduk miskin di bawah Sulawesi Selatan yaitu Kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Pinrang menunjukkan kinerja pembangunan yang baik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi di atas Sulawesi Selatan sebesar 7,86 persen dan persentase penduduk miskin di bawah Sulawesi Selatan sebesar 8,5 persen. Kabupaten yang memerlukan perhatian pada kawasan Parepare dan Sekitarnya adalah Kabupaten Barru dan Kabupaten Enrekang yang pertumbuhan ekonominya di bawah Sulawesi Selatan dan persentase penduduk miskin di atas Sulawesi Selatan. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.12
Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Barru	9.7	5.60	6.48
2	Enrekang	13.2	1.87	6.89
3	Pare-Pare	5.7	6.47	6.99
4	Pinrang	8.5	4.41	7.86
5	Sidenreng Rappang	5.3	3.17	7.11
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

d. Kawasan Watampone dan Sekitarnya

Kondisi pembangunan di wilayah Kawasan Watampone dan Sekitarnya menunjukkan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin yang ditandai dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,3 persen yang masih lebih besar daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan. Kabupaten Soppeng, menunjukkan kinerja pembangunan yang baik pada Tahun 2017 yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi di atas Sulawesi Selatan dan persentase penduduk miskin di bawah Sulawesi Selatan. Sedangkan Kabupaten Wajo, walaupun kinerja pertumbuhan ekonominya di bawah Sulawesi Selatan namun persentase penduduk miskinnya lebih kecil daripada persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.13
Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bone	10.3	4.55	8.43
2	Soppeng	8.3	2.71	8.34
3	Wajo	7.4	3.06	5.22
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

e. Kawasan Palopo dan Sekitarnya

Kondisi pembangunan di wilayah Kawasan Palopo dan Sekitarnya menunjukkan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara, Tana Toraja dan Toraja Utara yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin yang ditandai dengan persentase penduduk miskin yang masih lebih besar daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan. Kabupaten yang sangat memerlukan perhatian pada kawasan Palopo dan Sekitarnya adalah Kabupaten Luwu yang pertumbuhan ekonominya di bawah Sulawesi Selatan sebesar 6,79 dan persentase penduduk miskin di atas Sulawesi Selatan sebesar 14 persen. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.14
Gambaran Kondisi Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Luwu	14.0	4.78	6.79
2	Luwu Timur	7.7	2.58	3.07
3	Luwu Utara	14.3	3.31	7.60
4	Palopo	8.8	10.96	7.19
5	Tana Toraja	12.6	5.60	7.50
6	Toraja Utara	14.4	4.24	8.22
SULAWESI SELATAN		**9.4**	**5.61**	**7.23**

6.3.2. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan ditopang oleh sector pertanian antara lain tanaman pangan, perkebunan, sector perikanan, sector kehutanan, sector pertambangan serta perdagangan dan jasa. Mengacu pada kebijakan dan strategi penataan wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 diarahkan pada:

a. Meningkatkan pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan meningkatkan interkoneksi antar pusat kegiatan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, mengembangkan pusat pertumbuhan baru, mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan;

b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air, dan meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;

c. Mengembangkan kawasan strategis provinsi dengan mengembangkan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi dengan mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah, mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan, dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi, meningkatkan kepariwisataan Provinsi, membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah, dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi rakyat;

d. Memulihkan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*), termasuk ekohidrolika DAS dengan mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana, dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;

e. pengembangan kawasan budidaya dengan mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan, membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk

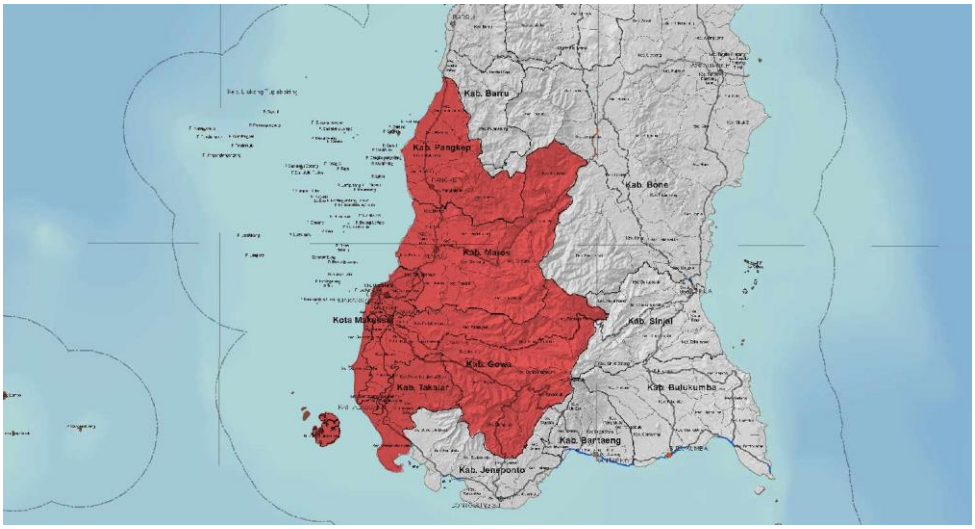
meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana, menumbuh-kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, agrowisata serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditi pertanian unggulan.

Memperhatikan kebijakan penataan ruang yang diamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 dan gambaran kondisi pembangunan pada 5 (lima) wilayah pengembangan di Sulawesi Selatan, maka kebijakan pengembangan wilayah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya yang meliputi:

a. Kawasan Makassar dan Sekitarnya, meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Takalar, Gowa, dan Pangkajene Kepulauan dengan sector unggulan pariwisata, pertanian, industry, agroindustry dan perikanan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

   PKN merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Takalar, sebagian wilayah Kabupaten Gowa, dan sebagian wilayah Kabupaten Maros, sedangkan PKW meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Gambar 6.2
Wilayah Pengembangan Makassar dan Sekitarnya



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Pengembangan wilayah Kawasan Makassar dan sekitarnya pada akhir Tahun 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai kondisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.15

Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2023

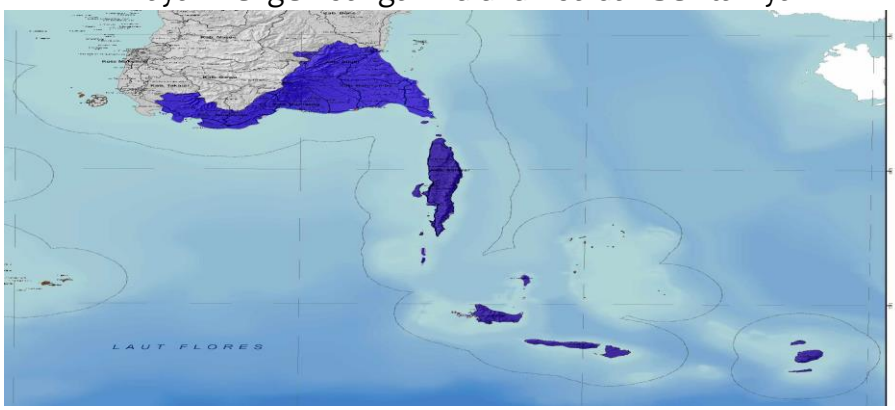
No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Gowa	6,83	5,08	7,3 - 7,7
2	Makassar	3,76	9,23	8.2 – 8,6
3	Maros	8,72	5,66	7,0 -7,4
4	Takalar	7,36	3,30	7,5 – 7,9
5	Pangkajene Kepulauan	12,91	5,75	6.4 – 6,8
SULAWESI SELATAN		**7,50**	**4,37**	**7,2 – 8,2**

Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018

Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka kebijakan pengembangan Kawasan Makassar dan Sekitarnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan perkotaan dengan memperhatikan peran kawasan tersebut sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan MAMMINASATA yang berperan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang disertai dengan upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*) yang antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana, dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, mengingat Kabupaten Maros, Gowa, dan Kabupaten Takalar merupakan wilayah dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

b. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Bantaeng dan Kepulauan Selayar dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, agroindustry, industry, perikanan, dan pariwisata merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba, sedangkan PKL meliputi Benteng dan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng.

Gambar 6.3
Wilayah Pengembangan Bulukumba dan Sekitarnya



Sumber: RTRWP Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Pengembangan wilayah Kawasan Bulukumba dan sekitarnya pada akhir Tahun 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai kondisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.16
Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bantaeng	7,89	5.23	7,2 – 8,0
2	Bulukumba	6,35	3.73	7,0 -7,5
3	Jeneponto	12,54	3.31	8.2 - 8,6
4	Kepulauan Selayar	10,71	2.34	7,6 -8,8
5	Sinjai	7,41	4.53	6,8 -7,2
SULAWESI SELATAN		**7,50**	**4,37**	**7,2 – 8,2**

Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018

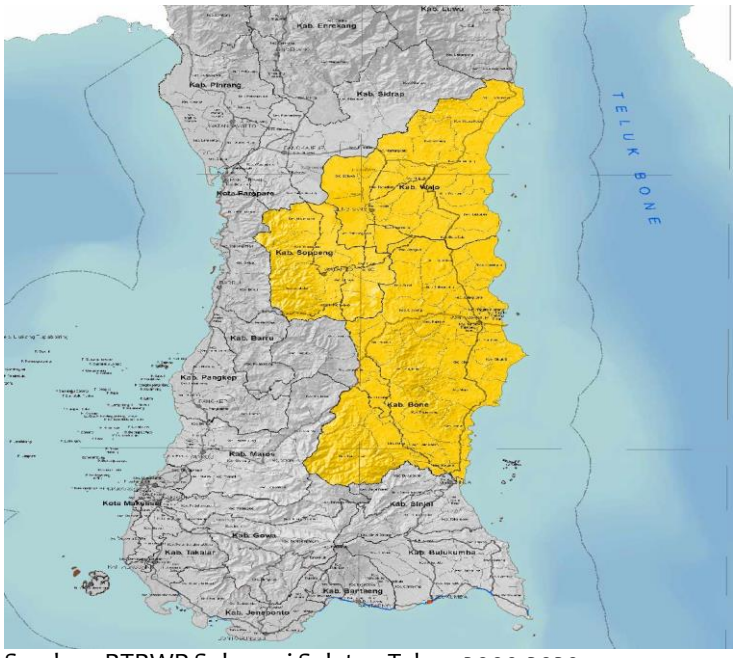
Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Bantaeng sebagai Kawasan Industri Prioritas serta pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata dengan tetap memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana, mengingat Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

c. Kawasan Watampone dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, dengan sector unggulan pertanian, perdagangan, dan perikanan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Watampone di Kabupaten Bone, sedangkan PKL meliputi

Kawasan Perkotaan Watansoppeng di Kabupaten Soppeng dan Sengkang di Kabupaten Wajo.

Gambar 6.4

Wilayah Pengembangan Watampone dan Sekitarnya



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Pengembangan wilayah Kawasan Watampone dan sekitarnya pada akhir Tahun 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai kondisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.17

Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bone	8,11	3,75	9,1 – 9,5
2	Soppeng	6,60	1,24	7,9 – 8,3
3	Wajo	5,96	2,32	5,0 – 5,4
SULAWESI SELATAN		**7,50**	**4,37**	**7,2 – 8,2**

Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018

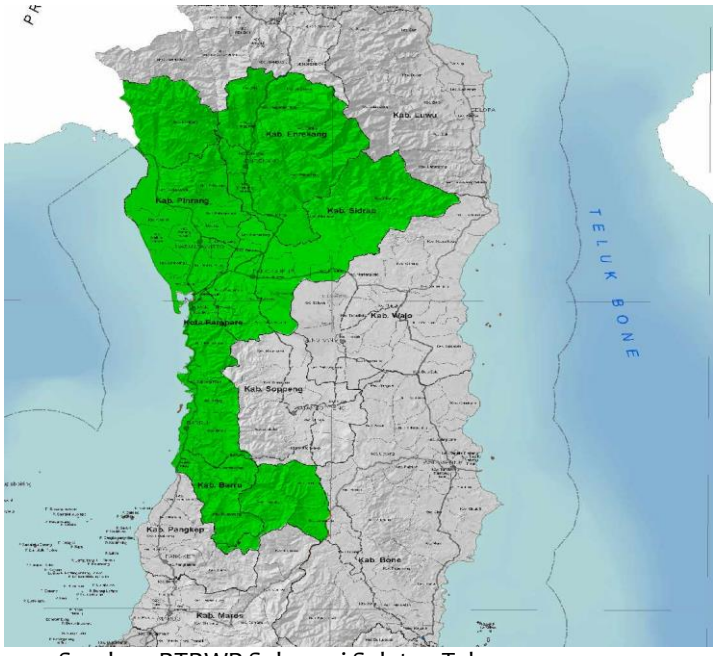
Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan Kawasan Watampone dan Sekitarnya diarahkan untuk berfungsi sebagai pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan penunjang pangan nasional didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya air melalui upaya

konservasi sumber air baku. Pembangunan di kawasan Watampone dan sekitarnya dilakukan dengan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana, mengingat Kabupaten Bone, dan Wajo merupakan wilayah dengan kelas resiko multi bencana tinggi.

d. Kawasan Parepare dan Sekitarnya, meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Enrekang, Sidenreng Rappang, dengan sector unggulan agroindustry, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kawasan Perkotaan Barru dan Kota Parepare, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Enrekang, Kawasan Perkotaan Pinrang, dan Kawasan Perkotaan Pangkajene.

Gambar 6.5

Wilayah Pengembangan Parepare dan Sekitarnya



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Pengembangan wilayah Kawasan Parepare dan sekitarnya pada akhir Tahun 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai kondisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.;

Tabel 6.18
Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Barru	8,00	2,99	6,1 – 6,5

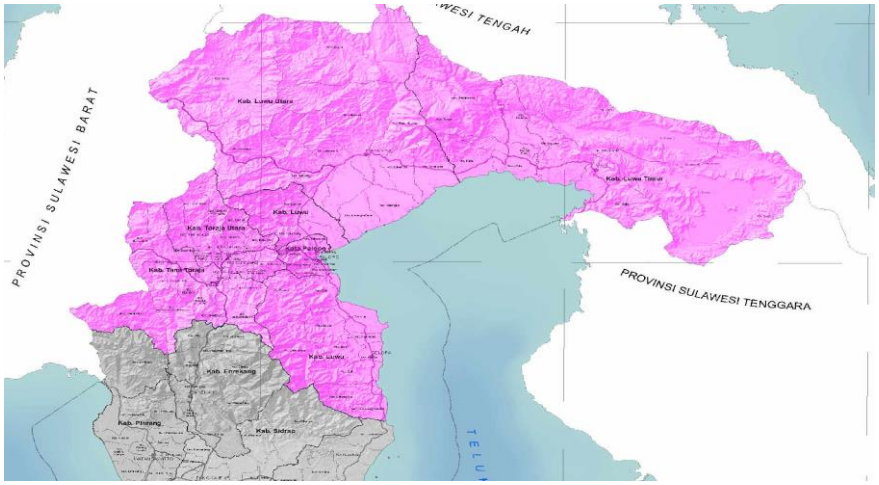
No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
2	Enrekang	10,37	1.10	6,6 – 7,0
3	Pare-Pare	4,57	3,94	7,1 – 7,5
4	Pinrang	6,97	3,01	7,4 – 7,8
5	Sidenreng Rappang	4,16	2,14	7.0 – 7,4
SULAWESI SELATAN		**7,50**	**4,37**	**7,2 – 8,2**

Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018

Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan Kawasan Parepare dan Sekitarnya diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata dengan tetap memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana, mengingat Kabupaten Barru , dan Kabupaten Pinrang merupakan wilayah dengan kelas multi resiko bencana tinggi sedangkan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kelas multi resiko bencana sedang.

e. Kawasan Palopo dan Sekitarnya, meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara dengan sector unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kota Palopo, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Perkotaan Belopa di Kabupaten Luwu, Kawasan Perkotaan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Perkotaan Makale di Kabupaten Tana Toraja, dan Kawasan Perkotaan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara.

Gambar 6.6
Wilayah Pengembangan Palopo dan Sekitarnya



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Pengembangan wilayah Kawasan Palopo dan sekitarnya pada akhir Tahun 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai kondisi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.19
Sasaran Pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH		
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi
1	Luwu	11,20	3,04	6,6 -7,0
2	Luwu Timur	6,11	1,18	4,2 – 4,6
3	Luwu Utara	11,33	11,89	7.60 – 7,80
4	Palopo	6,86	8,26	6,8 – 7,2
5	Tana Toraja	10,15	4,29	7,70 – 8,1
6	Toraja Utara	11,32	77,81	8,3 – 8,7
SULAWESI SELATAN		**7,50**	**4,37**	**7,2 – 8,2**

Sumber: Bank Indonesia, diolah Tahun 2018

Sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan Kawasan Palopo dan Sekitarnya diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kepariwisataan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang Kawasan Strategis Prioritas Nasional.

Pembangunan di Kawasan Palopo dan Sekitarnya dilakukan dengan memperhatikan resiko bencana, mengingat Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara, merupakan kota/kabupaten dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

6.4. Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan arahan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pencapaian sasaran pembangunan RPJMD diwujudkan pada program pembangunan daerah sebagai instrument arah kebijakan.

Proyek strategis nasional merupakan upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan infrastruktur. Memperhatikan hal tersebut, maka sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui Proyek Strategis Nasional, maka arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diintegrasikan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tabel 6.20
Integrasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Proyek Strategis Nasional	Arah Kebijakan RPJMD	Keterangan
1.	Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan)	Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis data akurat sumber-sumber pertumbuhan pada wilayah tersebut serta peletakan dasar infrastruktur pendukung pertumbuhan	Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare diharapkan akan memicu munculnya pusat pertumbuhan baru pada PKW di Sulawesi Selatan
2.	Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas: *Makassar New Port*	Pembangunan pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder serta bandara	Pengembangan kapasitas *Makassar New Port* akan meningkatkan kapasitas pelabuhan Makassar yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menunjang

No.	Proyek Strategis Nasional	Arah Kebijakan RPJMD	Keterangan
			optimalisasi pemasaran komoditas unggulan Sulawesi Selatan
3.	Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah: Energi Asal Sampah Kota Makassar	Pembangunan infrastruktur energy terbarukan	Pembangunan infrastruktur energy asal sampah Kota Makassar diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energy listrik yang akan memicu peningkatan produktivitas industry di Kawasan Mamminasata
4.	Proyek Penyediaan Air Minum: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Pembangunan infrastruktur sumber daya air	Pembangunan SPAM Regional Mamminasata merupakan upaya pemenuhan kebutuhan air minum yang merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang pemenuhannya merupakan kewajiban pemerintah Prov. Sulsel
	Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi:	Pembangunan infrastruktur sumber daya air	Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi akan meningkatkan cakupan pelayanan jaringan irigasi dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tanaman pangan guna mendukung peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
5.	Bendungan Karalloe		
6.	Bendungan Paselloreng		
7.	Bendungan Pamukkulu		
8.	Bendungan Jenelata		
9.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase		

No.	Proyek Strategis Nasional	Arah Kebijakan RPJMD	Keterangan
10.	Pembangunan kawasan Industri Prioritas: Kawasan Industri Bantaeng	Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan secara ekologis)	Permbangunan Kawasan Industri Bantaeng diharapkan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penguatan kerjasama antar daerah
11.	Proyek Pembangunan Smelter: Pembangunan Smelter Bantaeng	Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan secara ekologis)	Pembangunan smelter Bantaeng diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi wilayah pada kawasan pertumbuhan ekonomi baru

6.5. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman, ST, terdapat 5 Program Nyata antara lain :

1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas Sulawesi Selatan
2) Pembangunan Infrastruktur yang Menjangkau Masyarakat Desa Terpencil
3) Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan Ambulance Siaga
4) Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani
5) Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan dan memperhatikan 5 Program Nyata tersebut maka prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

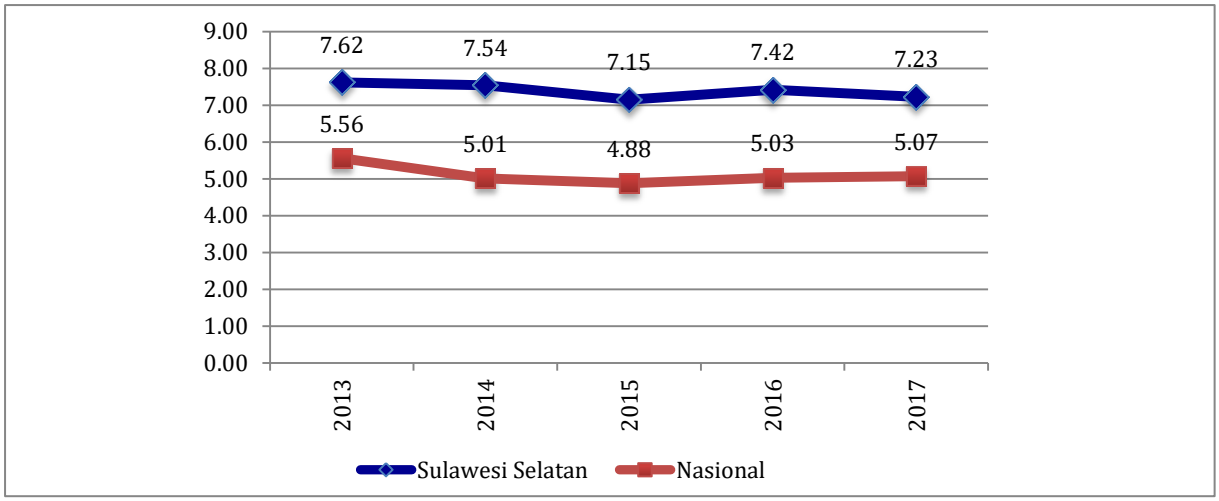
1) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2) Penguatan infrastruktur wilayah
3) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5) Pembangunan manusia
6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7) Pelestarian lingkungan hidup

6.5.1 Analisis Pertumbuhan Inklusif Di Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan terus bertumbuh kuat dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata, perekonomian Sulawesi Selatan bertumbuh dikisaran 7,40 persen per tahun. Pada tahun 2017, perekonomian Sulawesi Selatan mengalami sedikit pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,23 persen pada tahun 2017, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumya yang mencatat angka 7,42 persen. Meski demikian, capaian tersebut masih menempatkan Sulawesi Selatan pada peringkat kedua - setelah Maluku Utara - sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara Nasional.

Grafik 6.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dibalik fluktuasi itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat pertambahan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin sebanyak 787.660 jiwa, dan kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 792.630 jiwa. Antara 2013-2018, jumlah penduduk miskin tidak pernah di bawah jumlah pada tahun 2013.

Dari total penduduk miskin tersebut, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan selalu lebih banyak dari jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 639.690 jiwa sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 147.970 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 624.700 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 167.930 jiwa. Dalam lima tahun itu, penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi pada tahun 2018 dibanding 2013, berbeda dengan kemiskinan di perdesaan dimana pada tahun 2018 jumlahnya lebih rendah dibanding tahun 2013.

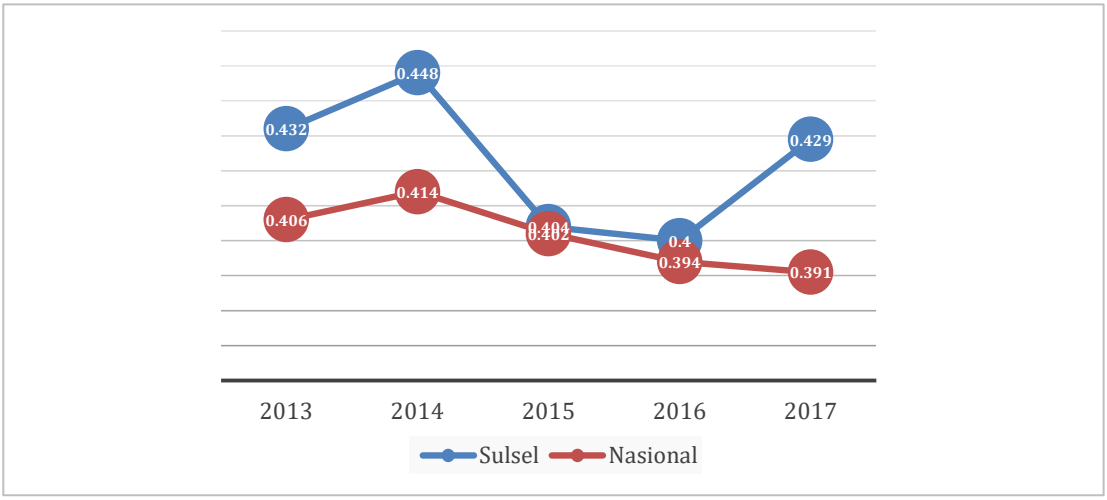
6.5.2 Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Untuk mengetahui elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan digunakan pendekatan *Growth Elasticity of Poverty* (GEP). Pendekatan GEP dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dengan penurunan angka kemiskinan sebagai variabel dependen. Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien regresi sebesar -0,169 persen. Angka ini kurang dari 1 (satu) yang berarti inelastis. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak cukup sensitif terhadap penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi semacam ini dianggap tidak inklusif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap perekonomian bertumbuh satu persen, jumlah penduduk miskin bekurang 0,169 persen. Dengan demikian, jika rata-rata perekonomian bertumbuh sebesar 7,40 persen per tahun maka jumlah penduduk miskin berkurang rata-rata 1,25 persen per tahun.

6.5.3 *Ketimpangan distribusi pendapatan*

Ketimpangan distribusi pendapatan atau biasa disebut saja ketimpangan (*inequality*) adalah perbedaan atau disparitas pendapatam antara kelompok penduduk suatu negara atau daerah/wilayah dalam satu pengukuran waktu tertentu. Pengukurannya diproksi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga melalui perhitungan koefisien gini atau biasa disebut rasio/indeks gini. Selain itu, ketimpangan juga dapat dilihat antar wilayah yang diproksi dari ketimpangan pendapatan wilayah melalui metode perhitungan Indeks Williamson (IW). Pada analisis kondisi ketimpangan di Sulawesi Selatan, lebih ditonjolkan tingkat ketimpangan melalui perhitungan koefisien gini atau indeks gini, baik berdasarkan posisi relatif Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya maupun berdasarkan indeks gini kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Grafik 6.2
Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Perkembangan indeks gini di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, meskipun nampak menurun, tetapi tidak menunjukkan kinerja penurunan yang konsisten selama periode 2013-2017. Berfluktuasi pada kisaran indeks gini 0,400 hingga 0,448. Tingkat ketimpangan yang dicapai selama periode ini, bukan hanya tidak konsisten menunjukkan penurunan, tetapi juga masih tergolong tinggi. Secara absolut menunjukkan dalam kategori ketimpangan moderat atau sedang, dan secara relatif menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional pada periode yang sama. Indeks gini di Sulawesi Selatan senantiasa mencatat angka indeks yang lebih besar daripada indeks gini nasional setiap tahunnnya selama periode 2013-2017, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Secara fungsional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan telah memberi dampak terhadap indeks gini selama periode lima tahun terakhir, 2013-2017. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap capaian indeks gini. Artinya, perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada perubahan indeks gini.

Secara teoritis, perubahan antara keduanya diharapkan berkorelasi secara negatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Meskipun hal sebaliknya juga dapat terjadi, penurunan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat. Berdasarkan analisis regresi sederhana yang dilakukan pada kedua variabel ini selama periode 2013-2017, dihasilkan persamaan:

$$RG = 0{,}11 + 0{,}56PE \quad dengan\ R^2 = 0{,}258$$

Dimana, RG = Indeks Gini dan PE = Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi tingkat indeks gini. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan indeks gini sebesar 0,56. Artinya, pertumbuhan ekonomi bersifat *inelastic* terhadap indeks gini. Selain itu, hanya 25,8 persen variabel indeks gini ditentukan oleh variabel-variabel dalam model ini, selebihnya 74,2 persen ditentukan variabel-variabel yang berada di luar model.

Mencermati hasil statistik ini, nampaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks gini di Sulawesi Selatan belum seperti yang diharapkan. Sangat diharapkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan angka indeks gini, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan atau peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan. Fakta yang ditunjukkan pada persamaan ini justeru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap indeks gini. Artinya, bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berdampak pada peningkatan indeks gini, yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan justeru akan semakin melebar dengan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan makro ekonomi daerah.

Fakta ini mengindikasikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi di Sulawesi Selatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, bukan oleh kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi justeru tidak memberi dampak besar pada penurunan tingkat ketimpangan, malah sebaliknya bisa semakin menciptakan disparitas pendapatan masyarakat yang semakin melebar. Hal ini sejalan dengan hipotesis Kuztnes melalui kurve U terbaliknya, bahwa pada tahapan awal peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan angka indeks gini yang berarti ketimpangan pendapatan justeru akan melebar. Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan tidak bisa menghindari risiko tingkat ketimpangan pendapatan yang cenderung tergolong tinggi sebagai dampak dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahapan awal.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan diharapkan secara bertahap akan semakin memperbesar kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saatnya akan menciptakan disparitas ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin menyempit, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pendapatan yang semkin tinggi.

6.5.4 Kondisi Ketenagakerjaan

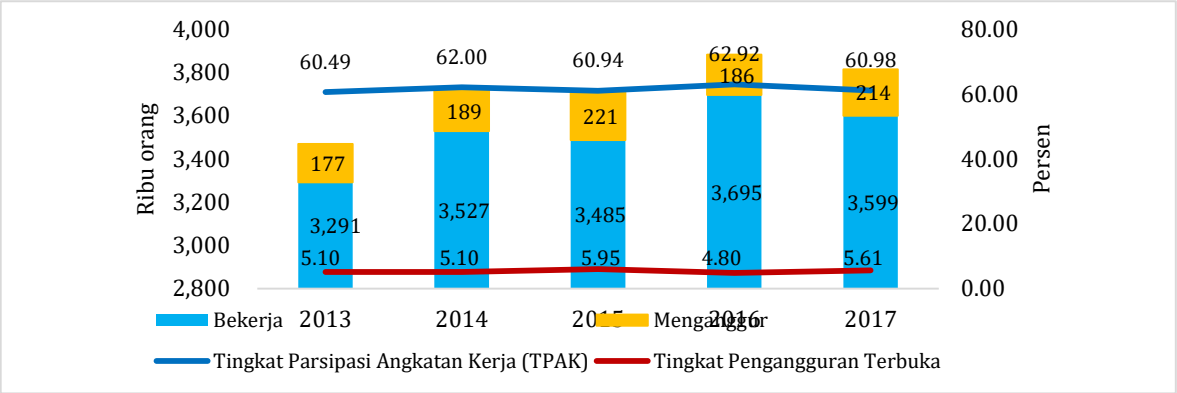
Dalam lima tahun terakhir (2013-2017), perekonomian di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 7,39 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,13 persen. Pertanyaannya adalah apakah dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan?

Di Sulawesi Selatan tercatat jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dalam kurung waktu 2013-2017. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 5,59 juta orang meningkat menjadi 6,25 juta orang pada tahun 2016 atau bertambah sebesar 652,4 ribu orang. Dalam struktur ketenagakerjaan, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebagian tergolong ke dalam angkatan kerja dan sebagian bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja, terdiri atas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan tidak bekerja/sedang mencari pekerjaan (menganggur), sementara untuk bukan angkatan kerja terdiri atas bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tercatat bahwa jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sebesar 3,46 juta orang meningkat menjadi 3,81 juta orang atau bertumbuh secara rata-rata 2,46 persen per tahun. Dengan mencermati perkembangan tersebut, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas tergolong ke dalam angkatan kerja. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang terkategori ke dalam angkatan kerja rata-rata 61,76 persen, selebihnya tergolong ke dalam bukan angkatan kerja. Pada tahun 2015 dan 2017, angkatan kerja mengalami penurunan dan

bukan angkatan kerja mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas lebih banyak terkategori sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Grafik 6.3
Perkembangan Penduduk Bekerja, Menganggur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Sulawesi Selatan, 2013-2017



ditandai oleh dominannya tenaga kerja berlatar pendidikan SD ke bawah. Data BPS mencatat bahwa sepanjang tahun 2013-2017, rata-rata 44,96 persen penduduk bekerja adalah berpendidikan hanya tamat SD/tidak tamat, dan belum pernah sekolah. Bahkan terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah dari 1.662 orang pada tahun 2014 menjadi 1.679 orang pada tahun 2017. Dominannya penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan rendah turut mempengaruhi produktivitas kerja. Sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMP dan SMA juga memperlihatkan angka yang relatif besar, selanjutnya menyusul universitas.

Jika dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan terbesar adalah berpendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mencapai angka 11,9 persen pada tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi untuk pendidikan SMK terjadi pada tahun 2015 yaitu 15 persen. Tingkat pengangguran terbuka ke dua terbesar menurut pendidikan adalah pendidikan SMA, selanjutnya Diploma, dan Universitas.

6.5.5 Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Sulawesi Selatan dalam kurung waktu lima tahun terakhir telah berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan linier antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Misalnya pada tahun 2016, perekonomian bertumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya dan pada saat itu, penduduk yang bekerja juga mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2017, dimana pertumbuhan penduduk yang bekerja kembali melambat seiring dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekwensi dari pelambatan pertumbuhan penduduk

yang bekerja mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang menganggur atau peningkatan tingkat pengangguran. Untuk mendorong lebih cepat jumlah angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan kerja, maka pertumbuhan ekonomi harus secara konsisten bertumbuh lebih cepat setiap tahunnya.

Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien regresi sebesar 0,31 persen. Angka ini kurang dari 1 yang berarti inelastis. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak peka terhadap penyerapan tenaga.

6.5.6 Kebijakan Pertumbuhan yang Iklusif

Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurungkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Mendorong Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Hal ini dilakukan melalui strategi:
   1. Melakukan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas Rumput Laut, Kakao, dan Jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan;
   2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, kepulauan, memperkuat interkonektivitas pusat-pusat pertumbuham ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan.
b) Meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan keterampilan, perbaikan akses terhadap sumberdaya, dan peningkatan infrastruktur ekonomi.
   1. Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi;
   2. Melakukan akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya alam.
c) Mendorong sektor ekonomi yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mendorong dan menfasilitasi pengembangan industri pengolahan, melalui arah kebijakan:
   1. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru;

2. Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis;
3. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

d) Mendorong ekonomi kreatif dan ekonomi digital di wilayah perkotaan untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja terdidik. Data menunjukkan bahwa para penganggur berdomisili di wilayah perkotaan, berada di usia produktif, dan relatif terdidik.
   1. Mengarahkan Tenaga kerja untuk bekerja di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital dapat menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran.
   2. Mendorong usaha-usaha non-pertanian di wilayah perdesaan. Berbagai hasil studi terbaru menunjukkan bahwa jembatan emas untuk keluar dari kemiskinan bagi mereka yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian tampaknya harus berasal dari kombinasi sektor pertanian yang lebih produktif dan pembukaan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan.

e) Mengendalikan inflasi, terutama harga kelompok bahan makanan. Kenaikan harga bahan makanan selalu berkorespondensi dengan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin akan bergerak naik ketika harga bahan makanan cenderung meningkat. Ini mudah difahami mengingat proporsi terbesar dari pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk membeli bahan makanan.

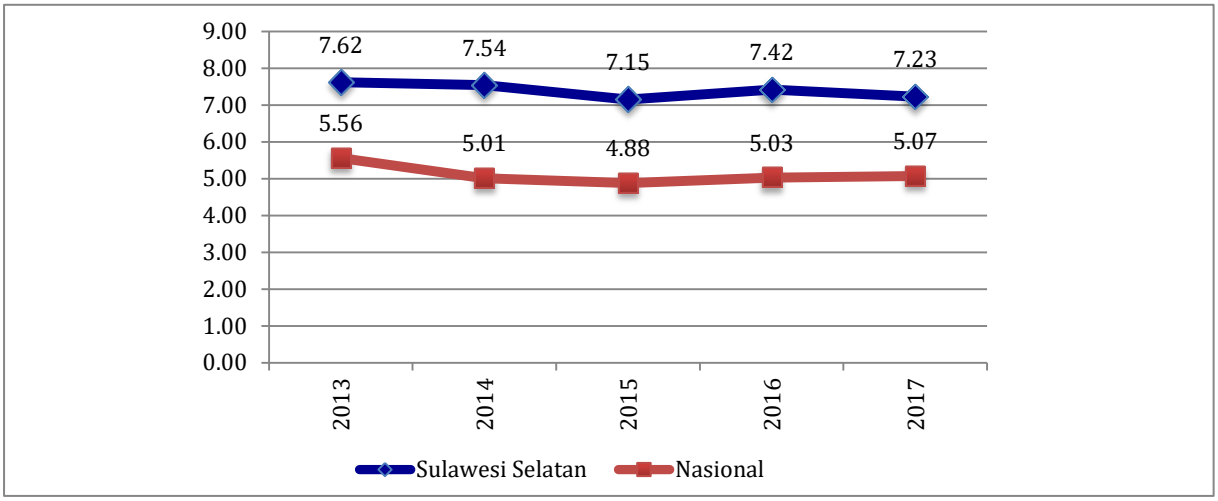
f) Menerapkan kebijakan penggajian dan pengupahan yang lebih adil, terutama memastikan para pekerja menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upaya semacam ini diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan taraf hidup para pekerja. Meningkatkan keselamatan kerja dan memperbaiki kualitas kesehatan para pekerja, juga perlu terus diupayakan untuk mendorong peningkatkan produktivitas pekerja.

g) Mengintensifkan kebijakan transfer, terutama yang diarahkan untuk perlindungan dan jaminan sosial. Ini penting untuk tetap mempertahankan kualitas hidup penduduk miskin, khususnya bagi mereka yang berada pada usia yang sudah tidak produktif, pengangguran, penyandang disabilitas, dan rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.

6.6. Kebijakan Pembangunan Inklusif Di Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan terus bertumbuh kuat dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata, perekonomian Sulawesi Selatan bertumbuh dikisaran 7,40 persen per tahun. Pada tahun 2017, perekonomian Sulawesi Selatan mengalami sedikit pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,23 persen pada tahun 2017, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumya yang mencatat angka 7,42 persen. Meski demikian, capaian tersebut masih menempatkan Sulawesi Selatan pada peringkat kedua - setelah Maluku Utara - sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara Nasional.

Gambar 6.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dibalik fluktuasi itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat pertambahan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin sebanyak 787.660 jiwa, dan kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 792.630 jiwa. Antara 2013-2018, jumlah penduduk miskin tidak pernah di bawah jumlah pada tahun 2013.

Dari total penduduk miskin tersebut, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan selalu lebih banyak dari jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 639.690 jiwa sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 147.970 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 624.700 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 167.930 jiwa. Dalam lima tahun itu, penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi pada tahun 2018 dibanding 2013, berbeda dengan kemiskinan di perdesaan dimana pada tahun 2018 jumlahnya lebih rendah dibanding tahun 2013

6.6.1. Gambaran Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pemerataan Pembangunan di Sulawesi Selatan

a. Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Untuk mengetahui elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan digunakan pendekatan *Growth Elasticity of Poverty* (GEP). Pendekatan GEP dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dengan penurunan angka kemiskinan sebagai variabel dependen. Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien regresi sebesar -0,169 persen. Angka ini kurang dari 1 (satu) yang berarti inelastis. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak cukup sensitif terhadap penurunan angka kemiskinan.

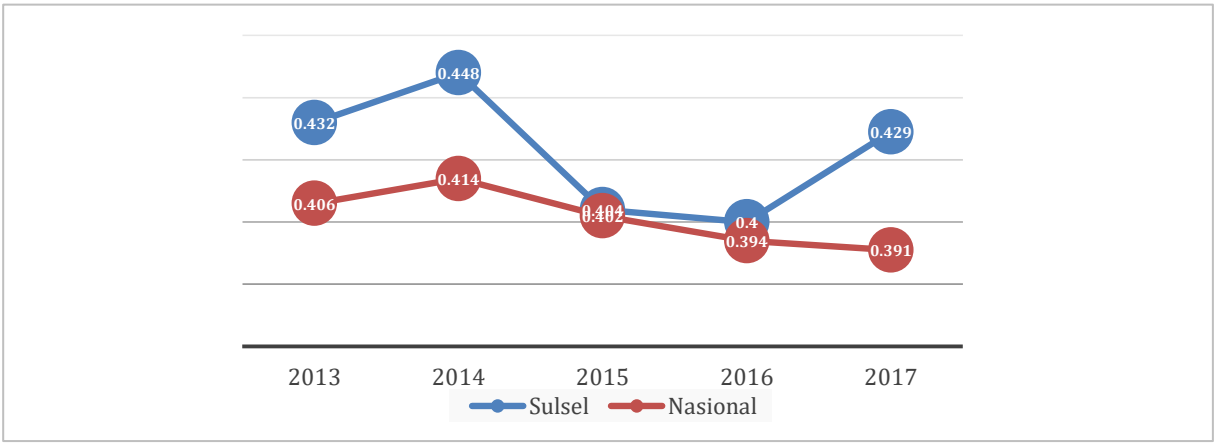
Pertumbuhan ekonomi semacam ini dianggap tidak inklusif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap perekonomian bertumbuh satu persen, jumlah penduduk miskin bekurang 0,169 persen. Dengan demikian, jika rata-rata perekonomian bertumbuh sebesar 7,40 persen per tahun maka jumlah penduduk miskin berkurang rata-rata 1,25 persen per tahun.

b. Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan atau biasa disebut saja ketimpangan (*inequality*) adalah perbedaan atau disparitas pendapatam antara kelompok penduduk suatu negara atau daerah/wilayah dalam satu pengukuran waktu tertentu. Pengukurannya diproksi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga melalui perhitungan koefisien gini atau biasa disebut rasio/indeks gini. Selain itu, ketimpangan juga dapat dilihat antar wilayah yang diproksi dari ketimpangan pendapatan wilayah melalui metode perhitungan Indeks Williamson (IW). Pada analisis kondisi ketimpangan di Sulawesi Selatan, lebih ditonjolkan tingkat ketimpangan melalui perhitungan koefisien gini atau indeks gini, baik berdasarkan posisi relatif Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya maupun berdasarkan indeks gini kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Perkembangan indeks gini di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, meskipun nampak menurun, tetapi tidak menunjukkan kinerja penurunan yang konsisten selama periode 2013-2017. Berfluktuasi pada kisaran indeks gini 0,400 hingga 0,448. Tingkat ketimpangan yang dicapai selama periode ini, bukan hanya tidak konsisten menunjukkan penurunan, tetapi juga masih tergolong tinggi. Secara absolut menunjukkan dalam kategori ketimpangan moderat atau sedang, dan secara relatif menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional pada periode yang sama. Indeks gini di Sulawesi Selatan senantiasa mencatat angka indeks yang lebih besar daripada indeks gini nasional setiap tahunnnya selama periode 2013-2017, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 6.5
Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Secara fungsional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan telah memberi dampak terhadap indeks gini selama periode lima tahun terakhir, 2013-2017. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap capaian indeks gini. Artinya, perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada perubahan indeks gini.

Secara teoritis, perubahan antara keduanya diharapkan berkorelasi secara negatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Meskipun hal sebaliknya juga dapat terjadi, penurunan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat.

Berdasarkan analisis regresi sederhana yang dilakukan pada kedua variabel ini selama periode 2013-2017, dihasilkan persamaan:

$$\mathbf{RG = 0{,}11 + 0{,}56PE \quad dengan\ R^2 = 0{,}258}$$

Dimana, RG = Indeks Gini dan PE = Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi tingkat indeks gini. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan indeks gini sebesar 0,56. Artinya, pertumbuhan ekonomi bersifat *inelastic* terhadap indeks gini. Selain itu, hanya 25,8 persen variabel indeks gini ditentukan oleh variabel-variabel dalam model ini, selebihnya 74,2 persen ditentukan variabel-variabel yang berada di luar model.

Mencermati hasil statistik ini, nampaknya diperoleh gambaran bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks gini di Sulawesi Selatan belum seperti yang diharapkan. Sangat diharapkan dengan Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong penurunan angka indeks gini, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan atau peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan, namun fakta yang ditunjukkan pada persamaan ini justeru menunjukkan sebaliknya, bahwa di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap indeks gini. Artinya, bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berdampak pada peningkatan indeks gini, yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan justeru akan semakin melebar dengan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan makro ekonomi daerah.

Fakta ini mengindikasikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi di Sulawesi Selatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, bukan oleh kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi justeru tidak memberi dampak besar pada penurunan tingkat ketimpangan, malah sebaliknya bisa semakin menciptakan disparitas pendapatan masyarakat yang semakin melebar. Hal ini sejalan dengan hipotesis Kuztnes melalui kurve U terbaliknya, bahwa pada tahapan awal peningkatan

pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan angka indeks gini yang berarti ketimpangan pendapatan justeru akan melebar. Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan tidak bisa menghindari risiko tingkat ketimpangan pendapatan yang cenderung tergolong tinggi sebagai dampak dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahapan awal.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan diharapkan secara bertahap akan semakin memperbesar kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saatnya akan menciptakan disparitas ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin menyempit, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pendapatan yang semkin tinggi.

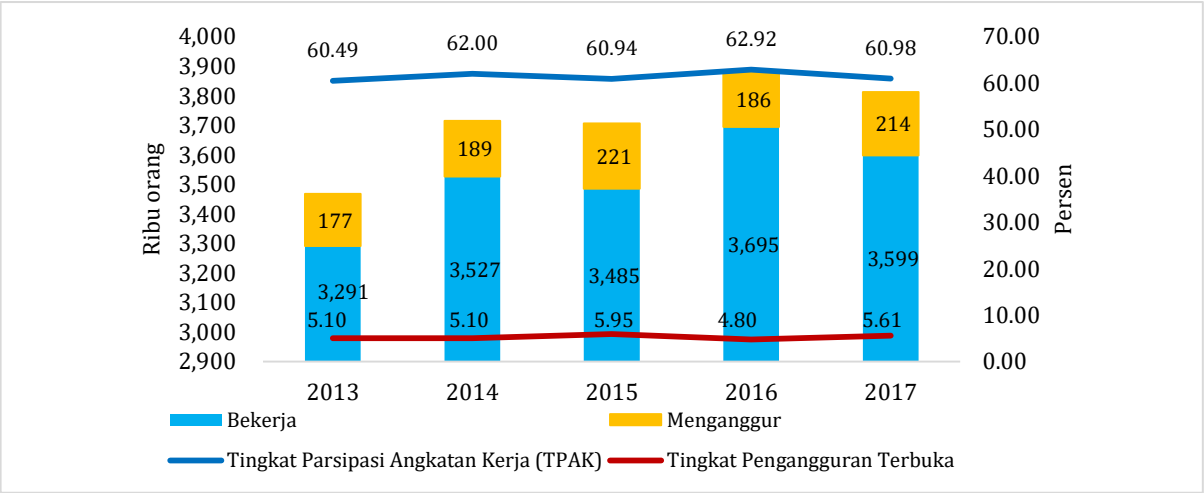
c. Kondisi Ketenagakerjaan

Dalam lima tahun terakhir (2013-2017), perekonomian di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode Tahun 2013-2017 selama periode tersebut sebesar 7,39 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,13 persen. Pertanyaannya adalah apakah dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan?

Di Sulawesi Selatan tercatat jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 5,59 juta orang meningkat menjadi 6,25 juta orang pada tahun 2016 atau bertambah sebesar 652,4 ribu orang. Dalam struktur ketenagakerjaan, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebagian tergolong ke dalam angkatan kerja dan sebagian bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja, terdiri atas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan tidak bekerja/sedang mencari pekerjaan (menganggur), sementara untuk bukan angkatan kerja terdiri atas bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tercatat bahwa jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sebesar 3,46 juta orang meningkat menjadi 3,81 juta orang atau bertumbuh secara rata-rata 2,46 persen per tahun. Dengan mencermati perkembangan tersebut, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas tergolong ke dalam angkatan kerja. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang terkategori ke dalam angkatan kerja rata-rata 61,76 persen, selebihnya tergolong ke dalam bukan angkatan kerja. Pada tahun 2015 dan 2017, angkatan kerja mengalami penurunan dan bukan angkatan kerja mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas lebih banyak terkategori sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Grafik 6.6
Perkembangan Penduduk Bekerja, Menganggur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Sulawesi Selatan, 2013-2017



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Kualitas tenaga kerja di Sulawesi Selatan dikategorikan cukup rendah. Hal ini ditandai oleh dominannya tenaga kerja berlatar pendidikan SD ke bawah. Data BPS mencatat bahwa sepanjang tahun 2013-2017, rata-rata 44,96 persen penduduk bekerja adalah berpendidikan hanya tamat SD/tidak tamat, dan belum pernah sekolah. Bahkan terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah dari 1.662 orang pada tahun 2014 menjadi 1.679 orang pada tahun 2017. Dominannya penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan rendah turut mempengaruhi produktivitas kerja. Sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMP dan SMA juga memperlihatkan angka yang relatif besar, selanjutnya menyusul universitas.

Jika dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan terbesar adalah berpendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mencapai angka 11,9 persen pada tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi untuk pendidikan SMK terjadi pada tahun 2015 yaitu 15 persen. Tingkat pengangguran terbuka ke dua terbesar menurut pendidikan adalah pendidikan SMA, selanjutnya Diploma, dan Universitas

d. Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan linier antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Namun berdasarkan hasil analisis Dari hasil perhitungan menunjukkan gambaran bahwa angka koefisien regresi sebesar 0,31 persen.

Angka ini kurang dari 1 yang berarti inelastis. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak peka terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menggambarkan bahwa, jika perekonomian Sulawesi Selatan bertumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya, maka dan pada saat itu, penduduk yang bekerja juga mengalami pertumbuhan positif. Namun jika pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, maka penduduk yang bekerja kembali melambat seiring dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan . Sebagai konsekwensi dari pelambatan pertumbuhan penduduk yang bekerja mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang menganggur atau meningkatnya angka pengangguran. Untuk itu, mendorong lebih cepat jumlah angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan kerja, maka pertumbuhan ekonomi harus secara konsisten bertumbuh lebih cepat setiap tahunnya.

6.6.2. Menuju Pertumbuhan yang Iklusif Sulawesi Selatan Tahun 2023

Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurungkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Selatan akan dilakukan dengan mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Mendorong Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian, sehingga pertumbuhan sektor pertanian yang berkeadilan dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:
    1) Melakukan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas Rumput Laut, Kakao, dan Jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan;
    2) Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan;
    3) Menginternalisasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai upaya untuk mempertahankan kinerja sistem irigasi terbangun, peningkatan kapasitas tampung, dan perluasan layanan jaringan irigasi serta perkuatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan terpadu;

4) Mendorong usaha-usaha non-pertanian di wilayah perdesaan, melalui fasilitasi pembukaan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan dengan tetap mengembangkan sektor pertanian yang produktif sebagai usaha utama.

b. Mendorong ekonomi kreatif dan ekonomi digital di wilayah perkotaan untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja terdidik. Data menunjukkan bahwa para penganggur berdomisili di wilayah perkotaan, berada di usia produktif, dan relatif terdidik, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dapat dicapai melalui strategi:
   1) Mengarahkan Tenaga kerja untuk bekerja di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital dapat menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran.
   2) Meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan keterampilan, perbaikan akses terhadap sumberdaya, dan peningkatan infrastruktur ekonomi;
   3) Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kululusan pada pendidikan tinggi bereputasi;
   4) Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru.

c. Mendorong peran pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif guna memacu pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat secara merata yang akan tercapai melalui strategi:
   1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya kebutuhan masyarakat berpenghasilan dasar akan perumahan yang layak dengan *menerapkan kemudahan perizinan pembangunan perumahan*, pemenuhan upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), peningkatan kualitas kesehatan masyarakat guna mendorong peningkatkan produktivitas serta melakukan pengendalian inflasi, terutama pada harga kelompok bahan makanan.
   2) Mengintensifkan kebijakan transfer, terutama yang diarahkan untuk perlindungan dan jaminan sosial. Ini penting untuk tetap mempertahankan kualitas hidup penduduk miskin, khususnya bagi mereka yang berada pada usia yang sudah tidak produktif, pengangguran, penyandang disabilitas, dan rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga;
   3) Meningkatkan peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah yang didukung oleh peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

6.7. Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel 6.21
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Sulawesi Selatan

anning.sulselprov.go.id/rpjmd/

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1					**Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**															
1	**1**				**Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**															
1	**1**	**1**			**Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**CC**	**CC**		**B**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		
1	**1**	**1**	**1**		**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan**	**Nilai SAKIP**	**B**	**B**		**A**		**A**		**AA**		**AA**		**AA**		
1	1	1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR (Prioritas)	Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas) (%)	10%	100	2,994,519,000	100	3,001,304,371	100	3,112,493,647	100	3,153,071,934	100	3,263,714,462	100	15,525,103,415	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	1	1	1	2	PROGRAM PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR (Prioritas)	Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas) (%)	65%	75	2,963,200,000	75	2,655,000,000	75	2,205,000,000	75	2,205,000,000	75	2,205,000,000	75	12,233,200,000	Badan Kepegawaian Daerah
1	1	1	1	3	PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (Prioritas)	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota (Prioritas) (%)	53 OPD Prov (100)	100	1,654,894,400	100	1,664,258,073	100	1,725,942,610	100	1,748,413,782	100	1,809,766,306	100	8,603,275,170	Biro Organisasi dan Tata Laksana
1	1	1	1	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DAERAH (Prioritas)	Opini LKPD dari BPK RI (Proritas) (% (Opini WTP))	100 % (Opini WTP)	100	4,295,640,000	100	4,305,376,487	100	4,464,952,193	100	4,523,084,316	100	4,681,801,115	100	22,270,854,111	Inspektorat Daerah
1	1	1	1	5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas) (%) % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas) (%) % Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas) (%)	100% 98.63% 96.69%	100 100 97	10,771,598,000	100 100 97.5	12,098,959,455	100 100 97	12,547,398,749	100 100 97	12,710,761,512	100 100 99	13,156,787,109	100 100 99	61,285,504,826	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	1	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Prioritas)	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas) (%)	40%	60	9,641,502,075	70	9,623,858,368	78	9,932,559,414	80	10,066,618,944	85	10,432,632,005	85	49,697,170,805	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1	1	1	1	7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas) (%)	20%	20	5,024,479,800	20	4,941,641,751	20	5,222,916,753	20	5,325,382,933	20	5,605,143,989	20	26,119,565,226	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	**1**	**1**	**2**		**Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik**	**IKM = D**	**D**		**C**		**C**		**B**		**B**		**B**		
1	1	1	2	1	PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas)	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas) (%)	100 %	100	1,016,200,000	100	1,018,503,316	100	1,056,253,415	100	1,070,005,466	100	1,107,552,377	100	5,268,514,574	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	1	1	2	2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas) () Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas) () % Jumlah warga negara usia 16 â€“ 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM) (%)	83.6 62.5 74.23%	88.12 63 74.23	527,908,752,174	88.7 63.5 75.25	527,203,518,279	89.25 63.95 75.68	546,775,081,644	89.85 64.45 76.29	553,888,484,830	90.15 65 78.65	573,354,651,640	90.15 65 78.65	2,729,130,488,567	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	3	PROGRAM PENDIDIKAN SISWA KEBUTUHAN KHUSUS (Prioritas)	% Jumlah warga negara usia 4 â€“ 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM) (%)	n.a	80	178,050,000	81	178,453,568	82	185,067,822	83	187,477,340	84	194,055,994	84	923,104,724	Dinas Pendidikan
1	1	1	2	4	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB) (Prioritas)	% Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (%) % Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (%)	100% 85%	100 100	11,550,000,000	100 100	11,162,130,021	100 100	10,159,896,973	100 100	11,715,770,474	100 100	12,059,565,274	100 100	56,647,362,742	Dinas Kesehatan
1	1	1	2	5	PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM) (%)	73.36%	100	30,000,000	100	800,000,000	100	800,000,000	100	20,000,000,000	100	20,000,000,000	100	41,630,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	1	1	2	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM) (%)	83.58%	0	0	100	800,000,000	100	800,000,000	100	20,000,000,000	100	20,000,000,000	100	41,600,000,000	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	1	1	2	7	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (Prioritas)	% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM) (%) Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas) (Ha)	67.77% 58.858 Ha	69.47 10786.8	117,785,237,000	71.46 15014.3	265,608,022,473	69.47 15014.3	255,556,510,793	69.47 15014.3	224,853,496,217	76.78 15014.3	227,085,841,604	76.78 70844	1,090,889,108,087	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	1	1	2	8	PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)	% Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas) (%)	60%	75	5,650,700,000	85	4,014,588,000	90	4,040,867,400	95	4,068,460,770	100	4,097,433,809	100	21,872,049,979	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1	1	1	2	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)	% Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM) (%) % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM) (%)	100% 100%	100 100	199,150,000	100 100	1,100,000,000	100 100	1,120,000,000	100 100	1,142,000,000	100 100	1,516,200,000	100 100	5,077,350,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
					PROGRAM PELAYANAN DAN	% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas) (%)	100%	100		100		100		100		100		100		

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	1	1	2	10	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (Prioritas)	% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) (%)	100%	100	1,037,800,000	100	1,040,152,275	100	1,128,704,776	100	1,092,749,137	100	1,131,094,132	100	5,430,500,321	Dinas Sosial
						% Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas) (%)	100%	100		100		100		100		100		100		
1	1	1	2	11	PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Prioritas)	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina (Jiwa)	425 Jiwa	425	4,524,400,055	425	4,534,655,049	425	4,549,728,801	425	4,763,956,693	425	4,931,125,798	2125	23,303,866,396	Dinas Sosial
						% Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) (%)	100%	100		100		100		100		100		100		
1	1	1	2	12	PROGRAM PELAYANAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO (Prioritas)	% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) (%)	4.50%	100	1,131,875,000	100	1,134,440,505	100	1,176,487,733	100	1,191,805,193	100	1,233,626,104	100	5,868,234,535	Dinas Sosial
1	1	1	2	13	PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM) (%)	100%	100	232,931,000	100	550,000,000	100	695,000,000	100	804,998,000	100	945,000,000	100	3,227,929,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	1	1	2	14	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL (Prioritas)	% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) (%)	1.95%	1.75	241,200,000	1.55	1,000,078,478	1.25	1,642,184,054	1	2,102,300,000	1	2,557,300,000	1	7,543,062,532	Biro Kesejahteraan
						% Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas) (%)	36.36%	10		10		10		10		10		86.36		
						% Penurunan Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas) (%)	322%	10		10		10		10		10		50		
1	**2**				**Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel**															
1	**2**	**2**			**Meningkatkan infrastruktur wilayah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)**	**63,57%**	**64.47**		**65.37**		**66.27**		**67.17**		**68.07**		**68.07**			
1	**2**	**2**	**1**		**Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur**	**Indeks aksesibilitas infrastruktur**	**51**	**56**		**64**		**65**		**71**		**73**		**73**		
1	2	2	1	1	PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM) (%)	58.94%	60.2	357,254,311,554	62.61	283,652,045,943	65.43	316,319,776,635	68.41	319,767,539,569	71.55	333,492,722,400	71.55	1,610,486,396,102	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1	2	2	1	2	PROGRAM PENGENDALIAN JALAN AKSES WILAYAH TERISOLIR (Prioritas)	Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (Prioritas) (Wilayah)	0 Wilayah	3	0	3	700,000,000	3	700,000,000	3	700,000,000	3	700,000,000	15	2,800,000,000	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1	2	2	1	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) (Orang)	1823531 Orang	980537	11,073,000,000	1009	9,598,098,035	1028	11,509,441,116	1047	11,659,290,031	1.105	12,068,419,083	5.171	55,908,248,265	Dinas Perhubungan
1	2	2	1	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas)	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas) (%)	20%	22	3,329,665,000	24	3,337,212,011	22	3,460,903,391	22	3,505,963,148	30	3,628,988,768	30	17,262,732,318	Dinas Perhubungan
1	2	2	1	5	PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas) (Kawasan)	24 Kawasan	1	67,500,000	8	350,000,000	8	450,000,000	8	456,750,000	8	463,601,250	38	1,787,851,250	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	2	2	1	6	PROGRAM PENYEDIAAN LISTRIK DAN KETAHANAN ENERGI (Prioritas)	% Desa Berlistrik (Prioritas) (%)	95.8%	97	4,655,000,000	98.5	7,965,551,012	99	8,138,476,329	99.5	8,201,471,606	100	8,373,466,164	100	37,333,965,111	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1	**3**				**Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif**															
1	**3**	**3**			**Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah**	**PDRB Perkapita (Juta Rp)** **Angka Kemiskinan (%)**	**48.21 Juta Rp** **9.48**	**45-55** **8.78**		**55-65** **8.46**		**65-70** **8.14**		**65-70** **7.82**		**70-75** **7.5**		**70-075** **7.5**		
1	**3**	**3**	**1**		**Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru**	**Tingkat Pengangguran Terbuka** **PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar dan Bone) (Milyar Rp)**	**5.61** **29,202,608.04 (Rp Milyar)**	**5.17** **33,110,348.45**		**4.97** **25,124,356.44**		**4.77** **37,138,364.43**		**4.57** **39,152,372.42**		**4.37** **41,166,380.41**		**4.37** **41,166,380.41**		
1	3	3	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas) (Kawasan)	0 Kawasan	3	689,310,000	3	690,872,388	3	716,479,080	3	725,807,388	6	751,276,254	6	3,573,745,110	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	3	3	1	3	PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas)	Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas) (MoU)	1 MoU	2	1,605,000,000	2	2,608,637,889	2	2,668,260,904	3	2,689,981,080	3	2,749,283,177	12	12,321,163,050	Dinas Perdagangan
1	3	3	1	4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)	Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas) (Juta $ US)	57950717 $ US	125749800	4,647,714,000	135809784	6,158,248,497	146674567	6,330,903,152	158408532	6,393,799,829	171081215	6,565,525,180	737723897	30,096,190,658	Dinas Perdagangan
1	3	3	1	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI (Prioritas)	% Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas) (%)	6%	10	508,800,000	10	7,350,000,000	10	7,600,000,000	10	8,025,000,000	10	8,715,000,000	50	32,198,800,000	Dinas Perindustrian
1	3	3	1	6	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA (Prioritas)	Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas) (%)	57.81%	58.17	1,117,700,000	58.47	1,720,500,000	58.78	1,738,500,000	59.09	1,738,500,000	59.41	1,774,000,000	59.41	8,089,200,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	**3**	**3**	**2**		**Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah**	**Indeks Williamson** **Indeks Gini**	**0.610** **0.429**	**0.580** **0.385**		**0.570** **0.376**		**0.560** **0.366**		**0.549** **0.357**		**0.539** **0.347**		**0.539** **0.347**		
1	3	3	2	1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UKM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Prioritas)	% Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas) (%)	0%	20	6,932,900,000	20	9,917,900,000	20	11,294,900,000	20	12,532,900,000	20	11,682,900,000	100	52,361,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1	3	3	2	1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas) (Lokasi)	0 Lokasi	2	82,107,240,000	2	66,076,249,998	2	64,355,000,000	2	63,738,000,000	2	65,234,825,000	10	341,511,314,998	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1	3	3	2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (Prioritas)	Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas) (Jenis) Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas) (Orang)	0 Jenis 0 Orang	2 0	2,889,343,000	2 1000	4,368,526,750	2 1000	4,954,375,430	2 1000	5,353,207,250	2 1000	5,759,831,488	10 4000	23,325,283,918	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1	3	3	2	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM) (%) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM) (%)	1.25% 0 %	0 0	0	1.75 5	3,100,000,000	2.25 5	3,000,000,000	2.75 5	3,100,000,000	3.75 5	3,000,000,000	3.75 5	12,200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1	3	3	2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL (Prioritas)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas) (Kab/Kota)	0 Kab/Kota	1	65,916,000	2	260,916,000	2	316,014,072	2	368,514,072	1	373,514,072	8	1,384,874,216	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1	3	3	2	3	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PROMOSI PRODUK UMKM (Prioritas)	Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas) (Produk)	0 Produk	10	900,000,000	10	900,000,000	10	900,000,000	10	900,000,000	10	900,000,000	10	4,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	3	3	2	3	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)	% Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas) (%)	35.49%	0	0	49	3,800,000,000	56	3,900,000,000	63	4,000,000,000	70	3,500,000,000	70	15,200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1	3	3	2	4	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas) (Klinik)	0 Klinik	2	2,062,718,800	2	2,168,000,000	4	2,272,390,000	4	2,294,417,738	4	2,491,574,490	4	11,289,101,028	Dinas Kesehatan
1	3	3	2	4	PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BAGI SISWA MISKIN (Prioritas)	Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas) (%)	0%	50.05	29,158,714,160	54.93	110,000,000	59.8	120,000,000	64.68	140,000,000	69.56	150,000,000	69.56	29,678,714,160	Dinas Pendidikan
1	3	3	2	5	PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)	Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas) (RT)	0 RT	0	2,126,000,000	1750	11,523,750,000	1750	12,560,000,000	1750	12,885,000,000	1750	12,400,000,000	7000	51,494,750,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1	**4**				**Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**															
1	**4**	**4**			**Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif**	**IPM**	**70.34**	**71.58**		**72.19**		**72.80**		**73.41**		**74.02**		**74.02**		
1	**4**	**4**	**1**		**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**	**Indeks Pendidikan**	**63.39**	**65.19**		**66.10**		**67.02**		**67.93**		**68.5**		**68.5**		
1	4	4	1	1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH (Prioritas)	% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas) (%)	0%	45.46	377,401,750	46.85	878,257,168	48.25	892,277,000	49.65	897,384,310	51.05	911,328,681	51.05	3,956,648,908	Dinas Pendidikan
1	4	4	1	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIONAL (Prioritas)	% Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas) (%)	n.a	44	521,400,000	45.6	522,581,804	46.75	541,950,925	47.65	549,006,938	49	568,271,806	64	2,703,211,473	Dinas Pendidikan
1	4	4	1	3	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN SEKOLAH SEHAT (Prioritas)	% SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas) (%)	0%	90	2,609,102,245	91	3,115,016,030	92	3,211,939,732	93	3,247,248,243	94	3,343,650,259	94	15,526,956,510	Dinas Pendidikan
1	4	4	1		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)	Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas) (Pemuda)	900 Pemuda	900	529,752,000	950	2,159,000,301	900	2,435,000,000	900	2,492,000,000	1100	2,490,000,000	1100	10,105,752,301	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1	**4**	**4**	**2**		**Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan**	**IPG** **IDG**	**92.84** **72.48**	**93.18** **74.01**		**93.40** **75.54**		**93.62** **77.07**		**93.84** **78.60**		**94.06** **80.13**		**94.06** **80.13**		
1	4	4	2	1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Prioritas)	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas) (%)	31.2%	31.1	230,251,000	31	928,360,000	30.9	931,360,000	30.8	886,360,000	30.7	939,460,000	30.7	3,915,791,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	4	4	2		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN (Prioritas)	Jumlah kelompok binaan PKK (Prioritas) (Kelompok Binaan PKK)	43 Kelompok Binaan PKK	1	2,174,450,000	1	2,179,378,603	1	2,260,155,715	1	2,289,582,156	1	2,369,924,490	48	11,273,490,963	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	**4**	**4**	**3**		**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Indeks Kesehatan**	**76.68**	**77.03**		**77.17**		**77.31**		**77.45**		**77.58**		**77.58**		
1	4	4	3	1	PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL (Prioritas)	Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas) (Unit)	0 Unit	2	145,845,418,992	4	123,778,800,054	6	130,471,937,258	6	131,495,895,722	6	136,713,061,945	6	668,305,113,971	Dinas Kesehatan
1	4	4	3	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas) (Unit)	0 Unit	6	646,936,000	6	631,138,208	6	653,669,842	6	567,807,939	6	681,881,720	6	3,181,433,709	Dinas Kesehatan

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	4	4	3	3	PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) (Prioritas)	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) (%) % Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas) (%)	9.9 % 4.4 %	11 5.5	250,000,000	11.5 6	5,492,101,020	12 6.5	5,692,101,020	12.5 7	5,892,101,020	13 7.5	6,092,101,020	13 7.5	23,418,404,080	Dinas Kesehatan
1	4	4	3		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Prioritas)	Prevalensi Balita Stunting (Prioritas) (%)	34.8 %	33	2,630,898,000	31	2,560,616,000	33	2,657,684,500	33	2,649,770,382	25	2,766,491,549	25	13,265,460,431	Dinas Kesehatan
1	**5**				**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**															
1	**5**	**5**			**Pengelolaan sumber daya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**	**Pertumbuhan PDRB (%)**	**7.23**	**7.2 - 7.6**		**7.4 - 7.8**		**7.6 - 8.0**		**7.8 - 8.2**		**7.9 - 8.3**		**7.9 - 8.3**		
1	**5**	**5**	**1**		**Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam**	**Produktivitas Total Daerah (Rp / Angkatan Kerja)**	**75,782,133**	**78,777,309**		**81,942,489**		**87,882,496**		**90,664,371**		**93,325,387**		**93,325,387**		
1	5	5	1	1	PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas) (Rp)	Rp 0	3694852500 00	75,817,194,500	4542379096 93	92,950,000,000	460835232750	94,300,000,000	4630343404 35	94,750,000,000	465893180426	95,335,000,000	4658931804 26	453,152,194,500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1	5	5	1	2	PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas) (Rp)	Rp. 3578350000	3578350000	3,578,350,000	5000000000	910,000,000	6000000	780,000,000	7000000000	800,000,001	8000000000	800,000,001	8000000000	6,868,350,002	Dinas Perkebunan
1	5	5	1	3	PROGRAM HILIRISASI PETERNAKAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas) (Rp)	Rp 0	9412084000	2,699,254,000	2196475000 0	35,405,887,584	29493840000	6,261,903,750	3705960911 3	4,992,232,399	38617836192	5,107,346,693	2431362442 8.38	54,466,624,426	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1	5	5	1	4	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas) (Rp)	Rp.17.953.5 35.596.200	1885121237 6010	47,368,673,650	1979377299 4810	43,608,000,000	2078346164455 1	45,732,000,000	2182263472 6778	47,052,000,000	2291376646311 7	49,043,000,000	2291376646 3117	232,803,673,650	Dinas Kelautan dan Perikanan
1	5	5	1	5	PROGRAM HILIRISASI PERTAMBANGAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas) (Rp)	Rp 12.186.109. 875.000	1382175000 0000	1,225,000,000	1520392500 0000	1,227,776,582	1672431750000 0	1,273,283,245	1839674925 0000	1,289,860,949	2023635962500 0	1,335,122,675	8438310137 5000	6,351,043,450	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1	5	5	1	8	PROGRAM EKSPLORASI SUMBER DAYA GEOLOGI, KONSERVASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (Prioritas)	Luas Wilayah Pemetaan (Prioritas) (Ha) Jumlah Cadangan Sumber Daya (Prioritas) (Ton)	4.558 Ha 364.460.000 Ton	9200 2400000	4,869,000,000	8500 4000000	4,880,036,064	7500 25200000	5,060,911,116	8173 33300000	5,126,802,417	7200 20000000	5,306,703,921	40573 84900000	25,243,453,518	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1	5	5	1		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK (Prioritas)	Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas) (Ekor) Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas) (Ekor) Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas) (Ekor) Jumlah produksi telur (Prioritas) (Kg) Jumlah produksi daging (Prioritas) (Kg) Jumlah produksi susu (Prioritas) (Kg)	1.354 Ekor 175.274 Ekor 93.752 Ekor 154.851.877 Kg 136.923.764 Kg 3.115.800 Kg	1384 180532 105219 162594471 138164039 3240432	22,705,787,500	1416 185948 115598 170724195 139478730 3370049	19,478,200,000	1434 191527 127387 179260404 140872302 3504851	19,488,720,000	1455 197272 140765 188223425 142349489 3645045	20,773,792,000	1486 203191 156268 197634596 143915307 3790847	21,549,671,200	2145 203191 133914 235587321 215753406 3790847	103,996,170,700	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**73.24**	**73.33**		**73.36**		**73.4**		**73.44**		**73.49**		**73.49**		

Kode					Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	**5**	**5**	**2**		**lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**	**Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2eq)**	**0.79 Juta Ton CO2eq (2017)**	**1.1**		**1.4**		**1.7**		**2.0**		**2.3**		**2.3**		
1	5	5	2	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	Indeks kualitas udara (Prioritas) () Indeks kualitas air (Prioritas) ()	88.66 77.62	88.68 77.63	848,400,000	88.71 77.67	913,628,104	88.75 77.72	936,750,016	88.8 77.78	943,823,873	88.86 77.85	1,007,867,772	88.86 77.85	4,650,469,764	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1	5	5	2	2	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Prioritas)	Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas) (Ha) Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas) ()	101359.41 Ha 58.40	1000 58.6	14,517,881,500	1000 58.62	14,967,300,000	1000 58.64	14,148,550,000	1000 58.66	12,927,250,000	1000 58.68	13,259,750,000	5000 58.68	69,820,731,500	Dinas Kehutanan
1	5	5	2	7	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (Prioritas)	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas) (Meter) Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas) (%)	50 Meter 79.45%	15000 80	11,727,968,032	17500 85	21,211,246,095	17000 90	21,311,448,550	22000 95	21,721,120,277	20000 100	22,136,937,080	91500 100	98,108,720,034	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1	5	5	2	9	PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas) (%)	68.34%	64.67	1,069,600,000	64.67	4,205,000,000	64.67	3,405,000,000	64.67	3,730,000,000	64.67	2,130,000,000	64.67	14,539,600,000	Dinas Kehutanan

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkanatas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi,kondisi sosialmasyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

7.1.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah,asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2018-2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan asumsi makro ekonomi juga didasarkan atas analisis perekonomian global dan nasional. Perekonomian global diperkirakan tetap dibayangi ketidakpastian, terutama risiko proteksionisme perdagangan yang meningkat dan potensi konflik perdagangan berbasis luas yang berpotensi mengancam dan menggagalkan pertumbuhan ekonomi global sebelum waktunya.Itu sebabnya, *International Monetary Fund* (IMF) memangkasproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen dan 3,6 persen masing-masing untuk tahun 2019 dan 2020, sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pemangkasan proyeksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di China, Eropa dan sejumlah negara berkembang.

Sedangkan Bank Dunia, dalam analisisnya, memperkirakan ekonomi global hanya akan bertumbuh sebesar 3,0 persen pada tahun 2019. Perkiraan ini didasarkan atas pemulihan berbasis luas yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Meski demikian, Bank Dunia memperingatkan bahwa risiko-risiko terhadap prospek tetap condong ke sisi negatifnya, yang mencakup pengetatan kondisi pembiayaan global yang tiba-tiba, meningkatnya pembatasan perdagangan, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Itu sebabnya, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi 2,9 persen.

Di tengah situasi ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan diperkirakan masih relatif stabil. Dalam Laporan Indonesia Economic Quarterly: Strengthening Competitiveness, Edisi Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank Dunia,disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Nasional diproyeksikan mencapai 5,2 persen pada tahun 2018, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk tahun 2019, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 5,2 persen. Sekalipun pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat dan arus perdagangan tetap moderat, pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan oleh Bank Dunia akan tetap stabil seiring menguatnya permintaan domestik, akibat peningkatan belanja sosial dan pasar tenaga kerja yang kuat, yang diperkirakan akan lebih besar darpada hambatan sektor eksternal.

Optimisme akan tetap stabilnya perekonomian Nasional didasarkan atas perkiraan bahwa sepanjang tahun 2019, investasi menguat dengan adanya investasi konstruksi yang lebuh kuat. Sementara konsumsi masyarakat sedikit menurun, kenaikan konsumsi pemerintah mempertahankan pertumbuhan konsumsi secara keseluruhan. Namun demikian, ekspor bersih (*net export*) akan terus membebani pertumbuhan ekonomi karena investasi tetap sarat impor, dan menurunnya pertumbuhan dan perdagangan global.

Selanjutnya menurut perkiraan Bank Dunia, pertumbuhan konsumsi masyarakat diproyeksikan akan tetap stabil tahun ini, didukung oleh inflasi yang relatif rendah yang meningkatkan daya beli konsumen, tetapi terbebani oleh sentimen konsumen berpendapatan rendah, sejalan dengan depresiasi nilai Rupiah. Melanjutkan tanda-tanda awal pertumbuhan penjualan eceran (*retail sales*) yang mulai menguat, belanja pra-pemilu diperkirakan akan mengangkat pertumbuhan konsumsi masyarakat tahun ini.

Tabel VII.1
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
ProvinsiSulawesi SelatanTahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	7,0-7,4	7,2-7,6	7,4-7,8	7,6-8,0	7,7-8,1	7,8-8,2
2	Tingkat Pengangguran (%)	5,4	5,2	5,05	4,90	4,50	4,25
3	Inflasi (%)*)	3,5±1,0	3,5±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0
4	PDRB Per Kapita (Rp juta)	45-55*)	55-65	55-65*)	65-70	70-75	75-80
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,13	8,78	8,52	8,35	8,13	7,87
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,96	71,58	72,19	72,80	73,41	74,02

Sumber: Hasil Proyeksi Bank Indonesia/Estimasi/Asumsi
Keterangan: *) Hasil proyeksi Bank Indonesia

Asumsi makro ekonomi daerah Provinsi Sulsel yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Sulsel lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas,

melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Sulsel untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional, sehingga Sulsel tetap diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian Nasional.Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Sulsel akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga secara relatif peringkatnya secara nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Sulsel juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomimasyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Sulsel yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 5,81 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 6,26 persen selama periode 2019-2023 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel VII.2
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan PAD	4.90	4.92	5.52	6.34	7.13
2.	Pertumbuhan Dana Perimbangan:	3.30	3.42	4.65	5.25	5.67
a.	Pertumbuhan DBH	(9.99)	(9.78)	2.01	3.54	4.88
b.	Pertumbuhan DAU	3.46	3.46	4.22	4.92	5.24
c.	Pertumbuhan DAK	4.69	4.70	5.27	5.69	6.12

Sumber: Hasil Proyeksi

7.1.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah

mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2019-2023 yang akan datang.

Tabel VII.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**5,80**	**9.952.606.237.000,00**	**10.314.124.016.000,00**	**10.830.112.657.000,00**	**11.447.069.168.000,00**	**12.165.451.507.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**6,85**	**4.170.721.006.000,00**	**4.375.872.214.000,00**	**4.617.613.027.000,00**	**4.910.507.974.000,00**	**5.260.452.576.000,00**
1.1.1.	Pajak daerah	4,73	3.711.927.500.000,00	3.843.460.587.000,00	4.009.685.323.000,00	4.189.532.457.000,00	4.367.276.778.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	12,59	87.626.316.000,00	102.385.225.000,00	110.008.562.000,00	119.646.363.000,00	132.474.926.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang	62,36	109.494.062.000,00	137.467.473.000,00	185.581.088.000,00	260.268.985.000,00	382.595.408.000,00
	dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	9,24	261.673.128.000,00	292.558.929.000,00	312.338.054.000,00	341.060.169.000,00	378.105.464.000,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**5,22**	**5.726.538.455.000,00**	**5.913.666.135.000,00**	**6.187.913.977.000,00**	**6.511.975.541.000,00**	**6.880.413.278.000,00**
1.2.1	**Dana Perimbangan**	**5,26**	**5.697.596.607.000,00**	**5.892.598.430.000,00**	**6.166.824.918.000,00**	**6.490.464.701.000,00**	**6.858.472.221.000,00**
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	(0,01)	279.763.771.000,00	252.413.160.000,00	257.485.363.000,00	266.595.056.000,00	279.609.590.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	4,93	2.596.312.342.000,00	2.686.143.998.000,00	2.799.499.275.000,00	2.937.234.639.000,00	3.091.145.735.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	6,18	2.821.520.494.000,00	2.954.041.272.000,00	3.109.840.280.000,00	3.286.635.006.000,00	3.487.716.896.000,00
	- Dana Alokasi Khusus Fisik	-	360.814.685.000,00	376.451.937.000,00	426.054.264.000,00	468.659.690.000,00	525.461.244.000,00
	- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	2.460.705.809.000,00	2.577.589.335.000,00	2.683.786.016.000,00	2.817.975.316.000,00	2.962.255.652.000,00
1.2.4	**Dana Insentif Daerah**	(10,94)	28.941.848.000,00	21.067.705.000,00	21.089.059.000,00	21.510.840.000,00	21.941.057.000,00
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**(23,58)**	**55.346.776.000,00**	**24.585.667.000,00**	**24.585.653.000,00**	**24.585.653.000,00**	**24.585.653.000,00**
1.3.1	Hibah	(23,58)	55.346.776.000,00	24.585.667.000,00	24.585.653.000,00	24.585.653.000,00	24.585.653.000,00
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan						
	Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus ***)						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi						
	atau Pemerintah Daerah lainnya						

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
2	**BELANJA**	**5,72**	**9.952.606.237.000,00**	**10.414.124.016.000,00**	**10.830.112.657.000,00**	**11.447.069.168.000,00**	**12.165.451.507.000,00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**6,52**	**6.868.951.050.451,77**	**7.125.871.922.076,18**	**7.447.052.146.176,74**	**8.020.622.452.155,70**	**8.617.024.695.340,43**
			69,02	**68,43**	**68,76**	**70,07**	**70,83**
2.1.1	Belanja Pegawai	3,11	3.357.803.860.030,00	3.346.788.646.893,41	3.483.807.162.825,74	3.778.518.823.282,85	3.748.914.238.919,43
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	10,09	1.607.996.853.826,00	1.594.966.853.723,00	1.594.966.853.826,00	1.599.966.853.826,00	2.409.966.853.826,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	(20,83)	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00	600.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	11,41	1.401.200.995.695,77	1.716.117.080.659,77	1.895.228.788.725,00	2.169.037.434.246,85	2.015.694.261.795,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	(7,27)	480.849.340.900,00	446.849.340.800,00	446.849.340.800,00	446.849.340.800,00	416.849.340.800,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	32,89	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**3,92**	**3.083.655.186.548**	**3.288.252.093.924**	**3.383.060.510.823**	**3.426.446.715.844**	**3.548.426.811.660**
			30,98	**31,57**	**31,24**	**29,93**	**29,17**
2.2.1	Belanja Pegawai	6,17	15.926.175.569	16.722.484.347	17.558.608.565	18.436.538.993	19.358.365.943
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,41	1.671.008.737.886	1.739.642.785.506	1.782.923.444.198	1.787.528.261.782	1.845.467.285.330
2.2.3	Belanja Modal	6,29	1.396.720.273.093	1.531.886.824.070	1.582.578.458.060	1.620.481.915.069	1.683.601.160.387
			14,03	**14,71**	**14,61**	**14,16**	**13,84**
	Surplus / (Defisit)		-	(100.000.000.000,00)	-	-	-
3	**PEMBIAYAAN**	-	**-**	**100.000.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	(26,00)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	(76,16)	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

Selama periode 2019-2023, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 9,952 Triliun lebih pada tahun 2019 menjadi Rp 12,165 Triliun lebih pada tahun 2023. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan dari dana bagi hasil pajak/non pajak. Dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil daripada komponen PAD. Hal ini disebabkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang akan terus dilakukan di semua sektor, sementara dana transfer dari pemerintah pusat diantaranya DAU yang berkontribusi paling besar terhadap dana perimbangan diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya jenis penerimaan yang berasal dari daerah sendiri di Sulsel untuk lima tahun ke depan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan ke depan. Sumber pendapatan baru juga diharapkan diperoleh dari kreatifitas Pemerintah Provinsi untuk melihat dan menggali potensi dari kekayaan sumber daya alam wilayah yang menjadi kewenangannya. Selain itu, potensi pendapatan daerah baru juga diharapkan dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2019-2023 diharapkan dapat dicapai dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah akan didorong untuk lebih akuntabel sekaligus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak khususnya kaum milenial. Jenis-jenis layanan pajak juga akan semakin beragam dan semakin mudah diakses oleh wajib pajak kapanpun dan dimanapun. Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui peninjauan kembali regulasi dan tarif obyek retribusi daerah serta mengarahkan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Semua hal tersebut diharapkan menunjang efektifitas dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui rencana revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh pemerintah. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak

yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Sulsel yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang diharapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Sulsel lima tahun ke depan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat. Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, kebijakan penganggaran daerah yang defisit untuk lima tahun ke depan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulsel secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja langsung, khususnya pada alokasi belanja modal, melebihi pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung.

7.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Sulsel untuk lima tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Sulsel selama periode 2019-2023 yang akan datang.

Tabel VII.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapatan	**9.952.606.237.000**	**10.314.124.016.000**	**10.830.112.657.000**	**11.447.069.168.000**	**12.165.451.507.000**
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
	Total Penerimaan	**10.152.606.237.000**	**10.614.124.016.000**	**10.830.112.657.000**	**11.447.069.168.000**	**12.165.451.507.000**
	Dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	**6.868.951.050.451,77**	**7.125.871.922.076,18**	**7.447.052.146.176,74**	**8.020.622.452.155,70**	**8.617.024.695.340,43**
5	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000	100.000.000.000			-
Kapasitas Kapasitas riil kemampuan keuangan		**3.083.655.186.548**	**3.288.252.093.924**	**3.383.060.510.823**	**3.426.446.715.844**	**3.548.426.811.660**

Sumber : Hasil Proyeksi

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Sulsel untuk periode 2019-2023 yang akan datang diharapkan meningkat secara konsisten, dari Rp 3,08 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp3,548 trilyun pada tahun 2023. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreasitivitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel VII.1
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018-2023

KELOMPOK PRIORITAS RPJMD 2018-2023	TAHUN 2019	%	TAHUN 2020	%	TAHUN 2021	%	TAHUN 2022	%	TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KP 1	1.287.636.249.054,68	**41,76**	1.274.760.095.334,67	**38,77**	1.324.064.428.193,87	**39,14**	1.341.694.889.305,70	**39,16**	1.386.098.464.299,54	**39,06**
KP 2	997.816.057.285,45	**32,36**	1.185.256.951.167,38	**36,05**	1.187.462.791.541,04	**35,10**	1.205.876.602.635,72	**35,19**	1.240.187.897.708,72	**34,95**
KP 3	798.202.880.208,10	**25,88**	828.235.047.421,95	**25,19**	871.533.291.088,09	**25,76**	878.875.223.903,58	**25,65**	922.140.449.651,74	**25,99**
JUMLAH	**3.083.655.186.548,23**	**100,00**	**3.288.252.093.924,00**	**100,00**	**3.383.060.510.823,00**	**100,00**	**3.426.446.715.845,00**	**100,00**	**3.548.426.811.660,00**	**100,00**

Sumber : Hasil Proyeksi

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerahtermasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Untuk periode 2019-2023 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Sulsel akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

7.2. Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritasdipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untukperencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahpada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD.Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepaladaerah pada tingkat kebijakan.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD ke dalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari

satu tahun anggaran (multiyear). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnyakemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program perangkat daerah dan kebutuhan pendanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel VII.6.

Tabel 7.7
KERANGKA PENDANAAN PAGU INDIKATIF PROGRAM RPJMD

//eplanning.sulselprov.go.id/

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Grandtotal				**3,083,655,186,548.23**		**3,288,252,093,924.0**		**3,383,060,510,823.0**		**3,426,446,715,845.0**		**3,548,426,811,659.15**		**16,729,841,318,799.40**	
1.01			**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**1,995,067,453,496.73**		**2,089,023,518,759.17**		**2,167,402,599,813.35**		**2,201,160,273,377.34**		**2,272,554,157,255.76**		**10,725,208,002,702.30**	
1.01	**01**		**Pendidikan**				**581,666,397,174.0**		**581,782,080,923.39**		**603,345,418,389.43**		**611,200,765,651.81**		**632,648,039,785.57**		**3,010,642,701,924.20**	
1.01	**01**		**Dinas Pendidikan**				**581,666,397,174.0**		**581,782,080,923.39**		**603,345,418,389.43**		**611,200,765,651.81**		**632,648,039,785.57**		**3,010,642,701,924.20**	
1.01	01	01	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas) Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas) % Jumlah warga negara usia 16 â€“ 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	83.6 62.5 74.23%	88.12 63 74.23 %	527,908,752,174.0	88.7 63.5 75.25 %	527,203,518,279.0	89.25 63.95 75.68 %	546,775,081,644.16	89.85 64.45 76.29 %	553,888,484,829.93	90.15 65 78.65 %	573,354,651,639.86	90.15 65 78.65 %	2,729,130,488,566.95	Dinas Pendidikan
1.01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIONAL (Prioritas)	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan % Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas)	0 Orang n.a	100 Orang 44 %	521,400,000.0	150 Orang 45.6 %	522,581,804.0	200 Orang 46.75 %	541,950,925.46	250 Orang 47.65 %	549,006,937.80	300 Orang 49 %	568,271,806.17	1000 Orang 64 %	2,703,211,473.43	Dinas Pendidikan
1.01	01	03	PROGRAM PENDIDIKAN SISWA KEBUTUHAN KHUSUS (Prioritas)	% Jumlah warga negara usia 4 â€“ 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	n.a	80 %	178,050,000.0	81 %	178,453,568.0	82 %	185,067,821.78	83 %	187,477,340.38	84 %	194,055,993.65	84 %	923,104,723.81	Dinas Pendidikan
1.01	01	04	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN SEKOLAH SEHAT (Prioritas)	% Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme % SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas) % Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	0% 0% 0%	50 % 90 % 50.05 %	2,609,102,245.0	51 % 91 % 52.5 %	3,115,016,030.0	52 % 92 % 54.25 %	3,211,939,732.07	53 % 93 % 55.6 %	3,247,248,243.09	54 % 94 % 57.25 %	3,343,650,259.40	54 % 94 % 69.56 %	15,526,956,509.56	Dinas Pendidikan
1.01	01	05	PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BAGI SISWA MISKIN (Prioritas)	Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas)	0%	50.05 %	29,158,714,160.0	54.93 %	110,000,000.0	59.8 %	120,000,000.0	64.68 %	140,000,000.0	69.56 %	150,000,000.0	69.56 %	29,678,714,160.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH (Prioritas)	% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas)	0%	45.46 %	377,401,750.0	46.85 %	878,257,168.0	48.25 %	892,276,999.78	49.65 %	897,384,309.72	51.05 %	911,328,680.72	51.05 %	3,956,648,908.22	Dinas Pendidikan
1.01	01	07	PROGRAM PROMOSI MINAT KEILMUAN	Jumlah perolehan medali siswa pada lomba/kejuruan tingkat nasional/International	13 Medali	30 Medali	1,497,847,300.0	32 Medali	1,501,242,317.0	34 Medali	1,556,884,791.78	36 Medali	1,577,154,889.67	38 Medali	1,632,497,872.15	38 Medali	7,765,627,170.60	Dinas Pendidikan
1.01	01	08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	% Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	50%	60 %	1,265,850,000.0	70 %	1,358,923,166.0	80 %	1,409,290,683.33	90 %	1,427,639,157.31	100 %	1,477,735,574.22	100 %	6,939,438,580.86	Dinas Pendidikan
1.01	01	09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	% Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % Guru SMK yang bersertifikat % Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan % Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % Guru SMA yang bersertifikat	99.40% 42.50% 1.14 97.95% 53.81%	99.4 % 42.5 % 1.14 % 97.95 % 53.81 %	0.0	99.45 % 42.75 % 1.14 % 98.18 % 53.85 %	29,224,805,232.0	99.48 % 43.16 % 1.13 % 98.39 % 53.89 %	30,308,001,772.74	99.54 % 43.37 % 1.13 % 98.52 % 54.18 %	30,702,601,402.56	99.6 % 43.75 % 1.13 % 98.61 % 54.28 %	31,779,967,704.94	99.6 % 43.75 % 1.13 % 98.61 % 54.28 %	122,015,376,112.24	Dinas Pendidikan
1.01	01	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	13,190,709,145.0	100 %	13,471,173,824.0	100 %	13,970,473,264.29	100 %	14,152,363,961.67	100 %	14,648,975,953.32	100 %	69,433,696,148.28	Dinas Pendidikan
1.01	01	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	4,164,548,400.0	100 %	3,422,287,806.39	100 %	3,549,132,461.48	100 %	3,595,340,930.34	100 %	3,721,502,851.05	100 %	18,452,812,449.26	Dinas Pendidikan
1.01	01	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	408,622,000.0	100 %	409,548,182.0	100 %	424,727,792.61	100 %	430,257,600.57	100 %	445,355,508.21	100 %	2,118,511,083.39	Dinas Pendidikan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	01	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	385,400,000.0	100 %	386,273,547.0	100 %	400,590,499.95	100 %	405,806,048.77	100 %	420,045,941.88	100 %	1,998,116,037.60	Dinas Pendidikan
1.01	**02**		**Kesehatan**				**467,299,274,425.45**		**453,556,640,568.09**		**470,886,293,636.95**		**477,199,344,342.47**		**494,435,721,625.48**		**2,363,377,274,598.44**	
1.01	**02**		**Dinas Kesehatan**				**187,338,871,512.0**		**171,961,680,073.0**		**178,891,281,263.0**		**181,415,678,232.0**		**188,307,981,272.11**		**907,915,492,352.11**	
1.01	02	01	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB) (Prioritas)	% Penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100%	100 %	11,550,000,000.0	100 %	11,162,130,021.0	100 %	10,159,896,973.0	100 %	11,715,770,474.0	100 %	12,059,565,274.0	100 %	56,647,362,742.0	Dinas Kesehatan
				% Penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	85%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.01	02	02	PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL (Prioritas)	Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)	0 Unit	2 Unit	145,845,418,992.0	4 Unit	123,778,800,054.0	6 Unit	130,471,937,258.0	6 Unit	131,495,895,722.0	6 Unit	136,713,061,945.0	6 Unit	668,305,113,971.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	% Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional	25 %	30 %	2,062,718,800.0	35 %	2,168,000,000.0	40 %	2,272,390,000.0	45 %	2,294,417,738.0	50 %	2,491,574,490.0	50 %	11,289,101,028.0	Dinas Kesehatan
				% RS yang Terakreditasi Nasional	59 %	70 %		75 %		80 %		90 %		100 %		100 %		
				% Puskesmas Terakreditasi	47.6 %	60 %		70 %		80 %		90 %		100 %		100 %		
				% Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	40 %	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		90 %		
				% RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU	70 %	75 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		
				Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas)	0 Klinik	2 Klinik		2 Klinik		4 Klinik		4 Klinik		4 Klinik		4 Klinik		
1.01	02	04	PROGRAM PELAYANAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) (Prioritas)	% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)	9.9 %	11 %	250,000,000.0	11.5 %	5,492,101,020.0	12 %	5,692,101,020.0	12.5 %	5,892,101,020.0	13 %	6,092,101,020.0	13 %	23,418,404,080.0	Dinas Kesehatan
				% Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Prioritas)	4.4 %	5.5 %		6 %		6.5 %		7 %		7.5 %		7.5 %		
1.01	02	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas)	0 Unit	6 Unit	646,936,000.0	6 Unit	631,138,208.0	6 Unit	653,669,842.0	6 Unit	567,807,939.0	6 Unit	681,881,719.88	6 Unit	3,181,433,708.88	Dinas Kesehatan
1.01	02	07	PROGRAM KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	65 %	70 %	4,572,479,496.45	75 %	8,130,779,117.0	80 %	8,254,753,442.0	85 %	8,252,756,482.0	90 %	8,265,232,511.0	90 %	37,476,001,048.45	Dinas Kesehatan
				% Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina	45 %	50 %		55 %		60 %		65 %		70 %		70 %		
				Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan	60 %	70 %		80 %		90 %		95 %		100 %		100 %		
				% Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang baik	54 %	55 %		57 %		59 %		61 %		63 %		63 %		
				% Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat	91.4 %	91.1 %		92 %		91.1 %		91.1 %		95 %		95 %		
1.01	02	08	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Prioritas)	Prevalensi Balita Kurus (Wasting)	8.7 %	8.25 %	2,630,898,000.0	8 %	2,560,616,000.0	8.25 %	2,657,684,500.0	8.25 %	2,649,770,382.0	7.25 %	2,766,491,549.23	7.25 %	13,265,460,431.23	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight)	23 %	22 %		21 %		20.3 %		18.5 %		17 %		17 %		
				Prevalensi Balita Stunting (Prioritas)	34.8 %	33 %		31 %		33 %		33 %		25 %		25 %		
				Jumlah Kematian Ibu	115 Kasus	114 Kasus		113 Kasus		112 Kasus		111 Kasus		110 Kasus		110 Kasus		
				% Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS	41.66 %	45 %		48 %		45 %		45 %		60 %		60 %		
				Jumlah Kematian Bayi	1059 Kasus	1057 Kasus		1055 Kasus		1057 Kasus		1057 Kasus		1049 Kasus		1049 Kasus		
				% Lansia Usia â‰¥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia	30 %	50 %		60 %		65 %		70 %		75 %		75 %		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				% Posyandu Aktif	55.69 %	61 %		62 %		61 %		61 %		65 %		65 %		
1.01	02	09	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	96.45 %	96.5 %		96.5 %		96.5 %		96.5 %		97 %		97 %		Dinas Kesehatan
				% Orang dengan HIV (ODHA) Mendapatkan Pengobatan	47 %	55 %		60 %		70 %		75 %		85 %		85 %		
				Angka Penemuan/Kejadian Malaria per 1.000 Penduduk (API)	0.4/1000 Penduduk	1 /1000 Penduduk (<)		1 /1000 Penduduk (<)		1 /1000 Penduduk (<)		1 /1000 Penduduk (<)		1 /1000 Penduduk (<)		1 /1000 Penduduk (<)		
				Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate)	197/100.000 Penduduk	202 /100000 Penduduk	3,292,706,000.0	207 /100000 Penduduk	3,738,961,263.0	202 /100000 Penduduk	3,468,419,457.0	202 /100000 Penduduk	3,302,805,496.0	222 /100000 Penduduk	3,454,805,496.0	222 /100000 Penduduk	17,257,697,712.0	
				Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				% Kab/Kota yang minimal 20% Puskesmasnya melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	75 %	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		
				% Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu	30 %	40 %		50 %		60 %		70 %		80 %		80 %		
1.01	02	10	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	% Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Kerja	87.6 %	88 %		90 %		88 %		88 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				% Kualitas Air Minum Memenuhi Syarat	87.13 %	89 %	810,998,000.0	90 %	595,073,168.0	89 %	616,317,280.0	89 %	567,807,939.0	94 %	642,917,050.0	94 %	3,233,113,437.0	
				% Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Olahraga	60.5 %	70 %		75 %		70 %		70 %		100 %		100 %		
				Cakupan Akses Sanitasi Dasar	85.12 %	93 %		95 %		93 %		93 %		100 %		100 %		
1.01	02	11	PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage	75.30 %	100 %	456,050,000.0	100 %	432,780,485.0	100 %	466,907,030.0	100 %	378,538,626.0	100 %	467,576,036.0	100 %	2,201,852,177.0	
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	9,226,076,116.0	100 %	8,511,349,547.0	100 %	7,871,233,570.0	100 %	7,895,657,711.0	100 %	8,176,179,716.0	100 %	41,680,496,660.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	5,331,789,807.55	100 %	3,964,300,785.0	100 %	5,397,445,267.0	100 %	5,488,810,077.0	100 %	5,571,947,768.0	100 %	25,754,293,704.55	Dinas Kesehatan
1.01	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	100 %	368,734,300.0	100 %	360,650,405.0	100 %	373,525,624.0	100 %	378,538,626.0	100 %	389,646,697.0	100 %	1,871,095,652.0	Dinas Kesehatan
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	98 %	100 %	294,066,000.0	100 %	435,000,000.0	100 %	535,000,000.0	100 %	535,000,000.0	100 %	535,000,000.0	100 %	2,334,066,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	**02**		**UPT Transfusi Darah**				**12,591,393,788.0**		**13,619,933,411.09**		**14,087,682,232.96**		**14,258,079,298.51**		**14,723,310,491.23**		**69,280,399,221.79**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah	100%	100 %	8,608,284,220.0	100 %	9,142,995,736.09	100 %	9,457,778,825.61	100 %	9,565,273,186.37	100 %	9,884,335,062.79	100 %	46,658,667,030.86	UPT Transfusi Darah
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,378,629,568.0	100 %	3,791,087,562.0	100 %	3,916,597,892.54	100 %	3,962,320,278.30	100 %	4,087,155,057.52	100 %	19,135,790,358.36	UPT Transfusi Darah
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	578,245,000.0	100 %	659,555,649.0	100 %	686,036,465.08	100 %	702,861,750.58	100 %	723,226,947.76	100 %	3,349,925,812.42	UPT Transfusi Darah
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	26,235,000.0	100 %	26,294,464.0	100 %	27,269,049.73	100 %	27,624,083.26	100 %	28,593,423.16	100 %	136,016,020.15	UPT Transfusi Darah
1.01	**02**		**UPT Pelatihan Kesehatan**				**3,914,398,626.0**		**3,923,270,992.58**		**4,068,684,230.90**		**4,121,657,082.87**		**4,266,287,643.41**		**20,294,298,575.76**	
1.01	02	17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang telah bersertifikasi	100%	100 %	75,000,000.0	100 %	1,160,000,000.0	100 %	1,475,000,000.0	100 %	2,075,000,000.0	100 %	2,060,247,944.41	100 %	6,845,247,944.41	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN MUTU PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN	Cakupan Pelatihan yang terakreditasi	100%	100 %	356,000,000.0	100 %	300,000,000.0	100 %	240,000,000.0	100 %	130,000,000.0	100 %	200,000,000.0	100 %	1,226,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	1,568,596,000.0	100 %	1,206,131,473.0	100 %	1,271,514,699.0	100 %	1,317,133,449.0	100 %	1,356,039,699.0	100 %	6,719,415,320.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,817,602,626.0	100 %	1,116,639,519.58	100 %	930,669,531.90	100 %	478,023,633.87	100 %	490,000,000.0	100 %	4,832,935,311.35	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	97,200,000.0	100 %	140,500,000.0	100 %	151,500,000.0	100 %	121,500,000.0	100 %	160,000,000.0	100 %	670,700,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan
1.01	**02**		**UPT RSK Gigi dan Mulut**				**12,087,475,045.45**		**12,114,872,487.52**		**12,563,901,586.87**		**12,727,479,210.77**		**13,174,091,438.70**		**62,667,819,769.31**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	100%	100 %	582,800,000.0	100 %	5,046,025,690.0	100 %	5,233,053,029.67	100 %	5,301,185,557.96	100 %	5,487,206,234.45	100 %	21,650,270,512.08	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	0 RS	0.0	1 RS	888,008,204.04	1 RS	920,921,595.62	1 RS	932,911,674.13	1 RS	965,647,909.99	1 RS	3,707,489,383.78	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Gigi dan Mulut	100%	100 %	1,454,675,045.45	100 %	2,918,650,446.0	100 %	3,026,828,140.57	100 %	3,066,236,389.02	100 %	3,173,831,824.25	100 %	13,640,221,845.29	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	13	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSKDGigi dan Mulut dalam kondisi baik	100%	100 %	0.0	100 %	75,169,995.48	100 %	77,956,117.02	100 %	78,971,078.52	100 %	81,742,204.57	100 %	313,839,395.59	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSKD Gigi dan Mulut	7%	7 %	10,050,000,000.0	0 %	0.0	0 %	0.0	0 %	0.0	0 %	0.0	7 %	10,050,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	16	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan Obat-Obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan	100%	0 %	0.0	100 %	1,343,037,241.0	100 %	1,392,815,957.27	100 %	1,410,949,936.05	100 %	1,460,460,721.65	100 %	5,607,263,855.97	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	0 %	0.0	100 %	1,596,451,129.0	100 %	1,655,622,450.47	100 %	1,677,178,078.29	100 %	1,736,030,913.62	100 %	6,665,282,571.38	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	0 %	0.0	100 %	118,768,592.0	100 %	123,170,664.88	100 %	124,774,304.05	100 %	129,152,683.22	100 %	495,866,244.15	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	0 %	0.0	100 %	40,311,163.0	100 %	41,805,267.02	100 %	42,349,557.04	100 %	43,835,619.57	100 %	168,301,606.63	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	88,450,027.0	100 %	91,728,364.35	100 %	92,922,635.71	100 %	96,183,327.38	100 %	369,284,354.44	UPT RSK Gigi dan Mulut
1.01	**02**		**Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**				**97,263,370,454.0**		**97,483,827,377.16**		**101,096,995,840.30**		**102,413,243,524.14**		**106,006,964,331.16**		**504,264,401,526.76**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	80%	80 %	221,720,454.0	85 %	480,000,000.0	90 %	430,000,000.0	95 %	430,000,000.0	100 %	380,000,000.0	100 %	1,941,720,454.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS	1 RS	200,000,000.0	1 RS	150,000,000.0	1 RS	350,000,000.0	1 RS	500,000,000.0	1 RS	350,000,000.0	1 RS	1,550,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji	80%	80 %	48,412,050,000.0	85 %	37,387,527,378.16	80 %	39,583,795,840.30	80 %	39,631,153,524.14	100 %	42,289,225,331.16	100 %	207,303,752,073.76	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	13	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji dalam kondisi baik	80%	80 %	600,000,000.0	85 %	1,550,000,000.0	80 %	1,550,000,000.0	80 %	1,600,000,000.0	100 %	1,650,000,000.0	100 %	6,950,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSUD Labuang Baji	100%	100 %	46,389,000,000.0	100 %	47,000,000,000.0	100 %	48,000,000,000.0	100 %	49,000,000,000.0	100 %	50,000,000,000.0	100 %	240,389,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	16	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan	80%	80 %	1,150,000,000.0	85 %	3,200,000,000.0	80 %	3,200,000,000.0	80 %	3,200,000,000.0	100 %	3,200,000,000.0	100 %	13,950,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	90%	90 %	140,000,000.0	95 %	7,056,000,000.0	90 %	7,106,400,000.0	90 %	7,161,840,000.0	100 %	7,222,824,000.0	100 %	28,687,064,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	60%	60 %	150,600,000.0	70 %	265,000,000.0	60 %	281,500,000.0	60 %	299,650,000.0	100 %	319,615,000.0	100 %	1,316,365,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	90%	0 %	0.0	90 %	200,000,000.0	90 %	200,000,000.0	90 %	200,000,000.0	100 %	200,000,000.0	100 %	800,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	98%	0 %	0.0	98 %	195,299,999.0	98 %	395,300,000.0	98 %	390,600,000.0	99 %	395,300,000.0	99 %	1,376,499,999.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	**02**		**Rumah Sakit Khusus Daerah**				**40,550,000,000.0**		**40,641,910,534.0**		**42,148,273,930.76**		**42,697,029,781.29**		**44,195,285,270.94**		**210,232,499,516.99**	
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD	100 %	100 %	2,748,084,747.0	100 %	2,754,313,549.0	100 %	2,856,400,214.59	100 %	2,893,589,550.78	100 %	2,995,126,740.87	100 %	14,247,514,802.24	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan Rumah Sakit Khusus Daerah	100 %	100 %	30,393,326,653.0	100 %	30,462,216,095.0	100 %	31,591,276,385.64	100 %	32,002,583,804.09	100 %	33,125,566,997.84	100 %	157,574,969,935.57	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	16	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan obat-obatan, makan minum dan logistik RS/UPTD Kesehatan	100 %	100 %	1,267,000,008.40	100 %	1,269,871,788.0	100 %	1,316,938,678.77	100 %	1,334,084,761.81	100 %	1,380,898,318.36	100 %	6,568,793,555.34	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	6,141,588,591.60	100 %	6,155,509,102.0	100 %	6,383,658,651.76	100 %	6,466,771,664.61	100 %	6,693,693,213.87	100 %	31,841,221,223.84	Rumah Sakit Khusus Daerah
1.01	**02**		**Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar**				**56,800,000,000.0**		**56,928,742,744.33**		**59,038,765,949.87**		**59,807,430,125.22**		**61,906,096,261.16**		**294,481,035,080.58**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	85%	0 %	0.0	87.5 %	1,192,500,000.0	90 %	1,465,375,000.0	95 %	1,323,643,750.0	100 %	1,922,325,937.0	100 %	5,903,844,687.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1RS	0 RS	0.0	1 RS	1,150,000,000.0	1 RS	825,000,000.0	1 RS	925,000,000.0	1 RS	1,020,000,000.0	1 RS	3,920,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar	85%	85 %	18,000,000,000.0	85.5 %	14,473,298,757.33	87.5 %	14,176,593,082.71	90 %	14,379,999,999.50	95 %	13,762,803,159.85	95 %	74,792,694,999.39	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	13	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar dalam kondisi baik	90%	0 %	0.0	92.5 %	350,000,000.0	92.5 %	1,170,000,000.0	95.5 %	1,119,415,093.0	97.5 %	1,100,000,000.0	97.5 %	3,739,415,093.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSUD Haji Makassar	1%	1 %	38,800,000,000.0	1.5 %	38,887,943,987.0	1 %	40,329,297,867.16	1 %	40,854,371,282.72	2.5 %	42,287,967,164.31	2.5 %	201,159,580,301.19	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	80%	0 %	0.0	85 %	125,000,000.0	90 %	150,000,000.0	95 %	375,000,000.0	100 %	700,000,000.0	100 %	1,350,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	80%	0 %	0.0	85 %	650,000,000.0	90 %	802,500,000.0	95 %	700,000,000.0	100 %	963,000,000.0	100 %	3,115,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	90%	0 %	0.0	90 %	100,000,000.0	92.5 %	120,000,000.0	95 %	130,000,000.0	100 %	150,000,000.0	100 %	500,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	**02**		**Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah**				**22,500,000,000.0**		**22,550,998,446.26**		**23,386,835,103.39**		**23,691,323,553.12**		**24,522,661,371.06**		**116,651,818,473.83**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100%	0 %	0.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	400,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	02	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	0 RS	0 RS	0.0	1 RS	350,000,000.0	1 RS	360,000,000.0	1 RS	370,000,000.0	1 RS	380,000,000.0	1 RS	1,460,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah	100%	100 %	7,000,000,000.0	100 %	5,450,000,000.0	100 %	5,675,000,000.0	100 %	5,820,000,000.0	100 %	6,119,272,426.55	100 %	30,064,272,426.55	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	02	13	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah dalam kondisi baik	100%	0 %	0.0	100 %	330,000,000.0	100 %	350,904,254.39	100 %	350,000,000.0	100 %	300,000,000.0	100 %	1,330,904,254.39	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	7.5%	7.5 %	15,500,000,000.0	7.5 %	15,535,132,263.26	7.5 %	16,110,930,849.0	7.5 %	16,320,689,560.80	7.5 %	16,893,388,944.51	7.5 %	80,360,141,617.57	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	0 %	0.0	100 %	595,866,183.0	100 %	725,000,000.0	100 %	525,000,000.0	100 %	525,000,000.0	100 %	2,370,866,183.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	0 %	0.0	100 %	60,000,000.0	100 %	65,000,000.0	100 %	75,633,992.32	100 %	75,000,000.0	100 %	275,633,992.32	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	130,000,000.0	0 %	0.0	100 %	130,000,000.0	100 %	130,000,000.0	100 %	390,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	**02**		**Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi**				**21,357,540,000.0**		**21,405,948,949.15**		**22,199,345,164.17**		**22,488,372,908.39**		**23,277,498,717.28**		**110,728,705,738.99**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100%	100 %	300,000,000.0	100 %	400,679,979.0	100 %	411,824,468.05	100 %	415,884,314.04	100 %	426,968,818.28	100 %	1,955,357,579.37	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	100%	100 %	1,057,540,000.0	100 %	1,959,937,018.15	100 %	1,999,222,837.45	100 %	2,013,534,324.91	100 %	2,052,608,680.28	100 %	9,082,842,860.79	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	74.78%	5.22 %	20,000,000,000.0	5 %	19,045,331,952.0	5 %	19,788,297,858.67	5 %	20,058,954,269.44	5 %	20,797,921,218.72	25.22 %	99,690,505,298.83	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	**02**		**Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat**				**12,896,225,000.0**		**12,925,455,553.0**		**13,404,528,334.73**		**13,579,050,626.16**		**14,055,544,828.43**		**66,860,804,342.32**	
1.01	02	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)	Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100%	0 %	0.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	400,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)	Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	0 RS	1 RS	200,000,000.0	1 RS	200,453,320.0	1 RS	207,882,978.70	1 RS	210,589,542.69	1 RS	217,979,212.19	1 RS	1,036,905,053.58	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat	100%	100 %	1,246,224,000.0	100 %	949,048,688.0	100 %	945,343,786.22	100 %	912,208,711.27	100 %	958,254,628.64	100 %	5,011,079,814.13	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	13	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	100%	0 %	0.0	100 %	200,000,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	300,000,000.0	100 %	300,000,000.0	100 %	1,050,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	% Peningkatan pendapatan RSUD Sayang Rakyat	2%	2 %	9,750,000,000.0	2 %	9,772,099,327.0	2 %	10,134,295,211.47	2 %	10,266,240,206.35	2 %	10,626,486,594.12	2 %	50,549,121,338.94	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	16	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan	100%	100 %	900,000,000.0	100 %	902,039,938.0	100 %	935,473,404.14	100 %	947,652,942.12	100 %	980,906,454.84	100 %	4,666,072,739.10	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	800,001,000.0	100 %	531,814,280.0	100 %	501,532,954.20	100 %	502,359,223.73	100 %	501,917,938.64	100 %	2,837,625,396.57	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	0 %	0.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	400,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	0 %	0.0	100 %	20,000,000.0	100 %	30,000,000.0	100 %	40,000,000.0	100 %	20,000,000.0	100 %	110,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	150,000,000.0	100 %	200,000,000.0	100 %	200,000,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	800,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	**03**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**811,516,482,674.28**		**907,595,580,625.78**		**940,800,630,777.64**		**955,575,792,897.29**		**984,331,356,391.83**		**4,599,819,843,366.82**	
1.01	**03**		**Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang**				**210,150,412,390.0**		**322,366,455,441.78**		**328,731,780,888.44**		**334,368,764,231.68**		**340,904,845,208.51**		**1,536,522,258,160.41**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	03	01	PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	73.36%	100 %	30,000,000.0	100 %	800,000,000.0	100 %	800,000,000.0	100 %	20,000,000,000.0	100 %	20,000,000,000.0	100 %	41,630,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	83.58%	0 %	0.0	100 %	800,000,000.0	100 %	800,000,000.0	100 %	20,000,000,000.0	100 %	20,000,000,000.0	100 %	41,600,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (Prioritas)	% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM) Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas)	67.77% 58.858 Ha	69.47 % 10786.8 Ha	117,785,237,000.0	71.46 % 15014.3 Ha	265,608,022,473.0	69.47 % 15014.3 Ha	255,556,510,793.0	69.47 % 15014.3 Ha	224,853,496,217.0	76.78 % 15014.3 Ha	227,085,841,604.0	76.78 % 70844 Ha	1,090,889,108,087.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	06	PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas)	24 Kawasan	1 Kawasan	67,500,000.0	8 Kawasan	350,000,000.0	8 Kawasan	450,000,000.0	8 Kawasan	456,750,000.0	8 Kawasan	463,601,250.0	38 Kawasan	1,787,851,250.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (Prioritas)	Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas) Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas)	50 Meter 79.45%	15000 Meter 80 %	11,727,968,032.0	17500 Meter 85 %	21,211,246,095.0	17000 Meter 90 %	21,311,448,550.0	22000 Meter 95 %	21,721,120,277.0	20000 Meter 100 %	22,136,937,080.0	91500 Meter 100 %	98,108,720,034.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	% Ketaatan terhadap RTRW	68%	70 %	1,475,733,100.0	70 %	1,660,060,834.50	100 %	1,865,000,000.0	100 %	1,892,975,000.0	100 %	1,921,369,624.0	100 %	8,815,138,558.50	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	13	PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEDUNG	% Bangunan /Gedung /Lingkungan Negara yang Terkelola	12%	95 %	67,093,681,708.0	95 %	18,950,000,000.0	100 %	34,835,632,015.0	100 %	32,102,528,736.0	100 %	35,823,816,667.0	100 %	188,805,659,126.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	10,755,232,550.0	100 %	10,916,561,039.28	100 %	11,080,309,455.44	100 %	11,246,514,126.68	100 %	11,415,211,810.51	100 %	55,413,828,981.91	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	599,560,000.0	100 %	649,560,000.0	100 %	599,560,000.0	100 %	649,560,000.0	100 %	599,560,000.0	100 %	3,097,800,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	560,500,000.0	100 %	865,180,000.0	100 %	876,657,700.0	100 %	888,307,565.0	100 %	900,132,178.0	100 %	4,090,777,443.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	55,000,000.0	100 %	555,825,000.0	100 %	556,662,375.0	100 %	557,512,310.0	100 %	558,374,995.0	100 %	2,283,374,680.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	**03**		**Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**				**601,366,070,284.28**		**585,229,125,184.0**		**612,068,849,889.20**		**621,207,028,665.61**		**643,426,511,183.32**		**3,063,297,585,206.41**	
1.01	03	04	PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)	% Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas)	60%	75 %	5,650,700,000.0	85 %	4,014,588,000.0	90 %	4,040,867,400.0	95 %	4,068,460,770.0	100 %	4,097,433,808.50	100 %	21,872,049,978.50	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	05	PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)	% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM)	58.94%	60.2 %	357,254,311,554.28	62.61 %	283,652,045,943.32	65.43 %	316,319,776,635.40	68.41 %	319,767,539,568.87	71.55 %	333,492,722,400.13	71.55 %	1,610,486,396,102.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	06	PROGRAM PENGENDALIAN JALAN AKSES WILAYAH TERISOLIR (Prioritas)	Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (Prioritas)	0 Wilayah	3 Wilayah	0.0	3 Wilayah	700,000,000.0	3 Wilayah	700,000,000.0	3 Wilayah	700,000,000.0	3 Wilayah	700,000,000.0	15 Wilayah	2,800,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	09	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	% Panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	85.07	87.02 %	175,220,982,530.0	93.28 %	233,062,686,432.68	100 %	224,861,482,285.10	100 %	229,656,647,469.86	100 %	235,781,470,406.90	100 %	1,098,583,269,124.54	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	12	PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	% Kesesuaian perencanaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan	100%	100 %	41,680,800,000.0	100 %	42,375,273,602.0	100 %	43,923,644,292.31	100 %	44,487,703,055.69	100 %	46,027,739,736.66	100 %	218,495,160,686.66	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	03	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	13,539,581,400.0	100 %	13,641,461,012.0	100 %	14,031,838,331.43	100 %	14,213,334,765.12	100 %	14,491,059,281.45	100 %	69,917,274,790.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	5,062,324,800.0	100 %	4,975,547,026.0	100 %	5,275,195,817.91	100 %	5,345,070,246.14	100 %	5,753,657,818.19	100 %	26,411,795,708.24	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,775,000,000.0	100 %	1,622,473,211.0	100 %	1,687,072,139.44	100 %	1,723,299,001.95	100 %	1,793,767,325.92	100 %	8,601,611,678.31	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	1,182,370,000.0	100 %	1,185,049,957.0	100 %	1,228,972,987.61	100 %	1,244,973,787.98	100 %	1,288,660,405.57	100 %	6,130,027,138.16	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	**04**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**99,034,470,000.0**		**99,258,941,293.19**		**102,937,903,086.0**		**104,277,680,000.11**		**107,937,278,750.21**		**513,446,273,129.51**	
1.01	**04**		**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**				**101,534,470,000.0**		**101,764,607,787.19**		**105,536,440,319.97**		**106,910,488,025.11**		**110,662,018,902.21**		**526,408,025,034.48**	
1.01	04	01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)	% Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM) % Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM)	100% 100%	100 % 100 %	199,150,000.0	100 % 100 %	1,100,000,000.0	100 % 100 %	1,120,000,000.0	100 % 100 %	1,142,000,000.0	100 % 100 %	1,516,200,000.0	100 % 100 %	5,077,350,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)	1.25% 0 %	0 % 0 %	0.0	1.75 % 5 %	3,100,000,000.0	2.25 % 5 %	3,000,000,000.0	2.75 % 5 %	3,100,000,000.0	3.75 % 5 %	3,000,000,000.0	3.75 % 5 %	12,200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,
1.01	04	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas) Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata	0 Lokasi 0 Lokasi	2 Lokasi 2 lokasi	82,107,240,000.0	2 Lokasi 0 lokasi	66,076,249,998.19	2 Lokasi 0 lokasi	64,355,000,000.0	2 Lokasi 0 lokasi	63,738,000,000.0	2 Lokasi 0 lokasi	65,234,825,000.0	10 Lokasi 2 lokasi	341,511,314,998.19	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,
1.01	04	04	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)	% Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas) Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	35.49% 24 Kab/Kota 880 Ha	0 % 0 Kab/Kota 0 Ha	0.0	49 % 24 Kab/Kota 860 Ha	3,800,000,000.0	56 % 24 Kab/Kota 840 Ha	3,900,000,000.0	63 % 24 Kab/Kota 820 Ha	4,000,000,000.0	70 % 24 Kab/Kota 780 Ha	3,500,000,000.0	70 % 24 Kab/Kota 780 Ha	15,200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	05	PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)	Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota	0 RT 24 Kab/Kota	0 RT 24 Kab/Kota	2,126,000,000.0	1750 RT 24 Kab/Kota	11,523,750,000.0	1750 RT 24 Kab/Kota	12,560,000,000.0	1750 RT 24 Kab/Kota	12,885,000,000.0	1750 RT 24 Kab/Kota	12,400,000,000.0	7000 RT 24 Kab/Kota	51,494,750,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	06	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Cakupan Pembinaan Penanganan Sanitasi Kabupaten/Kota % Sekolah yang memiliki Infrastruktur sanitasi Layak	24 Kab/Kota 50%	24 Kab/Kota 10 %	4,632,000,000.0	24 Kab/Kota 10 %	2,575,000,000.0	24 Kab/Kota 10 %	4,590,000,000.0	24 Kab/Kota 10 %	4,430,000,000.0	24 Kab/Kota 10 %	5,294,475,000.0	24 Kab/Kota 100 %	21,521,475,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,
1.01	04	08	PROGRAM SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Usaha Jasa/Pelaksana Perencana Rumah dan PSU Kemampuan Menengah Tersertifikasi	0 Peserta yang bersertifikat	50 Unit	200,000,000.0	50 Unit	400,000,000.0	50 Unit	200,000,000.0	50 Unit	200,000,000.0	50 Unit	200,000,000.0	250 Unit	1,200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	7,626,790,000.0	100 %	8,393,580,000.0	100 %	9,337,680,000.0	100 %	10,431,580,000.0	100 %	12,354,828,750.0	100 %	48,144,458,750.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	697,000,000.0	100 %	1,042,200,000.0	100 %	2,610,223,086.0	100 %	2,971,100,000.11	100 %	3,136,950,000.21	100 %	10,457,473,086.32	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	710,500,000.0	100 %	500,000,000.0	100 %	425,000,000.0	100 %	500,000,000.0	100 %	410,000,000.0	100 %	2,545,500,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	04	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	735,790,000.0	100 %	748,161,295.0	100 %	840,000,000.0	100 %	880,000,000.0	100 %	890,000,000.0	100 %	4,093,951,295.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	**05**		**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**				**19,763,756,168.0**		**21,007,419,351.72**		**23,023,035,065.45**		**24,283,728,009.98**		**25,995,491,966.33**		**114,073,430,561.48**	
1.01	**05**		**Satuan Polisi Pamong Praja**				**12,237,523,636.0**		**13,464,127,879.04**		**15,200,156,879.87**		**16,358,998,674.35**		**17,792,680,776.02**		**75,053,487,845.28**	
1.01	05	01	PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Prioritas)	% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100%	100 %	232,931,000.0	100 %	550,000,000.0	100 %	695,000,000.0	100 %	804,998,000.0	100 %	945,000,000.0	100 %	3,227,929,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA	Cakupan petugas satpol yang terlatih	100%	100 %	94,797,500.0	100 %	900,000,000.0	100 %	1,405,000,000.0	100 %	1,670,000,000.0	100 %	2,055,000,000.0	100 %	6,124,797,500.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	03	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	100%	100 %	160,140,000.0	100 %	610,000,000.0	100 %	858,000,000.0	100 %	980,000,000.0	100 %	1,115,000,000.0	100 %	3,723,140,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	100%	100 %	36,125,500.0	100 %	538,000,000.0	100 %	685,000,000.0	100 %	910,000,000.0	100 %	1,140,000,000.0	100 %	3,309,125,500.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemn kebakaran (WMK	100% 100%	100 % 100 %	10,675,000.0	100 % 100 %	310,000,000.0	100 % 100 %	515,000,000.0	100 % 100 %	561,000,000.0	100 % 100 %	615,000,000.0	100 % 100 %	2,011,675,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	10,993,734,636.0	100 %	9,180,000,000.0	100 %	9,465,000,000.0	100 %	9,830,000,000.0	100 %	10,215,000,000.0	100 %	49,683,734,636.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	705,360,000.0	100 %	545,000,000.0	100 %	635,000,000.0	100 %	750,000,000.0	100 %	833,000,000.0	100 %	3,468,360,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	3,760,000.0	100 %	221,127,879.04	100 %	222,156,879.87	100 %	133,000,674.35	100 %	149,680,776.02	100 %	729,726,209.28	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	610,000,000.0	100 %	720,000,000.0	100 %	720,000,000.0	100 %	725,000,000.0	100 %	2,775,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	**05**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				**7,526,232,532.0**		**7,543,291,472.68**		**7,822,878,185.58**		**7,924,729,335.63**		**8,202,811,190.31**		**39,019,942,716.20**	
1.01	05	07	PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah aparat/personil siaga bencana Jumlah kawasan evakuasi bencana	300 Orang 6 Lokasi	75 Orang 24 Lokasi	684,200,000.0	75 Orang 24 Lokasi	881,741,740.0	75 Orang 24 Lokasi	907,010,010.55	75 Orang 24 Lokasi	916,215,035.05	75 Orang 24 Lokasi	941,347,300.65	375 Orang 120 Lokasi	4,330,514,086.25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	08	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah posko penanganan darurat bencana Cakupan ketersediaan bahan logistik pada Gudang stock % Jumlah korban bencana yang dievakuasi	24 Unit 10 Jenis 100%	24 Unit 5 Jenis 100 %	1,927,200,000.0	24 Unit 5 Jenis 100 %	2,386,148,502.0	24 Unit 5 Jenis 100 %	2,482,002,249.66	24 Unit 5 Jenis 100 %	2,516,920,985.07	24 Unit 5 Jenis 100 %	2,612,258,806.03	120 Unit 25 Jenis 100 %	11,924,530,542.76	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	09	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah perbaikan sarana dan prasarana umum serta sosial ekonomi pasca bencana Jumlah SDM yang terlatih dalam penanggulangan bencana	0 Unit 300 Orang	10 Unit 75 Orang	685,600,000.0	10 Unit 75 Orang	799,407,837.68	10 Unit 75 Orang	829,037,319.04	10 Unit 75 Orang	839,831,096.27	10 Unit 75 Orang	869,301,098.20	50 Unit 375 Orang	4,023,177,351.19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	10	PROGRAM KUALITAS DAN AKSES INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan ketersediaan sistem peringatan dini resiko bencana % Ketersediaan data bencana kab/kota	1 Jenis 100%	1 Jenis 100 %	645,100,000.0	0 Jenis 100 %	0.0	0 Jenis 100 %	0.0	0 Jenis 100 %	0.0	0 Jenis 100 %	0.0	1 Jenis 100 %	645,100,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,009,412,532.0	100 %	2,013,967,062.0	100 %	2,088,613,312.91	100 %	2,115,806,330.99	100 %	2,190,050,803.42	100 %	10,417,850,041.32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	334,720,000.0	100 %	199,170,418.0	100 %	206,552,527.63	100 %	209,241,769.28	100 %	216,584,145.23	100 %	1,166,268,860.14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01	05	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	684,000,000.0	100 %	705,595,685.0	100 %	731,748,085.01	100 %	741,275,190.28	100 %	767,286,826.90	100 %	3,629,905,787.19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	556,000,000.0	100 %	557,260,228.0	100 %	577,914,680.78	100 %	585,438,928.69	100 %	605,982,209.88	100 %	2,882,596,047.35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	**06**		**Sosial**				**15,787,073,055.0**		**25,822,855,997.0**		**26,409,318,857.88**		**28,622,962,475.68**		**27,206,268,736.34**		**123,848,479,121.90**	
1.01	**06**		**Dinas Sosial**				**15,787,073,055.0**		**25,822,855,997.0**		**26,409,318,857.88**		**28,622,962,475.68**		**27,206,268,736.34**		**123,848,479,121.90**	
1.01	06	01	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (Prioritas)	% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas) % Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM) % Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas)	100% 100% 100%	100 % 100 % 100 %	1,037,800,000.0	100 % 100 % 100 %	1,040,152,275.0	100 % 100 % 100 %	1,128,704,776.46	100 % 100 % 100 %	1,092,749,137.04	100 % 100 % 100 %	1,131,094,132.04	100 % 100 % 100 %	5,430,500,320.54	Dinas Sosial
1.01	06	02	PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Prioritas)	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina % Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	425 Jiwa 100%	425 Jiwa 100 %	4,524,400,055.0	425 Jiwa 100 %	4,534,655,049.0	425 Jiwa 100 %	4,549,728,801.25	425 Jiwa 100 %	4,763,956,692.75	425 Jiwa 100 %	4,931,125,798.04	2125 Jiwa 100 %	23,303,866,396.04	Dinas Sosial
1.01	06	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi % PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	800 Jiwa 0% 0%	800 Jiwa 0.5 % 0 %	1,611,100,000.0	800 Jiwa 0.6 % 1 %	11,614,751,715.0	800 Jiwa 0.7 % 1.1 %	11,734,601,334.89	800 Jiwa 0.8 % 1.2 %	11,696,404,061.18	800 Jiwa 0.9 % 1.3 %	11,755,931,543.77	4000 Jiwa 0.9 % 1.3 %	48,412,788,654.84	Dinas Sosial
1.01	06	04	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	246 LKS	246 LKS	745,100,000.0	246 LKS	746,788,842.0	246 LKS	874,468,037.13	246 LKS	784,551,341.31	246 LKS	812,081,555.0	246 LKS	3,962,989,775.44	Dinas Sosial
1.01	06	05	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	Cakupan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pembinaan	100 Jiwa	100 Jiwa	925,450,000.0	100 Jiwa	927,547,623.0	100 Jiwa	927,926,513.17	100 Jiwa	974,450,461.43	100 Jiwa	1,008,644,309.59	500 Jiwa	4,764,018,907.19	Dinas Sosial
1.01	06	06	PROGRAM PELAYANAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO (Prioritas)	Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	75 Jiwa 4.50%	75 Jiwa 100 %	1,131,875,000.0	75 Jiwa 100 %	1,134,440,505.0	75 Jiwa 100 %	1,176,487,732.56	75 Jiwa 100 %	1,191,805,193.19	75 Jiwa 100 %	1,233,626,103.97	375 Jiwa 100 %	5,868,234,534.72	Dinas Sosial
1.01	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	4,537,450,000.0	100 %	4,547,734,573.0	100 %	4,666,293,108.44	100 %	4,777,697,602.49	100 %	4,945,348,881.69	100 %	23,474,524,165.62	Dinas Sosial
1.01	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	934,700,000.0	100 %	936,818,589.0	100 %	971,541,100.94	100 %	2,984,190,227.78	100 %	1,018,725,848.16	100 %	6,845,975,765.88	Dinas Sosial
1.01	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	321,198,000.0	100 %	321,926,027.0	100 %	333,857,984.96	100 %	338,204,699.67	100 %	350,072,434.98	100 %	1,665,259,146.61	Dinas Sosial
1.01	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	18,000,000.0	100 %	18,040,799.0	100 %	45,709,468.08	100 %	18,953,058.84	100 %	19,618,129.10	100 %	120,321,455.02	Dinas Sosial

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02			**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				**170,377,078,440.0**		**211,064,616,456.58**		**222,483,149,231.20**		**213,649,963,113.16**		**228,999,861,253.65**		**1,046,574,668,494.59**	
1.02	**01**		**Tenaga Kerja**				**9,465,369,027.0**		**15,835,813,024.26**		**16,229,880,996.28**		**16,373,436,731.56**		**16,765,383,657.06**		**74,669,883,436.16**	
1.02	**01**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**				**10,607,969,027.0**		**16,632,013,024.26**		**17,026,080,996.28**		**17,169,636,731.56**		**17,561,583,657.06**		**78,997,283,436.16**	
1.02	01	01	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA (Prioritas)	% Pencari kerja yang ditempatkan Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas)	0.72% 57.81%	3.48 % 58.17 %	1,117,700,000.0	3.7 % 58.47 %	1,720,500,000.0	3.91 % 58.78 %	1,738,500,000.0	4.13 % 59.09 %	1,738,500,000.0	4.35 % 59.41 %	1,774,000,000.0	4.35 % 59.41 %	8,089,200,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	62.50% 66.67%	71.4 % 70 %	1,623,150,000.0	71.4 % 75 %	2,199,650,000.0	71.4 % 80 %	2,299,650,000.0	71.4 % 85 %	2,299,650,000.0	71.4 % 90 %	2,328,650,000.0	71.4 % 90 %	10,750,750,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	% Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan	54.00% 13,00% 3,00%	62.13 % 13.21 % 6.4 %	961,000,000.0	70.13 % 26.43 % 9.6 %	1,651,000,000.0	78.13 % 39.64 % 12.8 %	1,673,000,000.0	86.13 % 52.85 % 16.01 %	1,693,000,000.0	94.13 % 66.07 % 19.21 %	1,713,000,000.0	94.13 % 66.07 % 19.21 %	7,691,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	04	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100% 2,23% 35,00% 100%	96 % 2.2 % 40.48 % 100 %	992,850,000.0	96 % 2.1 % 45.24 % 100 %	1,192,850,000.0	964 % 2 % 50 % 100 %	1,268,850,000.0	972 % 1.9 % 54.76 % 100 %	1,268,850,000.0	98 % 1.8 % 59.52 % 100 %	1,343,850,000.0	98 % 1.8 % 59.52 % 100 %	6,067,250,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,649,569,027.0	100 %	3,813,713,024.26	100 %	3,888,430,996.28	100 %	3,931,986,731.56	100 %	4,074,433,657.06	100 %	19,358,133,436.16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	486,650,000.0	100 %	4,406,650,000.0	100 %	4,510,000,000.0	100 %	4,590,000,000.0	100 %	4,680,000,000.0	100 %	18,673,300,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	536,450,000.0	100 %	601,450,000.0	100 %	601,450,000.0	100 %	601,450,000.0	100 %	601,450,000.0	100 %	2,942,250,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	98,000,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	1,098,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	**02**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**8,322,737,523.0**		**9,341,601,819.99**		**9,650,777,335.96**		**9,763,407,444.67**		**10,070,918,842.52**		**47,149,442,966.14**	
1.02	**02**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**8,322,737,523.0**		**9,341,601,819.99**		**9,650,777,335.96**		**9,763,407,444.67**		**10,070,918,842.52**		**47,149,442,966.14**	
1.02	02	01	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Prioritas)	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas)	31.2%	31.1 %	230,251,000.0	31 %	928,360,000.0	30.9 %	931,360,000.0	30.8 %	886,360,000.0	30.7 %	939,460,000.0	30.7 %	3,915,791,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	% Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang terstandarisasi	10%	15 %	837,769,000.0	25 %	652,684,000.0	35 %	776,601,500.0	45 %	689,601,500.0	50 %	942,601,500.0	50 %	3,899,257,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	03	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	% Kabupaten/Kota Layak Anak Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)	21% 2.98	50 % 2.96	524,824,580.0	54 % 2.94	847,184,580.0	58 % 2.92	899,184,580.0	70 % 2.90	912,286,578.0	87 % 2.88	941,636,746.52	87 % 2.88	4,125,117,064.52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
1.02	02	04	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	% Lembaga layanan Perlindungan Perempuan sesuai standar	12.5%	25 %	417,215,000.0	37.5 %	543,360,659.0	50 %	554,859,485.0	62.5 %	540,859,485.0	75 %	610,859,485.0	75 %	2,667,154,114.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	02	05	PROGRAM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	% Korban KtP/A yang memperoleh layanan komperehensif pada UPT PPA	50%	65 %	659,965,000.0	70 %	228,060,875.0	75 %	249,577,450.0	80 %	258,377,450.0	85 %	269,097,450.0	85 %	1,665,078,225.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	06	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	% Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di daerah	70%	80 %	521,057,500.0	82 %	859,238,528.0	85 %	656,594,926.0	87 %	943,646,301.0	90 %	663,646,301.0	90 %	3,644,183,556.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	4,490,273,000.0	100 %	4,348,001,265.99	100 %	4,612,986,931.96	100 %	4,553,933,954.67	100 %	4,709,577,157.0	100 %	22,714,772,309.62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	512,032,443.0	100 %	622,068,727.0	100 %	652,214,147.0	100 %	659,143,396.0	100 %	668,062,147.0	100 %	3,113,520,860.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	66,650,000.0	100 %	114,801,069.0	100 %	117,226,495.0	100 %	118,178,959.0	100 %	122,641,573.0	100 %	539,498,096.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	62,700,000.0	100 %	197,842,116.0	100 %	200,171,821.0	100 %	201,019,821.0	100 %	203,336,483.0	100 %	865,070,241.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	**03**		**Pangan**				**7,989,642,481.0**		**14,835,463,767.0**		**16,214,142,329.79**		**16,630,651,332.46**		**17,639,057,733.62**		**73,308,957,643.87**	
1.02	**03**		**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**				**184,769,127,981.0**		**183,889,001,767.0**		**190,704,716,329.29**		**193,187,625,332.46**		**199,966,654,732.62**		**952,517,126,142.37**	
1.02	03	01	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) % Pengawasan keamanan pangan	92,6% 100%	92.9 % 100 %	1,185,700,000.0	93.05 % 100 %	3,395,000,000.0	93.2 % 100 %	3,590,000,000.0	93.35 % 100 %	3,860,000,000.0	93.5 % 100 %	4,200,000,000.0	93.5 % 100 %	16,230,700,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KERAWANAN PANGAN	% Ketersediaan pangan utama Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Provinsi setara beras (ton)	100% 140 Ton	399.66 % 140 Juta Ton	108,000,000.0	100 % 145 Juta Ton	1,783,244,800.0	100 % 150 Juta Ton	1,878,256,809.0	100 % 155 Juta Ton	2,150,718,353.0	100 % 160 Juta Ton	2,301,008,775.0	100 % 160 Juta Ton	8,221,228,737.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
1.02	03	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN	Cakupan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	100%	100 %	220,800,000.0	100 %	875,000,000.0	100 %	1,000,000,000.0	100 %	1,075,000,000.0	100 %	1,275,000,000.0	100 %	4,445,800,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	90%	100 %	5,439,893,000.0	100 %	6,231,662,334.0	100 %	6,827,900,352.65	100 %	7,014,068,819.0	100 %	7,212,869,918.0	100 %	32,726,394,423.65	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	75%	100 %	436,000,000.0	100 %	1,075,000,000.0	100 %	1,125,000,000.0	100 %	1,175,000,000.0	100 %	1,225,000,000.0	100 %	5,036,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	90%	100 %	340,249,481.0	100 %	900,000,000.0	100 %	975,000,000.0	100 %	1,050,000,000.0	100 %	1,125,000,000.0	100 %	4,390,249,481.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	03	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	90%	100 %	259,000,000.0	100 %	575,556,633.0	100 %	817,985,168.14	100 %	305,864,160.46	100 %	300,179,040.62	100 %	2,258,585,002.22	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	**04**		**Pertanahan**															
1.02	**04**		**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**				**101,534,470,000.0**		**101,764,607,787.19**		**105,536,440,319.97**		**106,910,488,025.11**		**110,662,018,902.21**		**526,408,025,034.48**	
1.02	04	01	PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI	Penyelesaian Kasus tanah Provinsi Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum	100% 4 Lokasi	100 % 3 Lokasi	2,500,000,000.0	100 % 3 Lokasi	2,505,666,494.0	100 % 3 Lokasi	2,598,537,233.97	100 % 3 Lokasi	2,632,808,025.0	100 % 3 Lokasi	2,724,740,152.0	100 % 15 Lokasi	12,961,751,904.97	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.02	**05**		**Lingkungan Hidup**				**10,566,019,964.0**		**10,589,968,879.0**		**10,982,478,515.38**		**11,125,466,560.59**		**11,515,863,538.52**		**54,779,797,457.49**	
1.02	**05**		**Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup**				**10,566,019,964.0**		**10,589,968,879.0**		**10,982,478,515.38**		**11,125,466,560.59**		**11,515,863,538.52**		**54,779,797,457.49**	
1.02	05	01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan Indeks kualitas udara (Prioritas) Indeks kualitas air (Prioritas)	35% 0% 88.66 77.62	38 % 20 % 88.68 77.63	848,400,000.0	41 % 20 % 88.71 77.67	913,628,103.79	44 % 20 % 88.75 77.72	936,750,015.95	47 % 20 % 88.8 77.78	943,823,873.0	50 % 20 % 88.86 77.85	1,007,867,771.53	50 % 20 % 88.86 77.85	4,650,469,764.27	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	44.20% 30%	46 % 75 %	4,771,512,000.0	48 % 80 %	5,173,010,617.0	50 % 90 %	5,364,744,562.72	52 % 95 %	5,434,591,668.92	54 % 100 %	5,625,293,618.06	54 % 100 %	26,369,152,466.70	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	83%	100 %	458,415,900.0	100 %	459,454,944.0	100 %	476,484,313.87	100 %	482,687,973.0	100 %	499,625,683.68	100 %	2,376,668,814.55	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	04	PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	100% 0 kab/kota	100 % 24 kab/kota	501,800,000.0	100 % 24 kab/kota	652,964,702.21	100 % 24 kab/kota	687,907,433.26	100 % 24 kab/kota	701,986,050.26	100 % 24 kab/kota	695,694,266.51	100 % 100 kab/kota	3,240,352,452.24	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	05	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca	100% 4 Kab/Kota	100 % 5 Kab/Kota	683,600,000.0	100 % 10 Kab/Kota	765,471,091.0	100 % 15 Kab/Kota	793,842,730.75	100 % 20 Kab/Kota	804,178,286.69	100 % 24 Kab/Kota	832,397,217.58	100 % 24 Kab/Kota	3,879,489,326.02	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,437,325,064.0	100 %	1,706,945,273.0	100 %	1,770,211,980.39	100 %	1,793,259,523.99	100 %	1,856,185,702.68	100 %	9,563,927,544.06	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	348,317,000.0	100 %	349,106,494.0	100 %	362,045,877.45	100 %	366,759,588.71	100 %	379,629,326.26	100 %	1,805,858,286.42	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	391,650,000.0	100 %	444,104,329.0	100 %	460,564,739.30	100 %	466,561,131.84	100 %	482,932,944.60	100 %	2,245,813,144.74	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	95%	100 %	125,000,000.0	100 %	125,283,325.0	100 %	129,926,861.69	100 %	131,618,464.18	100 %	136,237,007.62	100 %	648,065,658.49	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	**06**		**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				**5,012,267,373.0**		**6,023,628,166.82**		**6,209,825,357.62**		**6,277,655,469.71**		**6,462,850,466.18**		**29,986,226,833.33**	
1.02	**06**		**Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				**5,855,232,423.0**		**6,868,503,878.82**		**7,086,015,785.27**		**7,165,253,591.64**		**7,381,594,753.68**		**34,356,600,432.41**	
1.02	06	01	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan Perekaman KTP-el Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan Cakupan Kepemilikan KTP-el	86.25% 91% 10.04% 84.18%	88 % 96 % 15 % 87 %	1,241,203,000.0	89 % 97 % 20 % 89 %	1,244,016,308.82	88 % 98 % 15 % 91 %	1,590,124,884.04	88 % 99 % 15 % 93 %	1,606,921,860.80	95 % 100 % 50 % 95 %	1,652,782,260.52	95 % 100 % 50 % 95 %	7,335,048,314.18	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	06	02	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi	100%	100 %	798,858,000.0	100 %	1,800,668,690.0	100 %	1,130,344,902.98	100 %	1,141,155,704.49	100 %	1,170,672,187.45	100 %	6,041,699,484.92	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,059,143,373.0	100 %	2,008,810,622.0	100 %	2,080,304,289.71	100 %	2,103,170,306.31	100 %	2,174,252,251.13	100 %	10,425,680,842.15	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	611,556,000.0	100 %	612,942,151.0	100 %	735,660,414.60	100 %	743,936,491.86	100 %	766,532,475.44	100 %	3,470,627,532.90	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	301,507,000.0	100 %	302,190,395.0	100 %	413,390,866.29	100 %	417,471,106.25	100 %	428,611,291.64	100 %	1,863,170,659.18	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	55,000,000.0	100 %	260,000,000.0	100 %	265,000,000.0	100 %	270,000,000.0	100 %	850,000,000.0	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**13,088,449,716.0**		**15,418,115,964.86**		**17,104,329,567.42**		**17,381,453,201.36**		**17,965,049,789.23**		**80,957,398,238.87**	
1.02	**07**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**13,088,449,716.0**		**15,418,115,964.86**		**17,104,329,567.42**		**17,381,453,201.36**		**17,965,049,789.23**		**80,957,398,238.87**	
1.02	07	01	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	5% 3020 RTM	5 % 60 RTM	829,600,000.0	5 % 60 RTM	962,730,369.0	5 % 60 RTM	1,000,111,095.63	5 % 60 RTM	1,018,228,548.11	5 % 60 RTM	1,056,116,053.40	25 % 300 RTM	4,866,786,066.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	02	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	1482 BUMDES	180 BUMDES	1,173,216,000.0	180 BUMDES	1,175,875,209.0	180 BUMDES	1,219,458,183.67	180 BUMDES	1,235,335,104.61	180 BUMDES	1,278,683,497.03	900 BUMDES	6,082,567,994.31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	03	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif) % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Berprestasi) % Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	0.15% 6.25% 1%	0.2 % 6.25 % 1 %	734,300,000.0	0.25 % 6.25 % 1 %	898,714,362.86	0.3 % 6.25 % 1 %	1,386,548,500.0	0.35 % 6.25 % 1 %	1,324,833,875.0	0.4 % 6.25 % 1 %	1,359,722,468.75	0.4 % 31.25 % 5 %	5,704,119,206.61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah desa berstatus swasembada	5179 Aparat Desa 89 Desa Swasembada	350 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	2,431,375,000.0	350 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	2,774,601,106.0	660 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	3,474,954,357.90	580 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	3,390,773,641.84	580 Aparat Desa 2 Desa Swasembada	3,547,848,574.66	2520 Aparat Desa 10 Desa Swasembada	15,619,552,680.40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	05	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN (Prioritas)	Jumlah kelompok binaan PKK % Posyandu aktif	43 Kelompok 99.89%	1 Kelompok Binaan PKK 99.91 %	2,174,450,000.0	1 Kelompok Binaan PKK 99.93 %	2,179,378,603.0	1 Kelompok Binaan PKK 99.95 %	2,260,155,715.14	1 Kelompok Binaan PKK 99.97 %	2,289,582,155.56	1 Kelompok Binaan PKK 100 %	2,369,924,489.70	48 Kelompok Binaan PKK 100 %	11,273,490,963.40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			(Prioritas)	% PKK aktif	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Desa
1.02	07	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	95%	100 %	3,342,347,716.0	100 %	4,354,456,658.0	100 %	4,568,053,739.21	100 %	4,841,227,659.58	100 %	4,942,689,101.16	100 %	22,048,774,873.95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	95%	100 %	1,439,010,000.0	100 %	1,541,619,657.0	100 %	1,602,723,425.87	100 %	1,637,558,189.16	100 %	1,700,311,875.65	100 %	7,921,223,147.68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	70%	80 %	855,451,000.0	80 %	1,106,420,000.0	90 %	1,156,923,550.0	90 %	1,196,877,977.50	90 %	1,250,500,876.38	90 %	5,566,173,403.88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	90%	100 %	108,700,000.0	100 %	424,320,000.0	100 %	435,401,000.0	100 %	447,036,050.0	100 %	459,252,852.50	100 %	1,874,709,902.50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															
1.02	**08**		**Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				**5,855,232,423.0**		**6,868,503,878.82**		**7,086,015,785.27**		**7,165,253,591.64**		**7,381,594,753.68**		**34,356,600,432.41**	
1.02	08	01	PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.16% (BPS)	1.1 % (BPS)	376,113,050.0	1.08 % (BPS)	376,965,547.0	1.1 % (BPS)	390,937,505.80	1.1 % (BPS)	396,027,376.0	0.88 % (BPS)	409,924,131.66	0.88 % (BPS)	1,949,967,610.46	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	02	PROGRAM PENINGKATAN KELUARGA BERENCANA	% Penggunaan kontrasepsi jangka panjang Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur % Peserta KB Aktif Rasio Total Fertility Rate	22.19% 66.30% 71.46% 2.36%	23.25 % 66.54 % 71.86 % 2.34	213,866,000.0	24.31 % 66.74 % 72.26 % 2.3	214,350,748.0	23.25 % 66.54 % 72.66 % 2.26	222,295,505.61	23.25 % 66.54 % 73.06 % 2.24	225,189,715.69	27.49 % 67.34 % 73.46 % 2.2	233,091,710.97	27.49 % 67.34 % 73.46 % 2.2	1,108,793,680.27	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina Cakupan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sejahtera secara terpadu berkesinambungan dan terencana	1000 Klp 24 Kab/ Kota	1500 Klp 100 %	252,986,000.0	1600 Klp 100 %	253,559,417.0	1700 Klp 100 %	262,957,416.24	1800 Klp 100 %	266,381,030.24	2000 Klp 100 %	275,728,444.87	2000 Klp 100 %	1,311,612,308.35	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	**09**		**Perhubungan**				**28,482,710,720.0**		**28,547,269,564.09**		**29,605,353,729.15**		**29,990,805,126.11**		**31,043,194,218.50**		**147,669,333,357.85**	
1.02	**09**		**Dinas Perhubungan**				**28,482,710,720.0**		**28,547,269,564.09**		**29,605,353,729.15**		**29,990,805,126.11**		**31,043,194,218.50**		**147,669,333,357.85**	
1.02	09	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas) Jumlah pelabuhan strategis provinsi Jumlah pelabuhan yang beroperasi	1823531 Orang 10 Lokasi 32 Lokasi	980537 Orang 10 Lokasi 35 Lokasi	11,073,000,000.0	1009 Orang 11 Lokasi 38 Lokasi	9,598,098,035.09	1028 Orang 11 Lokasi 35 Lokasi	11,509,441,115.54	1047 Orang 11 Lokasi 35 Lokasi	11,659,290,031.28	1.105 Orang 11 Lokasi 47 Lokasi	12,068,419,082.74	5.171 Orang 11 Lokasi 47 Lokasi	55,908,248,264.65	Dinas Perhubungan
1.02	09	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas)	Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas) Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	20% 78 Ruas	22 % 78 Ruas	3,329,665,000.0	24 % 78 Ruas	3,337,212,011.0	22 % 78 Ruas	3,460,903,391.31	22 % 78 Ruas	3,505,963,148.38	30 % 78 Ruas	3,628,988,767.74	30 % 78 Ruas	17,262,732,318.43	Dinas Perhubungan
1.02	09	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN	% Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan % Layanan Angkutan Darat Jumlah Terminal Bis Terkelola Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	20% 50% 3 Lokasi 121785 Orang	30 % 51 % 3 Lokasi 125000 Orang	3,640,000,000.0	40 % 52 % 7 Lokasi 245000 Orang	3,648,250,415.0	50 % 54 % 10 Lokasi 365000 Orang	3,783,470,212.28	60 % 56 % 13 Lokasi 485000 Orang	3,832,729,677.04	70 % 58 % 16 Lokasi 605000 Orang	3,967,221,661.81	70 % 58 % 16 Lokasi 1825000 Orang	18,871,671,966.13	Dinas Perhubungan
1.02	09	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Transportasi	12 Dokumen	5 Dokumen	611,320,720.0	7 Dokumen	2,112,706,338.0	7 Dokumen	635,415,861.06	7 Dokumen	643,688,754.31	10 Dokumen	666,276,044.70	36 Dokumen	4,669,407,718.07	Dinas Perhubungan
1.02	09	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	7,619,900,000.0	100 %	7,637,171,247.0	100 %	7,920,237,546.86	100 %	8,023,356,281.89	100 %	8,304,898,994.73	100 %	39,505,564,070.48	Dinas Perhubungan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	09	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	873,000,000.0	100 %	874,978,740.0	100 %	907,409,202.01	100 %	919,223,353.86	100 %	951,479,261.20	100 %	4,526,090,557.07	Dinas Perhubungan
1.02	09	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	930,200,000.0	100 %	932,308,389.0	100 %	966,863,733.92	100 %	979,451,963.07	100 %	1,013,821,315.86	100 %	4,822,645,401.85	Dinas Perhubungan
1.02	09	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	405,625,000.0	100 %	406,544,389.0	100 %	421,612,666.17	100 %	427,101,916.28	100 %	442,089,089.72	100 %	2,102,973,061.17	Dinas Perhubungan
1.02	**10**		**Komunikasi dan Informatika**				**17,942,285,130.0**		**17,885,503,070.70**		**18,552,028,387.41**		**18,794,838,103.50**		**19,457,769,306.88**		**92,632,423,998.49**	
1.02	**10**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**				**18,698,935,130.0**		**18,741,318,091.70**		**19,435,951,666.41**		**19,689,000,989.50**		**20,379,895,741.88**		**96,945,101,619.49**	
1.02	10	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Prioritas)	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)	40%	60 %	9,641,502,075.0	70 %	9,623,858,367.70	78 %	9,932,559,414.41	80 %	10,066,618,943.50	85 %	10,432,632,004.88	85 %	49,697,170,805.49	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	02	PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas)	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)	100 %	100 %	1,016,200,000.0	100 %	1,018,503,316.0	100 %	1,056,253,415.0	100 %	1,070,005,466.0	100 %	1,107,552,377.0	100 %	5,268,514,574.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	03	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	% Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi berkualitas baik	10%	70 %	1,763,100,000.0	80 %	1,586,574,921.0	90 %	1,643,526,973.0	90 %	1,664,274,139.0	100 %	1,720,919,651.0	100 %	8,378,395,684.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	04	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi % Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM)	30% 30%	40 % 40 %	568,200,000.0	50 % 50 %	569,487,881.0	65 % 65 %	590,595,542.0	85 % 85 %	598,284,890.0	100 % 100 %	619,278,941.0	100 % 100 %	2,945,847,254.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	50 %	3,515,463,055.0	75 %	3,502,376,215.0	75 %	3,631,901,663.0	100 %	3,679,086,723.0	100 %	3,807,915,009.0	100 %	18,136,742,665.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,066,820,000.0	100 %	1,169,464,711.0	100 %	1,272,109,422.0	100 %	1,287,899,787.0	100 %	1,331,011,857.0	100 %	6,127,305,777.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	178,350,000.0	100 %	222,150,999.0	100 %	224,838,679.0	100 %	225,817,778.0	100 %	228,490,991.0	100 %	1,079,648,447.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	90 %	192,650,000.0	90 %	193,086,660.0	95 %	200,243,279.0	95 %	202,850,377.0	98 %	209,968,476.0	98 %	998,798,792.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil dan**				**17,517,112,569.0**		**20,556,816,814.51**		**22,207,547,695.05**		**23,444,603,626.16**		**25,091,831,987.92**		**108,817,912,692.64**	
1.02	**11**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**17,517,112,569.0**		**20,556,816,814.51**		**22,207,547,695.05**		**23,444,603,626.16**		**25,091,831,987.92**		**108,817,912,692.64**	
1.02	11	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UKM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Prioritas)	% Pertumbuhan UKM Bagi Masyarakat Sangat Miskin Dan Miskin (Prioritas)	0%	20 %	6,932,900,000.0	20 %	9,917,900,000.0	20 %	11,294,900,000.0	20 %	12,532,900,000.0	20 %	11,682,900,000.0	100 %	52,361,500,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	02	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PROMOSI PRODUK UMKM (Prioritas)	Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)	0 Produk	10 Produk	900,000,000.0	10 Produk	900,000,000.0	10 Produk	900,000,000.0	10 Produk	900,000,000.0	10 Produk	900,000,000.0	10 Produk	4,500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	11	03	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN PENGEMBANGAN PRODUK PEMASARAN BAGI KOPERASI DAN UMKM	Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan	2058 Unit 114 Produk	10 Unit 5 Produk	297,500,000.0	10 Unit 5 Produk	300,000,000.0	10 Unit 5 Produk	300,000,000.0	10 Unit 5 Produk	300,000,000.0	10 Unit 5 Produk	2,150,000,000.0	10 Unit 5 Produk	3,347,500,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	04	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA PRODUKTIF BAGI KUMKM	% Jumlah KUMKM yang terfasilitasi kelembaga Keuangan % Pengelola yang terfasilitasi diklat	20% 20%	20 % 20 %	775,000,000.0	20 % 20 %	775,000,000.0	20 % 20 %	775,000,000.0	20 % 20 %	775,000,000.0	20 % 20 %	775,000,000.0	100 % 100 %	3,875,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN UMKM	Jumlah Koperasi aktif Jumlah Usaha Kecil menjadi usaha Menengah Jumlah Koperasi skala besar	5226 Unit 141119 Unit 20 Unit	100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,524,000,000.0	100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,400,000,000.0	100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,400,000,000.0	100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,400,000,000.0	100 Unit 50 Unit 2 Unit	1,800,000,000.0	100 Unit 50 Unit 2 Unit	7,524,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	4,457,462,564.0	100 %	4,750,000,000.0	100 %	4,750,000,000.0	100 %	4,750,000,000.0	100 %	4,750,000,000.0	100 %	23,457,462,564.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	2,121,250,005.0	100 %	1,884,916,814.51	100 %	2,158,647,695.05	100 %	2,157,703,626.16	100 %	2,404,931,987.92	100 %	10,727,450,128.64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	0 %	0.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	400,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	11	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	509,000,000.0	100 %	529,000,000.0	100 %	529,000,000.0	100 %	529,000,000.0	100 %	529,000,000.0	100 %	2,625,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	**12**		**Penanaman Modal**				**3,998,899,731.0**		**9,247,960,000.0**		**7,580,515,000.0**		**7,996,632,000.0**		**8,752,385,000.0**		**37,576,391,731.0**	
1.02	**12**		**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**				**3,998,899,731.0**		**9,247,960,000.0**		**7,580,515,000.0**		**7,996,632,000.0**		**8,752,385,000.0**		**37,576,391,731.0**	
1.02	12	01	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	11.47 Triliun	13.02 Triliun	223,676,300.0	13.87 Triliun	762,429,656.0	13.02 Triliun	783,991,544.0	13.02 Triliun	782,019,124.0	16.75 Triliun	800,283,859.0	74.14 Triliun	3,352,400,483.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	689 Proyek	774 Proyek	580,702,500.0	821 Proyek	1,222,152,945.0	870 Proyek	1,269,285,992.0	922 Proyek	1,302,348,880.0	977 Proyek	1,349,362,797.0	4364 Proyek	5,723,853,114.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	03	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	11 Orang/Proyek	12 Orang/proyek	191,836,100.0	13 Orang/proyek	692,270,915.0	13 Orang/proyek	724,397,299.0	14 Orang/proyek	836,993,382.0	15 Orang/proyek	1,059,081,409.0	15 Orang/proyek	3,504,579,105.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	-41%	15 %	441,807,100.0	15 %	1,081,788,499.0	15 %	1,236,720,879.0	15 %	1,344,699,775.0	15 %	1,488,023,817.0	15 %	5,593,040,070.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	75 %	1,826,171,200.0	75 %	1,990,176,170.0	75 %	2,127,454,378.0	80 %	2,216,963,278.0	80 %	2,349,879,366.0	80 %	10,510,644,392.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	75 %	312,897,000.0	75 %	2,791,376,212.0	75 %	745,229,801.0	80 %	774,464,180.0	80 %	811,025,207.0	80 %	5,434,992,400.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	70 %	245,017,531.0	80 %	245,572,887.0	80 %	254,674,870.0	80 %	257,990,649.0	90 %	267,043,641.0	90 %	1,270,299,578.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	12	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	80 %	176,792,000.0	85 %	462,192,716.0	90 %	438,760,237.0	95 %	481,152,732.0	95 %	627,684,904.0	95 %	2,186,582,589.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.02	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**				**22,198,337,523.0**		**36,744,119,026.59**		**40,494,452,845.02**		**27,667,793,310.78**		**34,814,088,503.77**		**161,918,791,209.16**	
1.02	**13**		**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**				**22,198,337,523.0**		**36,744,119,026.59**		**40,494,452,845.02**		**27,667,793,310.78**		**34,814,088,503.77**		**161,918,791,209.16**	
1.02	13	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA	% Organisasi pemuda yang aktif Jumlah lembaga pramuka yang aktif	8,31% 1 Kwarda, 24 Kwarcab	9.06 % 25 Kwarda/Kwarcab	134,774,500.0	9.81 % 25 Kwarda/Kwarcab	1,090,002,301.59	10.56 % 25 Kwarda/Kwarcab	1,490,000,000.0	11.31 % 25 Kwarda/Kwarcab	1,480,000,000.0	12.06 % 25 Kwarda/Kwarcab	1,455,000,000.0	12.06 % 25 Kwarda/Kwarcab	5,649,776,801.59	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN	% Wirausaha muda	10.89%	14.6 %		18.31 %		14.6 %		14.6 %		29.45 %		29.45 %		Dinas

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	13	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)	Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)	900 Pemuda	900 Pemuda	529,752,000.0	950 Pemuda	2,159,000,301.0	900 Pemuda	2,435,000,000.0	900 Pemuda	2,492,000,000.0	1100 Pemuda	2,490,000,000.0	1100 Pemuda	10,105,752,301.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	03	PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN	Cakupan atlet pelajar berprestasi Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	10% 1 Jenis	10 % 7 Jenis	1,216,918,150.0	10 % 7 Jenis	2,310,500,100.0	11 % 7 Jenis	4,710,000,000.0	12 % 7 Jenis	2,814,427,876.0	13 % 7 Jenis	3,775,000,000.0	15 % 7 Jenis	14,826,846,126.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan pembinaan olahraga Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga Cakupan pelatih yang bersertifikasi	31% 81 Atlet 16 Cabor 10.89%	32 % 245 Atlet 9 Cabor 14.75 %	11,052,625,500.0	34 % 359 Atlet 27 Cabor 17.36 %	23,885,970,680.0	36 % 300 Atlet 30 Cabor 14.75 %	3,165,000,000.0	38 % 500 Atlet 32 Cabor 14.75 %	3,175,000,000.0	40 % 600 Atlet 35 Cabor 25.22 %	16,300,000,000.0	40 % 600 Atlet 35 Cabor 25.22 %	57,578,596,180.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	05	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda	85% 85%	85 % 85 %	6,165,000,000.0	85 % 85 %	2,255,500,200.0	85 % 85 %	22,717,188,308.02	85 % 85 %	11,239,000,000.0	85 % 85 %	3,733,179,548.0	85 % 85 %	46,109,868,056.02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	7.54%	8.22 %	256,000,000.0	8.9 %	666,000,000.0	8.22 %	835,000,000.0	8.22 %	946,000,000.0	10.95 %	860,000,000.0	10.95 %	3,563,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2,517,689,873.0	100 %	2,971,945,444.0	100 %	3,698,545,637.0	100 %	3,919,546,534.78	100 %	4,330,408,955.77	100 %	17,438,136,444.55	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	124,800,000.0	100 %	250,000,000.0	100 %	316,718,900.0	100 %	317,718,900.0	100 %	523,000,000.0	100 %	1,532,237,800.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %	100 %	192,977,500.0	100 %	810,200,000.0	100 %	841,000,000.0	100 %	862,100,000.0	100 %	887,500,000.0	100 %	3,593,777,500.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	13	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100 %	100 %	7,800,000.0	100 %	345,000,000.0	100 %	286,000,000.0	100 %	422,000,000.0	100 %	460,000,000.0	100 %	1,520,800,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	**14**		**Statistik**															
1.02	**14**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**				**18,698,935,130.0**		**18,741,318,091.70**		**19,435,951,666.41**		**19,689,000,989.50**		**20,379,895,741.88**		**96,945,101,619.49**	
1.02	14	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral % Sistem data dan statistik yang terintegrasi	33% 20%	43 % 40 %	461,750,000.0	53 % 50 %	553,296,601.0	68 % 65 %	570,449,827.0	73 % 70 %	576,698,606.0	98 % 90 %	593,759,506.0	98 % 90 %	2,755,954,540.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
1.02	**15**		**Persandian**															
1.02	**15**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**				**18,698,935,130.0**		**18,741,318,091.70**		**19,435,951,666.41**		**19,689,000,989.50**		**20,379,895,741.88**		**96,945,101,619.49**	
1.02	15	01	PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	% Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	25%	30 %	294,900,000.0	50 %	302,518,420.0	60 %	313,473,452.0	70 %	317,464,280.0	80 %	328,366,929.0	80 %	1,556,723,081.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	**16**		**Kebudayaan**				**12,845,811,615.0**		**12,964,124,666.04**		**14,096,610,629.94**		**14,472,359,316.16**		**15,212,653,149.46**		**69,591,559,376.60**	
1.02	**16**		**Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan**				**19,903,249,615.0**		**23,948,362,273.04**		**26,687,734,078.55**		**27,957,081,172.78**		**28,692,473,355.21**		**127,188,900,494.58**	
1.02	16	01	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu % Kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama	8 Event 3 Jenis 0%	7 Event 2 Jenis 0 %	3,536,198,000.0	8 Event 2 Jenis 100 %	2,752,543,896.04	10 Event 2 Jenis 100 %	3,183,231,793.65	12 Event 2 Jenis 100 %	3,117,181,687.79	12 Event 2 Jenis 100 %	3,348,166,505.90	49 Event 10 Jenis 100 %	15,937,321,883.38	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	16	02	PROGRAM PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI NILAI BUDAYA	Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	5% 1.250 Benda Budaya 120 Karya Budaya	5 % 250 Benda Budaya 10 Karya Budaya	1,964,664,550.0	6 % 250 Benda Budaya 12 Karya Budaya	1,555,462,196.0	8 % 250 Benda Budaya 14 Karya Budaya	1,517,538,275.0	10 % 250 Benda Budaya 16 Karya Budaya	1,430,000,936.0	12 % 250 Benda Budaya 18 Karya Budaya	1,204,960,649.80	41 % 1250 Benda Budaya 95 Karya Budaya	7,672,626,606.80	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	16	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	5,582,303,065.0	100 %	5,698,772,116.0	100 %	6,013,923,865.06	100 %	6,278,923,865.06	100 %	6,657,314,328.06	100 %	30,231,237,239.18	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	16	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,324,380,000.0	100 %	1,899,061,816.0	100 %	2,204,061,816.0	100 %	2,491,044,258.13	100 %	2,781,062,414.78	100 %	10,699,610,304.91	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02	16	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	301,866,000.0	100 %	408,866,000.0	100 %	504,366,000.0	100 %	472,951,098.24	100 %	514,951,098.24	100 %	2,203,000,196.48	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	16	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	136,400,000.0	100 %	649,418,642.0	100 %	673,488,880.23	100 %	682,257,470.94	100 %	706,198,152.68	100 %	2,847,763,145.85	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	**17**		**Perpustakaan**				**7,624,909,018.0**		**7,267,874,465.72**		**7,596,555,901.56**		**7,716,291,857.17**		**8,043,204,185.49**		**38,248,835,427.94**	
1.02	**17**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**8,847,820,018.0**		**8,867,874,465.72**		**9,196,555,901.56**		**9,316,291,857.17**		**9,643,204,185.49**		**45,871,746,427.94**	
1.02	17	01	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina	732.403 Orang 1237 Unit	100000 Orang 70 Unit	793,519,000.0	110000 Orang 75 Unit	1,100,000,000.0	120000 Orang 80 Unit	1,100,000,000.0	130000 Orang 85 Unit	1,100,000,000.0	140000 Orang 90 Unit	1,100,000,000.0	140000 Orang 90 Unit	5,193,519,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	02	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat	0.0364 3.500 Orang	0.03 1000 Orang	160,989,000.0	0.03 1100 Orang	325,000,000.0	0.03 1200 Orang	325,000,000.0	0.03 1300 Orang	325,000,000.0	0.03 1400 Orang	325,000,000.0	0.03 1400 Orang	1,460,989,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	581.201 Jenis 390.672 Buku	250000 Jenis 300000 Buku	594,220,000.0	251000 Jenis 310000 Buku	375,000,000.0	252000 Jenis 320000 Buku	375,000,000.0	253000 Jenis 330000 Buku	375,000,000.0	254000 Jenis 340000 Buku	375,000,000.0	254000 Jenis 340000 Buku	2,094,220,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,302,690,018.0	100 %	3,776,874,465.72	100 %	4,105,555,901.56	100 %	4,125,291,857.17	100 %	4,552,204,185.49	100 %	19,862,616,427.94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	2,162,664,000.0	100 %	1,050,000,000.0	100 %	1,050,000,000.0	100 %	1,150,000,000.0	100 %	1,050,000,000.0	100 %	6,462,664,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	610,827,000.0	100 %	500,000,000.0	100 %	500,000,000.0	100 %	500,000,000.0	100 %	500,000,000.0	100 %	2,610,827,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	141,000,000.0	100 %	141,000,000.0	100 %	141,000,000.0	100 %	141,000,000.0	100 %	564,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	**18**		**Kearsipan**															
1.02	**18**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**				**8,847,820,018.0**		**8,867,874,465.72**		**9,196,555,901.56**		**9,316,291,857.17**		**9,643,204,185.49**		**45,871,746,427.94**	
1.02	18	01	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	% Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	20 %	260,590,000.0	40 %	600,000,000.0	60 %	600,000,000.0	80 %	600,000,000.0	100 %	600,000,000.0	100 %	2,660,590,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	02	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	100%	20 %	286,925,000.0	40 %	300,000,000.0	60 %	300,000,000.0	80 %	300,000,000.0	100 %	300,000,000.0	100 %	1,486,925,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar	5 Unit	5 Unit	263,633,500.0	5 Unit	250,000,000.0	5 Unit	250,000,000.0	5 Unit	250,000,000.0	5 Unit	250,000,000.0	5 Unit	1,263,633,500.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ARSIP	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	65 Lembaga/Instansi	20 Lembaga/Instansi	411,762,500.0	20 Lembaga/Instansi	450,000,000.0	20 Lembaga/Instansi	450,000,000.0	20 Lembaga/Instansi	450,000,000.0	20 Lembaga/Instansi	450,000,000.0	20 Lembaga/Instansi	2,211,762,500.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.00			**Urusan Pilihan**				**404,752,041,838.0**		**449,902,371,612.96**		**436,112,726,188.03**		**443,046,866,525.85**		**457,932,819,244.29**		**2,191,746,825,409.13**	
2.00	**01**		**Pariwisata**															
2.00	**01**		**Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan**				**19,903,249,615.0**		**23,948,362,273.04**		**26,687,734,078.55**		**27,957,081,172.78**		**28,692,473,355.21**		**127,188,900,494.58**	
2.00	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (Prioritas)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan lokal Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas) Lama Kunjungan WIsata Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas)	263.293 Kunjungan 8.393.024 Kunjungan 0 Jenis 5 Hari 0 Orang	300000 WNA 7500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 0 Orang	2,889,343,000.0	300000 WNA 7500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 1000 Orang	4,368,526,750.0	300000 WNA 7500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 1000 Orang	4,954,375,430.49	300000 WNA 7500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 1000 Orang	5,353,207,250.0	375000 WNA 8500000 WNI 2 Jenis 5 Hari 1000 Orang	5,759,831,487.63	1750000 WNA 39750000 WNI 10 Jenis 5 Hari 4000 Orang	23,325,283,918.12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.00	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL (Prioritas)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas)	0 Kab/Kota	1 Kab/Kota	65,916,000.0	2 Kab/Kota	260,916,000.0	2 Kab/Kota	316,014,072.12	2 Kab/Kota	368,514,072.12	1 Kab/Kota	373,514,072.12	8 Kab/Kota	1,384,874,216.36	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	04	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan	4 Destinasi Wisata	2 Destinasi Wisata	3,034,339,000.0	2 Destinasi Wisata	4,443,893,646.0	2 Destinasi Wisata	5,440,760,946.0	2 Destinasi Wisata	5,916,632,542.82	2 Destinasi Wisata	5,558,201,646.0	10 Destinasi Wisata	24,393,827,780.82	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan	0 Event	12 Event	1,067,840,000.0	12 Event	1,910,901,211.0	12 Event	1,879,973,000.0	12 Event	1,846,367,991.68	12 Event	1,788,273,000.0	60 Event	8,493,355,202.68	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	**02**		**Pertanian**				**234,442,347,834.0**		**256,847,098,841.04**		**234,426,211,911.36**		**237,272,953,047.85**		**245,174,123,520.12**		**1,208,162,735,154.37**	
2.00	**02**		**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**				**184,769,127,981.0**		**183,889,001,767.0**		**190,704,716,329.29**		**193,187,625,332.46**		**199,966,654,732.62**		**952,517,126,142.37**	
2.00	02	01	PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas)	Rp 0	3694852500 00 Rp	75,817,194,500.0	4542379096 93 Rp	92,950,000,000.0	460835232750 Rp	94,300,000,000.0	4630343404 35 Rp	94,750,000,000.0	465893180426 Rp	95,335,000,000.0	465893180426 Rp	453,152,194,500.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	04	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Jumlah produksi kedelai dan palawija Jumlah produksi padi Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas kedelai dan palawija Jumlah produksi jagung	15000 Ton 5000000 Ton 45 Kw/Ha 50 Kw/Ha 10 Kw/Ha 5000000 Ton	16423 Ton 6027914 Ton 51 Kw/Ha 57 Kw/Ha 13 Kw/Ha 6027914 Ton	3,954,704,500.0	16751 Ton 6329309 Ton 51 Kw/Ha 57 Kw/Ha 13 Kw/Ha 2560267 Ton	7,275,000,000.0	17087 Ton 6645775 Ton 51 Kw/Ha 57 Kw/Ha 14 Kw/Ha 2688281 Ton	7,600,000,000.0	17428 Ton 6978063 Ton 51 Kw/Ha 57 Kw/Ha 14 Kw/Ha 2822695 Ton	7,625,000,000.0	17777 Ton 7328967 Ton 52 Kw/Ha 58 Kw/Ha 14 Kw/Ha 2963830 Ton	7,700,000,000.0	85466 Ton 33310028 Ton 52 Kw/Ha 58 Kw/Ha 14 Kw/Ha 13473423 Ton	34,154,704,500.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	05	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PRODUK HORTIKULTURA	Jumlah produksi tanaman hortikultura Produktivitas tanaman hortikultura Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB	15000 Ton 55 Kw/Ha 5000 Pohon	22806 Ton 57 Kw/Ha 10000 Pohon	2,006,630,000.0	22806 Ton 57 Kw/Ha 10000 Pohon	5,400,000,000.0	23264 Ton 58 Kw/Ha 10000 Pohon	5,800,000,000.0	23497 Ton 58 Kw/Ha 10000 Pohon	6,200,000,000.0	23732 Ton 59 Kw/Ha 10000 Pohon	6,350,000,000.0	23969 Ton 59 Kw/Ha 50000 Pohon	25,756,630,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	06	PROGRAM PENGOLAHAN HASIL, PASCA PANEN, PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat kehilangan hasil panen Jumlah Kelompok Tani yang menjalankan usaha agribisnis	5% 20 Poktan	8 % 25 Poktan	820,000,000.0	8 % 25 Poktan	1,600,000,000.0	8 % 35 Poktan	1,665,000,000.0	8 % 40 Poktan	1,725,000,000.0	7 % 45 Poktan	1,760,000,000.0	7 % 170 Poktan	7,570,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
2.00	02	07	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaa jaringan irigasi Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian	10000 Ha 300 Unit	20000 Ha 388 Unit	79,571,805,500.0	20000 Ha 400 Unit	46,987,000,000.0	20000 Ha 412 Unit	51,737,985,999.50	20000 Ha 424 Unit	52,955,000,000.0	20000 Ha 437 Unit	57,052,999,999.0	100000 Ha 2061 Unit	288,304,791,498.50	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
2.00	02	08	PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BERMUTU PENGENDALIAN OPT DAN STATISTIK PERTANIAN	% Penurunan serangan OPT % Penggunaan benih padi bersertifikat Cakupan ketersediaan data statistik pertanian	5% 75% 100%	4.9 % 63 % 100 %	1,952,900,000.0	4.8 % 63 % 100 %	3,695,000,000.0	4.7 % 66 % 100 %	3,750,000,000.0	4.6 % 67 % 100 %	3,750,000,000.0	4.5 % 69 % 100 %	3,750,000,000.0	4.5 % 70 % 0 %	16,897,900,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	09	PROGRAM PENYULUHAN DAN PELATIHAN SDM PERTANIAN	Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama pertanian	0.4%	0.5 %	368,500,000.0	0.5 %	4,200,000,000.0	0.5 %	2,450,000,000.0	0.5 %	2,500,000,000.0	0.5 %	2,800,000,000.0	0.5 %	12,318,500,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	10	PROGRAM FASILITASI PRASARANA DAN SARANA BERBANTUAN	Jumlah proyek bantuan WISMP dan LOAN untuk sektor pertanian	2 Jenis	2 Proyek	12,287,751,000.0	2 Proyek	6,946,538,000.0	3 Proyek	7,187,588,000.0	3 Proyek	7,051,974,000.0	3 Proyek	7,579,597,000.0	3 Proyek	41,053,448,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	**02**		**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**35,609,773,138.0**		**65,690,486,164.74**		**37,013,328,553.21**		**37,495,229,202.92**		**38,810,951,473.93**		**214,619,768,532.80**	
2.00	02	03	PROGRAM HILIRISASI PETERNAKAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas)	Rp 0	9412084000 Rp	2,699,254,000.0	2196475000 0 Rp	35,405,887,584.0	29493840000 Rp	6,261,903,750.0	3705960911 3 Rp	4,992,232,399.0	38617836192 Rp	5,107,346,693.0	24313624428.38 Rp	54,466,624,426.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.00	02	11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) Prioritas (Rabies, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza, Brucellosis)	6.190 Kasus	6108 Kasus	3,215,384,100.0	5497 Kasus	3,446,000,000.0	4947 Kasus	3,403,000,000.0	4452 Kasus	3,661,000,000.0	4006 Kasus	3,772,000,000.0	2596 Kasus	17,497,384,100.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	13	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK (Prioritas)	Jumlah Populasi ternak kecil	1.577.427 Ekor	1656799 Ekor		1740324 Ekor		1828228 Ekor		1920748 Ekor		2018134 Ekor		2016796 Ekor		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas)	1.354 Ekor	1384 Ekor		1416 Ekor		1434 Ekor		1455 Ekor		1486 Ekor		2145 Ekor		
				Jumlah Populasi ternak unggas	107.964.212 Ekor	117948275 Ekor		129027702 Ekor		141334762 Ekor		155018412 Ekor		170246444 Ekor		178441097 Ekor		
				Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas)	175.274 Ekor	180532 Ekor		185948 Ekor		191527 Ekor		197272 Ekor		203191 Ekor		203191 Ekor		
				Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas)	93.752 Ekor	105219 Ekor	22,705,787,500.0	115598 Ekor	19,478,200,000.0	127387 Ekor	19,488,720,000.0	140765 Ekor	20,773,792,000.0	156268 Ekor	21,549,671,200.0	133914 Ekor	103,996,170,700.0	
				Jumlah produksi telur (Prioritas)	154.851.877 Kg	162594471 Kg		170724195 Kg		179260404 Kg		188223425 Kg		197634596 Kg		235587321 Kg		
				Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas)	1.190.390 Ekor	1263719 Ekor		1329788 Ekor		1404487 Ekor		1480894 Ekor		1568132 Ekor		2167209 Ekor		
				Jumlah produksi daging (Prioritas)	136.923.764 Kg	138164039 Kg		139478730 Kg		140872302 Kg		142349489 Kg		143915307 Kg		215753406 Kg		
				Jumlah produksi susu (Prioritas)	3.115.800 Kg	3240432 Kg		3370049 Kg		3504851 Kg		3645045 Kg		3790847 Kg		3790847 Kg		
2.00	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	5,283,038,288.0	100 %	5,402,468,580.0	100 %	5,416,468,580.0	100 %	5,454,468,580.0	100 %	5,494,468,580.0	100 %	27,050,912,608.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	294,659,250.0	100 %	729,880,000.74	100 %	928,150,000.0	100 %	1,028,650,000.71	100 %	1,207,115,000.93	100 %	4,188,454,252.38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,322,150,000.0	100 %	990,500,000.0	100 %	1,077,236,223.21	100 %	1,142,236,223.21	100 %	1,202,500,000.0	100 %	5,734,622,446.42	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	89,500,000.0	100 %	237,550,000.0	100 %	437,850,000.0	100 %	442,850,000.0	100 %	477,850,000.0	100 %	1,685,600,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	**02**		**Dinas Perkebunan**				**22,053,089,196.0**		**22,103,074,676.30**		**22,922,309,358.65**		**23,220,749,844.93**		**24,035,575,047.19**		**114,334,798,123.07**	
2.00	02	02	PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas)	Rp. 3578350000	3578350000 Rp	3,578,350,000.0	5000000000 Rp	910,000,000.30	6000000 Rp	780,000,000.0	7000000000 Rp	800,000,001.01	8000000000 Rp	800,000,001.0	8000000000 Rp	6,868,350,002.31	Dinas Perkebunan
2.00	02	16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN	Produktivitas Komoditi Kelapa Sawit	4.344 Kg/Ha	4348 Kg/Ha	9,547,670,500.0	4356 Kg/Ha	3,575,707,673.0	4369 Kg/Ha	3,302,898,513.75	4387 Kg/Ha	2,663,063,218.92	4409 Kg/Ha	2,113,175,150.0	4409 Kg/Ha	21,202,515,055.67	Dinas Perkebunan
				Produktivitas Komoditi Tembakau (Nikotin rendah)	680 Kg/Ha	1010 Kg/Ha		1030 Kg/Ha		1061 Kg/Ha		1104 Kg/Ha		1159 Kg/Ha		1159 Kg/Ha		
				Produktivitas Komoditi Tebu (Gula)	3.022 Kg/Ha	1146 Kg/Ha		1169 Kg/Ha		1204 Kg/Ha		1252 Kg/Ha		1314 Kg/Ha		1314 Kg/Ha		
				Produktivitas Komoditi Kelapa (Kopra)	1.025 Kg/Ha	671 Kg/Ha		681 Kg/Ha		694 Kg/Ha		712 Kg/Ha		733 Kg/Ha		733 Kg/Ha		
				Produktivitas Komoditi Cengkeh (Biji Kering)	517 Kg/Ha	526 Kg/Ha		534 Kg/Ha		545 Kg/Ha		558 Kg/Ha		575 Kg/Ha		575 Kg/Ha		
				Produktivitas Komoditi Kopi	624 Kg/Ha	588 Kg/Ha		589 Kg/Ha		590 Kg/Ha		592 Kg/Ha		595 Kg/Ha		595 Kg/Ha		
				Produktivitas Komoditi Kakao	779 Kg/Ha	634 Kg/Ha		704 Kg/Ha		788 Kg/Ha		891 Kg/Ha		1015 Kg/Ha		1015 Kg/Ha		
				Nilai Produksi Komoditi Kelapa Sawit	1.351.060.490 Triliun	957410000 Triliun		1361430 Triliun		2275850000 Triliun		2284950000 Triliun		2755600000 Triliun		2755600000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Kopi	1.362.768.000 Triliun	1148000000 Triliun		1962360000 Triliun		2189655000 Triliun		2452380000 Triliun		2758950000 Triliun		2758950000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Tebu (Gula)	35.456.850 Triliun	47475000 Triliun		64580000 Triliun		83150000 Triliun		103770000 Triliun		127085000 Triliun		127085000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Kelapa (Kopra)	463.044.000 Triliun	608000000 Triliun		513670000 Triliun		785925000 Triliun		1342600000 Triliun		1382900000 Triliun		1382900000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering)	517 Triliun	2747171250 Triliun		2724405000 Triliun		2874750000 Triliun		3044820000 Triliun		3136115000 Triliun		31361150000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Jambu Mete	2693.080.000 Triliun	202500000 Triliun		337500000 Triliun		486675000 Triliun		578440000 Triliun		683280000 Triliun		683280000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Pala	51.720.000 Triliun	15750000 Triliun		17670000 Triliun		28800000 Triliun		35000000 Triliun		37800000 Triliun		37800000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Lada	679.000.000 Triliun	1202500000 Triliun		1258510000 Triliun		1373000000 Triliun		1759000000 Triliun		1811750000 Triliun		1811750000 Triliun		
				Nilai Produksi Komoditi Kakao	3.352.250.000 Triliun	3625000000 Triliun		6030760000 Triliun		7598745000 Triliun		9540650000 Triliun		11963985000 Triliun		11963985000 Triliun		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Volume Produksi Komoditi Kelapa Sawit	90.493 Ton	90580 Ton		90762 Ton		91034 Ton		91398 Ton		91855 Ton		91855 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Kopi	32.476 Ton	32064 Ton		32706 Ton		33687 Ton		35034 Ton		36786 Ton		36786 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Tebu (Gula)	7.150 Ton	3165 Ton		3229 Ton		3326 Ton		3459 Ton		3631 Ton		3631 Ton		
				Produktivitas Komoditi Pala	279 Kg/Ha	124 Kg/Ha		127 Kg/Ha		131 Kg/Ha		136 Kg/Ha		143 Kg/Ha		143 Kg/Ha		
				Produktivitas Komoditi Lada	721 Kg/Ha	737 Kg/Ha		748 Kg/Ha		763 Kg/Ha		782 Kg/Ha		805 Kg/Ha		805 Kg/Ha		
				Volume Produksi Komoditi Kelapa (Kopra)	77.174 Ton	50608 Ton		51367 Ton		52395 Ton		53704 Ton		55316 Ton		55316 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Lada	6.790 Ton	6631 Ton		6730 Ton		6865 Ton		7036 Ton		7247 Ton		7247 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Kakao	134.090 Ton	135828 Ton		150769 Ton		168861 Ton		190813 Ton		217527 Ton		217527 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Pala	431 Ton	183 Ton		186 Ton		192 Ton		200 Ton		210 Ton		210 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Jambu Mete	13.454 Ton	13235 Ton		13500 Ton		13905 Ton		144610 Ton		15184 Ton		15184 Ton		
				Volume Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering)	18.033 Ton	18511 Ton		18789 Ton		19165 Ton		19644 Ton		20233 Ton		20233 Ton		
				Produktivitas Komoditi Jambu Mete	408 Kg/Ha	403 Kg/Ha		411 Kg/Ha		424 Kg/Ha		441 Kg/Ha		463 Kg/Ha		463 Kg/Ha		
2.00	02	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN	% Peningkatan jumlah hasil panen tanaman perkebunan	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				Cakupan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi tanaman perkebunan	2 Jenis	3 Jenis	1,721,825,000.0	5 Jenis	11,942,352,003.0	6 Jenis	12,541,455,358.0	7 Jenis	13,562,671,625.0	10 Jenis	14,717,384,896.19	100 Jenis	54,485,688,882.19	Dinas Perkebunan
2.00	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	4,898,086,233.0	100 %	4,200,000,000.0	100 %	4,812,940,486.90	100 %	4,700,000,000.0	100 %	4,900,000,000.0	100 %	23,511,026,719.90	Dinas Perkebunan
2.00	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,679,486,400.0	100 %	392,215,000.0	100 %	402,215,000.0	100 %	412,215,000.0	100 %	422,215,000.0	100 %	3,308,346,400.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	429,871,063.0	100 %	600,000,000.0	100 %	600,000,000.0	100 %	600,000,000.0	100 %	600,000,000.0	100 %	2,829,871,063.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	197,800,000.0	100 %	482,800,000.0	100 %	482,800,000.0	100 %	482,800,000.0	100 %	482,800,000.0	100 %	2,129,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	**03**		**Kehutanan**				**45,628,892,179.0**		**45,732,314,517.03**		**47,427,350,104.01**		**48,044,837,688.15**		**49,730,749,850.76**		**236,564,144,338.95**	
2.00	**03**		**Dinas Kehutanan**				**45,628,892,179.0**		**45,732,314,517.03**		**47,427,350,104.01**		**48,044,837,688.15**		**49,730,749,850.76**		**236,564,144,338.95**	
2.00	03	20	PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (Prioritas)	% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)	68.34%	64.67 %		64.67 %		64.67 %		64.67 %		64.67 %		64.67 %		
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1450 Ton	283 Ton	1,069,600,000.0	339.6 Ton	4,205,000,000.0	283 Ton	3,405,000,000.0	283 Ton	3,730,000,000.0	586.82 Ton	2,130,000,000.0	2.10596 Ton	14,539,600,000.0	Dinas Kehutanan
				Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	320613.27 M3	64122.65 M3		76947.18 M3		92336.62 M3		110803.94 M3		132964.73 M3		477175.12 M3		
2.00	03	21	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Prioritas)	Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan	124805797 Bibit	1000000 Bibit		1000000 Bibit		1000000 Bibit		1000000 Bibit		1000000 Bibit		5000000 Bibit		
				Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas)	101359.41 Ha	1000 Ha	14,517,881,500.0	1000 Ha	14,967,300,000.0	1000 Ha	14,148,550,000.0	1000 Ha	12,927,250,000.0	1000 Ha	13,259,750,000.0	5000 Ha	69,820,731,500.0	Dinas Kehutanan
				Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)	58.40	58.6		58.62		58.64		58.66		58.68		58.68		
2.00	03	22	PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL	Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial	43953 Ha	44953 Ha		45953 Ha		44953 Ha		44953 Ha		48953 Ha		48953 Ha		
				Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina	173 (HD = 21 dan HKM = 152)	32 Kelompok	1,173,104,500.0	32 Kelompok	2,860,000,000.0	32 Kelompok	2,895,000,000.0	32 Kelompok	2,930,000,000.0	32 Kelompok	2,965,000,000.0	160 Kelompok	12,823,104,500.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	23	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM	% Tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani	100%	100 %	3,742,210,000.0	100 %	4,065,000,000.0	100 %	4,230,000,000.0	100 %	4,445,000,000.0	100 %	4,560,000,000.0	100 %	21,042,210,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	24	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan	100%	100 %	1,475,010,000.0	100 %	3,220,000,000.0	100 %	3,230,000,000.0	100 %	3,280,000,000.0	100 %	3,330,000,000.0	100 %	14,535,010,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	11,554,445,179.0	100 %	11,820,314,517.03	100 %	11,937,350,104.01	100 %	12,081,837,688.15	100 %	12,267,749,850.76	100 %	59,661,697,338.95	Dinas Kehutanan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.00	03	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	7,273,566,000.0	100 %	2,991,700,000.0	100 %	3,270,450,000.0	100 %	5,651,750,000.0	100 %	6,035,250,000.0	100 %	25,222,716,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,456,000,000.0	100 %	1,253,000,000.0	100 %	1,338,000,000.0	100 %	1,423,000,000.0	100 %	1,868,000,000.0	100 %	7,338,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	03	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	80 %	3,367,075,000.0	80 %	350,000,000.0	80 %	2,973,000,000.0	80 %	1,576,000,000.0	80 %	3,315,000,000.0	80 %	11,581,075,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	**04**		**Energi dan Sumber Daya Mineral**				**19,274,121,584.0**		**22,617,808,261.95**		**23,333,809,033.22**		**23,594,642,251.06**		**24,306,789,192.40**		**113,127,170,322.63**	
2.00	**04**		**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**				**19,274,121,584.0**		**22,617,808,261.95**		**23,333,809,033.22**		**23,594,642,251.06**		**24,306,789,192.40**		**113,127,170,322.63**	
2.00	04	01	PROGRAM PENYEDIAAN LISTRIK DAN KETAHANAN ENERGI (Prioritas)	% Desa Berlistrik (Prioritas) % Rumah Tangga Pengguna Listrik Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun	95.8% 96% 1.028 M3	97 % 97 % 120 M3	4,655,000,000.0	98.5 % 97.5 % 1244 M3	7,965,551,012.0	99 % 98 % 1244 M3	8,138,476,329.17	99.5 % 98.5 % 1296 M3	8,201,471,606.21	100 % 99 % 1296 M3	8,373,466,163.66	100 % 99 % 5110 M3	37,333,965,111.04	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	02	PROGRAM HILIRISASI PERTAMBANGAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas)	Rp 12.186.109.875.000	1382175000 0000 Rp	1,225,000,000.0	1520392500 0000 Rp	1,227,776,582.0	1672431750000 0 Rp	1,273,283,244.52	1839674925 0000 Rp	1,289,860,949.0	2023635962500 0 Rp	1,335,122,674.65	84383101375000 Rp	6,351,043,450.17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	03	PROGRAM EKSPLORASI SUMBER DAYA GEOLOGI, KONSERVASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (Prioritas)	Luas Wilayah Pemetaan (Prioritas) Jumlah Cadangan Sumber Daya (Prioritas) Jumlah Pembangunan Sumur Bor	4.558 Ha 364.460.000 Ton 16 Unit	9200 Ha 2400000 Ton 23 Unit	4,869,000,000.0	8500 Ha 4000000 Ton 15 Unit	4,880,036,064.0	7500 Ha 25200000 Ton 17 Unit	5,060,911,116.37	8173 Ha 33300000 Ton 18 Unit	5,126,802,416.90	7200 Ha 20000000 Ton 20 Unit	5,306,703,920.70	40573 Ha 84900000 Ton 93 Unit	25,243,453,517.97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	04	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN AIR TANAH	% Pertambangan Tanpa Izin	11,3%	23.95 %	459,350,000.0	31.49 %	460,391,162.0	45.97 %	477,455,231.32	85.1 %	483,671,532.18	99 %	500,643,755.59	99 %	2,381,511,681.09	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN EKSPLORASI	% Pelayanan Usaha Minerba dan Air Tanah	45%	50 %	514,541,500.0	60 %	515,707,759.0	70 %	534,822,098.42	80 %	541,785,295.91	90 %	560,796,754.04	90 %	2,667,653,407.37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN	Jumlah Izin/Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan Jumlah izin Rekomendasi teknis pemanfaatan minerba yang diterbitkan Jumlah Izin/Rekomendasi teknik pemanfaatan EBT dan ketenagalistrikan yang diterbitkan	32 Izin/Rekomtek 594 Izin/Rekomtek 72 Izin/Rekomtek	50 Izin/Rekomtek 260 Izin/Rekomtek 115 Izin/Rekomtek	1,516,800,000.0	52 Izin/Rekomtek 289 Izin/Rekomtek 121 Izin/Rekomtek	1,520,237,975.0	55 Izin/Rekomtek 323 Izin/Rekomtek 145 Izin/Rekomtek	1,576,584,510.44	55 Izin/Rekomtek 350 Izin/Rekomtek 145 Izin/Rekomtek	1,597,111,091.79	60 Izin/Rekomtek 393 Izin/Rekomtek 175 Izin/Rekomtek	1,653,154,345.23	272 Izin/Rekomtek 1615 Izin/Rekomtek 701 Izin/Rekomtek	7,863,887,922.46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,848,253,100.0	100 %	2,878,161,980.95	100 %	2,984,839,001.04	100 %	3,023,700,565.54	100 %	3,129,803,402.04	100 %	14,864,758,049.57	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,417,809,800.0	100 %	1,421,023,404.0	100 %	1,473,692,622.25	100 %	1,492,879,587.05	100 %	1,545,265,316.18	100 %	7,350,670,729.48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,096,797,184.0	100 %	1,099,283,182.0	100 %	1,140,027,328.18	100 %	1,154,870,087.04	100 %	1,195,394,930.49	100 %	5,686,372,711.71	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% Kehadiran pegawai Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya	100% 100%	100 % 100 %	671,570,000.0	100 % 100 %	649,639,141.0	100 % 100 %	673,717,551.51	100 % 100 %	682,489,119.44	100 % 100 %	706,437,929.82	100 % 100 %	3,383,853,741.77	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	**05**		**Perdagangan**				**11,871,143,523.0**		**14,398,050,628.56**		**14,839,043,380.49**		**14,999,693,428.84**		**15,438,312,564.52**		**71,546,243,525.41**	
2.00	**05**		**Dinas Perdagangan**				**11,871,143,523.0**		**14,398,050,628.56**		**14,839,043,380.49**		**14,999,693,428.84**		**15,438,312,564.52**		**71,546,243,525.41**	
2.00	05	01	PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas)	Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas)	4 Pameran 1 MoU	4 Pameran 2 MoU	1,605,000,000.0	4 Pameran 2 MoU	2,608,637,889.0	4 Pameran 2 MoU	2,668,260,904.0	5 Pameran 3 MoU	2,689,981,080.0	5 Pameran 3 MoU	2,749,283,177.0	22 Pameran 12 MoU	12,321,163,050.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	02	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)	Nilai Total Ekspor Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas)	1164350000 57950717 $ US	1257498000 Rp (Milyar) 125749800 Juta $ US	4,647,714,000.0	1358097840 Rp (Milyar) 135809784 Juta $ US	6,158,248,497.0	1466745667 Rp (Milyar) 146674567 Juta $ US	6,330,903,152.0	1584085321 Rp (Milyar) 158408532 Juta $ US	6,393,799,829.0	1710812146 Rp (Milyar) 171081215 Juta $ US	6,565,525,180.0	7377238974 Rp (Milyar) 737723897 Juta $ US	30,096,190,658.0	Dinas Perdagangan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.00	05	03	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	0.74%	0.89 %	471,250,000.0	0.98 %	472,318,134.0	1.08 %	489,824,268.0	1.19 %	496,201,609.0	1.31 %	513,613,518.0	5.45 %	2,443,207,529.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	04	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah izin usaha perdagangan Nilai perdagangan dalam negeri	4 Izin 17.000.000	5 Izin 20000000 Rp	1,100,000,000.0	5 Izin 30000000 Rp	1,102,493,257.0	5 Izin 40000000 Rp	1,143,356,382.0	5 Izin 50000000 Rp	1,158,242,484.0	5 Izin 50000000 Rp	1,198,885,667.0	25 Izin 190000000 Rp	5,702,977,790.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	08	PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK	Peningkatan jumlah pemasaran komoditi ekspor Peningkatan jumlah informasi pemasaran komoditi ekspor Peningkatan jumlah lembaga kerjasama promosi produk perdagangan	5 Jenis 5 Informasi 5 Lembaga	10 Jenis 10 Informasi 10 Lembaga	200,000,000.0	15 Jenis 15 Informasi 10 Lembaga	200,453,320.0	20 Jenis 20 Informasi 10 Lembaga	207,882,978.0	20 Jenis 20 Informasi 10 Lembaga	210,589,542.0	25 Jenis 25 Informasi 10 Lembaga	217,979,212.0	90 Jenis 90 Informasi 50 Lembaga	1,036,905,052.0	Dinas Perdagangan
2.00	05	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,284,242,000.0	100 %	2,289,419,457.0	100 %	2,374,275,159.93	100 %	2,405,187,395.84	100 %	2,489,586,358.0	100 %	11,842,710,370.77	Dinas Perdagangan
2.00	05	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	800,800,000.0	100 %	802,615,092.56	100 %	832,363,445.56	100 %	843,200,527.0	100 %	872,788,765.0	100 %	4,151,767,830.12	Dinas Perdagangan
2.00	05	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	466,937,523.0	100 %	467,995,882.0	100 %	485,341,815.0	100 %	491,660,797.0	100 %	508,913,370.52	100 %	2,420,849,387.52	Dinas Perdagangan
2.00	05	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	295,200,000.0	100 %	295,869,100.0	100 %	306,835,276.0	100 %	310,830,165.0	100 %	321,737,317.0	100 %	1,530,471,858.0	Dinas Perdagangan
2.00	**06**		**Perindustrian**				**9,905,521,350.0**		**22,925,714,982.84**		**24,295,946,418.91**		**25,429,996,056.43**		**26,795,988,700.88**		**109,353,167,509.06**	
2.00	**06**		**Dinas Perindustrian**				**9,905,521,350.0**		**22,925,714,982.84**		**24,295,946,418.91**		**25,429,996,056.43**		**26,795,988,700.88**		**109,353,167,509.06**	
2.00	06	01	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI (Prioritas)	Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya Jumlah kawasan pergudangan yang tertata % Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas)	6 Sentra 1 Kawasan 6%	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	508,800,000.0	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	7,350,000,000.0	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	7,600,000,000.0	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	8,025,000,000.0	2 Sentra 2 Kawasan 10 %	8,715,000,000.0	10 Sentra 10 Kawasan 50 %	32,198,800,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Jumlah produk industri yang memenuhi standar	6408 produk	4 Produk	1,581,485,000.0	4 Produk	3,400,000,000.0	4 Produk	3,450,000,000.0	4 Produk	3,460,000,000.0	4 Produk	3,050,000,000.0	20 Produk	14,941,485,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	03	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Cakupan kelompok bina kelompok pengrajin % Industri kecil dan menengah yang berkembang	10% 13.92%	5 % 10 %	1,890,930,950.0	5 % 10 %	3,600,000,000.0	5 % 10 %	3,850,000,000.0	5 % 10 %	4,100,000,000.0	5 % 10 %	4,500,000,000.0	25 % 50 %	17,940,930,950.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	04	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar	265 Industri 0 unit	1 Industri 1 Unit	1,103,962,250.0	1 Industri 1 Unit	2,600,000,000.0	1 Industri 1 Unit	2,800,000,000.0	1 Industri 1 Unit	2,975,000,000.0	1 Industri 1 Unit	3,300,000,000.0	5 Industri 5 Unit	12,778,962,250.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,840,253,150.0	100 %	4,533,714,982.84	100 %	4,952,946,418.91	100 %	5,094,996,056.43	100 %	5,284,988,700.88	100 %	23,706,899,309.06	Dinas Perindustrian
2.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	643,440,000.0	100 %	721,000,000.0	100 %	777,000,000.0	100 %	837,000,000.0	100 %	930,000,000.0	100 %	3,908,440,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	290,650,000.0	100 %	585,000,000.0	100 %	730,000,000.0	100 %	802,000,000.0	100 %	880,000,000.0	100 %	3,287,650,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	46,000,000.0	100 %	136,000,000.0	100 %	136,000,000.0	100 %	136,000,000.0	100 %	136,000,000.0	100 %	590,000,000.0	Dinas Perindustrian
2.00	**07**		**Transmigrasi**															
2.00	**07**		**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**				**10,607,969,027.0**		**16,632,013,024.26**		**17,026,080,996.28**		**17,169,636,731.56**		**17,561,583,657.06**		**78,997,283,436.16**	
2.00	07	01	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	% Penempatan Transmigrasi	100%	100 %	1,142,600,000.0	100 %	796,200,000.0	100 %	796,200,000.0	100 %	796,200,000.0	100 %	796,200,000.0	100 %	4,327,400,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	**08**		**Kelautan dan Perikanan**				**75,429,977,368.0**		**75,600,946,774.54**		**78,403,041,891.43**		**79,423,822,196.90**		**82,210,835,209.86**		**391,068,623,440.73**	
2.00	**08**		**Dinas Kelautan dan Perikanan**				**75,429,977,368.0**		**75,600,946,774.54**		**78,403,041,891.43**		**79,423,822,196.90**		**82,210,835,209.86**		**391,068,623,440.73**	
2.00	08	01	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas)	Rp.17.953.535.596.200	1885121237 6010 Rp	47,368,673,650.0	1979377299 4810 Rp	43,608,000,000.0	2078346164455 1 Rp	45,732,000,000.0	2182263472 6778 Rp	47,052,000,000.0	2291376646311 7 Rp	49,043,000,000.0	22913766463117 Rp	232,803,673,650.0	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.00	08	02	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi garam rakyat	363.853 Ton 3.531.233.6 Ton 86.834.94 Ton	369365 Ton 4656858 Ton 91176.69 Ton	1,652,742,400.0	374981 Ton 5088024 Ton 95735.52 Ton	2,398,000,000.0	380743 Ton 5559907 Ton 100522.3 Ton	2,598,000,000.0	386644 Ton 6076403 Ton 105548.41 Ton	2,899,000,000.0	392318 Ton 6641782 Ton 110825.83 Ton	2,999,000,000.0	392318 Ton 6641782 Ton 110825.83 Ton	12,546,742,400.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	03	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP Nilai ekspor produk KP Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	130.623.1 Ton 340.390.4 US$ Juta 25.648.77 Ton	143685.41 Ton 374429.44 US$ Juta 26931.21 Ton	302,860,000.0	158053.95 Ton 411872.38 US$ Juta 28277.77 Ton	3,270,000,000.0	173859.35 Ton 453059.62 US$ Juta 29691.66 Ton	3,370,000,000.0	191245.28 Ton 498365.58 US$ Juta 31176.24 Ton	3,470,000,000.0	200154 Ton 548202.14 US$ Juta 32735.05 Ton	3,670,000,000.0	200154 Ton 548202.14 US$ Juta 32735.05 Ton	14,082,860,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	04	PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan % Penurunan tindakan IUU Fishing Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	101.437 Ha 11.6% 2%	941210.88 Ha 9.83 % 20 %	11,099,415,500.0	1008321.53 Ha 8.03 % 40 %	11,560,000,000.0	1034535.52 Ha 7.19 % 60 %	11,787,000,000.0	1037262.09 Ha 6.31 % 80 %	10,960,000,000.0	1038850.36 Ha 5.4 % 100 %	11,245,000,000.0	1038850.36 Ha 5.4 % 100 %	56,651,415,500.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	9,296,678,218.0	100 %	9,295,189,774.54	100 %	9,328,160,891.43	100 %	9,387,355,196.90	100 %	9,459,368,209.86	100 %	46,766,752,290.73	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,752,357,000.0	100 %	3,576,757,000.0	100 %	3,674,881,000.0	100 %	3,722,467,000.0	100 %	3,742,467,000.0	100 %	18,468,929,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,677,550,600.0	100 %	1,590,000,000.0	100 %	1,600,000,000.0	100 %	1,610,000,000.0	100 %	1,724,000,000.0	100 %	8,201,550,600.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	08	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	279,700,000.0	100 %	303,000,000.0	100 %	313,000,000.0	100 %	323,000,000.0	100 %	328,000,000.0	100 %	1,546,700,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.00			**Fungsi Penunjang Pemerintahan**				**513,458,612,773.50**		**538,261,587,095.29**		**557,062,035,590.42**		**568,589,612,828.65**		**588,939,973,905.45**		**2,766,311,822,193.31**	
3.00	**01**		**Perencanaan Pembangunan**				**26,963,476,000.0**		**28,327,537,926.0**		**29,377,477,896.02**		**29,759,962,428.98**		**30,804,251,160.74**		**145,232,705,411.74**	
3.00	**01**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**				**26,963,476,000.0**		**28,327,537,926.0**		**29,377,477,896.02**		**29,759,962,428.98**		**30,804,251,160.74**		**145,232,705,411.74**	
3.00	01	01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas) % Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas) % Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)	100% 98.63% 96.69%	100 % 100 % 97 %	10,771,598,000.0	100 % 100 % 97.5 %	12,098,959,455.0	100 % 100 % 97 %	12,547,398,749.35	100 % 100 % 97 %	12,710,761,512.06	100 % 100 % 99 %	13,156,787,109.40	100 % 100 % 99 %	61,285,504,825.81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas)	0 Kawasan	3 Kawasan	689,310,000.0	3 Kawasan	690,872,388.0	3 Kawasan	716,479,080.23	3 Kawasan	725,807,388.37	6 Kawasan	751,276,253.76	6 Kawasan	3,573,745,110.36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	1,315,000,000.0	10 Rekomendasi	1,317,980,576.0	10 Rekomendasi	1,366,830,584.93	10 Rekomendasi	1,384,626,243.22	10 Rekomendasi	1,433,213,320.13	50 Rekomendasi	6,817,650,724.28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi	8 Rekomendasi	924,790,000.0	8 Rekomendasi	946,931,459.0	8 Rekomendasi	982,028,797.21	8 Rekomendasi	994,814,470.21	8 Rekomendasi	1,029,722,899.41	40 Rekomendasi	4,878,287,625.83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	05	PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	282,960,600.0	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	283,601,958.0	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	294,113,461.91	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	297,942,716.77	4 Rekomendasi 4 Rekomendasi	308,397,643.34	20 Rekomendasi 20 Rekomendasi	1,467,016,380.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	06	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam dokumen Perencanaan	6 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4,746,240,000.0	4 Rekomendasi	4,739,959,284.0	4 Rekomendasi	4,915,642,490.86	4 Rekomendasi	4,979,642,444.46	4 Rekomendasi	5,154,380,047.22	20 Rekomendasi	24,535,864,266.54	Badan Perencanaan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Rekomendasi	4 Rekomendasi	[illegible]	4 Rekomendasi	[illegible]	4 Rekomendasi	[illegible]	4 Rekomendasi	[illegible]	4 Rekomendasi	[illegible]	20 Rekomendasi	[illegible]	Pembangunan Daerah
3.00	01	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,488,769,500.0	100 %	3,551,801,799.0	100 %	3,683,446,797.37	100 %	3,731,403,992.10	100 %	3,862,340,418.91	100 %	18,317,762,507.38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	3,282,466,400.0	100 %	3,231,774,968.0	100 %	3,351,558,399.70	100 %	3,395,194,523.05	100 %	3,514,333,227.98	100 %	16,775,327,518.73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,085,341,500.0	100 %	1,087,801,532.0	100 %	1,128,120,119.62	100 %	1,142,807,850.76	100 %	1,182,909,425.62	100 %	5,626,980,428.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	377,000,000.0	100 %	377,854,507.0	100 %	391,859,414.84	100 %	396,961,287.98	100 %	410,890,814.97	100 %	1,954,566,024.79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	**02**		**Keuangan**				**67,803,095,037.0**		**80,263,117,042.75**		**83,242,485,724.52**		**85,143,998,778.40**		**88,605,379,154.84**		**405,058,075,737.51**	
3.00	**02**		**Badan Pendapatan Daerah**				**45,130,007,184.0**		**55,232,298,750.49**		**56,908,801,610.07**		**57,519,537,873.38**		**59,187,017,059.85**		**273,977,662,477.79**	
3.00	02	05	PROGRAM PENINGKATAN AKSESBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH	Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling	100%	100 %	237,250,000.0	100 %	269,800,000.0	100 %	327,760,000.0	100 %	355,000,000.0	100 %	396,000,000.0	100 %	1,585,810,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda	6,68%	5 %	14,170,932,400.0	5 %	17,416,084,915.0	5 %	19,652,698,277.0	5 %	21,004,987,803.0	5 %	24,423,985,361.0	5 %	96,668,688,756.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	18,147,117,760.0	100 %	21,145,902,475.49	100 %	22,371,489,701.07	100 %	20,414,847,619.38	100 %	20,908,656,019.85	100 %	102,988,013,575.79	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	10,339,597,224.0	100 %	13,805,155,600.0	100 %	11,644,186,720.0	100 %	12,596,302,157.0	100 %	9,979,705,326.0	100 %	58,364,947,027.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	659,429,800.0	100 %	810,055,760.0	100 %	972,666,912.0	100 %	1,167,200,294.0	100 %	1,400,640,353.0	100 %	5,009,993,119.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	1,575,680,000.0	100 %	1,785,300,000.0	100 %	1,940,000,000.0	100 %	1,981,200,000.0	100 %	2,078,030,000.0	100 %	9,360,210,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	**02**		**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**22,673,087,853.0**		**25,030,818,292.26**		**26,333,684,114.45**		**27,624,460,905.02**		**29,418,362,094.99**		**131,080,413,259.72**	
3.00	02	01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH	Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah	1.03	1	3,152,000,000.0	1	3,667,260,000.0	1	3,797,932,600.0	1	4,028,205,723.80	1	4,344,904,718.41	1	18,990,303,042.21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	0.42	0.43		0.43		0.54		0.54		0.67		0.67		
				% Belanja Modal terhadap total APBD	11.33%	12 %		12 %		13 %		13 %		14 %		14 %		
				% Belanja Pendidikan terhadap total APBD	35.78%	20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		
				% Belanja Kesehatan terhadap total APBD	10%	10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		
				% Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD	70.35%	70 %		70 %		65 %		65 %		60 %		60 %		
				% Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD	14.08%	15 %		16 %		17 %		18 %		19 %		19 %		
				% Belanja Langsung terhadap Total APBD	29.65%	30 %		30 %		35 %		35 %		40 %		40 %		
				% Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	0%	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
				% SILPA	1.78%	2 %		2 %		2 %		2 %		2 %		2 %		
				Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
[illegible]	02	02	PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN	% Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	98,20%	98 %	2,283,500,000.0	98 %	2,794,417,500.0	98 %	2,916,361,675.0	98 %	3,135,174,376.78	98 %	3,336,510,305.59	98 %	14,465,963,857.37	Badan Pengelolaan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	02	02	DAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH	Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah	2 Hari	2 Hari	2,265,[illegible]	2 Hari	2,754,417,[illegible]	2 Hari	2,910,[illegible]	2 Hari	3,155,[illegible]	2 Hari	3,556,[illegible]	2 Hari	14,[illegible]	Keuangan Daerah
3.00	02	03	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	% Tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan % Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100% 100%	100 % 100 %	2,654,310,284.0	100 % 100 %	3,167,081,835.42	100 % 100 %	3,292,752,653.77	100 % 100 %	3,506,458,438.27	100 % 100 %	3,715,758,025.18	100 % 100 %	16,336,361,236.64	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00	02	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu	100%	100 %	1,848,500,000.0	100 %	2,357,242,500.0	100 %	2,474,814,925.0	100 %	2,677,887,519.04	100 %	2,859,685,555.68	100 %	12,218,130,499.72	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00	02	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	8,704,212,044.70	100 %	8,215,253,104.92	100 %	8,430,779,600.97	100 %	8,605,906,684.90	100 %	8,907,397,249.02	100 %	42,863,548,684.51	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00	02	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	2,095,553,420.0	100 %	2,281,733,550.0	100 %	2,464,906,888.24	100 %	2,682,896,710.83	100 %	2,937,583,307.93	100 %	12,462,673,877.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00	02	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,502,157,104.30	100 %	1,663,667,889.82	100 %	1,830,034,256.22	100 %	1,853,937,378.11	100 %	2,016,236,061.41	100 %	8,866,032,689.86	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00	02	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	432,855,000.0	100 %	884,161,912.10	100 %	1,126,101,515.25	100 %	1,133,994,073.29	100 %	1,300,286,871.77	100 %	4,877,399,372.41	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.00	**02**		**Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)**															
3.00	**03**		**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**				**30,064,910,772.0**		**30,133,055,826.95**		**31,249,916,027.67**		**31,656,779,053.12**		**32,767,627,822.79**		**155,872,289,502.53**	
3.00	**03**		**Badan Kepegawaian Daerah**				**13,201,946,303.0**		**13,231,869,802.96**		**13,722,299,610.31**		**13,900,959,173.13**		**14,388,749,272.33**		**68,445,824,161.73**	
3.00	03	02	PROGRAM PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR (Prioritas)	Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas)	65%	75 %	2,963,200,000.0	75 %	2,655,000,000.0	75 %	2,205,000,000.0	75 %	2,205,000,000.0	75 %	2,205,000,000.0	75 %	12,233,200,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	03	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	% Terisinya formasi	100%	100 %	90,950,000.0	100 %	150,000,000.0	100 %	150,000,000.0	100 %	160,000,000.0	100 %	160,000,000.0	100 %	710,950,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	04	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KINERJA APARATUR	% Pegawai yang menerima penghargaan Jumlah pegawai yang menerima tunjangan tambahan penghasilan	100 % 2600 Orang	100 % 26000 Orang	1,384,436,000.0	100 % 26000 Orang	1,446,000,000.0	100 % 26000 Orang	1,227,000,000.0	100 % 26000 Orang	1,240,000,000.0	100 % 26000 Orang	1,538,000,000.0	100 % 26000 Orang	6,835,436,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN APARATUR	% Pegawai yang menerima sanksi disiplin	100 %	100 %	553,700,000.0	100 %	590,000,000.0	100 %	660,000,000.0	100 %	660,000,000.0	100 %	660,000,000.0	100 %	3,123,700,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	06	PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER APARATUR	% Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar yang telah ditentukan	80%	100 %	1,077,285,000.0	100 %	1,025,000,000.0	100 %	1,300,000,000.0	100 %	1,300,000,000.0	100 %	1,300,000,000.0	100 %	6,002,285,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	07	PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI ASN	Cakupan pegawai yg direkrut sesuai dengan usulan formasi CPNS Cakupan ketersediaan data dan informasi kepegawaian	100% 100%	100 % 100 %	635,250,000.0	100 % 100 %	580,000,000.0	100 % 100 %	630,000,000.0	100 % 100 %	630,000,000.0	100 % 100 %	630,000,000.0	100 % 100 %	3,105,250,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	4,523,475,303.0	100 %	4,845,869,802.96	100 %	5,090,299,610.31	100 %	5,205,959,173.13	100 %	5,375,749,272.33	100 %	25,041,353,161.73	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,384,000,000.0	100 %	1,270,000,000.0	100 %	1,760,000,000.0	100 %	1,780,000,000.0	100 %	1,800,000,000.0	100 %	7,994,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	270,950,000.0	100 %	310,000,000.0	100 %	330,000,000.0	100 %	350,000,000.0	100 %	350,000,000.0	100 %	1,610,950,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	03	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	90 %	318,700,000.0	90 %	360,000,000.0	90 %	370,000,000.0	90 %	370,000,000.0	90 %	370,000,000.0	90 %	1,788,700,000.0	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	**03**		**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**16,862,964,469.0**		**16,901,186,023.99**		**17,527,616,417.36**		**17,755,819,879.99**		**18,378,878,550.46**		**87,426,465,340.80**	
3.00	03	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR (Prioritas)	Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas)	10%	100 %	2,994,519,000.0	100 %	3,001,304,370.99	100 %	3,112,493,647.42	100 %	3,153,071,934.0	100 %	3,263,714,462.49	100 %	15,525,103,414.90	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	03	11	PROGRAM PERENCANAAN KEDIKLATAN	Cakupan ketersediaan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan	6%	100 %	661,727,500.0	100 %	663,227,370.0	100 %	687,809,418.93	100 %	696,764,458.07	100 %	721,214,195.66	100 %	3,430,742,942.66	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN INOVASI PELATIHAN	Cakupan pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar ISO	6%	100 %	632,386,000.0	100 %	633,819,365.0	100 %	657,311,426.83	100 %	665,869,392.73	100 %	689,235,010.39	100 %	3,278,621,194.95	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	10%	100 %	7,064,945,026.0	100 %	7,080,958,414.0	100 %	7,343,409,081.67	100 %	7,439,017,710.93	100 %	7,700,055,754.57	100 %	36,628,385,987.17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	10%	100 %	3,241,240,787.0	100 %	3,248,587,376.0	100 %	3,368,993,947.37	100 %	3,412,857,075.48	100 %	3,532,615,566.30	100 %	16,804,294,752.15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	6%	100 %	1,534,233,656.0	100 %	1,537,713,144.0	100 %	1,594,705,312.13	100 %	1,615,467,820.02	100 %	1,672,155,218.23	100 %	7,954,275,150.38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	10%	100 %	733,912,500.0	100 %	735,575,984.0	100 %	762,893,583.01	100 %	772,771,488.76	100 %	799,888,342.82	100 %	3,805,041,898.59	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	**04**		**Penelitian dan Pengembangan**				**11,586,729,523.0**		**11,612,991,976.46**		**12,043,419,232.97**		**12,200,220,357.86**		**12,628,330,866.25**		**60,071,691,956.54**	
3.00	**04**		**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**11,586,729,523.0**		**11,612,991,976.46**		**12,043,419,232.97**		**12,200,220,357.86**		**12,628,330,866.25**		**60,071,691,956.54**	
3.00	04	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)	20%	20 %	5,024,479,800.0	20 %	4,941,641,751.46	20 %	5,222,916,752.81	20 %	5,325,382,932.54	20 %	5,605,143,988.69	20 %	26,119,565,225.50	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	02	PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	8 Rekomendasi	9 Rekomendasi	2,547,200,000.0	9 Rekomendasi	2,647,200,000.0	9 Rekomendasi	2,647,200,000.0	9 Rekomendasi	2,647,200,000.0	9 Rekomendasi	2,647,200,000.0	45 Rekomendasi	13,136,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	1,836,829,723.0	100 %	1,840,993,077.0	100 %	1,909,228,170.88	100 %	1,934,085,656.87	100 %	2,001,953,479.71	100 %	9,523,090,107.46	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	906,030,000.0	100 %	908,083,605.0	100 %	941,741,075.94	100 %	954,002,216.84	100 %	987,478,528.09	100 %	4,697,335,425.87	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	928,370,000.0	100 %	930,474,241.0	100 %	964,961,604.66	100 %	977,525,068.76	100 %	1,011,826,806.09	100 %	4,813,157,720.51	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	343,820,000.0	100 %	344,599,302.0	100 %	357,371,628.68	100 %	362,024,482.85	100 %	374,728,063.67	100 %	1,782,543,477.20	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	**05**		**Sekretariat Dewan**				**228,683,602,471.0**		**235,133,938,249.0**		**240,514,695,499.36**		**245,203,444,926.29**		**253,044,475,705.68**		**1,202,580,156,851.33**	
3.00	**05**		**Sekretariat DPRD**				**228,683,602,471.0**		**235,133,938,249.0**		**240,514,695,499.36**		**245,203,444,926.29**		**253,044,475,705.68**		**1,202,580,156,851.33**	
3.00	05	01	PROGRAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT	% Usulan reses yang diakomodir	100%	100 %	33,780,944,500.0	100 %	35,233,914,760.0	100 %	35,702,068,373.19	100 %	36,018,329,625.25	100 %	36,881,810,454.84	100 %	177,617,067,713.28	Sekretariat DPRD
3.00	05	02	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	% Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD	100%	100 %	25,898,668,400.0	100 %	26,953,768,636.0	100 %	27,856,831,390.61	100 %	29,185,809,757.05	100 %	30,584,011,831.82	100 %	140,479,090,015.48	Sekretariat DPRD
3.00	05	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Cakupan anggota DPRD yang kompeten dibidangnya	100%	100 %	16,318,696,000.0	100 %	18,355,683,917.0	100 %	18,961,895,664.63	100 %	19,182,733,640.04	100 %	19,785,682,490.01	100 %	92,604,691,711.68	Sekretariat DPRD
3.00	05	04	PROGRAM PRODUK HUKUM DAERAH	Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	56	16 Ranperda	115,316,139,400.0	16 Ranperda	116,636,715,929.0	16 Ranperda	119,151,844,668.69	16 Ranperda	120,968,806,465.17	16 Ranperda	124,564,476,997.53	80 Ranperda	596,637,983,460.39	Sekretariat DPRD
3.00	05	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	20,411,851,671.0	100 %	20,458,117,125.0	100 %	21,216,382,630.43	100 %	21,492,612,544.72	100 %	22,246,796,732.63	100 %	105,825,760,703.78	Sekretariat DPRD
3.00	05	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	10,615,200,000.0	100 %	11,139,260,387.0	100 %	11,033,596,977.31	100 %	11,677,250,568.08	100 %	12,069,464,666.05	100 %	56,534,772,598.44	Sekretariat DPRD
3.00	05	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	1,631,900,000.0	100 %	1,635,598,861.0	100 %	1,696,221,164.68	100 %	1,718,305,373.62	100 %	1,778,601,381.85	100 %	8,460,626,781.15	Sekretariat DPRD

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	05	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	4,710,202,500.0	100 %	4,720,878,634.0	100 %	4,895,854,629.82	100 %	4,959,596,952.36	100 %	5,133,631,150.95	100 %	24,420,163,867.13	Sekretariat DPRD
3.00	**06**		**Sekretariat Daerah**				**110,761,039,006.50**		**109,113,371,547.43**		**114,601,984,334.16**		**117,055,003,310.35**		**122,022,147,634.21**		**573,553,545,832.65**	
3.00	**06**		**Biro Hukum dan HAM**				**3,054,003,889.0**		**3,560,926,086.92**		**4,174,377,126.98**		**4,215,706,411.86**		**4,328,546,808.70**		**19,333,560,323.46**	
3.00	06	07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH	Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	12 Perda 50 Perda	12 Perda 50 Perda	324,600,000.0	12 Perda 50 Perda	435,335,736.92	12 Perda 50 Perda	618,394,074.43	12 Perda 50 Perda	612,786,827.79	12 Perda 50 Perda	618,780,261.38	12 Perda 50 Perda	2,609,896,900.52	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMANTAPAN ADVOKASI DAN PENGAMANAN YURIDIS KEROV BIJAKAN PEMERINTAHAN	% LHP aparat fungisonal prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti	98,64 %	100 %	440,000,000.0	100 %	560,015,926.0	100 %	677,342,553.13	100 %	663,296,993.93	100 %	699,554,266.81	100 %	3,040,209,739.87	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	09	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN PRODUK HUKUM MELALUI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	2 Jenis	2 Jenis	110,050,000.0	2 Jenis	220,299,439.0	2 Jenis	374,387,609.03	2 Jenis	375,876,895.87	2 Jenis	389,943,061.51	2 Jenis	1,470,557,005.41	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	10	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM LEGISLASI DAERAH	Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	96,11%	100 %	587,383,282.0	100 %	588,714,644.0	100 %	674,534,931.49	100 %	682,483,883.71	100 %	679,186,725.31	100 %	3,212,303,466.51	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	1,352,970,607.0	100 %	1,422,018,624.0	100 %	1,466,297,799.36	100 %	1,484,607,307.04	100 %	1,534,597,335.13	100 %	7,260,491,672.53	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	239,000,000.0	100 %	259,541,717.0	100 %	268,420,159.54	100 %	301,654,503.52	100 %	311,485,158.56	100 %	1,380,101,538.62	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	0 %	0.0	100 %	30,000,000.0	100 %	30,000,000.0	100 %	30,000,000.0	100 %	30,000,000.0	100 %	120,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	45,000,000.0	100 %	65,000,000.0	100 %	65,000,000.0	100 %	65,000,000.0	100 %	240,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
3.00	**06**		**Biro Pemerintahan**				**2,680,898,315.0**		**2,686,974,833.0**		**2,786,565,636.54**		**2,822,845,750.83**		**2,921,900,513.30**		**13,899,185,048.67**	
3.00	06	11	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN	Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten/Kota Cakupan Fasilitasi Administrasi Pengangkatan Kepala Daerah, Pengangkatan dan Pergantian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota	100% 100% 100% 100%	100 % 80 % 80 % 100 %	567,119,750.0	100 % 100 % 100 % 100 %	578,678,415.0	100 % 100 % 100 % 100 %	600,126,717.20	100 % 100 % 100 % 100 %	607,940,158.09	100 % 100 % 100 % 100 %	629,273,016.23	100 % 100 % 100 % 100 %	2,983,138,056.52	Biro Pemerintahan
3.00	06	13	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah	100%	100 %	138,510,000.0	100 %	138,823,946.0	100 %	143,969,356.90	100 %	145,843,787.79	100 %	150,961,503.40	100 %	718,108,594.09	Biro Pemerintahan
3.00	06	14	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH	Peningkatan jumlah kerjasama daerah	15 MoU	18 MoU	38,849,315.0	20 MoU	38,937,371.0	22 MoU	40,380,556.61	24 MoU	40,906,297.40	26 MoU	42,341,715.39	110 MoU	201,415,255.40	Biro Pemerintahan
3.00	06	22	PROGRAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KAB/KOTA	% Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi	100%	100 %	73,000,100.0	100 %	73,165,562.0	100 %	75,877,391.17	100 %	76,865,288.38	100 %	79,562,521.44	100 %	378,470,862.99	Biro Pemerintahan
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	80 %	1,594,316,250.0	100 %	1,589,656,213.0	100 %	1,648,575,685.23	100 %	1,670,039,566.61	100 %	1,728,641,908.78	100 %	8,231,229,623.62	Biro Pemerintahan
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	80 %	253,573,000.0	100 %	254,147,748.0	100 %	263,567,552.79	100 %	266,999,110.55	100 %	276,368,213.86	100 %	1,314,655,625.20	Biro Pemerintahan
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	80 %	15,529,900.0	100 %	13,565,578.0	100 %	14,068,376.64	100 %	14,251,542.01	100 %	14,751,634.20	100 %	72,167,030.85	Biro Pemerintahan
3.00	**06**		**Biro Humas dan Protokol**				**6,124,306,018.0**		**5,637,054,056.59**		**5,845,987,440.62**		**5,922,100,161.52**		**6,129,908,974.52**		**29,659,356,651.25**	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	06	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Peningkatan jumlah kerjasama informasi aktif media massa	51 Media Massa	20 Media Massa	1,333,500,000.0	25 Media Massa	1,336,522,508.0	65 Media Massa	1,386,059,760.46	70 Media Massa	1,404,105,775.92	80 Media Massa	1,451,376,397.26	80 Media Massa	6,911,564,441.64	Biro Humas dan Protokol
3.00	06	19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan ketersediaan layanan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah	3 Jenis	3 Jenis	1,054,750,000.0	3 Jenis	556,007,395.0	3 Jenis	576,615,412.16	3 Jenis	584,122,744.05	3 Jenis	604,619,839.80	3 Jenis	3,376,115,391.01	Biro Humas dan Protokol
3.00	06	21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEHUMASAN MEDIA SOSIAL	Cakupan Teknologi Informasi yang digunakan	100%	100 %	400,500,000.0	100 %	401,407,772.0	100 %	416,285,664.84	100 %	421,705,559.25	100 %	436,503,372.40	100 %	2,076,402,368.49	Biro Humas dan Protokol
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,030,806,918.0	100 %	3,037,676,538.0	100 %	3,150,265,849.84	100 %	3,191,281,214.28	100 %	3,305,264,521.40	100 %	15,715,295,041.52	Biro Humas dan Protokol
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	250,749,100.0	100 %	251,317,446.65	100 %	260,632,349.07	100 %	264,025,691.50	100 %	273,290,456.37	100 %	1,300,015,043.59	Biro Humas dan Protokol
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	54,000,000.0	100 %	54,122,396.94	100 %	56,128,404.25	100 %	56,859,176.52	100 %	58,854,387.29	100 %	279,964,365.0	Biro Humas dan Protokol
3.00	**06**		**Biro Perekonomian**				**4,256,141,000.0**		**4,265,787,959.02**		**4,423,896,344.17**		**4,481,493,934.17**		**4,638,751,310.69**		**22,066,070,548.05**	
3.00	06	16	PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKONOMI	Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing	2 Lembaga	5 Lembaga	3,538,291,250.0	7 Lembaga	3,146,311,132.0	8 Lembaga	3,277,752,622.75	10 Lembaga	3,325,635,681.29	12 Lembaga	3,456,369,695.82	12 Lembaga	16,744,360,381.86	Biro Perekonomian
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	519,949,750.0	100 %	571,128,268.02	100 %	590,443,514.0	100 %	597,479,900.38	100 %	616,691,184.41	100 %	2,895,692,616.81	Biro Perekonomian
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	164,500,000.0	100 %	414,872,855.0	100 %	420,983,749.98	100 %	423,209,898.87	100 %	429,287,902.02	100 %	1,852,854,405.87	Biro Perekonomian
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	0.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	100,000,000.0	100 %	400,000,000.0	Biro Perekonomian
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	33,400,000.0	100 %	33,475,704.0	100 %	34,716,457.44	100 %	35,168,453.63	100 %	36,402,528.44	100 %	173,163,143.51	Biro Perekonomian
3.00	**06**		**Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa**				**6,393,267,541.0**		**6,407,758,505.94**		**6,645,257,500.14**		**6,731,776,438.91**		**6,967,997,109.44**		**33,146,057,095.43**	
3.00	06	03	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	% Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBD % Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBN	100% 100%	100 % 100 %	786,936,000.0	100 % 100 %	788,719,667.0	100 % 100 %	817,952,998.62	100 % 100 %	828,602,461.85	100 % 100 %	857,678,446.61	100 % 100 %	4,079,889,574.08	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana % Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	100% 100%	100 % 100 %	1,346,200,000.0	100 % 100 %	1,349,251,293.0	100 % 100 %	1,399,260,329.61	100 % 100 %	1,417,478,211.87	100 % 100 %	1,467,218,077.23	100 % 100 %	6,979,407,911.71	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	28	PROGRAM ADMINISTRASI USAHA JASA PEMBANGUNAN	% Capaian Kinerja Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan	100%	100 %	400,495,000.0	100 %	401,402,762.94	100 %	416,280,467.76	100 %	421,700,294.51	100 %	436,497,922.92	100 %	2,076,376,448.13	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,357,566,541.0	100 %	2,362,910,196.0	100 %	2,450,489,775.09	100 %	2,482,394,298.70	100 %	2,569,502,486.43	100 %	12,222,863,297.22	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	1,183,870,000.0	100 %	1,186,553,357.0	100 %	1,230,532,109.95	100 %	1,246,553,209.55	100 %	1,290,295,249.66	100 %	6,137,803,926.16	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	318,200,000.0	100 %	318,921,230.0	100 %	330,741,819.11	100 %	335,047,962.43	100 %	346,804,926.59	100 %	1,649,715,938.13	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	**06**		**Biro Kesejahteraan**				**4,199,100,000.0**		**5,208,617,670.03**		**6,364,607,079.23**		**7,421,432,743.64**		**8,576,582,549.48**		**31,770,340,042.38**	
				% Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	1.95%	1.75 %		1.55 %		1.25 %		1 %		1 %		1 %		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	06	02	PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL (Prioritas)	% Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas)	36.36%	10 %	241,200,000.0	10 %	1,000,078,478.03	10 %	1,642,184,053.79	10 %	2,102,300,000.0	10 %	2,557,300,000.0	86.36 %	7,543,062,531.82	Biro Kesejahteraan
				% Penurunan Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	322%	10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		50 %		
3.00	06	05	PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEAGAMAAN	% Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	20 %	1,738,500,000.0	20 %	1,766,096,324.0	20 %	1,890,816,005.10	20 %	2,080,816,005.10	20 %	2,190,700,792.29	100 %	9,666,929,126.49	Biro Kesejahteraan
3.00	06	06	PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	% Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan dan seni budaya	100%	20 %	427,400,000.0	20 %	513,368,744.0	20 %	697,368,744.0	20 %	877,368,744.0	20 %	1,258,160,467.70	100 %	3,773,666,699.70	Biro Kesejahteraan
				% Pelaksaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial	100%	20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		100 %		
				% Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	100%	20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		100 %		
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	1,733,200,000.0	100 %	1,867,140,848.0	100 %	1,992,620,680.61	100 %	2,166,034,668.99	100 %	2,281,032,282.94	100 %	10,040,028,480.54	Biro Kesejahteraan
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	30,000,000.0	100 %	30,067,998.0	100 %	108,682,446.80	100 %	161,588,431.40	100 %	255,000,000.0	100 %	585,338,876.20	Biro Kesejahteraan
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	28,800,000.0	100 %	28,865,278.0	100 %	29,935,148.93	100 %	30,324,894.15	100 %	31,389,006.55	100 %	149,314,327.63	Biro Kesejahteraan
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	3,000,000.0	100 %	3,000,000.0	100 %	3,000,000.0	100 %	3,000,000.0	100 %	12,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	**06**		**Biro Organisasi dan Tata Laksana**				**7,100,000,000.0**		**6,514,732,884.0**		**6,756,196,807.64**		**6,844,160,137.57**		**7,084,324,396.08**		**34,299,414,225.29**	
3.00	06	01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (Prioritas)	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota (Prioritas)	53 OPD Prov (100)	100 %	1,654,894,400.0	100 %	1,664,258,073.0	100 %	1,725,942,609.91	100 %	1,748,413,781.71	100 %	1,809,766,305.77	100 %	8,603,275,170.39	Biro Organisasi dan Tata Laksana
3.00	06	17	PROGRAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov	53 OPD Prov	2,545,000,000.0	53 OPD Prov	1,495,485,999.0	53 OPD Prov	1,550,915,120.23	53 OPD Prov	1,571,107,495.06	53 OPD Prov	1,626,238,272.11	53 OPD Prov	8,788,746,886.40	Biro Organisasi dan Tata Laksana
				Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov	53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		
				Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov	53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		53 OPD Prov		
				Cakupan Fasilitasi Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov.Sulsel	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		
				Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		
				Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	142 UPT	142 UPT		142 UPT		142 UPT		142 UPT		142 UPT		142 UPT		
				Cakupan Fasilitasi Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	34 Cabang Dinas	34 Cabang Dinas		34 Cabang Dinas		34 Cabang Dinas		34 Cabang Dinas		34 Cabang Dinas		34 Cabang Dinas		
				Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		
3.00	06	29	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi	53 OPD Prov	53 OPD Prov	243,410,000.0	53 OPD Prov	216,460,000.0	53 OPD Prov	253,003,979.22	53 OPD Prov	256,298,002.94	53 OPD Prov	265,291,600.19	53 OPD Prov	1,234,463,582.35	Biro Organisasi dan Tata Laksana
				Cakupan Pembinaan SAKIP Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	1,944,611,900.0	100 %	2,173,125,336.0	100 %	2,368,043,674.40	100 %	2,473,623,005.72	100 %	2,557,257,189.10	100 %	11,516,661,105.22	Biro Organisasi dan Tata Laksana
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	521,500,000.0	100 %	751,887,799.0	100 %	604,035,887.64	100 %	526,651,181.0	100 %	537,184,205.0	100 %	2,941,259,072.64	Biro Organisasi dan Tata Laksana
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	25,000,000.0	100 %	22,500,000.0	100 %	56,160,000.0	100 %	67,392,000.0	100 %	80,870,400.0	100 %	251,922,400.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	165,583,700.0	100 %	191,015,677.0	100 %	198,095,536.24	100 %	200,674,671.14	100 %	207,716,423.91	100 %	963,086,008.29	Biro Organisasi dan Tata Laksana
3.00	**06**		**Biro Umum dan Perlengkapan**				**70,953,322,243.50**		**68,817,919,966.93**		**71,368,607,037.94**		**72,297,801,451.01**		**74,834,759,606.38**		**358,272,410,305.76**	
3.00	06	23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI NASKAH/SURAT KEDINASAN	Cakupan jumlah administrasi ketatausahaan dan naskah dinas yang dikelola	20 Jenis	20 Jenis	779,000,000.0	20 Jenis	2,308,794,265.0	20 Jenis	2,435,794,265.0	20 Jenis	2,767,794,265.0	20 Jenis	3,099,794,265.0	20 Jenis	11,391,177,060.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	24	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan jumlah pelayanan kerumahtanggan dan perlengkapan	2130 Pelayanan	2140 Pelayanan	20,580,956,448.50	2150 Pelayanan	21,172,294,000.0	2160 Pelayanan	23,044,294,000.0	2170 Pelayanan	23,486,294,000.0	2180 Pelayanan	24,158,294,000.0	2190 Pelayanan	112,442,132,448.50	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	25	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN INVENTARISASI ASET SEKRETARIAT DAERAH	Cakupan jumlah barang dan jasa yang terkelola	1028 Unit	1048 Unit	18,000,000.0	1058 Unit	202,000,000.0	1068 Unit	202,000,000.0	1088 Unit	202,000,000.0	1098 Unit	202,000,000.0	1101 Unit	826,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	26	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SERKRETARIAT DAERAH	Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah	15120 Dokumen	15125 Dokumen	1,106,000,000.0	15205 Dokumen	1,960,000,000.0	15295 Dokumen	1,960,000,000.0	15395 Dokumen	1,960,000,000.0	15505 Dokumen	1,960,839,638.0	15525 Dokumen	8,946,839,638.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	27	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11400 Pelayanan	11414 Pelayanan	7,721,350,000.0	11534 Pelayanan	9,515,000,000.0	11654 Pelayanan	9,595,687,069.0	11774 Pelayanan	9,520,881,483.0	11894 Pelayanan	10,415,000,000.0	11899 Pelayanan	46,767,918,552.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	17,257,560,424.0	100 %	18,364,267,632.0	100 %	18,464,267,632.0	100 %	18,564,267,632.0	100 %	18,562,267,632.0	100 %	91,212,630,952.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	23,490,455,371.0	100 %	14,275,564,069.93	100 %	14,596,564,071.94	100 %	14,706,564,071.01	100 %	15,316,564,071.38	100 %	82,385,711,655.26	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0.0	100 %	1,020,000,000.0	100 %	1,070,000,000.0	100 %	1,090,000,000.0	100 %	1,120,000,000.0	100 %	4,300,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	**06**		**Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah**				**6,000,000,000.0**		**6,013,599,585.0**		**6,236,489,360.90**		**6,317,686,280.84**		**6,539,376,365.62**		**31,107,151,592.36**	
3.00	06	20	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sertifikat Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	6 Jenis 37% 18%	6 Jenis 47 % 20 %	2,596,900,000.0	6 Jenis 52 % 24 %	1,931,500,000.0	6 Jenis 57 % 28 %	2,032,000,000.0	6 Jenis 62 % 32 %	2,219,946,280.84	6 Jenis 67 % 36 %	2,335,326,365.62	30 Jenis 55 % 40 %	11,115,672,646.46	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
3.00	06	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,676,643,000.0	100 %	2,763,080,000.0	100 %	2,980,090,000.0	100 %	3,079,070,000.0	100 %	3,206,180,000.0	100 %	14,705,063,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
3.00	06	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	618,249,000.0	100 %	1,212,769,585.0	100 %	1,106,949,360.90	100 %	893,180,000.0	100 %	867,370,000.0	100 %	4,698,517,945.90	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
3.00	06	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	7,500,000.0	100 %	5,250,000.0	100 %	5,450,000.0	100 %	5,490,000.0	100 %	5,500,000.0	100 %	29,190,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
3.00	06	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	100,708,000.0	100 %	101,000,000.0	100 %	112,000,000.0	100 %	120,000,000.0	100 %	125,000,000.0	100 %	558,708,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
3.00	**07**		**Pengawasan**				**13,580,348,036.0**		**14,109,995,921.0**		**14,595,908,560.57**		**14,772,922,555.93**		**15,256,219,799.26**		**72,315,394,872.76**	
3.00	**07**		**Inspektorat Daerah**				**13,580,348,036.0**		**14,109,995,921.0**		**14,595,908,560.57**		**14,772,922,555.93**		**15,256,219,799.26**		**72,315,394,872.76**	
3.00	07	01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DAERAH (Prioritas)	Opini LKPD dari BPK RI (Proritas)	100 % (Opini WTP)	100 % (Opini WTP)	4,295,640,000.0	100 % (Opini WTP)	4,305,376,487.0	100 % (Opini WTP)	4,464,952,193.04	100 % (Opini WTP)	4,523,084,315.90	100 % (Opini WTP)	4,681,801,115.20	100 % (Opini WTP)	22,270,854,111.14	Inspektorat Daerah
3.00	07	02	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Hasil EKPPD Prov. Sulsel % TLHP BPK Jumlah Kab/Kota yang hasil evaluasi SAKIP > CC % TLHP APIP	100% (Tinggi) 68% 3 Kab/Kota 65%	100 % 70 % 4 Kab/Kota 70 %	2,643,485,368.0	100 % 72 % 4 Kab/Kota 73 %	2,686,309,182.0	100 % 74 % 4 Kab/Kota 76 %	2,785,615,864.01	100 % 76 % 5 Kab/Kota 80 %	2,821,792,475.04	100 % 80 % 6 Kab/Kota 85 %	2,926,702,864.26	100 % 80 % 6 Kab/Kota 85 %	13,863,905,753.31	Inspektorat Daerah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Kab/Kota yang hasil EKPPD > Tinggi	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		24 Kab/Kota		
3.00	07	03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas	6 OPD/Unit Kerja	7 OPD/Unit Kerja	2,265,781,316.0	7 OPD/Unit Kerja	2,709,097,590.0	8 OPD/Unit Kerja	2,772,703,522.22	8 OPD/Unit Kerja	2,795,874,642.39	9 OPD/Unit Kerja	2,853,000,000.0	9 OPD/Unit Kerja	13,396,457,070.61	Inspektorat Daerah
3.00	07	05	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	% Pengaduan Masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti % Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota yang ditindaklanjuti	100% 100%	100 % 100 %	435,218,000.0	100 % 100 %	436,204,464.0	100 % 100 %	452,372,071.11	100 % 100 %	458,261,797.96	100 % 100 %	474,342,383.0	100 % 100 %	2,256,398,716.07	Inspektorat Daerah
3.00	07	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2,924,536,352.0	100 %	2,955,019,044.0	100 %	3,064,544,715.27	100 %	3,104,444,020.39	100 %	3,213,380,176.36	100 %	15,261,924,308.02	Inspektorat Daerah
3.00	07	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	692,253,000.0	100 %	693,822,059.0	100 %	719,538,078.26	100 %	728,906,213.49	100 %	754,483,817.87	100 %	3,589,003,168.62	Inspektorat Daerah
3.00	07	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	168,280,000.0	100 %	168,661,423.0	100 %	174,912,738.28	100 %	177,190,041.22	100 %	183,407,709.13	100 %	872,451,911.63	Inspektorat Daerah
3.00	07	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	92 %	155,154,000.0	93 %	155,505,672.0	94 %	161,269,378.38	95 %	163,369,049.54	96 %	169,101,733.44	96 %	804,399,833.36	Inspektorat Daerah
3.00	**08**		**Pemerintahan Umum**				**24,015,411,928.0**		**29,567,578,605.70**		**31,436,148,315.15**		**32,797,281,417.72**		**33,811,541,761.68**		**151,627,962,028.25**	
3.00	**08**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				**7,935,655,027.0**		**8,453,641,963.73**		**8,748,438,024.61**		**8,855,829,815.58**		**9,149,039,154.87**		**43,142,603,985.79**	
3.00	08	01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	Cakupan wilayah konflik yang terpetakan	0%	20 %	2,832,750,000.0	20 %	3,039,170,704.0	20 %	3,144,402,539.52	20 %	3,182,737,635.34	20 %	3,287,403,066.62	100 %	15,486,463,945.48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	02	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	% Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	20%	5 %	73,000,000.0	10 %	73,165,462.0	15 %	75,877,287.22	20 %	76,865,183.08	25 %	79,562,412.45	25 %	378,470,344.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	03	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Cakupan Jumlah konflik antar umat beragama dan etnis	5 Kasus	6 Kasus	66,250,000.0	5 Kasus	66,400,162.0	5 Kasus	68,861,236.69	5 Kasus	69,757,786.02	4 Kasus	72,205,614.04	25 Kasus	343,474,798.75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	04	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI DAERAH	Cakupan Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	20%	20 %	90,250,000.0	20 %	140,454,560.0	20 %	143,807,194.14	20 %	145,028,531.14	20 %	148,363,119.50	100 %	667,903,404.78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	05	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PEMILU	% Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Cakupan Partai Politik peserta Pemilu	79% 12 Parpol	79 % 16 Parpol	79,250,000.0	78 % 16 Parpol	79,429,628.0	78 % 16 Parpol	82,373,630.31	78 % 16 Parpol	83,446,106.29	79 % 16 Parpol	86,374,262.83	79 % 16 Parpol	410,873,627.43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	06	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA	% Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara	20%	20 %	120,750,000.0	20 %	221,023,692.0	20 %	225,509,348.39	20 %	227,143,436.40	20 %	231,604,949.36	100 %	1,026,031,426.15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	3,351,615,027.0	100 %	3,359,211,789.73	100 %	3,483,718,576.29	100 %	3,529,075,379.12	100 %	3,652,912,015.69	100 %	17,376,532,787.83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	989,950,000.0	100 %	1,052,193,818.0	100 %	1,088,968,773.80	100 %	1,102,365,588.95	100 %	1,138,942,605.52	100 %	5,372,420,786.27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	73,500,000.0	100 %	153,666,595.0	100 %	156,396,994.67	100 %	157,391,656.94	100 %	160,107,360.48	100 %	701,062,607.09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	258,340,000.0	100 %	268,925,553.0	100 %	278,522,443.58	100 %	282,018,512.30	100 %	291,563,748.38	100 %	1,379,370,257.26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	**08**		**Badan Penghubung Daerah**				**16,079,756,901.0**		**21,113,936,641.97**		**22,687,710,290.54**		**23,941,451,602.14**		**24,662,502,606.81**		**108,485,358,042.46**	
3.00	08	07	PROGRAM FASILITAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Pelayanan tamu daerah	100%	100 %	1,613,000,000.0	100 %	1,707,771,172.0	100 %	1,791,586,377.53	100 %	1,941,256,053.52	100 %	2,305,134,960.54	100 %	9,358,748,563.59	Badan Penghubung Daerah

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.00	08	08	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH	% Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah	100%	100 %	221,500,000.0	100 %	1,022,002,000.0	100 %	921,500,000.0	100 %	921,500,000.0	100 %	1,121,500,000.0	100 %	4,208,002,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	7,799,880,652.0	100 %	9,208,118,825.97	100 %	10,079,159,052.01	100 %	10,230,169,299.62	100 %	10,138,647,225.0	100 %	47,455,975,054.60	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	6,404,576,249.0	100 %	8,979,021,944.0	100 %	9,699,664,861.0	100 %	10,652,726,249.0	100 %	10,851,420,421.27	100 %	46,587,409,724.27	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	52	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100 %	10,000,000.0	100 %	130,022,700.0	100 %	130,000,000.0	100 %	130,000,000.0	100 %	180,000,000.0	100 %	580,022,700.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	53	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	100%	100 %	30,800,000.0	100 %	67,000,000.0	100 %	65,800,000.0	100 %	65,800,000.0	100 %	65,800,000.0	100 %	295,200,000.0	Badan Penghubung Daerah

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	BB	BB	A	A
2	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	AA	AA
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	IKM = D	D	C	C	B	B	B
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	Tahun 2016: 6,99 dan Tahun 2017:8,56	7.6	7.8	8,0	8,2	8,3	8,3
5	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	51	56	64	65	71	73	73
6	PDRB Perkapita (Juta Rp)	47,93	57,64	62,97	62,97	68,80	82,13	82,13
7	Angka Kemiskinan (%)	9,48	8.78	8.46	8.14	7.82	7.5	7.5
8	PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Milyar RP)	29,202,608.04	33,110,348.45	35,124,356.44	37,138,364.43	39,152,372.42	41,166,380.41	41,166,380.41
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5.17	4.97	4.77	4.57	4.37	4,37
10	Indeks Gini	0,429	0.385	0.376	0.366	0.357	0.347	0.347
11	Indeks Williamson	0,610	0,580	0,570	0,560	0,549	0,539	0,539
12	IPM	70,34	71,58	72,18	72,79	73,40	74,01	74,01

No.	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Indeks Pendidikan	63,39	65,19	66,10	67,02	67,93	68,5	68,5
14	IPG	92,84	93,18	93,40	93,62	93,84	94,06	94,06
15	IDG	72,48	74,01	75,54	77,07	78,60	80,13	80,13
16	Indeks Kesehatan	76,68	77,03	77,17	77,31	77,45	77,58	77,58
17	Pertumbuhan PDRB (%)	7,23	7,2-7,6	7,4-7,8	7,6-8,0	7,8-8,2	7,9-8,3	7,9-8,3
18	Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	75.782.133	78.777.309	81.942.489	87.882.496	90.664.371	93.325.387	93.325.387
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,24	73,33	73,36	73,40	73,44	73,49	73,49
20	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	0,79 Juta ton CO_2eq (2017)	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,3

8.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indkator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
			FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1			**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian**								
1	1		Pertumbuhan PDRB	%	7,23	7,2-7,6	7,4-7,8	7,6-8,0	7,8-8,2	7,9-8,3	7,9-8,3
1	2		Laju Inflasi	%	4,44	3,5-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0	3,0-1,0
1	3		Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	6,01	7,31	8,00	8,69	9,38	10,07	10,07
1	4		PDRB Perkapita	Juta Rp	47,93	57,64	62,97	62,97	68,80	82,13	82,13
1	5		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,89	23,59	23,77	23,94	24,12	24,29	24,29
1	6		Indeks Gini		0,429	0.385	0.376	0.366	0.357	0.347	0.347
1	7		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	50,93	51,29	51,49	51,70	51,90	52,10	52,10

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	8		Indeks Ketimpangan Williamson		0,610	0,580	0,570	0,560	0,549	0,539	0,539
1	9		Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	90,62	90,88	91,00	91,12	91,24	91,36	91,36
1	10		Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	22,89	23,59	23,77	23,94	24,12	24,29	24,29
1	11		Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB	%	7,52	7,66	7,75	7,84	7,93	8,11	8,11
1	12		PDRB Pertanian	Trilyun Rp	95,50	125,75	135,36	144,97	154,59	783,34	783,34
1	13		Kontribusi Sektor Perkebunan (TanamanKeras) Terhadap PDRB	%	4,26	4,41	4,42	4,44	4,45	4,47	4,47
1	14		PDRB Perkebunan	Trilyun Rp	17,84	21,72	23,40	25,08	26,77	28,45	145,45
1	15		PDRB Peternakan	Trilyun Rupiah	4,6	5,7	6,0	6,4	6,8	7,2	7,2
1	16		Kontribusi sub sektor Peternkan terhadap PDRB	%	1,09	1,18	1,21	1,23	1,25	1,28	1,28

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	17		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
1	18		Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	5,36	5,81	6,26	6,72	7,18	7,63	7,63
1	19		Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,33	9,15	9,48	9,81	10,14	10,46	10,46
1	20		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,94	14,23	14,50	14,76	15,03	15,30	15,30
1	21		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,71	13,89	13,89	13,90	13,90	13,91	13,91
1	22		Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industry	%	14,51	14,7	15,0	15,2	15,5	15,7	15,7
1	23		Pertumbuhan PDRB Industri	%	5,03	6,74	7,65	8,57	9,48	10,40	10,40
1	24		Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	40,62	40,70	40,72	40,79	40,86	41,19	41,19
1	25		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,6	93,5	94,4	95,3	96,2	97,1	97,1
1	26		Penguatan Cadangan Pangan	%	72,5	75	80	85	90	100	100

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	27		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	39,4	47,2	62,99	74,80	86,66	100	100
2			**FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL**								
2	1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,34	71,58	72,18	72,79	73,40	74,01	74,01
2	2		Angka Melek Huruf (AMH)		90,44	91,23	91,26	91,28	91,30	91,232	91,232
2	3		Angka Rata-Rata Lama Sekolah		7,95	8,16	8,29	8,41	8,54	8,66	8,66
2	4		Angka Harapan lama Sekolah		13,28	13,68	13,86	14,04	14,22	14,39	14,39
2	5		Angka Usia Harapan Hidup		69,84	70,07	70,16	70,25	70,34	70,43	70,43
2	6		Angka Partispasi Angkatan Kerja		60,98	62,23	62,42	62,61	62,80	62,99	62,99
2	7		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,98	62,23	62,42	62,61	62,80	62,99	62,99
2	8		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61	5,20	5,05	4,90	4,50	4,25	4,25
2	9		Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,39	94,54	94,62	94,69	94,77	94,84	94,84

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	10		Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	37,26	38,10	38,63	39,16	39,69	40,22	40,22
2	11		Prevalensi Balita Gizi Buruk (Balita Kurus/Wasting)	%	4,90	8,25	8,00	7,75	7,5	7,25	7,25
			ASPEK PELAYANAN UMUM								
			URUSAN WAJIB								
1			**TERKAIT PELAYANAN DASAR**								
1	1		**PENDIDIKAN**								
1	1	1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	81,39	88,12	91,42	94,46	96,53	98,56	98,56
1	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	70,54	81,45	84,5	87,31	89,23	91,10	91,10
1	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	71,8	82,88	85,98	88,84	90,79	92,70	92,70
1	1	4	Angka Putus SekolahSMA/SMK/MA	%	1,18	1,10	1,07	1,04	1,01	1,00	1,00
1	1	5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,95	100	100	100	100	100	100

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	1	6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,65	97,00	97,55	98,00	98,25	98,50	98,50
1	1	7	Rasio Guru/Murid per Kelas Pendidikan Menengah		1:12	1:15	1:17	1:20	1:25	1:25	1:25
1	1	8	Kondisi Bangunan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi baik	%	47,32	53,82	56,08	58,41	60,80	63,28	63,28
1	1	9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		0.170833	0.1819444	0.1888889	0.1958333	0.20347222	0.211806	0.21180556
1	1	10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	97,97	98,15	98,29	98,44	98,62	98,79	98,79
1	1	11	Penduduk yang Berusia>15 Tahun Melek Huruf (TidakButaAksara)	%	94,06	94,17	94.3	94,94	94,53	95,00	95,00
1	1	12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	91,8	97,82	97,96	98,11	98,20	98,68	98,68
1	2		**KESEHATAN**								
1	2	1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	1.059	1.057	1.055	1.053	1.051	1.049	1.049

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	2	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	1.151	1.149	1.147	1.145	1.143	1.141	5.725
1	2	3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	818	816	814	812	810	808	4.06
1	2	4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	115	114	113	112	111	110	560
1	2	5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 Balita	11,30	13,73	13,95	14,17	14,42	14,59	14,59
1	2	6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Per 100.000 Balita	20,37						
1	2	7	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,03	1,17	1,23	1,29	1,34	1,4	1,4
1	2	8	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	14,08	18	19	20	21	22	22
1	2	9	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Per 100.000 Pendudu	37,70	37,72	37,72	37,74	37,74	37,75	37,75

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
				k							
1	2	10	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	79,95	82	83	84	85	86	86
1	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95,31	96	96,5	97	97,5	98	98
1	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	96,45	96,5	96,5	97	97	97	97
1	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
1	2	14	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	102	95	95	95	95	95	95
1	2	15	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	1,96	2	2	2	2	2	2
1	2	16	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	19,04	20	30	40	60	80	80

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	46	100	100	100	100	100	100
1	2	18	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	197	202	207	202	197	192	192
1	2	19	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	3	3	3	3	3	3	3
1	2	20	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	46	65	75	80	85	90	90
1	2	21	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	89	90	90	90	90	90	90
1	2	22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
1	2	23	Penderita Diare yang ditangani	Orang	169.972	194.9	206.55	218.7	230.85	243	1.094.000

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	24	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,15	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
1	2	25	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,33	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
1	2	26	Proporsi Jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan Komprehensif	%	83,4	0	0	0	0	0	Indikator tidak digunakan lagi dalam RPJMN
1	2	27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
1	2	28	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,54	98	98	98	98	98	98
1	2	29	Cakupan Puskesmas	%	147						
1	2	30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	89.5	92	92,5	93	93,5	94	94
1	2	31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	92,63	93	93,5	94	94,5	95	95
1	2	32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	60,28	61	62	63	64	65	65

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	71,74	72	72,5	73	73,5	74	74
1	2	35 4	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
1	2	35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
1	2	36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100
1	2	37	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
1	3		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	34,41	48,87	56,84	60,37	64,27	75,44	75,44
1	3	2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/Km	0,00017	0,00023	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter)	%	77,00	80,00	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50
1	3	4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	43,40	44,37	45,36	46,37	47,40	48,46	48,46
1	3	5	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	9,85	9,53	9,21	8,89	8,57	8,25	8,25
1	3	6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	86.9	87.77	88.65	89.53	90.43	91.33	91.33
1	3	7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	35	37	37	40	43	43	43
1	3	8	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	32,55	40	45	55	65	70	70
1	3	9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	9,184	12	14	16	18	20	20
1	3	10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	87,38						

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	87,45	87,80	87,95	88,10	88,25	88,25	87,50
1	3	12	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	%	83.34	84.17	85.02	85.87	86.72	87.59	87.59
1	3	13	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	74,76	75,25	75,65	76,05	76,55	77,15	77,15
1	3	14	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	87,45	87,65	87,80	87,95	88,10	88,25	88,25
1	3	15	Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	%	0,067	0,060	0,055	0,050	0,045	0,040	0,040
1	3	16	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	84,41	84,70	84,95	85,10	85,25	85,40	85,40

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	17	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	75.41	76.16	76.93	77.69	78.47	79.26	79.26
1	3	18	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/ Jiwa	2,09	2,10	2,11	2,12	2,13	2,14	2,14
1	3	19	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	8,52	10,40	11,20	12,28	13,36	14,44	14,44
1	3	20	Ketaatan terhadap RTRW	%	65	67	67	68	70	75	75
1	3	21	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	25	25	30	35	35	40	165
1	3	22	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	48	48	50	50	55	58	58
1	3	23	Rasio luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	46	46	47	48	50	52	52
1	4		**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,194	0,196	0,197	0,198	0,199	0,200	0,200

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0.048	**0.043**	**0.039**	**0.035**	**0.031**	**0.028**	**0.028**
1	4	3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	%	0.048	**0.043**	**0.039**	**0.035**	**0.031**	**0.028**	**0.028**
1	4	4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%	35,49	42,25	47,20	53,35	58,50	63,70	63,70
1	5		**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	5	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	**34.54**	**31.086**	**27.977**	**25.180**	**22.662**	**20.396**	
1	5	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
1	5	3	Persentase Penegakan PERDA	%	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
1	6		**SOSIAL**								
1	6	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	31,75	35	35	35	35	35	35
1	6	2	Persentase PMKS yang tertangani	%	35	35	35	35	35	35	35

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	6	3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
1	6	4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
1	6	5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100
1	6	6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	45.27	**47.53**	**49.91**	**52.41**	**55.03**	**57.78**	**57.78**

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	6	7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	82,15	75	75	75	75	75	75
1	6	8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	Lanjut Usia : 5,58%	10	10	10	10	10	10
1	6	9			Disabilitas : 7,43%						
1	6	10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Sosial)	%	82,32	75	75	75	75	75	75
1	6	11	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (BPBD)	%	61,9	65	70	85	95	100	100
			TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR								
1	7		**TENAGA KERJA**								
1	7	1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	22,30	22,02	20,98	20,02	18,98	18,20	18,20

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	7	2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	98,0	98,0	98,0	98,0	95,0	95,0
1	7	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	51,20	3,48	3,70	3,91	4,13	4,35	4,35
1	7	4	Keselamatan dan perlindungan	%	100	62,0	70,0	78,0	86,0	96,0	96,0
1	7	5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
1	7	6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	25,48	26,0	39,0	52,0	65,0	78,0	78,0
1	7	7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	5,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	18,0
1	7	8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	70	70	80	85	90	90
1	7	9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	66,67	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
1	8		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	8	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,66	51,25	51,85	52,26	52,85	53,76	53,76
1	8	2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	21	22	22	22	22	23	23
1	8	3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,6	73	74	75	76	77	77
1	8	4	Rasio KDRT	%	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,05	0,05
1	8	5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
1	8	6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	43,76	45,26	45,96	46,28	46,88	47,16	47,16
1	8	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	8	8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100
1	8	9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	49	50	52	53	54	55	50
1	8	10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	8	11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	54	100	100	100	100	100	100
1	8	12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	36	40	50	60	70	80	80
1	8	13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	29	30	35	40	45	50	50
1	8	14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100,1	101	102	103	104	47,16	47,16
1	8	15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	104,1	105,40	105,86	106,32	106,72	47,16	47,16
1	8	16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA								
1	8	17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	103,1	105,2	106,3	107,4	108,2	109,5	109,5
1	8	18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		100,4	100,6	100,7	100,8	100,9	101,2	101,2

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	9		**PANGAN**								
1	9	1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	384	399,66	411,41	423,51	435,96	448,77	448,77
1	9	2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	38,89	50,54	57,62	65,69	74,89	85,37	85,37
1	9	3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	20,88	28,19	35,24	44,05	55,06	68,83	68,83
1	9	4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	5.769	5.885	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
1	9	5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	164,38	167,68	169,36	169,36	169,36	169,36	169,36
1	9	6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
1	10		**PERTANAHAN**								
1	10	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%							
1	10	2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100
1	10	3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100
1	11		**LINGKUNGAN HIDUP**								

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	11	1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	6	Peningkatan Indeks Kualitas Air		55,94	56,1	56,3	56,3	56,4	56,4	56,4
1	11	7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara		88,66	86,3	86,3	86,5	86,5	86,6	86,6
1	11	8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		55,1	56,1	56,7	56,8	56,8	56,95	56,95

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	11	9	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	11	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	667.9	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
1	11	12	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	34.35	75	77	80	85	87	87
1	11	13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	8	8	8	8	8	8

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	11	14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	9	11	14	17	20	23	23
1	11	15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	11	16	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	73%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
1	11	17	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	11	18	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,82	0,95	0,97	0,98	0,99	1,00	1,00
1	11	19	Rasio bayi berakte kelahiran		0,86	0,88	0,89	0,90	0,92	0,95	0,95
1	11	20	Rasio pasangan berakte nikah		0,11	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,50
1	11	21	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
				Ada							
1	11	22	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
1	11	23	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	79,92	95	97	98	99	100	100
1	11	24	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	85,03	88,0	89,0	90,0	92,5	95,0	95,0
1	12		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	12	1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	31,47	34,62	38,08	41,89	46,08	50,68	50,68
1	12	2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	20	21	22	23	24	25	25
1	12	3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	39	40	41	42	43	44	44
1	12	4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33	24,82	25,31	25,82	26,34	26,86	26,86
1	12	5	Persentase PKK aktif	%	97,71	97,95	98,20	98,44	98,69	98,94	98,94

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	12	6	Persentase Posyandu aktif	%	99,53	99,64	99,75	99,86	99,91	99,98	99,98
1	12	7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0	50	60	70	80	90	90
1	12	8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	0	50	60	70	80	90	90
1	13		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
1	13	1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,36	1,15	1,14	1,13	1,12	1,00	1,00
1	13	2	Total Fertility Rate (TFR)		2,4	2,35	2,30	2,20	2,10	2,00	2,00
1	13	3	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,4	2,30	2,30	2,25	2,20	2,15	2,15
1	13	4	Rasio Akseptor KB		66,3	66,54	66,74	66,94	67,14	67,34	67,34
1	13	5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		66,3	66,54	66,74	66,94	67,14	67,34	67,34
1	13	6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		26	22	20	18	16	14	14

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	13	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	50.7	**48.17**	**45.76**	**43.47**	**41.30**	**39.23**	**39.23**
1	13	8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,14	13,97	13,80	13,63	13,43	13,29	13,29
1	13	9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,05	24,29	25,35	26,47	27,59	28,71	28,71
1	13	10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	10,99	12,65	14,31	15,97	17,63	19,29	19,29
1	13	11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	60,0	62,0	63,6	65,2	66,80	68,40	68,40
1	13	12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	58,0
1	13	13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	44,0	46,5	49,0	51,5	54,0	56,50	56,50
1	13	14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	55	56	57	58	59	60	60

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	13	15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	15	17	19	21	23	25	25
1	13	16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,26	100	100	100	100	100	100
1	13	17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	65,71	66,71	67,21	67,71	68,21	68,71	68,71
1	13	18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	13	19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100
1	13	20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	71	**73.13**	**75.32**	**77.58**	**79.91**	**82.31**	**82.31**
1	13	21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,03	1,50	2,00	2,50	2,50	3,0	3,0
			PERHUBUNGAN								
1	14		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	13.322.856	15.539.779	16.782.962	18.125.599	19.575.646	21.141.698	
1	14	1	Rasio ijin trayek		0,20	0,30	0,50	0,70	0,90	1,10	1,10
1	14	2	Persentase layanan angkutan darat	%	97	97,5	97,5	97,5	98	98	98

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	14	3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	281	319	325	331	337	343	343
1	14	4	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	135.665	909.039	909.039	909.039	909.039	909.039	4.545.195
1	14	5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		108	108	108	108	108	108	108
1	14	6	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		14.239.542	15.663.496	17.229.846	18.952.830	20.848.811	22.932.925	95.627.908
1	15		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	15	1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	42.04	42.2502	42.461451	42.673758	42.887127	43.10156	43.10
1	15	2	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	26.89	27.02445	27.159572	27.29537	27.431847	27.56901	27.57
1	16		**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
1	16	1	Persentase koperasi aktif	%	59,08	70,00	75,00	80,00	90,00	100	100
1	16	2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	94,29	96,00	97,00	98,00	99,00	100	100
1	17		**PENANAMAN MODAL**								
1	17	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	689	774	821	870	922	977	4364

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	17	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun (Rp)	11,47	13,02	13,87	14,77	15,73	16,75	74,14
1	17	3	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Proyek	16	12	13	13	14	15	15
1	17	4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-41	15	15	15	15	15	15
1	18		**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
1	18	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	8,31	9,06	9,81	10,58	11,31	12,06	12,06
1	18	2	Persentase wirausaha muda	%	10,89	14,60	18,31	22,02	25,74	29,45	29,45
1	18	3	Cakupan pembinaan olahraga	%	32	32	34	36	38	40	40
1	18	4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	12,13	14,75	17,36	19,98	22,60	25,22	25,22
1	18	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	7,54	8,22	8,90	9,58	10,26	10,95	10,95
1	18	6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	81	93	105	117	129	141	141
1	18	7	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	16	16	17	17	18	20	20
1	19		**STATISTIK**								

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	19	1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	19	2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	19	3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1	20		**PERSANDIAN**								
1	20	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
1	21		**KEBUDAYAAN**								
1	21	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	22	81	85	84	86	84	420
1	21	2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3	4	5	5	7	8	29
1	21	3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	6	22	23	24	25	26	120

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	21	4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	1	2	3	4	4	5	18
1	22		**PERPUSTAKAAN**								
1	22	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	621,306	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000	140,000
1	22	2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	571002	300,000	310,000	320,000	330,000	340,000	340,000
1	22	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0.0043	0.00000034	0.00000034	0.00000034	0.00000034	0.00000034	0.00000034
1	22	4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	111,097	54,000	56,000	57,000	58,000	59,000	59,000
1	22	5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	380,579	250,000	251,000	252,000	253,000	254,000	254,000
1	22	6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2,300	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,400
1	23		**KEARSIPAN**								
1	23	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62	20	40	60	80	100	100

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	23	2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3,700	100	200	300	400	500	500
2			**PELAYANAN URUSAN PILIHAN**								
2	1		**PARIWISATA**								
2	1	1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Wisnu	8.367.748	7.500.000	7.750.000	8.000.000	8.250.000	8.500.000	39.750.000
2	1	2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Wisman	255.747	106.584	151.763	191.773	236.491	255.747	924.358
2	1	3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	5	5	5	5	5
2	1	4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	451.750.000	653.602.725	650.000.000	660.000.000	670.000.000	680.000.000	3.313.602.725
2	2		**PERTANIAN**								
2	2	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	22.89	23.81	24.76	25.75	26.78	27.85	27.85
2	2	2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	6.01	6.37	6.75	7.16	7.59	8.04	8.04
2	2	3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	4,26	4,55	4,69	4,85	5,01	5,18	5,18

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	2	4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%	87,71	90,00	91,17	92,36	93,56	94,78	94,78
2	2	5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan)	%	83,77	85,97	87,09	88,22	89,37	90,5	90,5
2	2	6	Produksi sub sektor Peternakan (Daging)	Kg	125,673,776	138,164,039	139,478,730	140,872,302	142,349,489	143,915,307	215.753.406
2	2	7	Produksi sub sektor Peternakan (Telur)	Kg	140.439.879	135,100,498	141,855,523	148,948,299	156,395,714	164,215,500	164,215,500
2	2	8	Produksi sub sektor Peternakan (Susu)	Kg	3.052.800	3.240.432	3.370.049	3.504.851	3.645.045	3.790.847	3.790.847
2	2	9	Konsumsi Hasil Peternakan (Daging)	Kg/ Kapita/ Tahun	4,86	5,10	5,36	5,63	5,91	6,20	6,20
2	2	10	Konsumsi Hasil Peternakan (Telur)	Kg/ Kapita/ Tahun	5,65	5,93	6,23	6,54	6,87	7,21	7,21
2	2	11	Konsumsi Hasil Peternakan (Susu)	Kg/ Kapita/ Tahun	2,56	2,61	2,66	2,72	2,77	2,83	2,83

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	2	12	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	4.198.428	4.884.118	5.224.541	5.610.635	6.049.947	6.552.093	6.552.093
2	2	13	Pertumbuhan PDRB	(%)	6,09	6,58	6,97	7,39	7,83	8,30	8,30
2	2	14	Sumbangan PDRB Sektor Peternakan	(%)	1,09	1,18	1,21	1,23	1,25	1,28	1,28
2	2	15	Cakupan Bina Kelompok Peternak	Kelompok	1.159	1.216	1.238	1.262	1.293	1.315	1.315
2	2	16	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Asal Hewan	Sampel	450	200	200	200	200	200	200
2	2	17	Nilat Tukar Peternak (NTP.Pt)		108,46	110,04	110,11	110,19	110,27	110,35	110,35
2	3		**KEHUTANAN**								
2	3	1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	48,48	48,81	49,19	49,59	50,03	50,50	50,50
2	3	2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,00092	0,01948	0,01851	0,01758	0,01670	0,01587	0,01587

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	3	3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Luas Kawasan Lindung/ Total Kawasan Hutan	76,45	76,45	76,45	76,45	76,45	76,45	76,45
2	4		**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								
2	4	1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,54	98	99	100	100	100	100
2	4	2	Rasio ketersediaan daya listrik		87,55	88,75	89,21	89,66	90,11	90,56	90,56
2	4	3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	14,22	20	25	33	50	100	100
2	4	4	Cadangan Sumber Daya	Ton	357.500.000	2.400.000	4.000.000	25.200.000	33.300.000	20.000.000	84.900.000
2	4	5	Luas Wilayah Pemetaan	Ha	6	9.2	8.5	7.5	8.173	7.2	40;573
2	5		**PERDAGANGAN**								
2	5	1	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US$	57.950.717	63.745.788	70.120.367	77.132.404	84.845.644	93.330.209	6.852.079.702
2	5	2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,74	0,89	0,98	1,08	1,19	1,31	5,45
2	6		**PERINDUSTRIAN**								

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	6	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,38	2,5	2,8	3,2	3,5	4	4
2	7		**TRANSMIGRASI**								
2	7	1	Persentase transmigran swakarsa	%	75,86	100	100	100	100	100	100
2	8		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
2	8	1	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	20,02	20,32	21,82	23,32	24,182	26,32	26,32
2	8	2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,37	49,10	50,60	52,10	53,60	55,10	55,10
2	8	3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,22	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,34
2	8	4	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terha dap PDRB Sulawesi Selatan	%	8,3	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3	9,3
2	8	5	Nilai PDRB Perikanan	Trilyun Rp	34,90	36,31	37,04	37,78	38,5	39,3	39,3
2	8	6	Produksi Kelautan dan Perikanan	%	4.261.427	4.920.204	5.614.824,50	6.413.160,63	7.330.831,50	8.385.710,02	32.664.730,65

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	8	7	Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan	Trilyun Rp	15,59	18,86	20,75	22,83	25,11	27,62	27,2
2	8	8	Nilai hasil pengolahan produksi perikanan	Trilyun Rp	6,24	7,54	8,30	9,13	10,04	11,05	11,05
2	8	9	Jumlah Produksi PerikananTangkap	Ton	357.77	366.356	370.649	374.942	379.253	383.528	1.874.728
2	8	10	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Trilyun Rp	6,4	7,74	8,52	9,37	10,31	11,34	11,34
2	8	11	Cakupan bina kelompok nelayan	%	24,94	30,18	33,2	36,51	40,17	44,18	44,18
2	8	12	Nilai Tukar Nelayan	%	107,57	107,79	107,89	108	108,11	108,22	108,22
2	8	13	Jumlah Produksi PerikananBudidaya	Ton	3.901.657	4.609.988	5.301.486,20	6.096.709,13	7.011.215,50	8.062.897,82	31.082.297
2	8	14	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Trilyun Rp	9,19	11,12	12,23	13,46	14,8	16,28	16,28
2	8	15	Nilai Tukar Pembudidaya	%	97,96	103,89	104,93	105,97	107,03	108,1	108,1
2	8	16	Cakupan bina UPR dan Panti Benih	%	-	17,39	18,84	18,84	14,49	13,04	13,04

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	8	17	Cakupan Pelabuhan perikanan yang beroperasional	%	-	52,17	65,22	78,26	86,96	100	100
2	8	18	Jumlah produksi hasil tangkapan yang dibongkardi Pelabuhan Perikanan	Ton	-	17.898	18.076	18.254	18.433	18.611	261.272
2	8	19	Nilai produksi hasil tangkapan yang dibongkardi Pelabuhan Perikanan	Milyar Rupiah	-	222,8	243,8	264,8	285,8	306,8	1.324
2	8	20	Jumlah kapal yang didaratkan dan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan	Unit	-	15.87	16.029	16.186	16.345	16.503	80.933
2	8	21	Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	Ton	242,150.00	293.001,5	322.301,7	354.531,8	389.985	428.983,5	1.788.803,5
2	8	22	Konsumsi Ikan	Kg/Kap	52,5	53,6	54,1	54,6	55,2	55,7	273,2
2	8	23	Volume Ekspor produk Kelompok Perikanan	Ton	123.435,9	181.439,50	199.583,45	219.541,80	241.495,97	265.645,57	1.107.706,29
2	8	24	Nilai Ekspor Produk Kelompok Perikanan	US$	210.317,60	388.769,70	427.646,67	470.411,34	517.452,47	569.197,72	2.373.477,9
2	8	25		Juta							

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	8	26	Nilai Tukar Pengolah	%	102	104,05	105,09	106,14	107,2	108,28	108,28
2	8	27	Rasio kawasan lindung perairan terhad ap total luas perairan tutorial	%	0	20	20	20	20	20	20
2	8	28	Cakupan Luas Kawasan Konservasi pera iran yang dikelola secara berk elanjutan	Ha	101.427	108.628	114.06	119.763	125.751	132.038	600.24
2	8	29	Cakupan kawasan pesisir rusak yang puli h kembali	%	0	20	20	20	20	20	20
2	8	30	Jumlah produksi garam rakyat	Ton	39.259,90	47.504,5	52.254,9	57.480,4	63.228,5	69.551,3	289.947,6
2	8	31	Cakupan Jumlah sarana dan prasarana y ang tersedia di wilayah pesisir dan p ulau-pulau kecil	%	27	48	60	74	90	100	100
2	8	32	Berkurangnya tindakan IUU fishing	%	13,33	9,83	8,03	6,19	4,31	2,4	2,4

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
2	8	33	Cakupan kasus illegal fishing yang dapat diproses melalui jalur hukum	%	16,67	17,34	17,69	18,04	18,41	18,77	18,77
2	8	34	Cakupan bina kelompok masyarakat terhadap pengawasan	%	62,65	70,83	75	79,17	83,33	87,5	87,5
2	8	35	Cakupan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan	%	20	20	20	20	20	20	20
3			**PENUNJANG URUSAN**								
3	1		**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**								
3	1	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
3	1	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	1	4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
3	1	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
3	1	7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100
3	2		**KEUANGAN**								
3	2	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	2	2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,78	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	2	3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	42,48	20	20	20	20	20	20

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
3	2	4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,84	10	10	10	10	10	10
3	2	5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	Belanja langsung : 34,24 Belanja Tidak Langsung : 65,64	Belanja langsung : 30,0 Belanja Tidak Langsung : 70,0	Belanja langsung : 30,0 Belanja Tidak Langsung : 70,0	Belanja langsung : 35,0 Belanja Tidak Langsung : 65,0	Belanja langsung : 35,0 Belanja Tidak Langsung : 65,0	Belanja langsung : 40,0 Belanja Tidak Langsung : 60,0	Belanja langsung : 40,0 Belanja Tidak Langsung : 60,0
3	2	6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	16,86	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	19,0
3	2	7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (Perda No. 11 Tahun 2016, 30 Desember 2016)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	3		**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
3	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/	15	20	20	20	20	20	20
3	3	2		Tahun							

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
3	3	3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	3	4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
3	3	5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	60	60	60	60	60	60	300
3	3	6	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.877	8.887	8.795	8.8	8.669	8.541	43.692
3	3	7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	17.485	16.535	15.893	15.571	14.919	14.557	77.475
3	4		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
3	4	1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	4	2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	24	100	100	100	100	100	100

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
3	4	3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	49	20	20	20	20	20	20
3	4	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	22	50	60	70	80	100	100
3	5		**PENGAWASAN**								
3	5	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	67,91	73	75	77	80	85	85
3	5	2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,08	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
3	5	3	Jumlah temuan BPK	Kasus	16	16	15	14	13	12	70
3	6		**SEKRETARIAT DEWAN**								
3	6	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
3	6	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	6	3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			ASPEK DAYA SAING DAERAH								
4			**FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI**								

NO			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
4	1		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	25,94	30,07	32,15	34,23	36,31	38,40	199,15
4	2		Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	10.498	10.932	11,159	11.386	11.613	11.841	67.636
4	3		Nilai Tukar Petani	Poin	101,71	103,59	104,70	105,82	106,93	108,05	108,05
4	4		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	14,35	16,61	17,73	18,85	19,97	21,09	21,09
4	5		Persentase Desa Berstatus Swasembada	%	266,62	271,95	277,39	282,94	288,60	300,14	300,14
4	6		Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)		33,08	44,60	51,32	58,04	64,76	71,48	71,48

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator SPM
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	**Pendidikan Menengah**						
	Persentase jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	**Pendidikan Khusus**						
	Persentase jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**KESEHATAN**						
2.1	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**						
	Persentase penduduk/	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan						
2.2	**Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi**						
	Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**PEKERJAAN UMUM**						
3.1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota**						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**PERUMAHAN RAKYAT**						
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi**						
	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi**						
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	penyediaan rumah yang layak huni						
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi						
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**SOSIAL**						
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti**						
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti**						
	Persentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti**						
	Persentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti**						
	Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	dalam panti						
6.5	Perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana provinsi						
	Persentase Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi orban bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII.4
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	**PENDIDIKAN**							
1.1	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%	57,61%	59,11%	60,61%	62,11%	63,61%	Dinas Pendidikan
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Sederajat	91,63%	88,12%	91,42%	94,46%	96,53%	98,56%	Dinas Pendidikan
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Meningkat menjadi 91,63%	88,12%	91,42%	94,46%	96,53%	98,56%	Dinas Pendidikan
1.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	81,45	84,5	87,31	89,23	91,10	Dinas Pendidikan
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	91,63 %	88,12%	91,42%	94,46%	96,53%	98,56%	Dinas Pendidikan
1.5	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	8,8 tahun	8,35	8,37	8,40	8,42	8,45	Dinas Pendidikan
1.6	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	96,1%	94,17%	94,30%	94,94%	94,53%	95%	Dinas Pendidikan
1.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	98,15%	98,29%	98,44%	98,62%	98,79%	Dinas Pendidikan
1.9	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Meningkat	SD = 50,54 SMP = 77,54 SMA = 78,79 SMK = 77,20 SLB = 54,37	SD = 53,49 SMP = 79,20 SMA = 80,48 SMK = 78,85 SLB = 55,53	SD = 55,09 SMP = 81,58 SMA = 82,89 SMK = 81,22 SLB = 57,19	SD = 57,16 SMP = 52,44 SMA = 83,77 SMK = 82,08 SLB = 59,54	SD = 6,02 SMP = 83,60 SMA = 86,29 SMK = 85,30 SLB = 63,71	Dinas Pendidikan
2	**KESEHATAN**							
2.1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95%	95%	96%	97%	99%	100%	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2.2	Persentase perempuan pernah kawin umur 14-15 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%	Dinas Kesehatan
2.3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	93,5%	94%	94,5%	95%	95%	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	66,54	66,74	66,94	67,14	67,34	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.5	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	22%	21%	20,3%	18,5%	17%	Dinas Kesehatan
2.6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Menurun		32,5%	32,0%	31,5%	31,0%	Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	28%	33,0%	32,5%	32,0%	31,5%	31,0%	Dinas Kesehatan
2.8	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Menurun	8,25%	8,00%	7,75%	7,50%	7,25%	Dinas Kesehatan
2.9	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	28,0%	27,5%	27,0%	26,5%	26,0%	Dinas Kesehatan
2.1	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	75%	77%	79%	80%	85%	Dinas Kesehatan
2.11	Angka Kematian Ibu (AKI)	306 Kasus	114 Kasus	113 Kasus	112 Kasus	111 Kasus	110 Kasus	Dinas Kesehatan
2.12	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	96%	96%	97%	97%	98%	Dinas Kesehatan
2.13	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas	85%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	kesehatan							
2.14	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	1.149 Kasus	1.147 Kasus	1.145 Kasus	1.143 Kasus	1.141 Kasus	Dinas Kesehatan
2.15	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	816 Kasus	814 Kasus	812 Kasus	810 Kasus	808 Kasus	Dinas Kesehatan
2.16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurun menjadi 24	1.057 Kasus	1.055 Kasus	1.053 Kasus	1.051 Kasus	1.049 Kasus	Dinas Kesehatan
2.17	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	Dinas Kesehatan
2.18	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	202/100.000 Penduduk	207/100.000 Penduduk	212/100.000 Penduduk	217/100.000 Penduduk	222/100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
2.19	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	Dinas Kesehatan
2.2	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
2.21	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Meningkat	80%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.22	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	F=100%; K=1.200 Orang	F=100%; K=1.080 Orang	F=100%; K=1.026 Orang	F=100%; K=975 Orang	F=100%; K=930 Orang	Dinas Kesehatan
2.23	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi	14 Kab/Kota	16 Kab/Kota	18 Kab/Kota	21 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
2.24	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Meningkat menjadi 35.	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
2.25	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Menurun menjadi 5,4%	7,10%	7,08%	7,06%	7,04%	7,02%	Dinas Kesehatan
2.26	Prevalensi tekanan darah tinggi	Menurun menjadi 24,3%	19,58%	19,08%	18,58%	18,08%	17,58%	Dinas Kesehatan
2.27	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	15,4	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2.28	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	Dinas Kesehatan
2.29	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	280 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
2.3	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,94%	1,93%	1,92%	1,91%	1,90%	BNN
2.31	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	66%	66,54	66,74	66,94	67,144	67,34	Dinas Kesehatan
2.34	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,5%	24,29	25,35	26,47	27,59	28,71	Dinas kependudukan,pencatat sipil,pengendalian penduduk,dan keluarga berencana.
2.37	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	13,97	13,8	13,63	13,46	13,29	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.38	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	22	20	18	16	14	Dinas kependudukan,pencatat sipil,pengendalian penduduk,dan keluarga berencana.
2.39	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,30	2,25	2,20	2,15	2,10	Dinas kependudukan,pencatat

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
								sipil,pengendalian penduduk,dan keluarga berencana.
2.4	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	800 Jiwa	850 Jiwa	900 Jiwa	950 Jiwa	1.000 Jiwa	Dinas Kesehatan
2.41	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	minimal 95%	95%	96%	97%	99%	100%	Dinas Kesehatan
2.42	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Menurun						
2.43	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	85%	87%	90%	93%	95%	Dinas Kesehatan
2.44	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	95%	95%	95%	95.50%	95.50%	96%	Dinas Kesehatan
2.45	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan:	Meningkat						Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk		18/100.000 penduduk	19/100.000 penduduk	20/100.000 penduduk	21/100.000 penduduk	22/100.000 penduduk	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk		17/100.000 penduduk	18/100.000 penduduk	19/100.000 penduduk	20/100.000 penduduk	21/100.000 penduduk	
	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk		8/100.000 penduduk	9/100.000 penduduk	10/100.000 penduduk	11/100.000 penduduk	12/100.000 penduduk	
	Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk		12/100.000 penduduk	13/100.000 penduduk	14/100.000 penduduk	15/100.000 penduduk	16/100.000 penduduk	
	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk		137/100.000 penduduk	138/100.000 penduduk	139/100.000 penduduk	140/100.000 penduduk	141/100.000 penduduk	
	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk		60/100.000 penduduk	61/100.000 penduduk	62/100.000 penduduk	63/100.000 penduduk	64/100.000 penduduk	
	Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk		15/100.000 penduduk	16/100.000 penduduk	17/100.000 penduduk	18/100.000 penduduk	19/100.000 penduduk	

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk		16/100.000 penduduk	17/100.000 penduduk	18/100.000 penduduk	19/100.000 penduduk	20/100.000 penduduk	
	Rasio Ahli Kesmas per 100.000 Penduduk		24/100.000 penduduk	25/100.000 penduduk	26/100.000 penduduk	27/100.000 penduduk	28/100.000 penduduk	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
3.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	100%	76,82	78,86	80,91	82,95	85	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	70,92	77,44	83,96	90,48	97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkat menjadi 100%	70.92	77.44	83.96	90.48	97	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.5	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	Dinas Kesehatan
3.6	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Meningkat	1.5	1.75	2	2.25	2.5	Dinas Kesehatan
3.7	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	24	24	24	24	24	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
3.9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkat menjadi 100%	90.95	93.21	95.48	97.74	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
3.11	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (tidak ada data terkait populasi, sehingga disamakan dengan rumah tangga)	100%	88.69	90.95	93.21	95.48	97.74	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
3.12	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	409 Kab/Kota	17	19	21	23	24	Dinas perumahan,kawasan permukiman dan pertahanan
3.15	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	100	100	100	100	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
3.16	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	77	88	88	88	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
3.19	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Meningkat	80	85	95	95	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
3.21	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Ada	40	40	60	80	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
5.2	Jumlah korban meninggal terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0,00227	0,002043	0,001839	0,001655	0,001489	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.3	Jumlah korban hilang terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0,00227	0,002043	0,001839	0,001655	0,001489	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.4	Jumlah korban terluka terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0,1820	0,1638	0,1474	0,1326	0,1194	Badan Penanggulangan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
								Bencana Daerah
5.5	Jumlah korban mengungsi terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	0,2390	0,2151	0,193	0,1742	0,1568	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.6	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 daerah	15	18	20	23	24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.7	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	118,6 di 133 Kab/Kota	166	155	140	128	120	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.8	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	65 Milyar	60 Milyar	55 Milyar	50 Milyar	50 Milyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Menurun menjadi 30%	166	155	140	128	120	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.1	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Meningkat	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	6 Kab/Kota	8 Kab/Kota	10 Kab/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.11	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ada	2 Sistem	3 Sistem	4 Sistem	5 Sistem	6 Sistem	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.12	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.13	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	**SOSIAL**							
6.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Provinsi, menurut jenis kelamin dan	Menurun menjadi 7-8%	8,78%	8,52%	8,35%	8,13%	7,87%	Dinas Sosial

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	kelompok umur.							
6.2	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	71,30	71,37	71,44	71,51	71,58	Dinas Sosial
6.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17,12%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
6.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,8 juta	314.420 KPM	345.862 KPM	377.304 KPM	408.746 KPM	440.188 KPM	Dinas Sosial
6.5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	2,8 Juta	314.420 KPM	345.862 KPM	377.304 KPM	408.746 KPM	440.188 KPM	Dinas Sosial
6.6	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	151 Ribu Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
6.7	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	81,5 Ribu Jiwa	50 Jiwa	55 Jiwa	60 Jiwa	65 Jiwa	70 Jiwa	Dinas Sosial
6.9	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	16%	16%	16%	16%	16%	Dinas Sosial
6.11	Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	14,69	14,25	13,96	13,59	13,16	SPKD
6.12	Koefisien Gini.	Koefisien Gini.	0,403	0,398	0,393	0,388	0,383	RPJMD
	WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1	**TENAGA KERJA**							

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Meningkat	3,27	3,30	3,33	3,36	3,39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2	Persentase tenaga kerja formal	51%	38,33	38,67	39,00	39,33	39,65	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	1,98	1,89	1,80	1,72	1,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	41,83	41,53	41,22	40,91	40,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.5	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	18,20	18,23	18,25	18,29	18,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	7,57%	7,69%	7,81%	7,92%	8,03%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan :							
	Jenis Kelamin							
	- Laki-Laki		4,59%	4,41%	4,23%	4,06%	3,88%	
	- Perempuan		6,15%	5,91%	5,67%	5,43%	5,19%	
	Kelompok Umur							
	- 15 – 19		19,64%	19,37%	19,10%	18,81%	18,55%	
	- 20 – 24		16,29%	16,10%	15,91%	15,72%	15,55%	
	- 25 – 29		7,60%	7,29%	6,95%	6,62%	6,30%	
	- 30 – 34		3,16%	3,11%	3,04%	2,98%	2,94%	
	- 35 – 39		2,31%	2,16%	2,00%	1,83%	1,69%	
	- 40 – 44		1,85%	1,78%	1,69%	1,58%	1,48%	

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	- 45 – 49		1,88%	1,74%	1,63%	1,52%	1,40%	
	- 50 – 54		1,09%	0,98%	0,87%	0,78%	0,66%	
	- 55 – 59		1,91%	1,72%	1,57%	1,47%	1,33%	
	- 60+		0,45%	0,40%	0,35%	0,31%	0,23%	
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
2.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	bertambah sebanyak 16	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	2,96	2,94	2,92	2,90	2,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkat menjadi 70%	65	70	75	80	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	0,014	0,013	0,012	0,011	0,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah	16,6%	7%	7%	7%	7%	7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2.6	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Meningkat menjadi 21 tahun	18-20	19-20	20-23	25-28	25-28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.7	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	45,47	45,42	45,32	45,27	45,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Meningkat	38,9	40,4	41,9	43,4	44,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.9	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Menurun	4%	3%	2%	2%	2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	38,62%	2,96	2,94	2,92	2,90	2,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.11	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Menurun	28,05	28,03	28,01	27,99	27,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2.12	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Menurun	0,032	0,030	0,027	0,025	0,023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	26.3	26.3	26.3	26,3	26,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Meningkat	11.5	13.5	15.5	17.5	17.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	**PANGAN**							
3.1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	Menurun	40	35	30	25	20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.2	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	8,5%	16	14	12	10	8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.3	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	82,5	84,4	86,4	88,3	90,3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	**LINGKUNGAN HIDUP**							
4.1	Kualitas air danau	Meningkat	56%	59%	60%	65%	70%	Dinas Pengelolaan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
								Lingkungan Hidup
4.2	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat	15%	20%	25%	30%	35%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.3	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	17,65%	17,89%	18,90%	19,00%	20,%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.4	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	677,9 Ton	680 Ton	685 Ton	690 Ton	700 Ton	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.5	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 ton per hari (skala nasional)	16,20 Ton/Hari	16,35 Ton/Hari	16,50 Ton/Hari	16,60 Ton/Hari	16,9 Ton/Hari	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.6	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.7	Persentase Perubahan Emisi CO_2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%	10%	6%	6%	6%	6%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.8	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste (sampah hijau) di kawasan perkotaan metropolitan	Ada	1 Kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.9	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste (sampah hijau) di kawasan perkotaan *non metropolitan*	Ada	7 Kota	10 Kota	12 Kota	15 Kota	19 Kota	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.1	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Meningkat	5 Perusahaan	6 Perusahaan	7 Perusahaan	8 Perusahaan	9 Perusahaan	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.11	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Meningkat	3 Produk	5 Produk	6 Produk	7 Produk	8 Produk	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.12	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	Kegiatan/ Dokumen	Sosialisasi Instrumen Ekonomi Lingkungan	Naskah Akademik Jasa Lingkungan	PERDA Jasa Lingkungan	Pengawasan/Pelaksanaan Kegiatan Jasa Lingkungan	Pengawasan/ Pelaksanaan Kegiatan Jasa Lingkungan	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
4.13	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dokumen	2 (Profil Kehati & Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)	1 DED (Taman keanekaragaman hayati Pucak)	1 DED (Benteng Somba Opu)	1 DED (Taman keanekaragaman hayati Rest Area)	1 DED (Taman keanekaragaman hayati Rest Area)	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.16	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	21	21	21	21	21	Dinas SDA, cipta karya dan tata ruang
4.17	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	7	8	9	10	11	Dinas SDA, cipta karya dan tata ruang
4.19	Persentase Perubahan Emisi CO_2/Emisi Gas Rumah Kaca	Menurun menjadi mendekati 26%	10%	6%	6%	6%	6%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.2	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Meningkat/ada	7 Kota	10 Kota	12 Kota	15 Kota	19 Kota	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
5.1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,4%	73,55%	74,56%	75,65%	76,63%	77,53%	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkat	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
								Penduduk dan Keluarga Berencana
6	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
6.1	Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan	80 Kabupaten (skala nasional)	-	-	-	1 Kabupaten	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.2	Jumlah Desa Tertinggal yang Terentaskan	Meningkat	24 Desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	**PERHUBUNGAN**							
7.2	Panjang Jalur Kereta Api	Bertambah 3.258 km	59,6 Km	110 Km	110 Km	110 Km	145 Km	Dinas Perhubungan
7.3	Jumlah Dermaga Penyeberangan	275 Unit	13	13	13	13	14	Dinas Perhubungan
7.4	Jumlah Pelabuhan Strategis	24 pelabuhan (skala nasional)	18	18	18	19	19	Dinas Perhubungan
7.6	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Meningkat menjadi 32%	26,0%	27,6%	29,2%	30,8%	32,4%	Dinas Perhubungan
7.6	Jumlah Sistem Angkutan Rel yang Dikembangkan di Kota Besar	10 Kota	-	-	-	-	1	Dinas Perhubungan
8	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
8.1	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Meningkat	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
8.3	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Perkotaan=100%; Perdesaan=50%	55%	60%	65%	70%	75%	Dinas Komunikasi, Informatika,

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
								Statistik, dan Persandian
8.4	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	100% wilayah USO (universal service obligation)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
8.6	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	63%	68%	73%	78%	83%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
8.7	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	47%	52%	57%	62%	67%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
9	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
9.1	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
9.2	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
10	**PENANAMAN MODAL**							
11	**STATISTIK**							
11.5	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	7,2-7,6	7,4-7,8	7,6-8,0	7,7-8,1	7,8-8,2	RPJMD
11.6	PDB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	45-55	55-65	65-70	65-70	70-75	RPJMD
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
1	**PARIWISATA**							

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.2	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	300.000 Kunjungan	325.000 Kunjungan	350.000 Kunjungan	375.000 Kunjungan	400.000 Kunjungan	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
1.3	Jumlah kunjungan wisata nusantara	Meningkat	7.500.000 Kunjungan	7.750.000 Kunjungan	8.000.000 Kunjungan	8.250.000 Kunjungan	8.500.000 Kunjungan	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
2	**KEHUTANAN**							
2.5	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	131 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	Dinas Kehutanan
2.6	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)	12.000 Ha	12.000 Ha	12.000 Ha	12.000 Ha	12.000 Ha	Dinas Kehutanan
2.7	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	16 UPT	16 UPT	16 UPT	16 UPT	16 UPT	Dinas Kehutanan
3	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							
3.3	Konsumsi listrik per kapita	Meningkat menjadi 1.200 KWh	802,22	887,87	969,88	1.056,63	1.148,48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Meningkat	0,145	0,167	0,188	0,210	0,230	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.6	Bauran energi terbarukan	10-16%	16,52	18,59	21,28	22,99	23,66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.7	Intensitas energi primer	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	14,50	14,40	14,30	14,00	13,80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
4	**PERINDUSTRIAN**							
4.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB perkapita		3,25	3,45	3,85	4,00	4,15	Dinas perindustrian
4.2	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	4	4,35	4,75	5	5,30	Dinas perindustrian
4.3	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	43%	47%	51%	52%	54%	Dinas Perindustrian
4.4	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Meningkat	10,0%	10,3%	10,5%	10,7%	11,0%	Dinas Perindustrian
5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
5.1	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Ada	1	1	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	39.451 Nelayan	78.902 Nelayan	118.353 Nelayan	157.803 Nelayan	197.253 Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.4	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Meningkat menjadi 87%	3,86%	4,08%	4,31%	4,56%	4,85%	Dinas kelautan dan perikanan
5.5	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Meningkat	19	19	19	19	19	Dinas kelautan dan perikanan
	PENUNJANG URUSAN							
2	**KEUANGAN**							
2.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	99	96	96	97	97	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.3	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Menjadi 80%	100	100	100	100	100	Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
2.4	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota : 45%	BB	A	A	A	A	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
2.6	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Diatas 12% pertahun	0,86	0,90	0,94	0,97	1,01	Badan Pendapatan Daerah
2.7	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	36,46	35,54	34,83	33,86	33,21	Badan Pendapatan Daerah
2.11	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota : 50%	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat kategori "B":	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat kategori "BB":	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat kategori "BB":	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat kategori "A":	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sulsel mendapat kategori "AA":	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET					OPD PELAKSANA
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
			B	BB	BB	A	AA	
			Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai "B" pada akhir Renstra sebanyak 3 Kab/Kota : 6	Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai "B" pada akhir Renstra sebanyak 3 Kab/Kota : 10	Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai "B" pada akhir Renstra sebanyak 3 Kab/Kota : 15	Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai "B" pada akhir Renstra sebanyak 3 Kab/Kota : 20	Jumlah Kab/Kota yang mendapat nilai "B" pada akhir Renstra sebanyak 3 Kab/Kota : 24	

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Gubenur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah RPJMD periode 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2023-2028).

Program-program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Provnsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.

2. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Provnsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

3. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD.

4. Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Gubernur/Wakil Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

6. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

M. NURDIN ABDULLAH.



Informasi Lebih Lanjut

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Jend. Uripsumoharjo 269 Makassar Telp (0411) 4453070 - 445305 - 320754
Fax (0411) 4453965 - 445445
Website : http://sulsel.go.id/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Jend. Uripsumoharjo 269 Makassar Telp (0411) 453486
Fax (0411) 453869
Email : Bappedass.makro@yahoo.co.id